Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023



AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 20.A/LHP/XIX.SMD/IV/2024
Tanggal : 30 April 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023
(AUDITED)

Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2023

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Laporan ini memuat:
   a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
   b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
   c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah; dan
   d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
   a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
   b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
   c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebelumnya.

DAFTAR ISI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN..... ii

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Berau bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Berau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Berau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Berau tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 20.B/LHP/XIX.SMD/IV/2024 tanggal 30 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Samarinda, 30 April 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Agus Priyono S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA., CFrA
Register Negara Akuntan No-13674

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 yang didasarkan pada kriteria:

a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Berau yang memiliki 46 Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2023;
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA):
c. Laporan Operasional (LO):
d. Laporan Arus Kas (LAK);
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2023;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 60 hari yang terdiri dari:

a. Pemeriksaan interim dilakukan 30 hari mulai tanggal 29 Januari s.d. 27 Februari 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 19/ST/XIX.SMD/01/2024 tanggal 25 Januari 2024; dan

b. Pemeriksaan terinci dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 7 Maret s.d. 5 April 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 56/ST/VIII/03/2024 tanggal 5 Maret 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BERAU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjung Redeb, 30 April 2024

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6 = (5 / 4) * 100	7
4	**PENDAPATAN**	**5.1.1**	**4.377.445.743.906,00**	**4.700.904.175.374,78**	**107,39**	**3.169.396.847.335,90**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.1.1**	**259.170.865.751,00**	**286.669.630.661,78**	**110,61**	**299.529.844.588,90**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	90.000.000.000,00	93.382.456.473,00	103,76	101.978.007.723,50
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	11.465.689.150,00	14.933.984.444,00	130,25	10.477.919.521,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	17.619.185.180,00	16.119.182.280,09	91,49	19.370.432.054,45
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	140.085.991.421,00	162.234.007.464,69	115,81	167.703.485.289,95
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**259.170.865.751,00**	**286.669.630.661,78**	**110,61**	**299.529.844.588,90**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**	**4.065.914.334.955,00**	**4.406.411.710.669,00**	**108,37**	**2.869.867.002.747,00**
4.2.01.01	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.1.1.2.1**	**3.233.006.863.800,00**	**3.579.099.939.714,00**	**110,70**	**2.350.774.212.350,00**
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	2.476.224.886.800,00	2.846.123.582.480,00	114,94	1.659.023.908.668,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	566.612.593.000,00	565.773.403.521,00	99,85	545.240.741.789,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	61.943.730.000,00	52.763.540.954,00	85,18	48.847.810.234,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	128.225.654.000,00	114.439.412.759,00	89,25	97.661.751.659,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**3.233.006.863.800,00**	**3.579.099.939.714,00**	**110,70**	**2.350.774.212.350,00**
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**5.1.1.2.2**	**93.677.389.000,00**	**93.677.389.000,00**	**100,00**	**87.834.603.000,00**
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	5.1.1.2.2.4	93.677.389.000,00	93.677.389.000,00	100,00	87.834.603.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		**93.677.389.000,00**	**93.677.389.000,00**	**100,00**	**87.834.603.000,00**
4.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**5.1.1.2.3**	**739.230.082.155,00**	**733.634.381.955,00**	**99,24**	**431.258.187.397,00**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	514.717.582.155,00	509.121.881.955,00	98,91	336.097.187.397,00
4.2.02.02	Bantuan keuangan	5.1.1.2.3.2	224.512.500.000,00	224.512.500.000,00	100,00	95.161.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**739.230.082.155,00**	**733.634.381.955,00**	**99,24**	**431.258.187.397,00**
	Total Pendapatan Transfer		**4.065.914.334.955,00**	**4.406.411.710.669,00**	**108,37**	**2.869.867.002.747,00**
4.3	**LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.1.3**	**52.360.543.200,00**	**7.822.834.044,00**	**14,94**	**0,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah		45.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya		7.360.543.200,00	7.822.834.044,00	106,28	0,00
	Jumlah Lain - Lain Pendapatan daerah yang sah		**52.360.543.200,00**	**7.822.834.044,00**	**14,94**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN		**4.377.445.743.906,00**	**4.700.904.175.374,78**	**107,39**	**3.169.396.847.335,90**
5	**BELANJA**	**5.1.2**	**5.177.879.482.000,00**	**4.608.120.868.464,26**	**89,00**	**2.906.895.452.391,91**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**2.136.652.416.585,00**	**1.818.795.262.619,26**	**85,12**	**1.574.647.666.072,91**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	950.561.904.928,00	812.677.295.576,65	85,49	788.533.936.225,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	993.395.407.456,00	834.570.312.408,61	84,01	698.410.047.416,22
5.1.03	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	183.280.304.201,00	163.011.244.933,00	88,94	80.981.838.137,07
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	9.414.800.000,00	8.536.409.701,00	90,67	6.721.844.294,00
	Jumlah Belanja operasi		**2.136.652.416.585,00**	**1.818.795.262.619,26**	**85,12**	**1.574.647.666.072,91**
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**2.583.507.416.051,00**	**2.345.617.541.442,00**	**90,79**	**1.028.531.224.206,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	17.447.199.000,00	7.825.488.693,00	44,85	192.821.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	187.524.561.369,00	172.966.458.500,00	92,24	119.216.483.894,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	359.913.853.309,00	307.876.754.279,00	85,54	155.604.600.350,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	2.009.310.327.282,00	1.848.412.488.655,00	91,99	749.802.632.312,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	9.311.475.091,00	8.536.351.315,00	91,68	3.714.686.650,00
	Jumlah Belanja Modal		**2.583.507.416.051,00**	**2.345.617.541.442,00**	**90,79**	**1.028.531.224.206,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**15.522.260.364,00**	**1.826.837.315,00**	**11,77**	**2.795.846.813,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	15.522.260.364,00	1.826.837.315,00	11,77	2.795.846.813,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		**15.522.260.364,00**	**1.826.837.315,00**	**11,77**	**2.795.846.813,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**	**442.197.389.000,00**	**441.881.227.088,00**	**99,93**	**300.920.715.300,00**
5.4.01.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1	9.600.000.000,00	9.540.281.000,00	99,38	9.376.212.300,00
5.4.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.2	432.597.389.000,00	432.340.946.088,00	99,94	291.544.503.000,00

Kode Rekening	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6 = (5 / 4) * 100	7
5.4.01.03	Belanja Bantuan Keuangan Daearh Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Transfer		**442.197.389.000,00**	**441.881.227.088,00**	**99,93**	**300.920.715.300,00**
	JUMLAH BELANJA		**5.177.879.482.000,00**	**4.608.120.868.464,26**	**89,00**	**2.906.895.452.391,91**
	SURPLUS/DEFISIT	**5.1.3**	**(800.433.738.094,00)**	**92.783.306.910,52**	**(11,59)**	**262.501.394.943,99**
6	**PEMBIAYAAN**	**5.1.4**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.1**	**802.433.738.094,00**	**802.427.865.251,52**	**100,00**	**539.932.343.149,53**
6.1.01	Penggunaan SILPA	5.1.4.1	802.433.738.094,00	802.427.865.251,52	100,00	539.932.343.149,53
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**802.433.738.094,00**	**802.427.865.251,52**	**100,00**	**539.932.343.149,53**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.2**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO		**800.433.738.094,00**	**800.427.865.251,52**	**100,00**	**539.932.343.149,53**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**5.1.5**	**0,00**	**893.211.172.162,04**	**0,00**	**802.433.738.093,52**

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	802.433.738.093,52	539.930.978.149,53
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	802.427.865.251,52	539.932.343.149,53
Sub Total		**5.872.842,00**	**(1.365.000,00)**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	893.211.172.162,04	802.433.738.093,52
Sub Total		**893.217.045.004,04**	**802.432.373.093,52**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(5.872.842,00)	1.365.000,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**893.211.172.162,04**	**802.433.738.093,52**

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

NERACA

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
ASET	**5.3.1**		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1		
Kas di Kas Daerah		821.259.740.624,13	676.574.033.624,96
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	1.200,00
Kas di Bendahara Penerimaan		65.356.000,00	68.930.500,00
Kas di BLUD		67.648.687.298,19	123.594.394.739,98
Kas Dana BOS		1.226.486.066,16	1.517.956.038,20
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		1.651.431.753,56	672.602.218,43
Kas Lainnya		1.396.754.055,00	21.228.897,95
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.2.a	44.170.326.364,91	40.497.502.727,59
Piutang Retribusi	5.3.1.1.2.b	3.940.339.164,00	5.293.090.261,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.c	55.372.169,00	55.372.169,00
Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.d	27.697.212.757,15	25.397.736.412,31
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.e	61.090.578.845,00	67.562.985.000,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.f	47.413.035.540,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(47.759.899.075,95)	(46.759.997.323,46)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	286.547.977,50	139.238.431,32
Persediaan	5.3.1.1.5	181.571.905.861,09	104.785.408.018,03
Jumlah Aset Lancar		**1.211.713.875.399,74**	**999.420.482.915,31**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**		
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Investasi Kepada BUMN		0,00	0,00
Investasi Kepada BUMD		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
		0,00	
Jumlah Investasi Non Permanen	**5.3.1.2.2**	**0,00**	**0,00**
Investasi Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2	618.232.967.990,13	612.840.345.860,79
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		**618.232.967.990,13**	**612.840.345.860,79**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**618.232.967.990,13**	**612.840.345.860,79**
ASET TETAP	**5.3.1.3**		
Tanah	5.3.1.3.1	1.069.237.842.504,83	1.058.655.114.710,83
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.109.298.981.825,43	931.458.524.421,82
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.128.863.132.087,38	2.014.725.162.495,07
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	9.093.051.129.603,83	7.368.157.044.197,75
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	87.661.682.797,00	80.709.039.565,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	323.829.393.153,36	85.453.760.261,36
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(4.839.896.416.400,87)	(4.191.264.155.277,63)
Jumlah Aset Tetap		**8.972.045.745.570,96**	**7.347.894.490.374,20**
PROPERTI INVESTASI	**5.3.1.4**		
Properti Investasi	5.3.1.4.1	369.649.076.785,00	369.649.076.785,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.2	(86.067.581.887,00)	(84.439.485.503,00)
Jumlah Properti Investasi		**283.581.494.898,00**	**285.209.591.282,00**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		**0,00**	**0,00**

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
ASET LAINNYA	**5.3.1.5**		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1		
Tagihan Penjualan Angsuran		666.136.618,00	1.096.569.599,00
Tuntutan Ganti Rugi		274.217.630,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	41.569.394.795,00	18.435.073.335,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	1.952.448.057.982,00	1.392.445.186.656,98
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(23.947.064.152,72)	(7.874.128.352,55)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(213.193.323.774,33)	(211.631.267.269,33)
Jumlah Aset Lainnya		1.757.817.419.097,95	1.192.471.433.969,10
JUMLAH ASET		**12.843.391.502.956,78**	**10.437.836.344.401,40**
KEWAJIBAN	**5.3.2**		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2**		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	35.836.120,00	13.961.611,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.2	1.447.515,00	1.447.515,00
Utang Belanja	5.3.2.3	8.911.589.717,91	3.126.593.537,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.4	1.105.288.003,37	14.395.872.347,53
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**10.054.161.356,28**	**17.537.875.010,53**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.5		
Utang Kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		**10.054.161.356,28**	**17.537.875.010,53**
EKUITAS	**5.3.3**		
EKUITAS	5.3.3	12.833.337.341.600,50	10.420.298.469.390,87
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**12.843.391.502.956,78**	**10.437.836.344.401,40**

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN OPERASIONAL
(LO)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAHAN KAB. BERAU

LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	REFF CALK	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4**				
7	**PENDAPATAN**	**5.4.1**				
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.4.1.1**				
7.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	93.535.186.343,00	103.415.718.954,50	(9.880.532.611,50)	(9,55)
7.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	14.879.768.897,00	10.539.679.023,00	4.340.089.874,00	41,18
7.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	19.765.364.436,57	23.544.776.552,39	(3.779.412.115,82)	(16,05)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	164.067.816.418,33	102.953.862.073,22	61.113.954.345,11	59,36
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**292.248.136.094,90**	**240.454.036.603,11**	**51.794.099.491,79**	**21,54**
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.4.1.2**				
7.2.01	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.4.1.2.1**				
7.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil		3.402.537.199.000,00	2.557.604.185.148,00	844.933.013.852,00	33,04
7.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum		565.773.403.521,00	545.240.741.789,00	20.532.661.732,00	3,77
7.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus - Fisik		52.763.540.954,00	48.847.810.234,00	3.915.730.720,00	8,02
7.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		105.085.271.816,00	89.576.831.839,00	15.508.439.977,00	17,31
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**4.126.159.415.291,00**	**3.241.269.569.010,00**	**884.889.846.281,00**	**27,30**
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**5.4.1.2.2**				
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.03	Dana Otinomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.04	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.01.05	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**5.4.1.2.3**				
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.3.1	502.649.475.800,00	371.451.696.916,00	131.197.778.884,00	35,32
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.4.1.2.3.2	224.512.500.000,00	95.161.000.000,00	129.351.500.000,00	135,93
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**727.161.975.800,00**	**466.612.696.916,00**	**260.549.278.884,00**	**55,84**
	Total Pendapatan Transfer		**4.853.321.391.091,00**	**3.707.882.265.926,00**	**1.145.439.125.165,00**	**30,89**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.4.1.3**				
7.3.01	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	8.603.171.200,00	5.757.315.000,00	2.845.856.200,00	49,43
7.3.02	Pendapatan Dana Darurat			0,00	0,00	0,00
7.3.03	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	55.235.869.584,00	0,00	55.235.869.584,00	100,00
	Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah		**63.839.040.784,00**	**5.757.315.000,00**	**58.081.725.784,00**	**1.008,83**
	JUMLAH PENDAPATAN		**5.209.408.567.969,90**	**3.954.093.617.529,11**	**1.255.314.950.440,79**	**31,75**
8	**BEBAN**	**5.4.2**				
8.1	**BEBAN OPERASI**	**5.4.2.1**				
8.1.01	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	818.796.869.375,56	789.429.230.514,62	29.367.638.860,94	3,72
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	796.699.707.092,91	695.697.781.904,34	101.001.925.188,57	14,52
8.1.03	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.04	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05	Beban Hibah	5.4.2.1.3	153.657.103.990,00	78.143.539.352,07	75.513.564.637,93	96,63
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	8.536.409.701,00	2.740.020.000,00	5.796.389.701,00	211,55
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	999.901.752,49	3.939.628.381,81	(2.939.726.629,32)	(74,62)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	656.945.015.157,40	631.902.480.023,61	25.042.535.133,79	3,96
	Beban Lain-lain	5.4.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Operasi		**2.435.635.007.069,36**	**2.201.852.680.176,45**	**233.782.326.892,91**	**10,62**
8.3	**BEBAN TRANSFER**	**5.4.2.3**				
8.3.01	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak		8.447.633.000,00	8.278.687.000,00	168.946.000,00	2,04
8.3.01.02	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		1.092.648.000,00	1.097.525.300,00	(4.877.300,00)	(0,44)
8.3.02.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
8.3.02.05.	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.3.2	338.663.557.088,00	202.709.900.000,00	135.953.657.088,00	67,07

Kode Rekening	Uraian	REFF CALK	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
8.3.02	Beban Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Transfer		**348.203.838.088,00**	**213.086.112.300,00**	**135.117.725.788,00**	**63,41**
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**5.4.2.4**				
8.2.01	Beban Tak Terduga		1.826.837.315,00	2.795.846.813,00	(969.009.498,00)	(34,66)
	Jumlah Beban Tak Terduga		**1.826.837.315,00**	**2.795.846.813,00**	**(969.009.498,00)**	**(34,66)**
	JUMLAH BEBAN	**5.4.2.5**	**2.785.665.682.472,36**	**2.417.734.639.289,45**	**367.931.043.182,91**	**15,22**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		**2.423.742.885.497,54**	**1.536.358.978.239,66**	**887.383.907.257,88**	**57,76**
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.3**				
	SURPLUS NON OPERASIONAL					
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan non Operasional Lainnya		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Surplus Non Operasional		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DEFISIT NON OPERASIONAL					
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.811.992.836,88	0,00	2.811.992.836,88	100,00
	Jumlah Defisit Non Operasional		**2.811.992.836,88**	**0,00**	**2.811.992.836,88**	**100,00**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(2.811.992.836,88)**	**0,00**	**(2.811.992.836,88)**	**100,00**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**5.4.4**	**2.420.930.892.660,66**	**1.536.358.978.239,66**	**884.571.914.421,00**	**57,58**
	POS LUAR BIASA	**5.4.5**				
8.5	**PENDAPATAN LUAR BIASA**					
	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BEBAN LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa			0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Luar Biasa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.4.6**	**2.420.930.892.660,66**	**1.536.358.978.239,66**	**884.571.914.421,00**	**57,58**

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN ARUS KAS
(LAK)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1**		
Arus Masuk Kas	**5.5.1.a**		
Penerimaan Pajak Daerah		93.382.456.473,00	101.978.007.723,50
Penerimaan Retribusi Daerah		14.933.984.444,00	10.477.919.521,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.119.182.280,09	19.370.432.054,45
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		161.955.118.611,24	167.224.432.998,95
Penerimaan Dana Bagi Hasil		2.846.123.582.480,00	1.659.023.908.668,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		565.773.403.521,00	545.240.741.789,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		52.763.540.954,00	48.847.810.234,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		105.085.271.816,00	89.576.831.839,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		93.677.389.000,00	87.834.603.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi		509.121.881.955,00	336.097.187.397,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		224.512.500.000,00	95.161.000.000,00
Penerimaan Hibah		0,00	0,00
Penerimaan Darurat		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		7.822.834.044,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**4.691.271.145.578,33**	**3.160.832.875.224,90**
Arus Keluar Kas	**5.5.1.b**		
Pembayaran Pegawai		812.677.295.576,65	788.533.936.225,62
Pembayaran Barang dan Jasa		834.570.312.408,61	698.410.047.416,22
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		153.657.103.990,00	72.896.918.317,07
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		8.536.409.701,00	6.721.844.294,00
Pembayaran Tak Terduga		1.826.837.315,00	2.795.846.813,00
Pembayaran Bagi Hasil		9.540.281.000,00	9.376.212.300,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		432.340.946.088,00	291.544.503.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**2.253.149.186.079,26**	**1.870.279.308.365,91**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**2.438.121.959.499,07**	**1.290.553.566.858,99**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**5.5.2**		
Arus Masuk Kas	**5.5.2.a**		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		302.060,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		278.586.793,45	479.052.291,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Laian yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**278.888.853,45**	**479.052.291,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.2.b**		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		7.825.488.693,00	192.821.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		172.966.458.500,00	119.216.483.894,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		307.876.754.279,00	155.604.600.350,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.848.412.488.655,00	749.802.632.312,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		8.536.351.315,00	3.714.686.650,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		2.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**2.347.617.541.442,00**	**1.028.531.224.206,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(2.347.338.652.588,55)**	**(1.028.052.171.915,00)**

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**5.5.3**		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**0,00**	**0,00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.5.4**		
Arus Masuk Kas	**5.5.4.a**		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		370.236.107.815,00	177.417.980.546,00
Koreksi Saldo Awal PKM Sambaliung		0,00	1.365.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**370.236.107.815,00**	**177.419.345.546,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.4.b**		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		370.214.233.306,00	177.415.063.424,00
Koreksi Saldo BOS		5.800.000,00	0,00
Koreksi Saldo Awal PKM Long Laai (FKTP)		72.842,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**370.220.106.148,00**	**177.415.063.424,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**16.001.667,00**	**4.282.122,00**
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**5.5.5**	**90.799.308.577,52**	**262.505.677.065,99**
Saldo Awal Kas	**5.5.6**	**802.449.147.219,52**	**539.943.470.153,53**
Saldo Akhir Kas	**5.5.7**	**893.248.455.797,04**	**802.449.147.219,52**

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
EKUITAS AWAL	5.6.1	10.420.298.469.390,87	8.892.695.087.298,67
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	2.420.930.892.660,66	1.536.358.978.239,66
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)			
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas		(7.892.020.451,03)	(8.755.596.147,46)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	12.833.337.341.600,50	10.420.298.469.390,87

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR SINGKATAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 5
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD 9
2.1 Ekonomi Makro 9
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah 16
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 17
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 25
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum .. 25
3.2. *Mandatory Spending* 37
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 40
4.1. Entitas Pelaporan 40
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 40
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 40
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 40
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 101
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN ..... .303
BAB VII PENUTUP 306

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau 9
Tabel 2.2 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Berau..... 10
Tabel 2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Berau 10
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau 11
Tabel 2.5 *Gini Ratio* Kabupaten Berau 11
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau..... 12
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau 13
Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Inflasi Nasional..... 14
Tabel 2.9 Data Informasi Terkait Penurunan *Stunting* 15
Tabel 2.10 Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023 15
Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan TA 2023 26
Tabel 3.2 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 28
Tabel 3.3 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023..... 30
Tabel 3.4 Rekap Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Tahun 2023 37
Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2023 37
Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Tahun 2023 37
Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Tahun 2023 38
Tabel 3.8 Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum 39
Tabel 3.9 Alokasi Anggaran Belanja Dana Desa Tahun 2023..... 39
Tabel 4.1 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak 57
Tabel 4.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih..... 57
Tabel 4.3 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas Perolehan 66
Tabel 4.4 Masa Manfaat Aset Tetap..... 71
Tabel 4.5 Neraca dengan Properti Investasi..... 86
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 102
Tabel 5.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 102
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 103
Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 104
Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 105

Tabel 5.6 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022 106
Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 110
Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 111
Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 117
Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022 117
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 118
Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022 118
Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 122
Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022 123
Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 124
Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022 125
Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 125
Tabel 5.18 Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 126
Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 129
Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 130
Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 131
Tabel 5.22 Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 132
Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2023 133
Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 133
Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 134
Tabel 5.26 Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 134
Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023..134
Tabel 5.28 Realisasi Transfer Antar DaerahTahun Anggaran 2023 dan 2022 135

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 135
Tabel 5.30 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022 135
Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 136
Tabel 5.32 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 136
Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 137
Tabel 5.34 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 137
Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 138
Tabel 5.36 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 138
Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 140
Tabel 5.38 Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 140
Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023..... 141
Tabel 5.40 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 142
Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OP Tahun Angggaran 2023 143
Tabel 5.42 Realisasi Belanja Pegawai Per OPDTahun Anggaran 2023 dan 2022….. 144
Tabel 5.43 Anggaran dan Realsasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023.. 146
Tabel 5.44 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022…….158
Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per OPD Tahun Anggaran 2023.. 169
Tabel 5.46 Realisasi Belanja Hibah per OPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 .. 170
Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial Tahun Anggaran 2023..... 171
Tabel 5.48 Realisasi Belanja Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 171
Tabel 5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023..... 172
Tabel 5.50 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 172
Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023…. 173
Tabel 5.52 Realisasi Belanja Modal TanahTahun Anggaran 2023 dan 2022..... 174
Tabel 5.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023..... 175

Tabel 5.54 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 180
Tabel 5.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 186
Tabel 5.56 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 187
Tabel 5.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 189
Tabel 5.58 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 190
Tabel 5.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023..... 191
Tabel 5.60 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 192
Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 194
Tabel 5.62 Rincian Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 194
Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023..... 195
Tabel 5.64 Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 196
Tabel 5.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 197
Tabel 5.66 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022198
Tabel 5.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 198
Tabel 5.68 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022… 198
Tabel 5.69 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 199
Tabel 5.70 Realisasi *Surplus/Defisit* Tahun Anggaran 2023 dan 2022 199
Tabel 5.71 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023..... 200
Tabel 5.72 Realisasi Penerimaan Pembiayaan DaerahTahun Anggaran 2023 dan 2022 200
Tabel 5.73 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 201
Tabel 5.74 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan DaerahTahun Anggaran 2023 dan 2022 201
Tabel 5.75 Rincian Neraca (Aset, Kewajiban dan Utang) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 203
Tabel 5.76 Nilai Aset Tahun Anggaran 2023 dan 2022 203
Tabel 5.77 Aset Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022 203
Tabel 5.78 Aset Lancar Tahun Anggaran 2023 dan 2022 204

Tabel 5.79 Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 204
Tabel 5.80 Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 205
Tabel 5.81 Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 207
Tabel 5.82 Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 208
Tabel 5.83 Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 208
Tabel 5.84 Rekening Kas di Bendahara BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 208
Tabel 5.85 Rekening Kas di Bendahara FKTP Tahun Anggaran 2023 dan 2022 209
Tabel 5.86 Rekening Kas di Bendahara BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022 .. 210
Tabel 5.87 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 210
Tabel 5.88 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023 210
Tabel 5.89 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 211
Tabel 5.90 Piutang Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 212
Tabel 5.91 Piutang Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 213
Tabel 5.92 Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 213
Tabel 5.93 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 214
Tabel 5.94 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.. 214
Tabel 5.95 Piutang Lainnya Menurut OPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 215
Tabel 5.96 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 215
Tabel 5.97 Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 216
Tabel 5.98 Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 dan 2022…….216
Tabel 5.99 Penyisihan Piutang Sesuai Klasifikasi Umur..... 217
Tabel 5.100 Beban Dibayar Dimuka Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 218
Tabel 5.101 Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 287
Tabel 5.102 Persediaan Per SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 287
Tabel 5.103 Investasi Jangka PanjangTahun Anggaran 2023 dan 2022..... 287
Tabel 5.104 Investasi Non PermanenTahun Anggaran 2023 dan 2022..... 223
Tabel 5.105 Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 224
Tabel 5.106 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022 227
Tabel 5.107 Rincian Mutasi Aset..... 228
Tabel 5.108 Nilai Buku Aset Tetap 234
Tabel 5.109 Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 234
Tabel 5.110 Properti Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 235
Tabel 5.111 Akumulasi Properti Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 235
Tabel 5.112 Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 235
Tabel 5.113 Tagihan Jangka Panjang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 236

Tabel 5.114 Rincian TP/TGR Tahun Anggaran 2023 dan 2022 236
Tabel 5.115 Rincian Angsuran Penjualan Rumah Dinas Per31 Desember 2023 237
Tabel 5.116 Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 dan 2022 238
Tabel 5.117 Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023 dan 2022 239
Tabel 5.118 Aset Rusak Berat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 239
Tabel 5.119 Amortisasi Per OPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 242
Tabel 5.120 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....243
Tabel 5.121 Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2023 dan 2022 244
Tabel 5.122 Kewajiban Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 245
Tabel 5.123 Kewajiban Pihak Ketiga..... 245
Tabel 5.124 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023 dan 2022 246
Tabel 5.125 Utang Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 246
Tabel 5.126 Utang Belanja (Beban Pegawai) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 247
Tabel 5.127 Utang Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 dan 2022 247
Tabel 5.128 Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 249
Tabel 5.129 Rincian Utang KDP 249
Tabel 5.130 Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 250
Tabel 5.131 Realisasi Pendapatan - LOTahun Anggaran 2023 dan 2022 250
Tabel 5.132 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 251
Tabel 5.133 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 251
Tabel 5.134 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022. 253
Tabel 5.135 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 254
Tabel 5.136 Lain – lain PAD Yang Sah - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 255
Tabel 5.137 Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 256
Tabel 5.138 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 257
Tabel 5.139 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 257
Tabel 5.140 Transfer Antar Daerah – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 258
Tabel 5.141 Bagi Hasil - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 258
Tabel 5.142 Bantuan Keuangan - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 259
Tabel 5.143 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 259
Tabel 5.144 Pendapatan Hibah - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 260
Tabel 5.145 Pendapatan Lainnya - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 260
Tabel 5.146 Beban – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 261
Tabel 5.147 Beban Operasi – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 261
Tabel 5.148 Beban Pegawai – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 262

Tabel 5.149 Barang dan Jasa - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 264
Tabel 5.150 Beban Persediaan - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 265
Tabel 5.151 Beban Jasa – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 267
Tabel 5.152 Beban Pemeliharaan - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 267
Tabel 5.153 Beban Perjalanan Dinas - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 268
Tabel 5.154 Beban Barang dan Jasa Lainnya - L Tahun Anggaran 2023 dan 2022 ..... …..268
Tabel 5.155 Beban Hibah - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 277
Tabel 5.156 Beban Bantuan Sosial - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 279
Tabel 5.157 Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 279
Tabel 5.158 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 280
Tabel 5.159 Beban Penyusutan Peralatan Mesin - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 280
Tabel 5.160 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 282
Tabel 5.161 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 283
Tabel 5.162 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 284
Tabel 5.163 Beban Penyusutan Properti Investasi - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 284
Tabel 5.164 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 285
Tabel 5.165 Beban Lain - Lain – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 286
Tabel 5.166 Beban Transfer - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 286
Tabel 5.167 Beban Bagi Hasil - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 287
Tabel 5.168 Beban Bantuan Keuangan - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 287
Tabel 5.169 Beban Tidak Terduga – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 288
Tabel 5.170 Beban Keseluruhan Per OPD - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 288
Tabel 5.171 Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2023 dan 2022 290
Tabel 5.172 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022.... 291
Tabel 5.173 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 ..... …..291
Tabel 5.174 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 292
Tabel 5.175 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 292
Tabel 5.176 Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 293

Tabel 5.177 Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 293
Tabel 5.178 Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 294
Tabel 5.179 Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 294
Tabel 5.180 Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 294
Tabel 5.181 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 295
Tabel 5.182 Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 ..... ….296
Tabel 5.183 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 296
Tabel 5.184 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 297
Tabel 5.185 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 dan 2022 298
Tabel 5.186 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 dan 2022 298
Tabel 5.187 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 dan 2022 299
Tabel 5.188 Kenaikan dan Penurunan Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 300
Tabel 5.189 Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 300
Tabel 5.190 Laporan Perubahan Ekuitas TA 2023 dan TA 2022 301
Tabel 5.191 Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar..... …301

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 30

Gambar 3.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 (dalam %)..... 31

Gambar 3.3 Pencapaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dan Tahun 2022 31

Gambar 3.4 Belanja Daerah TA 2023 32

Gambar 3.5 Belanja Daerah TA 2023 33

Gambar 3.6 Belanja Operasi TA 2023 dan 2022..... 34

Gambar 3.7 Belanja Modal TA 2023 Dan 2022..... 35

Gambar 3.8 Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022..... 36

Gambar 3.9 Belanja Transfer TA 2023 dan 2022..... 36

Gambar 5.1 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan KabupatenBerau Tahun Anggaran 2023 102

Gambar 5.2 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau TahunAnggaran 2023 dan 2022..... 103

Gambar 5.3 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli DaerahKabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 104

Gambar 5.4 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah KabupatenBerau Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 104

Gambar 5.5 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan TransferTahun Anggaran 2023..... 123

Gambar 5.6 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran2023 dan 2022 124

Gambar 5.7 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TahunAnggaran 2023 138

Gambar 5.8 Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 139

Gambar 5.9 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja OperasiTahun Anggaran 2023 140

Gambar 5.10 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 141

Gambar 5.11 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja PegawaiTahun Anggaran 2023 142

Gambar 5.12 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 143

Gambar 5.13 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 172

Gambar 5.14 Perbandingan Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 173

Gambar 5.15 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TransferTahun Anggaran 2023 196

Gambar 5.16 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 197

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Realisasi Penyaluran Dana Desa Per Desa TA 2023
Lampiran 2	Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) TA 2023
Lampiran 3	Realisasi Penyaluran Dana PKK Kampung TA 2023
Lampiran 4	Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Provinsi TA 2023
Lampiran 5	Daftar Obat / Alkes / BMHP Rusak / Kadaluarsa RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Tahun 2023
Lampiran 6	Laporan Perumdam Batiwakkal Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023
Lampiran 7	Laporan Auditor Independen PT Hutan Sanggam Berau Tahun yang berakhir 31 Desember 2023
Lampiran 8	Laporan Keuangan PT Indo Pusaka Berau Per 31 Desember 2023
Lampiran 9	Laporan Keuangan Perumda Bhakti Praja Per 31 Desember 2023
Lampiran 10	Rincian JIJ yang dimanfaatkan Perumdam Batiwakkal Tanpa Kerja Sama Pemanfaatan Tahun 2023 dan 2022
Lampiran 11	Properti Investasi SKPD dan Akumulasi Penyusutan
Lampiran 12	Rincian Masing - Masing Pos Aset Tidak Berwujud
Lampiran 13	Beban Hibah

DAFTAR SINGKATAN

A		
ADD	:	Alokasi Dana Desa
Adminduk		Administrasi Kependudukan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATK	:	Alat Tulis Kantor
B		
BAPENDA	:	Badan Pendapatan Daerah
BAPELITBANG	:	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
BARJAS	:	Barang dan Jasa
BAS	:	Bagan Akun Standar
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BKPP	:	Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan
BKS	:	Bangun, Kelola, Serah
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BMD	:	Barang Milik Daerah
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
BMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BOKB	:	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
BOKKB	:	Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana
BOP PAUD	:	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	:	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BOSNAS	:	Bantuan Operasional Sekolah Nasional
BPBD	:	Badan Penanggunalangan Bencana Daerah
BPD Kaltimtara	:	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Utara
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKAD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
C		
CaLK	:	Catatan Atas Laporan Keuangan
CHT	:	Cukai Hasil Tembakau
Covid 19	:	Corona Viruses Disease 19
D		
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAK-DBH	:	Dana Alokasi Khusus-Dana Bagi Hasil
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DED	:	Detail Engineer Design
DID	:	Dana Insentif Daerah
DISPORA	:	Dinas Pemuda dan Olahraga

DINAS PUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DISDUKCAPIL	:	Dinas Penduduk dan Catatan Sipil
DISKOMINFO	:	Dinas Komunikasi dan Informasi
DPMPK	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DP3A	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DTU	:	Dana Transfer Umum
F		
FASOS	:	Fasilitas Sosial
FASUM	:	Fasiitas Umum
FIFO	:	First In First Out
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
G		
Gn.	:	Gunung
H		
HSL	:	Harapan Lama Sekolah
I		
IMB	:	Ijin Mendirikan Bangunan
IMTA	:	Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
J		
JAMKESMAS	:	Jaminan Kesehatan Masyarakat
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
K		
Kaltimtara	:	Kalimantan Timur – Kalimantan Utara
KB	:	Keluarga Berencana
KDP	:	Kontruksi Dalam Pengerjaan
KDH	:	Kepala Daerah
Kec.	:	Kecamatan
KESBANGPOL	:	Kesatuan Bangsa dan Politik
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
Koperindag	:	Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
KORPRI	:	Korps. Pegawai Republik Indonesia
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
L		
L/C	:	*Letter Of Credit*
LAK	:	Laporan Arus Kas
Linmas	:	Perlindungan Masyarakat
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	:	Laporan Keuangann Pemerintah Daerah
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LP SAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LS	:	Langsung
N		
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak

O		
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
P		
P3D	:	Personel, Pendanaan, Sarana, Prasarana Serta Dokumen
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PARPOL	:	Partai Politik
PBB	:	Pajak Bumi Bangunan
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDH	:	Pakaian Dinas Harian
PDL	:	Pakaian Dinas Lapangan
PDU	:	Pakaian Dinas Upacara
PDRB	:	Pendapatan Domestik Regional Bruto
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Perbub	:	Peraturan Bupati
PERDA	:	Peraturan Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	:	Peraturan Presiden
PERUMDA	:	Perusahaan Umum Daerah
PERUMDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PFK	:	Pinjaman Fihak Ketiga
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PPh	:	Pajak Penghasilan
PK2UKM	:	Rekrutmen Tenaga Pendamping Peningkatan Kapasitas Kopeasi dan Usaha Mikro Kecil
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PKM	:	Puskesmas
PMD	:	Penyertaan Modal Daerah
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
POLRESTA	:	Kepolisian Resor Kota
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSH	:	Pakaian Sipil Harian
PSR	:	Pakaian Sipil Resmi
PSL	:	Pakaian Sipil Lengkap
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPPK	:	Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja
PT	:	Perseroan Terbatas
P3D	:	Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
R		
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RLS	:	Rata-Rata Lama Sekolah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
S		
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SDN	:	Sekolah Dasar Negeri
SETWAN	:	Sekretariat Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah
SiLPA	:	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran
SIM	:	Sistem Informasi Manajemen
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPT	:	Surat Keterangan Penguasaan Tanah
SKPKD	:	Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian Daerah
SKRD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanjung Jawab Mutlak
SLTP	:	Sekolah Lanjutan tingkat Pertama
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D - LS	:	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SP2D - TU	:	Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang
STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah
	:	
	:	
T		
TA	:	Tahun Anggaran
TASPEN	:	Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
TDF		*Treasury Deposit Facility*
TGR		Tuntutan Ganti Rugi
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKD	:	Transfer Ke Daerah
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPI	:	Tempat Pelelangan Ikan
TU	:	Tambah Uang
	:	
U	:	
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
W		
WKDH	:	Wakil Kepala Daerah
WP	:	Wajib Pajak

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu wajib disusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit Pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Berau sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dapat digunakan sebagai pengambil keputusan serta menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan cara:

a. Menyediakan informasi mengenai gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah.
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
g. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas sumber daya; dan
h. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, Transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas.

1.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

v. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No.75 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;

cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

dd. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 40);

ee. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

ff. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023;

gg. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023;

hh. Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau, telah dibubah sebagian dengan Peraturan Bupati No.22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau (Kebijakan Akuntansi Nomor 11 “Beban” dan Kebijakan Akuntansi Nomor 12 “Akuntansi Aset”);

ii. Peraturan Bupati Berau Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023; dan

jj. Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro
2.1.1 Tingkat Kemiskinan
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
2.1.3 Indek Gini (*Gini Ratio*)
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
2.1.6 Inflasi
2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Berau
2.1.8 Penanganan Stunting
2.1.9 Struktur Perekonomian Kabupaten Berau
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
2.2.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
2.2.3 Program Kebijakan Keuangan Daerah
2.2.4 Kebijakan Pembiayaan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum
3.1.1 Pendapatan Daerah
3.1.2 Belanja Daerah
3.1.3 Belanja Transfer

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban
4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer
4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek
4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang
4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar
4.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang
4.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap
4.4.11.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
4.4.11.4 Dana Cadangan
4.4.11.5 Aset Lainnya
4.4.12 Akuntansi Kewajiban
4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1 Pendapatan – LRA
5.1.2 Belanja Daerah
5.1.3 Transfer
5.1.4 Surplus / Defisit
5.1.5 Pembiayaan
5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
5.4.1 Pendapatan – LO
5.4.2 Beban - LO
5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
5.4.4 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
5.4.5 Surplus/Defisit – LO
5.5. Penjelasan Pos-Pos laporan Arus Kas (LAK)
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Invenstasi
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.5.5. Kenaikan / Penurunan Kas
5.5.6. Saldo Awal Kas
5.5.7. Saldo Akhir Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.6.1. Ekuitas Awal
5.6.2. Surplus / Defisit – LO
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5.6.4. Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1. Pengungkapan Lainnya atas Dampak Pandemi Covid-19
6.2. Domisili
6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
6.4. Struktur Organisasi

BAB VII Penutup

BAB II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau Tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, yaitu (minimal):

a. Tingkat Kemiskinan senilai 5,54 persen
b. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 4,95 persen
c. Gini Ratio senilai 0,327
d. Indeks Pembangunan Manusia senilai 76,71
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 3,95 persen
f. Tingkat Inflasi senilai 2,61 persen*
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) senilai Rp. 60.155.558,08 (Juta rupiah).

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu.

Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari Pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Berau (%)	5,04	5,19	5,88	5,65	5,54
2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Berau (ribu jiwa)	11,62	12,30	13,62	13,31	13,26

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
3	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur (%)	5,94	6,64	6,54	6,31	6,11
4	Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)	9,22	10,19	10,14	9,54	9,36
5	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur*	4	3	3	4	4
6	Peringkat pada tingkat Nasional*	83	85	90	93	73

Sumber : BPS Kabupaten Berau
** diurutkan dari tingkat kemiskinan yang nilainya paling rendah*

Persentase penduduk miskin Kabupaten Berau dari Tahun 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan 0,50 persen menjadi 5,54 persen. Selanjutnya angka ini diharapkan dapat berkurang pada Tahun 2024. Jika dibandingkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Berau masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Meskipun demikian, dalam perencanaan penganggaran Tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2. 2 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023**
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Berau	0,66	0,70	0,95	0,98	0,16
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	0,91	1,02	1,22	0,99	0,77
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,50	1,75	1,67	1,59	1,53
4.	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur*	4	3	3	4	4
5	Peringkat pada tingkat Nasional*	92	86	139	157	194

Sumber : BPS Kabupaten Berau
** diurutkan dari indeks kedalaman kemiskinan yang nilainya paling rendah*

***Update BPS Tgl. 30 Nopember 2023*

Tabel 2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Berau	0,12	0,17	0,20	0,22	0,01
2	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	0,21	0,24	0,29	0,23	0,14
3	Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,42	0,39	0,38
4.	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur*	4	4	3	4	1
5	Peringkat pada tingkat Nasional*	81	123	131	155	2

Sumber : BPS Kabupaten Berau
** diurutkan dari indeks keparahan kemiskinan yang nilainya paling rendah*

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka**,** terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau Tahun 2023 adalah senilai 4,95%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Berau (%)	4,95	5,08	5,82	5,02	4,95
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur (%)	5,94	6,87	6,83	5,71	5,31
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32
4	Peringkat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur*	4	4	4	4	5

Sumber : BPS Kabupaten Berau

** diurutkan dari tingkat pengangguran terbuka yang nilainya paling rendah*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 4,95 persen, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah senilai 4,95 persen atau sama dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Timur, TPT Kabupaten Berau baik pada Tahun 2019 sampai tahun 2022 memiliki angka yang lebih kecil. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Indonesia, TPT Kabupaten Berau baik Tahun 2019 maupun 2023 juga masih dibawah dibandingkan TPT Indonesia.

2.1.3. Indeks Gini *(Gini Ratio)*

Indeks Gini atau gini ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.

b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Realisasi pencapaian *gini ratio* Kabupaten Berau dapat dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 *Gini Ratio* Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	*Gini Ratio* Kabupaten Berau	0,345	0,300	0,377	0,352	0,327
2	*Gini Ratio* Provinsi Kalimantan Timur	0,330	0,328	0,334	0,327	0,322
3	*Gini Ratio* Nasional	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388

Sumber : BPS Kabupaten Berau

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Berau yang diukur melalui *gini ratio* adalah senilai 0,327. Angka ini turun jika dibandingkan dengan *gini ratio* selama 5 Tahun terakhir yakni Tahun 2019 yang senilai 0,345. Pada Tahun 2019, *gini ratio* Kabupaten Berau lebih tinggi dibandingkan gini ratio Provinsi Kalimantan Timur, namum pada Tahun 2023 Kabupaten Berau memiliki angka *gini ratio* yang lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, jika dibandingkan angka *gini ratio* nasional, Kabupaten Berau memiliki angka *gini ratio* yang lebih rendah baik pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM*)*

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak *(decent standart of living)*. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Berau Tahun 2023 adalah senilai 76,21 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau	74,88	74,71	75,20	75,74	76,71
2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur	76,61	76,24	76,88	77,44	78,20
3	Indeks Pembangunan Manusia Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39
4	Peringkat pada Tingkat Provinsi Kalimantan Timur*	4	4	4	4	7
5	Peringkat pada Tingkat Nasional*	92	94	94	92	101

Sumber : BPS Kabupaten Berau
** diurutkan dari IPM yang nilainya paling tinggi*

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Berau pada Tahun 2023 adalah senilai 76,71 poin. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2019 yang senilai 74,88. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun)

sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tujuh tahun dimasa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Pada Tahun 2023, besarnya IPM Kabupaten Berau mencapai 76,21. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Berau telah memasuki pembangunan manusia dengan status "tinggi" yang ditunjukkan oleh nilai IPM yang diatas 70. Indikator IPM ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan bahwa semakin baiknya akses masyarakat terhadap memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan yang semakin meningkat walaupun di beberapa kecamatan masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Namun hal ini tidak lantas membuat Kabupaten Berau berbangga diri, harus tetap meningkatkan pembangunan yang ada.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau

No	Uraian	Kabupaten/Kota					Provinsi	Nasional
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023*	Tahun 2023
1	PDRB atas dasar harga konstan 2010 (Miliar Rp)	28.275.572,78 miliar	27.337.086,7 miliar	28.802.649,7 miliar	29.940.780,5 miliar	29.940.780,5 miliar	137,51 triliun	3.124,9 triliun
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,63	-3,32	5,36	3,95	3,95	6,22	5,05

Sumber : BPS Kabupaten Berau

Selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan 2023, perekonomian Kabupaten Berau mengalami fluktuasi peningkatan rata-rata setiap tahunnya. Adapun besaran pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2019 sampai 2023 adalah 5,63 persen pada Tahun 2019, -3,32 persen pada Tahun 2020, 5,36 persen pada Tahun 2021, 3,95 pada Tahun 2022 dan 3,95 persen di Tahun 2023. Selama kurun waktu tersebut, besar rata-rata pertumbuhan yang terjadi setiap tahunnya adalah senilai 2,73% sedangkan untuk skala provinsi pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi 6,22% dan untuk skala nasional senilai 5,05%.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi *(Hyper Inflation),* jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah senilai 3,46 persen sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 8 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Inflasi Nasional

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Inflasi Kabupaten Berau	-	-	-	-	-
2	Inflasi Provinsi Kalimantan Timur	1,66	0,78	2,15	5,35	3,46*
3	Inflasi Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

* Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Bulan Desember Tahun ke Tahun *(year on year)-september 2023*

**Dihitung berdasarkan perubahan IHK bulan Desember tahun berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun sebelumnya

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun terakhir cukup fluktuatif menurut data BPS menunjukkan angka senilai 1,66% di Tahun 2019, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah senilai 3,37% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022 senilai 5,35%.

2.1.7. Penanganan Stunting

Penanganan Stunting Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 ditekankan memiliki komitmen kuat untuk mencegah dan menurunkan kasus stunting yang ada, ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 70 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di daerah. Data informasi terkait penurunan stunting dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Data Informasi Terkait Penurunan *Stunting*

NO	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI	OPD/PENANGGUNG JAWAB	KET
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.087.829.200,00	811.887.212,00	DINAS KESEHATAN	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	837.453.500,00	592.381.749,00	DINAS KESEHATAN	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	138.719.900,00	115.078.713,00	DINAS KESEHATAN	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	728.348.800,00	216.420.831,00	DINAS KESEHATAN	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	347.158.000,00	103.109.075,00	DINAS KESEHATAN	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	364.745.000,00	82.939.853,00	DINAS KESEHATAN	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.304.264.000,00	791.865.216,00	DINAS KESEHATAN	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	863.395.000,00	302.117.444,00	DINAS KESEHATAN	
9	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.281.743.000,00	1.144.756.894,00	DINAS KESEHATAN	
10	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.067.504.000,00	747.206.972,00	DINAS KESEHATAN	

2.1.8. Struktur Perekonomian Kabupaten Berau

Struktur perekonomian Kabupaten Berau dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021*	2022**	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	10,68	11,71	11,73	9,33	9,33
2	Pertambangan dan Penggalian	60,81	56,28	59,68	66,98	66,98
3	Industri Pengolahan	4,07	4,78	4,32	3,49	3,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
6	Konstruksi	4,06	4,16	3,74	3,36	3,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	6,53	5,72	4,99	4,99
8	Transportasi dan Pergudangan	5,78	6,14	5,41	4,47	4,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,25	1,04	0,81	0,81
10	Informasi dan Komunikasi	0,91	1,08	0,95	0,72	0,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,53	0,6	0,5	0,41	0,41

No	Uraian	2019	2020	2021*	2022**	2023**
12	Real Estat	0,89	0,99	0,83	0,62	0,62
13	Jasa Perusahaan	0,10	0,11	0,09	0,07	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	1,22	1,03	0,8	0,8
15	Jasa Pendidikan	2,5	3,03	2,77	2,22	2,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	1,25	1,37	1,1	1,1
17	Jasa Lainnya	0,70	0,79	0,71	0,57	0,57
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	35.104.693,57	35 450 848,90	43 036 483,47	60 155 558,08	60 155 558,08
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	35.104.693,57	35 450 848,90	43 036 483,47	60 155 558,08	60 155 558,08
20	PDRB Provinsi (Triliun Rupiah)	652,15	607,58	695,15	669,40	669,40

Sumber: BPS Kabupaten Berau
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Agar pencapaian pendapatan dapat terpenuhi dan senantiasa meningkat maka kebijakan di bidang pendapatan pada Tahun 2023 adalah menetapkan target pendapatan secara realistis dengan mempedomani perolehan pada tahun-tahun sebelumnya dengan senantiasa mengoptimalkan pendapatan yang sudah memiliki kepastian dasar hukum.

Untuk melaksanakan arah kebijakan pengelola pendapatan daerah, strategi dalam bidang pendapatan ditekankan pada kegiatan sebagai berikut.

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara intensifikasi pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan batas kemampuan bayar masyarakat sehingga pungutan pajak dan retribusi bukan merupakan beban tapi kewajiban yang disadari untuk kemaslahatan masyarakat Berau;

b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan intensifikasi, ekstensifikasi, potensi pajak, dan efisiensi pengelolaan perusahaan milik Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang sah;

c. Meningkatkan dana transfer Pemerintah Pusat dengan intensifikasi upaya memperoleh bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang lebih besar;

d. Meningkatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat dengan intensifikasi upaya memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar;

e. Meningkatkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dengan intensifikasi upaya memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar;

f. Melakukan kerjasama usaha (kemitraan) dengan pihak swasta untuk mengelola potensi unggulan sumber daya daerah;

g. Berupaya untuk memperoleh bantuan luar-negeri dalam bentuk Hibah (*Grant*); dan

h. Berupaya untuk tidak menerbitkan obligasi dan tidak melakukan pinjaman dalam dan luar negeri (*Loan*).

2.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belanja penyelenggara urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Untuk melaksanakan arah pengelola belanja daerah maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengalokasikan anggaran belanja untuk program-program prioritas yang mendatangkan manfaat yang besar terhadap masyarakat sesuai dengan visi, misi dan isu strategis/masalah-masalah mendesak untuk Kabupaten Berau; dan

b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk alokasi Anggaran Belanja Aparatur.

2.2.3. Program Kebijakan Keuangan Daerah

Program Kebijakan Keuangan Daerah meliputi:

a. Program Sosialisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Program Intensifikasi Peningkatan Dana Perimbangan.
c. Program Kemitraan Pemerintah Daerah-Swasta untuk Pengelolaan Potensi Unggulan Sumber Daya Daerah;
d. Program Kemitraan dan Hubungan Luar-Negeri;
e. Program Sosialisasi dan Implementasi Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Alokasi Anggaran Belanja Daerah yang Berbasis Kinerja; dan
f. Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Keuangan Daerah.

2.2.4. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2023 yang penggunaannya diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan investasi Pemerintah Daerah serta pembayaran pokok utang yang dialokasikan melalui pengeluaran pembayaran.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Struktur APBD akan optimal jika pencapaian seluruh komponen pendapatan dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja Pemerintah Daerah secara

menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat *output* dari suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap semua jenis penerimaan daerah, target pendapatan daerah Tahun 2023 senilai Rp4.377.445.743.906,00. Sumber-sumber pendanaan anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut;

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tahun 2023 target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp259.170.865.751,00.

b. Pendapatan Transfer

   Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer terdiri dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat {Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa} dan Pendapatan Transfer Antar Daerah {Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan} Target Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun 2023 senilai Rp40.65.914.334.955,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 ditargetkan senilai Rp52.360.543.200,00.

Rencana Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 senilai Rp5.177.879.482.000,00 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi

   Belanja Operasi Tahun 2023 direncanakan senilai Rp2.136.652.416.585,00 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal

   Belanja Modal Tahun 2023 direncanakan senilai Rp2.583.507.416.051,00 terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset tetap lainnya.

c. Belanja Tak Terduga

   Belanja Tak Terduga Tahun 2023 dialokasikan senilai Rp15.522.260.364,00.

d. Belanja Transfer

   Belanja Transfer Kabupaten Berau Tahun 2023 senilai Rp442.197.389.000,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Rp.9.600.000.000 dan Belanja Bantuan Keuangan Rp432.597.389.000,00.

Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Berau terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp802.433.738.094,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Pinjaman. Untuk Tahun 2023 Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00.

Pencapaian target kinerja keuangan APBD selama Tahun 2023 menurut urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Dinas Pendidikan

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kinerja keuangan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 89,88% dari anggaran Rp608.674.000.714,00 terealisasi senilai Rp547.102.048.098,00.

2) Kesehatan

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu:

a) Dinas Kesehatan

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Kinerja keuangan urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 78,85% dari anggaran Rp316.784.130.201,00 terealisasi senilai Rp249.787.874.175,00.

b) RSUD Dr. A. Rivai

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. A. Rivai. Kinerja keuangan urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 73,37% dari anggaran Rp304.770.707.859,00 terealisasi senilai Rp223.621.394.929,.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kinerja keuangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 90,95% dari anggaran Rp2.299.992.376.294,00 terealisasi senilai Rp2.091.775.582.731,00.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kinerja keuangan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan

oleh OPD tersebut mencapai 97,35%, dari anggaran Rp52.478.051.219,00 terealisasi senilai Rp51.089.943.207,00.

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu:

a) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kinerja keuangan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 93,77% dari anggaran Rp22.295.293.715,00 terealisasi senilai Rp20.906.397.885,00.

b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kinerja keuangan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 87,83% dari anggaran Rp27.431.180.898,00 atau terealisasi senilai Rp24.094.111.150,00.

6) Sosial

Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Kinerja keuangan urusan Sosial yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 89,09%, dari anggaran Rp20.646.197.878,00 terealisasi senilai Rp18.393.441.826,00.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kinerja keuangan urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 82,56%, dari anggaran Rp14.074.806.559,00 terealisasi senilai Rp11.620.861.184,00.

2) Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan yang oleh Dinas Pangan. Kinerja keuangan urusan Pangan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 88,30%, dari anggaran Rp12.629.596.334,00 terealisasi senilai Rp11.151.537.831,00.

3) Pertanahan

Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan. Kinerja keuangan urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 59,03% dari anggaran Rp27.817.199.159,00 terealisasi senilai Rp16.419.731.590,00.

4) Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kinerja keuangan urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 92,77%, dari anggaran Rp73.498.317.609,00 terealisasi senilai Rp68.187.722.480,00.

5) Administrasi Kependudukan dan Capil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kinerja keuangan urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 92,48%, dari anggaran Rp12.063.185.729,00 terealisasi senilai Rp11.155.637.480,00.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kinerja keuangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 91,02%, dari anggaran Rp18.641.108.284,00 terealisasi senilai Rp16.966.237.537,00.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kinerja keuangan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 87,37%, dari anggaran Rp20.464.334.558,00 terealisasi senilai Rp17.879.713.496,00.

8) Perhubungan

Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kinerja keuangan urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 94,68%, dari anggaran Rp81.291.885.436,00 terealisasi senilai Rp76.965.030.882,00.

9) Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Kinerja keuangan urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 81,43% dari anggaran Rp24.266.672.782,00 terealisasi senilai Rp19.760.025.140,00.

10) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Kinerja keuangan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 76,51%, dari anggaran Rp35.204.743.202,00 terealisasi senilai Rp26.934.819.711,00.

11) Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja keuangan urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 85,80%, dari anggaran Rp14.814.253.789,00 terealisasi senilai Rp12.710.574.836,00.

12) Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kinerja keuangan urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 90,84%, dari anggaran Rp58.132.834.385,00 terealisasi senilai Rp52.808.342.844,00.

13) Kebudayaan

Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kinerja keuangan urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 87,76%, dari anggaran Rp52.236.244.859,00 terealisasi senilai Rp45.842.446.759,00.

14) Perpustakaan

Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kinerja keuangan urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 94,99%, dari anggaran Rp21.453.159.036,00 terealisasi senilai Rp20.378.373.593,00.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Kinerja keuangan urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 87,93%, dari anggaran Rp33.357.585.940,00 terealisasi senilai Rp29.332.662.827,00.

2) Pertanian

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu:

a) Dinas Pertanian dan Peternakan

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan. Kinerja keuangan urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 83,32% dari anggaran Rp44.798.980.098,00 terealisasi senilai Rp37.326.807.471,00.

b) Dinas Perkebunan

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan. Kinerja keuangan urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 93,53% dari anggaran Rp18.410.447.091,00 terealisasi senilai Rp17.220.095.289,00.

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu:

a) Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Kinerja keuangan urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 86,07%, dari anggaran Rp138.821.917.083,00 terealisasi senilai Rp119.478.759.894,00.

b) Kantor Penghubung

Urusan Kantor Penghubung dilaksanakan oleh Kantor Penghubung. Kinerja keuangan urusan Kantor Penghubung yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 0,00%, dari anggaran Rp1.564.634.320,00 terealisasi senilai Rp0,00.

2) Pengawasan

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat. Kinerja Keuangan urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 85,13% dari anggaran Rp24.336.573.219,00 terealisasi senilai Rp20.717.496.190,00.

3) Perencanaan

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPLITBANG). Kinerja keuangan urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 86,20% dari anggaran Rp22.883.694.487,00 terealisasi senilai Rp19.725.383.591,00.

4) Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh beberapa OPD, yaitu:

a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kinerja keuangan urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 96,41% dari anggaran Rp489.699.021.055,00 terealisasi senilai 472.127.342.495,00.

b) Badan Pendapatan Daerah

Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Kinerja Keuangan urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 90,87% dari anggaran Rp23.524.068.663,00 terealisasi senilai Rp21.377.232.106,00.

5) Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh beberapa OPD, yaitu:

a) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Kinerja keuangan urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 84,71% dari anggaran Rp19.305.965.831,00 terealisasi senilai Rp16.354.953.636,00.

b) Sekretariat KORPRI

Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Sekretariat KORPRI. Kinerja keuangan urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 67,72%, dari anggaran Rp2.650.493.895,00 terealisasi senilai Rp1.794.985.00,00.

6) Sekretariat DPRD

Urusan Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Kinerja keuangan urusan Sekretariat DPRD yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 86,99% dari anggaran Rp86.559.986.667,00 terealisasi senilai Rp75.300.520.299,00.

7) Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan

Urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Berau. Kinerja keuangan urusan Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 93,01% dari anggaran Rp111.437.831.393,00 terealisasi senilai Rp103.647.637.808,00.

8) Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesbang, Politik dan Linmas. Kinerja keuangan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh OPD tersebut mencapai 89,95% dari anggaran Rp42.432.636.079,00 terealisasi senilai Rp38.168.142.393,00.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum pada APBD.

Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan APBD Kabupaten Berau Tahun 2023 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan daerah, penyesuaian berbagai besaran komponen APBD mendesak untuk dilakukan penyesuain sejalan dengan dinamika yang terus berkembang.

Perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun 2023 merupakan langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 serta tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan Daerah.

Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD murni Kabupaten Berau.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan target pada perubahan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Masih Adanya Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Adanya tambahan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Berau.
3. Adanya penyesuaian Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Berau.
4. Adanya Prakiraan Bertambah/berkurang pada penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Adanya Bantuan Penerimaan Dana The Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)

Adapun beberapa hal yang menyebabkan perubahan Anggaran Belanja daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 antara lain :

1. Adanya perkembangan alokasi anggaran pendapatan dari pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan besaran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Adanya keadaan dimana saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Adanya tambahan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten Berau pada perubahan APBD 2023.
5. Adanya Bantuan Penerimaan Dana The Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Berau melakukan perubahan kebijakan dalam perubahan APBD 2023 dengan rincian perubahan anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Kabupaten Berau dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **naik** senilai Rp738.445.743.906,00 atau senilai 20,29% menjadi Rp4.377.445.743.906,00 dengan rincian *Pendapatan Asli Daerah* mengalami **kenaikan** senilai Rp18.554.941.906,00 atau naik senilai 7,71% dari Rp240.615.923.845,00 di anggaran murni menjadi Rp259.170.865.751,00 dianggaran perubahan, *Pendapatan Transfer* mengalami **kenaikan** senilai Rp667.530.258.800,00 atau 19,64% dari Rp3.398.384.076.155,00 di anggaran perubahan menjadi Rp4.065.914.334.955,00 dan *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah* menjadi Rp. 52.360.543.200,00 di anggaran perubahan setelah sebelumnya tidak anggarkan pada anggran murni.

Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	PENDAPATAN DAERAH	**3.639.000.000.000,00**	**4.377.445.743.906,00**	**738.445.743.906,00**	**20,29%**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**240.615.923.845,00**	**259.170.865.751,00**	**18.554.941.906,00**	**7,71%**
	Pajak Daerah	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Restribusi Daerah	12.092.216.150,00	11.465.689.150,00	(626.527.000,00)	-5,18%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.577.997.993,00	17.619.185.180,00	(3.958.812.813,00)	-18,35%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.945.709.702,00	140.085.991.421,00	23.140.281.719,00	19,79%
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.398.384.076.155,00**	**4.065.914.334.955,00**	**667.530.258.800,00**	**19,64%**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**2.683.777.284.000,00**	**3.233.006.863.800,00**	**549.229.579.800,00**	**20,46%**
	Dana Bagi Hasil	1.926.995.307.000,00	2.476.224.886.800,00	549.229.579.800,00	**28,50%**
	Dana Alokasi Umum	566.612.593.000,00	566.612.593.000,00	0,00	**0,00%**
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	61.943.730.000,00	61.943.730.000,00	0,00	**0,00%**
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	128.225.654.000,00	128.225.654.000,00	0,00	**0,00%**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**90.744.907.000,00**	**93.677.389.000,00**	**2.932.482.000,00**	**3,23%**
	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	Dana Desa	90.744.907.000,00	93.677.389.000,00	2.932.482.000,00	**0,00%**
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**623.861.885.155,00**	**739.230.082.155,00**	**115.368.197.000,00**	**18,49%**
	Pendapatan Bagi Hasil	399.349.385.155,00	514.717.582.155,00	115.368.197.000,00	**28,89%**
	Bantuan keuangan	224.512.500.000,00	224.512.500.000,00	0,00	**0,00%**
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**52.360.543.200,00**	**52.360.543.200,00**	**0,00%**
	Pendapatan Hibah	0,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.360.543.200,00	7.360.543.200,00	0,00%

2. Belanja Kabupaten Berau dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meningkat senilai Rp1.345.128.000.000,00 dan/atau senilai 65,59% dari Rp2.050.800.000.000,00 di anggaran murni menjadi Rp3.395.928.000.000,00 di anggaran perubahan 2022 dengan rincian *Belanja Operasi* mengalami **kenaikan**

senilai Rp587.819.953.805,00 atau 45,69% dari Rp1.286.550.146.576,00,00 dianggaran murni menjadi Rp1.874.370.100.381,00 di anggaran perubahan 2022. *Belanja Modal* mengalami **kenaikan** senilai Rp707.416.201.095,00 atau senilai 147,95% dari Rp478.131.851.549,00 dianggaran murni menjadi Rp1.185.548.052.644,00 dianggaran perubahan 2023. Belanja Tidak Terduga mengalami **penurunan** senilai Rp(9.315.914.900,00) atau senilai 21,15% dari Rp44.040.092.575,00 di anggaran murni menjadi Rp34.724.177.675,00 dianggaran perubahan 2023. dan Belanja Transfer mengalami **kenaikan** senilai Rp58.207.760.000,00 atau senilai 24,46% dari Rp242.077.909.300,00 dianggaran murni menjadi Rp300.285.669.300,00 dianggaran perubahan 2023.

Tabel 3. 2 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	**3.639.000.000.000,00**	**5.177.879.482.000,00**	**1.538.879.482.000,00**	**42,29%**
BELANJA OPERASI	**1.605.032.468.986,00**	**2.136.652.416.585,00**	**531.619.947.599,00**	**33,12%**
Belanja Pegawai	766.150.220.304,00	950.561.904.928,00	184.411.684.624,00	24,07%
Belanja Barang dan Jasa	692.045.573.491,00	993.395.407.456,00	301.349.833.965,00	43,54%
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Belanja Hibah	141.104.675.191,00	183.280.304.201,00	42.175.629.010,00	29,89%
Belanja Bantuan Sosial	5.732.000.000,00	9.414.800.000,00	3.682.800.000,00	64,25%
BELANJA MODAL	**1.626.571.388.650,00**	**2.583.507.416.051,00**	**956.936.027.401,00**	**58,83%**
Belanja Modal Tanah	0,00	17.447.199.000,00	17.447.199.000,00	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.643.481.158,00	187.524.561.369,00	122.881.080.211,00	190,09%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.764.157.732,00	359.913.853.309,00	125.149.695.577,00	53,31%

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.323.194.421.360,00	2.009.310.327.282,00	686.115.905.922,00	51,85%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.969.328.400,00	9.311.475.091,00	5.342.146.691,00	134,59%
BELANJA TIDAK TERDUGA	**20.831.235.364,00**	**15.522.260.364,00**	**(5.308.975.000,00)**	**-25,49%**
Belanja Tidak Terduga	20.831.235.364,00	15.522.260.364,00	(5.308.975.000,00)	-25,49%
BELANJA TRANSFER	**386.564.907.000,00**	**442.197.389.000,00**	**55.632.482.000,00**	**14,39%**
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00	0,00	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi	376.964.907.000,00	432.597.389.000,00	55.632.482.000,00	14,76%
Belanja Bantuan Keuangan Daearh Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	0,00	0,00	0,00	0,00%
SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	**(800.433.738.094,00)**	**(800.433.738.094,00)**	**0,00**

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dianggarkan dan dicatat secara defenitif berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 sesuai dengan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2022 senilai Rp802.433.738.093,52 mengalami **kenaikan** senilai Rp802.433.738.093,52 atau senilai 100,00% dari sebelumnya Rp0,00 pada anggaran murni.

   Selisih lebih atas proyeksi SILPA tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang harus dijadwalkan kembali untuk dipergunakan melaksanakan yang bersipat spesifik grant, bersifat wajib dan mengikat seperti Program kegiatan yang bersumber dari dana Jaminan Kesehatan (JKN) dana BOSNAS, dana BLUD RSUD A.Rivai yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan, DAK DBH DR, DAK Non Fisik, serta Penegeluaran Pembiayaan.

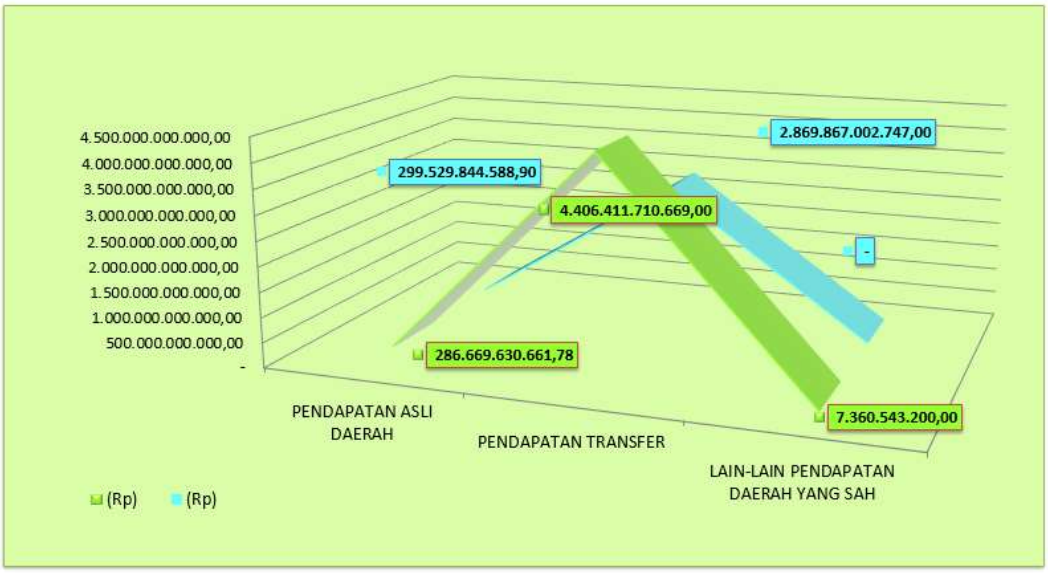
Tabel 3.3 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**0,00**	**802.433.738.094,00**	**802.433.738.094,00**	**0%**
	Penggunaan SILPA		802.433.738.094,00	802.433.738.094,00	0%
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0%**
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0%
	PEMBIAYAAN NETTO		**800.433.738.094,00**	**800.433.738.094,00**	**0%**

3.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 Rp4.377.445.743.906,00 terealisasi sejumlah Rp4.700.904.175.374,78 atau 107,39% dari target, mengalami **kenaikan** sejumlah Rp1.531.507.328.038,88 atau 48,32% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp3.169.396.847.335,90.

Realisasi Pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi PAD senilai Rp286.669.630.661,78, Pendapatan Transfer senilai Rp4.406.411.710.669,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp7.822.834.044,00 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dan 2022

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp259.170.865.751,00 terealisasi senilai Rp286.669.630.661,78 atau 110,61%. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2022 senilai Rp299.529.844.588.90, maka realisasi PAD mengalami penurunan senilai Rp12.860.213.927,12 atau 4,29%.

Rincian penyumbang PAD terdiri dari Pajak Daerah senilai Rp93.382.456.473,00; Retribusi Daerah Rp14.933.984.444,00; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp16.119.182.280,09 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp162.234.007.464,69 sebagaimana gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 (dalam %)

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Berau selama Tahun 2023 dan perbandingannya dengan Tahun 2022 ditunjukkan dalam Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Pencapaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dan 2022

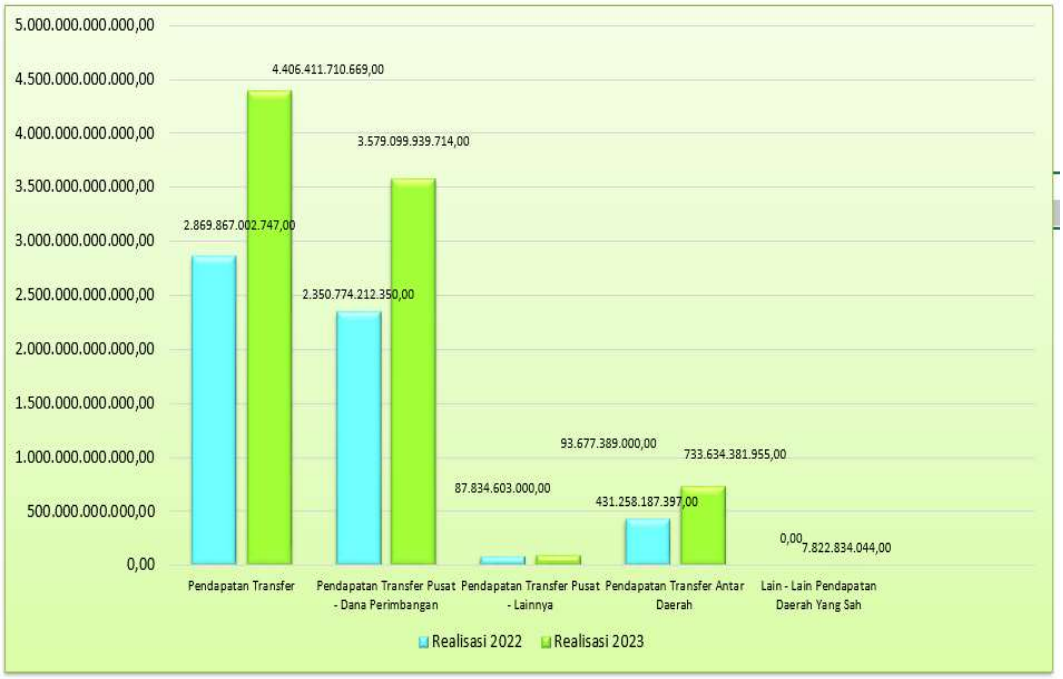
Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2023 maupun 2022 sumber utama PAD adalah dari Lain–Lain PAD yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp286.669.630.661,78 atau 110,61% mengalami **penurunan** senilai Rp12.860.213.927,12 atau 4,29% dibandingkan pada Tahun 2022 senilai Rp299.529.844.588,90. Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp90.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp93.382.456.473,00 atau 103,76%.

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 terealisasi Rp14.933.984.444,00 atau senilai 130,25% dari target senilai Rp11.465.689.150,00 atau mengalami **kenaikan** senilai Rp4.456.064.923,00 atau 42,53% dibandingkan TA 2022 senilai Rp10.477.919.521,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp16.119.182.280,09 atau 91,49% dari target senilai Rp17.619.185.180,00 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2022 mengalami **peneurunan** senilai Rp3.251.249.774,36 sedangkan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp162.234.007.464,69 atau senilai 116,14% mengalami **penurunan** senilai Rp5.469.477.825,26 atau 3,26% dibandingkan pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp167.703.485.289,95.

Tahun Anggaran 2023, target Pendapatan Transfer senilai Rp4.065.914.334.955,00 dengan realisasi senilai Rp4.406.411.710.669,00 atau 108,37% dan Tahun 2022 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp52.360.543.200,00. Pendapatan Transfer Kabupaten Berau terdiri dari; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dengan realisasi Rp3.579.099.939.714,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan realisasi senilai Rp93.677.389.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan realisasi senilai Rp733.634.381.955,00. Sedangkan untuk Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari; Pendapatan Hibah Rp0,00, Pendapatan Dana Darurat Rp0,00 dan Pendapatan Lainnya Rp7.360.543.200,00.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Transfer dari Pemerintah Pusat selama Tahun Anggaran 2023 dan perbandingannya dengan Tahun 2022 ditunjukkan dalam gambar 3.4 berikut.



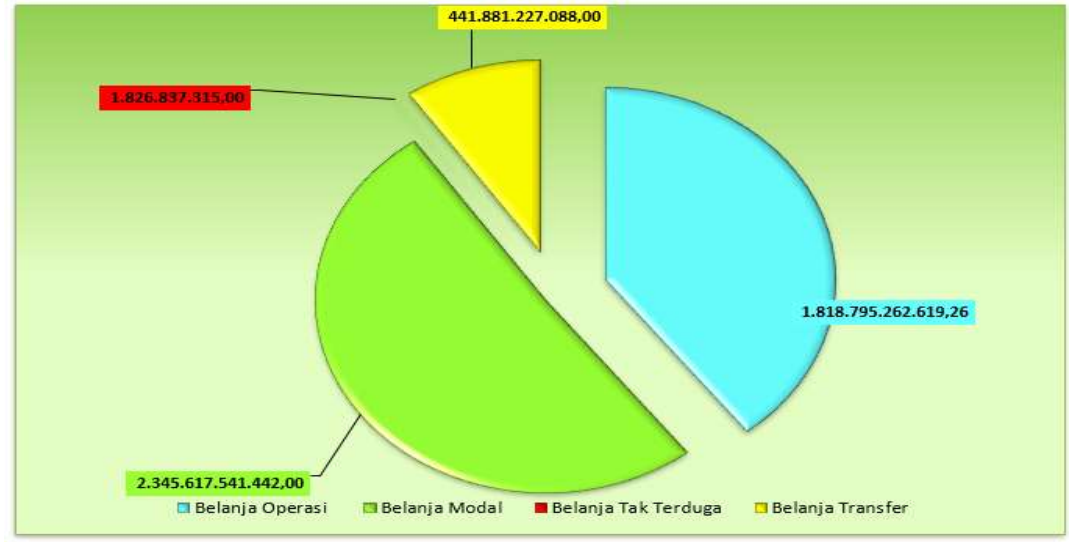
Gambar 3.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dan 2022

Grafik diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.579.099.939.714,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.350.774.212.350,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.228.325.727.364,00 atau 52,25%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya senilai Rp93.677.389.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp87.834.603.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.842.786.000,00 atau 6,55%. Dan untuk realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 senilai Rp733.634.381.955,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 Rp431.258.187.397,00 mengalami kenaikan senilai Rp302.376.194.558,00 atau 70,11%.

Realisasi Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 Rp7.822.834.044,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp00,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.822.834.044,00 atau 100,00%

3.1.2. Belanja Daerah

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.5 dibawah ini, target anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp5.177.879.482.000,00 realisasinya mencapai 89,00% atau senilai Rp4.608.120.868.464,26. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Modal senilai Rp2.345.617.541.442,00 atau 90,79% dari target, sedangkan Belanja Operasi senilai Rp1.818.795.262.619,26 atau 85,12% dari target, Belanja Tidak Terduga senilai Rp1.826.837.315,00 atau 11,77% dari target, Realisasi Belanja Transfer senilai Rp441.881.227.088,00 atau 99,93%.



Gambar 3.5 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

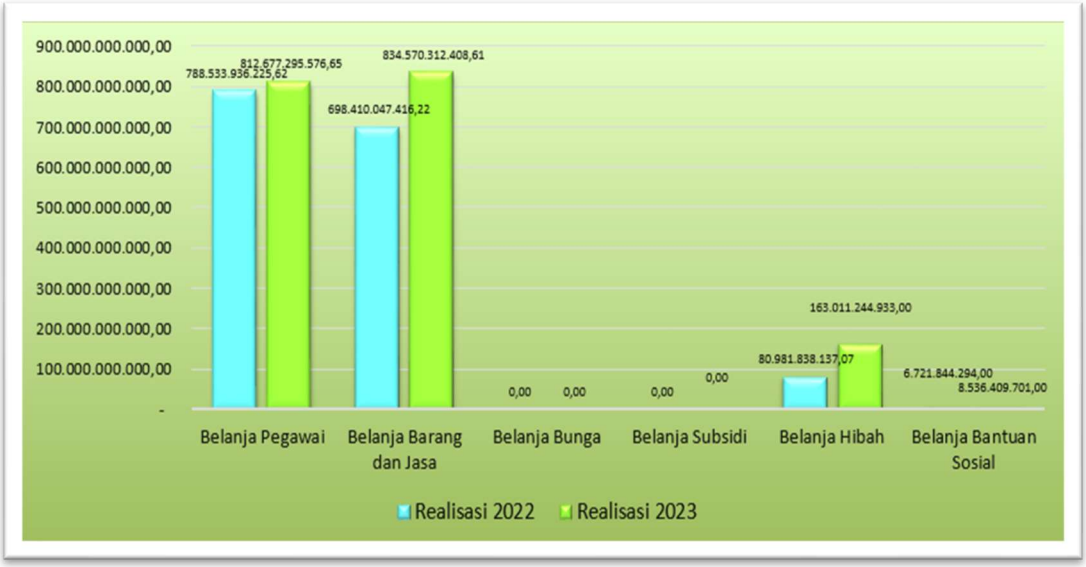
Perbandingan kinerja Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 ditunjukkan dalam grafik 3.5 dibawah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 senilai Rp812.677.295.576,65 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp788.533.936.225,62 mengalami **kenaikan** senilai Rp24.143.359.351,03 atau senilai 3,06%;

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 senilai Rp834.570.312.408,61 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp698.410.047.416,22 mengalami **kenaikan** senilai Rp136.160.264.992,39 atau senilai 19,50%;

Realisasi Belanja Bunga dan Belanja subsidi tidak ada dikarenakan tidak ada penanggaran.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp163.011.244.933,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp80.981.838.137,07 mengalami **kenaikan** senilai Rp82.029.406.795,93 atau senilai 101,29%;

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.536.409.701,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp6.721.844.294,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.814.565.407,00 atau senilai 27,00%.



Gambar 3.6 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Perbandingan kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 ditunjukkan dalam grafik 3.6 dibawah. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.345.617.541.442,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.028.531.224.206,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.317.086.317.236,00 atau senilai 128,06%;

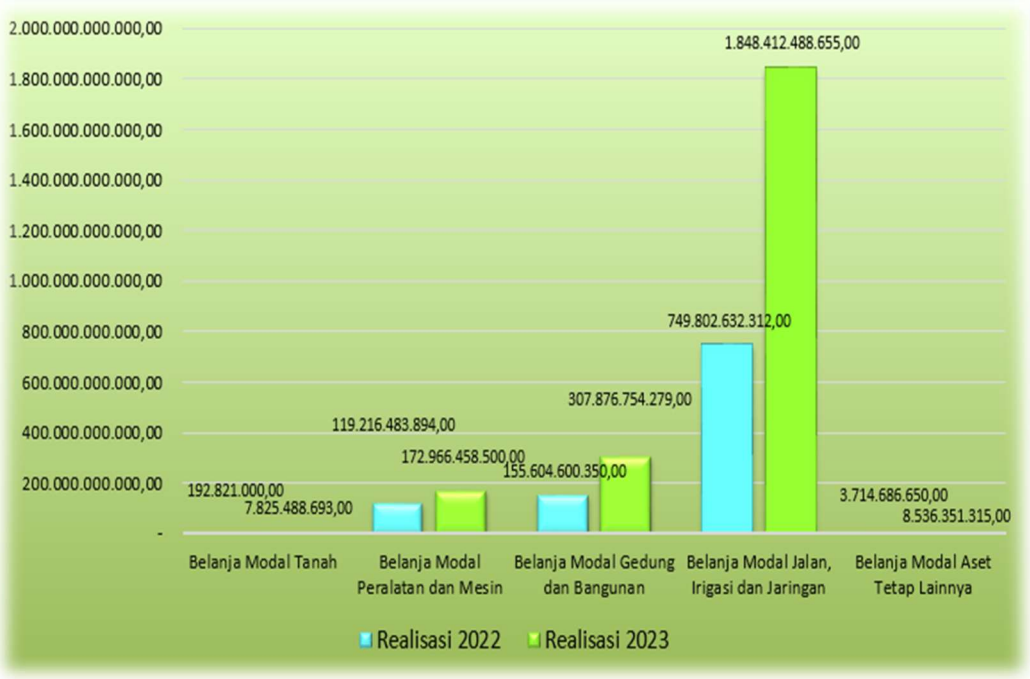
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp7.825.488.693,00 bila dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp192.821.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp7.632.667.693,00 atau senilai 3958,42%;

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2023 senilai Rp172.968.986.500,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp119.216.483.894,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp53.749.974.606,00 atau senilai 45,09%;

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp307.876.754.279,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp155.604.600.350,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp152.272.153.929,00 atau senilai 97,86%;

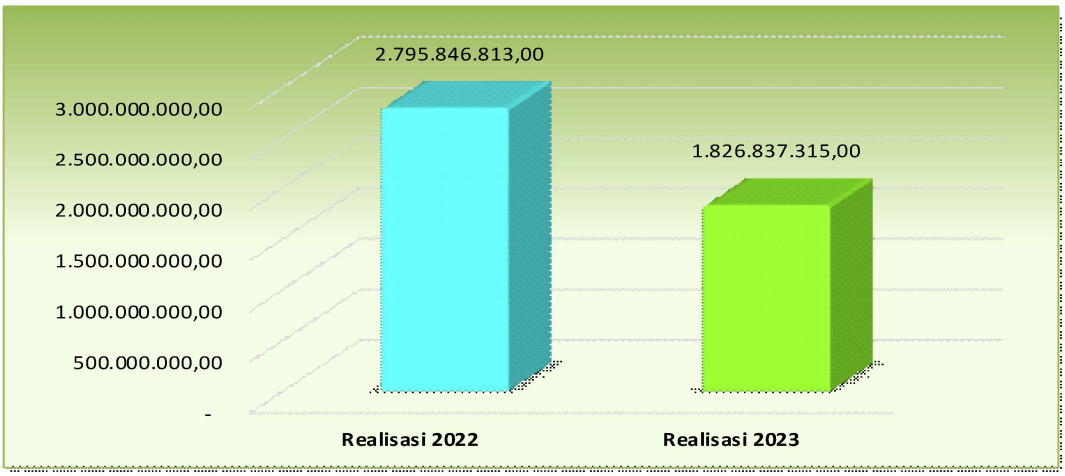
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.848.412.488.655,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp749.802.632.312,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.098.609.856.343,00 atau senilai 146,52%;

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.533.823.315,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.714.686.650,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.821.664.665,00 atau senilai 129,80%;



Gambar 3.7 Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 Dan 2022

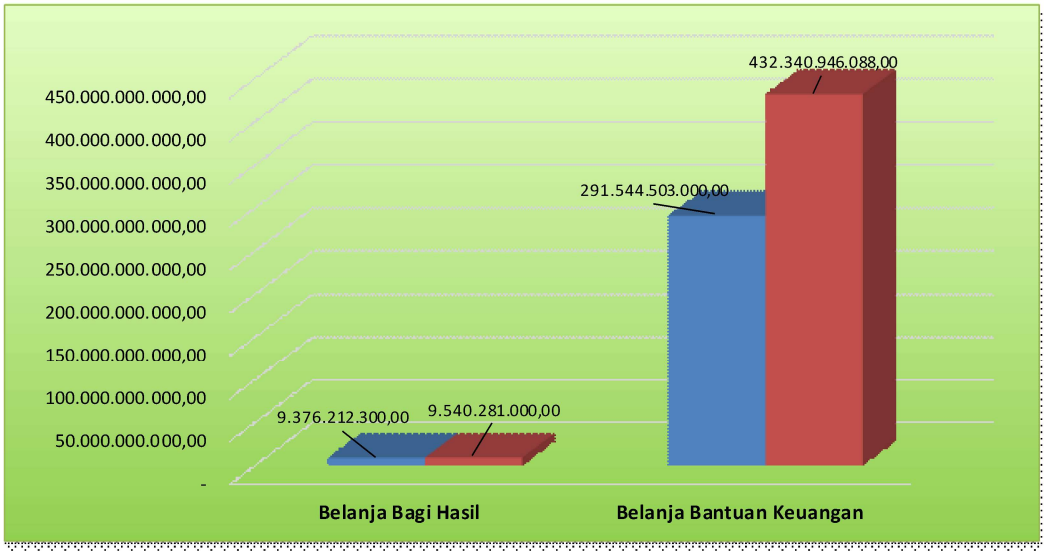
Perbandingan kinerja Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 ditunjukkan dalam grafik 3.8 dibawah. Realisasi Belanja tak Terduga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.826.837.315,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Tak terduga senilai Rp2.795.846.813,00 mengalami **penurunan** senilai Rp969.009.498 atau senilai 34,66%.



Gambar 3.8 Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022

3.1.3. Belanja Transfer

Perbandingan kinerja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 ditunjukkan dalam grafik 3.9 dibawah. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 senilai Rp441.881.227.088,00 bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp300.920.715.300,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp140.960.511.788,00 atau senilai 46,84%. Dengan rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 senilai Rp9.540.281.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp164.068.700,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp9.376.212.300,00 atau 1,75%; Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 senilai Rp432.340.946.088,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp140.796.443.088,00 atau 48,29% dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp291.544.503.000,00.



Gambar 3.9 Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

3.2. *Mandatory Spending*

Dalam Anggaran belanja daerah Tahun 2023 terdapat kategori pengeluaran yang telah diatur sesuai amanat Undang-Undang yaitu *Mandatory Spending, Mandatory Spending* merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran pendidikan senilai 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);

b. Besar anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN);

d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Tabel 3.4 Rekap Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Tahun 2023

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	% SESUAI REGULASI	JUMLAH BELANJA PADA APBD	% DALAM APBD	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
A	Belanja Fungsi Pendidikan	20	1.026.656.159.062,00	20	615.017.829.550,00	59,90
B	Belanja Fungsi Kesehatan	10	621.554.838.060,00	12	317.324.778.021,00	51,05
C	Belanja Fungsi Pengawasan	0,6	24.336.573.219,00	0,6	20.717.496.190,00	85,13
D	Belanja Wajib Yang Bersumber Dari DTU	25	2.464.107.995.486,00	81	2.201.946.992.686,00	89,36
E	Alokasi dana Desa (ADD)	10	442.197.389.000,00	16	441.881.227.088,00	99,93
TOTAL			**4.578.852.954.827,00**		**3.596.888.323.535,00**	**78,55**

Tabel 3. 5 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun 2023

(dalam satuan rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Pada Dinas Pendidikan	**608.674.000.714,00**	**495.988.666.354,00**
	BELANJA OPERASI	**512.987.220.350,00**	**422.703.077.615,00**
	Belanja Pegawai	334.255.027.918,00	292.323.041.459,00
	Belanja Barang dan Jasa	160.789.222.704,00	121.862.508.456,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
	Belanja Hibah	17.942.969.728,00	8.517.527.700,00
	BELANJA MODAL	**95.686.780.364,00**	**73.285.588.739,00**
	Belanja Di Luar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Menunjang Pendidikan, Antara Lain:	**417.982.158.348,00**	**119.029.163.196,00**
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	58.132.834.385,00	52.808.342.844,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.453.159.036,00	20.378.373.593,00
	Dinas Kebudayaan	52.236.244.859,00	45.842.446.759,00
	Belanja Transfer : Belanja Bantuan Keuangan	71.957.235.150,00	0,00
	Sub Kegiatan Pada SKPD	214.202.684.918,00	0,00
2	**Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan**	**1.026.656.159.062,00**	**615.017.829.550,00**
3	**Total Belanja Daerah**	**5.177.879.482.000,00**	**4.608.334.477.737,56**
4	**Rasio Anggaran Pendidikan**	**20%**	**13%**

Tabel 3. 6 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Tahun 2023

(dalam satuan rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	**Belanja Pada Dinas Kesehatan**	**316.784.130.201,00**	**239.509.327.906,00**
2	Belanja Di Luar Dinas Kesehatan Yang Menunjang Kesehatan, Antara Lain:		
	RSUD Abdul Rivai	**304.770.707.859,00**	**77.815.450.115,00**
3	**Anggaran Fungsi Kesehatan**	**621.554.838.060,00**	**317.324.778.021,00**
4	**Total Belanja Daerah**	**5.177.879.482.000,00**	**4.608.120.868.464,26**
5	**Gaji ASN**	**950.561.904.928,00**	**792.740.486.453,00**
6	**Total Belanja Daerah Di Luar Gaji ASN**	**4.227.317.577.072,00**	**2.114.154.965.938,91**
7	Rasio Anggaran Kesehatan	12,00%	10,92%

Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Tahun 2023

(dalam satuan rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja pada Inspektorat Daerah	24.336.573.219,00	20.717.496.190,00
2	Anggaran Fungsi Pengawasan	24.336.573.219,00	20.717.496.190,00
3	Total Belanja Daerah	5.177.879.482.000,00	4.608.120.868.464,26
4	Rasio Anggaran Pengawasan	0,5%	0,5%

Tabel 3. 8 Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum Tahun 2023

(dalam satuan rupiah)

No.	Jenis Belanja	ANGGARAN	REALISASI
I	Belanja Modal	1.656.520.157.353,00	1.464.854.345.200,00
II	Belanja Pemeliharaan	789.030.719.133,00	725.285.110.006,00
III	Belanja Hibah	18.445.919.000,00	11.696.337.480,00
IV	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
V	Belanja Bantuan Keuangan	111.200.000,00	111.200.000,00
VI	Belanja Gaji Guru Non PNS/Guru PPPK	0,00	0,00
JUMLAH		**2.464.107.995.486,00**	**2.201.946.992.686,00**
TOTAL DANA TRANSFER UMUM		**3.042.837.479.800,00**	**3.411.896.986.001,00**
RASIO BELANJA WAJIB DTU		**80,98**	**64,54**

Tabel 3. 9 Alokasi Anggaran Belanja Dana Desa Tahun 2023

(dalam satuan rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	**Alokasi Dana Desa (ADD)**	**442.197.389.000,00**	**441.881.227.088,00**
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	442.197.389.000,00	441.881.227.088,00
	Alokasi Anggaran Belanja Daerah	**5.177.879.482.000,00**	**4.608.120.868.464,26**
	Alokasi Dana Perimbangan*	**3.042.837.479.800,00**	**3.411.896.986.001,00**
	Rasio Anggaran Dana Desa	**14,53**	**12,95**

**) Anggaran setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus*

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Kebijakan Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari 48 (Empat Puluh Delapan) OPD selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan Pendapatan dan Beban, maupun pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Sedangkan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas Pendapatan Tersebut telah diterima pada RKUD;
b. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
c. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

d. Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
e. Kas atas Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai Pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan dalaam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis Kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

a. Kebijakan akuntansi berkenaan dengan Pendapatan-LRA;
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan sampai dengan rincian obyek Pendapatan-LRA; dan
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas Pendapatan (*earned*); atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Berau dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan Laporan Keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
b. Ketidakpastian penerimaan Kas relatif tinggi;
c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
e. Sistem atau administrasi Piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila

sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya Piutang diakhir tahun.

f. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas selama tahun berjalan.

   Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan Kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non Kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat Kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

   1) Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas

      Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan Kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

   2) Pendapatan-LO diakui setelah Penerimaan Kas

      Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan Kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau Kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

b. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran; dan

b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan

c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran Kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran

mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah dalam jumlah dan persentase yang signifikan, kebijakan akuntansi mengenai Belanja, penjelasan sebab-sebab realisasi Belanja yang melebihi Anggaran dan pengungkapan realisasi Belanja yang tidak sesuai peruntukannya yang disebabkan ketidaktepatan dalam penganggaran atau sebab lainnya.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a. Saat timbulnya kewajiban;

b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran Kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun Kas belum dikeluarkan;

b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran Kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan

c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran Kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun Kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran Kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian atas beban. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;

b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya; dan

c. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan, Beban Penyusutan aset tetap/amortisasi, Beban Transfer, Beban tak terduga dan Beban Lain-lain;
b. Beban Non Operasional;
c. Beban Luar Biasa; dan
d. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

a. Pengeluaran Beban tahun berkenaan;

b. Pengakuan Beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/Tahun Anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran,

pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transferdilakukan pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan Laporan Keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan Kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian Transfer Keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas Transfer Keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran Transfer Keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan Beban Transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan Beban Transfer pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, Pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas Pendapatan Transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang Pemerintah Daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai Transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan

sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Transfer DAU Tahun Anggaran berjalan.

2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer padaTahun Anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Transfer Keluar diukur dan dicatat senilai nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, Beban Transfer diukur dan dicatat senilai Kewajiban Transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Masuk dengan realisasinya. Realisasi Transfer Masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional; dan

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas Transfer Keluar dan Beban Transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi Transfer Keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya;

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran Transfer Keluar dengan realisasinya;

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi Beban Transfer pada Laporan Operasional; dan

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber Pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

a. Penerimaan Pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Pembiayaan antara lain:

a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan tahun berkenaan; dan

b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan Dana Cadangan, penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi Kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam Neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan Setara Kas didefinisikan sebagai Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi Kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan. Setara Kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Kas Jangka Pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek harus segera dapat diubah menjadi Kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut Setara Kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Daerah mencakup Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan Setara Kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

a. Saldo rekening Kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan

b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan

a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau

2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau

3) Pengesahan atas Penerimaan Pendapatan.

b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat:

1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:

a) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

d. Pengeluaran Kas dalam rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1) Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau

2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.

a) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

b) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

e. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan Transfer (Transfer Masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g. Penerimaan dan Pengeluaran Lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi Kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi Kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

h. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai Kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke Kas Daerah masuk sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran dengan akun lawan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan Setara Kas dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen Kas dan bukan merupakan bagian dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan Kas dan setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

a. Rincian Kas dan Setara Kas;

b. Kebijakan manajemen Setara Kas; dan

c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok Aset Non Lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

b. Ditujukan dalam rangka manajemen Kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan

c. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

a. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan Piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan

berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran Investasi Jangka Pendek dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan

2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat senilai nilai nominalnya.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
c. Perubahan harga pasar baik Investasi Jangka Pendek maupun Investasi Jangka Panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
f. Perubahan pos investasi.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas Piutang untuk penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi Piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya Piutang dibagi atas:

a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;

b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;

c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer; dan

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

a. Terdapat surat ketetapan atau dokumen yang sah dan belum dibayarkan/dilunasi; dan atau

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan

b. jumlah Piutang dapat diukur;

c. Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan telah dilaksanakan penagihan; dan

d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

a. Piutang Pajak Dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;

b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;

c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku senilai hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka Piutang atas DBH tidak diakui;

d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya senilai jumlah yang belum ditransfer;

e. Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:

   1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau Piutang bagi daerah penerima;

   2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang Transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu Tahun Anggaran ada kelebihan transfer. Jika

kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

g. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan Piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

a. Pengukuran Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut.

   1) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;

   2) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; dan

   3) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan.

b. Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

   1) Pemberian pinjaman

      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas daerah dan/atau apabila berupa Barang/Jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas Barang/Jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

   2) Penjualan

      Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai Piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

   3) Kemitraan

      Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran Piutang transfer adalah sebagai berikut.

1) Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

2) Dana Bagi Hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka Piutang atas DBH tidak disajikan; dan

3) Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran Piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

1) Disajikan sebagai Aset Lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

2) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian Piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan Piutang maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal Piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas Piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai penyisihan Piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Tabel 4. 2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,50%
b	Kurang Lancar	10%
c	Diragukan	50%
d	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa Piutang benar benar tidak dapat ditagi, atas Piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

Apabila kualitas Piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas Piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan Piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas Piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan Piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas Piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian Piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan Piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan Piutang

selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan Piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan Piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan Piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan Piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagihkan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Penghapusan suatu Piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi. Penghapustagihan dan penghapusbukuan Piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
    2) Memberi gambaran Ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan Ekuitas; dan
    3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah Daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu Piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan Piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan Piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan morel lebih luas menghadapi tugas masa depan;

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;

e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/Ekuitas/penyertaan dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.Informasi mengenai akun Piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan daerah.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah; dan

c. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada Beban Persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan senilai:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang

masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum.Aset Non lancar meliputi:

a. Investasi Jangka Panjang;
b. Aset Tetap;
c. Dana Cadangan; dan
d. Aset Lainnya.

4.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3) dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
4) investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

a. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan Piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode Ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Terhadap investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran Investasi Jangka Panjang sebagai berikut.

a. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat senilai biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b. Investasi Jangka Panjang non permanen:

   1) Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur senilai nilai perolehannya;

   2) Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah diukur dan dicatat senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga; dan

   3) Investasi Jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat senilai harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

a. Metode Biaya

   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

   Dengan menggunakan metode Ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai senilai biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

   Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai senilaiharga perolehan.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode Ekuitas;

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode Ekuitas; dan

d. Kepemilikan atas Investasi Jangka Panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

a. Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan

b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya; dan

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

a. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada

saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dan Aset Tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas;
2) Pengeluaran atas perolehan Aset Tetap konstruksi gedung dan bangunan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke atas;
3) Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi; dan
4) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap konstruksi jalan dan jaringan senilai Rp15.000.000,00 ke atas.

Tabel 4. 3 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas Perolehan

Kodefikasi	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Kapitalisasi) Rp
1.3	Aset Tetap	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.1.01	Alat Besar Darat	500.000
1.3.2.1.02	Alat Besar Apung	500.000
1.3.2.1.03	Alat Bantu	500.000
1.3.2.2.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000
1.3.2.2.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	500.000
1.3.2.2.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	500.000
1.3.2.2.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	500.000
1.3.2.2.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	500.000
1.3.2.3.01	Alat Bengkel Bermesin	500.000
1.3.2.3.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	500.000
1.3.2.3.03	Alat Ukur	500.000
1.3.2.4.01	Alat Pengolahan	500.000
1.3.2.5.01	Alat Kantor	500.000

Kodefikasi	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Kapitalisasi) Rp
1.3.2.5.02	Alat Rumah Tangga	500.000
1.3.2.5.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	500.000
1.3.2.6.01	Alat Studio	500.000
1.3.2.6.02	Alat Komunikasi	500.000
1.3.2.6.03	Peralatan Pemancar	500.000
1.3.2.6.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000
1.3.2.7.01	Alat Kedokteran	500.000
1.3.2.7.02	Alat Kesehatan Umum	500.000
1.3.2.8.01	Unit Alat Laboratorium	500.000
1.3.2.8.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	500.000
1.3.2.8.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	500.000
1.3.2.8.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	500.000
1.3.2.8.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	500.000
1.3.2.8.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	500.000
1.3.2.8.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000
1.3.2.8.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	500.000
1.3.2.8.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	500.000
1.3.2.9.01	Senjata Api	500.000
1.3.2.9.02	Persenjataan Non Senjata Api	500.000
1.3.2.9.03	Senjata Sinar	500.000
1.3.2.9.04	Alat Khusus Kepolisian	500.000
1.3.2.10.01	Komputer Unit	500.000
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	500.000
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	500.000
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	500.000
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	500.000
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	500.000
1.3.2.13.01	Sumur	500.000
1.3.2.13.02	Produksi	500.000
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	500.000
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	500.000
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	500.000
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	500.000
1.3.2.15.03	Alat Sar	500.000
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	500.000
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	500.000

Kodefikasi	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Kapitalisasi) Rp
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	500.000
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	500.000
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	500.000
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	500.000
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	500.000
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.1.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000
1.3.3.1.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.000.000
1.3.3.2.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20.000.000
1.3.3.3.01	Bangunan Menara Perambuan	20.000.000
1.3.3.4.01	Tugu/Tanda Batas	20.000.000
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000
1.3.4.1.01	Jalan	20.000.000
1.3.4.1.02	Jembatan	20.000.000
1.3.4.2.01	Bangunan Air Irigasi	20.000.000
1.3.4.2.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	20.000.000
1.3.4.2.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	20.000.000
1.3.4.2.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	20.000.000
1.3.4.2.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	20.000.000
1.3.4.2.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	20.000.000
1.3.4.2.07	Bangunan Air Kotor	20.000.000
1.3.4.3.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	15.000.000
1.3.4.3.02	Instalasi Air Kotor	15.000.000
1.3.4.3.03	Instalasi Pengolahan Sampah	15.000.000
1.3.4.3.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	15.000.000
1.3.4.3.05	Instalasi Pembangkit Listrik	15.000.000
1.3.4.3.06	Instalasi Gardu Listrik	15.000.000
1.3.4.3.07	Instalasi Pertahanan	15.000.000
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	15.000.000
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	15.000.000
1.3.4.3.09	Instalasi Pengaman	15.000.000
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	15.000.000
1.3.4.4.01	Jaringan Air Minum	15.000.000
1.3.4.4.02	Jaringan Listrik	15.000.000
1.3.4.4.03	Jaringan Telepon	15.000.000
1.3.4.4.04	Jaringan Gas	15.000.000
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	

Kodefikasi	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Kapitalisasi) Rp
1.3.5.2.01	Bahan Perpustakaan	1
1.3.5.2.02	Barang Bercorak Kesenian	1
1.3.5.2.03	Hewan	1
1.3.5.2.04	Biota Perairan	1
1.3.5.2.05	Tanaman	1
1.3.5.2.06	Barang Koleksi Non Budaya	1
1.3.5.2.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
1.3.6	Konnstruksi Dalam Pengerjaan	1

Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut.

a. Tanah

   Tanah diakui pertama kali senilai biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,

penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi Dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**				**ASET TETAP**	
1	**3**	**2**			**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing	10

Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
					Laboratory (BATAM)	
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	2	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	4
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	4
1	**3**	**3**			**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	40
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	**3**	**4**			**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30

Kode					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	2		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	2	1	Barang Bercorak Kesenian	4
1	3	5	7	1	Aset Tetap Dalam Renovasi	Masa Kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dan aset tetap dianggap berumur 1 (satu) tahun apabila telah melewati tahun perolehan. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;

b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;

c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan

d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Penilaian

a. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah senilai nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Berau melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, Aset Tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

b. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing Aset Tetap jika harga perolehan salah satu Aset Tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan Aset Tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

c. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan Aset Tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap Aset Tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Berau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

d. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan Aset Tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan Aset Tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak

tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos fasum diperoleh.

e. Pertukaran Aset (*Exchange of Asets*)

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau Aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap Kas atau Setara Kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat Aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi Kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi Kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut.

1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan senilai nilai yang tercatat di neraca;
2) Aset yang diterima dicatat senilai nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima; dan
3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

f. Aset Donasi

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu

perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

g. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut.

1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau;
2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
4) pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap.

1) Batasan minimal Kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

a) pemeliharaan kontruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke atas;
b) pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) ke atas.

2) Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan.

4.4.11.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Tujuan dari Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait, dengan ruang lingkup ;

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah daerah tidak termasuk BUMD
2. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk :
   - aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan

- hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

Perngertian istilah – istilah yang digunakan dalam kebijakan ini ;

a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
f. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
g. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
h. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti Investasi

1. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
   a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
   b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
2. Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
3. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
4. Berikut ini adalah contoh properti investasi:
   a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
c. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
   a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
   b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
   c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
   d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
   e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
   f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
   g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
6. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
   a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;

b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

7. Pemerintah daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
8. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan.
9. konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
   a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
   b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama

mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
   a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
   b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
   c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
7. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
8. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara

andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

9. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
   b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
   c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
10. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
11. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
   a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
   b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
12. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi

dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/ penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
    b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
    c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Penyajian Properti Investasi

1. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi

menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan

1. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
   a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
   b. metode penyusutan yang digunakan;
   c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
   e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
   f. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
   g. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
   h. pelepasan;
   i. penyusutan;
   j. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
   k. perubahan lain.
2. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
   a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   c. tanggal efektif penilaian kembali;
   d. nilai tercatat sebelum revaluasi
   e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
   f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
   g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
   h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
   i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

j. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
k. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
l. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
m. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
n. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
o. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
p. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
q. informasi lain terkait dengan properti investasi.

Ahli Guna

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
   a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
   b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
   c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
   d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
   a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
   b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
   c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

4. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
5. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
6. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
   a. pelepasan; atau
   b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
   c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Ketentuan Transisi

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.

2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

4.5 Tabel Neraca dengan Properti Investasi

(*dalam Rupiah*)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Kas di BLUD				
Piutang				
Piutang Pajak				
Piutang Retribusi				
Piutang PAD lainnya				
Piutang Lain-lain				
Persediaan				
Persediaan Alat Tuis Kantor				
Persediaan Alat Listrik				
Persediaan Material/Bahan				
Persediaan Benda Pos				
Persediaan Bahan Bakar				
Persediaan Bahan Makanan Pokok				
Jumlah				
ASET TETAP				
Tanah				
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Alat-alat berat				
Alat-alat angkutan darat bermotor				
Alat-alat angkutan darat tidak bermotor				
Alat-alat angkutan di air bermotor				
Alat-alat angkutan di air tidak bermotor				
Alat-alat angkutan udara				
Alat-alat bengkel				
Alat-alat pertanian dan peternakan				
Peralatan kantor				
Perlengkapan kantorkomputer				
Mebeleir				
Peralatan dapur				
Penghias ruangan rumah tangga				
Alat-alat studio				
Alat-alat komunikasi				
Alat-alat ukur				
Alat-alat kedokteran				
Alat-alat laboratorium				
Alat-alat persenjataan/keamanan				

Gedung dan Bangunan				
Gedung kantor				
Gedung rumah jabatan				
Gedung rumah dinas				
Gedung gudang				
Bangunan bersejarah				
Bangunan monumen				
Tugu peringatan				
Jalan, Jaringan dan Instalasi				
Jalan				
Jembatan				
Jaringan air				
Penerangan jalan, taman dan hutan kota				
Instalasi listrik dan telepon				
Aset Tetap Lainnya				
Buku dan kepustakaan				
Barang bercorak kesenian, kebudayaan				
Hewan/ternak dan tanaman				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan				
Akumulasi penyusutan aset tetap				
Jumlah				
Properti Investasi				
Properti Investasi				
Jumlah				
ASET LAINNYA				
Tagihan piutang penjualan angsuran				
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah				
Kemitraan dengan pihak ketiga				
Aset tidak berwujud				
Aset lai-lain				
Jumlah				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang perhitungan pihak ketiga				
Utang bunga				
Utang pajak				
Bagian lancar utang jangka panjang				
Pendapatan diterima dimuka				
Utang jangka pendek lainnya				
Jumlah				
EKUITAS				
Ekuitas				
Ekuitas untuk dikonsolidasikan				
Jumlah				

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS				

4.4.11.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu TA. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa TA untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan Dana Cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan Dana Cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana Cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4.4.11.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Aetap, dan Dana cadangan.Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Piutang penjualan angsuran disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu senilai nilai nominal Piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.

b. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan dinilai senilai nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai senilai nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu senilai nilai nominal Piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

1) Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset yang diserahkan dalam rangka Bangun Kelola Serah disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset tetap.

Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.

a) Untuk aset yang berasal dari Pemerintah Daerah dinilai senilai nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai senilai harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

2) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun,Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat senilainilai perolehan aset yang dibangun, yaitu senilai nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. Aset Bangun Serah Kelola disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan Aset Tetap.

d. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh Aset Tidak Berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset Tidak Berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah. Aset Tidak Berwujud meliputi:

1) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun

2) Lisensi dan *franchise*

   Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

3) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

   Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

   Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

   Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang, termasuk dalam hasil

kajian/penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi, antara lain: dokumen *master plan*, dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah, atau dokumen sejenisnya. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. Termasuk dalam kelompok ini adalah *feasibility study*, *Detail Engineer Design* (DED) yang tidak diikuti pembangunan fisik, kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum memberikan hasil nyata atau sejenisnya.

5) Aset Tidak Berwujud lainnya, termasuk Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diakui jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Nilai Aset Tidak Berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

1) Biaya yang berhubungan langsung dengan Aset Tidak Berwujud;

2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke Aset Tidak Berwujud tersebut; dan

3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan pengadaan Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang dikapitalisasi ke dalam Aset Tidak Berwujud yang dilaksanakan secara swakelola antara lain meliputi:

1) Biaya bahan yang digunakan dalam Aset Tidak Berwujud;

2) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;

3) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan

4) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan Aset Tidak Berwujud, seperti biaya konsultan perencana, tenaga ahli/narasumber.

Penilaian Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah

dikurangi amortisasi. Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 (lima) tahun.

Penyajian Aset Tidak Berwujud

ATB disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut.

1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

e. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Aset Tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang dan rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap karena dipinjamkan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan.

f. Aset Bersejarah (Heritage *Assets*)

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.

4) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran Kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai Belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

4.4.12. Akuntansi Kewajiban

Karakterisitik utama Kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai Kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian

kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek atau Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti Aset Lancar. Beberapa Kewajiban Jangka Pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap Aset Lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, Utang Jangka Pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan Kewajiban Jangka Panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) Kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

Jumlah setiap Kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa Kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan Kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan Laporan Keuangan membuktikan bahwa substansi Kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang hanya jika:

a) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan

b) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan Kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas Kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (*Exchange Transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa pertukaran (*Non-Exchange Transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*Government-Relatedevents*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian

yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan Kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d. Kejadian yang diakui pemerintah (*Government-Acknowledged Events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi Kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui Kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut.

1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan

2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan Kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu Kewajiban harus diakui senilai jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk

membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan Kewajiban sebagai berikut.

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;

b) Utang Bunga sebagai bagian dari Kewajiban atas pokok utang berupa Kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah Utang Jangka Panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga Kewajiban itu menjadi Kewajiban Jangka Pendek;

d) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat Kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah;

e) Utang Beban, diakui pada saat:

   (1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

   (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

   (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

f) Utang Jangka Pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

g) Utang Kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan apabila:

   (1) barang yang dibeli sudah diterima; atau

   (2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau

   (3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan

belum dibayar.

h) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

i) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang Kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal atas Kewajiban mencerminkan nilai Kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat Kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;

b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;

c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya; dan

d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal Neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan Ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos Kewajiban adalah sebagai berikut.

a. Utang PFK Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada Laporan Keuangan senilai jumlah yang masih harus disetorkan;

b. Utang Kepada Pihak Ketiga Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus

mengakui Kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;

c. Utang Transfer dicatat senilai nilai kekurangan transfer;

d. Utang Bunga Atas Utang Pemerintah harus dicatat senilai biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari Kewajiban yang berkaitan;

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

f. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;

g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca; dan

h. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan Kewajiban Lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam Kewajiban Lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat Laporan Keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo Kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian Kewajiban sebelum jatuh tempo;
    1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
        a) Pengurangan pinjaman;
        b) Modifikasi persyaratan utang;
        c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
        d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
        e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
        f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
    2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
    3) Biaya pinjaman:

a) Perlakuan biaya pinjaman;
b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, dimana dalam prosesnya juga ditentukan oleh Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode yang bersangkutan serta koreksi kesalahan atas pembukuan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang tercakup dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 meliputi pendapatan-LRA, belanja, Surplus/ defisit – LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Perbup Berau Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perubahan anggaran pendapatan menjadi senilai Rp4.377.445.743.906,00, dari anggaran murni senilai Rp3.639.000.000.000,00. Target belanja senilai Rp5.177.879.482.000,00, dari anggaran murni senilai Rp3.639.000.000.000,00 dan pembiayaan netto senilai Rp800.433.738.049,00. Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah sebagai berikut :

5.1.1 Pendapatan-LRA

	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Daerah	4.700.904.175.374,78	3.169.396.847.335,90

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, BLUD dan Penerimaan Non RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.

Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah, demikian pula bagi Pemerintah Kabupaten Berau, pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan tersebut diatas dalam Tahun

Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam Tabel 5.1 dan 5.2 berikut :

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah	259.170.865.751,00	286.669.630.661,78	110,61
2	Pendapatan Transfer	4.065.914.334.955,00	4.406.411.710.669,00	108,37
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	52.360.543.200,00	7.822.834.044,00	14,94
	Jumlah	**4.377.445.743.906,00**	**4.700.904.175.374,78**	**107,39**

Gambaran dari tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp4.377.445.743.906,00 dengan Realisasi senilai Rp4.700.904.175.374,78 atau 107,39%.

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	286.669.630.661,78	299.529.844.588,90	(12.860.213.927,12)	(4,29)
2	Pendapatan Transfer	4.406.411.710.669,00	2.869.867.002.747,00	1.536.544.707.922,00	53,54
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.822.834.044,00	0,00	7.822.834.044,00	100,00
	Jumlah	**4.700.904.175.374,78**	**3.169.396.847.335,90**	**1.531.507.328.038,88**	**48,32**

Gambaran dari tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp4.700.904.175.374,78 dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.169.396.847.335,90, mengalami **kenaikan** senilai Rp1.531.507.328.038,88 atau 48,32%.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.1 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2023

Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.2 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Masing-masing anggaran dan realisasi akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
	286.669.630.661,78	299.529.844.588,90

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2023 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Pajak Daerah	90.000.000.000,00	93.382.456.473,00	103,76
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.465.689.150,00	14.933.984.444,00	130,25
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.619.185.180,00	16.119.182.280,09	91,49
4	Lain-lain PAD Yang Sah	140.085.991.421,00	162.234.007.464,69	115,81
	Jumlah	**259.170.865.751,00**	**286.669.630.661,78**	**110,61**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp259.170.865.751,00 dengan Realisasi senilai Rp286.669.630.661,78 atau 110,61%.

Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	93.382.456.473,00	101.978.007.723,50	(8.595.551.250,50)	(8,43)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.933.984.444,00	10.477.919.521,00	4.456.064.923,00	42,53
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.119.182.280,09	19.370.432.054,45	(3.251.249.774,36)	(16,78)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	162.234.007.464,69	167.703.485.289,95	(5.469.477.825,26)	(3,26)
	Jumlah	**286.669.630.661,78**	**299.529.844.588,90**	**(12.860.213.927,12)**	**(4,29)**

Dari penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp286.669.630.661,78 dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp299.529.844.588,90, mengalami **penurunan** senilai Rp12.860.213.927,12 atau 4,29%.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.3 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5.4 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Dengan melihat tabel dan gambar di atas menunjukan anggaran dan realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
	93.382.456.473,00	101.978.007.723,50

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Berau. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten Berau.

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari kontribusi wajib pajak kepada daerah, yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kabupaten Berau memungut Pajak Daerah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perbup Nomor 21 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau selaku instansi pemungut dan pengelola pajak daerah selalu melakukan intensifikasi dan eksensifikasi serta menetapkan tarif berdasarkan dengan Peraturan Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*.

Pada Tahun Anggaran 2023 anggaran dan realisasi pendapatan pajak mengalami **penurunan** dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 serta anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pajak Hotel	6.000.000.000,00	6.881.753.285,00	114,70
2	Pajak Restoran	29.000.000.000,00	30.420.852.172,00	104,90
3	Pajak Hiburan	350.000.000,00	344.784.773,00	98,51
4	Pajak Reklame	655.000.000,00	602.184.763,00	91,94
5	Pajak Penerangan Jalan	26.050.000.000,00	28.534.831.162,00	109,54
6	Pajak Parkir	480.000.000,00	523.283.767,00	109,02
7	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	509.520,00	0,17
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	204.404.500,00	13,63
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	622.722.080,00	88,96

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
10	PBB	10.465.000.000,00	10.410.938.473,00	99,48
11	BPHTB	14.500.000.000,00	14.836.191.978,00	102,32
	Jumlah	**90.000.000.000,00**	**93.382.456.473,00**	**103,76**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Pajak Daerah senilai Rp90.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp93.382.456.473,00 atau 103,76%.

Tabel 5.6 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Pajak Hotel	6.881.753.285,00	4.987.958.867,00	1.893.794.418,00	37,97
2	Pajak Restoran	30.420.852.172,00	29.436.946.631,00	983.905.541,00	3,34
3	Pajak Hiburan	344.784.773,00	144.936.232,00	199.848.541,00	137,89
4	Pajak Reklame	602.184.763,00	493.990.979,00	108.193.784,00	21,90
5	Pajak Penerangan Jalan	28.534.831.162,00	24.634.778.107,00	3.900.053.055,00	15,83
6	Pajak Parkir	523.283.767,00	295.938.500,00	227.345.267,00	76,82
7	Pajak Air Tanah	509.520,00	1.192.232,00	(682.712,00)	(57,26)
8	Pajak Sarang Burung Walet	204.404.500,00	32.141.500,00	172.263.000,00	535,95
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	622.722.080,00	179.867.558,00	442.854.522,00	246,21
10	PBB	10.410.938.473,00	4.928.729.536,00	5.482.208.937,00	111,23
11	BPHTB	14.836.191.978,00	36.841.527.581,50	(22.005.335.603,50)	(59,73)
	Jumlah	**93.382.456.473,00**	**101.978.007.723,50**	**(8.595.551.250,50)**	**(8,43)**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah merealisasikan Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp93.382.456.473,00 dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp101.978.007.723,50 mengalami **penurunan** senilai Rp8.595.551.250,50 atau 8,43%.

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa terjadi ***kenaikan*** dan ***penurunan*** realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Target Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp6.000.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp6.881.753.285,00 atau 114,70%. Tercapainya target melebihi pagu anggaran tersebut disebabkan oleh:

1) Regulasi pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

2) Menurunnya dampak pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa hotel kembali beroperasi sehingga memberikan dampak yang cukup signfikan terhadap kenaikan pendapatan pajak hotel.

3) Tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sudah semakin membaik.

4) Beberapa pajak hotel ada kenaikan omzet beberapa hotel serta adanya Porprov se-Kaltim.

Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.893.794.418,00 atau 37,97% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp4.987.958.867,00.

b. Pajak Restoran

Target Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp29.000.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp30.420.852.172,00 atau 104,90% dengan rincian sebagai berikut :

1) Pajak restoran dan sejenisnya dianggarkan senilai Rp4.450.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.277.394.358,00 atau 118,59%. Realisasi Pajak Restoran dan Sejenisnya melebihi dari yang ditargetkan dengan sosialisasi, pendataan, monitoring setiap saat restoran, katering, kafe dan rumah makan untuk selalu melaporkan hasil omzet penjualan.
2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya dianggarkan senilai Rp50.000.000,00, dan terealisasi senilai Rp 23.714.000,00 atau 47,43%
3) Pajak Warung dan Sejenisnya tidak ada dianggarkan namun terealisasikan senilai Rp9.325.000,00
4) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya dianggarkan senilai Rp24.500.000.000,00, dan terealisasi senilai Rp25.110.418.814,00

Penerimaan Pajak Restoran dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp983.905.541,00 atau 3,34% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp29.436.946.631,00. Terjadi **kenaikan** dari target yang ditetapkan disebabkan bertambahnya objek pajak khususnya dari penyedia jasa katering yang merupakan bagian dari pajak restoran, beroperasinya PT Fast Food Indonesia (*Kentucky Fried Chiken*) dan PT Sarimelati Kencana Tbk (Pizza Hut Indonesia) serta penerimaan *lump sum payment* dari PT Berau Coal yang dialokasikan untuk pajak yang menjadi kewajiban, melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak atau *door to door*.

c. Pajak Hiburan

Target Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp350.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp344.784.773,00 atau 98,51%. mengalami **kenaikan** senilai Rp199.848.541,00 atau 137,89% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp144.936.232,00. Terjadi **penurunan** penerimaan pajak hiburan dari target yang ditetapkan dikarenakan adanya objek pajak hiburan yang ditutup atau tidak beroperasi lagi dan objek pajak insidental berkurang serta masih berdampak adanya pandemi Covid-19.

d. Pajak Reklame

Target Pajak Reklame TA 2023 dianggarkan senilai Rp655.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp602.184.763,00 atau 91,94%. Tidak tercapainya target Pajak Reklame dari yang telah direncanakan dikarenakan menurunnya pajak penarikan reklame yang insidental. Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp108.193.784,00 atau 21,90% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp493.990.979,00.

e. Pajak Penerangan Jalan

Target Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp26.050.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp28.534.831.162,00 atau 109,54%. Tercapainya target pendapatan pada Pajak Penerangan Jalan disebabkan karena adanya pemasangan baru pada enam perusahaan yang berada di Kabupaten Berau dengan daya 9,07 Mw. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.900.053.055,00 atau 15,83% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp24.634.778.107,00.

f. Pajak Parkir

Target Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp480.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp523.283.767,00 atau 109,02%. Tercapainya target dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh :

1) Potensi Pajak Parkir sebagian besar bersumber dari pengelolaan parkir Bandara Kalimarau dan RSUD Kabupaten Berau.
2) Bertambahnya jadwal penerbangan di Bandara Kalimarau sehingga menyebabkan pendapatan parkir di Bandara Kalimarau bertambah.
3) Potensi pajak parkir yang didapat pada kegiatan yang bersifat insidental.

Penerimaan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp227.345.267,00 atau 76,82% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp295.938.500,00.

g. Pajak Air Tanah

Target Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp300.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp509.520,00 atau 0,17%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Pajak Air Bawah Tanah ada beberapa objek yang tutup sehingga berpengaruh pada realisasi penerimaan. Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah TA 2023 mengalami **penurunan** senilai Rp682.712,00 atau 57,26% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.192.232,00.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Target Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp1.500.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp204.404.500,00 atau 13,63%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan objek sarang burung walet alami (Goa) mengalami penurunan hasil panen yang disebabkan faktor alam, pajak sarang burung rumahan belum dipungut secara maksimal dan untuk Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pemungutan tanpa melihat izin atau tidak ada

izin sepanjang objek dan subjek pajak terpenuhi akan dilakukan pemungutan. Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp172.263.000,00 atau 535,95% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp32.141.500,00.

i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp700.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp622.722.080,00 atau 88,96%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh perubahan regulasi terkait dengan perizinan berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sehingga apabila dipungut dianggap melegalkan usaha pertambangan rakyat, Tahun 2023 akan dilakukan pemungutan tanpa melihat izin atau tidak ada izin sepanjang objek dan subjek pajak terpenuhi akan dilakukan pemungutan.

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp442.854.522,00 atau 246,21% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp179.867.558,00.

j. Pajak PBBP2

Target Pajak PBBP2 Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp10.465.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp10.410.938.473,00 atau 99,48%. Tercapainya target realisasi pajak dikarenakan adanya tunggakan pajak beberapa Wajib Pajak yang telah dilunasi dan telah ditindaklanjuti pada proses penagihan bersama dengan pihak Kejaksaan selaku pengacara negara dan dikarenakan PT Kertas Nusantara telah melakukan pembayaran. Penerimaan PBBP2 Tahun Anggaran 2022 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.482.208.937,00 atau 111,23% dibandingkan penerimaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp4.928.729.536,00.

k. Pajak BPHTB-Pemindahan Hak

Target Pajak BPHTB-Pemindahan Hak Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp14.500.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp14.836.191.978,00 atau 102,32%. Tercapainya target pajak yang melebihi angka yang telah ditetapkan tersebut karena objek pajak BPHTB-Pemindahan Hak adalah objek pajak insidental atas transaksi terjadinya peralihan hak biasa disebabkan karena jual beli, hibah dan wasiat. Penerimaan BPHTB-Pemindahan Hak Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** senilai Rp22.005.335.603,50 atau 59,73% dari penerimaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp36.841.527.581,50.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
	14.933.984.444,00	10.477.919.521,00

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun organisasi perangkat daerah pemungut berdasarkan Jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut.

a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
g. Dinas Perhubungan
h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
j. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
l. Kantor Penghubung (Sekretariat Daerah)

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagai unit penghasil. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut ;

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.500.000.000,00	6.506.654.100,00	144,59
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.500.000.000,00	1.799.438.000,00	119,96
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	102.517.500,00	115.204.000,00	112,37
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.302.475.000,00	1.857.949.943,00	142,65
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	571.532.950,00	285,77
6	Retribusi Penyedotan dan/atau Penyedotan Kakus	2.400.000,00	1.000.000,00	41,67
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	196.274.100,00	196,27
	Subtotal Retribusi Jasa Umum	***7.707.392.500,00***	***11.048.053.093,00***	***143,34***
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.026.956.650,00	2.043.595.248,00	100,82
9	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.500.000,00	20.653.000,00	375,51
11	Retribusi rumah potong hewan	244.000.000,00	240.293.000,00	98,48
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	230.000.000,00	227.716.860,00	99,01
13	Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	55.640.000,00	52.901.000,00	95,08
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	175.000.000,00	177.030.000,00	101,16
	Subtotal Retribusi Jasa Usaha	***2.756.296.650,00***	***2.781.389.108,00***	***100,91***
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	15.000.000,00	3.400.000,00	22,67
17	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00
18	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	880.209.643,00	100,00
19	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	187.000.000,00	220.932.600,00	118,15
	Subtotal Retribusi Perizinan Tertentu	**1.002.000.000,00**	**1.104.542.243,00**	**110,23**
	Jumlah	**11.465.689.150,00**	**14.933.984.444,00**	**130,25**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp11.465.689.150,00 dengan realisasi senilai Rp14.933.984.444,00 atau 130,25%.

Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.506.654.100,00	5.000.751.400,00	1.505.902.700,00	30,11
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.799.438.000,00	1.381.743.000,00	417.695.000,00	30,23
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	115.204.000,00	200.410.000,00	(85.206.000,00)	(42,52)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.857.949.943,00	1.373.778.748,00	484.171.195,00	35,24
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	571.532.950,00	368.375.450,00	203.157.500,00	55,15
6	Retribusi Penyedotan dan/atau Penyedotan Kakus	1.000.000,00	5.400.000,00	(4.400.000,00)	(81,48)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	196.274.100,00	184.178.000,00	12.096.100,00	6,57
	Subtotal Retribusi Jasa Umum	***11.048.053.093,00***	***8.514.636.598,00***	***2.533.416.495,00***	***29,75***
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.043.595.248,00	1.182.769.820,00	860.825.428,00	72,78
9	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	19.200.000,00	6.000.000,00	13.200.000,00	220,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	20.653.000,00	1.500.000,00	19.153.000,00	1.276,87
11	Retribusi rumah potong hewan	240.293.000,00	284.173.000,00	(43.880.000,00)	(15,44)
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	227.716.860,00	220.175.537,00	7.541.323,00	3,43
13	Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	52.901.000,00	35.934.000,00	16.967.000,00	47,22
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	177.030.000,00	140.829.000,00	36.201.000,00	25,71
	Subtotal Retribusi Jasa Usaha	**2.781.389.108,00**	***1.871.381.357,00***	***910.007.751,00***	***48,63***
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	60.103.966,00	(60.103.966,00)	(100,00)
16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.400.000,00	13.200.000,00	(9.800.000,00)	(74,24)
17	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	18.597.600,00	(18.597.600,00)	(100,00)
18	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	880.209.643,00	0,00	880.209.643,00	100,00
19	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	220.932.600,00	0,00	220.932.600,00	100,00
	Subtotal Retribusi Perizinan Tertentu	**1.104.542.243,00**	**91.901.566,00**	**1.012.640.677,00**	**1.101,88**
	Jumlah	**14.933.984.444,00**	**10.477.919.521,00**	**4.456.064.923,00**	**42,53**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah merealisasikan Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp14.933.984.444,00

dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp10.477.919.521,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.456.064.923,00 atau 42,53%.

Dari rincian realisasi diatas terdapat **kenaikan** dan **penurunan** nilai retribusi antara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Target Retribusi Jasa Umum dianggarkan senilai Rp7.707.392.500,00 dan telah direalisasikan senilai Rp11.048.053.093,00 atau 143,34%. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
Target Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp4.500.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp6.506.654.100,00 atau 144,59%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami **kenaikan** senilai Rp1.505.902.700,00 atau 30,11% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.000.751.400,00. Pemungutan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 76 Tahun 2019. Adapun penyebab kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan diantaranya:

a) Tagihan BPJS Kesehatan yang boleh diklaimkan ke kantor BPJS dan telah dibayarkan oleh BPJS kesehatan.
b) Karena adanya peningkatan kunjungan pasien RSUD Talisayan.
c) Tersedianya pelayanan spesialis pada RSUD Talisayan, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis bedah.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp1.500.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp1.799.438.000,00 atau 119,96%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan mengalami **kenaikan** senilai Rp417.695.000,00 atau 30,23% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.381.743.000,00. **Kenaikan** realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan disebabkan karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bekerja sama dengan pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakal dalam pemungutan retribusinya.

3) Retribusi Pelayanan Parkir

Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp102.517.500,00 dan direalisasikan senilai Rp115.204.000,00 atau 112,37%. Penerimaan Retribusi Parkir mengalami **penuruan** senilai Rp85.206.000,00 atau 42,52% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp200.410.000,00. **Penurunan** Retribusi Pelayanan Parkir disebabkan karena MoU antara kantor Samsat dengan Dinas

Perhubungan belum ada kerjasama lagi sehingga belum dapat melakukan kegiatan penertiban retribusi parkir secara maksimal.

4) Retribusi Pelayanan Pasar

Target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp1.302.475.000,00 dan direalisasikan senilai Rp1.857.949.943,00 atau 142,65%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar mengalami **kenaikan** senilai Rp484.171.195,00 atau 35,24% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.373.778.748,00. **Kenaikan** Retribusi Pelayanan Pasar disebabkan karena tingginya pengunjung pasar sehingga pedagang mengalami kenaikan penghasilan. Retribusi pelayanan Pasar dipungut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp200.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp571.532.950,00 atau 285,77%. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengalami **kenaikan** senilai Rp203.157.500,00 atau 55,15% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp368.375.450,00. Hal ini disebabkan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Berau mulai beroperasi pada akhir bulan September 2021 setelah memenuhi persyaratan akreditasi dari Kementerian Perhubungan dan menyediakan sarana dan prasarana terkait penerapan penggunaan bukti lulus uji secara elektronik. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Dinas Perhubungan.

6) Retribusi Penyedotan dan/atau Penyedotan Kakus

Target Retribusi Penyedotan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp2.400.000,00 dan direaliasikan senilai Rp1.000.000,00 atau 41,67%. Penerimaan Retribusi Penyedotan Kakus mengalami **penurunan** senilai Rp4.400.000,00 atau 81,48% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.400.000,00. Retribusi penyedotan kakus dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Target Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp100.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp196.274.100,00 atau 196,27%. Penerimaan Retribusi Tera/Tera ulang mengalami **kenaikan** senilai Rp12.096.100,00 atau 6,57% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp184.178.000,00. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

b. Target Retribusi Jasa Usaha dianggarkan senilai Rp2.756.296.650,00 dan telah direalisasikan senilai Rp2.781.389.108,00 atau 100,91%. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Target Retribusi Pemakaian Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp2.026.956.650,00 dan direalisasikan senilai Rp2.043.595.248,00 atau 100,82%. Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami **kenaikan** senilai Rp860.825.428,00 atau 72,78% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.182.769.820,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah, yaitu:

a) Dinas Pendidikan (SKB)
b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
c) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
d) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
e) Sekretariat Daerah (Kantor Penghubung/Mess Berau)

2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Target Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp19.200.000,00 dan direalisasikan senilai Rp19.200.000,00 atau 100,00%. Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan mengalami **kenaikan** senilai Rp13.200.000,00 atau 220,00% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp6.000.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan hanya menyewakan *cool box* dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan PPI (Pusat Pendaratan Ikan) dialihkan ke provinsi. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.

3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Target Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp5.500.000,00 dan direalisasikan senilai Rp20.653.000,00 atau 375,51%. Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir mengalami **kenaikan** senilai Rp19.153.000,00 atau 1.276,87% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.500.000,00.

4) Retribusi Rumah Potong Hewan

Target Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp244.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp240.293.000,00 atau 98,48%. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami **penurunan** senilai Rp43.880.000,00 atau 15,44% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp284.173.000,00. Hal ini disebabkan oleh menurunnya konsumsi masyarakat terhadap hewan potong dan naik turunnyaharga hewan potong. Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.

5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Target Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp230.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp227.716.860,00 atau 99,01%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan mengalami **kenaikan** senilai Rp7.541.323,00 atau 3,43%

dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp220.175.537,00. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut oleh Dinas Perhubungan.

6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Target Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp55.640.000,00 dan direalisasikan senilai Rp52.901.000,00 atau 95,08%. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami **kenaikan** senilai Rp16.967.000,00 atau 47,22% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp35.934.000,00.

7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Target Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp175.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp177.030.000,00 atau 101,16%. Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami **kenaikan** senilai Rp36.201.000,00 atau 25,71% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp140.829.000,00. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Perikanan.

c. Target Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan senilai Rp1.002.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp1.104.542.243,00 atau 110,23%. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp800.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00%. Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami **penurunan** senilai Rp60.103.966,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp60.103.966,00 Hal ini disebabkan oleh kesalahan penganggaran karena peralihan Izin Mendirikan Bangunan ke Persetujuan Bangunan Gedung. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut oleh DPMPTSP.

2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Target Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp15.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp3.400.000,00 atau 22,67%. Penerimaan Retribusi Izin Trayek mengalami **penurunan** senilai Rp9.800.000,00 atau 74,24% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp13.200.000,00. Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan.

3) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Target Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00%. Penerimaan Retribusi IMTA mengalami **penurunan** senilai Rp18.597.600,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp18.597.600,00. Hal ini disebabkan adanya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mengharuskan

Peraturan Daerah yang lama tentang Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing diubah menjadi Peraturan Daerah Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Jika daerah tidak membuat Perda sebagaimana amanat UU Cipta Kerja dan turunannya, retribusi tidak dapat dipungut.

4) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Target Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp880.209.643,00. Tahun 2022 Anggaran dan Realisasi Rertibusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak ada karena nomenklaturnya masih menggunakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan baru diubah di Tahun 2023. Gedung Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak dianggarkan karena adanya kesalahan penanggaran yang mana anggaranya masih di alokasikan pada nomenkaltur lama yakni Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (*point c Retribusi Perizinan Tertentu no.1*) .

5) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Target Retribusi TKA TA 2023 dianggarkan senilai Rp187.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp220.932.600,00 atau 118,15%. Tahun 2022 Anggaran dan Realisasi Retribusi tidak ada karena nomenkalturnya masih menggunakan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan baru diubah di Tahun 2023 (*point c Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) no.3*).

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Tahun 2023	Tahun 2022
	16.119.182.280,09	19.370.432.054,45

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya dikelola Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Berau (Bagian Perekonomian) yaitu berupa dividen dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dividen PT BPD Kaltimtara	14.636.429.316,00	14.636.429.316,09	100,00
2	Dividen PT Hutan Sanggam Labanan Lestari	614.369.197,00	614.369.197,00	100,00
3	Dividen PT. Indo Pusaka Berau	0,00	499.997.100,00	100,00
4	Dividen Perumda Air Minum Batiwakal	368.386.667,00	368.386.667,00	100,00
5	Dividen Perumda Bhakti Praja	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**17.619.185.180,00**	**16.119.182.280,09**	**91,49**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah senilai Rp17.619.185.180,00 dengan realisasi senilai Rp16.119.182.280,09 atau 91,49%.

Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Deviden PT BPD Kaltimtara	14.636.429.316,09	14.109.010.255,45	527.419.060,64	3,74
2	Dividen PT HutanSanggam Labanan Lestari	614.369.197,00	83.058.253,00	531.310.944,00	639,68
3	Deviden PT. Indo Pusaka Berau	499.997.100,00	4.803.033.538,00	(4.303.036.438,00)	(89,59)
4	Deviden Perumda Air Minum Batiwakal	368.386.667,00	375.330.008,00	(6.943.341,00)	(1,85)
5	Deviden Perumda Bhakti Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**16.119.182.280,09**	**19.370.432.054,45**	**(3.251.249.774,36)**	**(16,78)**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah merealisasikan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah senilai Rp16.119.182.280,09 dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp19.370.432.054,45 mengalami **penurunan** senilai Rp3.251.249.774,36 atau 16,78%. Mengalami **penurunan** disebabkan karena menurunnya realisasi pada PT Indo Pusaka Berau dan Perumda Air Minum Batiwakal.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain - Lain PAD Yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022
	162.234.007.464,69	167.703.485.289,95

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan pendapatan yang terdiri dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Berau yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Abdul Rivai, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas

Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penghubung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dirincikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	398.064.907,00	278.888.853,45	70,06
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	8.400.000,00	12.699.000,00	151,18
3	Penerimaan Jasa Giro	12.200.537.858,00	20.162.740.302,79	165,26
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	9.600.000,00	25.144.444,00	261,92
5	Pendapatan Bunga	27.283.000.000,00	36.364.480.049,19	133,29
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	502.800.000,00	4.954.539.363,68	985,39
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	664.592.690,98	100,00
8	Pendapatan Denda Pajak	60.000.000,00	155.564.419,00	259,27
9	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	47.203.221,00	100,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	180.000.000,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	2.480.239,00	100,00
13	Pendapatan BLUD	90.201.377.000,00	89.860.617.262,60	99,62
14	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	14.391.181,00	13.609.000,00	94,56
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.227.820.475,00	9.691.448.619,00	105,02
16	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**140.085.991.421,00**	**162.234.007.464,69**	**115,81**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Pendapatan Lain–Lain PAD Yang Sah senilai Rp140.085.991.421,00 dengan realisasi senilai Rp162.234.007.464,69 atau 115,81%.

Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	278.888.853,45	479.052.291,00	(200.163.437,55)	(41,78)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	12.699.000,00	11.993.000,00	706.000,00	5,89
3	Penerimaan Jasa Giro	20.162.740.302,79	5.588.247.086,77	14.574.493.216,02	260,81
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25.144.444,00	26.353.000,00	(1.208.556,00)	(4,59)
5	Pendapatan Bunga	36.364.480.049,19	7.012.115.682,96	29.352.364.366,23	418,59

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	4.954.539.363,68	3.317.110.913,04	1.637.428.450,64	49,36
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	664.592.690,98	534.400.135,82	130.192.555,16	24,36
8	Pendapatan Denda Pajak	155.564.419,00	174.387.790,00	(18.823.371,00)	(10,79)
9	Pendapatan Denda Retribusi	47.203.221,00	80.124.291,00	(32.921.070,00)	(41,09)
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	366.127.040,20	(366.127.040,20)	(100,00)
11	Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	2.480.239,00	4.640.378,00	(2.160.139,00)	(46,55)
13	Pendapatan BLUD	89.860.617.262,60	145.679.508.556,16	(55.818.891.293,56)	(38,32)
14	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	13.609.000,00	0,00	13.609.000,00	100,00
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.691.448.619,00	4.428.975.125,00	5.262.473.494,00	118,82
16	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**162.234.007.464,69**	**167.703.485.289,95**	**(5.469.477.825,26)**	**(3,26)**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah merealisasikan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah senilai Rp162.234.007.464,69 dan Tahun Anggaran 2022 realisasi senilai Rp167.703.485.289,95 mengalami **penurunan** senilai Rp5.469.447.825,26 atau 3,26%.

Dari rincian realisasi diatas terdapat kenaikan dan penurunan nilai Lain-lain PAD yang sah antara Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2022, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Target Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp398.064.907,00 dan direalisasikan senilai Rp278.888.853,45 atau 70,06% mengalami **penurunan** senilai Rp200.163.437,55 atau 41,78% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp479.052.291,00. Penurunan terjadi dikarenakan Surat Keputusan Bupati Nomor 591 Tahun 2019 sementara masih menunggu petunjuk dari Mendagri untuk penjualan Tanah Kapling Pegawai sehingga belum dapat direalisasikan.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Target Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp8.400.000,00 dan direalisasikan senilai Rp12.699.000,00 atau 151,18%. mengalami **kenaikan** senilai Rp706.000,00 atau 5,89% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp11.993.000,00. Kenaikan dikarenakan perubahan nomenklatur Pendapatan Hasil dari Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 menjadi pemanfaatan BMD.

c. Pendapatan Jasa Giro

Target Pendapatan Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp12.200.537.858,00 dan direalisasikan senilai Rp20.162.740.302,79 atau 165,26% mengalami **kenaikan** senilai Rp14.574.493.216,02 atau 260,81% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.588.247.086,77. Naik turunnya Pendapatan Jasa Giro dipengaruhi jumlah dana yang ada dalam RKUD, jika anggaran dalam RKUD tinggi maka pendapatan jasa giro akan meningkat begitu pula sebaliknya.

d. Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir

Target Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp9.600.000,00 dan direalisasikan senilai Rp25.144.444,00 atau 261,92% mengalami **penurunan** senilai Rp1.208.556,00 atau 4,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp26.353.000,00.

e. Pendapatan Bunga Deposito

Target Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp27.283.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp36.364.480.049,19 atau 133,29% mengalami **kenaikan** senilai Rp29.352.364.366,23 atau 418,59% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp7.012.115.682,96. Kenaikan terjadi dikarenakan pada tahun tersebut adanya penambahan deposito Bank Mandiri dan suku bunga kredit mengalami kenaikan, Kenaikan bunga itu otomatis akan menambah manfaat yang bisa diperoleh.

f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Target Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp502.800.000,00 dan direalisasikan Rp4.954.539.363,68 atau 985,39,33% mengalami **kenaikan** senilai Rp1.637.428.450,64 atau 49,36% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.317.110.913,04 kenaikan realisasi dikarenakan adanya setoran pengembalian kelebihan volume pekerjaan dan setoran lainnya.

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Target Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp0,00 dan direalisasikan senilai Rp664.592.690,98 mengalami **kenaikan** senilai Rp130.192.555,16 atau 24,36% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp534.400.135,82. Kenaikan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dikarenakan pelaksanaan pekerjaan fisik dilakukan tidak begitu baik dan menurunnya kapasitas serta progress pelaksanaan pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya.

h. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Target Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp60.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp155.564.419,00 atau 259,27% mengalami **penurunan** senilai Rp18.823.371,00 atau 10,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp174.387.790,00.

Menurunnya Pendapatan Denda Pajak Daerah dikarenakan semasa Pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Berau menerbitkan Perbup Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak serta adanya perpanjangan jatuh tempo PBB P2 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 364 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Jatuh Tempo PBB P2, sehingga mengurangi pendapatan denda pajak pada PBB P2.

i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan namun ada realiasi senilai Rp47.203.221,00 mengalami **penurunan** senilai Rp32.921.070,00 atau 41,09% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp80.124.291,00. Adanya realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah disebabkan banyak objek-objek retribusi yang ditutup semasa Pandemi Covid-19 kembali beroperasi.

j. Pendapatan dari Pengembalian

Target Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp180.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00% mengalami **penurunan** senilai Rp366.127.040,20 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp366.127.040,20.

k. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan tidak dianggarkan di Tahun 2023 namun terdapat realisasi senilai Rp2.480.239,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp4.640.378,00 mengalami **penurunan** senilai Rp2.160.139,00 atau 46,55%.

l. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp90.201.377.000,00 dan direalisasikan senilai Rp89.860.617.262,60 atau 99,62% mengalami **penurunan** senilai Rp55.818.891.293,56 atau 38,32% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp145.679.508.556,16. Menurunnya realisasi pendapatan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya pelayanan pasien di Tahun Anggaran 2023. Sehingga itu juga terjadi penurunan pendapatan pada pelayanan umum dan pendapatan lain-lainnya yang sah.

m. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp14.391.181,00 dan direalisasikan senilai Rp13.609.000,00 atau 94,56%. Tidak terdapat realisasi di Tahun Anggaran 2022.

n. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp9.227.820.475,00 dan direalisasikan senilai Rp9.691.448.619,00 atau 105,02% mengalami **kenaikan** senilai Rp5.262.473.494,00 atau 118,82% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai

Rp4.428.975.125,00. Terkait dengan perhitungan Jasa Pelayanan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 dan naik turunnya transfer dana tidak menetap karena berdasarkan jumlah peserta perbulannya artinya jika peserta meningkat maka pendapatan akan meningkat.

o. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp450.000,00 atau 100,00%. Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit akibat Covid-19 dengan sasaran prokes tempat umum tepian, rumah makan, kafe/restoran, tempat hiburan malam, gor, tempat bermain anak-anak, serta tempat-tempat olahraga.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022
	4.406.411.710.669,00	2.869.867.002.747,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**3.233.006.863.800,00**	**3.579.099.939.714,00**	**110,70**
-	Dana Bagi Hasil	2.476.224.886.800,00	2.846.123.582.480,00	114,94
-	Dana Alokasi Umum	566.612.593.000,00	565.773.403.521,00	99,85
-	Dana Alokasi Khusus - Fisik	61.943.730.000,00	52.763.540.954,00	85,18
-	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	128.225.654.000,00	114.439.412.759,00	89,25
2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**93.677.389.000,00**	**93.677.389.000,00**	**100,00**
-	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
-	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
-	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
-	Dana Desa	93.677.389.000,00	93.677.389.000,00	100,00
3	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**739.230.082.155,00**	**733.634.381.955,00**	**99,24**
-	Pendapatan Bagi Hasil	514.717.582.155,00	509.121.881.955,00	98,91
-	Bantuan Keuangan	224.512.500.000,00	224.512.500.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	**4.065.914.334.955,00**	**4.406.411.710.669,00**	**108,37**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan Pendapatan Transfer senilai Rp4.065.914.334.955,00 dan direalisasikan senilai Rp4.406.411.710.669,00 atau 108,37%.

Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**3.579.099.939.714,00**	**2.350.774.212.350,00**	**1.228.325.727.364,00**	**52,25**
-	Dana Bagi Hasil	2.846.123.582.480,00	1.659.023.908.668,00	1.187.099.673.812,00	71,55
-	Dana Alokasi Umum	565.773.403.521,00	545.240.741.789,00	20.532.661.732,00	3,77
-	Dana Alokasi Khusus - Fisik	52.763.540.954,00	48.847.810.234,00	3.915.730.720,00	8,02
-	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	114.439.412.759,00	97.661.751.659,00	16.777.661.100,00	17,18
2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**93.677.389.000,00**	**87.834.603.000,00**	**5.842.786.000,00**	**6,65**
-	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dana Desa	93.677.389.000,00	87.834.603.000,00	5.842.786.000,00	6,65
3	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**733.634.381.955,00**	**431.258.187.397,00**	**302.376.194.558,00**	**70,11**
-	Pendapatan Bagi Hasil	509.121.881.955,00	336.097.187.397,00	173.024.694.558,00	51,48
-	Bantuan Keuangan	224.512.500.000,00	95.161.000.000,00	129.351.500.000,00	135,93
	Jumlah Pendapatan Transfer	**4.406.411.710.669,00**	**2.869.867.002.747,00**	**1.536.544.707.922,00**	**53,54**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah merealisasikan Pendapatan Transfer senilai Rp4.406.411.710.669,00 dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.869.867.002.747,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.536.544.707.922,00 atau 53,54%.

Dari tabel diatas Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggara 2022 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang dapat dilihat pada gambar grafik berikut :



Gambar 5.5 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023



Gambar 5.6 Perbandingan Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan disajikan sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Perimbangan	3.579.099.939.714,00	2.350.774.212.350,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusun (DAK) Non Fisik. Uraian Anggaran Dana Perimbangan yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dalam mendanai kewenangannya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.476.224.886.800,00	2.846.123.582.480,00	114,94
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	566.612.593.000,00	565.773.403.521,00	99,85
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.943.730.000,00	52.763.540.954,00	85,18
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	128.225.654.000,00	114.439.412.759,00	89,25
	Jumlah	**3.233.006.863.800,00**	**3.579.099.939.714,00**	**110,70**

Dari penjelasan tabel diatas Anggaran Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.233.006.863.800,00 dan direalisasikan senilai Rp3.579.099.939.714,00 atau 110,70 %.

Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (penurunan)	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.846.123.582.480,00	1.659.023.908.668,00	1.187.099.673.812,00	71,55
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	565.773.403.521,00	545.240.741.789,00	20.532.661.732,00	3,77
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.763.540.954,00	48.847.810.234,00	3.915.730.720,00	8,02
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	114.439.412.759,00	97.661.751.659,00	16.777.661.100,00	17,18
	Jumlah	**3.579.099.939.714,00**	**2.350.774.212.350,00**	**1.228.325.727.364,00**	**52,25**

Dari penjelasan tabel diatas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah merealisasikan Pendapatan Transfer senilai Rp3.579.099.939.714,00 dan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.350.774.212.350,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.228.325.727.364,00 atau 52,25%.

5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil (DBH)

	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Bagi Hasil (DBH)	2.846.123.582.480,00	1.659.023.908.668,00

Anggaran Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.476.224.886.800,00 dengan Realisasi senilai Rp2.846.123.582.480,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)			
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	77.254.889.885,00	66.987.244.000,00	86,71
2	DBH PPh Pasal 21	34.110.081.011,00	31.071.039.000,00	91,09
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	38.557.945,00	1.039.363.000,00	2.695,59
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.285,00	0,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	72.626.432.518,00	25.425.748.000,00	35,01
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	43.358.806.000,00	100,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	4.962.407.000,00	100,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.255.132.803.173,00	2.619.649.042.480,00	116,16

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.874.279.377,00	48.423.834.000,00	1.249,88
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	27.875.835.000,00	0,00	0,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.311.975.606,00	5.206.099.000,00	98,01
13	DBH PBB Bagi Rata Bagian Daerah	0,00	0,00	0,00
14	Biaya Pemungutan PBB	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**2.476.224.886.800,00**	**2.846.123.582.480,00**	**114,94**

Realisasi Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.846.123.582.480,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.187.099.673.812,00 atau 71,55% dari Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.659.023.908.668,00 dengan rincian perbandingan realisasi pada tabel berikut :

Tabel 5.18 Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)					
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	66.987.244.000,00	58.259.279.476,00	8.727.964.524,00	14,98
2	DBH PPh Pasal 21	31.071.039.000,00	32.231.236.000,00	(1.160.197.000,00)	(3,60)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.039.363.000,00	623.411.000,00	415.952.000,00	66,72
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	25.425.748.000,00	59.203.845.797,00	(33.778.097.797,00)	(57,05)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	43.358.806.000,00	97.305.557.930,00	(53.946.751.930,00)	(55,44)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Landrent*	4.962.407.000,00	2.921.732.518,00	2.040.674.482,00	69,84
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Royalty*	2.619.649.042.480,00	1.369.449.664.219,00	1.250.199.378.261,00	91,29
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	48.423.834.000,00	22.001.005.000,00	26.422.829.000,00	120,10
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	8.060.871.000,00	(8.060.871.000,00)	(100,00)
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.206.099.000,00	1.958.311.000,00	3.247.788.000,00	165,85
13	DBH PBB Bagi Rata Bagian Daerah	0,00	3.820.583.000,00	(3.820.583.000,00)	(100,00)
14	Biaya Pemungutan PBB	0,00	3.188.411.728,00	(3.188.411.728,00)	(100,00)
	Jumlah	**2.846.123.582.480,00**	**1.659.023.908.668,00**	**1.187.099.673.812,00**	**71,55**

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) di jelaskan sebagai berikut :

a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp66.987.244.000,00 atau 86,71% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp77.254.889.885,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp8.727.964.524,00 atau 14,98% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp58.259.279.476,00. Terjadi **kenaikan** realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2023 disebabkan realisasi transfer pusat yang masuk ke daerah lebih besar dari target yang sudah di tetapkan.

b. DBH PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp31.071.039.000,00 atau 91,09% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp34.110.081.011,00 mengalami **penurunan** senilai Rp1.160.197.000,00 atau 3,60% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp32.231.236.000,00. Penurunan dikarenakan Pengurangan nilai transfer.

c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp1.039.363.000,00 atau 2.695,59% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp38.557.945,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp415.952.000,00 atau 66,72%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp623.411.000,00.

d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp32.285,00. Tidak tercapainya target realisasi dikarenakan anggaran tidak ditransfer oleh pusat ke daerah.

e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp25.425.748.000,00 atau 35,01% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp72.626.432.518,00 mengalami **penurunan** senilai Rp33.778.097.797,00 atau 57,05% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp59.203.845.797,00. Terjadi penurunan dikarenakan transfer pusat ke daerah kurang target pagu Anggaran Tahun 2023.

f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp43.358.806.000,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00 mengalami **penurunan** senilai Rp53.946.751.930,00 atau 55,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp97.305.557.930,00. Terjadi penurunan dikarenakan transfer pusat ke daerah kurang target pagu Anggaran Tahun 2023.

g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Landrent* Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp4.962.407.000,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp0,00 atau 100%. Mengalami **kenaikan** senilai Rp2.040.674.482,00 atau 69,84% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.921.732.518,00. Terjadi penurunan dikarenakan target pagu Anggaran Tahun 2023 kurang.

h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Royalty* Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp2.619.649.042.480,00 atau 116,16% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp2.255.132.803.173,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.250.199.378.261,00 atau 91,29% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.369.449.664.219,00. Terjadi kenaikan realisasi dikarenakan transfer pusat melebihi target pagu anggaran yang telah ditetapkan dan transfer dana TDF.

i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp48.423.834.000,00 atau 1.249,88% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp3.874.279.377,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp26.422.829.000,00 atau 120,10%. dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp22.001.005.000,00. Terjadi kenaikan dikarenakan besarnya transfer Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

j. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp27.875.835.000,00.

k. Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5.206.099.000,00 atau 98,01% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp5.311.975.606,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.247.788.000,00 atau 165,85% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.958.311.000,00. Terjadi kenaikan realiasasi Tahun 2023 dikarenakan realisasi tranfser dan target anggaran yang sudah ditetapkan sudah sesuai dengan perpres.

l. DBH PBB Bagi Rata Bagian Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan atau senilai Rp0,00, mengalami **penurunan** jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.820.583.000,00.

m. Biaya Pemungutan PBB Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan atau senilai Rp0,00, mengalami **penurunan** jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.188.411.728,00.

5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DAU	Tahun 2023	Tahun 2022
	565.773.403.521,00	545.240.741.789,00

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp565.773.403.521,00 atau 99,85% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp566.612.593.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp545.240.741.789,00,

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami **kenaikan** senilai Rp20.532.661.732,00 atau 3,77%.

5.1.1.2.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DAK Fisik	Tahun 2023	Tahun 2022
	52.763.540.954,00	48.847.810.234,00

Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 senilai Rp61.943.730.000,00 dengan realisasi senilai Rp52.763.540.954,00 atau 85,18%. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%.
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	496.353.000,00	495.548.000,00	99,84
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.555.190.000,00	1.554.779.000,00	99,97
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.460.281.000,00	3.921.024.800,00	87,91
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	750.500.000,00	701575520,00	93,48
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	305.896.000,00	303.793.650,00	99,31
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	510.306.000,00	490.615.000,00	96,14
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	9.366.262.000,00	0,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.214.634.000,00	1.001.360.000,00	82,44
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	41.320.702.000,00	40.464.710.201,00	97,93
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.963.606.000,00	1.901.600.000,00	96,84
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	1.928.534.783,00	100,00
Jumlah		**61.943.730.000,00**	**52.763.540.954,00**	**85,18**

Realisasi Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 senilai Rp52.763.540.954,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.915.730.720,00 atau 8,02% dari Tahun Anggaran 2022 senilai Rp48.847.810.234,00. Rincian realisasi DAK Fisik Tahun Anggran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik					
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	495.548.000,00	301.930.500,00	193.617.500,00	64,13
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.554.779.000,00	4.045.365.200,00	(2.490.586.200,00)	(61,57)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.921.024.800,00	5.993.014.500,00	(2.071.989.700,00)	(34,57)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	405.625.800,00	(405.625.800,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	701.575.520,00	0,00	701.575.520,00	100,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	303.793.650,00	1.707.786.544,00	(1.403.992.894,00)	(82,21)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	1.758.291.529,00	(1.758.291.529,00)	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	1.231.931.875,00	(1.231.931.875,00)	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	490.615.000,00	413.962.000,00	76.653.000,00	18,52
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	537.085.200,00	(537.085.200,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.001.360.000,00	8.031.441.650,00	(7.030.081.650,00)	(87,53)
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	40.464.710.201,00	6.598.473.604,00	33.866.236.597,00	513,24
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	6.930.365.390,00	(6.930.365.390,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	3.997.473.000,00	(3.997.473.000,00)	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.901.600.000,00	0,00	1.901.600.000,00	100,00
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	6.895.063.442,00	(6.895.063.442,00)	(100,00)
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.928.534.783,00	0,00	1.928.534.783,00	100,00
Jumlah		**52.763.540.954,00**	**48.847.810.234,00**	**3.915.730.720,00**	**8,02**

5.1.1.2.1.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan -Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DAK Non Fisik	114.439.412.759,00	97.661.751.659,00

Anggaran Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 senilai Rp128.225.654.000,00 dengan realisasi

senilai Rp114.439.412.759,00 atau 89,25%. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	46.295.200.000,00	45.107.565.040,00	97,43
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.465.000.000,00	1.280.000.000,00	87,37
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	43.330.397.855,00	100,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	50.757.630.000,00	1.693.579.405,00	3,34
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	1.201.791.195,00	100,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.911.680.000,00	4.904.526.155,00	99,85
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.913.320.000,00	1.912.415.400,00	99,95
8	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	2.598.346.370,00	100,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	8.337.644.000,00	100,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00
13	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	808.626.000,00	686.055.864,00	84,84
17	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	406.900.000,00	0,00	0,00
18	DAK Non Fisik-BOKB-KB	20.731.203.000,00	2.633.217.275,00	12,70
19	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	566.725.000,00	512.471.600,00	90,43
21	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	369.370.000,00	241.402.600,00	65,36
	Jumlah	**128.225.654.000,00**	**114.439.412.759,00**	**89,25**

Realisasi Pendapatan Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 senilai Rp114.439.412.759,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp16.777.661.100,00 atau 17,18% dari Tahun Anggaran 2022 senilai Rp97.661.751.659,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik					
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.107.565.040,00	37.216.178.021,00	7.891.387.019,00	21,20
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.280.000.000,00	520.000.000,00	760.000.000,00	146,15
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	43.330.397.855,00	40.282.626.923,00	3.047.770.932,00	7,57
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.693.579.405,00	1.998.949.060,00	(305.369.655,00)	(15,28)
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.201.791.195,00	1.844.823.000,00	(643.031.805,00)	(34,86)
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.904.526.155,00	4.419.169.000,00	485.357.155,00	10,98
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.912.415.400,00	1.443.000.000,00	469.415.400,00	32,53
8	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	169.461.800,00	(169.461.800,00)	(100,00)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.598.346.370,00	4.156.214.578,00	(1.557.868.208,00)	(37,48)
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.337.644.000,00	0,00	8.337.644.000,00	100,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	2.042.041.577,00	(2.042.041.577,00)	(100,00)
14	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	1.929.059.000,00	(1.929.059.000,00)	(100,00)
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	686.055.864,00	929.201.700,00	(243.145.836,00)	(26,17)
17	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	240.027.000,00	(240.027.000,00)	(100,00)
18	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.633.217.275,00	0,00	2.633.217.275,00	100,0
19	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	512.471.600,00	471.000.000,00	41.471.600,00	8,81
21	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	241.402.600,00	0,00	241.402.600,00	100,00
	Jumlah	**114.439.412.759,00**	**97.661.751.659,00**	**16.777.661.100,00**	**17,18**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022
Pemerintah Pusat Lainnya	93.677.389.000,00	87.834.603.000,00

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp93.677.389.000,00 dengan realisasi senilai Rp93.677.389.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	93.677.389.000,00	93.677.389.000,00	100,00
	Total	**93.677.389.000,00**	**93.677.389.000,00**	**100,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp93.677.389.000,00 mengalami **kenaikan** 5.842.786.000,00 atau 6,65% dari Tahun Anggaran 2022 senilai Rp87.834.603.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	93.677.389.000,00	87.834.603.000,00	5.842.786.000,00	6,65
	Total	**93.677.389.000,00**	**87.834.603.000,00**	**5.842.786.000,00**	**6,65**

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
	0,00	0,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00 karena tidak ditargetkan pada saat penganggaran Tahun 2023.

5.1.1.2.2.2 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Kabupaten Berau tidak ada target maupun realisasi di Tahun 2023.

5.1.1.2.2.3 Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan Kabupaten Berau tidak ada target maupun realisasi di Tahun 2023.

5.1.1.2.2.4 Dana Desa

Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp93.677.389.000,00 dengan realisasi senilai Rp93.677.389.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dana Desa	93.677.389.000,00	93.677.389.000,00	100,00
	Total	**93.677.389.000,00**	**93.677.389.000,00**	**100,00**

*)Rincian anggaran pendapatan Dana Desa pada **Lampiran 1**

Dana Desa Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp93.677.389.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.842.786.000,00 atau 6,65% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp87.834.603.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26 Realisasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Dana Desa	93.677.389.000,00	87.834.603.000,00	5.842.786.000,00	6,65
	Total	**93.677.389.000,00**	**87.834.603.000,00**	**5.842.786.000,00**	**6,65**

*)Rincian realisasi pendapatan Dana Desa pada **Lampiran 1**

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Antar Daerah	733.634.381.955,00	431.258.187.397,00

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp739.230.082.155,00 dengan realisasi senilai Rp733.634.381.955,00 atau 99,24%. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Transfer Antar Daerah	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Bagi Hasil	514.717.582.155,00	509.121.881.955,00	98,91
2	Bantuan keuangan	224.512.500.000,00	224.512.500.000,00	100,00
	Jumlah	**739.230.082.155,00**	**733.634.381.955,00**	**99,24**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp733.634.381.955,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp302.376.194.558,00 atau 70,11% dari Tahun Anggaran 2022 senilai Rp431.258.187.397,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.28 Realisasi Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Transfer Antar Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	509.121.881.955,00	336.097.187.397,00	173.024.694.558,00	51,48
2	Bantuan keuangan	224.512.500.000,00	95.161.000.000,00	129.351.500.000,00	135,93
	Jumlah	**733.634.381.955,00**	**431.258.187.397,00**	**302.376.194.558,00**	**70,11**

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Bagi Hasil	509.121.881.955,00	336.097.187.397,00

Anggaran Pendapatan Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 senilai Rp514.717.582.155,00 dengan realiasi senilai Rp509.121.881.955,00,00 atau 98,91%, dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Bagi Hasil	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30.152.357.000,00	26.178.027.000,00	86,82
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.040.996.000,00	32.040.996.000,00	100,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	434.555.578.155,00	434.555.578.155,00	100,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	994.838.000,00	635.502.000,00	63,88
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.973.813.000,00	15.711.778.800,00	92,56
	Jumlah	**514.717.582.155,00**	**509.121.881.955,00**	**98,91**

Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 senilai Rp509.121.881.955,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp173.024.694.558,00 atau 51,48% dari Tahun Anggaran 2022 Rp336.097.187.397,00. Kenaikan realisasi terjadi karena bertambahnya pendapatan pajak bagi hasil bahan bakar kendaraan bermotor sesuai SK Gubernur dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.30 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian Bagi Hasil	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.178.027.000,00	26.342.225.000,00	(164.198.000,00)	(0,62)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.040.996.000,00	28.264.006.000,00	3.776.990.000,00	13,36
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	434.555.578.155,00	266.168.929.481,00	168.386.648.674,00	63,26

(dalam rupiah)

No	Uraian Bagi Hasil	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	635.502.000,00	531.635.000,00	103.867.000,00	19,54
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.711.778.800,00	14.790.391.916,00	921.386.884,00	6,23
	Jumlah	**509.121.881.955,00**	**336.097.187.397,00**	**173.024.694.558,00**	**51,48**

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan	Tahun 2023	Tahun 2022
	224.512.500.000,00	95.161.000.000,00

Anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp224.512.500.000,00 dengan realisasi senilai Rp224.512.500.000,00 atau 100,00%. Anggaran Bantuan Keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Bantuan Keuangan	224.512.500.000,00	224.512.500.000,00	100,00
	Jumlah	**224.512.500.000,00**	**224.512.500.000,00**	**100,00**

Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp224.512.500.000,00 mengalami **kenaikan** Rp129.351.500.000,00 atau 135,93% dari Tahun Anggaran 2022 senilai Rp224.512.500.000,00. Kenaikan realisasi Tahun Anggaran 2023 terjadi karena sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan SK Gubernur Kalimantan Timur. Realisasi Bantuan Keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 5.32 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah –Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Bantuan Keuangan	224.512.500.000,00	95.161.000.000,00	129.351.500.000,00	135,93
	Jumlah	**224.512.500.000,00**	**95.161.000.000,00**	**129.351.500.000,00**	**135,93**

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.822.834.044,00	0,00

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 senilai Rp52.360.543.200,00 dengan realisasi senilai Rp7.822.834.044,00 atau 14,94% yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Hibah	45.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	7.360.543.200,00	7.822.834.044,00	106,28
	Jumlah	**52.360.543.200,00**	**7.822.834.044,00**	**14,94**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 senilai Rp7.822.834.044,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp7.822.834.044,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp0,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.34 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PendapatanLainnya	7.822.834.044,00	0,00	7.822.834.044,00	100,00
	Jumlah	**7.822.834.044,00**	**0,00**	**7.822.834.044,00**	**100,00**

5.1.2 BELANJA DAERAH

	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja	4.608.120.868.464,26	2.906.895.452.391,91

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan senilai Rp5.177.879.482.000,00 dengan realisasi Rp4.608.120.868.464,26 atau 89,00%. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan rincian tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Operasi	2.136.652.416.585,00	1.818.795.262.619,26	85,12
2	Belanja Modal	2.583.507.416.051,00	2.345.617.541.442,00	90,79
3	Belanja Tak Terduga	15.522.260.364,00	1.826.837.315,00	11,77
4	Belanja Transfer	442.197.389.000,00	441.881.227.088,00	99,93
	Jumlah	**5.177.879.482.000,00**	**4.608.120.868.464,26**	**89,00**



Gambar 5.7 Perbandingan Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.608.120.868.464,26 mengalami **kenaikan** Rp1.701.225.416.072,35 atau 58,52% dari Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.906.895.452.391,91. Dengan rincian tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.36 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Operasi	1.818.795.262.619,26	1.574.647.666.072,91	244.147.596.546,35	15,50
2	Belanja Modal	2.345.617.541.442,00	1.028.531.224.206,00	1.317.086.317.236,00	128,06
3	Belanja Tak Terduga	1.826.837.315,00	2.795.846.813,00	(969.009.498,00)	(34,66)
4	Belanja Transfer	441.881.227.088,00	300.920.715.300,00	140.960.511.788,00	46,84
	Jumlah	**4.608.120.868.464,26**	**2.906.895.452.391,91**	**1.701.225.416.072,35**	**58,52**



Gambar 5.8 Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Berdasarkan fungsi terdiri dari fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Kenaikan terbesar terjadi pada Realisasi Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.818.795.262.619,26 mengalami kenaikan senilai Rp244.147.596.546,35 atau 15,50% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.574.647.666.072,91. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.345.617.541.442,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.317.086.317.236,00 atau 128,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.028.531.224.206,00. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.826.837.315,00 mengalami penurunan senilai Rp969.009.498,00 atau 34,66% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.795.846.813,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 senilai Rp441.881.227.088,00 mengalami kenaikan senilai Rp140.960.511.788,00 atau 46,84% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp300.920.715.300,00. Rincian Belanja Daerah disajikan sebagai berikut :

5.1.2.1. Belanja Operasi

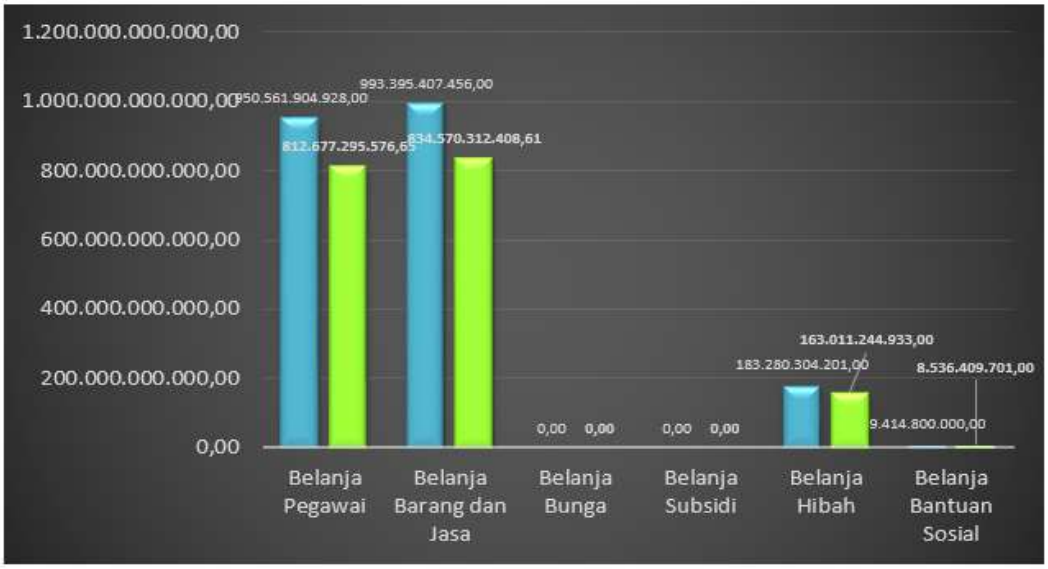
	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Operasi	1.818.795.262.619,26	1.574.647.666.072,91

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp2.136.652.416.585,00 dengan realisasi senilai Rp1.818.795.262.619,26 atau 85,12%. Rincian Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	950.561.904.928,00	812.677.295.576,65	85,49
2	Belanja Barang dan Jasa	993.395.407.456,00	834.570.312.408,61	84,01
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	183.280.304.201,00	163.011.244.933,00	88,94
6	Belanja Bantuan Sosial	9.414.800.000,00	8.536.409.701,00	90,67
	Jumlah	**2.136.652.416.585,00**	**1.818.795.262.619,26**	**85,12**



Gambar 5.9 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.818.795.262.619,26 mengalami **kenaikan** senilai Rp244.147.596.546,35 atau 15,50% dari Tahun Anggran 2022 senilai Rp1.574.647.666.072,91. Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.38 Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Pegawai	812.677.295.576,65	788.533.936.225,62	24.143.359.351,03	3,06
2	Belanja Barang dan Jasa	834.570.312.408,61	698.410.047.416,22	136.160.264.992,39	19,50
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	163.011.244.933,00	80.981.838.137,07	82.029.406.795,93	101,29

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
6	Belanja Bantuan Sosial	8.536.409.701,00	6.721.844.294,00	1.814.565.407,00	27,00
	Jumlah	**1.818.795.262.619,26**	**1.574.647.666.072,91**	**244.147.596.546,35**	**15,50**



Gambar 5.10 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi yaitu sebagai berikut :

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Tahun 2023	Tahun 2022
	812.677.295.576,65	788.533.936.225,62

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS/PPPK Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimam Pimpinan dan Anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS dan uang lembur. Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 senilai Rp950.561.904.928,00 dengan realisasi senilai Rp812.677.295.576,65 atau 85,49% yang disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

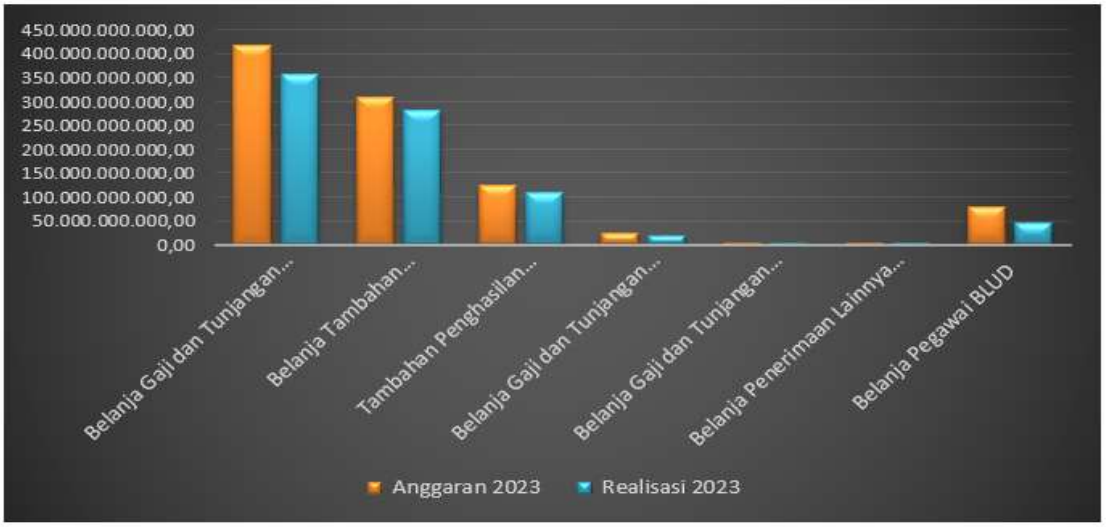
Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	416.968.375.021,00	355.920.527.971,00	85,36
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	307.353.508.188,00	281.100.224.750,00	91,46
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	123.332.345.664,00	108.899.525.171,87	88,30
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.734.694.884,00	19.830.034.174,00	83,55
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	498.140.000,00	470.730.000,00	94,50

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	952.500.000,00	912.480.000,00	95,80
7	Belanja Pegawai BLUD	77.722.341.171,00	45.543.773.509,78	58,60
	Jumlah	**950.561.904.928,00**	**812.677.295.576,65**	**85,49**



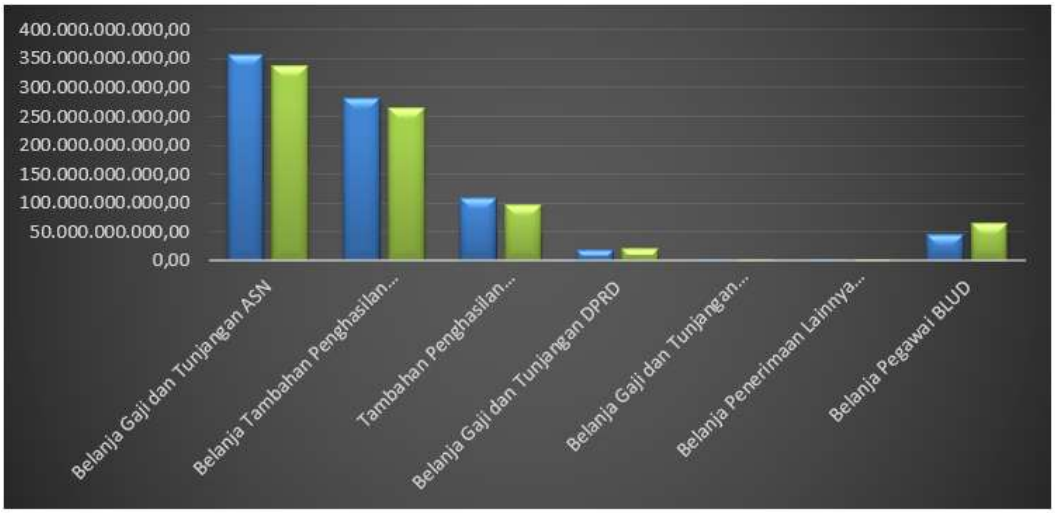
Gambar 5.11 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 senilai Rp812.677.295.576,65 mengalami **kenaikan** Rp24.143.359.351,03 atau 3,06% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp788.533.936.225,62 yang disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.40 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	355.920.527.971,00	337.554.562.355,00	18.365.965.616,00	5,44
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	281.100.224.750,00	264.517.809.032,00	16.582.415.718,00	6,27
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.899.525.171,87	98.102.068.622,40	10.797.456.549,47	11,01
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.830.034.174,00	21.755.729.364,00	(1.925.695.190,00)	(8,85)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	470.730.000,00	412.210.000,00	58.520.000,00	14,20
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	912.480.000,00	0,00	0,00
7	Belanja Pegawai BLUD	45.543.773.509,78	65.279.076.852,22	(19.735.303.342,44)	(30,23)
	Jumlah	**812.677.295.576,65**	**788.533.936.225,62**	**24.143.359.351,03**	**3,06**



Gambar 5.12 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 senilai Rp950.561.904.928,00 dengan realisasi senilai Rp812.677.295.576,65 atau 85,49%. Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 pada masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per OPD Tahun Angggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Dinas Pendidikan	334.255.027.918,00	292.322.300.309,00	87,45
2	Dinas Kesehatan	129.685.424.951,00	104.674.761.522,87	80,71
3	RSUD Abd Rivai	151.468.263.690,00	107.700.375.196,78	71,10
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	26.603.474.586,00	24.809.142.227,00	93,26
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	6.033.301.779,00	5.590.292.225,00	92,66
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	7.027.584.179,00	6.542.739.248,00	93,10
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.154.869.358,00	5.605.337.281,00	91,07
8	Dinas Sosial	5.585.108.774,00	5.157.325.763,00	92,34
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	5.563.965.399,00	5.030.663.078,00	90,42
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	6.926.846.460,00	6.421.702.859,00	92,71
11	Dinas Pangan	5.645.628.854,00	5.368.660.662,00	95,09
12	Dinas Pertanahan	3.867.203.119,00	3.418.662.786,00	88,40
13	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	11.165.390.303,00	10.139.700.260,00	90,81
14	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	5.630.360.287,00	5.075.021.894,00	90,14
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	5.574.464.284,00	5.168.614.512,00	92,72
16	Dinas Perhubungan	12.957.199.218,00	11.946.789.464,00	92,20
17	Dinas Komunikasi & Informatika	6.360.986.266,00	5.837.301.330,00	91,77
18	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	9.703.981.644,00	8.607.820.635,00	88,70
19	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.439.340.189,00	4.943.643.832,00	90,89
20	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	5.816.758.195,00	5.478.479.491,00	94,18

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	6.902.477.822,00	6.556.666.081,00	94,99
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	7.193.886.373,00	6.840.863.676,00	95,09
23	Dinas Perikanan	6.717.166.340,00	6.166.878.436,00	91,81
24	Dinas Pertanian & Peternakan	15.649.743.558,00	14.835.404.994,00	94,80
25	Dinas Perkebunan	7.825.476.661,00	7.467.437.098,00	95,42
26	Sekretariat Daerah	24.711.108.936,00	22.444.986.524,00	90,83
27	Inspektorat	9.350.751.851,00	8.616.124.588,00	92,14
28	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	7.173.497.857,00	6.293.262.014,00	87,73
29	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	9.824.582.291,00	9.101.848.038,00	92,64
30	Badan Pendapatan Daerah	11.450.178.553,00	10.694.248.622,00	93,40
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	5.889.620.111,00	5.271.632.982,00	89,51
32	Set Dewan Pengurus KORPRI	657.723.895,00	430.779.178,00	65,50
33	Sekretariat DPRD	32.880.518.927,00	27.958.663.873,00	85,03
34	Kec Tg Redeb	8.924.063.048,00	8.864.765.166,00	99,34
35	Kec Gn Tabur	4.856.129.834,00	4.505.690.207,00	92,78
36	Kec Sambaliung	4.331.980.759,00	4.160.724.305,00	96,05
37	Kec Teluk Bayur	5.619.553.315,00	5.385.343.464,00	95,83
38	Kec Segah	2.600.768.558,00	2.505.336.217,00	96,33
39	Kec Kelay	2.212.061.250,00	2.137.988.248,00	96,65
40	Kec Pulau Derawan	2.379.895.503,00	2.107.938.696,00	88,57
41	Kec Talisayan	3.278.185.574,00	3.118.166.055,00	95,12
42	Kec Biduk - Biduk	3.144.590.466,00	2.880.746.170,00	91,61
43	Kec Maratua	3.042.174.540,00	2.944.467.092,00	96,79
44	Kec Tabalar	2.575.730.379,00	2.454.735.887,00	95,30
45	Kec Batu Putih	2.005.635.590,00	1.949.427.374,00	97,20
46	Kec Biatan	2.281.553.152,00	2.128.500.010,00	93,29
47	Badan Kesbang, Politik & Linmas	5.617.670.332,00	5.015.336.006,00	89,28
	Jumlah	**950.561.904.928,00**	**812.677.295.576,65**	**85,49**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 senilai Rp812.677.295.576,65 mengalami **kenaikan** senilai Rp24.143.359.351,03 atau 3,06% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp788.533.936.225,62. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 pada masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.42 Realisasi Belanja Pegawai Per OPD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	292.322.300.309,00	280.990.551.301,00	11.331.749.008,00	4,03
2	Dinas Kesehatan	104.674.761.522,87	83.747.588.932,40	20.927.172.590,47	24,99
3	RSUD Abd Rivai	107.700.375.196,78	122.416.469.136,22	(14.716.093.939,44)	(12,02)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24.809.142.227,00	20.797.242.732,00	4.011.899.495,00	19,29
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	5.590.292.225,00	5.146.642.573,00	443.649.652,00	8,62
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	6.542.739.248,00	6.108.807.699,00	433.931.549,00	7,10
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.605.337.281,00	5.610.433.036,00	(5.095.755,00)	(0,09)
8	Dinas Sosial	5.157.325.763,00	5.364.037.832,00	(206.712.069,00)	(3,85)
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	5.030.663.078,00	5.320.003.777,00	(289.340.699,00)	(5,44)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	6.421.702.859,00	6.159.032.447,00	262.670.412,00	4,26
11	Dinas Pangan	5.368.660.662,00	5.299.117.529,00	69.543.133,00	1,31
12	Dinas Pertanahan	3.418.662.786,00	3.318.267.686,00	100.395.100,00	3,03
13	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	10.139.700.260,00	10.029.711.156,00	109.989.104,00	1,10
14	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	5.075.021.894,00	5.222.380.515,00	(147.358.621,00)	(2,82)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	5.168.614.512,00	4.998.860.421,00	169.754.091,00	3,40
16	Dinas Perhubungan	11.946.789.464,00	11.243.987.310,00	702.802.154,00	6,25
17	Dinas Komunikasi & Informatika	5.837.301.330,00	5.650.585.391,00	186.715.939,00	3,30
18	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	8.607.820.635,00	8.600.333.141,00	7.487.494,00	0,09
19	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.943.643.832,00	4.907.712.534,00	35.931.298,00	0,73
20	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	5.478.479.491,00	5.398.590.625,00	79.888.866,00	1,48
21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	6.556.666.081,00	6.523.204.569,00	33.461.512,00	0,51
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	6.840.863.676,00	6.537.911.261,00	302.952.415,00	4,63
23	Dinas Perikanan	6.166.878.436,00	5.928.994.069,00	237.884.367,00	4,01
24	Dinas Pertanian & Peternakan	14.835.404.994,00	15.204.718.083,00	(369.313.089,00)	(2,43)
25	Dinas Perkebunan	7.467.437.098,00	7.059.529.369,00	407.907.729,00	5,78
26	Sekretariat Daerah	22.444.986.524,00	22.772.732.744,00	(327.746.220,00)	(1,44)
27	Inspektorat	8.616.124.588,00	8.328.587.025,00	287.537.563,00	3,45
28	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	6.293.262.014,00	6.358.886.449,00	(65.624.435,00)	(1,03)
29	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	9.101.848.038,00	8.401.736.666,00	700.111.372,00	8,33
30	Badan Pendapatan Daerah	10.694.248.622,00	11.104.447.352,00	(410.198.730,00)	(3,69)
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	5.271.632.982,00	5.170.297.268,00	101.335.714,00	1,96
32	Set Dewan Pengurus KORPRI	430.779.178,00	496.613.377,00	(65.834.199,00)	(13,26)
33	Sekretariat DPRD	27.958.663.873,00	29.967.736.099,00	(2.009.072.226,00)	(6,70)
34	Kec Tg Redeb	8.864.765.166,00	8.231.863.398,00	632.901.768,00	7,69
35	Kec Gn Tabur	4.505.690.207,00	4.363.607.455,00	142.082.752,00	3,26
36	Kec Sambaliung	4.160.724.305,00	4.052.754.268,00	107.970.037,00	2,66
37	Kec Teluk Bayur	5.385.343.464,00	4.988.125.042,00	397.218.422,00	7,96
38	Kec Segah	2.505.336.217,00	2.478.028.123,00	27.308.094,00	1,10
39	Kec Kelay	2.137.988.248,00	2.081.904.777,00	56.083.471,00	2,69
40	Kec Pulau Derawan	2.107.938.696,00	2.224.970.391,00	(117.031.695,00)	(5,26)
41	Kec Talisayan	3.118.166.055,00	2.766.499.393,00	351.666.662,00	12,71

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
42	Kec Biduk - Biduk	2.880.746.170,00	2.773.748.398,00	106.997.772,00	3,86
43	Kec Maratua	2.944.467.092,00	3.016.386.764,00	(71.919.672,00)	(2,38)
44	Kec Tabalar	2.454.735.887,00	2.439.235.435,00	15.500.452,00	0,64
45	Kec Batu Putih	1.949.427.374,00	1.844.243.255,00	105.184.119,00	5,70
46	Kec Biatan	2.128.500.010,00	2.061.277.195,00	67.222.815,00	3,26
47	Badan Kesbang, Politik & Linmas	5.015.336.006,00	5.025.542.227,00	(10.206.221,00)	(0,20)
	Jumlah	**812.677.295.576,65**	**788.533.936.225,62**	**24.143.359.351,03**	**3,06**

Data tabel diatas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp950.561.904.928,00 dan terealisasi senilai Rp812.677.295.576,65 atau 85,49% mengalami **kenaikan** senilai Rp24.143.359.351,03 atau 3,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp788.533.936.225,62. Tidak tercapainya realisasi anggaran karena jumlah pengurangan dan penambahan pegawai tidak bisa diprediksi karena ada beberapa kriteria seperti teknis dan non teknis antara lain mutasi pegawai, pensiunan, meninggal dunia, dan perubahan gaji pokok.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022
	834.570.312.408,61	698.410.047.416,22

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari bahan habis pakai, belanja bahan/ material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas, honorarium, uang yang diberikan kepada pihak ketiga, belanja barang BOS, BOSNAS, belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, barang di bawah nilai kapitalisasi, Beasiswa, Tunjangan Non Pegawai.

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 senilai Rp993.395.407.456,00 dengan realisasi senilai Rp834.570.312.408,61 atau 84,01%, dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.43 Anggaran dan Realsasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
1	**(A+B)**	**Belanja Barang**		**154.180.728.086,00**	**128.447.666.761,00**	**83,31**
A	**Jumlah A (1 s/d 58)**	**Belanja Barang Pakai Habis**		**153.826.174.086,00**	**128.101.913.761,00**	**83,28**
		1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.950.239.160,00	11.726.325.863,00	98,13
		2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.463.546.780,00	3.103.628.880,00	89,61
		3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.097.725.165,00	18.370.174.705,00	76,23
		4	Belanja Bahan-Bahan Baku	130.000.000,00	104.960.000,00	80,74
		5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	175.733.000,00	142.716.200,00	81,21

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	719.750.000,00	553.218.000,00	76,86
		7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	157.835.000,00	119.995.000,00	76,03
		8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.362.697.640,00	7.905.329.884,00	84,43
		9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	182.240.000,00	144.259.988,00	79,16
		10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00
		11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	12.810.000,00	11.910.000,00	92,97
		12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
		13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	23.974.000,00	22.336.700,00	93,17
		14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
		15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	124.223.000,00	115.900.000,00	93,30
		16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.450.461.162,00	10.301.086.657,00	89,96
		17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.035.815.100,00	881.898.867,00	85,14
		18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.862.797.082,00	8.607.638.032,00	79,24
		19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	592.923.788,00	493.237.000,00	83,19
		20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00
		21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.395.835.850,00	2.980.605.964,00	87,77
		22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.406.212.388,00	2.215.208.068,00	92,06
		23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.515.687.710,00	1.357.520.434,00	89,56
		24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.011.876.035,00	892.717.081,00	88,22
		25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	494.554.060,00	485.785.589,00	98,23
		26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.102.012.000,00	921.948.200,00	83,66
		27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	670.179.800,00	545.247.187,00	81,36
		28	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.270.435.400,00	4.073.562.761,00	95,39
		29	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.560.328.268,00	1.333.238.396,00	85,45
		30	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.204.395.000,00	1.834.100.543,00	83,20
		31	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.302.299.398,00	2.122.272.619,00	92,18
		32	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	19.800.000,00	15.338.000,00	77,46
		33	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.852.524.500,00	1.628.036.768,00	87,88

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		34	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	26.250.000,00	24.163.400,00	92,05
		35	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.341.874.200,00	1.528.613.060,00	65,27
		36	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	1.463.000,00	1.463.000,00	100,00
		37	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.280.813.400,00	18.444.477.131,00	75,96
		38	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.141.872.000,00	2.158.086.928,00	68,69
		39	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	826.160.000,00	703.565.250,00	85,16
		40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.189.094.000,00	2.947.194.037,00	92,41
		41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00
		42	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.778.908.200,00	12.649.427.950,00	80,17
		43	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00
		44	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	225.200.000,00	197.318.700,00	87,62
		45	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	65.400.000,00	53.085.000,00	81,17
		46	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	902.000.000,00	848.608.120,00	94,08
		47	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	929.939.000,00	865.609.429,00	93,08
		48	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	164.750.000,00	155.421.000,00	94,34
		49	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	347.032.000,00	336.102.000,00	96,85
		50	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00
		51	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00
		52	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00
		53	Belanja Pakaian Kerja KORPRI	87.600.000,00	85.800.000,00	97,95
		54	Belanja Pakaian Adat Daerah	584.425.000,00	538.900.600,00	92,21
		55	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.911.204.000,00	1.789.744.890,00	93,64
		56	Belanja Pakaian Olahraga	1.687.190.000,00	1.582.636.880,00	93,80
		57	Belanja Pakaian Paskibraka	186.088.000,00	181.499.000,00	97,53
		58	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**		**354.554.000,00**	**345.753.000,00**	**97,52**
		1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	5.160.000,00	1.050.000,00	20,35
		2	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	349.394.000,00	344.703.000,00	98,66
		3	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	**(A+B+C+D+E+F+G+H+I)**	**Belanja Jasa**		**442.930.161.137,00**	**384.189.800.484,00**	**86,74**
A	**Jumlah A (1 s/d 56)**	**Belanja Jasa Kantor**		**379.365.159.562,00**	**331.379.340.767,00**	**87,35**
		1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00
		2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.164.875.000,00	7.184.160.000,00	70,68
		3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.565.060.000,00	27.457.318.200,00	86,99
		4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	413.410.000,00	322.160.000,00	77,93
		5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.650.200.000,00	984.870.000,00	59,68

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		6	Honorarium Rohaniwan	3.600.900.000,00	3.524.950.000,00	97,89
		7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	71.000.000,00	68.800.000,00	96,90
		8	Honorarium Penyelenggara Ujian	13.200.000,00	11.300.000,00	85,61
		9	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.522.228.000,00	1.908.889.200,00	75,68
		10	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	807.600.000,00	661.900.000,00	81,96
		11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	85.187.544.591,00	77.669.118.910,00	91,17
		12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	47.630.424.400,00	36.741.262.008,00	77,14
		13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	401.560.000,00	249.866.000,00	62,22
		14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.338.872.000,00	6.029.770.500,00	95,12
		15	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.782.800.000,00	5.736.400.000,00	99,20
		16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.375.950.000,00	2.088.596.759,00	87,91
		17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	177.600.000,00	130.600.000,00	73,54
		18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	484.750.000,00	443.292.000,00	91,45
		19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	47.145.146.400,00	44.642.900.486,00	94,69
		20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.145.130.000,00	1.851.705.000,00	86,32
		21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	289.250.000,00	252.740.777,00	87,38
		22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.200.340.000,00	3.511.816.000,00	83,61
		23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.195.550.000,00	25.570.047.036,00	97,61
		24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	11.140.700.000,00	10.348.836.936,00	92,89
		25	Belanja Jasa Tenaga Caraka	104.850.000,00	102.070.000,00	97,35
		26	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.335.200.000,00	4.100.200.000,00	94,58
		27	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00
		28	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.071.825.000,00	927.325.000,00	86,52
		29	Belanja Jasa Tata Rias	220.850.000,00	192.150.000,00	87,00
		30	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
		31	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	529.750.000,00	509.517.285,00	96,18
		32	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	123.425.000,00	115.855.000,00	93,87
		33	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	174.610.000,00	174.560.000,00	99,97
		34	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	746.627.000,00	166.500.000,00	22,30
		35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.111.630.000,00	4.296.617.350,00	84,06
		36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	9.160.950.000,00	7.158.609.896,00	78,14
		37	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
		38	Belanja Jasa Kalibrasi	416.690.000,00	339.762.300,00	81,54
		39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	246.900.000,00	226.790.000,00	91,86
		40	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2.379.044.771,00	2.188.680.790,00	92,00

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		41	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	223.783.000,00	0,00	0,00
		42	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	16.696.439.000,00	16.046.168.520,00	96,11
		43	Belanja Jasa Penyelaman	0,00	0,00	0,00
		44	Belanja Tagihan Telepon	194.960.000,00	140.215.295,00	71,92
		45	Belanja Tagihan Air	2.243.423.880,00	1.589.571.892,00	70,85
		46	Belanja Tagihan Listrik	15.174.766.620,00	13.367.291.459,00	88,09
		47	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.004.480.000,00	830.786.600,00	82,71
		48	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.940.395.900,00	9.525.091.831,00	73,61
		49	Belanja Paket/Pengiriman	592.510.000,00	507.585.883,00	85,67
		50	Belanja Registrasi/Keanggotaan	8.000.000,00	6.000.000,00	75,00
		51	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.540.778.000,00	519.571.498,00	33,72
		52	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.200.000.000,00	5.149.087.844,00	99,02
		53	Belanja Lembur	6.966.790.000,00	5.682.723.500,00	81,57
		54	Belanja Medical Check Up	270.751.000,00	103.669.012,00	38,29
		55	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	271.640.000,00	21.640.000,00	7,97
		56	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.110.000.000,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 7)**	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**		**32.495.989.265,00**	**27.673.470.043,00**	**85,16**
		1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	979.200.000,00	974.260.536,00	99,50
		2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	460.236.000,00	379.780.800,00	82,52
		3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	18.303.969.600,00	16.426.317.000,00	89,74
		4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.241.040.111,00	8.689.630.605,00	84,85
		5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	771.615.800,00	488.698.427,00	63,33
		6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.508.177.754,00	551.528.162,00	36,57
		7	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	231.750.000,00	163.254.513,00	70,44
		Belanja Sewa Tanah		**18.000.792,00**	**18.000.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	792,00	0,00	0,00
		2	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
C	**Jumlah C (1 s/d 20)**	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**		**13.949.992.768,00**	**10.163.816.613,00**	**72,86**
		1	Belanja Sewa Excavator	172.800.000,00	154.245.600,00	89,26
		2	Belanja Sewa Grader	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Sewa Electric Generating Set	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
		4	Belanja Sewa Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00
		5	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
		6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000.000,00	215.000.000,00	43,00
		7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	295.000.000,00	254.217.000,00	86,18
		8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		9	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	584.810.000,00	380.833.000,00	65,12
		10	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	98.000.000,00	90.000.000,00	91,84
		11	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.663.500.000,00	4.646.056.014,00	69,72
		12	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
		13	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
		14	Belanja Sewa Mebel	85.000.000,00	83.000.000,00	97,65
		15	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.393.316.000,00	1.877.599.023,00	78,45
		16	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00
		17	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	785.000.000,00	573.942.500,00	73,11
		18	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	31.635.000,00	31.635.000,00	100,00
		19	Belanja Sewa Komputer Jaringan	2.143.431.768,00	1.760.788.476,00	82,15
		20	Belanja Sewa Elektrik	35.000.000,00	34.000.000,00	97,14
D	**Jumlah D (1 s/d 11)**	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**		**4.726.190.000,00**	**3.708.543.343,00**	**78,47**
		1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	344.100.000,00	300.925.676,00	87,45
		2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
		3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.987.250.000,00	1.388.950.000,00	69,89
		4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	36.600.000,00	35.040.000,00	95,74
		5	Belanja Sewa Taman	194.000.000,00	182.894.555,00	94,28
		6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
		7	Belanja Sewa Asrama	398.000.000,00	234.500.000,00	58,92
		8	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00
		9	Belanja Sewa Motel	0,00	0,00	0,00
		10	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	1.450.000.000,00	1.300.000.000,00	89,66
		11	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	292.240.000,00	242.233.112,00	82,89
E	**Jumlah E (1 s/d 5)**	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**		**502.750.000,00**	**434.523.500,00**	**86,43**
		1	Belanja Sewa Audio Visual	128.000.000,00	128.000.000,00	100,00
		2	Belanja Sewa Alat Musik	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		3	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		4	Belanja Sewa Tanaman	350.750.000,00	282.523.500,00	80,55
		5	Belanja Sewa Tanaman Koleksi	0,00	0,00	0,00
F	**Jumlah F (1 s/d 14)**	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**		**4.707.295.000,00**	**4.013.833.704,00**	**85,27**
		1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	38.500.000,00	38.422.650,00	99,80
		3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	178.220.000,00	165.048.500,00	92,61

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.560.000.000,00	1.327.996.792,00	85,13
		7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.555.525.000,00	1.347.157.567,00	86,60
		9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00
		10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00
		11	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	825.050.000,00	787.388.195,00	95,44
		12	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	75.000.000,00	0,00	0,00
		13	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	400.000.000,00	292.820.000,00	73,21
		14	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	75.000.000,00	55.000.000,00	73,33
G	**Jumlah G (1 s/d 10)**	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**		**5.784.400.000,00**	**5.576.034.294,00**	**96,40**
		1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	380.000.000,00	362.752.000,00	95,46
		3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	630.000.000,00	573.445.000,00	91,02
		5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	161.400.000,00	159.600.022,00	98,88
		6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	830.000.000,00	799.131.404,00	96,28
		7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	150.000.000,00	148.055.468,00	98,70
		8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.045.000.000,00	2.039.840.500,00	99,75
		9	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		10	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	1.568.000.000,00	1.473.209.900,00	93,95
H	**Jumlah H (1 s/d 2)**	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**		**342.000.000,00**	**342.000.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
		2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00
I	**Jumlah I (1 s/d 2)**	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**		**160.000.000,00**	**108.633.447,00**	**67,90**

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Bimbingan Teknis	160.000.000,00	108.633.447,00	67,90
J	**Jumlah J (1 s/d 11)**	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**		**878.383.750,00**	**771.604.773,00**	**87,84**
		1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	49.500.000,00	47.474.996,00	95,91
		2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	245.750.000,00	226.599.982,00	92,21
		3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.887.500,00	1.773.744,00	61,43
		4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.403.750,00	3.547.512,00	65,65
		5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	215.912.500,00	206.251.858,00	95,53
		6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.960.000,00	3.805.000,00	96,09
		7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemingutan Pajak Air Tanah	2.475.000,00	0,00	0,00
		8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	12.375.000,00	0,00	0,00
		9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.775.000,00	2.924.987,00	50,65
		10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	83.720.000,00	33.000.000,00	39,42
		11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	250.625.000,00	246.226.694,00	98,25
K	**Jumlah K (1)**	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
3	**(A+B+C+D+E+F)**	**Belanja Pemeliharaan**		**46.102.105.600,00**	**42.636.129.353,00**	**92,48**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**	**Belanja Pemeliharaan Tanah**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Untuk Taman	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 31)**	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**		**16.553.444.600,00**	**14.406.183.227,00**	**87,03**
		1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	340.000.000,00	315.637.684,00	92,83
		3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	117.000.000,00	111.717.000,00	95,48
		4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	200.000.000,00	195.666.942,00	97,83
		5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.632.000,00	17.630.000,00	99,99

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	935.680.000,00	817.988.474,00	87,42
		7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.138.200.000,00	5.400.452.132,00	87,98
		8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.153.034.000,00	902.434.050,00	78,27
		9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.095.000.000,00	1.051.686.024,00	96,04
		10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	121.200.000,00	90.879.000,00	74,98
		11	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	6.000.000,00	5.709.000,00	95,15
		12	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00
		13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.750.000,00	250.000,00	14,29
		14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	59.500.000,00	39.155.151,00	65,81
		15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.043.737.800,00	1.669.553.447,00	81,69
		16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	88.175.000,00	42.300.000,00	47,97
		17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	132.000.000,00	131.720.000,00	99,79
		18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.128.882.000,00	965.186.000,00	85,50
		19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	549.240.000,00	461.468.523,00	84,02
		20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	17.600.000,00	12.345.000,00	70,14
		21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00
		22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	0,00	0,00	#DIV/0!
		23	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		24	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	100.000.000,00	99.964.000,00	99,96
		25	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	29.136.300,00	28.971.000,00	99,43
		26	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
		27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	104.199.500,00	99.819.500,00	95,80
		28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	943.478.000,00	729.461.500,00	77,32
		29	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	390.000.000,00	388.085.800,00	99,51
		30	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	55.000.000,00	54.623.000,00	99,31
		31	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	640.000.000,00	626.480.000,00	97,89
C	**Jumlah C (1 s/d 17)**		**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**7.943.550.000,00**	**7.098.353.180,00**	**89,36**
		1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.480.733.500,00	5.067.921.014,00	92,47
		2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	30.000.000,00	29.446.000,00	98,15
		3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	195.000.000,00	194.849.000,00	99,92
		4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	230.000.000,00	0,00	0,00
		5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	404.937.500,00	403.496.682,00	99,64
		6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pemotong Hewan	0,00	0,00	0,00
		7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	80.000.000,00	39.803.000,00	49,75
		9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	141.360.000,00	138.206.100,00	97,77

(dalam rupiah)

NO	Point	Uraian		2023		%
				Anggaran	Realisasi	
			Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan			
		10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	636.295.000,00	632.863.122,00	99,46
		11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	66.000.000,00	65.990.100,00	99,99
		12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	75.000.000,00	0,00	0,00
		13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	221.000.000,00	209.807.750,00	94,94
		14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00
		15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00
		16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	373.224.000,00	309.698.412,00	82,98
		17	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	10.000.000,00	6.272.000,00	62,72
D	**Jumlah D (1 s/d 8)**		**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**21.432.611.000,00**	**21.019.092.946,00**	**98,07**
		1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	11.501.000,00	11.501.000,00	100,00
		4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	4.899.240.000,00	4.499.164.400,00	91,83
		5	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	16.123.370.000,00	16.112.045.546,00	99,93
		7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	398.500.000,00	396.382.000,00	99,47
E	**Jumlah E (1 s/d 2)**		**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**122.500.000,00**	**112.500.000,00**	**91,84**
		1	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket,	22.500.000,00	12.500.000,00	55,56

(dalam rupiah)

NO	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
			Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah			
		2	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
F	**Jumlah F (1 s/d 1)**		**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**50.000.000,00**	**0,00**	0,00
		1	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	0,00	0,00
						#DIV/0!
4	**(A+B)**		**Belana Perjalanan Dinas**	**187.898.997.272,00**	**155.344.259.077,00**	**82,67**
A	**Jumlah A (1 s/d 5)**		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**187.421.497.272,00**	**155.226.042.049,00**	**82,82**
		1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	121.838.647.420,00	106.502.264.489,00	87,41
		2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.291.649.852,00	48.535.131.560,00	74,34
		4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	254.960.000,00	152.646.000,00	59,87
		5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36.240.000,00	36.000.000,00	99,34
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**	**477.500.000,00**	**118.217.028,00**	**24,76**
		1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	477.500.000,00	118.217.028,00	24,76
						#DIV/0!
5	**(A+B)**		**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**49.375.063.500,00**	**45.460.619.230,00**	**92,07**
A	**Jumlah A (1 s/d 5)**		**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**49.031.116.000,00**	**45.153.336.730,00**	**92,09**
		1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.093.466.000,00	3.542.161.730,00	86,53
		2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	32.778.050.000,00	32.088.675.000,00	97,90
		3	Belanja Beasiswa	12.156.000.000,00	9.522.500.000,00	78,34
		4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00
		5	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	3.600.000,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**343.947.500,00**	**307.282.500,00**	**89,34**
		1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	343.947.500,00	307.282.500,00	89,34
			Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
6	**(A)**		**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**26.834.525.374,00**	**24.838.471.280,00**	**92,56**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**26.834.525.374,00**	**24.838.471.280,00**	**92,56**
		1	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.834.525.374,00	24.838.471.280,00	92,56
7	**(A)**		**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**86.073.826.487,00**	**53.653.366.223,61**	**62,33**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**86.073.826.487,00**	**53.653.366.223,61**	**62,33**
		1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	86.073.826.487,00	53.653.366.223,61	62,33
JUMLAH				**993.395.407.456,00**	**834.570.312.408,61**	**84,01**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 senilai Rp834.570.312.408,61 mengalami **kenaikan** senilai Rp136.160.264.992,39 atau 19,50% dari Tahun Anggaran 2022 yang direalisasikan senilai Rp69.841.0047.416,22, dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.44 Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
1	**(A+B)**	**Belanja Barang**		**128.447.666.761,00**	**155.573.362.209,00**	**(27.125.695.448,00)**	**(17,44)**
A	**Jumlah A (1 s/d 58)**	**Belanja Barang Pakai Habis**		**128.101.913.761,00**	**155.542.920.009,00**	**(27.441.006.248,00)**	**(17,64)**
		1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.726.325.863,00	11.940.498.208,00	(214.172.345,00)	(1,79)
		2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.103.628.880,00	1.226.161.266,00	1.877.467.614,00	153,12
		3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.370.174.705,00	15.227.544.400,00	3.142.630.305,00	20,64
		4	Belanja Bahan-Bahan Baku	104.960.000,00	90.600.000,00	14.360.000,00	15,85
		5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	142.716.200,00	5.603.000,00	137.113.200,00	2.447,14
		6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	553.218.000,00	417.506.000,00	135.712.000,00	32,51
		7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	119.995.000,00	160.023.000,00	(40.028.000,00)	(25,01)
		8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.905.329.884,00	5.389.389.027,00	2.515.940.857,00	46,68
		9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	144.259.988,00	156.704.100,00	(12.444.112,00)	(7,94)
		10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	42.905.000,00	(42.905.000,00)	(100,00)
		11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	11.910.000,00	60.273.000,00	(48.363.000,00)	(80,24)
		12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	22.336.700,00	220.349.402,00	(198.012.702,00)	(89,86)
		14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
		15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	115.900.000,00	0,00	115.900.000,00	100,00
		16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.301.086.657,00	7.389.302.140,00	2.911.784.517,00	39,41
		17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	881.898.867,00	1.156.290.250,00	(274.391.383,00)	(23,73)
		18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.607.638.032,00	6.591.517.204,00	2.016.120.828,00	30,59
		19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	493.237.000,00	385.539.400,00	107.697.600,00	27,93
		20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	53.570.000,00	(53.570.000,00)	(100,00)
		21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.980.605.964,00	2.978.044.500,00	2.561.464,00	0,09
		22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.215.208.068,00	2.828.973.756,00	(613.765.688,00)	(21,70)
		23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.357.520.434,00	1.012.021.309,00	345.499.125,00	34,14
		24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	892.717.081,00	235.840.200,00	656.876.881,00	278,53
		25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	485.785.589,00	350.724.000,00	135.061.589,00	38,51
		26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	921.948.200,00	507.734.100,00	414.214.100,00	81,58

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
		27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	545.247.187,00	953.469.206,00	(408.222.019,00)	(42,81)
		28	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.073.562.761,00	3.192.384.053,00	881.178.708,00	27,60
		29	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.333.238.396,00	1.487.897.750,00	(154.659.354,00)	(10,39)
		30	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.834.100.543,00	25.669.797.491,00	(23.835.696.948,00)	(92,86)
		31	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.122.272.619,00	23.854.567.898,00	(21.732.295.279,00)	(91,10)
		32	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	15.338.000,00	0,00	15.338.000,00	100,00
		33	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.628.036.768,00	935.423.965,00	692.612.803,00	74,04
		34	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	24.163.400,00	19.124.000,00	5.039.400,00	26,35
		35	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.528.613.060,00	1.633.158.400,00	(104.545.340,00)	(6,40)
		36	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	1.463.000,00	3.900.000,00	(2.437.000,00)	(62,49)
		37	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.444.477.131,00	16.376.132.636,00	2.068.344.495,00	12,63
		38	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.158.086.928,00	1.525.029.649,00	633.057.279,00	41,51
		39	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	703.565.250,00	338.626.938,00	364.938.312,00	107,77
		40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.947.194.037,00	2.327.905.595,00	619.288.442,00	26,60
		41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	34.276.100,00	(34.276.100,00)	(100,00)
		42	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.649.427.950,00	10.574.423.130,00	2.075.004.820,00	19,62
		43	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	197.318.700,00	60.943.500,00	136.375.200,00	223,77
		45	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	53.085.000,00	0,00	53.085.000,00	100,00
		46	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	848.608.120,00	2.238.111.720,00	(1.389.503.600,00)	(62,08)
		47	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	865.609.429,00	1.050.895.188,00	(185.285.759,00)	(17,63)
		48	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	155.421.000,00	102.017.775,00	53.403.225,00	52,35
		49	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	336.102.000,00	58.696.800,00	277.405.200,00	472,61
		50	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	12.300.000,00	(12.300.000,00)	(100,00)
		51	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
		53	Belanja Pakaian Kerja KORPRI	85.800.000,00	355.054.868,00	(269.254.868,00)	(75,83)
		54	Belanja Pakaian Adat Daerah	538.900.600,00	140.236.000,00	398.664.600,00	284,28
		55	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.789.744.890,00	1.347.017.335,00	442.727.555,00	32,87
		56	Belanja Pakaian Olahraga	1.582.636.880,00	2.503.834.800,00	(921.197.920,00)	(36,79)
		57	Belanja Pakaian Paskibraka	181.499.000,00	220.916.350,00	(39.417.350,00)	(17,84)
		58	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	97.665.600,00	(97.665.600,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**		**345.753.000,00**	**30.442.200,00**	**315.310.800,00**	**1.035,77**
		1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.050.000,00	10.430.000,00	(9.380.000,00)	(89,93)
		2	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	344.703.000,00	20.012.200,00	324.690.800,00	1.622,46

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
		3	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**(A+B+C+D+E+F+G+H+I)**	**Belanja Jasa**		**384.189.800.484,00**	**337.342.628.892,61**	**46.847.171.591,39**	**13,89**
A	**Jumlah A (1 s/d 56)**	**Belanja Jasa Kantor**		**331.379.340.767,00**	**308.099.937.171,61**	**23.279.403.595,39**	**7,56**
		1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	132.600.000,00	(132.600.000,00)	(100,00)
		2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.184.160.000,00	5.061.805.000,00	2.122.355.000,00	41,93
		3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.457.318.200,00	22.661.206.250,00	4.796.111.950,00	21,16
		4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	322.160.000,00	385.680.000,00	(63.520.000,00)	(16,47)
		5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	984.870.000,00	1.144.270.000,00	(159.400.000,00)	(13,93)
		6	Honorarium Rohaniwan	3.524.950.000,00	3.503.150.000,00	21.800.000,00	0,62
		7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	68.800.000,00	59.000.000,00	9.800.000,00	16,61
		8	Honorarium Penyelenggara Ujian	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00
		9	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.908.889.200,00	2.146.380.000,00	(237.490.800,00)	(11,06)
		10	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	661.900.000,00	716.300.000,00	(54.400.000,00)	(7,59)
		11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	77.669.118.910,00	78.116.394.493,00	(447.275.583,00)	(0,57)
		12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	36.741.262.008,00	45.268.270.230,00	(8.527.008.222,00)	(18,84)
		13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	249.866.000,00	451.099.558,00	(201.233.558,00)	(44,61)
		14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.029.770.500,00	2.760.745.062,00	3.269.025.438,00	118,41
		15	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.736.400.000,00	5.087.650.000,00	648.750.000,00	12,75
		16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.088.596.759,00	2.055.100.000,00	33.496.759,00	1,63
		17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	130.600.000,00	552.489.603,00	(421.889.603,00)	(76,36)
		18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	443.292.000,00	398.890.702,00	44.401.298,00	11,13
		19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.642.900.486,00	43.581.684.160,00	1.061.216.326,00	2,44
		20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.851.705.000,00	1.554.350.000,00	297.355.000,00	19,13
		21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	252.740.777,00	65.000.000,00	187.740.777,00	288,83
		22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.511.816.000,00	1.434.000.000,00	2.077.816.000,00	144,90
		23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.570.047.036,00	24.747.737.724,00	822.309.312,00	3,32
		24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.348.836.936,00	9.732.595.000,00	616.241.936,00	6,33
		25	Belanja Jasa Tenaga Caraka	102.070.000,00	85.725.000,00	16.345.000,00	19,07
		26	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.100.200.000,00	3.996.100.000,00	104.100.000,00	2,61
		27	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	154.500.000,00	(154.500.000,00)	(100,00)
		28	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	927.325.000,00	177.875.000,00	749.450.000,00	421,34
		29	Belanja Jasa Tata Rias	192.150.000,00	125.650.000,00	66.500.000,00	52,92
		30	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	27.380.000,00	(27.380.000,00)	(100,00)
		31	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	509.517.285,00	601.923.110,00	(92.405.825,00)	(15,35)
		32	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	115.855.000,00	69.200.000,00	46.655.000,00	67,42

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
		33	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	174.560.000,00	334.173.000,00	(159.613.000,00)	(47,76)
		34	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	166.500.000,00	30.000.000,00	136.500.000,00	455,00
		35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.296.617.350,00	560.138.423,00	3.736.478.927,00	667,06
		36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	7.158.609.896,00	3.756.172.364,00	3.402.437.532,00	90,58
		37	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	(100,00)
		38	Belanja Jasa Kalibrasi	339.762.300,00	372.320.900,00	(32.558.600,00)	(8,74)
		39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	226.790.000,00	214.505.000,00	12.285.000,00	5,73
		40	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2.188.680.790,00	1.331.256.500,00	857.424.290,00	64,41
		41	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	10.786.580,00	(10.786.580,00)	(100,00)
		42	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	16.046.168.520,00	8.240.067.675,00	7.806.100.845,00	94,73
		43	Belanja Jasa Penyelaman	0,00	49.800.180,00	(49.800.180,00)	(100,00)
		44	Belanja Tagihan Telepon	140.215.295,00	126.859.484,00	13.355.811,00	10,53
		45	Belanja Tagihan Air	1.589.571.892,00	1.276.355.639,00	313.216.253,00	24,54
		46	Belanja Tagihan Listrik	13.367.291.459,00	12.108.276.518,00	1.259.014.941,00	10,40
		47	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	830.786.600,00	1.170.550.742,00	(339.764.142,00)	(29,03)
		48	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.525.091.831,00	4.656.821.353,61	4.868.270.477,39	104,54
		49	Belanja Paket/Pengiriman	507.585.883,00	271.299.655,00	236.286.228,00	87,09
		50	Belanja Registrasi/Keanggotaan	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00	5,26
		51	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	519.571.498,00	463.283.076,00	56.288.422,00	12,15
		52	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.149.087.844,00	4.329.557.993,00	819.529.851,00	18,93
		53	Belanja Lembur	5.682.723.500,00	5.236.297.000,00	446.426.500,00	8,53
		54	Belanja Medical Check Up	103.669.012,00	118.006.116,00	(14.337.104,00)	(12,15)
		55	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	21.640.000,00	2.822.079.995,00	(2.800.439.995,00)	(99,23)
		56	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	3.755.928.086,00	(3.755.928.086,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1 s/d 7)**		**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**27.673.470.043,00**	**15.204.634.532,00**	**12.468.835.511,00**	**82,01**
		1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	974.260.536,00	0,00	974.260.536,00	100,00
		2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	379.780.800,00	185.390.800,00	194.390.000,00	104,85
		3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	16.426.317.000,00	6.376.100.100,00	10.050.216.900,00	157,62
		4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.689.630.605,00	7.646.815.256,00	1.042.815.349,00	13,64
		5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	488.698.427,00	363.148.807,00	125.549.620,00	34,57
		6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	551.528.162,00	437.920.892,00	113.607.270,00	25,94
		7	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	163.254.513,00	195.258.677,00	(32.004.164,00)	(16,39)
			Belanja Sewa Tanah	**18.000.000,00**	**33.400.000,00**	**(15.400.000,00)**	**(46,11)**
		1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	18.000.000,00	33.400.000,00	(15.400.000,00)	(46,11)
C	**Jumlah C (1 s/d 20)**		**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**10.163.816.613,00**	**8.067.848.152,00**	2.095.968.461,00	25,98

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
		1	Belanja Sewa Excavator	154.245.600,00	0,00	154.245.600,00	100,00
		2	Belanja Sewa Grader		0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Sewa Electric Generating Set	54.000.000,00	21.000.000,00	33.000.000,00	157,14
		4	Belanja Sewa Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	99.280.000,00	(99.280.000,00)	(100,00)
		6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	215.000.000,00	428.034.800,00	(213.034.800,00)	(49,77)
		7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	254.217.000,00	247.935.500,00	6.281.500,00	2,53
		8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus		0,00	0,00	0,00
		9	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	380.833.000,00	242.485.000,00	138.348.000,00	57,05
		10	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	90.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00	12,50
		11	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.646.056.014,00	4.423.284.000,00	222.772.014,00	5,04
		12	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
		13	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
		14	Belanja Sewa Mebel	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	100,00
		15	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.877.599.023,00	426.383.000,00	1.451.216.023,00	340,36
		16	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		0,00	0,00	0,00
		17	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	573.942.500,00	487.845.998,00	86.096.502,00	17,65
		18	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	31.635.000,00	31.635.000,00	0,00	0,00
		19	Belanja Sewa Komputer Jaringan	1.760.788.476,00	1.579.964.854,00	180.823.622,00	11,44
		20	Belanja Sewa Elektrik	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00
D	**Jumlah D (1 s/d 11)**		**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**3.708.543.343,00**	**1.784.474.000,00**	1.924.069.343,00	107,82
		1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	300.925.676,00	232.250.000,00	68.675.676,00	29,57
		2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	24.000.000,00	24.000.000,00	0,0	0,00
		3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.388.950.000,00	784.920.000,00	604.030.000,00	76,95
		4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00	100,00
		5	Belanja Sewa Taman	182.894.555,00	0,00	182.894.555,00	100,00
		6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	89.250.000,00	(89.250.000,00)	(100,00)
		7	Belanja Sewa Asrama	234.500.000,00	211.115.000,00	23.385.000,00	11,08
		8	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Belanja Sewa Motel	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	1.300.000.000,00	347.839.000,00	952.161.000,00	273,74
		11	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	242.233.112,00	95.100.000,00	147.133.112,00	154,71
E	**Jumlah E (1 s/d 5)**		**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**434.523.500,00**	**159.500.000,00**	**275.023.500,00**	**172,43**
		1	Belanja Sewa Audio Visual	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	100,00
		2	Belanja Sewa Alat Musik	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
		3	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
		4	Belanja Sewa Tanaman	282.523.500,00	159.500.000,00	123.023.500,00	77,13
		5	Belanja Sewa Tanaman Koleksi	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**Jumlah F (1 s/d 14)**		**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**4.013.833.704,00**	**1.848.778.274,00**	**2.165.055.430,00**	**117,11**
		1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	89.177.400,00	(89.177.400,00)	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
		2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	38.422.650,00	43.728.400,00	(5.305.750,00)	(12,13)
		3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	235.443.218,00	(235.443.218,00)	(100,00)
		4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	165.048.500,00	0,00	165.048.500,00	100,00
		5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.327.996.792,00	454.219.880,00	873.776.912,00	192,37
		7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.347.157.567,00	270.000.000,00	1.077.157.567,00	398,95
		9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	445.950.566,00	(445.950.566,00)	(100,00)
		11	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	787.388.195,00	17.382.600,00	770.005.595,00	4.429,75
		12	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	49.728.000,00	(49.728.000,00)	(100,00)
		13	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	292.820.000,00	243.148.210,00	49.671.790,00	20,43
		14	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00
G	**Jumlah G (1 s/d 10)**	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**		**5.576.034.294,00**	**1.339.578.386,00**	4.236.455.908,00	316,25
		1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	217.860.000,00	(217.860.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	362.752.000,00	0,00	362.752.000,00	100,00
		3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	573.445.000,00	0,00	573.445.000,00	100,00
		5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	159.600.022,00	0,00	159.600.022,00	100,00
		6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	799.131.404,00	421.100.386,00	378.031.018,00	89,77
		7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	148.055.468,00	0,00	148.055.468,00	100,00
		8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.039.840.500,00	700.618.000,00	1.339.222.500,00	191,15
		9	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
		10	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	1.473.209.900,00	0,00	1.473.209.900,00	100,00
H	**Jumlah H (1 s/d 2)**	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**		**342.000.000,00**	**342.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
		2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00
I	**Jumlah I (1 s/d 2)**	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**		**108.633.447,00**	**142.925.000,00**	**(34.291.553,00)**	**(23,99)**
		1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	142.925.000,00	(142.925.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Bimbingan Teknis	108.633.447,00	0,00	108.633.447,00	100,00
J	**Jumlah J (1 s/d 11)**	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**		**771.604.773,00**	**319.553.377,00**	**452.051.396,00**	**141,46**
		1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	47.474.996,00	16.675.050,00	30.799.946,00	184,71
		2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	226.599.982,00	96.250.000,00	130.349.982,00	135,43
		3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.773.744,00	434.992,00	1.338.752,00	307,76
		4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.547.512,00	1.594.941,00	1.952.571,00	122,42
		5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	206.251.858,00	95.700.330,00	110.551.528,00	115,52
		6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.805.000,00	725.000,00	3.080.000,00	424,83
		7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemingutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.924.987,00	598.114,00	2.326.873,00	389,04
		10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.000.000,00	21.750.000,00	11.250.000,00	51,72
		11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	246.226.694,00	85.824.950,00	160.401.744,00	186,89
K	**Jumlah K (1)**	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
						-	#DIV/0!
3	**(A+B+C+D+E+F)**	**Belanja Pemeliharaan**		**42.636.129.353,00**	**23.650.205.135,00**	**18.985.924.218,00**	**80,28**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**	**Belanja Pemeliharaan Tanah**		**0,00**	**807.359.132,00**	**(807.359.132,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	622.409.132,00	(622.409.132,00)	(100,00)
		2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	184.950.000,00	(184.950.000,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1 s/d 31)**	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**		**14.406.183.227,00**	**12.321.552.586,00**	**2.084.630.641,00**	**16,92**
		1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
		2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	315.637.684,00	263.962.684,00	51.675.000,00	19,58
		3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	111.717.000,00	176.944.202,00	(65.227.202,00)	(36,86)
		4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	195.666.942,00	298.940.651,00	(103.273.709,00)	(34,55)
		5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.630.000,00	0,00	17.630.000,00	100,00
		6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	817.988.474,00	576.570.750,00	241.417.724,00	41,87
		7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.400.452.132,00	4.251.985.028,00	1.148.467.104,00	27,01
		8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	902.434.050,00	568.002.505,00	334.431.545,00	58,88
		9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.051.686.024,00	1.438.378.715,00	(386.692.691,00)	(26,88)
		10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	90.879.000,00	88.140.000,00	2.739.000,00	3,11
		11	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	5.709.000,00	9.468.000,00	(3.759.000,00)	(39,70)
		12	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Pengolahan Lainnya	0,00	17.066.250,00	(17.066.250,00)	(100,00)
		13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	250.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(50,00)
		14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	39.155.151,00	0,00	39.155.151,00	100,00
		15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.669.553.447,00	1.366.622.971,00	302.930.476,00	22,17
		16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	42.300.000,00	39.835.000,00	2.465.000,00	6,19
		17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	131.720.000,00	0,00	131.720.000,00	100,00
		18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	965.186.000,00	662.431.082,00	302.754.918,00	45,70
		19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	461.468.523,00	416.826.610,00	44.641.913,00	10,71
		20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	12.345.000,00	15.525.000,00	(3.180.000,00)	(20,48)
		21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)	(100,00)
		22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
			Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan				
		23	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	120.000.000,00	117.300.000,00	2.700.000,00	2,30
		24	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	99.964.000,00	64.493.220,00	35.470.780,00	55,00
		25	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	28.971.000,00	28.314.000,00	657.000,00	2,32
		26	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	#DIV/0!
		27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	99.819.500,00	183.581.000,00	(83.761.500,00)	(45,63)
		28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	729.461.500,00	562.244.295,00	167.217.205,00	29,74
		29	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	388.085.800,00	341.907.573,00	46.178.227,00	13,51
		30	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	54.623.000,00	0,00	54.623.000,00	100,00
		31	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	626.480.000,00	830.563.050,00	(204.083.050,00)	(24,57)
C	**Jumlah C (1 s/d 17)**		**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**7.098.353.180,00**	**9.992.944.417,00**	**(2.894.591.237,00)**	**(28,97)**
		1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.067.921.014,00	6.325.363.141,00	(1.257.442.127,00)	(19,88)
		2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	29.446.000,00	25.000.000,00	4.446.000,00	17,78
		3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	194.849.000,00	0,00	194.849.000,00	100,00
		4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	174.710.300,00	(174.710.300,00)	(100,00)
		5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	403.496.682,00	221.969.127,00	181.527.555,00	81,78
		6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pemotong Hewan	0,00	193.555.000,00	(193.555.000,00)	(100,00)
		7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	69.887.800,00	(69.887.800,00)	(100,00)
		8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	39.803.000,00	12.607.000,00	27.196.000,00	215,72
		9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	138.206.100,00	192.236.000,00	(54.029.900,00)	(28,11)

(dalam rupiah)

No	Point	Uraian		Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
		10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	632.863.122,00	814.431.079,00	(181.567.957,00)	(22,29)
		11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	65.990.100,00	179.836.400,00	(113.846.300,00)	(63,31)
		12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	209.807.750,00	651.304.500,00	(441.496.750,00)	(67,79)
		14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	224.178.130,00	(224.178.130,00)	(100,00)
		15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
		16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	309.698.412,00	884.453.940,00	(574.755.528,00)	(64,98)
		17	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	6.272.000,00	3.412.000,00	2.860.000,00	83,82
D	**Jumlah D (1 s/d 8)**		**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**21.019.092.946,00**	**528.349.000,00**	**20.490.743.946,00**	**3.878,26**
		1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	398.449.000,00	(398.449.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	11.501.000,00	0,00	11.501.000,00	100,00
		4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	4.499.164.400,00	0,00	4.499.164.400,00	100,00
		5	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur		0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	16.112.045.546,00	0,00	16.112.045.546,00	100,00
		7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	396.382.000,00	129.900.000,00	266.482.000,00	205,14
E	**Jumlah E (1 s/d 2)**		**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**112.500.000,00**	**0,00**	**112.500.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
		2	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
F	**Jumlah F (1 s/d 1)**		**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan Penurunan	%
4	(A+B)		**Belanja Perjalanan Dinas**	**155.344.259.077,00**	**124.320.743.471,00**	**31.023.515.606,00**	**24,95**
A	Jumlah A (1 s/d 5)		**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**155.226.042.049,00**	**124.320.743.471,00**	**30.905.298.578,00**	**24,86**
		1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.502.264.489,00	75.914.499.251,00	30.587.765.238,00	40,29
		2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	74.293.332,00	(74.293.332,00)	(100,00)
		3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.535.131.560,00	48.331.950.888,00	203.180.672,00	0,42
		4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	152.646.000,00	0,00	152.646.000,00	100,00
		5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
B	Jumlah B (1)		**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**	**118.217.028,00**	**0,00**	**118.217.028,00**	**100,00**
		1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	118.217.028,00	0,00	118.217.028,00	100,00
5	(A+B)		**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**45.460.619.230,00**	**14.999.880.200,00**	**30.460.739.030,00**	**203,07**
A	Jumlah A (1 s/d 5)		**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**45.153.336.730,00**	**14.465.609.700,00**	**30.687.727.030,00**	**212,14**
		1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.542.161.730,00	1.304.169.700,00	2.237.992.030,00	171,60
		2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	32.088.675.000,00	1.371.440.000,00	30.717.235.000,00	2.239,78
		3	Belanja Beasiswa	9.522.500.000,00	11.550.000.000,00	(2.027.500.000,00)	(17,55)
		4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)	(100,00)
		5	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Jumlah B (1 s/d 2)		**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**307.282.500,00**	**534.270.500,00**	**(226.988.000,00)**	**(42,49)**
		1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	307.282.500,00	534.270.500,00	(226.988.000,00)	(42,49)
		2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	(A)		**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**24.838.471.280,00**	**0,00**	**24.838.471.280,00**	**100,00**
A	Jumlah A (1)		**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**24.838.471.280,00**	**0,00**	**24.838.471.280,00**	**100,00**
		1	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.838.471.280,00	0,00	24.838.471.280,00	100,00
7	(A)		**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**53.653.366.223,61**	**42.523.227.508,61**	**11.130.138.715,00**	**26,17**
A	Jumlah A (1)		**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**53.653.366.223,61**	**42.523.227.508,61**	**11.130.138.715,00**	**26,17**
		1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.653.366.223,61	42.523.227.508,61	11.130.138.715,00	26,17
JUMLAH				**834.570.312.408,61**	**698.410.047.416,22**	**136.160.264.992,39**	**19,50**

Data tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 senilai Rp834.570.312.408,61 atau 84,01% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD senilai Rp993.395.407.456,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp698.410.047.416,22, Belanja Barang dan Jasa mengalami **kenaikan** senilai Rp136.160.264.992,39 atau 19,50%. Tidak tercapainya realisasi anggaran dikarenakan adanya beberapa kendala seperti Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai kebutuhan, belanja yang tidak terlaksana, dan pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman penyelenggara dalam melakukan proses belanja.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah	Tahun 2023	Tahun 2022
	163.011.244.933,00	80.981.838.137,07

Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp183.280.304.201,00 dengan realisasi senilai Rp163.011.244.933,00 atau 88,94%. Rincian Anggaran dan Realisai Belanja Hibah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah per OPD
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	Dinas Pendidikan	17.942.969.728,00	17.871.668.643,00	99,60
2	Dinas Kesehatan	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	59.990.272.656,00	55.287.353.417,00	92,16
4	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	3.320.000.000,00	3.319.106.227,00	99,97
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	148.028.250,00	121.289.700,00	81,94
6	Dinas Pangan	1.268.383.400,00	882.345.240,00	69,56
7	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	1.080.050.000,00	1.016.457.000,00	94,11
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.165.500.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1.910.000,00	1.910.000,00	100,00
10	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	499.710.000,00	273.410.760,00	54,71
11	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	4.037.806.756,00	2.550.011.573,00	63,15
12	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.282.559.000,00	1.061.677.000,00	82,78
13	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	3.785.368.000,00	3.760.496.400,00	99,34
14	Dinas Perikanan	16.899.985.000,00	14.392.874.053,00	85,17
15	Dinas Pertanian & Peternakan	17.753.974.300,00	13.238.208.343,00	74,56
16	Dinas Perkebunan	3.642.757.200,00	3.436.610.100,00	94,34
17	Sekretariat Daerah	21.644.896.000,00	18.975.000.000,00	87,67
18	Kec Teluk Bayur	227.402.000,00	227.262.000,00	99,94
19	Badan Kesatuan, Politik & Linmas	27.888.731.911,00	25.895.564.477,00	92,85
	Jumlah	**183.280.304.201,00**	**163.011.244.933,00**	**88,94**

Realisasi Belanja Hibah Tahu Anggaran 2023 adalah senilai Rp163.011.244.933,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp82.029.406.795,93 atau 102,29% dari Tahun Anggaran 2022 senilai Rp80.981.838.137,07. Rincian realisasi Belanja Hibah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.46 Realisasi Belanja Hibah per OPD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	17.871.668.643,00	58.605.922.566,07	(40.734.253.923,07)	(69,51)
2	Dinas Kesehatan	700.000.000,00	722.900.000,00	(22.900.000,00)	(3,17)
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	55.287.353.417,00	0,00	55.287.353.417,00	100,00
4	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	3.319.106.227,00	0,00	3.319.106.227,00	100,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	121.289.700,00	179.487.000,00	(58.197.300,00)	(32,42)
6	Dinas Pangan	882.345.240,00	0,00	882.345.240,00	100,00
7	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	1.016.457.000,00	0,00	1.016.457.000,00	100,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	100,00
10	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	273.410.760,00	0,00	273.410.760,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	2.550.011.573,00	4.775.000.000,00	(2.224.988.427,00)	(46,60)
12	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.061.677.000,00	500.000.000,00	561.677.000,00	112,34
13	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	3.760.496.400,00	0,00	3.760.496.400,00	100,00
14	Dinas Perikanan	14.392.874.053,00	0,00	14.392.874.053,00	100,00
15	Dinas Pertanian & Peternakan	13.238.208.343,00	0,00	13.238.208.343,00	100,00
16	Dinas Perkebunan	3.436.610.100,00	0,00	3.436.610.100,00	100,00
17	Sekretariat Daerah	18.975.000.000,00	13.054.000.000,00	5.921.000.000,00	45,36
18	Kec Teluk Bayur	227.262.000,00	0,00	227.262.000,00	100,00
19	Badan Kesatuan, Politik & Linmas	25.895.564.477,00	3.144.528.571,00	22.751.035.906,00	723,51
	Jumlah	**163.011.244.933,00**	**80.981.838.137,07**	**82.029.406.795,93**	**101,29**

Dari tabel diatas terdapat Belanja Hibah di beberapa OPD antara lain:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
c. Dinas Pertanian dan Peternakan;
d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. Dinas Perikanan;
g. Dinas Perkebunan;
h. Badan Kesbang, Politik dan Linmas;
i. Dinas Kesehatan;
j. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
k. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
m. Dinas Pangan;

n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

o. Kecamatan Teluk Bayur;

p. Sekretariat Daerah;

q. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2023	Tahun 2022
	8.536.409.701,00	6.721.844.294,00

Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp9.414.800.000,00 dengan realisasi senilai Rp8.536.409.701,00 atau 90,67%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Bantuan Sosial	9.414.800.000,00	8.536.409.701,00	90,67
JUMLAH		**9.414.800.000,00**	**8.536.409.701,00**	**90,67**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp8.536.409.701,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.814.565.407,00 atau 27,00% dari Tahun Anggaran 2022 senilai Rp6.721.844.294,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Realisasi Belanja Sosial
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Bantuan Sosial	8.536.409.701,00	6.721.844.294,00	1.814.565.407,00	27,00
	JUMLAH	**8.536.409.701,00**	**6.721.844.294,00**	**1.814.565.407,00**	**27,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial terdiri dari beberapa OPD antara lain :

a. Dinas Sosial, penggunaannya untuk tunjangan yatim piatu, lansia, kebakaran dan kematian, senilai Rp8.487.714.821,00;

b. BPKAD, penggunaannya untuk dana santunan kerohiman, tanam tumbuh, senilai Rp48.694.880,00.

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Tahun 2023	Tahun 2022
	2.345.617.541.442,00	1.028.531.224.206,00

Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp2.583.507.416.051,00 dengan realisasi senilai Rp2.345.617.541.442,00 atau 90,79%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Modal Tanah	17.447.199.000,00	7.825.488.693,00	44,85
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.524.561.369,00	172.966.458.500,00	92,24
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.913.853.309,00	307.876.754.279,00	85,54
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.009.310.327.282,00	1.848.412.488.655,00	91,99
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.311.475.091,00	8.536.351.315,00	91,68
	JUMLAH	**2.583.507.416.051,00**	**2.345.617.541.442,00**	**90,79**



Gambar 5.13 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp2.345.617.541.442,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.317.086.317.236,00 atau 128,06% dari Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.028.531.224.206,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.50 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
			Murni	Pembayaran Utang			
1	Belanja Modal Tanah	7.825.488.693,00	192.821.000,00	0,00	192.821.000,00	7.632.667.693,00	3.958,42
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.966.458.500,00	119.216.483.894,00	0,00	119.216.483.894,00	53.749.974.606,00	45,09
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.876.754.279,00	149.766.997.169,48	5.837.603.180,52	155.604.600.350,00	152.272.153.929,00	97,86

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
			Murni	Pembayaran Utang			
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.848.412.488.655,00	743.577.956.486,13	6.224.675.825,87	749.802.632.312,00	1.098.609.856.343,00	146,52
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.536.351.315,00	3.714.686.650,00	0,00	3.714.686.650,00	4.821.664.665,00	129,80
	JUMLAH	**2.345.617.541.442,00**	**1.016.468.945.199,61**	**12.062.279.006,39**	**1.028.531.224.206,00**	**1.317.086.317.236,00**	**128,06**



Gambar 5.14 Perbandingan Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Tahun 2023	Tahun 2022
	7.825.488.693,00	192.821.000,00

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp17.447.199.000,00 dengan realisasi senilai Rp7.825.488.693,00 atau 44,85%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
	Belanja Modal Tanah			
1	**Belanja Modal Tanah Persil**	**10.947.199.000,00**	**7.825.488.693,00**	**71,48**
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.943.000.000,00	3.569.414.693,00	90,53
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.719.199.000,00	4.256.074.000,00	90,19
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	2.285.000.000,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Modal Tanah Non Persil**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	**Belanja Modal Lapangan**	**6.500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**17.447.199.000,00**	**7.825.488.693,00**	**44,85**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp7.825.488.693,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp7.632.667.693,00 atau 3.958,42% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp192.821.000,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.52 Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
Belanja Modal Tanah					
1	**Belanja Modal Tanah Persil**	**7.825.488.693,00**	**124.821.000,00**	**7.700.667.693,00**	**6169,37**
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.569.414.693,00	0,00	3.569.414.693,00	100,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.256.074.000,00	124.821.000,00	4.131.253.000,00	3309,74
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Modal Tanah Non Persil**	**0,00**	**68.000.000,00**	**(68.000.000,00)**	(100,00)
	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	0,00	68.000.000,00	(68.000.000,00)	(100,00)
3	**Belanja Modal Lapangan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**7.825.488.693,00**	**192.821.000,00**	**7.632.667.693,00**	**3958,42**

Dari tabel diatas tidak terealisasinya Belanja Modal Tanah secara maksimal disebabkan adanya kegiatan pengadaan tanah pembangunan skala kecil yang dialokasikan di APBD-Perubahan sehingga tidak tersedia cukup waktu untuk merealisasikannya.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2023	Tahun 2022
	172.966.458.500,00	119.216.483.894,00

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 senilai Rp187.524.561.369,00 dengan realisasi senilai Rp172.966.458.500,00

atau 92,24%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1	**(A+B)**		**Belanja Modal Alat Besar**	**5.007.756.955,00**	**4.264.187.780,00**	**85,15**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Besar Darat**	**3.571.923.000,00**	**2.869.000.000,00**	**80,32**
		1	Belanja Modal Tractor	550.000.000,00	495.500.000,00	90,09
		2	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Mesin Proses	21.923.000,00	13.500.000,00	61,58
		4	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	3.000.000.000,00	2.360.000.000,00	78,67
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Besar Apung**	**7.310.000,00**	**7.310.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Kapal Tarik	7.310.000,00	7.310.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Mesin Proses Apung	0,00	0,00	0,00
C	**Jumlah C (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Alat Bantu**	**1.428.523.955,00**	**1.387.877.780,00**	**97,15**
		1	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Electric Generating Set	143.978.000,00	143.925.000,00	99,96
		3	Belanja Modal Pompa	1.064.911.900,00	1.045.556.000,00	98,18
		4	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00
		5	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00
		7	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	219.634.055,00	198.396.780,00	90,33
2	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Angkutan**	**42.887.942.000,00**	**38.427.246.378,00**	**89,60**
A	**Jumlah A (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**40.052.942.000,00**	**37.655.722.678,00**	**94,01**
		1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.503.644.000,00	8.916.969.754,00	93,83
		2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	16.417.108.000,00	15.462.607.953,00	94,19
		3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.041.846.000,00	1.892.000.000,00	92,66
		4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.018.544.000,00	3.817.344.971,00	94,99
		5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.411.800.000,00	1.260.800.000,00	89,30
		6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.660.000.000,00	6.306.000.000,00	94,68
		7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor**	**2.770.000.000,00**	**706.588.700,00**	**25,51**
		1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	670.000.000,00	608.088.700,00	90,76
		2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.100.000.000,00	98.500.000,00	4,69

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
C	**Jumlah C (1)**	**1**	**Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	0,00	0,00	0,00
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor**	**65.000.000,00**	**64.935.000,00**	**99,90**
		1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	65.000.000,00	64.935.000,00	99,90
3	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**2.177.207.100,00**	**2.116.554.200,00**	**97,21**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**	**73.248.100,00**	**55.910.700,00**	**76,33**
		1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	73.248.100,00	55.910.700,00	76,33
		2	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin**	**13.959.000,00**	**6.696.500,00**	**47,97**
		1	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	314.000,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	13.645.000,00	6.696.500,00	49,08
		3	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00
C	**Jumlah C (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Ukur**	**2.090.000.000,00**	**2.053.947.000,00**	**98,27**
		1	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	2.090.000.000,00	2.053.947.000,00	98,27
		4	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00
						!
4	**(A)**		**Belanja Modal Alat Pertanian**	**256.485.000,00**	**239.163.750,00**	**93,25**
A	**Jumlah A (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Alat Pengolahan**	**256.485.000,00**	**239.163.750,00**	**93,25**
		1	Belanja Modal Alat Pengolahan	23.990.000,00	19.957.800,00	83,19
		2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
		3	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	173.086.000,00	161.529.350,00	93,32
		5	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	56.909.000,00	55.176.600,00	96,96
5	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**30.724.525.190,00**	**29.204.567.522,00**	**95,05**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Kantor**	**1.861.757.800,00**	**1.304.079.180,00**	**70,05**
		1	Belanja Modal Mesin Ketik	12.680.000,00	12.000.000,00	94,64
		2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	376.394.000,00	227.000.000,00	60,31
		3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	206.276.000,00	201.011.000,00	97,45
		4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.266.407.800,00	864.068.180,00	68,23
B	**Jumlah B (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**28.648.800.390,00**	**27.690.911.810,00**	**96,66**
		1	Belanja Modal Mebel	23.770.697.000,00	23.270.005.445,00	97,89

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		3	Belanja Modal Alat Pembersih	13.416.000,00	13.300.000,00	99,14
		4	Belanja Modal Alat Pendingin	1.941.340.800,00	1.828.963.940,00	94,21
		5	Belanja Modal Alat Dapur	10.183.000,00	6.738.500,00	66,17
		6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.714.430.590,00	2.398.745.445,00	88,37
		7	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	198.733.000,00	173.158.480,00	87,13
C	**Jumlah C (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**213.967.000,00**	**209.576.532,00**	**97,95**
		1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	67.820.000,00	67.699.000,00	99,82
		3	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.302.000,00	25.109.000,00	99,24
		4	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	48.484.000,00	48.452.032,00	99,93
		5	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	72.361.000,00	68.316.500,00	94,41
6	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**6.505.517.938,00**	**6.062.225.231,00**	**93,19**
A	**Jumlah A (1 s/d 6)**		**Belanja Modal Alat Studio**	**6.364.430.938,00**	**5.938.104.231,00**	**93,30**
		1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	864.986.550,00	797.863.960,00	92,24
		2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.679.200.000,00	1.468.637.950,00	87,46
		3	Belanja Modal Peralatan Cetak	200.000.000,00	198.908.151,00	99,45
		4	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00
		5	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	851.954.000,00	803.260.000,00	94,28
		6	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.768.290.388,00	2.669.434.170,00	96,43
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**127.487.000,00**	**110.521.000,00**	**86,69**
		1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	12.400.000,00	12.080.000,00	97,42
		2	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	115.087.000,00	98.441.000,00	85,54
		3	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Peralatan Pemancar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00
D	**Jumlah D (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Alat Pengatur Telekomunikasi	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Peralatan Komunikasi dan Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
		1	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	**(A+B)**		**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**6.510.537.200,00**	**5.744.608.588,00**	**88,24**
A	**Jumlah A (1 s/d 11)**		**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**3.590.552.000,00**	**2.997.622.694,00**	**83,49**
		1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.017.111.514,00	842.465.387,00	82,83
		2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	905.196.000,00	843.710.100,00	93,21

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		3	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	986.065.710,00	888.048.907,00	90,06
		5	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	7.200.000,00	6.891.300,00	95,71
		6	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00
		7	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00
		9	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	128.595.000,00	0,00	0,00
		10	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	24.846.000,00	12.328.000,00	49,62
		11	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	521.537.776,00	404.179.000,00	77,50
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**2.919.985.200,00**	**2.746.985.894,00**	**94,08**
		1	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.919.985.200,00	2.746.985.894,00	94,08
8	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**4.378.122.000,00**	**1.900.362.378,00**	**43,41**
A	**Jumlah A (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**3.653.246.000,00**	**1.190.745.378,00**	**32,59**
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	200.000.000,00	198.169.100,00	99,08
		4	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	31.600.000,00	28.300.000,00	89,56
		5	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.027.427.000,00	956.783.778,00	93,12
		7	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	2.394.219.000,00	7.492.500,00	0,31
B	**Jumlah B (1 s/d 6)**		**Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah**	**724.876.000,00**	**709.617.000,00**	**97,89**
		1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	425.000.000,00	410.750.000,00	96,65
		3	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	0,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	118.376.000,00	118.313.000,00	99,95
		5	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	181.500.000,00	180.554.000,00	99,48
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
9	**(A+B)**		**Belanja Modal Komputer**	**31.358.937.588,00**	**29.936.695.920,00**	**95,46**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Komputer Unit**	**19.638.615.788,00**	**19.079.655.676,00**	**97,15**
		1	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.104.947.000,00	1.099.182.750,00	99,48
		2	Belanja Modal Personal Computer	15.972.601.000,00	15.555.332.815,00	97,39
		3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.561.067.788,00	2.425.140.111,00	94,69
B	**Jumlah B (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**11.720.321.800,00**	**10.857.040.244,00**	**92,63**
		1	Belanja Modal Peralatan Mainframe	33.760.000,00	33.211.200,00	98,37
		2	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	246.271.000,00	237.871.000,00	96,59
		3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	590.479.000,00	477.400.740,00	80,85
		4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	793.963.000,00	749.711.700,00	94,43
		5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.055.848.800,00	9.358.845.604,00	93,07
10	**(A)**		**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**1.165.544.520,00**	**1.121.756.500,00**	**96,24**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**	**1.165.544.520,00**	**1.121.756.500,00**	**96,24**
		1	Belanja Modal Elektronik/Electric	1.165.544.520,00	1.121.756.500,00	96,24
11	**(A)**		**Belanja Modal Alat Pengeboran**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Peralatan Bantu	0,00	0,00	0,00
12	**(A + B)**		**Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian**	**200.000.000,00**	**99.950.000,00**	**49,98**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Sumur**	**100.000.000,00**	**99.950.000,00**	**99,95**
		1	Belanja Modal Sumur Pemboran	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Produksi**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Produksi Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00
13	**(B)**		**Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi**	**666.230.150,00**	**61.019.780,00**	**9,16**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Bantu Produksi**	**666.230.150,00**	**61.019.780,00**	**9,16**
			Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	666.230.150,00	61.019.780,00	9,16
14	**(A+B)**		**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**79.638.000,00**	**53.114.500,00**	**66,69**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Deteksi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Pelindung**	**79.638.000,00**	**53.114.500,00**	**66,69**
		1	Belanja Modal Baju Pengaman	31.350.000,00	31.350.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	48.288.000,00	21.764.500,00	45,07
15	**(A)**		**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**33.096.350.000,00**	**32.167.651.000,00**	**97,19**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
A	Jumlah A (1 s/d 2)		**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**33.096.350.000,00**	**32.167.651.000,00**	**97,19**
		1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	137.850.000,00	136.513.000,00	99,03
		2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	32.958.500.000,00	32.031.138.000,00	97,19
16	(A)		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**144.200.000,00**	**143.650.000,00**	**99,62**
A	Jumlah A (1 s/d 3)		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**144.200.000,00**	**143.650.000,00**	**99,62**
		1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Peralatan Permainan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		3	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	114.800.000,00	114.250.000,00	99,52
17	(A)		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**14.599.816.571,00**	**14.271.650.627,00**	**97,75**
A	Jumlah A (1)		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**14.599.816.571,00**	**14.271.650.627,00**	**97,75**
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	14.599.816.571,00	14.271.650.627,00	97,75
18	(A)		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**7.765.751.157,00**	**7.152.054.346,00**	**92,10**
A	Jumlah A (1)		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**7.765.751.157,00**	**7.152.054.346,00**	**92,10**
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.765.751.157,00	7.152.054.346,00	92,10
			Jumlah	**187.524.561.369,00**	**172.966.458.500,00**	**92,24**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 senilai Rp172.966.458.500,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp53.749.974.606,00 atau 45,09% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yang direalisasikan senilai Rp119.216.483.894,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.54 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
1	(A+B)		**Belanja Modal Alat Besar**	**4.264.187.780,00**	**7.912.161.121,00**	**(3.647.973.341,00)**	**(46,11)**
A	Jumlah A (1 s/d 4)		**Belanja Modal Alat Besar Darat**	**2.869.000.000,00**	**5.334.544.361,00**	**(2.465.544.361,00)**	**(46,22)**
		1	Belanja Modal Tractor	495.500.000,00	0,00	495.500.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	997.136.000,00	(997.136.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Mesin Proses	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00
		4	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	2.360.000.000,00	4.337.408.361,00	(1.977.408.361,00)	(45,59)
B	Jumlah B (1 s/d 2)		**Belanja Modal Alat Besar Apung**	**7.310.000,00**	**7.410.000,00**	**(100.000,00)**	**(1,35)**
		1	Belanja Modal Kapal Tarik	7.310.000,00	0,00	7.310.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Mesin Proses Apung	0,00	7.410.000,00	(7.410.000,00)	(100,00)
C	Jumlah C (1 s/d 7)		**Belanja Modal Alat Bantu**	**1.387.877.780,00**	**2.570.206.760**	**(1.182.328.980,00)**	**(46,00)**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
		1	Belanja Modal Compressor	0,00	2.300.000,00	(2.300.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Electric Generating Set	143.925.000,00	1.773.623.360,00	(1.629.698.360,00)	(91,89)
		3	Belanja Modal Pompa	1.045.556.000,00	11.422.300,00	1.034.133.700,00	9.053,64
		4	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	28.645.000,00	(28.645.000,00)	(100,00)
		7	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	198.396.780,00	754.216.100,00	(555.819.320,00)	(73,69)
2	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Angkutan**	**38.427.246.378,00**	**30.402.736.108,00**	**8.024.510.270,00**	**26,39**
A	**Jumlah A (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**37.655.722.678,00**	**30.402.736.108,00**	**7.252.986.570,00**	**23,86**
		1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.916.969.754,00	8.270.883.075,00	646.086.679,00	7,81
		2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	15.462.607.953,00	5.025.570.000,00	10.437.037.953,00	207,68
		3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.892.000.000,00	4.823.544.700,00	(2.931.544.700,00)	(60,78)
		4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.817.344.971,00	5.002.299.533,00	(1.184.954.562,00)	(23,69)
		5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.260.800.000,00	77.861.000,00	1.182.939.000,00	1.519,30
		6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.306.000.000,00	7.202.577.800,00	(896.577.800,00)	(12,45)
		7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor**	**706.588.700,00**	**0,00**	**706.588.700,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	608.088.700,00	0,00	608.088.700,00	100,00
		2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	98.500.000,00	0,00	98.500.000,00	100,00
C	**Jumlah C (1)**	**1**	**Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor**	**64.935.000,00**	**0,00**	**64.935.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	64.935.000,00	0,00	64.935.000,00	100,00
3	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**2.116.554.200,00**	**1.304.467.755,00**	**812.086.445,00**	**62,25**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**	**55.910.700,00**	**3.500.000,00**	**52.410.700,00**	**1.497,45**
		1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	55.910.700,00	0,00	55.910.700,00	100,00
		2	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin**	**6.696.500,00**	**1.000.000,00**	**5.696.500,00**	**569,65**
		1	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	6.696.500,00	0,00	6.696.500,00	100,00
		3	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
C	**Jumlah C (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Ukur**	**2.053.947.000,00**	**1.299.967.755,00**	**753.979.245,00**	**58,00**
		1	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
		2	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	97.720.900	(97.720.900,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	2.053.947.000,00	699.483.000,00	1.354.464.000,00	193,64
		4	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	502.763.855,00	(502.763.855,00)	(100,00)
4	**(A)**		**Belanja Modal Alat Pertanian**	**239.163.750,00**	**44.100.300,00**	**195.063.450,00**	**442,32**
A	**Jumlah A (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Alat Pengolahan**	**239.163.750,00**	**44.100.300,00**	**195.063.450,00**	**442,32**
		1	Belanja Modal Alat Pengolahan	19.957.800,00	0,00	19.957.800,00	100,00
		2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		3	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	8.658.000,00	(8.658.000,00)	(100,00)
		4	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	161.529.350,00	0,00	161.529.350,00	100,00
		5	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	55.176.600,00	35.442.300,00	19.734.300,00	55,68
5	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**29.204.567.522,00**	**21.942.074.079,00**	**7.262.493.443,00**	**33,10**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Alat Kantor**	**1.304.079.180,00**	**1.865.905.983,00**	**(561.826.803,00)**	**(30,11)**
		1	Belanja Modal Mesin Ketik	12.000.000,00	42.013.000,00	(30.013.000,00)	(71,44)
		2	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	227.000.000,00	428.534.100,00	(201.534.100,00)	(47,03)
		3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	201.011.000,00	80.020.500,00	120.990.500,00	151,20
		4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	864.068.180,00	1.315.338.383,00	(451.270.203,00)	(34,31)
B	**Jumlah B (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**27.690.911.810,00**	**19.685.206.440,00**	**8.005.705.370,00**	**40,67**
		1	Belanja Modal Mebel	23.270.005.445,00	15.934.447.942,00	7.335.557.503,00	46,04
		3	Belanja Modal Alat Pembersih	13.300.000,00	168.825.550,00	(155.525.550,00)	(92,12)
		4	Belanja Modal Alat Pendingin	1.828.963.940,00	1.907.850.845,00	(78.886.905,00)	(4,13)
		5	Belanja Modal Alat Dapur	6.738.500,00	145.097.864,00	(138.359.364,00)	(95,36)
		6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.398.745.445,00	1.476.311.439,00	922.434.006,00	62,48
		7	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	173.158.480,00	52.672.800,00	120.485.680,00	228,74
C	**Jumlah C (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**209.576.532,00**	**390.961.656,00**	**(181.385.124,00)**	**(46,39)**
		1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	117.000.000,00	(117.000.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	67.699.000,00	0,00	67.699.000,00	100,00
		3	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.109.000,00	173.880.000,00	(148.771.000,00)	(85,56)
		4	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	48.452.032,00	33.355.406,00	15.096.626,00	45,26
		5	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	68.316.500,00	66.726.250,00	1.590.250,00	2,38
6	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**6.062.225.231,00**	**2.492.155.212,00**	**3.570.070.019,00**	**143,25**
A	**Jumlah A (1 s/d 6)**		**Belanja Modal Alat Studio**	**5.938.104.231,00**	**2.082.898.612,00**	**3.855.205.619,00**	**185,09**
		1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	797.863.960,00	15.665.050,00	782.198.910,00	4.993,27
		2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.468.637.950,00	554.484.413,00	914.153.537,00	164,87
		3	Belanja Modal Peralatan Cetak	198.908.151,00	0,00	198.908.151,00	100,00
		4	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
		5	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	803.260.000,00	319.807.000,00	483.453.000,00	151,17
		6	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.669.434.170,00	1.192.942.149,00	1.476.492.021,00	123,77
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**110.521.000,00**	**130.896.000,00**	**(20.375.000,00)**	**(15,57)**
		1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	12.080.000,00	130.896.000,00	(118.816.000,00)	(90,77)
		2	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	98.441.000,00	0,00	98.441.000,00	100,00
		3	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Peralatan Pemancar**	**0,00**	**50.000.000,00**	**(50.000.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
D	**Jumlah D (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi**	**13.600.000,00**	**228.360.600,00**	**(214.760.600,00)**	**(94,04)**
		1	Belanja Modal Alat Pengatur Telekomunikasi	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Peralatan Komunikasi dan Dokumentasi	0,00	130.472.100,00	(130.472.100,00)	(100,00)
		1	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00	97.888.500,00	(97.888.500,00)	(100,00)
7	**(A+B)**		**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**5.744.608.588,00**	**9.820.598.797,00**	**(4.075.990.209,00)**	**(41,50)**
A	**Jumlah A (1 s/d 11)**		**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**2.997.622.694,00**	**5.880.444.779,00**	**(2.882.822.085,00)**	**(49,02)**
		1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	842.465.387,00	631.925.300,00	210.540.087,00	33,32
		2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	843.710.100,00	356.276.000,00	487.434.100,00	136,81
		3	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00		0,00	0,00
		4	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	888.048.907,00	3.115.484.311,00	(2.227.435.404,00)	(71,50)
		5	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	6.891.300,00	10.606.500,00	(3.715.200,00)	(35,03)
		6	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	218.999.800,00	(218.999.800,00)	(100,00)
		7	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	12.328.000,00	1.536.096.868,00	(1.523.768.868,00)	(99,20)
		11	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	404.179.000,00	11.056.000,00	393.123.000,00	3.555,74
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**2.746.985.894,00**	**3.940.154.018,00**	**(1.193.168.124,00)**	**(30,28)**
		1	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.746.985.894,00	3.938.054.018,00	(1.191.068.124,00)	(30,25)
8	**(A+B+C+D)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**1.900.362.378,00**	**3.882.682.135,00**	**(1.982.319.757,00)**	**(51,06)**
A	**Jumlah A (1 s/d 7)**		**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**1.190.745.378,00**	**1.586.839.635,00**	**(396.094.257,00)**	**(24,96)**
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	177.004.257,00	(177.004.257,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	9.400.000,00	(9.400.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	198.169.100,00	0,00	198.169.100,00	100,00
		4	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	28.300.000,00	43.450.000,00	(15.150.000,00)	(34,87)

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
		5	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	956.783.778,00	1.356.985.378,00	(400.201.600,00)	(29,49)
		7	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	7.492.500,00	0,00	7.492.500,00	100,00
B	**Jumlah B (1 s/d 6)**		**Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah**	**709.617.000,00**	**1.443.142.500,00**	**(733.525.500,00)**	**(50,83)**
		1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	174.545.000,00	(174.545.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	410.750.000,00	791.400.000,00	(380.650.000,00)	(48,10)
		3	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	352.200.000,00	(352.200.000,00)	(100,00)
		4	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	118.313.000,00	0,00	118.313.000,00	100,00
		5	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	180.554.000,00	124.997.500,00	55.556.500,00	44,45
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**	**0,00**	**848.200.000,00**	**(848.200.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	848.200.000,00	(848.200.000,00)	(100,00)
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica**	**0,00**	**4.500.000,00**	**(4.500.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
9	**(A+B)**		**Belanja Modal Komputer**	**29.936.695.920,00**	**25.109.971.354,00**	**4.826.724.566,00**	**19,22**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Komputer Unit**	**19.079.655.676,00**	**22.729.063.597,00**	**(3.649.407.921,00)**	**(16,06)**
		1	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.099.182.750,00	1.873.414.050,00	(774.231.300,00)	(41,33)
		2	Belanja Modal Personal Computer	15.555.332.815,00	16.641.428.880,00	(1.086.096.065,00)	(6,53)
		3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.425.140.111,00	4.214.220.667,00	(1.789.080.556,00)	(42,45)
B	**Jumlah B (1 s/d 5)**		**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**10.857.040.244,00**	**2.380.907.757,00**	**8.476.132.487,00**	**356,00**
		1	Belanja Modal Peralatan Mainframe	33.211.200,00	253.100.000,00	(219.888.800,00)	(86,88)
		2	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	237.871.000,00	0,00	237.871.000,00	100,00
		3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	477.400.740,00	61.065.740,00	416.335.000,00	681,78
		4	Belanja Modal Peralatan Jaringan	749.711.700,00	431.572.730,00	318.138.970,00	73,72
		5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.358.845.604,00	1.635.169.287,00	7.723.676.317,00	472,35
10	**(A)**		**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**1.121.756.500,00**	**5.061.600,00**	**1.116.694.900,00**	**22.062,09**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**	**1.121.756.500,00**	**5.061.600,00**	**1.116.694.900,00**	**22.062,09**
		1	Belanja Modal Elektronik/Electric	1.121.756.500,00	5.061.600,00	1.116.694.900,00	22.062,09
11	**(A)**		**Belanja Modal Alat Pengeboran**	**0,00**	**10.150.000,00**	**(10.150.000,00)**	**(100,00)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin**	**0,00**	**10.150.000,00**	**(10.150.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Peralatan Bantu	0,00	10.150.000,00	(10.150.000,00)	(100,00)
12	**(A + B)**		**Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian**	**99.950.000,00**	**0,00**	**99.950.000,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Sumur**	**99.950.000,00**	**0,00**	**99.950.000,00**	**100,00**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
		1	Belanja Modal Sumur Pemboran	99.950.000,00	0,00	99.950.000,00	100,00
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Produksi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**(B)**		**Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi**	**61.019.780,00**	**0,00**	**61.019.780,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Bantu Produksi**	**61.019.780,00**	0,00	**61.019.780,00**	**100,00**
			Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	61.019.780,00	0,00	61.019.780,00	100,00
14	**(A+B)**		**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**53.114.500,00**	**468.100.250,00**	**(414.985.750,00)**	**(88,65)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Alat Deteksi**	**0,00**	**268.530.000,00**	**(268.530.000,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	0,00	268.530.000,00	(268.530.000,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Alat Pelindung**	**53.114.500,00**	**199.570.250,00**	**(146.455.750,00)**	**(73,39)**
		1	Belanja Modal Baju Pengaman	31.350.000,00	0,00	31.350.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	21.764.500,00	199.570.250,00	(177.805.750,00)	(89,09)
15	**(A)**		**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**32.167.651.000,00**	**8.381.861.005,00**	**23.785.789.995,00**	**283,78**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**32.167.651.000,00**	**8.381.861.005,00**	**23.785.789.995,00**	**283,78**
		1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	136.513.000,00	148.499.000,00	(11.986.000,00)	(8,07)
		2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	32.031.138.000,00	8.233.362.005,00	23.797.775.995,00	289,04
16	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**143.650.000,00**	**137.784.000,00**	**5.866.000,00**	**4,26**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**143.650.000,00**	**137.784.000,00**	**5.866.000,00**	**4,26**
		1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Peralatan Permainan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
		3	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	114.250.000,00	137.784.000,00	(23.534.000,00)	(17,08)
17	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**14.271.650.627,00**	**0,00**	**14.271.650.627,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**14.271.650.627,00**	**0,00**	**14.271.650.627,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	14.271.650.627,00	0,00	14.271.650.627,00	100,00
18	**(A)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**7.152.054.346,00**	**7.302.580.178,00**	**(150.525.832,00)**	**(2,06)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**7.152.054.346,00**	**7.302.580.178,00**	**(150.525.832,00)**	**(2,06)**
		1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.152.054.346,00	7.302.580.178,00	(150.525.832,00)	(2,06)
			Jumlah	**172.966.458.500,00**	**119.216.483.894,00**	**53.749.974.606,00**	**45,09**

Dari tabel diatas tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak tersedia, barang yang dianggarkan di DPA tidak relevan dengan harga di pasaran (harga di pasaran lebih tinggi), keterlambatan proses lelang sehingga waktu pelaksanan tidak cukup dan gagal lelang karena tidak ada penyedia yang berminat.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2023	Tahun 2022
	307.876.754.279,00	155.604.600.350,00

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Angaran 2023 senilai Rp359.913.853.309,00 dengan realisasi senilai Rp307.876.574.279,00 atau 85,54%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1	**(A+B)**		**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**313.172.720.384,00**	**264.082.802.861,00**	**84,32**
A	**Jumlah A (1 s/d 19)**		**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**309.019.594.384,00**	**260.577.619.100,00**	**84,32**
		1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	62.845.694.392,00	59.818.241.319,00	95,18
		2	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	7.049.333.000,00	4.747.725.230,00	67,35
		4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	20.292.979.000,00	16.358.634.689,00	80,61
		5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	263.506.679,00	263.506.679,00	100,00
		6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.146.705.000,00	3.736.287.878,00	90,10
		7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36.736.555.602,00	34.292.770.006,00	93,35
		8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	286.000.000,00	284.979.508,00	99,64
		9	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	14.757.627.000,00	14.720.773.275,00	99,75
		10	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	175.000.000,00	169.952.100,00	97,12
		11	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	6.202.040.000,00	4.715.444.153,00	76,03
		12	Belanja Modal Bangunan Terbuka	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		13	Belanja Modal Bangunan Industri	2.765.858.000,00	418.916.923,00	15,15
		14	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	199.700.000,00	192.777.000,00	96,53
		15	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	23.046.757.400,00	21.047.600.059,00	91,33
		16	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	108.625.906.600,00	78.724.335.862,00	72,47
		17	Belanja Modal Bangunan Parkir	50.000.000,00	47.175.000,00	94,35
		18	Belanja Modal Taman	20.423.359.711,00	20.118.234.955,00	98,51
		19	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.142.572.000,00	910.264.464,00	79,67
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**	**4.153.126.000,00**	**3.505.183.761,00**	**84,40**
		1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Asrama	91.272.000,00	91.145.985,00	99,86
		3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	4.061.854.000,00	3.414.037.776,00	84,05

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
2	**(A)**		**Belanja Modal Bangunan Monumen**	**2.893.330.000,00**	**2.889.482.793,00**	**99,87**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti**	**2.893.330.000,00**	**2.889.482.793,00**	**99,87**
			Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	2.893.330.000,00	2.889.482.793,00	99,87
3	**(A)**		**Belanja Modal Bangunan Menara**	**400.000.000,00**	**399.100.000,00**	**99,78**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan**	**400.000.000,00**	**399.100.000,00**	**99,78**
		1	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	399.100.000,00	99,78
4	**(A)**		**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**1.213.950.000,00**	**1.048.238.000,00**	**86,35**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	**1.213.950.000,00**	**1.048.238.000,00**	**86,35**
		1	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Pagar	1.121.950.000,00	956.438.000,00	85,25
		3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	92.000.000,00	91.800.000,00	99,78
5	**(A)**		**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**42.233.852.925,00**	**39.457.130.625,00**	**93,43**
	Jumlah A (1)		**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**42.233.852.925,00**	**39.457.130.625,00**	**93,43**
		1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	42.233.852.925,00	39.457.130.625,00	93,43
Jumlah				**359.913.853.309,00**	**307.876.754.279,00**	**85,54**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp307.876.754.279,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp152.272.153.929,00 atau 97,86% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp155.604.600.350,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.56 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
1	**(A+B)**		**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**264.082.802.861,00**	**154.416.918.062,00**	**109.665.884.799,00**	**71,02**
A	**Jumlah A (1 s/d 19)**		**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**260.577.619.100,00**	**147.001.650.929,00**	**113.575.968.171,00**	**77,26**
		1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	59.818.241.319,00	32.136.829.194,00	27.681.412.125,00	86,14
		2	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	59.300.000,00	(59.300.000,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	4.747.725.230,00	0,00	4.747.725.230,00	100,00
		4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	16.358.634.689,00	7.253.993.750,00	9.104.640.939,00	125,51
		5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	263.506.679,00	2.962.113.244,00	(2.698.606.565,00)	(91,10)
		6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.736.287.878,00	507.851.839,00	3.228.436.039,00	635,70
		7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	34.292.770.006,00	50.226.365.034,00	(15.933.595.028,00)	(31,72)
		8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	284.979.508,00	20.940.885.577,00	(20.655.906.069,00)	(98,64)

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
		9	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	14.720.773.275,00	0,00	14.720.773.275,00	100,00
		10	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	169.952.100,00	446.297.195,00	(276.345.095,00)	(61,92)
		11	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	4.715.444.153,00	207.027.210,00	4.508.416.943,00	2.177,69
		12	Belanja Modal Bangunan Terbuka	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
		13	Belanja Modal Bangunan Industri	418.916.923,00	8.784.879.870,00	(8.365.962.947,00)	(95,23)
		14	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	192.777.000,00	0,00	192.777.000,00	100,00
		15	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21.047.600.059,00	15.324.933.043,00	5.722.667.016,00	37,34
		16	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	78.724.335.862,00	7.453.588.223,00	71.270.747.639,00	956,19
		17	Belanja Modal Bangunan Parkir	47.175.000,00		47.175.000,00	100,00
		18	Belanja Modal Taman	20.118.234.955,00	497.989.000,00	19.620.245.955,00	3.939,90
		19	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	910.264.464,00	199.597.750,00	710.666.714,00	356,05
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**	**3.505.183.761,00**	**7.415.267.133,00**	**(3.910.083.372,00)**	**(52,73)**
		1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	5.283.753.644,00	(5.283.753.644,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Asrama	91.145.985,00	1.294.025.326,00	(1.202.879.341,00)	(92,96)
		3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	3.414.037.776,00	837.488.163,00	2.576.549.613,00	307,65
2	**(A)**		**Belanja Modal Bangunan Monumen**	**2.889.482.793,00**	**98.790.000,00**	**2.790.692.793,00**	**2.824,87**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti**	**2.889.482.793,00**	**98.790.000,00**	**2.790.692.793,00**	**2.824,87**
			Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	2.889.482.793,00	98.790.000,00	2.790.692.793,00	2.824,87
3	**(A)**		**Belanja Modal Bangunan Menara**	**399.100.000,00**	**0,00**	**399.100.000,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan**	**399.100.000,00**	**0,00**	**399.100.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	399.100.000,00	0,00	399.100.000,00	100,00
4	**(A)**		**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**1.048.238.000,00**	**296.759.288,00**	**751.478.712,00**	**253,23**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	**1.048.238.000,00**	**296.759.288,00**	**751.478.712,00**	**253,23**
		1	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
		2	Belanja Modal Pagar	956.438.000,00	286.259.288,00	670.178.712,00	234,12
		3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	91.800.000,00	0,00	91.800.000,00	100,00
5	**(A)**		**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.457.130.625,00**	**792.133.000,00**	**38.664.997.625,00**	**4.881,12**
	Jumlah A (1)		**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**39.457.130.625,00**	**792.133.000,00**	**38.664.997.625,00**	**4.881,12**
		1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	39.457.130.625,00	792.133.000,00	38.664.997.625,00	4.881,12
Jumlah				**307.876.754.279,00**	**155.604.600.350,00**	**152.272.153.929,00**	**97,86**

Dari tabel diatas Belanja Modal Gedung dan Bangunan baik Anggaran maupun realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan di Tahun Anggaran 2023, namun belum mencapai target dari realisasi dari yang dianggarkan di masing – masing Tahun Anggaran. Tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan belum tuntasnya pembebasan lahan tanah (*clear dan clean*), tidak sepakatnya antara SKPD teknis dengan kepala wilayah

(Camat) di dalam penempatan lokasi bangunan, tidak siapnya sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan, gagal lelang karena tidak ada yang berminat, keterlambatan proses lelang sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	Tahun 2023	Tahun 2022
	1.848.412.488.655,00	749.802.632.312,00

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.009.310.327.282,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.227.064.433.376,00 atau 156,86% dibandingkann Tahun Anggaran 2022 senilai Rp782.245.893.906,00. Rincian anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
	Jumlah (1+2+3+4)		**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**			
1	**(A+B)**		**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.288.680.532.773,00**	**1.201.499.535.012,00**	**93,23**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Jalan**	**1.206.938.013.773,00**	**1.135.319.869.412,00**	**94,07**
		1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.205.518.958.773,00	1.133.907.691.935,00	94,06
		2	Belanja Modal Jalan Kota	360.000.000,00	359.582.000,00	99,88
		3	Belanja Modal Jalan Desa	859.355.000,00	854.132.637,00	99,39
		4	Belanja Modal Jalan Lainnya	199.700.000,00	198.462.840,00	99,38
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Jembatan**	**81.742.519.000,00**	**66.179.665.600,00**	**80,96**
		1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	81.742.519.000,00	66.179.665.600,00	**80,96**
2	**(A+B+C+D+E)**		**Belanja Modal Bangunan Air**	**708.623.855.509,00**	**643.717.997.979,00**	**90,84**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**88.039.600.000,00**	**84.742.400.917,00**	**96,25**
		1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	88.039.600.000,00	84.742.400.917,00	96,25
		2	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut**	**333.731.510.000,00**	**314.747.213.487,00**	**94,31**
		1	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	333.731.510.000,00	314.747.213.487,00	94,31
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**196.643.794.050,00**	**158.747.785.415,00**	**80,73**
		1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	196.643.794.050,00	158.747.785.415,00	80,73
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku**	**90.208.951.459,00**	**85.480.598.160,00**	94,76
		1	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	90.208.951.459,00	85.480.598.160,00	94,76
E	**Jumlah E (1)**		**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Instalasi**	**11.125.939.000,00**	**2.325.155.664,00**	**20,90**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**243.535.000,00**	**199.984.783,00**	**82,12**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	243.535.000,00	199.984.783,00	82,12
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**	**10.235.000.000,00**	**1.482.003.881,00**	**14,48**
		1	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	10.235.000.000,00	1.482.003.881,00	14,48
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik**	**647.404.000,00**	**643.167.000,00**	**99,35**
		1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	647.404.000,00	643.167.000,00	99,35
4	**(A+B)**		**Belanja Modal Jaringan**	**880.000.000,00**	**869.800.000,00**	**98,84**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Jaringan Listrik**	**880.000.000,00**	**869.800.000,00**	**98,84**
		1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	880.000.000,00	869.800.000,00	98,84
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Jaringan Telepon**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	**2.009.310.327.282,00**	**1.848.412.488.655,00**	**91,99**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.848.412.488.655,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.098.609.856.343,00 atau 146,52% dibandingkann Tahun Anggaran 2022 senilai Rp749.802.632.312,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.58 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (penurunan)	%
	Jumlah (1+2+3+4)		**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**				
1	**(A+B)**		**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**1.201.499.535.012,00**	**478.817.075.042,00**	**722.682.459.970,00**	**150,93**
A	**Jumlah A (1 s/d 4)**		**Belanja Modal Jalan**	**1.135.319.869.412,00**	**478.208.641.042,00**	**657.111.228.370,00**	**137,41**
		1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.133.907.691.935,00	448.088.571.398,00	685.819.120.537,00	153,05
		2	Belanja Modal Jalan Kota	359.582.000,00	30.120.069.644,00	(29.760.487.644,00)	(98,81)
		3	Belanja Modal Jalan Desa	854.132.637,00	0,00	854.132.637,00	100,00
		4	Belanja Modal Jalan Lainnya	198.462.840,00	0,00	198.462.840,00	100,00
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Jembatan**	**66.179.665.600,00**	**608.434.000,00**	**65.571.231.600,00**	**10.777,05**
		1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	66.179.665.600,00	608.434.000,00	65.571.231.600,00	**10.777,05**
2	**(A+B+C+D+E)**		**Belanja Modal Bangunan Air**	**643.717.997.979,00**	**225.204.129.967,00**	**418.513.868.012,00**	**185,84**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**84.742.400.917,00**	**24.613.635.477,00**	**60.128.765.440,00**	**244,29**
		1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	84.742.400.917,00	18.502.026.977,00	66.240.373.940,00	358,02
		2	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	5.940.098.500,00	(5.940.098.500,00)	(100,00)
		3	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi Lainnya	0,00	171.510.000,00	(171.510.000,00)	(100,00)
B	**Jumlah B (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut**	**314.747.213.487,00**	**133.470.107.213,00**	**181.277.106.274,00**	**135,82**
		1	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	314.747.213.487,00	133.470.107.213,00	181.277.106.274,00	135,82
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**158.747.785.415,00**	**60.646.004.645,00**	**98.101.780.770,00**	161,76
		1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	158.747.785.415,00	60.646.004.645,00	98.101.780.770,00	161,76
D	**Jumlah D (1)**		**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku**	**85.480.598.160,00**	**0,00**	**85.480.598.160,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	85.480.598.160,00	0,00	85.480.598.160,00	100,00

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (penurunan)	%
E	**Jumlah E (1)**		**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**0,00**	**6.474.382.632,00**	**(6.474.382.632,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	6.474.382.632,00	(6.474.382.632,00)	(100,00)
3	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Instalasi**	**2.325.155.664,00**	**43.251.023.403,00**	**(40.925.867.739,00)**	**(94,62)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**199.984.783,00**	**42.156.023.403,00**	**(41.956.038.620,00)**	**(99,53)**
		1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	199.984.783,00	42.156.023.403,00	(41.956.038.620,00)	(99,53)
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**	**1.482.003.881,00**	**1.095.000.000,00**	**387.003.881,00**	**35,34**
		1	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.482.003.881,00	1.095.000.000,00	387.003.881,00	35,34
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik**	**643.167.000,00**	**0,0**	**643.167.000,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	643.167.000,00	0,00	643.167.000,00	100,00
4	**(A+B)**		**Belanja Modal Jaringan**	**869.800.000,00**	**2.530.403.900,00**	**(1.660.603.900,00)**	**(65,63)**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Jaringan Listrik**	**869.800.000,00**	**2.505.987.500,00**	**(1.636.187.500,00)**	**(65,29)**
		1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	869.800.000,00	2.505.987.500,00	(1.636.187.500,00)	(65,29)
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Jaringan Telepon**	**0,00**	**24.416.400,00**	**(24.416.400,00)**	**(100,00)**
		1	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	0,00	24.416.400,00	(24.416.400,00)	(100,00)
			Jumlah	**1.848.412.488.655,00**	**749.802.632.312,00**	**1.098.609.856.343,00**	**146,52**

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap	Tahun 2023	Tahun 2022
Lainnya	8.536.351.315,00	3.714.686.650,00

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp9.311.475.091,00 dengan realisasi senilai Rp8.536.351.315 atau 91,68%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**2.117.844.100,00**	**2.076.913.704,00**	**98,07**
A	**Jumlah A (1 s/d 8)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**2.047.844.100,00**	**2.019.913.704,00**	**98,64**
		1	Belanja Modal Buku Umum	1.593.971.100,00	1.569.903.704,00	98,49
		2	Belanja Modal Buku Agama	9.516.000,00	9.200.000,00	96,68
		3	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	104.600.000,00	104.000.000,00	99,43
		4	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	47.100.000,00	46.640.000,00	99,02
		5	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	26.200.000,00	25.760.000,00	98,32
		6	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	111.612.000,00	111.000.000,00	99,45
		7	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	58.090.000,00	57.300.000,00	98,64
		8	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	96.755.000,00	96.110.000,00	99,33
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	2023		%
				Anggaran	Realisasi	
		1	Belanja Modal Audio Visual	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Musik**	**50.000.000,00**	**37.000.000,00**	**74,00**
		1	Belanja Modal Musik Lainnya	50.000.000,00	37.000.000,00	74,00
2	**(A+B)**		**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**114.457.000,00**	**108.577.366,00**	**94,86**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	**18.397.000,00**	**12.348.997,00**	**67,13**
		1	Belanja Modal Alat Musik	7.832.000,00	7.832.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	10.565.000,00	4.516.997,00	42,75
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan**	**96.060.000,00**	**96.228.369,00**	**100,18**
		1	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	66.000.000,00	64.560.375,00	97,82
		2	Belanja Modal Barang Kerajinan	17.528.000,00	17.528.000,00	100,00
		3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	12.532.000,00	14.139.994,00	112,83
3	**A**		**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**	**85.000.000,00**	**80.247.591,00**	**94,41**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**	**85.000.000,00**	**80.247.591,00**	**94,41**
		1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	85.000.000,00	80.247.591,00	94,41
4	**(A)**		**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**2.579.535.400,00**	**2.134.444.956,00**	**82,75**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**2.579.535.400,00**	**2.134.444.956,00**	**82,75**
		1	Belanja Modal Software	619.420.000,00	591.240.506,00	95,45
		2	Belanja Modal Kajian	1.960.115.400,00	1.543.204.450,00	78,73
5	**(A)**		**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**4.414.638.591,00**	**4.136.167.698,00**	**93,69**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**4.414.638.591,00**	**4.136.167.698,00**	**93,69**
		1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.414.638.591,00	4.136.167.698,00	93,69
			Jumlah	**9.311.475.091,00**	**8.536.351.315,00**	**91,68**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.536.351.315,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.821.664.665,00 atau 129,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.714.686.650,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.60 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
1	**(A+B+C)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**2.076.913.704,00**	**832.707.450,00**	**1.244.206.254,00**	**149,42**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
A	**Jumlah A (1 s/d 8)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**2.019.913.704,00**	**598.156.500,00**	**1.421.757.204,00**	**237,69**
		1	Belanja Modal Buku Umum	1.569.903.704,00	527.368.700,00	1.042.535.004,00	197,69
		2	Belanja Modal Buku Agama	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	100,00
		3	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	104.000.000,00	70.787.800,00	33.212.200,00	46,92
		4	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	46.640.000,00	0,00	46.640.000,00	100,00
		5	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	25.760.000,00	0,00	25.760.000,00	100,00
		6	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	100,00
		7	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00	100,00
		8	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	96.110.000,00	0,00	96.110.000,00	100,00
B	**Jumlah B (1)**		**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	**20.000.000,00**	**18.800.000,00**	**1.200.000,00**	**6,38**
		1	Belanja Modal Audio Visual	20.000.000,00	18.800.000,00	1.200.000,00	6,38
C	**Jumlah C (1)**		**Belanja Modal Musik**	**37.000.000,00**	**215.750.950,00**	**(178.750.950,00)**	**(82,85)**
		1	Belanja Modal Musik Lainnya	37.000.000,00	215.750.950,00	(178.750.950,00)	(82,85)
2	**(A+B)**		**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**108.577.366,00**	**263.900.000,00**	**(155.322.634,00)**	**(58,86)**
A	**Jumlah A (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	**12.348.997,00**	**263.900.000,00**	**(251.551.003,00)**	**(95,32)**
		1	Belanja Modal Alat Musik	7.832.000,00	0,00	7.832.000,00	100,00
		2	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	4.516.997,00	263.900.000,00	(259.383.003,00)	(98,29)
B	**Jumlah B (1 s/d 3)**		**Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan**	**96.228.369,00**	**0,00**	**96.228.369,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	64.560.375,00	0,00	64.560.375,00	100,00
		2	Belanja Modal Barang Kerajinan	17.528.000,00	0,00	17.528.000,00	100,00
		3	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	14.139.994,00	0,00	14.139.994,00	100,00
3	**A**		**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**	**80.247.591,00**	**0,00**	**80.247.591,00**	**100,00**
A	**Jumlah A (1)**		**Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi**	**80.247.591,00**	**0,00**	**80.247.591,00**	**100,00**
		1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	80.247.591,00	0,00	80.247.591,00	100,00
4	**(A)**		**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**2.134.444.956,00**	**2.618.079.200,00**	**(483.634.244,00)**	**(18,47)**
A	**Jumlah A (1 s/d 2)**		**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**2.134.444.956,00**	**2.618.079.200,00**	**(483.634.244,00)**	**(18,47)**
		1	Belanja Modal Software	591.240.506,00	719.250.000,00	(128.009.494,00)	(17,80)
		2	Belanja Modal Kajian	1.543.204.450,00	1.898.829.200,00	(355.624.750,00)	(18,73)
5	**(A)**		**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**4.136.167.698,00**	**0,00**	**4.136.167.698,00**	**100,00**

(dalam rupiah)

No	Point		Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
A	Jumlah A (1 s/d 2)		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.136.167.698,00	0,00	4.136.167.698,00	100,00
		1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.136.167.698,00	0,00	4.136.167.698,00	100,00
			Jumlah	8.536.351.315,00	3.714.686.650,00	4.821.664.665,00	129,80

Dari tabel diatas tidak tercapainya Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya disebabkan keterlambatan proses lelang sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup waktu untuk dilaksanakan.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Tahun 2023	Tahun 2022
	1.826.837.315,00	2.795.846.813,00

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp15.522.260.364,00 dengan realisasi senilai Rp1.826.837.315,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Tidak Terduga	15.522.260.364,00	1.826.837.315,00	11,77
	Jumlah	15.522.260.364,00	1.826.837.315,00	11,77

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.826.837.315,00 mengalami **penurunan** senilai Rp969.009.498,00 atau 34,66% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.795.846.813,00. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.62 Rincian Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Tidak Terduga	1.826.837.315,00	2.795.846.813,00	(969.009.498,00)	(34,66)
	Jumlah	1.826.837.315,00	2.795.846.813,00	(969.009.498,00)	(34,66)

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan

kewenangan daerah. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Berau untuk siaga darurat, realisasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Nama Hariadi senilai Rp3.000.000,00, realisasi untuk santunan kematian senilai Rp60.000.000,00, realisasi Bantuan Sosial Kebakaran senilai Rp1.733.250.000.00, realisasi Pengembalian Dana Salah Setor Pajak Penerangan Jalan senilai Rp27.019.905,00, realisasi Bantuan Sosial untuk membayar tagihan perawatan orang/pasien terlantar RSUD dr. Abdul Rivai An.Bendahara RSUD Abdul Rivai / Nurlaila senilai Rp3.102.403,00 dan realisasi Pengembalian Dana BOSP TA.2020/2022 untuk SDN 001 Sido Bangen Kec.Kelay Telah Tutup senilai Rp.465.007,00. Tahun Anggaran 2023 realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Berau hanya terealisasi senilai 11,77% dikarenakan alokasi Belanja Tidak Terduga yang peruntukannya untuk alokasi yang tidak diharapkan dan tidak dapat di prediksi kejadiannya. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp1.826.837.315,00 atau 11,77% dari yang dianggarkan senilai Rp15.522.260.364,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer

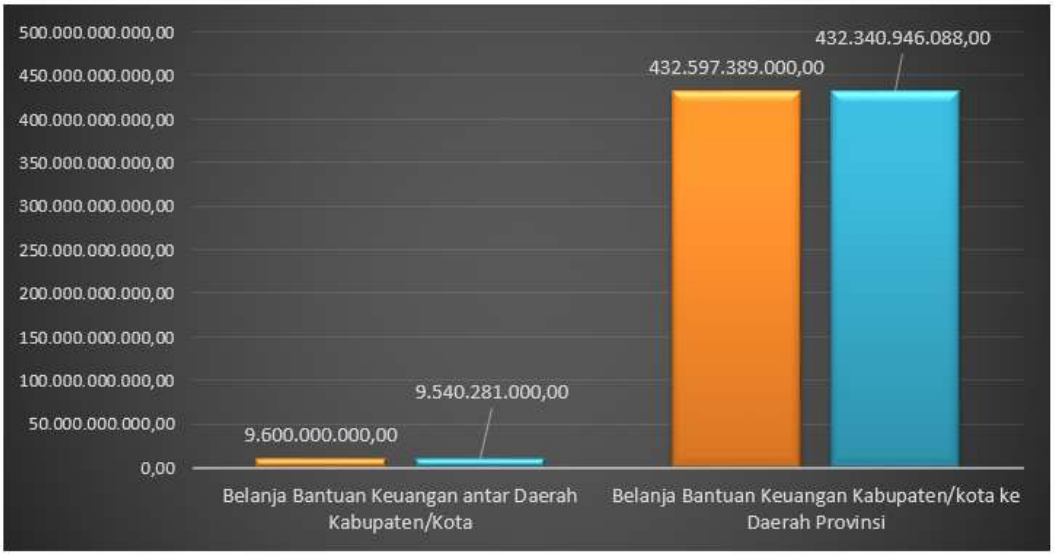
Belanja Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022
	441.881.227.088,00	300.920.715.300,00

Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp442.197.389.000,00 dengan realisasi senilai Rp441.881.227.088,00 atau 99,93%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	**Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota**	**9.600.000.000,00**	**9.540.281.000,00**	**99,38**
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.500.000.000,00	8.454.408.000,00	99,46
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.100.000.000,00	1.085.873.000,00	98,72
	Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi**	**432.597.389.000,00**	**432.340.946.088,00**	**99,94**
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	432.597.389.000,00	432.340.946.088,00	99,94
	Jumlah	**442.197.389.000,00**	**441.881.227.088,00**	**99,93**



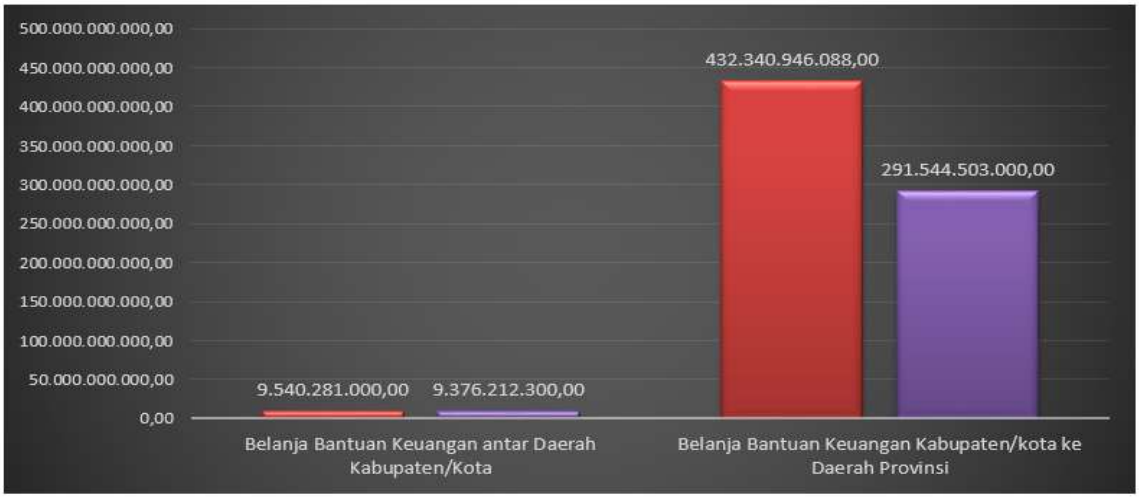
Gambar 5.15 Perbandingan Komposisi Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp441.881.227.088,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp140.960.511.788,00 atau 46,84% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan senilai Rp300.920.715.300,00. Rincian Realisasi Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.64 Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan penurunan	%
1	**Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota**	**9.540.281.000,00**	**9.376.212.300,00**	**164.068.700,00**	**1,75**
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.454.408.000,00	8.278.687.000,00	175.721.000,00	2,12
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.085.873.000,00	1.097.525.300,00	(11.652.300,00)	(1,06)
	Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	**Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi**	**432.340.946.088,00**	**291.544.503.000,00**	**140.796.443.088,00**	**48,29**
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	432.340.946.088,00	290.544.503.000,00	141.796.443.088,00	48,80
	Jumlah	**441.881.227.088,00**	**300.920.715.300,00**	**140.960.511.788,00**	**46,84**



Gambar 5.16 Perbandingan Komposisi Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

5.1.2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan Antar Pemda	Tahun 2023	Tahun 2022
Kab/Kota	9.540.281.000,00	9.376.212.300,00

Belanja Bantuan Keuangan Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan transfer kepada Pemerintahan Desa sebagai Bantuan Keuangan pendapatan pajak daerah. Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan senilai Rp9.600.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp9.540.281.000,00 atau 99,38%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%.
		Anggaran 2023	Realisasi 2023	
	Belanja Bantuan Keuangan Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**9.600.000.000,00**	**9.540.281.000,00**	**99,38**
1	Belanja Bantuan Keuangan Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.500.000.000,00	8.454.408.000,00	99,46
2	Belanja Bantuan Keuangan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.100.000.000,00	1.085.873.000,00	98,72
	Jumlah	**9.600.000.000,00**	**9.540.281.000,00**	**99,38**

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 direalisasikan senilai Rp9.540.281.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp164.068.700,00 atau 1,75% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yang direalisasikan senilai Rp9.376.212.300,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.66 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan penurunan	%.
	Belanja Bantuan Keuangan Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**9.540.281.000,00**	**9.376.212.300,00**	**164.068.700,00**	**1,75**
1	Belanja Bantuan Keuangan Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.454.408.000,00	8.278.687.000,00	175.721.000,00	2,12
2	Belanja Bantuan Keuangan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.085.873.000,00	1.097.525.300,00	(11.652.300,00)	(1,06)
	Jumlah	**9.540.281.000,00**	**9.376.212.300,00**	**164.068.700,00**	**1,75**

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi

	Tahun 2023	Tahun 2022
Bantuan Keuangan ke Pemprov	432.340.946.088,00	291.544.503.000,00

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp432.597.389.000,00 dengan realisasi senilai Rp432.3403946.088,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	**432.597.389.000,00**	**432.340.946.088,00**	**99,94**
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	432.597.389.000,00	432.340.946.088,00	99,94
	Jumlah	**432.597.389.000,00**	**432.340.946.088,00**	**99,94**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp432.340.946.088,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp140.796.443.088,00 atau 48,29% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yang direalisasikan senilai Rp291.544.503.000,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.68 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	**432.340.946.088,00**	**291.544.503.000,00**	**140.796.443.088,00**	**48,29**
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan (penurunan)	%
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	432.340.946.088,00	290.544.503.000,00	141.796.443.088,00	48,80
	Jumlah	**432.340.946.088,00**	**291.544.503.000,00**	**140.796.443.088,00**	**48,29**

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 2, 3, dan 4.**

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja, berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja. Pada Tahun Anggaran 2023 Anggaran *Surplus/Defisit* Pemerintah Kabupaten Berau senilai Rp(800.433.738.094,00) dengan realisasi senilai Rp92.783.306.910,52 atau 11,59% , dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.69 Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%.
		Anggaran	Realisasi	
1	SURPLUS / DEFISIT	(800.433.738.094,00)	92.783.306.910,52	(11,59)
	Jumlah	**(800.433.738.094,00)**	**92.783.306.910,52**	**(11,59)**

Realisasi *surplus/defisit* Tahun Anggaran 2023 senilai Rp92.783.306.910,52 mengalami **penurunan** senilai Rp169.718.088.033,47 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp262.501.394.943,99, dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.70 Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan penurunan	%
1	SURPLUS / DEFISIT	92.783.306.910,52	262.501.394.943,99	(169.718.088.033,47)	(64,65)
	Jumlah	**92.783.306.910,52**	**262.501.394.943,99**	**(169.718.088.033,47)**	**(64,65)**

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Berau mengalami **surplus** senilai Rp92.783.306.910,52 dengan demikian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 lebih besar dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran yang terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah;

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
	802.427.865.251,52	539.932.343.149,53

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah Penggunaan Silpa senilai Rp802.433.738.094,00 dengan realisasi senilai Rp802.427.865.251,52 atau 100%. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.71 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Penggunaan SILPA	802.433.738.094,00	802.427.865.251,52	100,00
	Jumlah	**802.433.738.094,00**	**802.427.865.251,52**	**100,00**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah Penggunaan Silpa senilai Rp802.427.865.251,52 mengalami **kenaikan** senilai Rp262.495.522.101,99 atau 48,62% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan senilai Rp539.932.343.149,53. Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.72 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan penurunan	%
1	Penggunaan SILPA	802.427.865.251,52	539.932.343.149,53	262.495.522.101,99	48,62
	Jumlah	**802.427.865.251,52**	**539.932.343.149,53**	**262.495.522.101,99**	**48,62**

Terjadi Selisih lebih penerimaan senilai Rp5.872.842,00 karena adanya koreksi Silpa pada Kas di saldo awal TK Negeri Maratua Rp5.800.000,00 dan Puskesmas Long La'ai Rp72.842,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp2.000.000.000,00 atau 100%. Tabel rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.73 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Pengeluaran Pembiayaan	2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Jumlah		**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**100,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.000.000.000,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.000.000.000,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp0,00 atau 100%, dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	kenaikan penurunan	%
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
Jumlah		**2.000.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Bhakti Praja. Ketentuan besarnya nilai penyertaan modal daerah pada setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Tahun Anggaran 2023 senilai Rp893.211.172.162,04 merupakan selisih lebih antara Surplus dan Defisit dengan Pembiayaan Netto.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan Tahun Anggaran 2023. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal SiLPA/SiKPA. Koreksi SAL Akhir dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran lebih merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun Anggaran 2023. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 senilai Rp802.433.738.093,52 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran berjalan senilai Rp802.427.865.251,52 merupakan penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2022 pada Tahun Anggaran 2023. Terdapat selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan senilai Rp802.427.865.251,52 karena adanya koreksi SiLPA pada saldo awal Dinas Kesehatan (Puskesmas Long La'ai) senilai Rp72.842,00 dan Dinas Pendidikan (TK Negeri Maratua) senilai Rp5.800.000,00 .

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan senilai Rp893.211.172.162,04.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan TA Sebelumnya senilai Rp5.872.842,00 merupakan koreksi kurang saldo awal pada SiLPA Kas di saldo awal Dinas Kesehatan (Puskesmas Long La'ai) senilai Rp72.842,00 dan Dinas Pendidikan (TKN Maratua) Senilai Rp5.800.000,00.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SILPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp893.211.172.162,04. Saldo akhir mengalami **kenaikan** senilai Rp90.777.434.068,52 atau 11,31% jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Tahun Anggaan 2022 senilai Rp802.433.738.093,52.

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.75 Rincian Neraca (Aset, Kewajiban dan Utang) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
ASET	**12.843.391.502.956,78**	**10.437.836.344.401,40**	**2.405.555.158.555,38**	**23,05**
KEWAJIBAN	**10.054.161.356,28**	**17.537.875.010,53**	**(7.483.713.654,25)**	**(42,67)**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.054.161.356,28	17.537.875.010,53	(7.483.713.654,25)	(42,67)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS	**12.833.337.341.600,50**	**10.420.298.469.390,87**	**2.413.038.872.209,63**	**23,16**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**12.843.391.502.956,78**	**10.437.836.344.401,40**	**2.405.555.158.555,38**	**23,05**

5.3.1 Aset

Posisi Keuangan Aset per 31 Desember 2023 dengan nilai Aset senilai Rp12.843.391.502.956,78 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.405.555.158.555,38 atau 23,05% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp10.437.836.344.401,40 yang dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.76 Nilai Aset
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset	12.843.391.502.956,78	10.437.836.344.401,40	2.405.555.158.555,38	23,05
Jumlah	**12.843.391.502.956,78**	**10.437.836.344.401,40**	**2.405.555.158.555,38**	**23,05**

Total Aset Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp12.843.391.502.956,78 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.405.555.158.555,38 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp10.437.836.344.401,40 atau 23,05%. Total Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Properti Investasi dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.77 Aset Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

	ASET	31 Desember 2023	31 Desember 2022	kenaikan (penurunan)	%
a.	Aset Lancar	1.211.713.875.399,74	999.420.482.915,31	212.293.392.484,43	21,24
b.	Investasi Jangka Panjang	618.232.967.990,13	612.840.345.860,79	5.392.622.129,34	0,88
c.	Aset Tetap	8.972.045.745.570,96	7.347.894.490.374,20	1.624.151.255.196,76	22,10
d.	Properti Investasi	283.581.494.898,00	285.209.591.282,00	(1.628.096.384,00)	(0,57)
e	Aset lainnya	1.757.817.419.097,95	1.192.471.433.969,10	565.345.985.128,85	47,41
	Jumlah	**12.843.391.502.956,78**	**10.437.836.344.401,40**	**2.405.555.158.555,38**	**23,05**

5.3.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lancar	1.211.713.875.399,74	999.420.482.915,31

Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 senilai Rp1.211.713.875.399,74 mengalami **kenaikan** senilai Rp212.293.392.484,43 atau 21,24% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp999.420.482.915,31. Saldo Aset Lancar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.78 Aset Lancar Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	ASET LANCAR	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Kas	893.248.455.797,04	802.449.147.219,52	90.799.308.577,52	11,32
2	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Daerah	44.170.326.364,91	40.497.502.727,59	3.672.823.637,32	9,07
4	Piutang Retribusi Daerah	3.940.339.164,00	5.293.090.261,00	(1.352.751.097,00)	(25,56)
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55.372.169,00	55.372.169,00	0,00	0,00
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	27.697.212.757,15	25.397.736.412,31	2.299.476.344,84	9,05
7	Piutang Transfer Antar Daerah	61.090.578.845,00	67.562.985.000,00	(6.472.406.155,00)	(9,58)
8	Piutang Lainnya	47.413.035.540,00	0,00	47.413.035.540,00	100,00
9	Penyisihan Piutang	(47.759.899.075,95)	(46.759.997.323,46)	(999.901.752,49)	2,14
10	Beban Dibayar Dimuka	286.547.977,50	139.238.431,32	147.309.546,18	105,80
11	Persediaan	181.571.905.861,09	104.785.408.018,03	76.786.497.843,06	73,28
	Jumlah	**1.211.713.875.399,74**	**999.420.482.915,31**	**212.293.392.484,43**	**21,24**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas dan Setara Kas	893.248.455.797,04	802.449.147.219,52

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 senilai Rp893.214.219.663,04 mengalami **kenaikan** senilai Rp90.799.308.577,52 atau 11,32% dibandingkan dengan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 senilai Rp802.449.147.219,52. Rincian jumlah Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.79 Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	KAS	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Kas di Kas Daerah	821.259.740.624,13	676.574.033.624,96	144.685.706.999,17	21,39
2	Kas di Bendahara Penerimaan	65.356.000,00	68.930.500,00	(3.574.500,00)	(5,19)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.200,00	(1.200,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	67.648.687.298,19	123.594.394.739,98	(55.945.707.441,79)	(45,27)

(dalam rupiah)

NO	KAS	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
5	Kas di Bendahara FKTP-JKN	1.226.486.066,16	672.602.218,43	553.883.847,73	82,35
6	Kas di Bendahara Bos	1.651.431.753,56	1.517.956.038,20	133.475.715,36	8,79
7	Kas Lainnya	1.396.754.055,00	21.228.897,95	1.375.525.157,05	6.479,49
8	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**893.248.455.797,04**	**802.449.147.219,52**	**90.799.308.577,52**	**11,32**

b. Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Kas Daerah	821.259.740.624,13	676.574.033.624,96

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp821.259.740.624,13 mengalami **kenaikan** senilai Rp144.685.706.999,17 atau 21,39% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp676.574.033.624,96. Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari rekening giro dan deposito pada Bank BPD Kaltimtara, giro dan deposito pada Bank BNI dan deposito padaBank Danamon, serta deposito pada Bank BRI. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.80 Rekening Kas Umum Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

	KAS DI KAS DAERAH	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
	BPD Kaltimtara Cabang Tanjung Redeb				
1	Giro -0061300014	821.259.740.624,13	676.514.780.866,95	144.744.959.757,17	21,40
2	Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BPD	**821.259.740.624,13**	**676.514.780.866,95**	**144.744.959.757,17**	**21,40**
	BNI 1946				
1	Giro- 02104813388	0,00	21.670.034,00	(21.670.034,00)	(100,00)
2	Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah BNI	**0,00**	**21.670.034,00**	**(21.670.034,00)**	**(100,00)**
	BRI				
1	Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rekening Titipan Bunga Deposito-0213.0100940.99.8	0,00	23.673.224,00	(23.673.224,00)	(100,00)
	Jumlah BRI	**0,00**	**23.673.224,00**	**(23.673.224,00)**	**(100,00)**

	KAS DI KAS DAERAH	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
	Bank Danamon				
1	Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Danamon	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo Bank keseluruhan	**821.259.740.624,13**	**676.560.124.124,95**	**144.699.616.499,18**	**21,39**
	Koreksi kesalahan Bank/ Bank kurang posting	0,00	13.909.500,01	(13.909.500,01)	(100,00)
	Saldo Kas Daerah	**821.259.740.624,13**	**676.574.033.624,96**	**144.685.706.999,17**	**21,40**

Masing-masing saldo rekening Kas di Bank per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Rekening Giro

Penggunaan masing-masing rekening giro tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Rekening giro Nomor – 0061300014 pada BPD Kaltimtara merupakan rekening Kas Umum Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan PAD serta transfer dari provinsi dan dana pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 senilai Rp821.259.740.624,13 mengalami **kenaikan** senilai Rp144.744.959.757,17 atau 21,40% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp676.514.780.866,96;

b) Rekening Giro Nomor – 021048133388 pada BNI Cabang Berau merupakan rekening Kas Umum Daerah yang digunakan untuk penempatan dana Pemerintah Kabupaten Berau, menampung Pajak Daerah BPHTB. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 mengalami **penurunan** senilai Rp21.670.034,00 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp21.670.034,00;

2) Rekening Deposito

Rekening Deposito adalah rekening Pemerintah Kabupaten Berau yang penempatan rekeningnya pada empat Bank, dengan rincian:

a) Penempatan deposito pada BPD Kaltimtara Cabang Tanjung Redeb dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00;

b) Penempatan deposito pada BNI Cabang Berau dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00;

c) Penempatan deposito pada BRI Cabang Berau dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00; selain itu juga terdapat saldo Titipan Bunga Deposito

(0213.0100940.99.8) per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp23.673.224,00.

d) Penempatan deposito pada Bank Danamon Cabang Berau dengan jangka waktu 1 bulan yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Nominal deposito per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00.

Dari saldo Bank keseluruhan per 31 Desember 2023 total Saldo Kas Daerah senilai Rp821.259.740.624,13 dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp676.574.033.624,95.

Disamping itu, terdapat sisa dana alokasi khusus non fisik senilai Rp6.968.776.719,00 yang dibatasi penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD	2.535.771.000,00
2	DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD	90.567.600,00
3	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	257.929.405,00
4	DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	2.300.336.289,00
5	DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)	831.866.992,00
7	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL (FPM)	140.489.600,00
8	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (KPP)	255.864.301,00
10	DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL (PK2UMK)	120.989.120,00
11	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN (PARIWISATA)	434.962.412,00
JUMLAH		**6.968.776.719,00**

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	65.356.000,00	68.930.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan kas akhir tahun yang masih berada pada Bendahara Penerimaan OPD. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 ada pada Dinas Kesehatan berupa penerimaan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor ke kas daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 senilai Rp65.356.000,00 mengalami **penurunan** senilai Rp3.574.500,00 atau 5,19% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp68.930.500,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.82 Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	NAMA OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Dinas Kesehatan (Retribusi pelayanan)	65.356.000,00	68.930.500,00	(3.574.500,00)	(5,19)
Jumlah		**65.356.000,00**	**68.930.500,00**	**(3.574.500,00)**	**(5,19)**

d. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	0,00	1.200,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 mengalami **penurunan** senilai Rp1.200,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp1.200,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.83 Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.200,00	(1.200,00)	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**1.200,00**	**(1.200,00)**	**(100,00)**

e. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	67.648.687.298,19	123.594.394.739,98

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Abdul Rivai per 31 Desember 2023 senilai Rp67.648.687.298,19 mengalami **penurunan** senilai Rp55.945.707.441,79 atau 45,27% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp123.594.394.739,98. Rincian saldo Kas di BLUD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.84 Rekening Kas di Bendahara BLUD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
	Kas BLUD				
1	Kas Tunai dan Surat berharga	52.582.279,00	0,00	52.582.279,00	100,00
2	BPD 0061435697	61.668.808.196,19	117.785.348.388,98	(56.116.540.192,79)	(47,64)
3	BNI 0360133440	1.927.296.823,00	1.809.046.351,00	118.250.472,00	6,54
4	Deposito	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**67.648.687.298,19**	**123.594.394.739,98**	**(55.945.707.441,79)**	**(45,27)**

f. Kas di Bendahara FKTP

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara FKTP	1.651.431.753,56	672.602.218,43

Saldo Kas di Bendahara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2023 senilai Rp1.651.431.753,56 mengalami **kenaikan** senilai Rp978.829.535,13 atau 145,53% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp672.602.218,43. Rincian saldo Kas di Bendahara FKTP disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.85 Rekening Kas di Bendahara FKTP
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Unit Kerja FKTP JKN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Puskesmas Kel. Bugis	83.144.581,67	18.428.604,67	64.715.977,00	351,17
2	Puskesmas Tanjung Redeb	195.358.462,65	152.940.977,65	42.417.485,00	27,73
3	Puskesmas Teluk Bayur	122.517.730,68	47.832.199,68	74.685.531,00	156,14
4	Puskesmas Labanan	162.627.010,12	46.933.133,12	115.693.877,00	246,51
5	Puskesmas Sambaliung	202.502.746,20	54.791.248,20	147.711.498,00	269,59
6	Puskesmas Suaran	19.631.432,77	18.142.754,77	1.488.678,00	8,21
7	Puskesmas GN. Tabur	367.262.041,31	34.994.050,31	332.267.991,00	949,50
8	Puskesmas Merancang Ulu	26.775.455,46	92.373.556,46	(65.598.101,00)	(71,01)
9	Puskesmas Tanjung Batu	74.387.824,84	462.385,14	73.925.439,70	15.987,85
10	Puskesmas Pl. Derawan	5.096.557,54	13.269.750,09	(8.173.192,55)	(61,59)
11	Puskesmas Maratua	25.154.159,89	17.720.359,89	7.433.800,00	41,95
12	Puskesmas Tubaan	23.974.734,19	654.955,19	23.319.779,00	3.560,52
13	Puskesmas Biatan Lempake	6.104.732,94	806.624,19	5.298.108,75	656,82
14	Puskesmas Talisayan	239.990.135,19	147.862.725,19	92.127.410,00	62,31
15	Puskesmas Batu Putih	628.018,21	7.300,21	620.718,00	8.502,74
16	Puskesmas Biduk-Biduk	64.220.391,01	4.957.635,01	59.262.756,00	1.195,38
17	Puskesmas Kelay	2.344.689,38	4.277.275,43	(1.932.586,05)	(45,18)
18	Puskesmas Tepian Buah	23.438.754,48	520.140,15	22.918.614,33	4.406,24
19	Puskesmas Long La'ai	6.177.521,08	15.626.543,08	(9.449.022,00)	(60,47)
20	Merapun	78.973,95	0,00	78.973,95	100,00
21	Long Boy	15.800,00	0,00	15.800,00	100,00
Jumlah		**1.651.431.753,56**	**672.602.218,43**	**978.829.535,13**	**145,53**

g. Kas di Bendahara BOS

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara BOS	1.226.486.066,16	1.517.956.038,20

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 senilai Rp1.226.486.066,16 mengalami **penurunan** senilai Rp291.469.972,04 atau 19,20% dibandingkan Per 31 Desember 2022 senilai Rp1.517.956.038,20.

Saldo Kas di Bendahara BOS adalah dana yang masih berada ditangan Bendahara Dana BOS pada TK, SD dan SLTP yang merupakan dana non APBD yang disalurkan langsung ke sekolah. Rincian saldo Kas di Bendahara BOS disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.86 Rekening Kas di Bendahara BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Kas di Bendahara BOS	1.226.486.066,16	1.517.956.038,20	(291.469.972,04)	(19,20)
Jumlah		**1.226.486.066,16**	**1.517.956.038,20**	**(291.469.972,04)**	**(19,20)**

h. Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.396.754.055,00	21.228.897,95

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp1.362.517.921,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.375.525.157,05 atau 6.479,49% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp21.289.023,05. Saldo Kas Lainnya adalah Kas yang dibatasi penggunaannya pada Silpa Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.359.470.420,00; Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp35.836.120,00 (DPUPR senilai Rp34.236.134,00, Disperkim senilai Rp1.599.986,00); Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp1.447.515,00. Rincian saldo Kas Lainnya disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.87 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Kas Lainnya	1.396.754.055,00	21.228.897,95	1.375.525.157,05	6.479,49
Jumlah		**1.396.754.055,00**	**21.228.897,95**	**1.375.525.157,05**	**6.479,49**

Dengan rincian tabel SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.88 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

NO	PUSKESMAS	JUMLAH SILPA BOK
1	Batu Putih	57.029.116,00
2	Biatan Lempake	74.598.421,00
3	Biduk-Biduk	31.475.795,00
4	Gunung Tabur	76.377.274,00
5	Kampung Bugis	26.341.672,00
6	Kelay	150.634.005,00
7	Labanan	20.100,00

(dalam rupiah)

NO	PUSKESMAS	JUMLAH SILPA BOK
8	Long Boy	24.577.515,00
9	Long Laai	45.803.431,00
10	Maratua	2.261.432,00
11	Merancang Ulu	113.391.126,00
12	Merapun	202.877.300,00
13	Pulau Derawan	77.662.039,00
14	Sambaliung	75.967.315,00
15	Suaran	32.948.984,00
16	Talisayan	80.845.100,00
17	Tanjung Batu	71.177.634,00
18	Tanjung Redeb	109.417.600,00
19	Teluk Bayur	87.717.955,00
20	Tepian Buah	17.707.418,00
21	Tubaan	639.188,00
SUB TOTAL		**1.359.470.420,00**
NO	**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**JUMLAH**
22	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.599.986,00
NO	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**JUMLAH**
23	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	34.236.134,00
NO	**RSUD**	**JUMLAH**
24	Pendapatan Diterima Dimuka	1.447.515,00
TOTAL		**1.396.754.055,00**

i. Setara Kas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Setara Kas	0,00	0,00

Setara Kas per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dan di Tahun Anggaran 2022 senilai Rp0,00. Tabel rincian Setara Kas disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.89 Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) %
1	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	184.366.864.840,06	138.806.686.569,90

Piutang Daerah merupakan hak pemerintah Kabupaten Berau berupa penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain. Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 senilai Rp184.366.864.840,06 mengalami **kenaikan** senilai Rp45.560.178.270,16 atau 32,82% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp138.806.686.569,90. Rincian Saldo Piutang Pendapatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.90 Piutang Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	JENIS PIUTANG	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) 31 Desember 2022	Penambahan Piutang Baru Selama Tahun 2023	Pembayaran/ Penghapusan Piutang Selama Tahun 2023	Nilai Piutang Brutto (Sebelum Penyisihan) TA 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Pajak Daerah	40.497.502.727,59	82.596.817.059,00	78.923.993.421,68	44.170.326.364,91	3.672.823.637,32	9,07
2	Piutang Retribusi Daerah	5.293.090.261,00	947.470.956,00	2.300.222.053,00	3.940.339.164,00	(1.352.751.097,00)	(25,56)
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.372.169,00	0,00	0,00	55.372.169,00	0,00	0,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	25.397.736.412,31	10.131.452.571,66	7.831.976.226,82	27.697.212.757,15	2.299.476.344,84	9,05
4	Piutang Transfer Antar Daerah	67.562.985.000,00	61.090.578.845,00	67.562.985.000,00	61.090.578.845,00	(6.472.406.155,00)	(9,58)
5	Pituang Lainnya	0,00	0,00	0,00	47.413.035.540,00	47.413.035.540,00	100,00
	Jumlah	**138.806.686.569,90**	**154.766.319.431,66**	**156.619.176.701,50**	**184.366.864.840,06**	**45.560.178.270,16**	**32,82**

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	44.170.326.364,91	40.497.502.727,59

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp44.170.326.364,91 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp40.497.502.727,59 mengalami **kenaikan** senilai Rp3.672.823.637,32 atau 9,07%. Terkait *treatment* yang dilakukan terhadap penagihan piutang pajak daerah adalah selain melakukan penagihan rutin dengan menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak Bapenda juga melakukan perjanjian kerjasama dengan kejaksaan selaku pengacara negara dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melakukan penagihan piutang pajak daerah. Disamping hal tersebut *treatment* yang dilakukan terhadap penagihan piutang pajak adalah memberikan keringanan pembayaran piutang dengan cara diangsur dengan membuat perjanjian pembayaran secara angsuran kepada wajib pajak yang menunggak. Rincian Piutang Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.91 Piutang Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Piutang Pajak Daerah	Piutang 31 Desember 2022	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang/ Koreksi	Piutang 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	951.487.553,97	6.782.984.551,00	6.881.753.285,00	852.718.819,97	(98.768.734,00)	(10,38)
2	Pajak Restoran	3.904.159.507,00	30.706.788.260,00	30.692.670.972,00	3.918.276.795,00	14.117.288,00	0,36
3	Pajak Hiburan	1.100.000,00	344.184.773,00	344.784.773,00	500.000,00	(600.000,00)	(54,55)
4	Pajak Reklame	99.239.103,91	594.227.407,00	602.184.763,91	91.281.747,00	(7.957.356,91)	(8,02)
5	Pajak Penerangan Jalan	18.928.877,71	31.620.074.132,00	28.534.656.040,77	3.104.346.968,94	3.085.418.091,23	16.300,06
6	Pajak Parkir	17.707.250,00	538.591.286,00	523.283.767,00	33.014.769,00	15.307.519,00	86,45
7	Pajak Air Tanah	976.648,00	509.520,00	509.520,00	976.648,00	0,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	373.347.500,00	335.653.000,00	204.404.500,00	504.596.000,00	131.248.500,00	35,15
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	1.267.129.934,00	653.284.580,00	622.722.080,00	1.297.692.434,00	30.562.500,00	2,41
10	Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.863.426.353,00	11.020.519.550,00	10.517.023.720,00	34.366.922.183,00	503.495.830,00	1,49
	Jumlah	**40.497.502.727,59**	**82.596.817.059,00**	**78.923.993.421,68**	**44.170.326.364,91**	**3.672.823.637,32**	**9,07**

b. Piutang Retribusi Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Retribusi Daerah	3.940.339.164,00	5.293.090.261,00

Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan daerah yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak pemerintah daerah melalui OPD terkait, yang belum dilunasi sampai dengan akhir per 31 Desember oleh Wajib Retribusi Daerah. Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp3.940.339.164,00 mengalami **penurunan** senilai Rp1.352.751.097,00 atau 25,56% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp5.293.090.261,00. Rincian Piutang Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.92 Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	Piutang 31 Desember 2022	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	4.709.350.961,00	947.067.756,00	2.143.965.653,00	3.512.453.064,00	(1.196.897.897,00)	(25,42)
2	Badan Pendapatan Daerah	581.896.900,00	403.200,00	154.414.000,00	427.886.100,00	(154.010.800,00)	(26,47)
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.842.400,00	0,00	1.842.400,00	0,00	(1.842.400,00)	(100,00)
	Jumlah	**5.293.090.261,00**	**947.470.956,00**	**2.300.222.053,00**	**3.940.339.164,00**	**(1.352.751.097,00)**	**(25,56)**

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	55.372.169,00	55.372.169,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Berau atas piutang dividen BUMD PT Hutan Sanggam Berau. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

per 31 Desember 2023 senilai Rp55.372.169,00 tidak ada perubahan dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp55.372.169,00. Tabel Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.93 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Piutang 31 Desember 2022	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang Dividen BUMD PT Hutan Sanggam Berau	55.372.169,00	0,00	0,00	55.372.169,00	0,00	0,00
	Jumlah	**55.372.169,00**	**0,00**	**0,00**	**55.372.169,00**	**0,00**	**0,00**

d. Piutang Lain – Lain PAD yang Sah

Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	27.697.212.757,15	25.397.736.412,31

Piutang Lain – Lain PAD yang Sah merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Berau dari pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Piutang Lain – Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 senilai Rp27.697.212.757,15 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.299.476.344,84 atau 9,05% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp25.397.736.412,31. Rincian Piutang Lain – lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.94 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Lainnya	Piutang 31 Desember 2022	Koreksi	Saldo Piutang Lainnya Setelah Koreksi	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Piutang BLUD	8.034.284.530,19	331.299.431,00	8.365.583.961,19	8.294.429.249,00	6.863.384.865,00	9.796.628.345,19	1.762.343.815,00	21,94
2	Piutang Angsuran Rumah Dinas	3.216.728.412,77	0,00	3.216.728.412,77	156.215.551,00	276.973.264,75	3.095.970.699,02	(120.757.713,75)	(3,75)
3	Piutang Denda Pajak	12.026.782.829,08	(58.431.073,92)	11.968.351.755,16	973.741.810,02	351.498.094,88	12.590.595.470,30	563.812.641,22	4,69
4	Piutang Denda Retribusi	1.859.892.641,00	0,00	1.859.892.641,00	35.124.530,64	21.640.929,00	1.873.376.242,64	13.483.601,64	0,72
5	Piutang Remonerasi (TDF)	260.047.999,27	0,00	260.047.999,27	0,00	260.047.999,27	0,00	(260.047.999,27)	(100,00)
6	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	0,00	340.642.000,00	0,00	340.642.000,00	340.642.000,00	100,00
	Jumlah	**25.397.736.412,31**	**272.868.357,08**	**25.670.604.769,39**	**9.800.153.140,66**	**7.773.545.152,90**	**27.697.212.757,15**	**2.299.476.344,84**	**9,05**

Rincian Piutang Lainnya menurut OPD pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.95 Piutang Lainnya Menurut OPD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	Piutang 31 Desember 2022	Koreksi	Saldo Piutang Lainnya Setelah Koreksi	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	Piutang 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	**RSUD A. Rivai**								
	Piutang BLUD	8.034.284.530,19	331.299.431,00	8.365.583.961,19	8.294.429.249,00	6.863.384.865,00	9.796.628.345,19	1.762.343.815,00	21,94
2	**Badan Pendapatan Daerah**								
	Piutang Angsuran Rumah Dinas	3.216.728.412,77		3.216.728.412,77	156.215.551,00	276.973.264,75	3.095.970.699,02	(120.757.713,75)	(3,75)
	Piutang Denda Pajak	12.026.782.829,08	58.431.073,92	11.968.351.755,16	973.741.810,02	351.498.094,88	12.590.595.470,30	563.812.641,22	4,69
3	**Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan**								
	Piutang Denda Retribusi	1.859.892.641,00	0,00	1.859.892.641,00	35.124.530,64	21.640.929,00	1.873.376.242,64	13.483.601,64	0,72
4	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**								
	Piutang Remonerasi (TDF)	260.047.999,27	0,00	260.047.999,27	0,00	260.047.999,27	0,00	(260.047.999,27)	(100,00)
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	0,00	340.642.000,00	0,00	340.642.000,00	340.642.000,00	0,00
	Jumlah	**25.397.736.412,31**	**389.730.504,92**	**25.670.604.769,39**	**9.800.153.140,66**	**7.773.545.152,90**	**27.697.212.757,15**	**2.299.476.344,84**	**9,05**

Atas piutang lainnya tersebut nilai Piutang Angsuran Rumah Dinas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya akibat pencatatan nilai sisa Angsuran belum dapat di andalkan, surat perjanjian yang tidak lengkap, pembayaran tagihan tidak sesuai perjanjian, angsuran telah lunas namun belum didukung SK pelepasan, denda yang tidak dicatat sebagai piutang.

e. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	61.090.578.845,00	67.562.985.000,00

Piutang Transfer Antar Daerah, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.100.3.3.1 / K.116 / 2023 tentang penetapan nilai kurang salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/ kota se-Kalimantan Timur Tahun 2023. Piutang Transfer per 31 Desember 2023 senilai Rp61.090.578.845,00 mengalami **penurunan** senilai Rp 6.472.406.155,00 atau 9,58% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp67.562.985.000,00. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.96 Piutang Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2022	Penambahan Piutang	Pembayaran/ Penghapusan Piutang	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.719.449.000,00	2.871.402.000,00	2.719.449.000,00	2.871.402.000,00	151.953.000,00	5,59
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.669.318.000,00	5.102.882.000,00	2.669.318.000,00	5.102.882.000,00	2.433.564.000,00	91,17
3	PBB-KB	62.116.028.000,00	53.013.027.845,00	62.116.028.000,00	53.013.027.845,00	(9.103.000.155,00)	(14,65)
4	AP	58.190.000,00	103.267.000,00	58.190.000,00	103.267.000,00	45.077.000,00	77,47
	Jumlah	**67.562.985.000,00**	**61.090.578.845,00**	**67.562.985.000,00**	**61.090.578.845,00**	**(6.472.406.155,00)**	**(9,58)**

f. Piutang Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Lainnya	47.413.035.540,00	0,00

Piutang Lainnya merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Berau terhadap pihak ketiga diluar piutang pajak dan retribusi. Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp47.413.035.540,00 terjadi **kenaikan** senilai Rp47.413.035.540,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 karena tidak ada realisasi. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.97 Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Piutang Lainnya	47.413.035.540,00	0,00	47.413.035.540,00	100,00
Jumlah		**47.413.035.540,00**	**0,00**	**47.413.035.540,00**	**100,00**

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyisihan Piutang	(47.759.899.075,95)	(46.759.997.323,46)

Penyisihan Piutang pada Pemerintah Kabupaten Berau bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp47.759.899.075,95 mengalami **kenaikan** senilai Rp999.901.752,48 atau 2,14% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp46.759.997.323,47. Penyisihan Piutang pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.98 Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	PENYISIHAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Daerah	(29.456.030.906,85)	(28.700.861.383,97)	(755.169.522,88)	2,63
2	Piutang Retribusi Daerah	(3.626.937.784,92)	(4.517.873.998,77)	890.936.213,85	(19,72)
3	Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	(14.676.930.384,18)	(13.541.261.940,73)	(1.135.668.443,45)	8,39
4	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**(47.759.899.075,95)**	**(46.759.997.323,47)**	**(999.901.752,48)**	**2,14**

Rincian perhitungan penyisihan Piutang sesuai umur pada tabel berikut :

Tabel 5.99 Penyisihan Piutang Sesuai Klasifikasi Umur

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Persentase Penyisihan	OPD	Lancar 0,5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	Jumlah
I	**Piutang Pajak daerah**		**8.975.732.288,00**	**2.692.721.110,00**	**6.719.985.665,00**	**25.781.887.301,91**	**44.170.326.364,91**
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		**44.878.661,44**	**269.272.111,00**	**3.359.992.832,50**	**25.781.887.301,91**	**29.456.030.906,85**
	Piutang Pajak daerah	Bapenda	8.975.732.288,00	2.692.721.110,00	6.719.985.665,00	25.781.887.301,91	44.170.326.364,91
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		44.878.661,44	269.272.111,00	3.359.992.832,50	25.781.887.301,91	29.456.030.906,85
II	**Piutang Retribusi Daerah**		**63.091.363,00**	**145.427.726,00**	**239.481.039,00**	**3.492.339.036,00**	**3.940.339.164,00**
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		**315.456,82**	**14.542.772,60**	**119.740.519,50**	**3.492.339.036,00**	**3.626.937.784,92**
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bapenda	0,00	0,00	403.200,00	427.482.900,00	427.886.100,00
	Penyisihan Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah		0,00	0,00	201.600,00	427.482.900,00	427.684.500,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Koperindag	63.091.363,00	145.427.726,00	239.077.839,00	3.064.856.136,00	3.512.453.064,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		315.456,82	14.542.772,60	119.538.919,50	3.064.856.136,00	3.199.253.284,92
III	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**		**9.564.789.309,63**	**1.245.972.184,84**	**4.756.282.201,93**	**12.130.169.059,76**	**27.697.212.756,16**
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**44.023.004,97**	**124.597.218,48**	**2.378.141.100,96**	**12.130.169.059,76**	**14.676.930.384,18**
	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	BPKAD		88.921.301,00	1.393.235.239,57	853.625.843,45	2.335.782.384,02
	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 2023 yang belum disisihkan		760.188.315,00	0,00	0,00	0,00	760.188.315,00
	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	8.892.130,10	696.617.619,79	853.625.843,45	1.559.135.593,34
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	BPKAD	105.203.000,00	184.254.000,00	51.185.000,00		340.642.000,00
	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		526.015,00	18.425.400,00	25.592.500,00		44543915,00
	Piutang Denda Pajak	Bapenda	404.337.832,00	692.101.951,58	2.924.809.414,66	8.569.346.270,82	12.590.595.469,06
	Penyisihan Piutang Denda Pajak		2.021.689,16	69.210.195,16	1.462.404.707,33	8.569.346.270,82	10.102.982.862,47
	Piutang Pendapatan BLUD	RSUD	8.294.429.249,00	279.240.655,00	384.661.769,31	838.296.671,88	9.796.628.345,19
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		41.472.146,25	27.924.065,50	192.330.884,66	838.296.671,88	1.100.023.768,28
	Piutang Denda Retribusi	Koperindag	630.913,63	1.454.277,26	2.390.778,39	1.868.900.273,61	1.873.376.242,89
	Penyisihan Piutang Denda Retribusi		3.154,57	145.427,73	1.195.389,20	1.868.900.273,61	1.870.244.245,10
IV	**Piutang Transfer Antara Daerah**		**61.090.578.845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.090.578.845,00**
	Penyisihan Piutang Transfer Antara Daerah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Piutang Transfer Antara Daerah	BPKAD	61.090.578.845,00	0,00	0,00	0,00	61.090.578.845,00
	Penyisihan Piutang Transfer Antara Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Piutang Persentase Penyisihan	OPD	Lancar 0,5%	Kurang Lancar 10%	Diragukan 50%	Macet 100%	Jumlah
	Jumlah Piutang		79.694.191.805,63	4.084.121.020,84	11.715.748.905,93	41.404.395.397,67	136.898.457.130,07
	Nilai Penyisihan		89.217.123,23	408.412.102,08	5.857.874.452,96	41.404.395.397,67	47.759.899.075,95

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	286.547.977,50	139.238.431,32

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya Tahun Anggaran 2023 yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 senilai Rp286.547.977,50 mengalami **kenaikan** senilai Rp147.309.546,18 atau 105,80% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp139.238.431,32,00. Tabel rincian Beban Dibayar Dimuka disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.100 Beban Dibayar Dimuka
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Dibayar Dimuka	286.547.977,50	139.238.431,32	147.309.546,18	105,80
	Jumlah	**286.547.977,50**	**139.238.431,32**	**147.309.546,18**	**105,80**

Beban dibayar dimuka terdapat pada di beberapa SKPD yaitu :

a. Sekretariat DPRD
Atas pemeriksaan premi asuransi BMD dengan nilai SP2D SIPD Nomor 16.01/ 04.0/000264/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.06/8/2023 senilai Rp145.781.811,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp55.516.909,00 dan sisa polis asuransi senilai Rp90.264.902,15.

b. Dinas Perikanan
Atas pemeriksaan premi asuransi nelayan dengan nilai SP2D SIPD Nomor 16.01/04.0 /000044/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 sesuai surat Keputusan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023 senilai Rp23.377.600,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp13.084.125,00 dan sisa polis asuransi senilai Rp9.293.475,00.

c. Sekretariat Daerah
Atas pemeriksaan terdapat belanja sewa asrama dan asuransi barang milik daerah senilai 186.989.600,35 dengan rincian sebagai berikut :
- Belanja Sewa Asrama Mahasiswa Putri Tarakan dengan No surat Perjanjian 900/393/Umum/2023/Tanggal 15 Agustus 2023. Nilai SP2D Nomor 16.01./04.0/000329/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/8/2023 senilai Rp55.500.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp21.135.616,44 dan sisa polis asuransi senilai Rp34.364.383,56;
- Belanja Sewa Asrama Mahasiswa Putra Tarakan dengan No surat Perjanjian 900/931/Umum Tanggal 13 Desember 2023. Nilai SP2D Nomor

16.01/04.0/000715/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.10/12/2023 senilai Rp31.000.000,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp1.613.698,63 dan sisa polis asuransi senilai Rp29.386.301,37;

- Belanja Sewa Asrama Mahasiswa Putri Makasar dengan No surat Perjanjian 900/491/Umum/2023 Tanggal 29 September 2023. Nilai SP2D Nomor 16.01/04.0/000441/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.07/10/2023 senilai Rp148.000.000,00,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp38.115.068,00 dan sisa polis asuransi senilai Rp109.884.932,00;
- Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Dengan No SPK 021/747/SPK/Um an. Rekanan PT Asuransi Jasa Indonesia Tanggal 1 Desember 2023.Nilai SP2D Nomor 16.01/04.0/000709/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.10/12/2023 senilai Rp14.593.425,00. Nilai manfaat yang sudah terpakai adalah senilai Rp1.239.441,58 dan sisa polis asuransi senilai Rp13.353.983,42;

5.3.1.1.5 Persediaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan	181.571.905.861,09	104.785.408.018,03

Persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 senilai Rp181.571.905.861,09 mengalami **kenaikan** senilai Rp76.786.497.843,06 atau 73,28% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp104.785.408.018,03. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.101 Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	**Persediaan Bahan Habis Pakai**				
	Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.441.900,00	32.903.680,00	(7.461.780,00)	(22,68)
	Persediaan Bahan-Bahan Kimia	1.858.756.319,50	1.000.597.833,00	858.158.486,50	85,76
	Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00
	Persediaan Bahan-Bahan Baku	49.174.816,00	86.428.785,00	(37.253.969,00)	(43,10)
	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	221.500.800,00	0,00	221.500.800,00	0,00
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	13.230.000,00	0,00	13.230.000,00	0,00
	Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas	700.000,00	9.040.000,00	(8.340.000,00)	(92,26)
	Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Bahan Lainnya	987.638.776,94	17.636.758.210,65	(16.649.119.433,71)	(94,40)
	Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	3.894.000,00	(3.894.000,00)	(100,00)
	Persediaan Suku Cadang Alat Besar	0,00	9.930.000,00	(9.930.000,00)	(100,00)
	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	1.902.523.207,08	116.440.000,00	1.786.083.207,08	1.533,91

(dalam rupiah)

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	127.954.128,60	56.915.700,00	71.038.428,60	124,81
	Persediaan Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Suku Cadang Alat Studio & Komunikasi	0,00	238.000,00	(238.000,00)	(100,00)
	Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	519.000,00	(519.000,00)	(100,00)
	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.385.112.204,47	919.119.537,30	465.992.667,17	50,70
	Persediaan Kertas & Cover	233.371.221,00	159.206.768,00	74.164.453,00	46,58
	Persediaan Bahan Cetak	620.769.000,00	556.026.750,00	64.742.250,00	11,64
	Persediaan Benda Pos	1.132.000,00	3.264.600,00	(2.132.600,00)	(65,33)
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Bahan Komputer	136.018.100,00	155.804.950,00	(19.786.850,00)	(12,70)
	Persediaan Perabot Kantor	433.078.271,68	213.036.221,01	220.042.050,67	103,29
	Persediaan Alat Listrik	204.235.948,96	225.808.440,36	(21.572.491,40)	(9,55)
	Persediaan Perlengkapan Dinas	1.347.942.448,50	801.113.390,00	546.829.058,50	68,26
	Persediaan Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Souvenir/Cinderamata	296.842.150,00	118.131.300,00	178.710.850,00	151,28
	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.164.000,00	(1.164.000,00)	(100,00)
	Persediaan Obat	15.942.387.400,48	9.533.072.187,84	6.409.315.212,64	67,23
	Persediaan Obat-Obat Lainnya	0,00	8.940.799,75	(8.940.799,75)	(100,00)
	Persediaan Untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat	144.368.750.249,00	25.608.586.765,00	118.760.163.484,00	463,75
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	47.502.879.828,00	(47.502.879.828,00)	(100,00)
	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Natura	42.292.114,48	23.604.772,12	18.687.342,36	79,17
	Persediaan Pakan	7.590.000,00	0,00	7.590.000,00	0,00
	Persediaan Natura & Pakan Lainnya	2.020.000,00	1.205.500,00	814.500,00	67,57
	Persediaan Komponen Baja	11.362.667.804,40	0,00	11.362.667.804,40	0,00
	Persediaan Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga - Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Bahan Pakai Habis Bahan Penunjang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Bahan Spesimen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap	0,00	0,00	0,00	0,00
	Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**181.571.905.861,09**	**104.785.408.018,03**	**76.786.497.843,06**	**73,28**

Selain persediaan Pemerintah Kabupaten Berau tersebut terdapat Persediaan berupa obat-obatan yang sudah kadaluarsa pada RSUD dr. Abdul

Rivai senilai Rp58.851.027,93 dengan rincian pada **Lampiran 5**. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 pada SKPD dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.102 Persediaan Per SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	2.278.000,00	1.420.000,00	858.000,00	60,42
2	Dinas Kesehatan	9.577.985.796,51	6.780.421.518,54	2.797.564.277,97	41,26
3	Rsud Abdul Rivai	10.552.772.264,18	10.228.472.644,09	324.299.620,09	3,17
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	153.975.890.605,40	83.791.239.647,40	70.184.650.958,00	83,76
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	0,00	4.277.800,00	(4.277.800,00)	(100,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	746.510.000,00	451.098.890,00	295.411.110,00	65,49
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	197.492.980,00	1.442.400,00	196.050.580,00	13.591,97
8	Dinas Sosial	463.320.000,00	463.320.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	10.171.000,00	1.250.000,00	8.921.000,00	713,68
10	Dinas Pangan	342.003.500,00	5.852.800,00	336.150.700,00	5.743,42
11	Dinas Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	1.717.314.960,00	517.730.925,00	1.199.584.035,00	231,70
13	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	960.445.215,00	954.091.650,00	6.353.565,00	0,67
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	7.323.400,00	0,00	7.323.400,00	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	152.984.346,00	0,00	152.984.346,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	626.480.000,00	120.947.500,00	505.532.500,00	417,98
17	Dinas Komunikasi & Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	61.061.400,00	57.400.000,00	3.661.400,00	6,38
19	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.615.500,00	16.803.783,00	1.811.717,00	10,78
20	Dinas Kepemudaan & Olahraga	824.051.030,00	669.726.175,00	154.324.855,00	23,04
21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	228.104.500,00	152.866.250,00	75.238.250,00	49,22
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	183.125.468,00	0,00	183.125.468,00	100,00
23	Dinas Perikanan	22.867.634,00	2.200.000,00	20.667.634,00	939,44
24	Dinas Pertanian & Peternakan	88.165.066,00	51.191.000,00	36.974.066,00	72,23
25	Dinas Perkebunan	33.801.000,00	174.859.800,00	(141.058.800,00)	(80,67)
26	Sekretariat Daerah	348.317.700,00	48.979.050,00	299.338.650,00	611,16
27	Kantor Penghubung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Inspektorat	5.244.000,00	8.149.000,00	(2.905.000,00)	(35,65)
29	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	24.529.800,00	5.944.200,00	18.585.600,00	312,67
30	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	56.482.816,00	97.607.785,00	(41.124.969,00)	(42,13)
31	Badan Pendapatan Daerah	154.318.000,00	84.433.500,00	69.884.500,00	82,77
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	3.260.000,00	4.925.000,00	(1.665.000,00)	(33,81)

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
33	Set Dewan Pengurus Korpri	0,00	712.900,00	(712.900,00)	(100,00)
34	Sekretariat DPRD	135.594.380,00	18.010.300,00	117.584.080,00	652,87
35	Kec Tg Redeb	2.767.300,00	2.960.000,00	(192.700,00)	(6,51)
36	Kec Gunung Tabur	2.436.000,00	477.700,00	1.958.300,00	409,94
37	Kec Sambaliung	3.970.000,00	978.000,00	2.992.000,00	305,93
38	Kec Teluk Bayur	560.000,00	380.000,00	180.000,00	47,37
39	Kec Segah	1.450.000,00	1.780.600,00	(330.600,00)	(18,57)
40	Kec Kelay	1.871.000,00	1.025.000,00	846.000,00	82,54
41	Kec Talisayan	3.550.000,00	2.108.600,00	1.441.400,00	68,36
42	Kec Biduk-Biduk	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
43	Kec Maratua	516.000,00	1.695.800,00	(1.179.800,00)	(69,57)
44	Kec Tabalar	2.388.000,00	863.900,00	1.524.100,00	176,42
45	Kec Batu Putih	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kec Biatan	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Badan Kesbang, Politik & Linmas	31.779.200,00	57.763.900,00	(25.984.700,00)	(44,98)
	TOTAL PERSEDIAAN	**181.571.905.861,09**	**104.785.408.018,03**	**76.786.497.843,06**	**73,28**

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau, metode pencatatan persediaan untuk mengukur nilai persediaan dilakukan dengan metode periodik, sedangkan metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO (*First In First Out*).

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Investasi Jangka Panjang	618.232.967.990,13	612.840.345.861,00

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2023 senilai Rp618.232.967.990,13 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.392.622.129,13 atau 0,88% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp612.840.345.861,00. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.103 Investasi Jangka Panjang
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
2	Investasi Permanen	618.232.967.990,13	612.840.345.861,00	5.392.622.129,13	0,88
TOTAL PERSEDIAAN		**618.232.967.990,13**	**612.840.345.861,00**	**5.392.622.129,13**	**0,88**

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. Investasi Non Permanen merupakan dana bergulir Pemerintah Kabupaten Berau telah disisihkan seluruhnya (100%) sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Berau yang berada pada Dinas Koperindag dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sejak tahun 2002 yang bekerja sama dengan BPD Kaltimtara Cabang Tanjung Redeb yang berfungsi sebagai bank penyalur. Danabergulir yang diterima masyarakat, pihak Pemerintah Kabupaten Berau menetapkanbunga sebesar 2% yang digunakan untuk operasional BPD Kaltimtara Cabang Tanjung Redeb. Penyajian pada laporan keuangan sebesar nilai yang belum tertagih. Jumlah Dana bergulir yang tidak tertagih disebabkan beberapa kondisi diantaranya debitur telah meninggal dunia; alamat tidak ditemukan/berbeda dan masa jatuh tempo dana bergulir 5 tahun

Tabel 5.104 Investasi Non Permanen
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2022	Penerimaan Dana Bergulir	Sisa Dana Begulir	Penyisihan Dana Bergulir	31 Desember 2023	%
1	Dana bergulir pengembangan ekonomi kerakyatan pada Dinas Perindagkop	1.247.812.478,44	21.944.444,00	1.225.868.034,44	1.225.868.034,44	0,00	0,00
2	Dana bergulir pengembangan ekonomi kerakyatan pada bagian perekonomian Sekertariat Daerah	1.353.542.862,00	3.200.000,00	1.350.342.862,00	1.350.342.862,00	0,00	0,00
Total		**2.601.355.340,44**	**25.144.444,00**	**2.576.210.896,44**	**2.576.210.896,44**	**0,00**	**0,00**

5.3.1.2.2 Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Investasi Permanen	618.232.967.990,13	612.840.345.861,00

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2023 senilai Rp618.096.020.678,13 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.255.674.817,13 atau 0,88% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp612.840.345.860,79. Investasi Permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Rincian Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Berau disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.105 Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Nilai Penyertaan Modal (Rp)	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Kenaikan/ Penurunan)	%
1	PT BPD Kaltimtara	304.165.000.000,00	9,17	304.165.000.000,00	304.165.000.000,00	0,00	0,00
2	Perumda Air Minum Batiwakkal	171.320.860.000,00	100,00	196.464.784.479,00	196.002.014.543,00	462.769.936,00	0,24
3	PT Hutansanggam Labanan Lestari	6.000.000.000,00	50,00	2.128.653.593,00	2.716.401.318,00	(587.747.725,00)	(21,64)
4	PT Indo Pusaka Berau	65.890.000.000,00	49,48	113.588.543.113,35	109.956.930.000,00	3.631.613.113,35	3,30
5	Perumda Bhakti Praja	2.000.000.000,00	100,00	1.885.986.805,00	0,00	1.885.986.805,00	0,00
	JUMLAH	**549.375.860.000,00**		**618.232.967.990,35**	**612.840.345.861,00**	**5.392.622.129,35**	**0,88**

Uraian lebih lanjut Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

a. PT BPD Kaltimtara

Investasi dalam Saham pada PT BPD Kaltimtara per 31 Desember 2023 sebesar Rp304.165.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara. Pemerintah Kabupaten Berau tidak menambah penyertaan modal pada BPD Kaltim pada Tahun Anggaran 2022. Investasi Pemerintah Daerah pada PT BPD Kaltimtara disajikan berdasarkan metode biaya.

b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal

Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal (PERUMDAM Batiwakkal) Kabupaten Berau per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp196.464.784.479,00, mengalami **kenaikan** senilai Rp462.769.936,00 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp196.002.014,543,00. Investasi pemerintah daerah pada Perusahaan Umum daerah Air Minum Batiwakkal disajikan dengan metode ekuitas karena modal PERUMDAM Batiwakkal Kabupaten Berau seluruhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Penyajian investasi Pemerintah Kabupaten Berau atas PERUMDAM Batiwakkal per 31 Desember 2023 didasarkan atas laporan keuangan per 31 Desember 2023 *(Audited)* **Lampiran 6**.

c. PT Hutan Sanggam Berau

Sesuai perjanjian kerjasama pengelolaan hutan antara Pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I, dan Perusahaan Daerah Sylva Kaltim Sejahtera dengan Nomor 127/V/Inh/2003 tanggal 4 Februari 2003, disepakati pembentukan usaha patungan dalam areal Hak Pengusahaan Hutan di Kabupaten Berau dengan Nama PT Hutansanggam Berau. Komposisi Pemerintah Kabupaten Berau sebesar 50%,PT Inhutani I sebesar 30%, dan Perusda Sylva Kaltim Sejahtera sebesar 20%.

Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada PT Hutansanggam Labanan Lestari diakui berdasarkan metode Ekuitas yaitu senilai Rp2.128.653.593,00 yang dihitung berdasarkan kepemilikan sebesar 50% dari nilai Ekuitas

Perusda Hutan Sanggam Labanan Lestari per 31 Desember 2023 *(Audited)* sebesar Rp4.257.307.186,00 **Lampiran 7**.

d. PT Indo Pusaka Berau

PT Indo Pusaka Berau adalah perusahaan *joint venture* yang melanjutkan usaha Konsorsium Indo Pusaka Berau yang dibentuk oleh PT Indonesia Power, Pemerintah Kabupaten Berau, dan PT Pusaka Jaya Baru. Konsorsium tersebut dibentuk sesuai Surat Perjanjian Konsorsium Nomor 015/2088/UM-I/IX/2002 tanggal 23 September 2002 dalam rangka pembangunan PLTU Mulut Tambang (2 x 7 MW) di Lati - Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Sejak Desember 2015 perusahaan PLTU telah menambah satu unit pembangkit dengan membangun turbin Generator berkapasitas 7 MW untuk melengkapi boiler unit 3 yang telah beroperasi sebelumnya sehingga total kapasitas terpasang PLTU Lati mencapai 3 x 7 MW.

Investasi pada PLTU Mulut Tambang pada Tahun 2017 mengalami kenaikan karena adanya Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada PT Indo Pusaka Berau berupa Tanah seluas 129.662m^2 senilai Rp777.972.000,00. Adanya penambahan investasi tersebut mempengaruhi porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Berau menjadi 49,48%. Penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Pembagian saham sesuai surat Dewan Eksekutif Proyek PLTU Mulut Tambang Nomor 002.K/010/RUPS-IPB/2017, adalah sebagai berikut.

1. PT. Indonesia Power (46,53%)	Rp	61.950.000.000,00
2. Pemkab Berau (49,48%)	Rp	65.890.000.000,00
3. PT. Pusaka Jaya Baru (3,99%)	Rp	5.310.000.000,00
Jumlah	Rp	133.150.000.000,00

Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada PT Indo Pusaka Berau diperhitungkan dengan metode Ekuitas. Dalam laporan keuangan 2023 ***audited*** (**Lampiran 8**), PT Indo Pusaka Berau membukukan Ekuitas sebesar Rp113.588.543.113,35 Sehingga Investasi Pemerintah Kabupaten Berau pada PT Indo Pusaka Berau diakui sebesar Rp113.588.543.113,35 atau 49,48% dari total Ekuitas perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) yang menyatakan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemkab Berau sampai dengan 31 Desember 2020 telah menetapkan penyertaan modal pada PT. IPB dengan menerbitkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

a. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. IPB. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp53.364.792.235,00 terdiri

dari penyertaan modal Tahun 2005 sebesar Rp43.365.000.000,00 dan Tahun 2009 sebesar Rp9.999.792.235,00;

b. Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. IPB. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau untuk Tahun 2011 sebesar Rp17.500.000.000,00. Besarnya penyertaan modal Kabupaten Berau untuk Tahun 2005, 2009, dan 2011 keseluruhan berjumlah Rp70.864.792.235,00;

c. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada PT. IPB. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau untuk Tahun 2014 sebesar Rp777.972.000,00 berupa tanah. Besarnya penyertaan modal Kabupaten Berau untuk Tahun 2005,2009, 2011, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 96 dan 2014 keseluruhan berjumlah Rp71.533.014.235,00.

e. Perumda Bhakti Praja

1. Pendirian

Perumda Bhakti Praja didirikan untuk pertama kalinya dengan nama Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Tingkat II Berau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Berau Daerah Tingkat II Berau No.05 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah, Perusahaan Daerah Bhakti Praja diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah, dengan nama Perumda Bhakti Praja.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan pasal 5 Perda 14/2020, bidang usaha Perumda Bhakti Praja meliputi sebagai berikut :

a. Kehutanan,
b. Pertanian tanaman pangan,
c. Perkebunan,
d. Peternakan,
e. Perikanan,
f. Pariwisata,
g. Pertambangan dan penggalian,
h. Minyak dan gas bumi,
i. Ketenagalistrikan,
j. Perhubungan/kepelabuhanan,
k. Industri pengolahan dan,
l. Pergudangan

Disamping itu, Perumda Bhakti Praja dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untul mencapai tujuan perusahaan dan memperhatikan bidang usaha yang telah ditetapkan dalam Perda 14/2020, sebagaimana disebutkan diatas, Direksi Perumda Bhakti Praja menginisiasi berbagai kegiatan usaha yang akan dijalankan pada Tahun 2023, yang meliputi :

a. Pengangkutan CPO
b. Perdagangan TBS Kelapa Sawit
c. Perdagangan Cangkang Kelapa Sawit
d. Perdagangan Karet
e. Supplier Industri

3. Permodalan

Berdasarkan Perda 14/2020, Perumda Bhakti Praja memiliki modal senilai Rp50.000.000.000 yang akan disetor secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Pada bulan Nopember 2023 Perumda Bhakti Praja meneirma setoran modal Pemerintah Kabupaten Berau senilai Rp2.000.000.000,00. Laporan Keuangan Perumda Bhakti Praja dan diakui dengan motode Ekuitas di Tahun 2023 senilai Rp1.885.986.805,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 9***.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	8.972.045.745.570,96	7.347.894.490.374,20

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap berasal dari Belanja Modal dan/atau lainnya yang dikapitalisasi dalam nilai Aset Tetap tahun berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2023 senilai Rp8.972.045.745.570,96 atau mengalami **kenaikan** senilai Rp1.624.151.255.196,76 atau 22,10% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp7.347.894.490.374,20. Dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.106 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Permendagri 108/2016			
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (penurunan)	%
Tanah	1.069.237.842.504,83	1.058.655.114.710,83	10.582.727.794,00	1,00
Peralatan dan Mesin	1.109.298.981.825,43	931.458.524.421,82	177.840.457.403,61	19,09
Gedung dan Bangunan	2.128.863.132.087,38	2.014.725.162.495,07	114.137.969.592,31	5,67
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.093.051.129.603,83	7.368.157.044.197,75	1.724.894.085.406,08	23,41
Aset Tetap Lainnya	87.661.682.797,00	80.709.039.565,00	6.952.643.232,00	8,61
Konstruksi Dalam Pengerjaan	323.829.393.153,36	85.453.760.261,36	238.375.632.892,00	278,95
Akumulasi Penyusutan	**(4.839.896.416.400,87)**	**(4.191.264.155.277,63)**	**(648.632.261.123,24)**	**15,48**
Jumlah	**8.972.045.745.570,96**	**7.347.894.490.374,20**	**1.624.151.255.196,76**	**22,10**

Ringkasan mutasi aset tetap per 31 Desember 2023 adalah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.107 Rincian Mutasi Aset

(dalam rupiah)

Keterangan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	JUMLAH
Saldo Awal	**1.058.655.114.710,83**	**931.458.524.421,82**	**2.014.725.162.495,07**	**7.368.157.044.197,75**	**80.709.039.565,00**	**85.453.760.261,36**	**11.539.158.645.651,80**
PENAMBAHAN							
LRA	7.825.488.693,00	172.966.458.500,00	307.876.754.279,00	1.848.412.488.655,00	8.536.351.315,00	0,00	**2.345.617.541.442,00**
Hutang + Hibah	1.246.489.500,00	2.057.648.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.304.138.330,00**
Reklas + Koreksi	5.129.516.519,00	4.118.601.365,61	3.984.934.446,00	19.085.809.476,08	628.756.600,00	257.733.940.955,00	**290.681.559.361,69**
TOTAL MUTASI TAMBAH	**14.201.494.712,00**	**179.142.708.695,61**	**311.861.688.725,00**	**1.867.498.298.131,08**	**9.165.107.915,00**	**257.733.940.955,00**	**2.639.603.239.133,69**
PENGURANGAN							
SK PENGHAPUSAN/ Hibah	1.853.033.112,00		930.437.500,00				**2.783.470.612,00**
HUTANG PIHAK KE_3			263.506.679,00	11.887.381.480,00			**12.150.888.159,00**
Reklas + Koreksi	1.765.733.806,00	621.707.351,00	196.473.065.953,69	130.716.831.245,00	2.212.464.683,00	19.358.308.063,00	**351.148.111.101,69**
NILAI DIBAWAH KAPITALISASI		680.543.941,00	56.709.000,00				**737.252.941,00**
TOTAL MUTASI KURANG	**3.618.766.918,00**	**1.302.251.292,00**	**197.723.719.132,69**	**142.604.212.725,00**	**2.212.464.683,00**	**19.358.308.063,00**	**366.819.722.813,69**
SALDO AKHIR	**1.069.237.842.504,83**	**1.109.298.981.825,43**	**2.128.863.132.087,38**	**9.093.051.129.603,83**	**87.661.682.797,00**	**323.829.393.153,36**	**13.811.942.161.971,80**

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Per 31 Desember 2022	**Rp**	**1.058.655.114.710,83**
Mutasi Tambah	**Rp**	**14.201.494.712,00**
Mutasi Kurang	**Rp**	**3.618.766.918,00**
Saldo akhir per 31 Desember 2023	**Rp**	**1.069.237.842.504,83**

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 senilai Rp1.069.237.842.504,83 mengalami **kenaikan** senilai Rp10.582.727.794,00 atau 1,00% dibandingkan dengan nilai perolehan aset Tanah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.058.655.114.710,83.

Rincian mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut :

Realisasi belanja modal Tanah Ta 2023		
DINAS PERTANAHAN	**Rp**	**7.825.488.693,00**
Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tanah	Rp	429.719.892,00
Hasil Inventarisasi Aset Tanah	Rp	241.748.000,00
Mutasi Masuk Aset Tanah antar SKPD dari BPKAD ke DLHK	Rp	411.575.000,00
Mutasi Masuk Aset Tanah antar SKPD dari BPBD ke Kesbangpol	Rp	1.354.158.806,00
Mutasi Masuk Barang dan Jasa Biaya Kerohimanan dari BPKAD	Rp	2.692.314.821,00
Jumlah Penambahan Aset Tanah (Reklasifikasi)	**Rp**	**5.129.516.519,00**

Hibah :

Hibah Tanah pada Dinas Pendidikan

Hibah dari Yayasan SMP Bina Informatika Berau Nomor : 002/YBIB/VIII/2015, luas 7500 M2, Surat Pernyataan Pengurusan Fisik Bidang Tanah No. 030/36/BPKAD-E/2022, Penggunaan SMP 6 Sambaliung	Rp	1.180.000.000,00
Hibah Tanah pada Kecamatan Teluk Bayur		
Hibah Tanah Jalan Terowongan Teluk Bayur Dari Bapak Erhamsyah Sanusi (Komisaris Utama PT BBI) Luas Tanah 18.997 M2 (Harga Menggunakan Nilai NJOP)	Rp	66.489.500,00
Jumlah Penambahan Aset Tanah (Hibah)	**Rp**	**1.246.489.500,00**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**14.201.494.712,00**

Rincian mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Reklasifikasi :		
Mutasi Keluar Aset Tanah antar SKPD dari BPBD ke Kesbangpol	Rp	1.354.158.806,00
Mutasi Keluar Aset Tanah antar SKPD dari BPKAD ke DLHK	Rp	411.575.000,00
Jumlah Pengurangan Aset Tanah (Reklasifikasi)	**Rp**	**1.765.733.806,00**
Hibah :		
Hibah keluar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Hibah keluar Tanah ke KPU Nomor BAST No : 030/1918 /BPKAD - E /HIBAH TANAH / 2019 tanggal 31 Juli 2019	Rp	948.000.000,00
Hibah keluar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Nomor : 030/918/BAST/BPKAD-E/IV/2020 berupa Tanah seluas 20,000 M2 kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Berau	Rp	745.033.112,00
Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Nomor : 030/918/BAST/BPKAD-E/IV/2020 berupa Tanah seluas 10,000 M2 kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Berau	Rp	160.000.000,00
	Rp	905.033.112,00
Jumlah Pengurangan Aset Tanah (Hibah)	**Rp**	**1.853.033.112,00**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**3.618.766.918,00**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Per 31 Desember 2022	**Rp**	**931.458.524.421,82**
Mutasi Tambah	**Rp**	**179.142.708.695,61**
Mutasi Kurang	**Rp**	**1.302.251.292,00**
Saldo akhir per 31 Desember 2023	**Rp**	**1.109.298.981.825,43**

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 per 31 Desember 2023 senilai Rp1.109.298.981.825,43 mengalami **kenaikan** senilai Rp177.840.457.403,61 atau 19,09% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 senilai Rp931.458.524.421,82.

Rincian mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut :

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Ta 2023	**Rp**	**172.966.458.500,00**
Reklasifikasi :		

Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin	Rp	1.875.942.336,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin	Rp	313.935.028,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	Rp	680.255.301,61
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Peralatan dan Mesin	Rp	12.931.000,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke Peralatan dan Mesin	Rp	1.089.762.700,00
Mutasi Masuk antar OPD pada Perealatan dan Mesin	Rp	145.775.000,00
Jumlah Penambahan Peralatan dan Mesin (Reklasifikasi)	**Rp**	**4.118.601.365,61**
Hibah :		
Jumlah Penambahan Peralatan dan Mesin (Hibah)	**Rp**	**2.057.648.830,00**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**179.142.708.695,61**

Rincian mutasi kurang peralatan dan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut :

Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	Rp	8.379.100,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	9.933.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan	Rp	293.258.151,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud	Rp	133.383.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa	Rp	711.523.041,00
Mutasi Keluar antar OPD pada Peralatan dan Mesin	Rp	145.775.000,00
Jumlah Pengurangan Peralatan dan Mesin (Reklasifikasi)	**Rp**	**1.302.251.292,00**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**1.302.251.292,00**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Per 31 Desember 2022	**Rp**	**2.014.725.162.495,07**
Mutasi Tambah	**Rp**	**311.861.688.725,00**
Mutasi Kurang	**Rp**	**197.723.719.132,69**
Saldo akhir per 31 Desember 2023	**Rp**	**2.128.863.132.087,38**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp2.128.863.132.087,38 mengalami **kenaikan** senilai Rp114.137.969.592,31 atau 5,67%. dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.014.725.162.495,07.

Rincian mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

Realisasi belanja modal gedung & bangunan Ta 2023	**Rp**	**307.876.754.279,00**
Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung & Bangunan	Rp	742.533.500,00
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Gedung & Bangunan	Rp	442.089.151,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung & Bangunan	Rp	80.247.591,00
Reklasifikasi dari Barang & Jasa ke Gedung & Bangunan	Rp	1.270.343.704,00
Mutasi Masuk antar OPD pada Gedung & Bangunan	Rp	1.449.720.500,00
Jumlah Penambahan Gedung & Bangunan (Reklasifikasi)	**Rp**	**3.984.934.446,00**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**311.861.688.725,00**

Adapun pengurangan Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Tanah	Rp	429.719.892,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	132.453.449.949,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp	14.228.139.053,08
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Peralatan & Mesin	Rp	680.255.301,61
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Tetap Lainnya	Rp	500.000.000,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Tak Berwujud	Rp	3.052.969.213,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Aset Lainnya	Rp	4.535.187.040,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Barang & Jasa	Rp	84.649.000,00
Reklasifikasi dari Gedung & Bangunan ke Persediaan	Rp	39.115.685.005,00
Mutasi Keluar antar OPD pada Gedung & Bangunan	Rp	1.449.720.500,00
Jumlah Pengurangan Gedung & Bangunan (Reklasifikasi)	**Rp**	**196.529.774.953,69**
Hibah :		
Jumlah Pengurangan Gedung & Bangunan (Hibah)	**Rp**	**930.437.500,00**
Hutang :		
Jumlah Pengurangan Utang Belanja Modal Gedung & Bangunan	**Rp**	**263.506.679,00**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**197.723.719.132,69**

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Per 31 Desember 2022	**Rp**	**7.368.157.044.197,75**
Mutasi Tambah	**Rp**	**1.867.498.298.131,08**
Mutasi Kurang	**Rp**	**142.604.212.725,00**
Saldo akhir per 31 Desember 2023	**Rp**	**9.093.051.129.603,83**

Nilai perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp9.093.051.129.603,83 dan mengalami **kenaikan** senilai Rp1.724.894.085.406,08 atau 23,41%. Dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp7.368.157.044.197,75.

Dari nilai JIJ terdapat aset yang dimanfaatkan oleh PERUMDAM Batiwakkal senilai Rp189.835.436.414,81 (Rincian nilai JIJ aset yang dimanfaatkan oleh PERUMDAM dan dilihat pada **Lampiran 10**).

Rincian mutasi Tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Ta 2022	**Rp**	**1.848.412.488.655,00**
Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	14.228.139.053,08
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	9.933.000,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	4.817.737.423,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	30.000.000,00

Jumlah Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Reklasifikasi)	**Rp**	**19.085.809.476,08**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**1.867.498.298.131,08**

Rincian mutasi Kurang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin	Rp	1.875.942.336,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	125.280.491.006,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya	Rp	89.910.000,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tak Berwujud	Rp	3.370.614.543,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Barang dan Jasa	Rp	99.873.360,00
Jumlah Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Reklasifikasi)	**Rp**	**130.716.831.245,00**
Hutang :		
Jumlah Pengurangan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**Rp**	**11.887.381.480,00**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**142.604.212.725,00**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Per 31 Desember 2022	**Rp**	**80.709.039.565,00**
Mutasi Tambah	**Rp**	**9.165.107.915,00**
Mutasi Kurang	**Rp**	**2.212.464.683,00**
Saldo akhir per 31 Desember 2023	**Rp**	**87.661.682.797,00**

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 Rp87.661.682.797,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp6.952.643.232,00 atau 8,61% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 senilai Rp80.709.039.565,00.

Rincian nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya Ta 2023	**Rp**	**8.536.351.315,00**

Rincian Mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut :

Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	Rp	8.379.100,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya	Rp	500.000.000,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya	Rp	89.910.000,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke Aset Tetap Lainnya	Rp	6.660.000,00
Mutasi Masuk antar OPD pada Aset Tetap Lainnya	Rp	23.807.500,00
Jumlah Penambahan Aset Tetap Lainnya (Reklasifikasi)	**Rp**	**628.756.600,00**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**9.165.107.915,00**

Rincian Mutasi Kurang dapat dirincikan sebagai berikut :

Reklasifikasi :

Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin	Rp	313.935.028,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan	Rp	80.247.591,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud	Rp	1.739.474.564,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Barang dan Jasa	Rp	55.000.000,00
Mutasi Keluar antar OPD pada Aset Tetap Lainnya	Rp	23.807.500,00
Jumlah Pengurangan Aset Tetap Lainnya (Reklasifikasi)	**Rp**	**2.212.464.683,00**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**2.212.464.683,00**

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Per 31 Desember 2022	**Rp**	**85.453.760.261,36**
Mutasi Tambah	**Rp**	**257.733.940.955,00**
Mutasi Kurang	**Rp**	**19.358.308.063,00**
Saldo akhir per 31 Desember 2023	**Rp**	**323.829.393.153,36**

Nilai perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 senilai Rp323.829.393.153,36 mengalami **kenaikan** senilai Rp238.375.632.892,00 atau 278,95% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp85.453.760.261,36.

Rincian Mutasi Tambah dapat dirincikan sebagai berikut:

Reklasifikasi:		
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	132.453.449.949,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	125.280.491.006,00
Jumlah Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (Reklasifikasi)	**Rp**	**257.733.940.955,00**
Total Mutasi Penambahan Seluruhnya	**Rp**	**257.733.940.955,00**

Rincian Mutasi Kurang dapat dirincikan sebagai berikut:

Reklasifikasi :		
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	742.533.500,00
Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	4.817.737.423,00
Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Peralatan dan Mesin	Rp	12.931.000,00
Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tak Berwuhjud	Rp	13.785.106.140,00
Jumlah Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (Reklasifikasi)	**Rp**	**19.358.308.063,00**
Total Mutasi Pengurangan Seluruhnya	**Rp**	**19.358.308.063,00**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan	(4.839.896.416.400,87)	(4.191.264.155.277,63)

Akumulasi Penyusutan merupakan Akumulasi Penyusutan Aset milik Pemerintah Kabupaten Berau sampai dengan tanggal neraca, sedangkan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Nilai perolehan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp4.839.896.416.400,87 mengalami **kenaikan** senilai Rp648.632.261.123,24 atau 15,48% dibandingkan dengan nilai perolehan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp4.191.264.155.277,63.

Nilai buku Aset Tetap setelah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.108 Nilai Buku Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Nilai Buku (per 31-Des-2023)	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	kenaikan penurunan	%
1	TANAH	1.069.237.842.504,83	0,00	1.069.237.842.504,83	0,00	0,00	0,00
2	PERALATAN MESIN	1.109.298.981.825,43	(729.863.686.437,96)	379.435.295.387,47	(639.243.537.129,84)	(90.620.149.308,12)	14,18
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.128.863.132.087,38	(424.215.396.291,27)	1.704.647.735.796,11	(387.864.481.928,67)	(36.350.914.362,60)	9,37
4	JALAN. JARINGAN. DAN IRIGASI	9.093.051.129.603,83	(3.684.256.757.976,64)	5.408.794.371.627,19	(3.163.184.671.217,12)	(521.072.086.759,52)	16,47
5	ASET TETAP LAINNYA	87.661.682.797,00	(1.560.575.695,00)	86.101.107.102,00	(971.465.002,00)	(589.110.693,00)	60,64
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	323.829.393.153,36	0,00	323.829.393.153,36	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**13.811.942.161.971,80**	**(4.839.896.416.400,87)**	**8.972.045.745.570,96**	**(4.191.264.155.277,63)**	**(648.632.261.123,24)**	**15,48**

5.3.1.4. Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	283.581.494.898,00	285.209.591.282,00

Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 senilai Rp283.581.494.898,00 dan untuk per 31 Desember 2022 senilai Rp285.209.591.282,00, mengalami **penurunan** senilai Rp1.628.096.384,00 atau 0,57% dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.109 Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	PROPERTI INVESTASI	31 Desember 2023	31 Desember 2022	kenaikan penurunan	%
1	Properti Investasi	369.649.076.785,00	369.649.076.785,00	0,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(86.067.581.887,00)	(84.439.485.503,00)	(1.628.096.384,00)	1,93
Jumlah		**283.581.494.898,00**	**285.209.591.282,00**	**(1.628.096.384,00)**	**(0,57)**

5.3.1.4.1. Properti Investasi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Properti Investasi	369.649.076.785,00	369.649.076.785,00

Properti Investasi per 31 Desember 2023 senilai Rp369.649.076.785,00 dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp369.649.076.785,00 tidak

terjadi kenaikan maupun penurunan. Penyajian informasi Properti Investasi ini belum didukung dengan Kebijakan Akuntansi. Rincian Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Tabel 5.110 Properti Investasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	Properti Investasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	kenaikan penurunan	%
1	BPKAD	Tanah	3.161.844.520,00	3.161.844.520,00	0,00	0,00
2	DPUPR	Gedung dan Bangunan	364.165.232.265,00	364.165.232.265,00	0,00	0,00
3	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	2.322.000.000,00	2.322.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah			**369.649.076.785,00**	**369.649.076.785,00**	**0,00**	**0,00**

5.3.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(86.067.581.887,00)	(84.439.485.503,00)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan Akumulasi Penyusutan Aset milik Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember2023 dengan nilai Rp86.067.581.887,00 dan senilai Rp84.439.485.503,00 per 31 Desember 2022. Mengalami **kenaikan** senilai Rp1.628.096.384,00 atau 1,93%. Rincian Akumulasi penyusutan Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Tabel 5.111 Akumulasi Properti Investasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	kenaikan penurunan	%
1	TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	(86.067.581.887,00)	(84.439.485.503,00)	(1.628.096.384)	0,00
Jumlah		**(86.067.581.887,00)**	**(84.439.485.503,00)**	**(1.628.096.384,00)**	**1,93**

5.3.1.5 Aset Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lainnya	1.757.817.419.097,95	1.192.471.433.969,10

Nilai perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp1.757.817.419.097,95 mengalami **kenaikan** senilai Rp565.345.985.128,85 atau 47,41% dibandingkan dengan nilai perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp1.192.471.433.969,10. Rincian Aset lainnya dapat disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.112 Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tagihan Jangka Panjang	940.354.248,00	1.096.569.599,00	(156.215.351,00)	(14,25)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	41.569.394.795,00	18.435.073.335,00	23.134.321.460,00	125,49
4	Aset lain-lain	1.952.448.057.982,00	1.392.445.186.656,98	560.002.871.325,02	40,22
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(23.947.064.152,72)	(7.874.128.352,55)	(16.072.935.800,17)	204,12
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(213.193.323.774,33)	(211.631.267.269,33)	(1.562.056.505,00)	0,74
Jumlah		**1.757.817.419.097,95**	**1.192.471.433.969,10**	**565.345.985.128,85**	**47,41**

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	940.354.248,00	1.096.569.599,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai Rp940.354.248,00 mengalami **penurunan** senilai Rp156.215.551,00 atau 14,25% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.096.569.599,00. Tagihan Jangka Panjang berupa tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan tagihan penjualan angsuran rumah dinas yang dikelola Bapenda dan jatuh tempo lebih dari satu tahun, dengan rincian berikut.

Tabel 5.113 Tagihan Jangka Panjang
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	666.136.618,00	822.352.169,00	(156.215.551,00)	(19,00)
2	Tuntutan Ganti Rugi	274.217.630,00	274217630,00	0,00	0,00
Jumlah		**940.354.248,00**	**1.096.569.799,00**	**(156.215.551,00)**	**(14,25)**

Tabel 5.114 Rincian TP/TGR Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun Kejadian	Tgl. SKTJM	Saldo 31 Desember 2022	Pembayaran Selama 2022	Saldo 31 Desember 2023
1	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Gunung Tabur	2011	21 September 2011	67.380.150,00	0,00	67.380.150,00
2	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Berau	2012	Desember 2012	138.197.480,00	0,00	138.197.480,00
3	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau	2012	10 Desember 2012	68.640.000,00	0,00	68.640.000,00
4	TP/TGR pada Bendahara Pengeluaran Badan Ketahanan Pangandan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Berau	2012	18 April 2012	0,00	0,00	0,00
JUMLAH				**274.217.630,00**	**0,00**	**274.217.630,00**

Tabel 5.115 Rincian Angsuran Penjualan Rumah Dinas Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	N A M A	NO.& TGL.SK BUPATI PENJUALAN ASET	NO.& TGL.PERJANJIAN JUAL BELI	JATUH TEMPO PELUNASAN	KETETAPAN	Aset Tetap - Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas 2023
1	2	3	4	5	6	13
1	DRS. ABIDINSYAH SANUSI	184 TGL.16 APRIL 2008	030/213/BPKAD-F/2017 TGL.18-4-2017	10 DESEMBER 2027	68.993.200,00	25.446.847,00
2	JUNAIDI. (Alm)	535 TGL 6 JULI 2015	030/36/BPKAD-F/2016 TGL.21-3-2016	10 SEPTEMBER 2026	40.448.000,00	7.804.000,00
3	SABRANSYAH, A.MA,PD	452 TGL.06 JULI 2017	030/007/BPKAD-E/2017 TGL.14-09-2017	10 MARET 2035	194.162.000,00	104.216.410,00
4	DRS.HARNO	452 TGL.06 JULI 2017	030/ /BPKAD-E/2019 TGL.02-09-2019	10 SEPTEMBER 2039	203.500.000,00	147.410.303,00
5	ROHANA, S.PD	452 TGL.06 JULI 2017	030/033/BPKAD-E/2018 TGL.15-02-2018	10 JANUARI 2038	104.765.400,00	65.513.680,00
6	HJ.CHAIRUNNISAH, S.PD	452 TGL.06 JULI 2017		06 JULI 2027	97.528.000,00	26.615.256,00
7	H.SUKIRMAN(TANAH)	452 TGL.06 JULI 2017	030/005/BPKAD-E/2017 TGL.22-08-2017	10 AGUSTUS 2037	45.000.000,00	18.525.000,00
8	H.M. RUSLIE DJAFAR	452 TGL.06 JULI 2017	030/010/BPKAD-E/2018 TGL.04-01-2018	10 JANUARI 2038	145.941.000,00	86.407.297,00
9	HJ.SERI TUTI HANDAYANI,S.PD.SD	452 TGL.06 JULI 2017	030/001/BPKAD-E/2017 TGL.24-08-2017	10 AGUSTUS 2027	81.061.000,00	59.032.325,00
10	RITA HARYANTI	452 TGL.06 JULI 2017	030/669/BPKAD-E/2017 TGL.05-09-2017	10 SEPTEMBER 2037	100.402.000,00	61.975.025,00
11	ELYANA	452 TGL.06 JULI 2017	030/670/BPKAD-E/2017 TGL.05-09-2017	10 SEPTEMBER 2037	100.402.000,00	63.190.475,00
NILAI TOTAL						**666.136.618,00**

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	41.569.394.795,00	18.435.073.335,00

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2023 senilai Rp41.569.394.795,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp23.134.321.460,00 atau 125,49% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp18.435.073.335,00 Aset Tidak Berwujud tersebut berupa perangkat lunak sistem operasi dan hasil kajian. Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD disajikan pada tabel berikut dan untuk rincian masing-masing pos ATB terdapat pada **Lampiran 12**.

Tabel 5.116 Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	OPD	31 Desember 2022	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023	kenaikan (penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	432.400.000,00	0,00	0,00	0,00	432.400.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	364.757.400,00	0,00	5.000.000,00	0,00	369.757.400,00	5.000.000,00	1,35
3	RSUD Dr. Rivai	23.102.700,00	0,00	2.250.000.000,00	0,00	2.273.102.700,00	2.250.000.000,00	98,98
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	7.599.279.455,00	0,00	17.275.383.233,00	0,00	24.874.662.688,00	17.275.383.233,00	69,45
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	9.240.000,00	0,00	139.450.000,00	0,00	148.690.000,00	139.450.000,00	93,79
6	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	140.517.000,00	84.722.000,00	0,00	0,00	225.239.000,00	84.722.000,00	37,61
7	Dinas Pertanahan	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	156.886.000,00	0,00	63.483.000,00	0,00	220.369.000,00	63.483.000,00	28,81
9	Badan Lingkungan Hidup	1.486.494.910,00	0,00	584.306.663,00	0,00	2.070.801.573,00	584.306.663,00	28,22
10	Dinas Komunikasi & Informatika	1.605.539.200,00	0,00	1.052.206.450,00	0,00	2.657.745.650,00	1.052.206.450,00	39,59
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	253.050.220,00	0,00	99.000.000,00	0,00	352.050.220,00	99.000.000,00	28,12
12	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	169.427.500,00	0,00	0,00	0,00	169.427.500,00	0,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	109.280.000,00	0,00	0,00	0,00	109.280.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.337.541.300,00	0,00	69.900.000,00	0,00	1.407.441.300,00	69.900.000,00	4,97
16	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	289.987.350,00	0,00	20.000.000,00	0,00	309.987.350,00	20.000.000,00	6,45
18	Sekretariat DPRD	49.280.000,00	0,00	171.270.114,00	0,00	220.550.114,00	171.270.114,00	77,66
19	Kantor Penghubung	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
20	Kecamatan Tanjung Redeb	50.834.300,00	0,00	0,00	0,00	50.834.300,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Biatan	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00
22	Dinas Perikanan	34.410.000,00	0,00	0,00	0,00	34.410.000,00	0,00	0,00
23	Dinas Perkebunan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
24	Dinas Pertanian & Peternakan	528.030.000,00	0,00	0,00	0,00	528.030.000,00	0,00	0,00
25	Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluaraga Berencana	92.880.000,00	0,00	0,00	0,00	92.880.000,00	0,00	0,00
26	Badan Pendapatan Daerah	1.502.000.000,00	699.500.000,00	620.100.000,00	0,00	2.821.600.000,00	1.319.600.000,00	46,77
27	BPKAD	947.650.000,00	0,00	0,00	0,00	947.650.000,00	0,00	0,00
28	Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan	702.236.000,00	0,00	0,00	0,00	702.236.000,00	0,00	0,00
29	Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan	332.350.000,00	0,00	0,00	0,00	332.350.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**18.435.073.335,00**	**784.222.000,00**	**22.350.099.460,00**	**0,00**	**41.569.394.795,00**	**23.134.321.460,00**	**125,49**

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.952.448.057.982,00	1.392.445.186.656,98

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2023 senilai Rp1.952.448.057.982,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp560.002.871.325,02 atau 40,22% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.392.445.186.656,98. Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 5.117 Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Aset rusak berat	220.759.757.584,49	216.387.227.544,49	4.372.530.040,00	2,02
2	Aset Perusda Bhakti Praja	288.371.844,42	288.371.844,42	0,00	0,00
3	Jaminan Reklamasi & Jaminan Kesungguhan	373.943.242,75	372.996.477,73	946.765,02	0,25
4	Aset Lancar yang direncanakan untuk dihapus (Piutang)	6.982.067.000,00	6.982.067.000,00	0,00	0,00
5	Perpindahan kewenangan Kabupaten Keprovinsi	269.050.025.310,34	269.050.025.310,34	0,00	0,00
6	Jasa Kajian Akademis Pengelolaan PBB-P2 dengan FEB UGM	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
7	Kajian Penyusunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
8	Kajian Penyusunan Potensi Wajib Pajak dengan UMB	0,00	99.500.000,00	(99.500.000,00)	(100,00)
9	Jasa Konsultasi Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan BLK	0,00	84.722.000,00	(84.722.000,00)	(100,00)
10	TDF/TKD	1.454.993.893.000,00	898.580.276.480,00	556.413.616.520,00	61,92
Jumlah		**1.952.448.057.982,00**	**1.392.445.186.656,98**	**560.002.871.325,02**	**40,22**

Rincian Aset Lain-lain sebagai berikut :

a. Aset Rusak berat

Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 senilai Rp220.759.757.584,49 mengalami **kenaikan** Rp4.372.530.040,00 atau 2,02% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp216.387.227.544,49 merupakan reklasifikasi Aset Tetap yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi sebelum dihapusbukukan. Rincian aset rusak berat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.118 Aset Rusak Berat Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi	Penambahan	Saldo 31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	23.867.661.184,99	0,00	0,00	23.867.661.184,99	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	50.407.838.908,00	0,00	1.399.342.040,00	51.807.180.948,00	1.399.342.040,00	2,78
3	RSUD	69.977.933.410,00	0,00	2.542.995.000,00	72.520.928.410,00	2.542.995.000,00	3,63

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi	Penambahan	Saldo 31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	2.414.783.547,50	0,00	224.584.000,00	2.639.367.547,50	224.584.000,00	9,30
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	870.350.300,00	0,00	0,00	870.350.300,00	0,00	0,00
6	Badan Kesbang, Politik & Linmas	427.860.000,00	0,00	0,00	427.860.000,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.341.488.291,00	0,00	0,00	2.341.488.291,00	0,00	0,00
8	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	385.589.500,00	0,00	0,00	385.589.500,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	688.772.000,00	0,00	0,00	688.772.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga & Transmigrasi	392.775.000,00	0,00	0,00	392.775.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	258.540.000,00	0,00	0,00	258.540.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Pangan	1.838.365.600,00	0,00	0,00	1.838.365.600,00	0,00	0,00
13	Dinas Pertanahan	371.386.350,00	0,00	0,00	371.386.350,00	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	2.288.459.600,00	0,00	0,00	2.288.459.600,00	0,00	0,00
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.119.807.600,00	0,00	0,00	1.119.807.600,00	0,00	0,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	451.429.500,00	0,00	0,00	451.429.500,00	0,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	10.410.698.675,00	0,00	0,00	10.410.698.675,00	0,00	0,00
18	Dinas Komunikasi & Informatika	2.193.403.250,00	0,00	0,00	2.193.403.250,00	0,00	0,00
19	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	2.705.351.150,00	0,00	0,00	2.705.351.150,00	0,00	0,00
20	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.556.012.203,00	0,00	0,00	1.556.012.203,00	0,00	0,00
21	Dinas Kepemudaan & Olahraga	481.710.340,00	0,00	0,00	481.710.340,00	0,00	0,00
22	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.889.426.500,00	0,00	0,00	1.889.426.500,00	0,00	0,00
23	Kantor Perpustakaan & Kearsipan	1.174.600.667,00	0,00	0,00	1.174.600.667,00	0,00	0,00
24	Dinas Kelautan & Perikanan	3.193.326.900,00	0,00	0,00	3.193.326.900,00	0,00	0,00
25	Dinas Pertaniaan& Peternakan	2.821.085.490,00	0,00	0,00	2.821.085.490,00	0,00	0,00
26	Dinas Perkebunan	512.478.300,00	0,00	0,00	512.478.300,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	5.146.430.150,00	162.657.000,00	368.266.000,00	5.352.039.150,00	205.609.000,00	4,00
28	Sekretariat DPRD	6.599.605.360,00	0,00	0,00	6.599.605.360,00	0,00	0,00
29	Kec. Tanjung Redeb	2.772.039.516,00	0,00	0,00	2.772.039.516,00	0,00	0,00
30	Kec. Gunung Tabur	604.203.050,00	0,00	0,00	604.203.050,00	0,00	0,00
31	Kec. Sambaliung	1.964.801.489,00	0,00	0,00	1.964.801.489,00	0,00	0,00
32	Kec. Teluk Bayur	734.268.100,00	0,00	0,00	734.268.100,00	0,00	0,00
33	Kec. Segah	2.560.389.300,00	0,00	0,00	2.560.389.300,00	0,00	0,00
34	Kec. Kelay	348.085.193,00	0,00	0,00	348.085.193,00	0,00	0,00
35	Kec. Talisayan	586.225.250,00	0,00	0,00	586.225.250,00	0,00	0,00
36	Kec. Biduk-biduk	1.288.550.601,00	0,00	0,00	1.288.550.601,00	0,00	0,00
37	Kec. Maratua	615.127.700,00	0,00	0,00	615.127.700,00	0,00	0,00
38	Kec. Tabalar	211.000.850,00	0,00	0,00	211.000.850,00	0,00	0,00
39	Kec. Batu Putih	912.186.088,00	0,00	0,00	912.186.088,00	0,00	0,00
40	Kec. Biatan	479.433.750,00	0,00	0,00	479.433.750,00	0,00	0,00
41	Sekretariat KORPRI	60.045.000,00	0,00	0,00	60.045.000,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	OPD	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi	Penambahan	Saldo 31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
42	Inspektorat	737.697.208,00	0,00	0,00	737.697.208,00	0,00	0,00
43	Badan Penelitian & Pengembangan	2.588.320.361,00	0,00	0,00	2.588.320.361,00	0,00	0,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2.702.871.063,00	0,00	0,00	2.702.871.063,00	0,00	0,00
45	Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan	434.813.249,00	0,00	0,00	434.813.249,00	0,00	0,00
JUMLAH		**216.387.227.544,49**	**162.657.000,00**	**4.535.187.040,00**	**220.759.757.584,49**	**4.372.530.040,00**	**2,02**

b. Investasi pada Perusahaan Daerah Bhakti Praja senilai Rp288.371.844,42. Tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, aset-aset yang dimiliki Perusda Bhakti Praja untuk sementara diamankan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 428 Tahun 2007 tentang Pembekuan Sementara Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau. Penyebab berhentinya operasi Perusda Bhakti Praja karena belum pernah membukukan keuntungan dan aktifitas perusahaan yang pasif mengakibatkan beban anggaran Pemerintah Daerah selaku pemilik modal. Reklasifikasi Perusda Bhakti Praja dari investasi permanen ke aset lainnya pada Tahun 2013. Aset yang masih dikuasai Pemda adalah Tanah;

c. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan ijin usaha pertambangan senilai Rp373.943.242,75 yang belum diserahkan kepada Pemprov Kaltim dikarenakan belum adanya ijin usaha pertambangan;

d. Aset yang direncanakan untuk dihapus (Piutang) senilai Rp6.982.067.000,0 yaitu senilai Rp46.950.000,00 merupakan kesalahan transfer Pendapatan Retribusi Daerah ke rekening Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi pada Tahun 2009 yang sudah dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Kementerian Keuangan yang menyatakan Piutang tersebut tidak dapat dikembalikan dan Piutang Retribusi atas Ijin Pertambangan senilai Rp6.935.117.000,00 yang tidak dapat dipungut lagi karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; dan

e. Aset yang akan diserahkan kepada Pemprov Kaltim akibat perpindahan kewenangan Kabupaten Berau ke Provinsi Kaltim senilai Rp269.050.025.310,34 dengan rincian sebagai berikut.

   1) Aset SMA/SMK Negeri pada Dinas Pendidikan yang tersebar berupa di wilayah Kabupaten Berau senilai Rp12.683.123.350,01;

   2) Aset pada Dinas Perhubungan berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanensenilai Rp48.480.000,00;

   3) Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp635.160.000,00 yang terdiri atas Tanah SMAN 04 Berau senilai Rp472.640.000,00, Buku Laporan Lain-lain senilai Rp75.400.000,00, dan Kontur Zonasi Kecamatan Teluk Bayur (Dinas Kehutanan) senilai Rp87.120.000,00.

4) Aset P3D Senilai Rp255.322.585.723,33 terdiri atas Gedung dan Bangunan senilai Rp248.492.354.190,33 dan Peralatan dan Mesin senilai Rp6.830.231.533,00

5) Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan ijin usaha pertambangan sebesar Rp360.676.237,00 yang belum diserahkan kepada Pemprov Kaltim dikarenakan belum adanya ijin usaha pertambangan.

6) *Treasury Deposit Facility* (TDF-TKD) yaitu Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk non tunai senilai Rp1.454.993.893.000,00

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi amortisasi	(23.947.064.152,72)	(7.874.128.352,55)

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada per 31 Desember 2023 senilai Rp23.947.064.152,72 mengalami **kenaikan** senilai Rp16.072.935.800,17 atau 204,12% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp7.874.128.352,55. Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 yang disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 5.119 Amortisasi Per OPD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	OPD	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Amortisasi 31 Desember 2023	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	(412.400.000,00)	0,00	(20.000.000,00)	(432.400.000,00)	(20.000.000,00)	4,85
2	Dinas Kesehatan	(220.023.900,00)	0,00	(37.349.333,33)	(257.373.233,33)	(37.349.333,33)	16,98
3	RSUD Dr. Rivai	(23.102.700,00)	0,00	(337.500.000,00)	(360.602.700,00)	(337.500.000,00)	1.460,87
4	Dnas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	(2.903.267.024,25)	(11.531.065.450,67)	(2.373.265.840,38)	(16.807.598.315,30)	(13.904.331.291,05)	478,92
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	(9.240.000,00)	0,00	(15.108.333,33)	(24.348.333,33)	(15.108.333,33)	163,51
6	Dinas Perhubungan	(68.574.333,33)	0,00	(31.223.200,00)	(99.797.533,33)	(31.223.200,00)	45,53
7	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	(306.494.998,50)	0,00	(249.738.426,38)	(556.233.424,88)	(249.738.426,38)	81,48
8	Dinas Komunikasi & Informatika	(984.280.760,00)	0,00	(240.185.190,83)	(1.224.465.950,83)	(240.185.190,83)	24,40
9	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	(22.067.340,67)	0,00	(35.918.000,00)	(57.985.340,67)	(35.918.000,00)	162,77
10	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	(86.844.000,00)	0,00	(9.674.666,67)	(96.518.666,67)	(9.674.666,67)	11,14
11	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(73.888.375,00)	0,00	(33.885.500,00)	(107.773.875,00)	(33.885.500,00)	45,86
12	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	(2.497.500,00)	0,00	(9.990.000,00)	(12.487.500,00)	(9.990.000,00)	400,00
13	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	(428.618.338,33)	0,00	(186.367.260,00)	(614.985.598,33)	(186.367.260,00)	43,48
14	Sekretariat Daerah	(124.665.955,83)	0,00	(35.596.136,67)	(160.262.092,50)	(35.596.136,67)	28,55
15	Sekretariat DPRD	(35.317.333,33)	0,00	(12.710.501,90)	(48.027.835,23)	(12.710.501,90)	35,99
16	Kantor Penghubung	(45.000.000,00)	0,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	(50.000.000,00)	0,00		(50.000.000,00)	0,00	0,00
18	Dinas Perikanan	(1.720.500,00)	0,00	(6.882.000,00)	(8.602.500,00)	(6.882.000,00)	400,00
19	Dinas Perkebunan	(19.500.000,00)	0,00		(19.500.000,00)	0,00	0,00
20	Dinas Pertanian & Peternakan	(140.947.666,66)	0,00	(80.086.000,00)	(221.033.666,66)	(80.086.000,00)	56,82
21	Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana	(92.880.000,00)	0,00	0,00	(92.880.000,00)	0,00	0,00
22	Badan Pendapatan Daerah	(790.408.333,33)	(36.658.333,33)	(367.360.000,00)	(1.194.426.666,66)	(404.018.333,33)	51,12

(dalam rupiah)

NO	OPD	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Amortisasi 31 Desember 2023	Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
23	Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan	(426.778.033,34)	0,00	(139.427.200,00)	(566.205.233,34)	(139.427.200,00)	32,67
24	BPKAD	(265.016.666,67)	0,00	(165.630.000,00)	(430.646.666,67)	(165.630.000,00)	62,50
25	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	(38.261.950,00)	(4.236.100,00)	(44.299.466,67)	(86.797.516,67)	(48.535.566,67)	126,85
26	Dinas Pertanahan	(40.425.000,00)	0,00	(9.075.000,00)	(49.500.000,00)	(9.075.000,00)	22,45
27	Kecamatan Tanjung Redeb	(1.694.476,67)	0,00	(10.166.860,00)	(11.861.336,67)	(10.166.860,00)	600,00
28	Kecamatan Biatan	(3.225.833,33)	0,00	(658.333,33)	(3.884.166,66)	(658.333,33)	20,41
29	Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan	(256.987.333,34)	0,00	(48.878.666,67)	(305.866.000,01)	(48.878.666,67)	19,02
	JUMLAH	**(7.874.128.352,55)**	**(11.571.959.884,00)**	**(4.500.975.916,17)**	**(23.947.064.152,72)**	**(16.072.935.800,17)**	**204,12**

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	Tahun 2023	Tahun 2022
Akumulasi PenyusutanAset Lainnya	(213.193.323.774,33)	(211.631.267.269,33)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada per 31 Desember 2023 senilai Rp213.193.323.774,33 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.562.056.505,00 atau 0,74% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp211.631.267.269,33. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 5.120 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	31 Desember 2022	Koreksi	Penambahan	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	(77.787.632.748,33)	0,00	0,00	(77.787.632.748,33)	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	(36.244.523.207,00)	0,00	(606.116.097,00)	(36.850.639.304,00)	(606.116.097,00)	1,67
3	RSUD Dr. Rivai	(12.909.488.610,00)	0,00	(946.756.124,00)	(13.856.244.734,00)	(946.756.124,00)	7,33
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	(13.255.324.833,00)	0,00	(374.307,00)	(13.255.699.140,00)	(374.307,00)	0,00
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	(817.497.992,00)	0,00	0,00	(817.497.992,00)	0,00	0,00
6	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	(188.322.708,00)	0,00	0,00	(188.322.708,00)	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.211.234.145,00)	0,00	0,00	(2.211.234.145,00)	0,00	0,00
8	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	(383.930.333,00)	0,00	0,00	(383.930.333,00)	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	(665.448.520,00)	0,00	0,00	(665.448.520,00)	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	(389.383.333,00)	0,00	0,00	(389.383.333,00)	0,00	0,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(243.771.613,00)	0,00	0,00	(243.771.613,00)	0,00	0,00
12	Dinas Pangan	(1.320.675.944,00)	0,00	0,00	(1.320.675.944,00)	0,00	0,00
13	Dinas Pertanahan	(343.835.151,00)	0,00	0,00	(343.835.151,00)	0,00	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	(2.198.951.016,00)	0,00	0,00	(2.198.951.016,00)	0,00	0,00
15	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	(1.101.924.582,00)	0,00	0,00	(1.101.924.582,00)	0,00	0,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	(324.743.084,00)	0,00	0,00	(324.743.084,00)	0,00	0,00
17	Dinas Perhubungan	(9.663.396.255,00)	0,00	0,00	(9.663.396.255,00)	0,00	0,00
18	Dinas Komunikasi & Informatika	(2.160.716.709,00)	0,00	0,00	(2.160.716.709,00)	0,00	0,00
19	Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan	(2.607.209.958,00)	0,00	0,00	(2.607.209.958,00)	0,00	0,00
20	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(792.523.118,00)	0,00	0,00	(792.523.118,00)	0,00	0,00
21	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	(386.918.755,00)	0,00	0,00	(386.918.755,00)	0,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	SKPD	31 Desember 2022	Koreksi	Penambahan	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
22	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	(1.346.520.582,00)	0,00	0,00	(1.346.520.582,00)	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	(1.150.951.545,00)	0,00	0,00	(1.150.951.545,00)	0,00	0,00
24	Dinas Perikanan	(2.730.778.631,00)	0,00	0,00	(2.730.778.631,00)	0,00	0,00
25	Dinas Pertanian & Peternakan	(2.606.400.029,00)	0,00	0,00	(2.606.400.029,00)	0,00	0,00
26	Dinas Perkebunan	(511.744.622,00)	0,00	0,00	(511.744.622,00)	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	(4.932.604.931,00)	(162.657.000,00)	(171.466.977,00)	(4.941.414.908,00)	(8.809.977,00)	0,18
28	Sekretariat DPRD	(6.161.472.218,00)	0,00	0,00	(6.161.472.218,00)	0,00	0,00
29	Sekretariat Korpri	(59.476.250,00)	0,00	0,00	(59.476.250,00)	0,00	0,00
30	Kec. Tanjung Redeb	(2.752.033.234,00)	0,00	0,00	(2.752.033.234,00)	0,00	0,00
31	Kec. Gunung Tabur	(777.047.615,00)	0,00	0,00	(777.047.615,00)	0,00	0,00
32	Kec. Sambaliung	(1.454.587.185,00)	0,00	0,00	(1.454.587.185,00)	0,00	0,00
33	Kec. Teluk Bayur	(709.389.145,00)	0,00	0,00	(709.389.145,00)	0,00	0,00
34	Kec. Segah	(2.545.898.325,00)	0,00	0,00	(2.545.898.325,00)	0,00	0,00
35	Kec. Kelay	(314.999.604,00)	0,00	0,00	(314.999.604,00)	0,00	0,00
36	Kec. Talisayan	(560.744.273,00)	0,00	0,00	(560.744.273,00)	0,00	0,00
37	Kec. Biduk-Biduk	(1.272.353.263,00)	0,00	0,00	(1.272.353.263,00)	0,00	0,00
38	Kec. Maratua	(587.889.552,00)	0,00	0,00	(587.889.552,00)	0,00	0,00
39	Kec. Tabalar	(158.730.350,00)	0,00	0,00	(158.730.350,00)	0,00	0,00
40	Kec. Batu Putih	(888.329.576,00)	0,00	0,00	(888.329.576,00)	0,00	0,00
41	Kec. Biatan	(468.850.598,00)	0,00	0,00	(468.850.598,00)	0,00	0,00
42	Inspektorat	(693.588.630,00)	0,00	0,00	(693.588.630,00)	0,00	0,00
43	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	(2.499.537.414,00)	0,00	0,00	(2.499.537.414,00)	0,00	0,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	(3.039.857.876,00)	0,00	0,00	(3.039.857.876,00)	0,00	0,00
45	Badan Pendapatan Daerah	(7.084.185.000,00)	0,00	0,00	(7.084.185.000,00)	0,00	0,00
46	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	(325.844.207,00)	0,00	0,00	(325.844.207,00)	0,00	0,00
	JUMLAH	**(211.631.267.269,33)**	**(162.657.000,00)**	**(1.724.713.505,00)**	**(213.193.323.774,33)**	**(1.562.056.505,00)**	**0,74**

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	10.054.161.356,28	17.537.875.010,53

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yaitu Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang beban, Utang Jangka Pendek Lainnya dan Utang Transfer. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2023 senilai Rp10.054.161.356,28 mengalami **penurunan** senilai Rp7.483.713.654,25 atau 42,67% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp17.537.875.010,53. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.121 Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
Utang PFK	13.961.611,00	13.961.611,00	35.836.120,00	35.836.120,00	21.874.509,00	156,68
Pendapatan di terima dimuka	1.447.515,00	0,00	0,00	1.447.515,00	0,00	0,00
Utang Beban	3.126.593.537,00	3.126.593.537,00	8.911.589.717,91	8.911.589.717,91	5.784.996.180,91	185,03

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
Utang Jangka Pendek Lainnya	14.395.872.347,53	14.395.872.347,53	1.105.288.003,37	1.105.288.003,37	(13.290.584.344,16)	(92,32)
Utang Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**17.537.875.010,53**	**17.536.427.495,53**	**10.052.713.841,28**	**10.054.161.356,28**	**(7.483.713.654,25)**	**(42,67)**

5.3.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	35.836.120,00	13.961.611,00

PFK Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2023 senilai Rp35.836.120,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp21.874.509,00 atau 156,68% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp13.961.611,00. Perhitungan Fihak Ketiga oleh Bendahara Pengeluaran (pajak) belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian :

Tabel 5.122 Kewajiban Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2022	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Utang PFK	13.961.611,00	13.961.611,00	35.836.120,00	35.836.120,00	21.874.509,00	156,68
	JUMLAH	**13.961.611,00**	**13.961.611,00**	**35.836.120,00,00**	**35.836.120,00**	**21.874.509,00**	**156,68**

Tabel 5.123 Kewajiban Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

Nama OPD	NPWP	Keterangan	Tanggal		Nominal
			Tanggal Buku	Tanggal Setor	
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2929230727000	Pajak Penambahan Nilai	16/02/2024	16/02/2024	300.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2929230727000	Pajak Penambahan Nilai	16/02/2024	16/02/2024	300.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2929230727000	Pajak Penambahan Nilai	21/02/2024	21/02/2024	999.986,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Honor 2023			22.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Honor 2020			3.016.134,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Honor 2020			4.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Insentif 2020			752.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Belanja ATK 2023			4.468.000,00
JUMLAH					**35.836.120,00**

5.3.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.447.515,00	1.447.515,00

Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2023 senilai Rp1.447.515,00 tidak ada perbedaan dengan saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 senilai Rp1.447.515,00. Pendapatan diterima dimuka senilai Rp1.447.515,00 yaitu saldo pada BRI atas dana Jamkesmas dari pusat yang tidak dapat dipergunakan sebelum ada verifikasi tagihan.

Tabel 5.124 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	1.447.515,00	1.447.515,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.447.515,00**	**1.447.515,00**	**0,00**	**0,00**

5.3.2.3 Utang Belanja

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Belanja	8.911.589.717,91	3.126.593.537,00

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2023 senilai Rp8.911.589.717,91 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.784.996.180,91 atau 185,03% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp3.126.593.537,00 Utang Belanja Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125 Utang Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2022	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Utang Beban Pegawai	895.294.289,00	895.294.289,00	7.014.868.087,91	7.014.868.087,91	6.119.573.798,91	683,53
2	Utang Beban Jasa Kantor	2.231.299.248,00	2.231.299.248,00	1.896.721.630,00	1.896.721.630,00	(334.577.618,00)	(14,99)
Jumlah		**3.126.593.537,00**	**3.126.593.537,00**	**8.911.589.717,91**	**8.911.589.717,91**	**5.784.996.180,91**	**185,03**

a. Utang Belanja

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Belanja (Beban Pegawai)	7.014.868.087,91	895.294.289,00

Utang Belanja (Beban Pegawai) adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi akibat perikatan dengan pegawai, utang belanja (beban pegawai) ini terdiri dari Utang Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan, honorarium, penanggungjawaban pengelola keuangan, dan insentif pemungutan pajak daerah bulan Desember 2023. Utang Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Berau per 31 Desember 2023 senilai Rp7.014.868.087,91, mengalami **kenaikan** senilai Rp6.119.573.798,91 atau 683,53% dibandingkan dengan per 31

Desember 2022 senilai Rp895.294.289,00. Dengan rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.126 Utang Belanja (Beban Pegawai) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2022	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	91.817.800,00	91.817.800,00	91.817.800,00	0,00
2	RSUD Abd Rivai	895.294.289,00	895.294.289,00	6.920.221.487,91	6.920.221.487,91	6.024.927.198,91	672,95
3	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inspektorat	0,00	0,00	2.828.800,00	2.828.800,00	2.828.800,00	0,00
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kec Gn Tabur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**895.294.289,00**	**895.294.289,00**	**7.014.868.087,91**	**7.014.868.087,91**	**6.119.573.798,91**	**683,53**

b. Utang Jasa Kantor

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Jasa Kantor	1.896.721.630,00	2.231.299.248,00

Utang Jasa Kantor (Air, Listrik, telepon, Internet) dari beberapa OPD yang belum melakukan realisasi pembayaran sampai tanggal per 31 Desember 2023. Adapun saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.896.721.630,00. Terjadi **penurunan** senilai Rp334.577.618,00 atau 14,99%. Rincian utang jasa kantor dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.127 Utang Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2022	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	1.599.600,00	1.599.600,00	2.455.900,00	2.455.900,00	856.300,00	53,53
2	Dinas Kesehatan	549.357.688,00	549.357.688,00	477.485.989,00	477.485.989,00	(71.871.699,00)	(13,08)
3	RSUD Abd Rivai	141.891.594,00	141.891.594,00	165.881.660,00	165.881.660,00	23.990.066,00	16,91
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	44.023.590,00	44.023.590,00	0,00	0,00	(44.023.590,00)	(100,00)
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	64.500,00	64.500,00	197.500,00	197.500,00	133.000,00	206,20
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63.441.808,00	63.441.808,00	15.459.957,00	15.459.957,00	(47.981.851,00)	(75,63)
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	11.627.199,00	11.627.199,00	0,00	0,00	(11.627.199,00)	(100,00)
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	39.501.119,00	39.501.119,00	19.225.622,00	19.225.622,00	(20.275.497,00)	(51,33)
10	Dinas Pangan	1.250.100,00	1.250.100,00	379.900,00	379.900,00	(870.200,00)	(69,61)
11	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	2.740.500,00	2.740.500,00	3.119.000,00	3.119.000,00	378.500,00	13,81
12	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	6.195.336,00	6.195.336,00	450.000,00	450.000,00	(5.745.336,00)	(92,74)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	3.495.950,00	3.495.950,00	3.501.850,00	3.501.850,00	5.900,00	0,17
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	34.327.142,00	34.327.142,00	31.005.502,00	31.005.502,00	(3.321.640,00)	(9,68)

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2022	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
15	Dinas Perhubungan	24.676.328,00	24.676.328,00	25.846.267,00	25.846.267,00	1.169.939,00	4,74
16	Dinas Komunikasi & Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	176.718.096,00	176.718.096,00	266.591.629,00	266.591.629,00	89.873.533,00	50,86
18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.145.065,00	15.145.065,00	15.387.404,00	15.387.404,00	242.339,00	1,60
19	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	124.036.996,00	124.036.996,00	67.723.614,00	67.723.614,00	(56.313.382,00)	(45,40)
20	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	463.400,00	463.400,00	1.712.700,00	1.712.700,00	1.249.300,00	269,59
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	2.635.800,00	2.635.800,00	991.600,00	991.600,00	(1.644.200,00)	(62,38)
22	Dinas Perikanan	15.200.456,00	15.200.456,00	35.166.419,00	35.166.419,00	19.965.963,00	131,35
23	Dinas Pertanian & Peternakan	11.772.700,00	11.772.700,00	17.842.577,00	17.842.577,00	6.069.877,00	51,56
24	Dinas Perkebunan	14.057.249,00	14.057.249,00	13.560.097,00	13.560.097,00	(497.152,00)	(3,54)
25	Sekretariat Daerah	631.651.638,00	631.651.638,00	602.931.781,00	602.931.781,00	(28.719.857,00)	(4,55)
26	Kantor Penghubung	18.869.525,00	18.869.525,00	23.128.599,00	23.128.599,00	4.259.074,00	22,57
27	Inspektorat	13.307.807,00	13.307.807,00	36.089.281,00	36.089.281,00	22.781.474,00	171,19
28	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	22.286.585,00	22.286.585,00	325.100,00	325.100,00	(21.961.485,00)	(98,54)
29	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	14.092.500,00	14.092.500,00	0,00	0,00	(14.092.500,00)	(100,00)
30	Badan Pendapatan Daerah	138.510.500,00	138.510.500,00	0,00	0,00	(138.510.500,00)	(100,00)
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	13.825.598,00	13.825.598,00	11.914.517,00	11.914.517,00	(1.911.081,00)	(13,82)
32	Sekretariat DPRD	69.417.654,00	69.417.654,00	36.866.817,00	36.866.817,00	(32.550.837,00)	(46,89)
33	Kec Tg Redeb	10.048.971,00	10.048.971,00	0,00	0,00	(10.048.971,00)	(100,00)
34	Kec Gn Tabur	207.300,00	207.300,00	560.200,00	560.200,00	352.900,00	170,24
35	Kec Sambaliung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kec Teluk Bayur	1.588.300,00	1.588.300,00	752.900,00	752.900,00	(835.400,00)	(52,60)
37	Kec Segah	1.135.000,00	1.135.000,00		0,00	(1.135.000,00)	(100,00)
38	Kec Maratua	1.838.642,00	1.838.642,00	1.664.720,00	1.664.720,00	(173.922,00)	(9,46)
39	Kec Batu Putih	0,00	0,00	1.365.240,00	1.365.240,00	1.365.240,00	0,00
39	Kec Biatan	1.535.224,00	1.535.224,00	3.090.340,00	3.090.340,00	1.555.116,00	101,30
40	Badan Kesbang, Politik & Linmas	8.761.788,00	8.761.788,00	14.046.948,00	14.046.948,00	5.285.160,00	60,32
Jumlah		**2.231.299.248,00**	**2.231.299.248,00**	**1.896.721.630,00**	**1.896.721.630,00**	**(334.577.618,00)**	**(14,99)**

5.3.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.105.288.003,37	14.395.872.347,53

Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Berau pada per 31 Desember 2023 senilai Rp1.105.288.003,37 mengalami **penurunan** senilai Rp13.290.584.344,16 atau 92,32% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp14.395.872.347,53, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.128 Utang Jangka Pendek Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	Pelunasan/ Penghapusan	Penambahan	31 Desember 2023	kenaikan penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	29.389.474,72	29.389.474,72	0,00	0,00	(29.389.474,72)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD Abdul Rivai	1.842.598.235,53	1.842.598.235,53	731.344.760,07	731.344.760,07	(1.111.253.475,46)	(60,31)
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	12.150.888.159,55	12.150.888.159,00	0,00	0,55	(12.150.888.159,00)	(100,00)
5	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BPKAD	372.996.477,73	0,00	946.765,02	373.943.242,75	946.765,02	0,25
	JUMLAH	**14.395.872.347,53**	**14.022.875.869,25**	**732.291.525,09**	**1.105.288.003,37**	**(13.290.584.344,16)**	**(92,32)**

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 kewajiban Pemerintah kabupaten Berau kepada pihak Ketiga sesuai reviu Inspektorat nomor: 700/012/LHR-REV/Wil.III/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 atas 11 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai sisa yang sudah terbayar senilai Rp12.150.888.159,00 di Tahun 2023 Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang belum selesai pada Tahun 2022 namun terdapat selisih senilai Rp0,55 dikarenakan pada saat pembuatan SP2D di SIPD tidak dimasukan nilai selisih tersebut dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.129 Rincian Utang KDP

(dalam rupiah)

No	Rincian Utang KDP	2023	2022	Keterangan
1	Lanjutan Rehab Total Mesjid Halaman Kantor Setda (Include Tempat Wudhu)	(0,50)	263.506.678,50	DPUPR
2	Perluasan Jaringan Persiapan SPAM Biatan Kec Biatan	0,00	320.459.736,00	DPUPR
3	Lanjutan Penyediaan Sarana Air Bersih di Kam Merasa	1,41	485.117.763,41	DPUPR
4	Peningkatan Jalan Poros Kamp Tunggal Bumi (Dari Jalan Poros Ke Batu Putih)	0,28	616.044.232,28	DPUPR
5	Lanjutan Pembangunan Jalan Teluk Sumbang-Sinondok-Landas	0,00	1.466.154.335,00	DPUPR
6	Lanjutan Pembangunan Jalan Teluk Sulaiman	0,00	1.352.811.805,00	DPUPR
7	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Kawasan DAS Anak Sungai Kalibasau	0,41	4.452.190.564,41	DPUPR
8	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Kawasan DAS Anak Sungai Sei Buntu	0,00	1.293.843.135,00	DPUPR
9	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Kawasan RT 01 Kam Sukan Tengah	(0,72)	547.933.084,28	DPUPR
10	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air SP 2 RT 05 Kam Sukan	(0,47)	561.926.402,53	DPUPR
11	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Kawasan Jalan Kedaung dan Sekitarnya	0,14	790.900.423,14	DPUPR
	Jumlah	**0,55**	**12.150.888.159,55**	

5.3.2.5 Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Berau tidak memiliki kasus hukum yang memungkinkan terjadinya utang terhadap pihak ketiga.

5.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas	12.833.337.341.600,50	10.420.298.469.390,87

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Berau pada kondisi tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Berau. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp12.833.337.341.600,50 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.413.038.872.209,63 atau 23,16% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp10.420.298.469.390,87.

Tabel 5.130 Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	EKUITAS	12.833.337.341.600,50	10.420.298.469.390,87	2.413.038.872.209,63	23,16
	JUMLAH	**12.833.337.341.600,50**	**10.420.298.469.390,87**	**2.413.038.872.209,63**	**23,16**

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

5.4.1. Pendapatan-LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan-LO	5.209.408.567.969,90	3.954.093.617.529,11

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Berau yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan-LO diakui pada saat pendapatan diterima atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Menurut jenisnya, pendapatan-LO diklasifikasikan dalam tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan-LO Tahun 2023 adalah senilai Rp5.209.408.567.969,90 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.255.314.950.440,79 atau 31,75% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp3.954.093.617.529,11. Rincian pendapatan-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.131 Realisasi Pendapatan - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)	Proporsi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	292.248.136.094,90	240.454.036.603,11	51.794.099.491,79	21,54	5,61
2	Pendapatan Transfer - LO	4.853.321.391.091,00	3.707.882.265.926,00	1.145.439.125.165,00	30,89	93,16
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO	63.839.040.784,00	5.757.315.000,00	58.081.725.784,00	1.008,83	1,23
	JUMLAH	**5.209.408.567.969,90**	**3.954.093.617.529,11**	**1.255.314.950.440,79**	**31,75**	

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	292.248.136.094,90	240.454.036.603,11

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Berau. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 senilai Rp292.248.136.094,90 mengalami **kenaikan** senilai Rp51.794.099.491,79 atau 21,54% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp240.454.036.603,11. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.132 Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	93.535.186.343,00	103.415.718.954,50	(9.880.532.611,50)	(9,55)
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	14.879.768.897,00	10.539.679.023,00	4.340.089.874,00	41,18
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	19.765.364.436,57	23.544.776.552,39	(3.779.412.115,82)	(16,05)
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	164.067.816.418,33	102.953.862.073,22	61.113.954.345,11	59,36
	JUMLAH	**292.248.136.094,90**	**240.454.036.603,11**	**51.794.099.491,79**	**21,54**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	93.535.186.343,00	103.415.718.954,50

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan secara akrual. Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 senilai Rp93.535.186.343,00 mengalami **penurunan** senilai Rp9.880.532.611,50 atau 9,55% dibanding dengan Tahun 2022 senilai Rp103.415.718.954,50, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.133 Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel - LO	6.782.984.551,00	5.005.007.229,00	1.777.977.322,00	35,52
2	Pajak Restoran - LO	30.693.215.360,00	30.652.728.798,00	40.486.562,00	0,13
3	Pajak Hiburan - LO	344.184.773,00	145.151.232,00	199.033.541,00	137,12
4	Pajak Reklame - LO	594.227.406,00	550.285.753,00	43.941.653,00	7,99
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	31.620.074.132,00	24.649.448.138,00	6.970.625.994,00	28,28
6	Pajak Parkir - LO	538.591.286,00	313.645.750,00	224.945.536,00	71,72
7	Pajak Air Tanah - LO	509.520,00	1.192.232,00	(682.712,00)	(57,26)
8	Pajak Sarang Burung Walet LO	335.653.000,00	32.141.500,00	303.511.500,00	944,30

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	653.284.580,00	192.297.158,00	460.987.422,00	239,73
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	7.136.269.757,00	5.032.293.583,00	2.103.976.174,00	41,81
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	14.836.191.978,00	36.841.527.581,50	(22.005.335.603,50)	(59,73)
	JUMLAH	**93.535.186.343,00**	**103.415.718.954,50**	**(9.880.532.611,50)**	**(9,55)**

Tercapainya target pajak daerah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah pandemi Covid-19 yang sudah turun sehingga banyak potensi–potensi pajak daerah mengalami kenaikan.

Penjelasan Pendapatan Pajak Daerah – LO dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah - LRA		**93.382.456.473,00**
Mutasi Tambah :		
Penambahan Piutang pada Badan Pendapatan Daerah		
Pajak Hotel	31.289.384,00	
Pajak Restoran	3.608.698.411,00	
Pajak Reklame	44.450.413,00	
Pajak Penerangan Jalan	3.099.237.578,00	
Pajak Parkir	33.014.769,00	
Pajak Sarang Burung Walet	335.653.000,00	
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	30.562.500,00	
Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.997.230.733,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**9.180.136.788,00**
Pengurangan Penerimaan Pembayaran Piutang pada Badan Pendapatan Daerah		
Mutasi Kurang :		
Pajak Hotel	130.058.118,00	
Pajak Restoran	3.336.335.223,00	
Pajak Hiburan	600.000,00	
Pajak Reklame	52.407.770,00	
Pajak Penerangan Jalan	13.994.608,00	
Pajak Parkir	17.707.250,00	
Pajak Sarang Burung Walet	204.404.500,00	
Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.271.899.449,00	
Jumlah Mutasi Kurang		**9.027.406.918,00**
Total Pendapatan Pajak Daerah - LO		**93.535.186.343,00**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	14.879.768.897,00	10.539.679.023,00

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 dipungut dan dikelola oleh beberapa OPD penghasil antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penghubung serta Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 senilai Rp14.879.768.897,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.340.089.874,00 atau 41,18% dibanding dengan Tahun 2022 senilai Rp10.539.679.023,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.134 Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.506.654.100,00	5.000.751.400,00	1.505.902.700,00	30,11
3	DPUPR	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	712.067.950,00	524.430.650,00	187.637.300,00	35,78
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Retribusi Perpanjangan IMTA	220.932.600,00	18.597.600,00	202.335.000,00	1.087,96
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Pelindung	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	154.000.000,00	106.500.000,00	47.500.000,00	44,60
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Penyediaan Penyedot Kakus	1.807.108.448,00	1.388.643.000,00	418.465.448,00	30,13
7	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Ret. Pelayanan Pasar, Ret. Pelayanan Tera/Tera ulang dan Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	2.390.583.696,00	1.820.273.250,00	570.310.446,00	31,33
8	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, PKB, Pelayanan Kepelabuhan, dan izin Trayek	494.584.860,00	574.279.437,00	(79.694.577,00)	(13,88)
9	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	880.209.643,00	60.103.966,00	820.105.677,00	1.364,48
10	Dinas Kepemudaan & Olahraga	Retribusi Pemakaian Kekayaan	667.131.000,00	189.849.120,00	477.281.880,00	251,40
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	52.901.000,00	36.094.000,00	16.807.000,00	46,56
12	Dinas Perikanan	Retribusi Tempat Pelelangan dan Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	177.730.000,00	124.829.000,00	52.901.000,00	42,38
13	Dinas Pertanian & Peternakan	Retribusi Rumah Potong Hewan dan Penjualan Produksi Usaha Daerah	265.293.000,00	287.556.000,00	(22.263.000,00)	(7,74)
14	Sekertariat Daerah/Kantor Penghubung	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	465.500.000,00	363.900.000,00	101.600.000,00	27,92
15	Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	58.672.600,00	43.871.600,00	14.801.000,00	33,74
		JUMLAH	**14.879.768.897,00**	**10.539.679.023,00**	**4.340.089.874,00**	**41,18**

Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah – LO dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi - LRA		**14.933.984.444,00**
Mutasi Tambah :		
Penyewaan Tanah & Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah	403.200,00	
Penyewaan Kios, Los dan Pelataran pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	947.067.756,00	
Jumlah Mutasi Tambah :		947.470.956,00
Mutasi Kurang :		
Penyewaan Tanah & Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah	2.586.000,00	
Penyewaan Tanah & Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah	1.842.400,00	
Penyewaan Kios, Los dan Pelataran pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	997.258.103,00	
Jumlah Mutasi Kurang :		1.001.686.503,00
Total Pendapatan Retribusi - LO		**14.879.768.897,00**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	19.765.364.436,57	23.544.776.552,39

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemkab Berau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 senilai Rp19.765.364.436,57 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada Perusda pada Tahun 2022 mengalami **penurunan** senilai Rp3.779.412.115,82 atau 16,05% dibanding dengan Tahun 2022 senilai Rp23.544.776.552,39, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.135 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	Dividen BPD Kaltim	14.636.429.316,09	14.109.010.255,45	527.419.060,64	3,74
2	Laba PT Hutan Sanggam Labanan Lestari	28.658.558,00	1.228.738.395,00	(1.200.079.837,00)	(97,67)
3	Perumda Air Minum Batiwakal	1.727.823.301,00	6.891.361.234,94	(5.163.537.933,94)	(74,93)
4	PT. Indo Pusaka Berau	3.372.453.261,48	1.315.666.667,00	2.056.786.594,48	156,33
5	Perumda Bhakti Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**19.765.364.436,57**	**23.544.776.552,39**	**(3.779.412.115,82)**	**(16,05)**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO, dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		**16.119.182.280,09**
Mutasi Tambah :		
Dividen 2022 - laba/rugi tahun berjalan pada Perumda Air Minum Batiwakal	1.359.436.634,00	
Dividen 2022 - laba/rugi tahun berjalan pada PT. Indo Pusaka Berau	2.872.456.161,48	
Jumlah Mutasi Tambah :		**4.231.892.795,48**
Mutasi Kurang :		
Dividen 2022 - laba/rugi tahun berjalan pada PT Hutan Sanggam Labanan Lestari	585.710.639,00	
Jumlah Mutasi Kurang :		**585.710.639,00**
Total Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		**19.765.364.436,57**

5.4.1.1.4 Lain - Lain PAD Yang Sah- LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain-lain PAD Yang Sah -LO	164.067.816.418,33	102.953.862.073,22

Lain-lain PAD Yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 senilai Rp164.067.816.418,33 mengalami **kenaikan** senilai Rp61.113.954.345,11 atau 59,36% dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp102.953.862.073,22, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136 Lain – lain PAD Yang Sah - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.691.448.619,00	4.428.975.125,00	5.262.473.494,00	118,82
2	RSUD Abdul Rivai	Pendapatan BLUD	91.291.661.646,60	79.787.536.111,16	11.504.125.535,44	14,42
3	Dinas Perhubungan	Pendapatan Denda Retribusi	18.607.400,00	17.745.245,00	862.155,00	4,86
3	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Pendapatan Denda Retribusi	35.124.530,64	1.260.888.500,25	(1.225.763.969,61)	(97,21)
4	BPKAD (SKPKD) :	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	61.864.750.838,07	17.063.209.904,81	44.801.540.933,26	262,56
5	Bapenda	Pendapatan Denda Retribusi & Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Pajak	1.159.789.288,02	394.776.970,00	765.012.318,02	193,78
6	Dispora	Pendapatan Denda Retribusi	6.434.096,00	730.217,00	5.703.879,00	781,12
		Jumlah	**164.067.816.418,33**	**102.953.862.073,22**	**61.113.954.345,11**	**59,36**

Penjelasan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dijelaskan sebagai berikut :

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA		**162.234.007.464,69**
Mutasi Tambah :		
Penambahan Piutang pada RSUD Abd Rivai	8.803.819.799,00	
Penambahan Piutang Denda Pajak pada Badan Pendapatan Daerah	973.741.810,02	
Penambahan Piutang Wisma Altit pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	105.203.000,00	
Penambahan Piutang Retribusi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	35.124.530,64	
Jumlah Mutasi Tambah :		**9.917.889.139,66**
Mutasi Kurang :		
Pembayaran Piutang pada RSUD Abd Rivai	7.372.775.415,00	
Pengurangan Piutang Denda Pajak pada Badan Pendapatan Daerah	152.642.778,00	
Pembayaran Piutang Remunerasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	260.047.999,27	
Pembayaran Tagihan Penjualan Angsuran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	276.973.064,75	
Pembayaran Piutang Denda Retribusi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	21.640.929,00	
Jumlah Mutasi Kurang :		**8.084.080.186,02**
Total Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO		**164.067.816.418,33**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	4.853.321.391.091,00	3.707.882.265.926,00

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diterima dan telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Berau. Pendapatan Transfer – LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2023 adalah senilai Rp4.853.321.391.091,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.145.439.125.165,00 atau 30,89% dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp3.707.882.265.926,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.137 Pendapatan Transfer – LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	4.126.159.415.291,00	3.241.269.569.010,00	884.889.846.281,00	27,30
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	727.161.975.800,00	466.612.696.916,00	260.549.278.884,00	55,84

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
	Jumlah	**4.853.321.391.091,00**	**3.707.882.265.926,00**	**1.145.439.125.165,00**	**30,89**

5.4.1.2.1 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO	4.126.159.415.291,00	3.241.269.569.010,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 senilai Rp4.126.159.415.291,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp884.889.846.281,00 atau 27,30% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp3.241.269.569.010,00. Rincian transfer pemerintah pusat - LO sebagai berikut:

Tabel 5.138 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
	Dana Perimbangan				
1	Dana Bagi Hasil	3.402.537.199.000,00	2.557.604.185.148,00	844.933.013.852,00	33,04
2	Dana Alokasi Umum	565.773.403.521,00	545.240.741.789,00	20.532.661.732,00	3,77
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	52.763.540.954,00	48.847.810.234,00	3.915.730.720,00	8,02
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	105.085.271.816,00	89.576.831.839,00	15.508.439.977,00	17,31
	Jumlah	**4.126.159.415.291,00**	**3.241.269.569.010,00**	**884.889.846.281,00**	**27,30**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO	**0,00**	**0,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO Tahun 2023 tidak terdapat anggaran maupun realisasi. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO sebagai berikut :

Tabel 5.139 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
	Pendapatan Transfer - Pemerintah Pusat Lainnya - LO				
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	727.161.975.800,00	466.612.696.916,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2023 senilai Rp727.161.975.800,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp260.549.278.884,00 atau 55,84% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp466.612.696.916,00. Rincian realisasi Dana Insentif Daerah –LO tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 5.140 Transfer Antar Daerah – LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (penurunan)	%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO				
1	Pendapatan Bagi Hasil	502.649.475.800,00	371.451.696.916,00	131.197.778.884,00	35,32
2	Bantuan Keuangan	224.512.500.000,00	95.161.000.000,00	129.351.500.000,00	135,93
	Jumlah	**727.161.975.800,00**	**466.612.696.916,00**	**260.549.278.884,00**	**55,84**

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil – LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LO	502.649.475.800,00	371.451.696.916,00

Bagi Hasil Tahun 2023 adalah senilai Rp502.649.475.800,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp131.197.778.884,00 atau 35,32% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp371.451.696.916,00. Pendapatan bagi hasil mencatat beberapa akun pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.141 Bagi Hasil - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (penurunan)	%
	Pendapatan Bagi Hasil - LO				
1	Pendapatan Bagi Hasil	502.649.475.800,00	371.451.696.916,00	131.197.778.884,00	35,32
	Jumlah	**502.649.475.800,00**	**371.451.696.916,00**	**131.197.778.884,00**	**35,32**

5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

	Tahun 2023	Tahun 2022
Bantuan Keuangan	224.512.500.000,00	95.161.000.000,00

Bantuan Keuangan Tahun 2023 adalah senilai Rp224.512.500.000,00, mengalami **kenaikan** senilai Rp129.351.500.000,00 atau 135,93% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp95.161.000.000,00. Bantuan Keuangan merupakan bantuan yang diberikan pemerintah provinsi untuk kabupaten/kota dalam rangka mendukung percepatan pencapaian sarana pembangunan nasional, daerah, dan kabupaten/kota; mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat serta untuk kegiatan yang mendukung hal yang berkaitan dengan tanggungjawab atau kesepakatan yang dibangun antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Rincian Realisasi Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.142 Bantuan Keuangan - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (penurunan)	%
	Bantuan Keuangan				
1	Bantuan Keuangan	224.512.500.000,00	95.161.000.000,00	129.351.500.000,00	135,93
	Jumlah	**224.512.500.000,00**	**95.161.000.000,00**	**129.351.500.000,00**	**135,93**

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	63.839.040.784,00	5.757.315.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya senilai Rp63.839.040.784,00. Kondisi ini mengalami **kenaikan** senilai Rp58.081.725.784,00 atau 1.008,83% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp5.757.315.000,00. Dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.143 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah	8.603.171.200,00	5.757.315.000,00	2.845.856.200,00	49,43
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	55.235.869.584,00	0,00	55.235.869.584,00	100,00
JUMLAH		**63.839.040.784,00**	**5.757.315.000,00**	**58.081.725.784,00**	**1.008,83**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah	Tahun 2023	Tahun 2022
	8.603.171.200,00	5.757.315.000,00

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 senilai Rp8.603.171.200,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.845.856.200,00 atau 49,43% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp5.757.315.000,00. Dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.144 Pendapatan Hibah - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah pada Kecamatan Teluk Bayur	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
2	Pendapatan Hibah pada Dinas Perkebunan	252.685.465,00	0,00	252.685.465,00	100,00
3	Pendapatan Hibah pada Dinas Perhubungan	1.196.023.365,00	0,00	1.196.023.365,00	100,00
4	Pendapatan Hibah pada KOMINFO	318.900.000,00	0,00	318.900.000,00	100,00
5	Pendapatan Hibah pada Dinas Pendidikan	1.180.000.000,00	0,00	1.180.000.000,00	100,00
6	Pendapatan Hibah pada Kecamatan Teluk Bayur	174.237.500,00	0,00	174.237.500,00	100,00
7	Pendapatan Hibah pada BPBD	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	100,00
8	Pendapatan Hibah pada Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	546.321.000,00	600.485.000,00	(54.164.000,00)	(9,02)
9	Pendapatan Hibah pada Dinas Koperasi, perindustrian & Perdagangan	0,00	239.150.000,00	(239.150.000,00)	(100,00)
10	Pendapatan Hibah pada Dinas Sosial	0,00	537.680.000,00	(537.680.000,00)	(100,00)
11	Pendapatan Hibah pada Dinas Kepemudaan & Olahraga	0,00	1.680.000.000,00	(1.680.000.000,00)	(100,00)
12	Pendapatan Hibah pada BPKAD		2.700.000.000,00	(2.700.000.000,00)	(100,00)
13	Pendapatan Hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja	4.050.077.330,00	0,00	4.050.077.330,00	100,00
14	Pendapatan Hibah pada Dinas Perpustakaan & Kearsipan	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00	100,00
15	Pendapatan Hibah pada DPPKBP3A	505.426.540,00	0,00	505.426.540,00	100,00
JUMLAH		**8.603.171.200,00**	**5.757.315.000,00**	**2.845.856.200,00**	**49,43**

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	55.235.869.584,00	0,00

Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 senilai Rp55.235.869.584,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp55.235.869.584,00 dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp0,00. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.145 Pendapatan Lainnya - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Lainnya	55.235.869.584,00	0,00	55.235.869.584,00	100,00
JUMLAH		**55.235.869.584,00**	**0,00**	**55.235.869.584,00**	**100,00**

Pendapatan Lainnya – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

Total Pendapatan Lainnya - LRA	**7.822.834.044,00**

Mutasi Tambah :

Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK (KPC)	45.000.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK (KPC)	2.413.035.540,00
Jumlah Mutasi Tambah :	**47.413.035.540,00**
Total Pendapatan Lainnya - LO	**55.235.869.584,00**

5.4.2. Beban - LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban - LO	2.785.665.682.472,36	2.417.734.639.289,45

Beban – LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Tahun 2023 senilai Rp.2.785.665.682.472,36 mengalami **kenaikan** senilai Rp367.931.043.182,91 atau 15,22% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp2.417.734.639.289,45. Rincian Beban – LO dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.146 Beban – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	BEBAN - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	BEBAN OPERASI	2.435.635.007.069,36	2.201.852.680.176,45	233.782.326.892,91	10,62
2	BEBAN TRANSFER	348.203.838.088,00	213.086.112.300,00	135.117.725.788,00	63,41
3	BEBAN TIDAK TERDUGA	1.826.837.315,00	2.795.846.813,00	(969.009.498,00)	(34,66)
JUMLAH		**2.785.665.682.472,36**	**2.417.734.639.289,45**	**367.931.043.182,91**	**15,22**

5.4.2.1 Beban Operasi – LO

Beban Operasi – LO Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 senilai Rp2.435.635.007.069,36 mengalami **kenaikan** senilai Rp233.782.326.892,91 atau 10,62% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp2.201.852.680.176,45. Beban Operasi – LO terdiri dari ; Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain – Lain. Dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.147 Beban Operasi – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	BEBAN OPERASI - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	818.796.869.375,56	789.429.230.514,62	29.367.638.860,94	3,72
2	Beban Barang dan Jasa	796.699.707.092,91	695.697.781.904,34	101.001.925.188,57	14,52
3	Beban Hibah	153.657.103.990,00	78.143.539.352,07	75.513.564.637,93	96,63
4	Beban Bantuan Sosial	8.536.409.701,00	2.740.020.000,00	5.796.389.701,00	211,55
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	656.945.015.157,40	631.902.480.023,61	25.042.535.133,79	3,96
6	Beban Penyisihan Piutang	999.901.752,49	3.939.628.381,81	(2.939.726.629,32)	(74,62)
7	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**2.435.635.007.069,36**	**2.201.852.680.176,45**	**233.782.326.892,92**	**10,62**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai –LO

Beban Pegawai	Tahun 2023	Tahun 2022
	818.796.869.375,56	789.429.230.514,62

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang ataupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai Imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai – LO merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2023 yang terealisasi senilai Rp818.796.869.375,56 mengalami **kenaikan** senilai Rp29.367.638.860,94 atau 3,72% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp789.429.230.514,62. Rincian Beban Pegawai sebagai berikut :

Tabel 5.148 Beban Pegawai – LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Belanja Gaji Pokok PNS-LO	262.448.741.263,00	247.488.694.789,00	14.960.046.474,00	6,04
2	Beban Belanja Tunjangan Keluarga ASN-LO	24.286.571.382,00	23.401.322.884,00	885.248.498,00	3,78
3	Beban Belanja Tunjangan Jabatan ASN-LO	8.325.288.650,00	8.695.030.000,00	(369.741.350,00)	(4,25)
4	Beban Belanja Tunjangan Fungsional ASN-LO	15.914.048.791,00	13.489.081.506,00	2.424.967.285,00	17,98
5	Beban Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-LO	4.081.432.500,00	4.469.819.000,00	(388.386.500,00)	(8,69)
6	Beban Belanja Tunjangan Beras ASN-LO	15.544.953.000,00	15.089.702.760,00	455.250.240,00	3,02
7	Beban Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-LO	478.311.421,00	449.172.031,00	29.139.390,00	6,49
8	Beban Belanja Pembulatan Gaji ASN-LO	3.682.015,00	3.532.150,00	149.865,00	4,24
9	Beban Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-LO	22.665.260.530,00	22.381.766.253,00	283.494.277,00	1,27
10	Beban Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-LO	551.544.343,00	515.643.444,00	35.900.899,00	6,96
11	Beban Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-LO	1.620.802.876,00	1.570.797.538,00	50.005.338,00	3,18
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-LO	216.651.493.979,00	207.712.643.309,00	8.938.850.670,00	4,30
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-LO	46.360.450.271,00	41.199.572.389,00	5.160.877.882,00	12,53
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-LO	18.091.000.500,00	15.605.593.334,00	2.485.407.166,00	15,93
15	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - LO	2.401.370.188,00	4.232.335.488,00	(1.830.965.300,00)	(43,26)
16	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO	512.321.258,00	0,00	512.321.258,00	0,00
17	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Retribusi Daerah - LO	2.498.168.997,00	1.500.198.331,00	997.970.666,00	66,52
18	Beban Belanja TPG PNSD-LO	39.985.439.400,00	40.205.924.955,00	(220.485.555,00)	(0,55)
19	Beban Belanja TKG PNSD-LO	1.801.985.800,00	1.755.182.400,00	46.803.400,00	2,67
20	Beban Belanja Tamsil Guru PNSD-LO	1.284.000.000,00	1.445.900.000,00	(161.900.000,00)	(11,20)
21	Beban Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO	10.647.723.388,87	3.851.070.948,40	6.796.652.440,47	176,49
22	Beban Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan-LO	41.859.176.900,00	42.876.491.500,00	(1.017.314.600,00)	(2,37)
23	Beban Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa-LO	6.695.654.000,00	0,00	6.695.654.000,00	100,00
24	Beban Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-LO	2.420.630.000,00	2.234.965.000,00	185.665.000,00	8,31
26	Beban Belanja TPG PPPK-LO	2.601.720.000,00	0,00	2.601.720.000,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
27	Beban Belanja TKG PPPK-LO	284.784.000,00	0,00	284.784.000,00	0,00
28	Beban Belanja Tamsil Guru PPPK-LO	886.500.000,00	0,00	886.500.000,00	0,00
29	Beban Belanja Uang Representasi DPRD-LO	667.065.000,00	671.790.000,00	(4.725.000,00)	(0,70)
30	Beban Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-LO	85.745.100,00	86.406.600,00	(661.500,00)	(0,77)
31	Beban Belanja Tunjangan Beras DPRD-LO	92.697.600,00	92.987.280,00	(289.680,00)	(0,31)
32	Beban Belanja Uang Paket DPRD-LO	57.424.500,00	57.582.000,00	(157.500,00)	(0,27)
33	Beban Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-LO	967.244.250,00	904.517.250,00	62.727.000,00	6,93
34	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-LO	94.729.950,00	94.821.300,00	(91.350,00)	(0,10)
35	Beban Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-LO	5.277.300.000,00	5.361.578.250,00	(84.278.250,00)	(1,57)
36	Beban Belanja Tunjangan Reses DPRD-LO	1.278.900.000,00	1.310.505.000,00	(31.605.000,00)	(2,41)
37	Beban Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD-LO	50.765.022,00	7.532.541.684,00	(7.481.776.662,00)	(99,33)
38	Beban Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD-LO	1.378.188,00	0,00	1.378.188,00	100,00
39	Beban Belanja Jaminan Kematian DPRD-LO	4.134.564,00	0,00	4.134.564,00	100,00
40	Beban Belanja Tunjangan Perumahan DPRD-LO	6.216.600.000,00	0,00	6.216.600.000,00	100,00
41	Beban Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-LO	5.036.050.000,00	5.643.000.000,00	(606.950.000,00)	(10,76)
42	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel-LO	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
43	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran-LO	174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	100,00
44	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan-LO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
45	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame-LO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
46	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan-LO	156.300.000,00	0,00	156.300.000,00	100,00
47	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir-LO	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00
48	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00
51	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	8.250.000,00	412.210.000,00	(403.960.000,00)	(98,00)
52	Beban Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	100,00
53	Beban Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-LO	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00	0,00
54	Beban Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-LO	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
55	Beban Belanja Pegawai BLUD-LO	46.680.569.748,69	66.174.371.141,22	(19.493.801.392,53)	(29,46)
JUMLAH		**818.796.869.375,56**	**789.429.230.514,62**	**29.367.638.860,94**	**3,72**

Penjelasan Beban Pegawai – LO dapat dilihat sebagai berikut:

Belanja Pegawai - LRA		**812.677.295.576,65**
Mutasi Kurang :		
Penyesuaian Utang Belanja Pegawai TA 2022		
Utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - RSUD Abd Rivai	895.294.289,00	
Jumlah Mutasi Kurang		895.294.289,00
Mutasi Tambah :		
Penyesuaian Utang Belanja Pegawai TA 2023		
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	91.817.800,00	
Utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - RSUD Abd Rivai	6.920.221.487,91	

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK - Inspektorat	2.720.000,00	
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK - Inspektorat	108.800,00	
Jumlah Mutasi Tambah		7.014.868.087,91
Total Beban Pegawai - LO		**818.796.869.375,56**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang & Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022
	796.699.707.092,91	695.697.781.904,34

Beban Barang dan Jasa merupakan Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 terealisasi senilai Rp796.699.707.092,91 mengalami **kenaikan** senilai Rp101.001.925.188,57 atau 14,52% dibandingkan Tahun 2022 terealisasi senilai Rp695.697.781.904,34. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 termasuk realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang tidak menghasilkan aset.

Akun Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.149 Barang dan Jasa - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Beban Barang dan Jasa - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Persediaan	98.123.490.293,01	158.641.887.541,43	(60.518.397.248,42)	(38,15)
2	Beban Jasa	380.287.802.520,82	337.433.290.186,62	42.854.512.334,20	12,70
3	Beban Pemeliharaan	40.626.430.704,00	19.865.786.716,00	20.760.643.988,00	104,50
4	Beban Perjalanan Dinas	155.635.289.077,00	124.396.234.972,00	31.239.054.105,00	25,11
5	Beban Barang dan Jasa Lainnya	122.026.694.498,08	55.360.582.488,29	66.666.112.009,79	120,42
	Jumlah	**796.699.707.092,91**	**695.697.781.904,34**	**101.001.925.188,57**	**14,52**

Rincian Beban Barang dan Jasa – LO di rincikan sebagai berikut:

a. Beban Persediaan - LO

Beban Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
	98.123.490.293,01	158.641.887.541,43

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp98.123.490.293,01 mengalami **penurunan** senilai Rp60.518.397.248,42 atau 38,15% dibandingkan Tahun 2022 terealisasi senilai Rp158.641.887.541,43.

Tabel 5.150 Beban Persediaan - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	BEBAN PERSEDIAAN - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (penurunan)	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.730.437.643,00	11.609.116.943,00	121.320.700,00	1,05
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.208.005.686,00	859.071.933,00	2.348.933.753,00	273,43
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.444.060.688,00	15.682.675.650,00	1.761.385.038,00	11,23
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	142.893.969,00	97.544.000,00	45.349.969,00	46,49
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	142.716.200,00	5.603.000,00	137.113.200,00	2.447,14
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	552.918.000,00	425.186.506,00	127.731.494,00	30,04
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	119.995.000,00	160.023.000,00	(40.028.000,00)	(25,01)
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.916.270.430,64	5.516.878.377,79	399.392.052,85	7,24
9	Beban Bahan Spesimen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Bahan Penunjang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	148.153.988,00	152.810.100,00	(4.656.112,00)	(3,05)
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	9.930.000,00	32.975.000,00	(23.045.000,00)	(69,89)
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	810.000,00	90.795.320,00	(89.985.320,00)	(99,11)
15	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Studio &Komunikasi	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
16	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	22.336.700,00	217.670.192,00	(195.333.492,00)	(89,74)
18	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	519.000,00	668.500,00	(149.500,00)	(22,36)
19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	45.099.571,40	0,00	45.099.571,40	0,00
20	Beban Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.842.991.739,83	7.813.903.788,70	3.029.087.951,13	38,77
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	748.432.314,00	1.190.948.452,00	(442.516.138,00)	(37,16)
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.480.812.132,00	6.625.987.238,56	1.854.824.893,44	27,99
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	495.369.600,00	389.644.300,00	105.725.300,00	27,13
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	53.570.000,00	(53.570.000,00)	(100,00)
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.976.874.814,00	3.053.259.093,00	(76.384.279,00)	(2,50)
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.713.815.674,00	2.989.239.772,56	(275.424.098,56)	(9,21)
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.397.116.025,40	1.132.184.109,00	264.931.916,40	23,40
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.253.135.086,00	535.082.100,00	718.052.986,00	134,19
30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	477.550.589,00	350.724.000,00	126.826.589,00	36,16
31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	997.777.000,00	448.147.300,00	549.629.700,00	122,64
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	538.866.187,00	884.035.206,00	(345.169.019,00)	(39,04)
33	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.157.696.363,07	5.145.767.517,00	11.928.846,07	0,23
34	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.304.072.129,75	2.070.742.122,00	(766.669.992,25)	(37,02)
35	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.631.512.893,00	25.282.377.491,00	(19.650.864.598,00)	(77,73)

(dalam rupiah)

No	BEBAN PERSEDIAAN - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (penurunan)	%
36	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	(28.946.693.334,00)	23.934.207.429,58	(52.880.900.763,58)	(220,94)
37	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	15.338.000,00	0,00	15.338.000,00	100,00
38	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.633.019.786,00	925.321.402,95	707.698.383,05	76,48
39	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	13.681.400,00	19.124.000,00	(5.442.600,00)	(28,46)
40	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.198.838.760,00	1.641.674.750,00	(442.835.990,00)	(26,97)
41	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	1.463.000,00	10.800.000,00	(9.337.000,00)	(86,45)
42	Beban Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.437.177.131,00	16.382.832.636,00	2.054.344.495,00	12,54
44	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.158.086.928,00	1.525.029.649,00	633.057.279,00	41,51
45	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	703.565.250,00	338.626.938,00	364.938.312,00	107,77
46	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.146.103.829,92	2.245.067.358,29	(1.098.963.528,37)	(48,95)
47	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	34.276.100,00	(34.276.100,00)	(100,00)
48	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.610.433.950,00	10.540.454.130,00	2.069.979.820,00	19,64
49	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	197.318.700,00	60.943.500,00	136.375.200,00	223,77
51	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	53.085.000,00	0,00	53.085.000,00	0,00
52	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	848.608.120,00	2.238.111.720,00	(1.389.503.600,00)	(62,08)
53	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	865.609.429,00	1.028.695.188,00	(163.085.759,00)	(15,85)
54	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	155.421.000,00	102.017.775,00	53.403.225,00	52,35
55	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	336.102.000,00	58.696.800,00	277.405.200,00	472,61
56	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	290.000,00	(290.000,00)	(100,00)
57	Beban Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
60	Belanja Pakaian KORPRI	85.800.000,00	355.054.868,00	(269.254.868,00)	(75,83)
61	Belanja Pakaian Adat Daerah	339.628.600,00	140.236.000,00	199.392.600,00	142,18
62	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.789.744.890,00	1.347.017.335,00	442.727.555,00	32,87
63	Belanja Pakaian Olahraga	1.453.736.430,00	2.544.754.800,00	(1.091.018.370,00)	(42,87)
64	Belanja Pakaian Paskibraka	181.499.000,00	220.916.350,00	(39.417.350,00)	(17,84)
65	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	97.665.600,00	(97.665.600,00)	(100,00)
66	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.050.000,00	11.717.600,00	(10.667.600,00)	(91,04)
67	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	344.703.000,00	18.724.600,00	325.978.400,00	1.740,91
68	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**98.123.490.293,01**	**158.641.887.541,43**	**(60.518.397.248,42)**	**(38,15)**

b. Beban Jasa - LO

Beban Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022
	380.287.802.520,82	337.433.290.186,62

Beban Jasa yang sudah diterima selama Tahun 2023 terealisasi senilai Rp380.287.802.520,82 mengalami **kenaikan** senilai Rp42.854.512.334,20 atau 12,70% dibandingkan Tahun 2022 terealisasi senilai Rp337.433.290.186,62.

Tabel 5.151 Beban Jasa – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	BEBAN JASA	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (penurunan)	%
1	Beban Jasa Kantor	331.009.418.291,00	308.526.310.300,22	22.483.107.990,78	7,29
2	Beban Iuran Jaminan Asuransi	27.563.856.990,17	15.233.598.518,40	12.330.258.471,77	80,94
3	Beban Sewa Tanah	18.000.000,00	33.400.000,00	(15.400.000,00)	(46,11)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	10.223.561.613,00	8.345.187.152,00	1.878.374.461,00	22,51
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.578.314.424,65	1.782.251.963,00	1.796.062.461,65	100,77
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	434.523.500,00	159.500.000,00	275.023.500,00	172,43
7	Beban Jasa Konsultansi Kontruksi	1.068.907.188,00	1.170.165.490,00	(101.258.302,00)	(8,65)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi	5.307.482.294,00	1.239.898.386,00	4.067.583.908,00	328,06
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	108.633.447,00	142.925.000,00	(34.291.553,00)	(23,99)
11	Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	633.104.773,00	458.053.377,00	175.051.396,00	38,22
12	Beban Barang Dibawah Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**380.287.802.520,82**	**337.433.290.186,62**	**42.854.512.334,20**	**12,70**

c. Beban Pemeliharaan - LO

Beban Pemeliharaan	Tahun 2023	Tahun 2022
	40.626.430.704,00	19.865.786.716,00

Beban Pemeliharaan meliputi Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dan Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 terealisasi senilai Rp40.626.430.704,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp20.760.643.988,00 atau 104,50% dibandingkan Tahun 2022 terealisasi senilai Rp19.865.786.716,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.152 Beban Pemeliharaan - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	BEBAN PEMELIHARAAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (penurunan)	%
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	807.359.132,00	(807.359.132,00)	(100,00)
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.599.704.227,00	12.302.985.486,00	1.296.718.741,00	10,54
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.795.260.171,00	6.098.291.298,00	-303.031.127,00	(4,97)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.118.966.306,00	657.150.800,00	20.461.815.506,00	3.113,72
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00	100,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**40.626.430.704,00**	**19.865.786.716,00**	**20.760.643.988,00**	**104,50**

d. Beban Perjalanan Dinas - LO

Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2023	Tahun 2022
	155.635.289.077,00	124.396.234.972,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 terealisasi senilai Rp155.635.289.077,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp31.239.054.105,00 atau 25,11% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp124.396.234.972,00, Dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.153 Beban Perjalanan Dinas - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	BEBAN PERJALANAN DINAS	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (penurunan)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	155.517.072.049,00	124.396.234.972,00	31.120.837.077,00	**25,02**
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	118.217.028,00	0,00	118.217.028,00	**0,00**
	Jumlah	**155.635.289.077,00**	**124.396.234.972,00**	**31.239.054.105,00**	**25,11**

e. Beban Barang dan Jasa Lainnya - LO

Beban Barang dan Jasa Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	122.026.694.498,08	55.360.582.488,29

Beban Barang dan Jasa Lainnya Tahun 2023 terealisasi senilai Rp122.026.694.498,08 mengalami **kenaikan** senilai Rp66.666.112.009,79 atau 120,42% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp55.360.582.488,29.

Tabel 5.154 Beban Barang dan Jasa Lainnya - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Beban Barang Dan Jasa Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (penurunan)	%
1	Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.153.336.730,00	14.465.609.700,00	30.687.727.030,00	212,14
2	Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	307.282.500,00	534.270.500,00	(226.988.000,00)	(42,49)
3	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.838.471.280,00	0,00	24.838.471.280,00	0,00
4	Beban Barang dan Jasa BLUD	51.727.603.988,08	40.360.702.288,29	11.366.901.699,79	28,16
	Jumlah	**122.026.694.498,08**	**55.360.582.488,29**	**66.666.112.009,79**	**120,42**

Penjelasan Beban Barang dan Jasa – LO dapat dilihat sebagai berikut:

	Belanja Persediaan - LRA	**Rp**	**128.447.666.761,00**
	Mutasi Tambah :		
a.	Penyesuaian Persediaan TA 2022	Rp	93.422.740.213,63
b.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2023	Rp	806.950.543,07
c.	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa		
	Di bawah nilai kapitalisasi PM Keset 60 Buah harga satuan Rp 50.000	Rp	3.000.000,00
	Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Talisayan	Rp	49.950.000,00
	Nilai di bawah Kapitalisasi Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan - Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi IPA Jenjang SMP (02.35.5.2.02.08) TA. 2023, Nomor Kontrak 03/Alper-IPA/VII/2023	Rp	49.390.392,00
	Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 005 Sambaliung	Rp	35.325.750,00
	Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Sambaliung	Rp	27.195.000,00
	Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Merapun	Rp	23.240.000,00
	Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Merasa	Rp	22.200.000,00
	Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 003 Sambaliung	Rp	21.645.000,00
	Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 4 Tanjung Redeb	Rp	19.369.500,00
	Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Dumaring	Rp	15.811.200,00
	Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 017 Tanjung Redeb	Rp	14.799.980,00

Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 013 Tanjung Redeb	Rp	13.910.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 3 Tanjung Redeb	Rp	13.320.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 2 Gunung Tabur	Rp	13.320.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 1 Sambaliung	Rp	12.499.975,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Bukit Makmur	Rp	8.880.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 002 Tanjung Batu	Rp	8.769.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 008 Tanjung Redeb	Rp	8.250.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 016 Tanjung Redeb	Rp	7.492.500,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 005 Sukan Tengah	Rp	6.993.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Tubaan	Rp	6.840.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Tepian Buah	Rp	6.749.985,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 1 Tabalar	Rp	6.375.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Tabalar Ulu	Rp	6.373.620,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Buyung - Buyung	Rp	4.550.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 1 Segah	Rp	4.273.500,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 1 Tanjung Redeb	Rp	3.996.000,00
Nilai di Bawah Kapitalisasi Pengadaan Pelampung SDN 002 Semurut (01.16.5.2.02.02.03) TA. 2023 Nomor Kontrak : 01/PPK.PPB-PPS/PERAHU-MESINTEMPEL/SDN002SMRT/2023 Sebanyak 12 Buah x @Rp. 325.000 = Rp. 3.900.000	Rp	3.900.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 4 Kelay	Rp	3.718.500,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 1 Pulau Derawan	Rp	3.663.000,00
Nilai di bawah Kapitalisasi Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) DAK TK Negeri Teluk Bayur 2 (03.12.5.2.02.08) TA. 2023 sebanyak 14 Unit	Rp	3.500.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 2 Sambaliung	Rp	3.500.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Harapan Maju	Rp	3.250.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Tanjung Perangat	Rp	3.010.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Giring-Giring	Rp	2.614.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Batu Putih	Rp	2.599.620,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 003 Teluk Bayur	Rp	2.386.500,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 3 Gunung Tabur	Rp	2.331.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Tanjung Batu	Rp	2.084.580,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 004 Sambaliung	Rp	1.650.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Pegat Batumbuk	Rp	1.631.700,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 002 Rinding	Rp	1.554.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Semurut	Rp	1.507.824,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 5 Sambaliung	Rp	1.498.500,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Sumber Mulya	Rp	1.452.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Balikukup	Rp	1.221.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 002 Merancang Ulu	Rp	1.170.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 3 Kelay	Rp	999.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 2 Tanjung Redeb	Rp	888.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 011 Tanjung Redeb	Rp	880.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 3 Pulau Derawan	Rp	777.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 5 Tanjung Redeb	Rp	599.400,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SMP Negeri 3 Talisayan	Rp	471.000,00

Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 002 Pesayan	Rp	444.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 004 Sukan Tengah	Rp	299.700,00
Nilai dibawah Kapitalisasi PM BOSNAS SD Negeri 001 Merabu	Rp	229.100,00
Nilai di bawah Kapitalisasi Connectors untuk SMP Negeri 1 Talisayan @Rp. 200.000 x 1 Item = Rp. 200.000 Nomor Kontrak 03/TIK2-DAK/VII/2023	Rp	200.000,00
Nilai di bawah Kapitalisasi Connectors untuk SDN 001Gurimbang @Rp. 150.000 Nomor Kontrak 01/PPK/PPS-PTIK/SDN-BRU/2023	Rp	150.000,00
Nilai di bawah Kapitalisasi Connectors 1 Buah untuk SDN 003 Teluk Bayur omor Kontrak 01/PPK/PPS-PTIK/SDN-BRU/2023	Rp	150.000,00
Nilai di bawah Kapitalisasi Connectors 1 Buah untuk SDN 001 Kasai Nomor Kontrak 01/PPK/PPS-PTIK/SDN-BRU/2023	Rp	150.000,00
Nilai di bawah Kapitalisasi Connectors untuk SDN 001 Tanjung Redeb @Rp. 150.000 Nomor Kontrak 01/PPK/PPS-PTIK/SDN-BRU/2023	Rp	150.000,00
Di bawah Nilai Kapitalisasi PM (Alat Laboratorium lain-Alat Tes Postable(Autocheck) TA.2023.) 47 buah x 322.000,-	Rp	15.134.000,00
Dibawah nilai kapitalisasi -KURSI RAPAT .JKN TA.2023. 30 Buah x 481.000,-	Rp	14.430.000,00
Di bawah Nilai Kapitalisasi (Jangka Pelvimeter Obsterik.)TA.2023. 9 buah x 377.023	Rp	3.393.207,00
Di bawah Nilai Kapitalisasi -'Mebel -Kursi Besi .JKN.TA.2023. 30 unit x 305.000,-	Rp	2.440.000,00
Di Bawah NIlai Kapitalisasi Lampu Emergency.JKN.TA.2023.10 buah x 159.000	Rp	1.590.000,00
Dibawah nilai Kaptalisasi Resusitator Manual & Sungkup Anak .JKN.2023.2 x 460.000	Rp	920.000,00
Di bawah Nilai Kapitalisasi (Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-Canulla-RSUD Talisayan.) 2 unit x 277.500,-	Rp	555.000,00
Di bawah Nilai Kapitalisasi (Pengukur Tinggi Badan.TA.2023.) 9 buah x 54.212,-	Rp	487.908,00
Di bawah Nilai Kapitalisasi (Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan-Vacum -RSUD Talisayan.) 2 unit x 222.500,-	Rp	445.000,00
Niliai di bawah kapitalisasi PM Helm 40 buah harga satuan 262.000	Rp	10.480.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja Tas Kamera 1 bh @Rp.200.000 Nomor BAST : BA.STP-043/1.05.01.2.07.07/SEKR/BPBD-I/2023 Tanggal 6 Desember 2023	Rp	200.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Kipas Angin 2 buah Harga satuan Rp .495.000 Nomor BAST : 03/BASTP- 01.10 /RS/XI/2023	Rp	990.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja Helmet 30 unit @Rp.255.300 Nomor BAST : 900/016/KPA-BASTP/DLHK-LAB/XI/2023	Rp	7.659.000,00
Nilai di bawah kapitalisasi PM Traffic Cone 20 Buah harga satuan Rp. 333.000 01/BAST/ALAT/PRTH(DBHDR)/DLHK/XI/2023	Rp	6.660.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Botol Reagent 10 buah @Rp.390.000 Nomor BAST : 900/010/KPA-BASTP/DLHK-LAB/XI/2023	Rp	3.900.000,00
Nilai di bawah kapitalisasi PM Traffic Cone 10 Buah harga satuan Rp. 333.000 Nomor BAST : 900/016/KPA-BASTP/DLHK-LAB/XI/2023	Rp	3.330.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja alat laboratorium lainnya, baju Anti Radiasi 10 Buah Harga Satuan Rp. 225.000 Nomor BAST : 900/016/KPA-BASTP/DLHK-LAB/XI/2023	Rp	2.250.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja portable glass meter 8 bh @Rp.240.000 Nomor BAST : 900/016/KPA-BASTP/DLHK-LAB/XI/2023	Rp	1.920.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja alat laboratorium Botol Reagent 8 Buah Harga Satuan Rp. 170.000 Nomor BAST : 900/016/KPA-BASTP/DLHK-LAB/XI/2023	Rp	1.360.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja Pipet Tetes 3 bh @Rp.340.000 Nomor BAST : 900/016/KPA-BASTP/DLHK-LAB/XI/2023	Rp	1.020.000,00

Nilai dibawah kapitalisasi belanja alat laboratorium lainnya, Blower 2 unit @Rp.490.000 Nomor BAST : 900/016/KPA-BASTP/DLHK-LAB/XI/2023	Rp	980.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja pipet tetes 3 bh @Rp.295.000 Nomor BAST : 900/016/KPA-BASTP/DLHK-LAB/XI/2023	Rp	885.000,00
Reklas Belanja modal alat studio lainnya sebanyak 3 unit @Rp.350.000, 2 unit @Rp.250.000 total	Rp	1.550.000,00
Reklas Belanja modal alat studio lainnya sebanyak 2 unit @Rp.400.000	Rp	800.000,00
Reklas Belanja modal Power supply sebanyak 2 unit @Rp.305.000	Rp	610.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Modem Gpon 10 Buah Harga Satuan Rp. 399.600 Nomor BAST : 81 / Diskominfo - II /BAST /X/2023	Rp	3.996.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja peralatan jaringan 10 Unit (HTB-GS-03-A/B) Harga Satuan Rp.299.700 Nomor BAST : 81 / Diskominfo - II /BAST /X/2023	Rp	2.997.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Precon 10 Buah Harga Satuan Rp. 299.700 Nomor BAST : 81 / Diskominfo - II /BAST /X/2023	Rp	2.997.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Galvanis Ukuran 1 .1/4 Inch , 5 Buah Harga Satuan Rp. 355. 200 Nomor BAST : 81 / Diskominfo - II /BAST /X/2023	Rp	1.776.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Fast Connentor 10 Buah Harga Satuan Rp. 155.400 Nomor BAST : 81 / Diskominfo - II /BAST /X/2023	Rp	1.554.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Galvanis Ukuran 1 Inch , 5 Buah Harga Satuan Rp. 255.000 Nomor BAST : 81 / Diskominfo - II /BAST /X/2023	Rp	1.276.500,00
Nilai dibawah kapitalisasi Tas Camera , 4 Buah Harga Satuan Rp. 288. 000 Nomor BAST : 800 / 892 /Diskominfo - PIKP / X I /2023	Rp	1.152.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Speaker Computer , 2 Buah Harga Satuan Rp. 460. 000 Nomor BAST : 800 / 892 /Diskominfo - PIKP / X I /2023	Rp	920.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Protektor Sleeve Fiber Core Optik , 5 Buah Harga Satuan Rp. 155.400 Nomor BAST : 81 / Diskominfo - II /BAST /X/2023	Rp	777.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi Connentor RJ. 45 , 2 Buah Harga Satuan Rp. 222. 000 Nomor BAST : 81 / Diskominfo - II /BAST /X/2023	Rp	444.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja Pelangkan sisir 10 buah Rp.480.000 BAST Nomor	Rp	4.800.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja alat tenun sisir 10 buah Rp.280.000 BAST Nomor	Rp	2.800.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja Rak Tempel Tiang 8 buah Rp.200.000 BAST Nomor disikan lah	Rp	1.600.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja Logo Pemda/Dekrenasda 2 buah Rp.300.000 BAST Nomor	Rp	600.000,00
Nilai di bawah Kapitalisasi (Router) 5 Buah Nilai Satuan Rp.450.000 BAST Nomor : 00/362.1/PLP/Dispusip/2023	Rp	2.250.000,00
Nilai di bawah kapitalisasi belanja Head Set 4 Unit @Rp.400.000	Rp	1.600.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi berupa Kabel Sound	Rp	350.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi berupa Kabel UTP/Kabel Listrik	Rp	300.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi berupa Kipas Angin	Rp	229.000,00
Nilai dibawah Kapitalsasi Regulator Selang Gas Rumah Dinas Sekda Rp.450.000	Rp	450.000,00
Di bawah nilai kapitalisasi PM Kursi Rapat Sebanyak 20 buah harga satuan Rp.472.000	Rp	20.296.000,00
Di bawah nilai kapitalisasi Kursi Tamu sejumlah 181 unit @Rp.275.000 = Rp.49.775.000	Rp	49.775.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja 2 unit Kursi Tamu biasa @Rp.499,000	Rp	998.000,00
Nilai dibawah kapitalisasi belanja 1 unit meja tamu biasa @Rp.350,000	Rp	350.000,00
Nilai dibawah Kapitalisas bangunan Pos Yandu RT XVII Kelurahan Bugis Nomor BAST : 002 /BAST /CTR/Kel - Bugis /XII / 2023	Rp	19.995.000,00
Nilai dibawah Kapitalisas bangunan Pos Yandu RT XVII Kelurahan Gunung Panjang Nomor BAST : 002/BASTPK/Pembuatan Pos Yandu / KL - GP / X/ 2023	Rp	15.000.000,00
Nilai dibawah Kapitalisasi Pembuatan Ruang Khusus Merokok Kantor Kelurahan Gunung Panjang Nomor BAST : 002 / BASTPK /Modal DAU Gunpa / Kel GP / XII / 2023	Rp	10.000.000,00

	Reklas dari PM Ke Barjas Kuota Internet (12 Bulan) Pengadaan Penguat Sinyal SDN 002 Long Suluy (01.16.5.2.02) TA.2023 No.Kontrak : 01/PPK.PPB-PPS/P.SINYAL/SDN002-LONGSULUY/2023 tanggal : 11/07/2023			Rp	25.200.000,00
	Reklas dari PM Ke Barjas Belanja Penambahan Daya Listrik Gedung SMPN 2 Tanjung Redeb (Gedung Eks SMKN 2) SPK Nomor : 421.3/97/I-SMPN2/VI/2023			Rp	2.156.000,00
	Reklas dari PM Ke Barjas Belanja Penambahan Daya Listrik Gedung SMPN 2 Tanjung Redeb (Gedung Kelas Baru) SPK Nomor : 421.3/34/I-SMPN2/I/2023			Rp	1.243.100,00
	Nilai dibawah kapitalisasi alat pelindung lainnya/baju pengaman sebanyak 5 unit @Rp.277.500			Rp	1.387.500,00
	Nilai dibawah kapitalisasi alat pelindung lainnya/baju pengaman sebanyak 3 unit @Rp.300.000			Rp	900.000,00
d.	BAST Pendapatan Hibah Nomor 0003.2790.b/Satpol.PP-V/XII/2023			Rp	3.854.110.350,00
e.	Naskah Perjanjian Hibah DPPKBP3A Nomor : 453/SP/03.06/J1/2023			Rp	505.768.908,00
f.	BAST Pendapatan Hibah Nomor 400.8.1.3/61/SES			Rp	461.478.786,00
	Jumlah Mutasi Tambah			Rp	**99.784.355.841,70**
	Mutasi Kurang :				
a.	Penyesuaian Persediaan TA 2023	Rp	129.339.664.109,69		
b.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2022	Rp	148.383.500,00		
c	Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap	Rp			
	Reklas dari Barjas Ke PM (Mesin Pompa Air) 1 Buah BAST Nomor :BAST/13/02.14/UPT.PTKS/X/2023	Rp	2.000.000,00		
	Reklas dari barjas ke PM Pompa Air Merk PANASONIC Type GA--200JAK 200 Watt Rp.1.350.000 Nomor BAST 523/G.1/PPB-719/XI/2023	Rp	1.350.000,00		
	Reklas Barjas Ke PM (Pengadaan Pallet Tatakan Plastik) 20 Buah @ 1.054.500,- dengan BAST Nomor : 360/023/BA-STB/PLT/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023	Rp	21.090.000,00		
	Reklas Barjas Ke PM (Pengadaan Hand Pallet Manual) 2 Buah @ 9.934.500,- dengan BAST Nomor : 360/023/BA-STB/PLT/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023	Rp	19.869.000,00		
	Reklas Barjas Ke PM (pengadaan Papan Informasi) 1 buah dengan BAST Nomor : BA.STBJ-062/ 1.05.01.2.06.05/BPBD/2023 tanggal 20 Nopember 2023	Rp	4.000.000,00		
	Reklas Barjas Ke PM (Podium Kayu) dengan BAST Nomor : BA.STBJ-069/1.05.01.2.06.05/BPBD/2023	Rp	3.000.000,00		
	Reklas Barjas ke PM (Pengadaan Box Hardcase) 1 Unit dengan Nomor SPK 027/013/SPK/MDL/PK/BPBD-II/2023 Tanggal 27 Nopember 2023	Rp	2.500.000,00		
	Reklas dari Barjas Ke PM (Akrilik Dinding Plus Monel uk 70 x 50) 1 Paket Harga 5.500.000 Bast Nomor: 066/BASTPB-01.07/Dinsos.Set.2/XI/2023	Rp	5.500.000,00		
	Reklas dari Barjas Ke PM (Semprotan Rumput) 2 Buah Harga Satuan Rp.1.075.000 BAST Nomor :BASTP/84/84/02.01/Dinsos-Linjamsos 1.3 /II/2023	Rp	2.150.000,00		
	Reklas dari Barjas Ke PM 1 buah Semprotan Rumput Nomor : 26/BASTPB/DPMK-I/01.09/II/2023	Rp	1.375.000,00		
	Reklas dari Barjas 2 buah TEMPAT BAKAR IKAN @ Rp. 1000.000,- dengan BAST No : 021/168 DKPP-SET.2 tanggal 15/09/2023	Rp	2.000.000,00		
	Reklas Dari Barjas Ke PM Kolam terpal Bulat (Kolam Sementara) Merk Juara HDPE D3 ukuran (100 X 300) Harga Satuan @Rp.4.500.000 di BBI. Sei Bedungun Nomor BAST :523/G.1/PPB-388/VIII/2023	Rp	36.000.000,00		
	Reklas Dari Barjas Ke PM 2 unit blower mini Merk Resun LP 100 Air Pump Harga Satuan @Rp. 3.150.000 di BBI Sei. Bedungun Nomor BAST :523/G.1/PPB-388/VIII/2023	Rp	6.320.000,00		
	Reklas dari Barjas ke PM jaring PE Merk Pelyethilan PE Mesh Size 1 bahan benang 50 Kg di BBI Sei Bedungun Nomor BAST 523/G.1/PPB-/VIII/2023	Rp	4.700.000,00		
	Reklas dari Barjas ke PM Selang kompresor (tekanan tinggi) merk Trida korea rubber 8,5 mm (100 Meter) Rp. 3.330.000 Nomor BAST 523/P3T-788/XII/2023	Rp	3.330.000,00		

Reklas Dari Barjas Ke PM 8 Rol Waring Hitam (Jaring) Merk Ikan Arwana Panjang 100 Meter/Rol Harga Satuan @Rp.1.100.000 di BBI. Sei. Bedungun Nomor BAST :523/G.1/PPB-388/VIII/2023	Rp	3.300.000,00
Reklas dari Barjas ke PM Mesin kompresor Merk Matrix type OF3550-258 Bor 550 Watt Rp.2.497.500 Nomor BAST 523/P3T-788/XII/2023	Rp	2.497.500,00
Reklas Dari Barjas Ke PM 3 rol Waring Hijau (Jaring) merk Ikan Arwana Panjang 50 meter/rol Harga Satuan @Rp. 560.000 Di BBI. Sei. Bedungun Nomor BAST :523/G.1/PPB-388/VIII/2023	Rp	1.680.000,00
Reklas dari Barjas ke PM Selang air Biasa (serat Benang) Merk Royal 5/8 mm (51 Meter) Rp.1.132.200 Nomor BAST 523/P3T-788/XII/2023	Rp	1.132.200,00
Reklas dari Barjas Ke PM (Al Gun Sapi alat kawin suntik sapi) 5 Buah harga Satuan Rp.754.800 Nomor BAST : 027 / 240 / BAST .IB / DPP.3 / VII / 2023	Rp	3.774.000,00
Reklas dari Barjas ke PM (Tungku Pemanggang ikan/Sate) 2 Buah harga Satuan 1 Buah Rp.1.500.000 BAST Nomor : 41/BAST-B /IX/2023 Tanggal 11 September 2023	Rp	3.000.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM (Pompa Air) 2 Buah harga 1 buah Rp. 784.000,00 BAST Nomor : 027/002/UPT-PTHPT/III/2023 tanggal 2 Maret 2023	Rp	1.568.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM (Semprotan Rumput) BAST Nomor : 027/002/UPT-PTHPT/III/2023 tanggal 2 Maret 2023	Rp	1.382.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM Semprotan Rumput 2 Buah harga satuan Rp. 1.567.000 Nomor BAST:217/BA-SPTB/KEC-TLB/VII/2023	Rp	3.134.000,00
Reklas Dari Barjas Ke PM 1 Buah Tempat Pembakaran Ikan	Rp	1.990.000,00
Reklas Dari Barjas Ke PM Pompa Air (3 Buah) Harga Satuan Rp.784.000 Nomor : 32/BAPHP/8.04/2023	Rp	2.352.000,00
Reklas Dari Barjas Ke PM Tempat Bakar Ikan dengan ukuran Panjang 1,5 Meter, Lebar 40 Cm dan Tinggi 1 Meter bahan Besi Non Merk Harga Satuan Rp.2.000.000,- Nomor : 149 /BAPHP-/8.04 /2023 Tanggal 11 September 2023	Rp	2.000.000,00
Reklas Dari Barjas Ke PM 2 Buah Tungku Bakar Ikan Harga Satuan Rp.1.000.000 ,SPK/360/SPK-CBTN/IX/2023 Tanggal 05 September 2023, dan BAST No. 360/BASTB-CBTN/IX/2023 Tanggal 05 September 2023	Rp	2.000.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM Cadang alat kedokteran (Probe Bistos BT 250) 2 buah harga satuan Rp.5.500.000 BAST No. 455/012/PEM-ALKES/VII/2023	Rp	11.100.000,00
Reklas Barjas Ke PM (Pengadaan Whitebord) 12 Buah @ 776.000 BAST Nomor : 360/020/BA-STB/WB/XI/2023 tanggal 20 NOpember 2023	Rp	9.312.000,00
Reklas Barjas Ke PM (ATK (Pembelian Whitebord)) 2 Buah @ 776.000,- dengan BAST Nomor 360/019/BA-STB/ATK2/XI/2023 Tanggal 22 Nopember 2023	Rp	1.552.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM 1 buah White Board Nomor : 26.1/BAST/ATK/DPMK-1	Rp	750.000,00
Reklas Barjas Ke PM (pengadaan Plang/Rambu-Rambu) 30 buah @ 1.864.000,- dengan BAPH Nomor : BA.PHP-001/1.05.03.2.01.02/Rambu/PK/BPBD-II/2023 tanggal 05 Desember 2023	Rp	55.920.000,00
Reklas Barjas Ke PM (pengadaan Plang/Rambu-Rambu) 28 buah @ 1.780.000,- dengan BAST Nomor : BA.STP-011/1.05.03.2.01.02/PK/BPBD-II/2023 tanggal 21 Agustus 2023.batas	Rp	49.840.000,00
Reklas Barjas Ke PM (pengadaan Plang jalur Evakuasi) 10 buah @ 2.300.000,- dengan BAST Nomor : BA.STBJ-062/ 1.05.01.2.06.05/BPBD/2023 tanggal 20 Nopember 2023	Rp	23.000.000,00
Reklas Barjas Ke PM (pengadaan Plang Titik Kumpul) 1 buah dengan BAST Nomor : BA.STBJ-062/ 1.05.01.2.06.05/BPBD/2023 tanggal 20 Nopember 2023	Rp	3.000.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM (Bendera Merah Putih Besar)1 Buah Harga Satuan 600.000 Bast Nomor : BASTPB/171/02.14/UPT.PTKS/X/2022	Rp	600.000,00
Reklas dari barjas ke ATL belanja Umubul-Umbul (86,000x15M) Rp.1,290,000	Rp	1.290.000,00
Reklas dari Barjas ke PM Peralatan Alat Cetak AK1 Nomor BAST : 560/09/POAIPK/Penta/XII/2023 tanggal 18/12/2023	Rp	17.700.000,00
Reklas dari Barjas ke PM 1 buah Figura Nomor : 04/BASTPB/DPMK-II/01.07/VII/2023	Rp	1.098.000,00
Reklas dari Barang & Jasa Pengadaan Bendera Merah Putih (3buah) Harga Satuan Rp.600.000 Nomor BAST : Nomor BAST: 158/KPA	Rp	1.800.000,00

Reklas Dari Barjas Ke ATL Belanja Umbul-Umbul (14 M2) Harga Per Meter Rp. 70.000	Rp	980.000,00
Belanja Bendera Merah putih yang Belanjanya di Belanja Bahan Cetak	Rp	600.000,00
Reklas Dari Barjas Ke GB 1 Buah Kerangka Baleho Ukuran 4 x 6 Meter Nomor BAST : 274 /BASTHP/Baplitbang - SET/XI/2023 tanggal 14/11/2023	Rp	35.000.000,00
Reklas Barjas Ke PM (Pengadaan Mic Kabel) 5 Unit @ 2.250.000 dengan Nomor SPK 027/012/SPK/MDL/PK/BPBD-II/2023 tanggal 27 Nopember 2023	Rp	11.250.000,00
Reklas dari Barjas ke PM peralatan komputer Keyboard ketik 2 buah harga satuan Rp.561.000 Nomor BAST :560/212/SET-II tanggal 04/12/2023	Rp	1.122.000,00
Reklas dari Barang & Jasa Pengadaan Layar/LCD Macbook Air 2020 Nomor BAST	Rp	6.000.000,00
Reklas dari Barjas ke PM Camera Digital Logitech Nomor BAST : 900/362.1/PLP/Dispusip/2023 tanggal 06/07/2023	Rp	2.250.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM Hardisk Internal (1) Buah SPK Nomor :161/SPK/Bahan Lomputer/KEL-GY/XI/2023	Rp	900.000,00
Reklas dari Barjas ke PM Rak Piring 2 buah Power Supply harga satuan Rp. 998.000 Nomor BAST : 08.1/BAST.PPK/06.03/BPKAD-A/XII/2023 Tanggal 5/10/2023	Rp	1.996.000,00
Reklas Barjas ke PM .Satu Buah Dispenser Berdiri No.440/161/PBP-BASTB/XII/2023.Tgl 13/12/2023.	Rp	3.000.000,00
Reklas dari barjas ke PM belanja Gordyn (262,000x30M) Rp.7,860,000	Rp	7.860.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM (Dispenser) 1 Buah Harga satuan Rp. 766.000 BAST Nomor: 78/06.03/BASTPB/XII/2023	Rp	766.000,00
Reklas dari Barang & Jasa Umbul-Umbul 25 lembar @Rp86.000 Tgl 14 Agustus 2023	Rp	2.150.000,00
Reklas dari barjas Ke ATL Bunga Hias 2 buah @Rp.314.000 tanggal 03/11/2023	Rp	628.000,00
Reklas dari barjas Ke ATL taplak meja 1 lbr Rp.356.000 tanggal 03/11/2023	Rp	356.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM Kompor Gas Tipe Dua Tungku I Buah Nomor SPK 18/SPK/CTR/KEL-BUG/II/2023	Rp	519.000,00
	Rp	
Reklas dari Barjas ke Aset Tetap Lainya (Bunga Hias) 4 Buah harga satuan Rp. 314.000	Rp	1.256.000,00
Reklas Dari Barjas Ke PM 1 Buah Kompor Gas ,SPK/108/SPK-CBTN/IX/2023 Tanggal 29 September 2023, dan BAST No. 360/BASTB-CBTN/IX/2023 Tanggal 05 September 2023	Rp	519.000,00
Reklas dari Barjas ke PM Rak Piring satu buah Nomor BAST : 09.1/BAST.PPK/06.03/BPKAD-A/XII/2023 Tanggal 5/12/2023	Rp	1.000.000,00
Reklas dari barjas gordyn 155 M Rp.69.750.000	Rp	69.750.000,00
Reklas dari barjas Kain Flanel 39 M Rp.4.095.000	Rp	4.095.000,00
Reklas dari Barjas ke PM (Stavol) 1 Buah Nomor BAST : 556/ /BASTP/II/2023	Rp	738.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM (Kontaktor) Nomor BAST : 027/05.81/BA - STB -Lis.RJ/V/2023 NO.027/05.81/BA-STB-Lis.RJ/V/2023	Rp	1.844.500,00
Reklas dari Barjas Ke PM (Timer Theber) Nomor BASTB : 027/05.81/BA - STB -Lis.RJ/V/2023 NO.027/05.81/BA-STB-Lis.RJ/V/2023	Rp	1.844.500,00
Reklas dari Barjas Ke PM Belanja Lampu Penerangan jalan (dana DAU)5 buah Harga Satuan Rp. 1.000.000 SPK nomor : 003/SPK/DAU-PENERANGAN JALAN/KEL-GP/XI/2023	Rp	5.000.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM Belanja Kabel LAN Kantor Kecamatan Tanjung Redeb 1 Buah nomor SPK : 214/SPK/LS- Alat Kantor/Keu-CTR/XII/2023	Rp	1.149.000,00
Reklas dari Barjas Ke PM (Tenda Peleton Barak) 22 Set Harga 4.177.000 Bast Nomor: BASTP/171/XII/2023	Rp	91.894.000,00
Reklas Barjas ke PM (Pengadaan Tas Ransel Waterproof) 15 Buah @ 549.000,- dengan Nomor BAST : 360/017/BA-STB/TAS/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023	Rp	8.235.000,00
Reklas Dari Barjas Ke PM 1 Buah Mainan Play Ground Nomor BAST : 919.4/1512/CSDR-I / 2023	Rp	6.400.000,00

	Reklas Dari Barjas Ke PM 1 Buah Mainan Truck Besar Nomor BAST : 919.4/1512/CSDR-I / 2023	Rp	580.000,00		
	Reklas Dari Barjas Ke PM 1 Buah Exacavator Besar Mainan Nomor BAST : 919.4/1512/CSDR-I / 2023	Rp	565.000,00		
	Reklas dari Barjas Ke PM Hand wash Pengering (Mesin Electrik) 6 buah harga satuan Rp 750.000 Nomor BAST :NO.027/02.31/BA-STB-Pem./II/2023	Rp	4.500.000,00		
	Reklas Barjas ke PM (Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan) 10 Unit @ 679.000,- dengan Nomor BA.PHP-001/1.05.03.2.01.02/APAR/PK/BPBD-II/2023 Tanggal 15 Nopember 2023	Rp	6.790.000,00		
	Reklas dari Barjas Ke PM Tong Sampah Plastik 10 Buah Harga Satuan Rp. 1.350.000 SPK Nomor :027/231/SPK/KL-TR/2023	Rp	13.500.000,00		
	Reklas dari Barjas 1 Unit OVEN merk Hock dengan BAST No : BAST.1/01/PKPPUM/ DKPP-SET.3/VI/2023 tanggal 26/06/2023	Rp	1.182.000,00		
	Reklas dari Barjas 1 buah KOMPOR GAS merk Rinnai dengan BAST No : BAST.1/01/PKPPUM/ DKPP-SET.3/VI/2023 tanggal 26/06/2023	Rp	900.000,00		
	Reklas dari Barjas 1 Unit HAND MIXER merk Philip dengan BAST No : BAST.1/01/PKPPUM/ DKPP-SET.3/VI/2023 tanggal 26/06/2023	Rp	810.000,00		
	Reklas dari Barjas ke PM Tungku satu buah Nomor BAST : /BPKAD/Sekrt/IX/2023 Tanggal 17/09/2023	Rp	600.000,00		
	Jumlah Mutasi Kurang			**Rp**	**130.108.532.309,69**
	Jumlah Saldo Beban Persediaan - LO			**Rp**	**98.123.490.293,01**
	Belanja Jasa - LRA			**Rp**	**384.189.800.484,00**
	Mutasi Tambah :				
a.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2023			Rp	1.431.385.847,00
b.	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa				
	Reklas dari PM ke Barjas, Bayar sewa alat apung bermotor (speed Boat) ke sungai Belawan Kec. Gunung Tabur SPK Nomor : 800/DLHK - III/SPK/IX/2023			Rp	1.700.000,00
	Reklas dari ATL ke Barjas biaya Sewa dan Instal Aplikasi SIM RS BAST : Nomor : 440/147/PBP-BASTB/XI/2023.Tggl 12/12/2023.Tggl 12/12/2023.			Rp	55.000.000,00
c.	Penyesuaian Beban di bayar dimuka TA 2022			Rp	139.238.431,32
	Jumlah Mutasi Tambah			**Rp**	**1.627.324.278,32**
	Mutasi Kurang :				
a.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2022	Rp	1.983.535.748,00		
b.	Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap				
	Reklas dari Barjas Ke PM Alat pelindung Diri (Jas Operasi) 80 buah harga satuan Rp.572.000 BAST No. 455/012/Keg - Bencana / IX /2023	Rp	45.760.000,00		
	Reklas dari Barjas Ke GB - Review Perencanaan Gedung Kantor Tgl 25 Mei 2023 Nomor SPK. 03/KPA-PPK/DPKP/Review PGK/IV/2023	Rp	49.800.000,00		
	Reklas dari Barjas Ke GB - Pengawasan Pembangunan Gedung Baru Tgl 20 Desember 2023 Nomor SPK. 653/06/PPK-PWGK/VIII/2023	Rp	93.655.695,00		
	Reklas dari Barjas ke GB Penambahan RKB SMPN 3 Gunung Tabur di Maluang TA.2023 Nomor BAST : 04-BAST-PPK/RKB3Gun/IX/2023	Rp	64.867.000,00		
	Reklas dari Barjas ke GB Pembangunan USB SMPN 3 Biduk-Biduk di Teluk Sumbang Nomor BAST : 04/BASTPP/USBSMPN3BID/IX/2023	Rp	44.289.000,00		
	Mutasi dari BPKAD Barang dan jasa Biaya kerohiman tanam tumbuh Rek : 5.1.06.02.01.0001 TA 2023, dikapitalisasi ke nilai perolehan tanah, BAST Nomor: 030/1180/BAST/BPKAD-E/2023 tanggal 20/12/2023	Rp	2.692.314.821,00		
	Reklas dari Barjas Ke ATB Konsultansi Beorientasi Bidang Telematika Nomor BAST : 91 /BA . STB - Diskominfo - IV / XII / 2023	Rp	170.052.000,00		
	Reklas dari Barjas Ke ATB, Pengadaan Sistem Informasi Satu Data Kabupaten Berau, BAST Nomor : 79/BA.STB-Diskominfo-IV/XI tanggal 27 November 2023	Rp	98.500.000,00		

c.	Penyesuaian Beban di bayar dimuka TA 2023	Rp	286.547.977,50		
	Jumlah Mutasi Kurang			**Rp**	**5.529.322.241,50**
	Jumlah Saldo Beban Jasa - LO			**Rp**	**380.287.802.520,82**
	Belanja Pemeliharaan - LRA			**Rp**	**42.636.129.353,00**
	Mutasi Tambah :				
a.	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa				
	Reklas Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			Rp	16.835.000,00
	Reklas Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum			Rp	27.940.000,00
	Reklas Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman			Rp	11.714.000,00
	Reklas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya			Rp	99.873.360,00
	Jumlah Mutasi Tambah			**Rp**	**156.362.360,00**
	Mutasi Kurang :				
a.	Penyesuaian Persediaan TA 2023	Rp	626.480.000,00		
b.	Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap				
	Reklas Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp	2.950.000,00		
	Reklas Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	Rp	193.884.000,00		
	Reklas Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp	890.490.863,00		
	Reklas Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Rp	60.231.146,00		
	Reklas Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp	392.025.000,00		
	Jumlah Mutasi Kurang			**Rp**	**2.166.061.009,00**
	Jumlah Saldo Beban Pemeliharaan - LO			**Rp**	**40.626.430.704,00**
	Belanja Perjalanan Dinas - LRA			**Rp**	**155.344.259.077,00**
	Mutasi Tambah :				
a.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2023			Rp	389.730.000,00
b.	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa				
	Reklas dari PM ke Barjas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak empat orang an. Nopian Hidayat, Datu Abdullah Hasbi, Indra Sabti, Julius Ke tanjung Batu Pulau Derawan dengan Nomor Surat Perintah Tugas : 360 / 72 / BPBD - III / 2023 (kesalahan penganggaran)			Rp	680.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah			**Rp**	**390.410.000,00**
	Mutasi Kurang :				
a.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2022	Rp	99.380.000,00		
	Jumlah Mutasi Kurang			**Rp**	**99.380.000,00**

	Jumlah Saldo Beban Perjalanan Dinas - LO			**Rp**	**155.635.289.077,00**
	Belanja Barang dan Jasa Lainnya - LRA			**Rp**	**123.952.456.733,61**
	Mutasi Tambah :				
a.	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Barang dan Jasa Nilai dibawah kapitalisasi belanja alat kesehatan umum Selo 10 unit @Rp.399,600			Rp	3.996.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah			**Rp**	**3.996.000,00**
	Mutasi Kurang :				
a.	Penyesuaian Utang Barang dan Jasa TA 2022	Rp	1.842.598.235,53		
b.	Reklasifikasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap				
	Reklas dari Barjas ke PM Selimut 100 Buah Harga satuan Rp. 813. 600 BAST No. 455/123/Keg - PMRS /XII/2023	Rp	81.360.000,00		
	Reklas dari Barjas ke PM Frame 3D Box 4 Buah Harga satuan Rp. 750.000 BAST No. 455/73/Keg - PMRS /X/2023	Rp	3.000.000,00		
	Reklas dari Barjas ke PM Kasur Mandi ukuran 40x70 cm 2 buah harga satuan Rp.750.000 BAST No. 455/116/TU-1/BAST/III/2023	Rp	1.500.000,00		
	Reklas dari Barjas ke PM Standing Flower 2 Buah Harga satuan Rp. 650.000 BAST No. 455/73/Keg - PMRS /X/2023	Rp	1.300.000,00		
	Jumlah Mutasi Kurang			**Rp**	**1.929.758.235,53**
	Jumlah Saldo Beban Barang dan Jasa Lainnya - LO			**Rp**	**122.026.694.498,08**

5.4.2.1.3 Beban Hibah - LO

Beban Hibah	Tahun 2023	Tahun 2022
	153.657.103.990,00	78.143.539.352,07

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada Tahun 2023. Beban Hibah Tahun 2023 terealisasi senilai Rp153.657.103.990,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp75.513.564.637,93 atau 96,63% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp78.143.539.352,07. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.155 Beban Hibah - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah Dinas Pendidikan	8.517.527.700,00	30.019.399.989,07	(21.501.872.289,07)	(71,63)
2	Beban Hibah Dinas Kesehatan	700.000.000,00	722.900.000,00	(22.900.000,00)	(3,17)
3	Beban Hibah Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	55.287.353.417,00	1.734.692.742,00	53.552.660.675,00	3.087,16
4	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	3.319.106.227,00	0,00	3.319.106.227,00	100,00
5	Beban Hibah Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	121.289.700,00	179.487.000,00	(58.197.300,00)	(32,42)
6	Beban Hibah Pangan	882.345.240,00	0,00	882.345.240,00	100,00
7	Beban Hibah Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	1.016.457.000,00	0,00	1.016.457.000,00	100,00
8	Beban Hibah Dinas Pemberdayaan Kampung	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	100,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Beban Hibah Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	273.410.760,00	0,00	273.410.760,00	100,00
10	Beban Hibah Dinas Kepemudaan & Olah Raga	2.550.011.573,00	4.775.000.000,00	(2.224.988.427,00)	(46,60)
11	Beban Hibah Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.061.677.000,00	500.000.000,00	561.677.000,00	112,34
12	Beban Hibah Perpustakaan & Kearsipan	3.760.496.400,00	0,00	3.760.496.400,00	100,00
13	Beban Hibah Dinas Perikanan	14.392.874.053,00	0,00	14.392.874.053,00	100,00
14	Beban Hibah Pertanian & Peternakan	13.238.208.343,00	0,00	13.238.208.343,00	100,00
15	Beban Hibah Perkebunan	3.436.610.100,00	0,00	3.436.610.100,00	100,00
16	Beban Hibah Sekretariat Daerah	18.975.000.000,00	13.054.000.000,00	5.921.000.000,00	45,36
17	Beban Hibah Kec Tg Redeb	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Beban Hibah Kec Gn Tabur	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beban Hibah Kec Teluk Bayur	227.262.000,00	0,00	227.262.000,00	100,00
20	Beban Hibah Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	0,00	24.013.531.050,00	(24.013.531.050,00)	(100,00)
21	Beban Hibah Badan Kesbang, Politik dan Linmas	25.895.564.477,00	3.144.528.571,00	22.751.035.906,00	723,51
	J u m l a h	**153.657.103.990,00**	**78.143.539.352,07**	**75.513.564.637,93**	**96,63**

Dari tabel diatas terdapat Beban Hibah di beberapa SKPD yang dirincikan pada ***lampiran 13.***

Penjelasan Belanja Hibah – LO dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Hibah - LRA		163.011.244.933,00
Mutasi Kurang :		
Realisasi Belanja BOS Swasta	9.354.140.943,00	
Beban Hibah - LO		153.657.103.990,00

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial	Tahun 2023	Tahun 2022
	8.536.409.701,00	2.740.020.000,00

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 terealisasi senilai Rp8.536.409.701,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.796.389.701,00 atau 211,55%. dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp2.740.020.000,00. Beban Bantuan Sosial digunakan untuk mencatat biaya – biaya yang sudah digunakan untuk Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, Kedaruratan dan Logistik Bila Terjadi Bencana, Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, serta tunjangan yatim piatu, lansia, kebakaran dan kematian. Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 terdapat pada SKPD ; Dinas Sosial senilai Rp8.487.714.821,00 dan BPKAD Rp48.694.880,00. Tabel Beban Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.156 Beban Bantuan Sosial - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial	8.536.409.701,00	2.740.020.000,00	5.796.389.701,00	211,55
	J u m l a h	**8.536.409.701,00**	**2.740.020.000,00**	**5.796.389.701,00**	**211,55**

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2023	Tahun 2022
	999.901.752,49	3.939.628.381,81

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 terealisasi senilai Rp999.901.752,49 mengalami **penurunan** senilai Rp2.939.726.629,32 atau 74,62% dibandingkan dengan Tahun 2022 yang senilai Rp3.939.628.381,81 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.157 Beban Penyisihan Piutang - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
I	**Beban Penyisihan Piutang Pajak**		**755.169.522,88**	**1.704.927.342,31**	**(949.757.819,43)**	**(55,71)**
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak daerah	Bapenda	755.169.522,88	1.704.927.342,31	(949.757.819,43)	(55,71)
II	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi daerah**		**(890.936.213,85)**	**285.051.913,27**	**(1.175.988.127,12)**	**(412,55)**
1	Beban Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bapenda	(152.112.280,00)	(230.215.340,00)	78.103.060,00	(33,93)
		Koperindag	(737.287.933,85)	515.221.338,27	(1.252.509.272,12)	(243,10)
		Dispora	(1.536.000,00)	154.000,00	(1.690.000,00)	(1.097,40)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Koperindag	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	Pertanian	0,00	(108.085,00)	108.085,00	(100,00)
III	**Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**		**1.135.668.443,46**	**1.949.649.126,23**	**(813.980.682,77)**	**(41,75)**
1	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	BPKAD	255.439.106,71	100.219.960,57	155.219.146,14	154,88
2	Beban Penyisihan Piutang Denda Pajak	Bapenda	623.119.236,50	849.328.866,91	(226.209.630,41)	(26,63)
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	RSUD	74.128.084,13	(638.031.459,11)	712.159.543,24	(111,62)
4	Beban Penyisihan Piutang Denda retribusi	Koperindag	182.982.016,12	1.638.131.757,86	(1.455.149.741,74)	(88,83)
IV	**Beban Penyisihan Piutang Transfer Antara Daerah**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antara Daerah	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang			**999.901.752,49**	**3.939.628.381,81**	**(2.939.726.629,32)**	**(74,62)**

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 terealisasi senilai Rp656.945.015.157,40 mengalami **kenaikan** senilai Rp25.042.535.133,79 atau 3,96% dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp631.902.480.023,61. Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.158 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	90.620.149.308,12	80.436.476.391,36	10.183.672.916,76	12,66
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.534.596.096,60	45.966.990.578,00	(7.432.394.481,40)	(16,17)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	521.072.086.759,52	495.839.141.670,00	25.232.945.089,52	5,09
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	589.110.693,00	437.571.696,00	151.538.997,00	34,63
5	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.628.096.384,00	7.329.644.644,00	(5.701.548.260,00)	(77,79)
6	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Amortisasi Tak Berwujud	4.500.975.916,16	1.892.655.044,25	2.608.320.871,91	137,81
	J u m l a h	**656.945.015.157,40**	**631.902.480.023,61**	**25.042.535.133,79**	**3,96**

5.4.2.1.6.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO

Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	Tahun 2023	Tahun 2022
	90.620.149.308,12	80.436.476.391,36

Beban Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2023 terealisasi senilai Rp90.620.149.308,12 mengalami **kenaikan** senilai Rp10.183.672.916,76 atau 12,66% dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp80.436.476.391,36 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.159 Beban Penyusutan Peralatan Mesin - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	25.542.026.238,20	19.824.639.346,00	5.717.386.892,20	28,84
2	Dinas Kesehatan	12.113.294.919,00	11.038.151.604,00	1.075.143.315,00	9,74
3	RSUD Dr. Abd. Rivai	12.739.960.711,00	13.605.258.639,36	(865.297.928,36)	(6,36)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.157.790.763,92	4.216.596.460,00	(58.805.696,08)	(1,39)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	264.303.840,00	297.960.345,00	(33.656.505,00)	(11,30)
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	509.526.353,00	341.984.943,00	167.541.410,00	48,99
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.476.881.167,00	8.877.816.749,00	599.064.418,00	6,75
8	Dinas Sosial	195.684.434,00	166.314.091,00	29.370.343,00	17,66
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	214.317.554,00	120.142.483,00	94.175.071,00	78,39
10	Dinas Pangan	206.925.260,00	247.505.488,00	(40.580.228,00)	(16,40)
11	Dinas Pertanahan	374.776.326,00	313.994.819,00	60.781.507,00	19,36
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.595.112.781,00	2.997.385.219,00	597.727.562,00	19,94
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	769.116.841,00	538.804.083,00	230.312.758,00	42,75
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	238.411.979,00	244.670.249,00	(6.258.270,00)	(2,56)

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	400.439.437,00	413.224.950,00	(12.785.513,00)	(3,09)
16	Dinas Perhubungan	3.909.202.963,00	3.079.997.693,00	829.205.270,00	26,92
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	958.107.790,00	782.364.368,00	175.743.422,00	22,46
18	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	588.177.551,00	711.311.882,00	(123.134.331,00)	(17,31)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	317.193.420,00	227.900.828,00	89.292.592,00	39,18
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	425.415.969,00	486.649.446,00	(61.233.477,00)	(12,58)
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	512.610.932,00	376.053.246,00	136.557.686,00	36,31
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	453.708.780,00	348.477.398,00	105.231.382,00	30,20
23	Dinas Perikanan	332.217.789,00	316.891.947,00	15.325.842,00	4,84
24	Dinas Pertanian dan Peternakan	631.890.338,00	577.706.198,00	54.184.140,00	9,38
25	Dinas Perkebunan	468.506.775,00	452.522.915,00	15.983.860,00	3,53
26	Sekretariat Daerah	2.448.148.007,00	2.551.618.177,00	(103.470.170,00)	(4,06)
27	Inspektorat	913.808.026,00	668.934.615,00	244.873.411,00	36,61
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	706.213.166,00	527.358.237,00	178.854.929,00	33,92
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.593.955.593,00	1.239.914.088,00	354.041.505,00	28,55
30	Badan Pendapatan Daerah	438.174.318,00	433.483.973,00	4.690.345,00	1,08
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	311.883.887,00	232.698.701,00	79.185.186,00	34,03
32	Sekretariat Korpri	13.881.042,00	21.936.089,00	(8.055.047,00)	(36,72)
33	Sekretariat DPRD	2.074.914.896,00	1.697.967.389,00	376.947.507,00	22,20
34	Kecamatan Tanjung Redeb	471.430.423,00	293.651.552,00	177.778.871,00	60,54
35	Kecamatan Gunung Tabur	124.155.388,00	151.948.218,00	(27.792.830,00)	(18,29)
36	Kecamatan Sambaling	97.302.002,00	103.445.360,00	(6.143.358,00)	(5,94)
37	Kecamatan Teluk Bayur	147.316.399	145.816.259	1.500.140,00	1,03
38	Kecamatan Segah	382.717.877	341.509.461	41.208.416,00	12,07
39	Kecamatan Kelay	177.300.869	91.774.397	85.526.472,00	93,19
40	Kecamatan Pulau Derawan	221.060.253	287.766.076	(66.705.823,00)	(23,18)
41	Kecamatan Talisayan	46.168.815	24.195.437	21.973.378,00	90,82
42	Kecamatan Biduk-Biduk	122.666.971	98.289.079	24.377.892,00	24,80
43	Kecamatan Maratua	270.524.766	122.635.878	147.888.888,00	120,59
44	Kecamatan Tabalar	359.400.223	381.297.712	(21.897.489,00)	(5,74)
45	Kecamatan Batu Putih	105.524.980	98.758.668	6.766.312,00	6,85
46	Kecamatan Biatan	145.540.848	139.226.467	6.314.381,00	4,54
47	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	52.459.648,00	177.925.169,00	(125.465.521,00)	(70,52)
	Jumlah	**90.620.149.308,12**	**80.436.476.391,36**	**10.183.672.916,76**	**12,66**

5.4.2.1.6.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	38.534.596.096,60	45.966.990.578,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp38.534.596.096,60 mengalami **penurunan** senilai Rp7.432.394.481,40 atau 16,17% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp45.966.990.578,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.160 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	14.923.760.503,60	14.256.799.553,00	666.960.950,60	4,68
2	Dinas Kesehatan	3.838.773.026,00	3.649.367.184,00	189.405.842,00	5,19
3	RSUD Dr. Abd. Rivai	1.440.026.742,00	1.468.529.278,00	(28.502.536,00)	(1,94)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.353.284.092,00	19.953.747.138,00	(8.600.463.046,00)	(43,10)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	84.806.953,00	80.633.717,00	4.173.236,00	5,18
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.872.360,00	2.872.360,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	544.402.220,00	549.627.981,00	(5.225.761,00)	(0,95)
8	Dinas Sosial	64.668.492,00	64.057.801,00	610.691,00	0,95
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.992.720,00	45.992.720,00	0,00	0,00
10	Dinas Pangan	126.875.294,00	121.342.668,00	5.532.626,00	4,56
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	489.739.667,00	416.565.421,00	73.174.246,00	17,57
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	22.319.548,00	22.718.548,00	(399.000,00)	(1,76)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	2.699.060,00	2.699.060,00	0,00	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	64.580.580,00	43.037.060,00	21.543.520,00	50,06
15	Dinas Perhubungan	649.914.041,00	628.328.269,00	21.585.772,00	3,44
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.394.375,00	75.000,00	3.319.375,00	4.425,83
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	522.798.604,00	391.911.547,00	130.887.057,00	33,40
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.413.866,00	235.644,00	1.178.222,00	500,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	557.589.281,00	539.252.321,00	18.336.960,00	3,40
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	208.976.733,00	140.817.974,00	68.158.759,00	48,40
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.143.244,00	7.151.734,00	1.991.510,00	27,85
22	Dinas Perikanan	231.259.620,00	228.709.035,00	2.550.585,00	1,12
23	Dinas Pertanian dan Peternakan	229.613.061,00	225.633.765,00	3.979.296,00	1,76
24	Dinas Perkebunan	109.545.879,00	108.585.844,00	960.035,00	0,88
25	Sekretariat Daerah	751.290.245,00	802.177.655,00	(50.887.410,00)	(6,34)
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1.324.577,00	1.207.910,00	116.667,00	9,66
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	510.090.646,00	506.172.086,00	3.918.560,00	0,77
28	Badan Pendapatan Daerah	3.647.380,00	3.647.380,00	0,00	0,00
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	15.361.241,00	15.007.306,00	353.935,00	2,36
30	Sekretariat Korpri	28.258.500,00	28.258.500,00	0,00	0,00
31	Sekretariat DPRD	745.325.272,00	743.706.608,00	1.618.664,00	0,22
32	Kecamatan Tanjung Redeb	65.685.540,00	66.748.362,00	(1.062.822,00)	(1,59)
33	Kecamatan Gunung Tabur	48.295.842,00	45.539.672,00	2.756.170,00	6,05
34	Kecamatan Sambaling	8.484.320,00	8.484.320,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Teluk Bayur	62.561.990,00	63.216.390,00	(654.400,00)	(1,04)
36	Kecamatan Segah	70.518.590,00	70.518.590,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Kelay	84.159.998,00	84.159.998,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
38	Kecamatan Pulau Derawan	50.380.000,00	50.680.000,00	(300.000,00)	(0,59)
39	Kecamatan Talisayan	115.018.260,00	115.018.260,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Biduk-Biduk	80.627.220,00	80.627.220,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Maratua	67.219.420,00	65.385.444,00	1.833.976,00	2,80
42	Kecamatan Tabalar	99.407.800,00	99.407.800,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Batu Putih	79.680.000,00	79.680.000,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Biatan	90.146.135,00	88.655.455,00	1.490.680,00	1,68
45	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	28.663.159,00	0,00	28.663.159,00	0,00
	Jumlah	**38.534.596.096,60**	**45.966.990.578,00**	**(7.432.394.481,40)**	**(16,17)**

5.4.2.1.6.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi – LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	521.072.086.759,52	495.839.141.670,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 terealisasi senilai Rp521.072.086.759,52 mengalami **kenaikan** senilai Rp25.232.945.089,52 atau 5,09% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp495.839.141.670,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.161 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	283.019.305,00	289.747.816,00	(6.728.511,00)	(2,32)
2	Dinas Kesehatan	372.670.737,00	325.048.792,00	47.621.945,00	14,65
3	RSUD Dr. Abd. Rivai	91.892.967,00	91.018.184,00	874.783,00	0,96
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.525.909.171,52	476.215.343.415,00	24.310.565.756,52	5,10
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.932.717.021,00	6.255.123.619,00	1.677.593.402,00	26,82
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132.124.400,00	15.090.783,00	117033617,00	0,00
8	Dinas Sosial	14.556.920,00	8.763.460,00	5.793.460,00	66,11
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	45.000,00	(45.000,00)	(100,00)
10	Dinas Pangan	1.900.150,00	1.900.150,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	209.593.827,00	471.679.132,00	(262.085.305,00)	(55,56)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.203.840,00	1.266.340,00	(62.500,00)	(4,94)
13	Dinas Perhubungan	10.732.297.061,00	11.410.959.798,00	(678.662.737,00)	(5,95)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.369.100,00	12.369.100,00	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	15.808.550,00	16.113.533,00	(304.983,00)	(1,89)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.284.500,00	4.284.500,00	0,00	0,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	13.768.708,00	14.960.375,00	(1.191.667,00)	(7,97)
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	60.704.830,00	61.381.024,00	(676.194,00)	(1,10)
19	Dinas Perikanan	107.004.097,00	109.025.755,00	(2.021.658,00)	(1,85)
20	Dinas Pertanian dan Peternakan	123.647.656,00	105.181.845,00	18.465.811,00	17,56
21	Dinas Perkebunan	25.016.700,00	25.016.700,00	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	12.822.625,00	13.227.637,00	(405.012,00)	(3,06)
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	150.830.700,00	150.830.700,00	0,00	0,00
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	491.675,00	491.675,00	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	36.174.104,00	36.472.854,00	(298.750,00)	(0,82)
27	Kecamatan Tanjung Redeb	136.483.731,00	129.695.427,00	6.788.304,00	5,23
28	Kecamatan Gunung Tabur	23.603.800,00	24.033.728,00	(429.928,00)	(1,79)
29	Kecamatan Teluk Bayur	49.357.250,00	49.357.250,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Kelay	833.334,00	69.444,00	763.890,00	1.100,01
31	Kecamatan Talisayan	0,00	283.334,00	(283.334,00)	(100,00)
32	Kecamatan Biduk-Biduk	0,00	92.500,00	(92.500,00)	(100,00)
33	Kecamatan Tabalar	0,00	267.800,00	(267.800,00)	(100,00)
34	Kecamatan Biatan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	Jumlah	**521.072.086.759,52**	**495.839.141.670,00**	**25.232.945.089,52**	**5,09**

5.4.2.1.6.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya – LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	589.110.693,00	437.571.696,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 terealisasi senilai Rp589.110.693,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp151.538.997,00 atau 34,63% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp437.571.696,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.162 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan	580.953.505,00	429.414.510,00	151.538.995,00	35,29
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.157.188,00	8.157.186,00	2,00	0,00
	Jumlah	**589.110.693,00**	**437.571.696,00**	**151.538.997,00**	**34,63**

5.4.2.1.6.5 Beban Penyusutan Properti Investasi – LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Properti Investasi	1.628.096.384,00	7.329.644.644,00

Beban Penyusutan Properti investasi Tahun 2023 terdapat nilai penyusutan senilai Rp1.628.096.384,00, mengalami penurunan senilai Rp5.701.548.260,00 atau 77,79% dibanding Tahun 2022 senilai Rp7.329.644.644,00.

Tabel 5.163 Beban Penyusutan Properti Investasi - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Akun	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	DPUPR	Gedung dan Bangunan	1.581.656.384,00	7.283.204.644,00	(5.701.548.260,00)	(78,28)

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Akun	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
2	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	46.440.000,00	46.440.000,00	0,00	0,00
	Jumlah		**1.628.096.384,00**	**7.329.644.644,00**	**(5.701.548.260,00)**	**(77,79)**

5.4.2.1.6.6 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud – LO

	TA 2023	TA 2022
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.500.975.916,16	1.892.655.044,26

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 terealisasi senilai Rp4.500.975.916,16 mengalami **kenaikan** senilai Rp2.608.320.871,90 atau 137,81% dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.892.655.044,26. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud disajikan pada tabel rincian berikut :

Tabel 5.164 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	20.000.000,00	74.930.000,00	(54.930.000,00)	(73,31)
2	Dinas Kesehatan	37.349.333,33	35.932.666,67	1.416.666,66	3,94
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	240.185.190,83	161.273.676,67	78.911.514,16	48,93
4	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	9.674.666,67	11.008.000,00	(1.333.333,33)	(12,11)
5	Dinas Perhubungan	31.223.200,00	26.493.500,00	4.729.700,00	17,85
6	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.299.466,67	10.573.616,67	33.725.850,00	318,96
8	Dinas Pertanahan	9.075.000,00	9.900.000,00	(825.000,00)	(8,33)
9	Kantor Penghubung	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.108.333,33	1.694.000,00	13.414.333,33	791,87
11	Badan Pendapatan Daerah	367.360.000,00	101.004.166,67	266.355.833,33	263,71
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	165.630.000,00	80.873.333,33	84.756.666,67	104,80
13	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	139.427.200,00	140.362.200,00	(935.000,00)	(0,67)
14	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	48.878.666,67	65.736.666,67	(16.858.000,00)	(25,64)
15	Kecamatan Biatan	658.333,33	790.000,00	(131.666,67)	(16,67)
16	Kecamatan Tanjung Redeb	10.166.860,00	1.694.476,67	8.472.383,33	500,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.885.500,00	33.885.500,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Dewan	12.710.501,90	9.856.000,00	2.854.501,90	28,96
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.373.265.840,38	1.039.675.607,58	1.333.590.232,80	128,27
20	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	35.918.000,00	20.491.674,00	15.426.326,00	75,28
21	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	9.990.000,00	2.497.500,00	7.492.500,00	300,00
22	Dinas Perikanan	6.882.000,00	1.720.500,00	5.161.500,00	300,00
23	Dinas Pertanian & Peterenakan	80.086.000,00	13.347.666,67	66.738.333,33	500,00
24	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	249.738.426,38	19.999.998,50	229.738.427,88	1.148,69
25	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	186.367.260,00	17.088.338,33	169.278.921,67	990,61

(dalam rupiah)

NO	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan Penurunan	%
26	Sekretariat Daerah	35.596.136,67	4.325.955,83	31.270.180,84	722,85
27	RSUD Dr. Rivai	337.500.000,00	0,00	337.500.000,00	100,00
JUMLAH		**4.500.975.916,16**	**1.892.655.044,26**	**2.608.320.871,90**	**137,81**

5.4.2.1.7 Beban Lain-lain - LO

Beban lain-lain	Tahun 2023	Tahun 2022
	0,00	0,00

Beban Lain-lain Tahun 2023 senilai Rp0,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp0,00. Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.165 Beban Lain - Lain – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Lain - Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.4.2.2 Beban Transfer - LO

Beban Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022
	348.203.838.088,00	213.086.112.300,00

Beban Transfer Tahun 2023 terealisasi senilai Rp348.203.838.088,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp135.117.725.788,00 atau 63,41% dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp213.086.112.300,00. Dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.166 Beban Transfer - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil	9.540.281.000,00	9.376.212.300,00	164.068.700,00	1,75
2	Beban Bantuan Keuangan	338.663.557.088,00	203.709.900.000,00	134.953.657.088,00	66,25
	Jumlah	**348.203.838.088,00**	**213.086.112.300,00**	**135.117.725.788,00**	**63,41**

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil - LO

Beban Bagi Hasil	Tahun 2023	Tahun 2022
	9.540.281.000,00	9.376.212.300,00

Beban Bagi Hasil Tahun 2023 terealisasi senilai Rp9.540.281.000 mengalami **kenaikan** senilai Rp164.068.700,00 atau 1,75% dibandingkan

dengan Tahun 2022 senilai Rp9.376.212.300,00. Beban Bagi Hasil disajikan pada rincian tabel berikut :

Tabel 5.167 Beban Bagi Hasil - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban Bagi Hasil				
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.447.633.000,00	8.278.687.000,00	168.946.000,00	2,04
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.092.648.000,00	1.097.525.300,00	(4.877.300,00)	(0,44)
3	Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Jumlah	**9.540.281.000,00**	**9.376.212.300,00**	**164.068.700,00**	**1,75**

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan - LO

Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2023	Tahun 2022
	338.663.557.088,00	203.709.900.000,00

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp338.663.557.088,00 mengalami **kenaikan** senilai Rp134.953.657.088,00 atau 66,25% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp203.709.900.000,00. Rincian Realisasi Beban Bantuan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 5.168 Beban Bantuan Keuangan - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban Bantuan Keuangan				
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	338.663.557.088,00	202.709.900.000,00	135.953.657.088,00	67,07
3	Beban Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**338.663.557.088,00**	**203.709.900.000,00**	**134.953.657.088,00**	**66,25**

5.4.2.3 Beban Tidak Terduga – LO

Beban Tak Terduga -LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	1.826.837.315,00	2.795.846.813,00

Beban Tidak Terduga - LO Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.826.837.315,00 mengalami **penurunan** senilai Rp969.009.498,00 atau 34,66% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp2.795.846.813,00. Beban Tidak Terduga terdapat pada dinas BPKAD di peruntukan untuk pembayaran ganti rugi Pemerintah Daerah atas putusan Pengadilan Negeri, pembayaran restitusi rumah dinas, bantuan sosial santunan kematian, bantuan sosial bencana alam, dan bantuan tak terduga lainnya.

Tabel 5.169 Beban Tidak Terduga – LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Beban Tidak Terduga				
1	- Beban Tidak Terduga	1.826.837.315,00	2.795.846.813,00	(969.009.498,00)	(34,66)
	Jumlah	**1.826.837.315,00**	**2.795.846.813,00**	**(969.009.498,00)**	**(34,66)**

5.4.2.4 Jumlah Beban Keseluruhan per OPD - LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Keseluruhan Per OPD	2.785.665.682.472,36	2.417.734.639.289,45

Jumlah Beban Pemerintah Kabupaten Berau pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp2.785.665.682.472,36 mengalami **kenaikan** senilai Rp367.931.043.182,90 atau 15,22% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp2.417.734.639.289,45. Rincian Beban per OPD Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.170 Beban Keseluruhan Per OPD - LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (penurunan)	(%)
1	Dinas Pendidikan	487.752.772.165,80	467.122.923.333,29	20.629.848.832,51	4,42
2	Dinas Kesehatan	227.102.314.793,23	206.265.627.339,06	20.836.687.454,17	10,10
3	RSUD Abd Rivai	195.054.802.846,88	195.183.193.412,63	(128.390.565,75)	(0,07)
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	617.488.862.257,82	574.528.395.037,16	42.960.467.220,66	7,48
5	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	20.989.743.471,33	17.775.611.493,00	3.214.131.978,33	18,08
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.775.490.830,00	26.981.582.583,72	793.908.246,28	2,94
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	24.097.013.935,00	18.140.165.513,00	5.956.848.422,00	32,84
8	Dinas Sosial	20.129.543.584,00	13.349.059.591,00	6.780.483.993,00	50,79
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	11.168.577.627,67	10.984.681.692,67	183.895.935,00	1,67
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	18.004.034.602,00	15.270.994.719,00	2.733.039.883,00	17,90
11	Dinas Pangan	10.860.005.564,00	10.164.343.106,00	695.662.458,00	6,84
12	Dinas Pertanahan	10.636.126.231,00	6.749.173.630,00	3.886.952.601,00	57,59
13	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	40.276.691.339,38	36.135.474.674,50	4.141.216.664,88	11,46
14	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	10.818.632.215,67	10.617.814.776,00	200.817.439,67	1,89
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	17.356.104.515,00	10.713.966.952,00	6.642.137.563,00	62,00
16	Dinas Perhubungan	37.128.982.667,00	35.224.649.436,00	1.904.333.231,00	5,41
17	Dinas Komunikasi & Informatika	18.706.715.071,83	11.818.440.646,67	6.888.274.425,16	58,28
18	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	25.713.795.068,27	26.519.619.292,12	(805.824.223,85)	(3,04)
19	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.945.920.209,00	8.797.919.151,00	4.148.001.058,00	47,15
20	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	51.438.489.689,00	30.767.907.184,00	20.670.582.505,00	67,18
21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	25.747.578.136,00	17.839.987.312,33	7.907.590.823,67	44,33
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	18.140.540.296,00	12.406.536.179,00	5.734.004.117,00	46,22

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / (penurunan)	(%)
23	Dinas Perikanan	28.009.398.074,00	19.999.141.415,00	8.010.256.659,00	40,05
24	Dinas Pertanian & Peternakan	36.978.597.269,00	28.053.604.440,67	8.924.992.828,33	31,81
25	Dinas Perkebunan	17.635.211.477,00	12.613.419.307,00	5.021.792.170,00	39,81
26	Sekretariat Daerah	112.577.314.506,32	97.548.937.090,83	15.028.377.415,49	15,41
27	Inspektorat	19.538.336.704,00	15.090.886.313,00	4.447.450.391,00	29,47
28	Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan	18.645.005.247,00	16.818.032.740,00	1.826.972.507,00	10,86
29	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	370.823.244.462,71	261.698.379.266,33	109.124.865.196,38	41,70
30	Badan Pendapatan Daerah	21.829.982.998,38	20.044.344.542,46	1.785.638.455,92	8,91
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	16.764.015.227,67	15.526.160.443,67	1.237.854.784,00	7,97
32	Set Dewan Pengurus KORPRI	1.864.414.482,00	2.124.838.178,00	(260.423.696,00)	(12,26)
33	Sekretariat DPRD	72.908.817.784,07	65.112.477.308,68	7.796.340.475,39	11,97
34	Kec Tg Redeb	25.250.845.562,00	20.495.437.529,67	4.755.408.032,33	23,20
35	Kec Gn Tabur	9.165.623.773,00	7.652.846.308,00	1.512.777.465,00	19,77
36	Kec Sambaliung	8.805.590.553,00	9.244.516.035,00	(438.925.482,00)	(4,75)
37	Kec Teluk Bayur	12.052.526.878,00	9.718.701.334,00	2.333.825.544,00	24,01
38	Kec Segah	5.365.883.132,00	4.922.011.287,00	443.871.845,00	9,02
39	Kec Kelay	5.019.109.720,00	4.427.770.105,00	591.339.615,00	13,36
40	Kec Pulau Derawan	3.875.123.494,00	3.754.516.866,00	120.606.628,00	3,21
41	Kec Talisayan	5.372.568.373,00	4.628.408.650,00	744.159.723,00	16,08
42	Kec Biduk - Biduk	4.883.029.967,00	4.550.054.137,00	332.975.830,00	7,32
43	Kec Maratua	5.574.034.317,00	5.117.654.995,00	456.379.322,00	8,92
44	Kec Tabalar	4.794.581.197,00	4.489.930.374,00	304.650.823,00	6,79
45	Kec Batu Putih	6.526.766.201,00	3.864.210.088,00	2.662.556.113,00	68,90
46	Kec Biatan	3.948.882.444,33	3.847.215.358,00	101.667.086,33	2,64
47	Badan Kesbang, Politik, dan Linmas	38.124.041.513,00	13.033.078.123,00	25.090.963.390,00	192,52
JUMLAH		**2.785.665.682.472,36**	**2.417.734.639.289,45**	**367.931.043.182,90**	**15,22**

5.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO

Surplus Defisit Non Operasional merupakan Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 adalah Rp2.811.992.836,88.

5.4.4. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa - LO

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 senilai Rp2.420.930.892.660,66 mengalami **kenaikan** senilai Rp884.571.914.421,00 atau 57,58% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp1.536.358.978.239,66.

5.4.5. Pos Luar Biasa - LO

Pos Luar Biasa - LO Tahun 2023 senilai Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp0,00. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

5.4.6. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan *surplus/defisit* dari kegitan non operasional dan pos luar biasa. *Surplus/Defisit* pada Laporan Operasional Tahun 2023 senilai Rp2.240.930.892.660,66 mengalami **kenaikan** senilai Rp884.571.914.421,00 atau 57,58% dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp1.536.358.978.239,66.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, Pendanaan, dan Transitoris. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas serta setara kas selama Tahun 2023 dan saldo Tahun 2022. Arus kas bersih pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dan Tahun 2022 terinci dalam tabel berikut.

Tabel 5.171 Arus Kas Bersih
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Arus Kas	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.438.121.959.499,07	1.290.553.566.858,99	1.147.568.392.640,08	88,92
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.347.338.652.588,55)	(1.028.052.171.915,00)	(1.319.286.480.673,55)	128,33
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	16.001.667,00	4.282.122,00	11.719.545,00	273,69
	Arus Kas Bersih	**90.799.308.577,52**	**262.505.677.065,99**	**(171.706.368.488,47)**	**(65,41)**

Data tabel pada Realisasi Arus Kas Bersih Tahun 2023 senilai Rp90.799.308.577,52 dan Tahun 2022 senilai Rp262.505.677.065,99. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya Realisasi Arus Kas Bersih mengalami **penurunan** senilai Rp171.706.368.488,47 atau 65,41%. Realisasi Arus Kas Bersih dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2023 senilai Rp2.438.121.126.959,07 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.172 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Aktivitas Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Arus Masuk Kas	4.691.271.145.578,33	3.160.832.875.224,90	1.530.438.270.353,43	48,42
2	Arus Keluar Kas	2.253.149.186.079,26	1.870.279.308.365,91	382.869.877.713,35	20,47
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**2.438.121.959.499,07**	**1.290.553.566.858,99**	**1.147.568.392.640,08**	**88,92**

a. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp4.691.271.145.578,33 dan Rp3.160.832.875.224,90. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Arus Masuk Kas Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.530.438.270.353,43 atau 48,42% yang terdiri dari :

1) Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 senilai Rp93.382.456.473,00 dan Tahun 2022 senilai Rp101.978.007.723,50. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 mengalami **penurunan** senilai Rp8.595.551.250,50 atau 8,43%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.173 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Hotel	6.881.753.285,00	4.987.958.867,00	1.893.794.418,00	37,97
2	Pajak Restoran	30.420.852.172,00	29.436.946.631,00	983.905.541,00	3,34
3	Pajak HIburan	344.784.773,00	144.936.232,00	199.848.541,00	137,89
4	Pajak Reklame	602.184.763,00	493.990.979,00	108.193.784,00	21,90
5	Pajak Penerangan Jalan	28.534.831.162,00	24.634.778.107,00	3.900.053.055,00	15,83
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Parkir	523.283.767,00	295.938.500,00	227.345.267,00	76,82
8	Pajak Air Bawah Tanah	509.520,00	1.192.232,00	(682.712,00)	(57,26)
9	Pajak Sarang Burung Walet	204.404.500,00	32.141.500,00	172.263.000,00	535,95
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	622.722.080,00	179.867.558,00	442.854.522,00	246,21
11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.410.938.473,00	4.928.729.536,00	5.482.208.937,00	111,23
12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.836.191.978,00	36.841.527.581,50	(22.005.335.603,50)	(59,73)
	Peneimaan Pajak Daerah	**93.382.456.473,00**	**101.978.007.723,50**	**(8.595.551.250,50)**	**(8,43)**

2) Penerimaan Retribusi Daerah

Saldo Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 senilai Rp14.933.984.444,00 dan Tahun 2022 senilai Rp10.477.919.521,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp4.456.064.923,00 atau 42,53% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.174 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum	11.048.053.093,00	8.516.136.598,00	2.531.916.495,00	29,73
2	Retribusi Jasa Usaha	2.781.389.108,00	1.869.881.357,00	911.507.751,00	48,75
3	Retribusi Perijinan Tertentu	1.104.542.243,00	91.901.566,00	1.012.640.677,00	1101,88
	Penerimaan Retribusi Daerah	**14.933.984.444,00**	**10.477.919.521,00**	**4.456.064.923,00**	**42,53**

3) Penerimaan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Saldo Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Tahun 2023 senilai Rp16.119.182.280,09 dan Tahun 2022 senilai Rp19.370.432.054,45. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Tahun 2023 mengalami **penurunan** senilai Rp3.251.249.774,36 atau 16,78% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.175 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - Perumda Bhakti Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - PT BPD Kaltimtara	14.636.429.316,09	14.109.010.255,45	527.419.060,64	3,74
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PT HutanSanggam Labanan Lestari	0,00	83.058.253,00	(83.058.253,00)	(100,00)
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - PT. Indo Pusaka Berau	368.386.667,00	4.803.033.538,00	(4.434.646.871,00)	(92,33)
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - Perumda Air Minum Batiwakal	1.114.366.297,00	375.330.008,00	739.036.289,00	196,90
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**16.119.182.280,09**	**19.370.432.054,45**	**(3.251.249.774,36)**	**(16,78)**

4) Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Realisasi Penerimaan Lain-lain Yang Sah Tahun 2023 senilai Rp161.955.118.611,24 dan Tahun 2022 senilai Rp167.224.432.998,95. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan

Lain-lain Yang Sah Tahun 2023 mengalami **penurunan** senilai Rp5.269.314.387,71 atau 3,15% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.176 Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	20.162.740.302,79	5.588.247.086,77	14.574.493.216,02	260,81
3	Penerimaan Bunga Deposito	36.364.480.049,19	7.012.115.682,96	29.352.364.366,23	418,59
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	664.592.690,98	534.400.135,82	130.192.555,16	24,36
5	Pendapatan Denda Pajak	155.564.419,00	192.538.529,00	(36.974.110,00)	(19,20)
6	Pendapatan Denda Retribusi	47.203.221,00	80.124.291,00	(32.921.070,00)	(41,09)
7	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	276920285,20	(276.920.285,20)	(100,00)
8	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	12.699.000,00	11.993.000,00	706.000,00	5,89
9	Pendapatan BLUD	89.860.617.262,60	145.679.508.556,16	(55.818.891.293,56)	(38,32)
10	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	25.144.444,00	26.353.000,00	(1.208.556,00)	(4,59)
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	450000,00	(450.000,00)	(100,00)
12	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.954.539.363,68	3.388.166.929,04	1.566.372.434,64	46,23
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.691.448.619,00	4.428.975.125,00	5.262.473.494,00	118,82
14	Pendapatan Denda pengakhiran Sewa BMD	2.480.239,00	4.640.378,00	(2.160.139,00)	(46,55)
15	Penerimaan Tak Terduga	13.609.000,00	0,00	13.609.000,00	100,00
	Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah	**161.955.118.611,24**	**167.224.432.998,95**	**(5.269.314.387,71)**	**(3,15)**

5) Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Saldo Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 senilai Rp3.569.745.798.771,00 dan Tahun 2022 senilai Rp2.342.689.292.530,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.227.056.506.241,00 atau 52,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.177 Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil	2.846.123.582.480,00	1.659.023.908.668,00	1.187.099.673.812,00	71,55
2	Penerimaan Dana Alokasi Umum	565.773.403.521,00	545.240.741.789,00	20.532.661.732,00	3,77
3	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	52.763.540.954,00	48.847.810.234,00	3.915.730.720,00	8,02
4	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	105.085.271.816,00	89.576.831.839,00	15.508.439.977,00	17,31
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**3.569.745.798.771,00**	**2.342.689.292.530,00**	**1.227.056.506.241,00**	**52,38**

6) Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Saldo Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2023 senilai Rp93.677.389.000,00 dan Tahun 2022 senilai Rp87.834.603.000,00 Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp5.842.786.000,00 atau 6,65% dengan rincian sebgai berikut :

Tabel 5.178 Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Dana Desa	93.677.389.000,00	87.834.603.000,00	5.842.786.000,00	6,65
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**93.677.389.000,00**	**87.834.603.000,00**	**5.842.786.000,00**	**6,65**

7) Penerimaan Transfer Antar Daerah

Saldo Realisasi Penerimaan Transfer antar Daerah Tahun 2023 senilai Rp733.634.381.955,00 dan Tahun 2022 senilai Rp431.258.187.397,00 Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp302.376.194.558,00 atau 70,11% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.179 Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi	509.121.881.955,00	336.097.187.397,00	173.024.694.558,00	51,48
2	Penerimaan Bantuan Keuangan	224.512.500.000,00	95.161.000.000,00	129.351.500.000,00	135,93
	Penerimaan Transfer Antar Daerah	**733.634.381.955,00**	**431.258.187.397,00**	**302.376.194.558,00**	**70,11**

8) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Saldo Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya untuk periode Tahun 2023 senilai Rp7.822.834.044,00 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00 Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya Tahun 2023 mengalami tidak mengalami **kenaikan/penurunan**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.180 Realisasi Penerimaan dari Pendapatan Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.822.834.044,00	0,00	7.822.834.044,00	100,00
	Jumlah	**7.822.834.044,00**	**0,00**	**7.822.834.044,00**	**100,00**

b. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2023 senilai Rp2.253.149.186.079,26 dan Tahun 2022 senilai Rp1.870.279.308.365,91. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Arus Keluar Kas Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp382.869.877.713,35 atau 20,47% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.181 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pembayaran Pegawai	812.677.295.576,65	788.533.936.225,62	24.143.359.351,03	3,06
2	Pembayaran Barang dan Jasa	834.570.312.408,61	698.410.047.416,22	136.160.264.992,39	19,50
3	Pembayaran Hibah	153.657.103.990,00	72.896.918.317,07	80.760.185.672,93	110,79
4	Pembayaran Bantuan Sosial	8.536.409.701,00	6.721.844.294,00	1.814.565.407,00	27,00
5	Pembayaran Tak Terduga	1.826.837.315,00	2.795.846.813,00	(969.009.498,00)	(34,66)
6	Pembayaran Bagi Hasil	9.540.281.000,00	9.376.212.300,00	164.068.700,00	1,75
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	432.340.946.088,00	291.544.503.000,00	140.796.443.088,00	48,29
	Jumlah Arus Kas Keluar	**2.253.149.186.079,26**	**1.870.279.308.365,91**	**382.869.877.713,35**	**20,47**

1) Saldo Realisasi Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2023 senilai Rp812.677.295.576,65 dan Tahun 2022 senilai Rp788.533.936.225,62. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp24.143.359.351,03 atau 3,06%.

2) Saldo Realisasi Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2023 senilai Rp834.570.312.408,61 dan Tahun 2022 senilai Rp698.410.047.416,22. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp136.160.264.992,39 atau 19,50%.

3) Saldo Realisasi Pembayaran Hibah Tahun 2023 senilai Rp153.657.103.990,00 dan Tahun 2022 senilai Rp72.896.918.317,07. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Hibah Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp80.760.185.672,93 atau 110,79%

4) Saldo Realisasi Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2023 senilai Rp8.536.409.701,00 dan Tahun 2022 senilai Rp6.721.844.294,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp1.814.565.407,00 atau 27,00%.

5) Saldo Realisasi Pembayaran Tak Terduga Tahun 2023 senilai Rp1.826.837.315,00 dan Tahun 2022 senilai Rp2.795.846.813,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Tak Terduga Tahun 2023 mengalami **penurunan** senilai Rp969.009.498,00 atau 34,66%

6) Saldo Realisasi Pembayaran Bagi Hasil Tahun 2023 senilai Rp9.540.281.000,00 dan Tahun 2022 senilai Rp9.376.212.300,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Bagi Hasil Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp164.067.700,00 atau 1,75%.

7) Saldo Realisasi Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2023 senilai Rp432.340.946.088,00 dan Tahun 2022 senilai Rp291.544.503.000,00. Jika

dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya Realisasi Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2023 mengalami **kenaikan** senilai Rp140.796.443.088,00 atau 48,29%.

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2023 defisit senilai Rp2.347.338.652.588,55 dan Tahun 2022 defisit senilai Rp1.028.052.171.915,00. Jika dibandingakan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mengalami **kenaikan** senilai Rp1.319.286.480.673,55 atau 128,33% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.182 Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Arus Kas Masuk	278.888.853,45	479.052.291,00	(200.163.437,55)	(41,78)
2	Arus Kas Keluar	2.347.617.541.442,00	1.028.531.224.206,00	1.319.086.317.236,00	128,25
	Arus Kas Bersih	**(2.347.338.652.588,55)**	**(1.028.052.171.915,00)**	**(1.319.286.480.673,55)**	128,33

Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp278.888.853,45 dan Rp479.052.291,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Arus Kas Masuk mengalami **penurunan** senilai Rp200.163.437,55 atau 41,78%.

Tabel 5.183 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	302.060,00	0,00	302.060,00	100,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	278.586.793,45	479.052.291,00	(200.465.497,55)	(41,85)
	Jumlah Arus Keluar	**278.888.853,45**	**479.052.291,00**	**(200.163.437,55)**	**(41,78)**

1) Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Saldo Realisasi Penjualan Atas Peralatan dan Mesin Tahun 2023 senilai Rp302.060,00 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Penjualan Atas Peralatan dan Mesin mengalami **kenaikan** senilai Rp302.060,00 atau 100%.

2) Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Saldo Realisasi Penjualan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp278.586.793,45 dan Tahun 2022 senilai Rp479.052.291,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun sebelumnya, Realisasi Penjualan

Gedung dan Bangunan mengalami **penurunan** senilai Rp200.163.437,55 atau 41,85%.

b. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp2.347.617.541.442,00 dan Rp1.028.531.224.206,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya, Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi mengalami **kenaikan** senilai Rp1.319.086.317.236,00 atau 128,25%, dengan dirincian sebagai berikut:

Tabel 5.184 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Perolehan Tanah	7.825.488.693,00	192.821.000,00	7.632.667.693,00	3.958
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	172.966.458.500,00	119.216.483.894,00	53.749.974.606,00	45,09
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	307.876.754.279,00	155.604.600.350,00	152.272.153.929,00	97,86
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.848.412.488.655,00	749.802.632.312,00	1.098.609.856.343,00	146,52
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.536.351.315,00	3.714.686.650,00	4.821.664.665,00	129,80
6	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Arus Keluar	**2.347.617.541.442,00**	**1.028.531.224.206,00**	**1.319.086.317.236,00**	**128,25**

1) Saldo Realisasi Perolehan Tanah Tahun 2023 senilai Rp7.825.488.693,00 dan Tahun 2022 senilai Rp192.821.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Tanah mengalami **kenaikan** senilai Rp7.632.667.693,00 atau 3.958%.

2) Saldo Realisasi Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 senilai Rp172.966.458.500,00 dan Tahun 2022 senilai Rp119.216.483.894,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Peralatan dan Mesin mengalami **kenaikan** senilai Rp53.749.974.606,00 atau 45,09%.

3) Saldo Realisasi Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp307.876.754.279,00 dan Tahun 2022 senilai Rp155.604.600.350,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Gedung dan Bangunan mengalami **kenaikan** senilai Rp152.272.153.929,00 atau 97,86%.

4) Saldo Realisasi Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 senilai Rp1.848.412.488.655,00 dan Tahun 2022 senilai Rp749.802.632.312,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami **kenaikan** senilai Rp1.098.609.856.343,00 atau 146,52%.

5) Saldo Realisasi Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 senilai Rp8.536.351.315,00 dan Tahun 2022 senilai Rp3.714.686.650,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Perolehan Aset Tetap Lainnya mengalami **kenaikan** senilai Rp4.821.664.665,00 atau 129,80%.

6) Saldo Realisasi Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah Tahun 2023 senilai Rp2.000.000.000,00 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya Realisasi Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah mengalami **kenaikan** senilai Rp2.000.000.000,00.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00, sehingga tidak terdapat kenaikan dan penurunan.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas transitoris Tahun 2023 senilai Rp16.001.667,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.185 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Arus Kas Masuk	370.236.107.815,00	177.419.345.546,00	192.816.762.269,00	108,68
2	Arus Kas Keluar	370.220.106.148,00	177.415.063.424,00	192.805.042.724,00	108,67
	Arus Kas Bersih	**16.001.667,00**	**4.282.122,00**	**11.719.545,00**	**273,69**

a. Arus Masuk Kas

Saldo Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 senilai Rp370.236.107.815,00 dan Tahun 2022 senilai Rp177.419.345.546,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris mengalami **kenaikan** senilai Rp192.816.762.269,00 atau 108,68% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.186 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	370.236.107.815,00	177.417.980.546,00	192.818.127.269,00	108,68
2	Koreksi Saldo Awal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Saldo Awal BOSNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi Saldo Awal JKN	0,00	1.365.000,00	(1.365.000,00)	(100,00)
5	Remunerasi	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
6	TDF-TKD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk	**370.236.107.815,00**	**177.419.345.546,00**	**192.816.762.269,00**	**108,68**

1) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

Arus Kas Masuk Tahun 2023 senilai Rp370.236.107.815,00 merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) oleh BUD yang dipotong dari SP2D atau diterima secara tunai serta Saldo Rekening Bank Bendahara pengeluaran OPD atas transaksi yang belum disalurkan kepada penerima. Arus Masuk Kas Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2022 senilai Rp177.417.980.546,00, mengalami **kenaikan** senilai Rp192.818.127.269,00 atau 108,68% dari Tahun 2023.

2) Koreksi Saldo Awal BLUD

Arus Kas Masuk Tahun 2023 senilai Rp0,00, sementara Tahun 2022 senilai Rp0,00 adalah pembayaran atas Piutang Pegawai BLUD yang merupakan bagian dari SILPA BLUD.

3) Koreksi Saldo Awal BOSNAS

Arus kas masuk Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00.

4) Koreksi Saldo Awal JKN

Arus Kas Masuk Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp1.365.000 yang merupakan koreksi tambah SiLPA pada saldo awal Dinas Kesehatan (Puskesmas Sambaliung).

b. Arus Keluar Kas

Saldo Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 senilai Rp370.220.106.148,00 dan Tahun 2022 senilai Rp177.415.063.424,00. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris mengalami **kenaikan** senilai Rp192.805.042.724,00 atau 108,67%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.187 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	370.214.233.306,00	177.415.063.424,00	192.799.169.882,00	108,67
2	Koreksi Saldo BOS	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
3	Koreksi Saldo Awal PKM Long Laai (FKTP)	72.842,00	0,00	72.842,00	100,00
	Jumlah Arus Keluar	**370.220.106.148,00**	**177.415.063.424,00**	**192.805.042.724,00**	**108,67%**

5.5.5 Kenaikan/ Penurunan Kas

Kas selama Tahun 2023 senilai Rp90.799.308.577,52 dan Tahun 2022 senilai Rp262.505.677.065,99 mengalami **penurunan** kas senilai Rp171.706.368.488,47 atau 65,41%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.188 Kenaikan dan Penurunan Kas
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.438.121.959.499,07	1.290.553.566.858,99	1.147.568.392.640,08	88,92
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.347.338.652.588,55)	(1.028.052.171.915,00)	(1.319.286.480.673,55)	128,33
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	16.001.667,00	4.282.122,00	11.719.545,00	273,69
	Kenaikan (Penurunan) Kas	**90.799.308.577,52**	**262.505.677.065,99**	**(171.706.368.488,47)**	**(65,41)**

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo awal Kas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah senilai Rp802.449.147.219,52 dan Rp539.943.470.153,53. Jika dibandingkan Tahun sebelumnya, Saldo Awal Kas mengalami **kenaikan** senilai Rp262.505.677.065,99 atau 48,62%.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah senilai Rp893.248.455.797,04 dan Rp802.449.147.219,52. Jika dibandingkan Tahun sebelumnya, Saldo Akhir Kas mengalami **kenaikan** senilai Rp90.799.308.577,52 atau 11,32%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.189 Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	821.259.740.624,13	676.574.033.624,96	144.685.706.999,17	21,39
2	Kas di Bendahara Penerimaan	65.356.000,00	68.930.500,00	(3.574.500,00)	(5,19)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.200,00	(1.200,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	67.648.687.298,19	123.594.394.739,98	(55.945.707.441,79)	(45,27)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP (JKN)	1.651.431.753,56	672.602.218,43	978.829.535,13	145,53
6	Kas di Bendahara BOS	1.226.486.066,16	1.517.956.038,20	(291.469.972,04)	(19,20)
7	Kas Di Bendahara Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kas Lainnya (PFK, Pendapatan Diterima Dimuka)	1.396.754.055,00	21.228.897,95	1.375.525.157,05	6.479,49
	Saldo Akhir Kas	**893.248.455.797,04**	**802.449.147.219,52**	**90.799.308.577,52**	**11,32**

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan

serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan, dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022, dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.190 Laporan Perubahan Ekuitas
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
EKUITAS AWAL	10.420.298.469.390,87	8.892.695.087.298,67
SURPLUS/DEFISIT - LO	2.420.930.892.660,66	1.536.358.978.239,66
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	**(7.892.020.451,03)**	**(8.755.596.147,46)**
Koreksi Ekuitas - Kas	0,00	1.365.000,00
Koreksi Ekuitas - Piutang	0,00	(3.708.499.859,00)
Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan	757.482.116,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00	(3.342.366.753,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(8.649.502.567,03)	(1.706.094.535,46)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	**12.833.337.341.600,50**	**10.420.298.469.390,87**

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 senilai Rp10.420.298.469.390,87 merupakan saldo Ekuitas akhir Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Audited.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Penambahan Ekuitas Tahun 2023 bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp2.420.930.892.660,66 yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada LPE terdapat koreksi Ekuitas senilai Rp7.892.020.451,03. Hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar.

Tabel 5.191 Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAMBAH	KURANG	SALDO
1	PT Hutan Sanggam Berau	547.632,00		547.632,00
2	Perumda Air Minum Batiwakkal		13.303.199,00	(12.755.567,00)
3	PT Indo Pusaka Berau	759.156.951,86		746.401.384,86
4	Koreksi Saldo Awal BOSNAS TKN Maratua		5.800.000,00	740.601.384,86
5	Koreksi Saldo Awal PKM Long Laai (FKTP)		72.842,00	740.528.542,86
6	Pencatatan Tanah Persil berdasarkan Telaahan Staf No : 030/525/BPKAD-E/2023 Luas 400 Meter persegi di Jl. Dr Soetomo Tanjung Redeb	134.000.000,00		874.528.542,86

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAMBAH	KURANG	SALDO
7	**Koreksi Piutang Pajak (BAPENDA)**	3.835.500.325,32		4.710.028.868,18
8	Pajak Restoran		258.245.900,00	
9	Pajak Reklame	0,09		
10	Pajak Penerangan Jalan	175.121,23		
11	Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.778.164.546,00		
12	Koreksi Piutang Retribusi Bapenda (Sewa Tanah & Bangunan, Sewa Rumah Dinas)		766.000,00	4.709.262.868,18
13	Koreksi Piutang (RSUD A. Rivai)	331.299.431,00		5.040.562.299,18
14	Koreksi Penyusutan (BPBD)	458.968.229,00		5.499.530.528,18
15	Hibah keluar Tanah ke KPU Nomor BAST No : 030/1918 /BPKAD - E /HIBAH TANAH / 2019 tanggal 31 Juli 2019		948.000.000,00	4.551.530.528,18
16	Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Nomor : 030/918/BAST/BPKAD-E/IV/2020 berupa Tanah seluas 20,000 M2 kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Berau		745.033.112,00	3.806.497.416,18
17	Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Nomor : 030/918/BAST/BPKAD-E/IV/2020 berupa Tanah seluas 10,000 M2 kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Berau		160.000.000,00	3.646.497.416,18
18	Hibah Keluar gedung dan bangunan ke KPU Nomor BAST No : 030/1918 /BPKAD - E /HIBAH TANAH / 2019 tanggal 31 Juli 2019		930.437.500,00	2.716.059.916,18
19	Pekerjaan Kontruksi Pembangunan SMPN Teluk Bayur	29.389.474,72		2.745.449.390,90
20	Ak Amortisasi		11.985.442.128,75	(9.239.992.737,85)
21	Piutang Wisma Atlit (BPKAD)	235.439.000,00		(9.004.553.737,85)
22	Koreksi Persediaan di BPBD	746.510.000,00		(8.258.043.737,85)
23	Koreksi Persediaan di Dispusip	10.625.468,00		(8.247.418.269,85)
24	Koreksi Persediaan di DPPKBP3A	346.648,00		(8.247.071.621,85)
25	Koreksi kurang saji beban amortisasi pada DPUPR	355.051.170,82		(7.892.020.451,03)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas akhir Tahun 2023 senilai Rp 11.833.337.341.600,50 yang terdiri dari Ekuitas awal senilai Rp10.420.298.469.390,87 ditambah *Surplus/Defisit LO* senilai Rp2.420.930.892.660,66 dan dikurangi koreksi Ekuitas senilai Rp7.892.020.451,03.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Pengungkapan Lainnya atas Dampak Pandemi Covid-19

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah mempertimbangkan/menggambarkan peristiwa setelah tanggal pelaporan, Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mempengaruhi terhadap posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan Ekuitas, dampak tersebut antara lain berupa:

a. Potensi ketertagihan Piutang Pemerintah Daerah yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi Covid-19 termasuk estimasi atas dampak terhadap penyisihan Piutang tersebut;

b. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajiban, khususnya kewajiban jangka pendek apakah terganggu akibat adanya perubahan kebijakan anggaran pada Tahun 2023 sebagai dampak penanganan pandemi Covid-19;

c. Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terkait proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang tidak dilanjutkan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, termasuk yang terkait dengan eskalasi harga yang telah dilakukan atas proyek tersebut; dan

d. Rencana Program Penanganan Krisis di tingkat Pemerintah Daerah dan dampaknya terhadap posisi dan pengelolaan keuangan.

6.2. Domisili

Kabupaten Berau secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang, karena berada pada jalur Lintas Utara Pulau Kalimantan, antar Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Berau terletak pada posisi antara 1160 sampai dengan 1190 bujur timur dan 10 sampai dengan 20 33’ lintang utara.

Kabupaten Berau di bentuk berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); dan

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Berau.

Luas wilayah Kabupaten Berau 34.127,47 Km^2, terdiri dari luas laut 11.962,42 Km^2 dan luas daratan 21.951,71 Km^2. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Berau mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan
b. Sebelah Timur : Laut Sulawesi

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Timur
d. Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Malinau

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Berau;
b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023;
c. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023;
d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023; dan
e. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023.

6.4. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Berau dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023, ditunjang dengan susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut.

a. Sekretariat
   1) Sekretariat Daerah
   2) Sekretariat DPRD
b. Badan
   1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
   2) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
   3) Badan Pendapatan Daerah
   4) Badan Kesbang, Politik dan Linmas
   5) Badan Satuan Polisi Pamong Praja
   6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   7) RSUD Dr. A. Rivai
   8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
   9) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
   10) Inspektorat
c. Dinas
   1) Dinas Perhubungan
   2) Dinas Komunikasi dan Informatika
   3) Dinas Kesehatan
   4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
   5) Dinas Pangan

6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8) Dinas Pertanahan
9) Dinas Pertanian dan Peternakan
10) Dinas Perkebunan
11) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
12) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13) Dinas Pendidikan
14) Dinas Perikanan
15) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
18) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19) Dinas Sosial
20) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
22) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

d. Kantor
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
e. Perangkat Daerah lainnya

1) Kecamatan Tanjung Redeb
2) Kecamatan Tabalar
3) Kecamatan Talisayan
4) Kecamatan Teluk Bayur
5) Kecamatan Batu Putih
6) Kecamatan Biatan
7) Kecamatan Biduk-Biduk
8) Kecamatan Gunung Tabur
9) Kecamatan Kelay
10) Kecamatan Maratua
11) Kecamatan Pulau Derawan
12) Kecamatan Sambaliung
13) Kecamatan Segah

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun periode pelaporan, informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peran antara lain akuntabilitas, manajemen dan transparansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. LKPD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Berau selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi Laporan Keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna meskipun upaya telah kami lakukan.

Pemerintah Kabupaten Berau bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah. Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan, masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023 ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Berau mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Kabupaten Berau di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat atas segala upaya yang telah dilakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Berau yang lebih baik.

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

DAFTAR LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Penyaluran Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2023

REALISASI PENYALURAN DANA DESA PER DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 1

No.	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan	Status Desa	TOTAL PAGU	Total Penyaluran	%
1	6.403.122.005	Ampen Medang	Batu Putih	BERKEMBANG	847.081.000,00	847.081.000,00	100
2	6.403.122.006	Balikukup	Batu Putih	BERKEMBANG	937.773.000,00	937.773.000,00	100
3	6.403.122.003	Batu Putih	Batu Putih	MANDIRI	869.280.000,00	869.280.000,00	100
4	6.403.042.012	Batu Rajang	Segah	BERKEMBANG	696.043.000,00	696.043.000,00	100
5	6.403.062.011	Batu-Batu	Gunung Tabur	BERKEMBANG	871.475.000,00	871.475.000,00	100
6	6.403.032.015	Bena Baru	Sambaliung	MAJU	900.180.000,00	900.180.000,00	100
7	6.403.132.006	Biatan Bapinang	Biatan	BERKEMBANG	717.224.000,00	717.224.000,00	100
8	6.403.132.007	Biatan Baru	Biatan	BERKEMBANG	665.578.000,00	665.578.000,00	100
9	6.403.132.002	Biatan Ilir	Biatan	MAJU	936.703.000,00	936.703.000,00	100
10	6.403.132.004	Biatan Lempake	Biatan	MAJU	734.083.000,00	734.083.000,00	100
11	6.403.132.001	Biatan Ulu	Biatan	BERKEMBANG	758.562.000,00	758.562.000,00	100
12	6.403.082.001	Biduk-Biduk	Biduk-Biduk	MAJU	1.151.528.000,00	1.151.528.000,00	100
13	6.403.062.002	Birang	Gunung Tabur	BERKEMBANG	677.520.000,00	677.520.000,00	100
14	6.403.112.001	Bohe Silian	Maratua	BERKEMBANG	725.241.000,00	725.241.000,00	100
15	6.403.042.009	Bukit Makmur	Segah	MAJU	1.045.394.000,00	1.045.394.000,00	100
16	6.403.132.008	Bukit Makmur Jaya	Biatan	BERKEMBANG	818.647.000,00	818.647.000,00	100
17	6.403.022.015	Bumi Jaya	Talisayan	MAJU	804.542.000,00	804.542.000,00	100
18	6.403.102.006	Buyung-Buyung	Tabalar	BERKEMBANG	844.744.000,00	844.744.000,00	100
19	6.403.022.014	Campur Sari	Talisayan	MAJU	1.081.793.000,00	1.081.793.000,00	100
20	6.403.022.023	Capuak	Talisayan	BERKEMBANG	1.055.317.000,00	1.055.317.000,00	100
21	6.403.022.002	Dumaring	Talisayan	MAJU	1.798.130.000,00	1.798.130.000,00	100
22	6.403.022.021	Eka Sapta	Talisayan	MAJU	1.214.727.000,00	1.214.727.000,00	100
23	6.403.082.009	Giring-Giring	Biduk-Biduk	MAJU	732.280.000,00	732.280.000,00	100
24	6.403.042.007	Gunung Sari	Segah	MAJU	1.077.994.000,00	1.077.994.000,00	100
25	6.403.032.011	Gurimbang	Sambaliung	MANDIRI	877.919.000,00	877.919.000,00	100
26	6.403.042.010	Harapan Jaya	Segah	MAJU	865.783.000,00	865.783.000,00	100
27	6.403.102.007	Harapan Maju	Tabalar	MAJU	767.057.000,00	767.057.000,00	100
28	6.403.032.004	Inaran	Sambaliung	MAJU	886.054.000,00	886.054.000,00	100
29	6.403.132.003	Karangan	Biatan	BERKEMBANG	727.179.000,00	727.179.000,00	100
30	6.403.072.009	Kasai	Pulau Derawan	MAJU	1.832.315.000,00	1.832.315.000,00	100
31	6.403.122.002	Kayu Indah	Batu Putih	BERKEMBANG	766.682.000,00	766.682.000,00	100
32	6.403.092.004	Labanan Jaya	Teluk Bayur	MANDIRI	908.229.000,00	908.229.000,00	100
33	6.403.092.006	Labanan Makarti	Teluk Bayur	MAJU	883.610.000,00	883.610.000,00	100
34	6.403.092.005	Labanan Makmur	Teluk Bayur	MANDIRI	867.789.000,00	867.789.000,00	100
35	6.403.012.006	Lesan Dayak	Kelay	BERKEMBANG	601.043.000,00	601.043.000,00	100
36	6.403.122.004	Lobang Kelatak	Batu Putih	BERKEMBANG	807.565.000,00	807.565.000,00	100
37	6.403.042.004	Long Ayan	Segah	BERKEMBANG	1.437.403.000,00	1.437.403.000,00	100
38	6.403.042.003	Long Ayap	Segah	BERKEMBANG	826.610.000,00	826.610.000,00	100
39	6.403.012.007	Long Beliu	Kelay	MAJU	677.552.000,00	677.552.000,00	100
40	6.403.012.008	Long Duhung	Kelay	BERKEMBANG	612.382.000,00	612.382.000,00	100
41	6.403.012.010	Long Keluh	Kelay	BERKEMBANG	607.533.000,00	607.533.000,00	100
42	6.403.042.001	Long La'ai	Segah	BERKEMBANG	780.181.000,00	780.181.000,00	100
43	6.403.012.009	Long Lamcin	Kelay	BERKEMBANG	617.557.000,00	617.557.000,00	100
44	6.403.032.001	Long Lanuk	Sambaliung	BERKEMBANG	693.520.000,00	693.520.000,00	100
45	6.403.012.011	Long Pelay	Kelay	BERKEMBANG	665.425.000,00	665.425.000,00	100
46	6.403.012.013	Long Sului	Kelay	BERKEMBANG	618.918.000,00	618.918.000,00	100
47	6.403.062.004	Maluang	Gunung Tabur	MAJU	1.197.803.000,00	1.197.803.000,00	100
48	6.403.132.005	Manunggal Jaya	Biatan	BERKEMBANG	723.058.000,00	723.058.000,00	100
49	6.403.012.012	Mapulu	Kelay	TERTINGGAL	670.505.000,00	670.505.000,00	100
50	6.403.062.010	Melati Jaya	Gunung Tabur	BERKEMBANG	906.533.000,00	906.533.000,00	100
51	6.403.012.001	Merabu	Kelay	MAJU	665.632.000,00	665.632.000,00	100
52	6.403.062.008	Merancang Ilir	Gunung Tabur	BERKEMBANG	804.225.000,00	804.225.000,00	100
53	6.403.062.007	Merancang Ulu	Gunung Tabur	MAJU	825.767.000,00	825.767.000,00	100
54	6.403.012.003	Merapun	Kelay	MAJU	726.143.000,00	726.143.000,00	100
55	6.403.012.005	Merasa	Kelay	MAJU	727.124.000,00	727.124.000,00	100
56	6.403.012.004	Muara Lesan	Kelay	MAJU	759.908.000,00	759.908.000,00	100
57	6.403.012.002	Panaan	Kelay	BERKEMBANG	802.941.000,00	802.941.000,00	100
58	6.403.042.008	Pandan Sari	Segah	BERKEMBANG	753.491.000,00	753.491.000,00	100
59	6.403.082.002	Pantai Harapan	Biduk-Biduk	BERKEMBANG	1.027.433.000,00	1.027.433.000,00	100
60	6.403.112.002	Payung-Payung	Maratua	BERKEMBANG	687.600.000,00	687.600.000,00	100

No.	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan	Status Desa	TOTAL PAGU	Total Penyaluran	%
61	6.403.072.001	Pegat Batumbuk	Pulau Derawan	BERKEMBANG	1.457.274.000,00	1.457.274.000,00	100
62	6.403.032.005	Pegat Bukur	Sambaliung	MANDIRI	1.163.895.000,00	1.163.895.000,00	100
63	6.403.032.009	Pesayan	Sambaliung	BERKEMBANG	872.764.000,00	872.764.000,00	100
64	6.403.032.008	Pilanjau	Sambaliung	MAJU	805.033.000,00	805.033.000,00	100
65	6.403.062.009	Pulau Besing	Gunung Tabur	BERKEMBANG	606.883.000,00	606.883.000,00	100
66	6.403.072.004	Pulau Derawan	Pulau Derawan	MANDIRI	1.020.868.000,00	1.020.868.000,00	100
67	6.403.042.006	Punan Mahkam	Segah	BERKEMBANG	1.393.254.000,00	1.393.254.000,00	100
68	6.403.042.005	Punan Malinau	Segah	MAJU	1.806.717.000,00	1.806.717.000,00	100
69	6.403.042.002	Punan Segah	Segah	BERKEMBANG	1.192.597.000,00	1.192.597.000,00	100
70	6.403.022.019	Purna Sari Jaya	Talisayan	BERKEMBANG	969.502.000,00	969.502.000,00	100
71	6.403.032.006	Rantau Panjang	Sambaliung	BERKEMBANG	688.906.000,00	688.906.000,00	100
72	6.403.062.006	Sambakungan	Gunung Tabur	MAJU	964.590.000,00	964.590.000,00	100
73	6.403.062.005	Samburakat	Gunung Tabur	BERKEMBANG	819.238.000,00	819.238.000,00	100
74	6.403.032.010	Sei Bebanir Bangun	Sambaliung	MANDIRI	1.224.970.000,00	1.224.970.000,00	100
75	6.403.102.005	Semurut	Tabalar	BERKEMBANG	703.555.000,00	703.555.000,00	100
76	6.403.012.014	Sido Bangen	Kelay	MAJU	1.000.173.000,00	1.000.173.000,00	100
77	6.403.042.013	Siduung Indah	Segah	BERKEMBANG	840.330.000,00	840.330.000,00	100
78	6.403.032.007	Suaran	Sambaliung	MAJU	937.744.000,00	937.744.000,00	100
79	6.403.022.018	Suka Murya	Talisayan	MAJU	1.038.032.000,00	1.038.032.000,00	100
80	6.403.032.012	Sukan Tengah	Sambaliung	MANDIRI	833.077.000,00	833.077.000,00	100
81	6.403.122.007	Sumber Agung	Batu Putih	MAJU	931.650.000,00	931.650.000,00	100
82	6.403.022.017	Sumber Mulya	Talisayan	MAJU	2.097.041.000,00	2.097.041.000,00	100
83	6.403.102.002	Tabalar Muara	Tabalar	MAJU	728.458.000,00	728.458.000,00	100
84	6.403.102.004	Tabalar Ulu	Tabalar	BERKEMBANG	746.569.000,00	746.569.000,00	100
85	6.403.022.003	Talisayan	Talisayan	MANDIRI	1.968.829.000,00	1.968.829.000,00	100
86	6.403.072.003	Tanjung Batu	Pulau Derawan	MANDIRI	2.224.986.000,00	2.224.986.000,00	100
87	6.403.032.014	Tanjung Perangat	Sambaliung	MAJU	752.084.000,00	752.084.000,00	100
88	6.403.082.003	Tanjung Prepat	Biduk-Biduk	MAJU	902.462.000,00	902.462.000,00	100
89	6.403.062.001	Tasuk	Gunung Tabur	MAJU	919.645.000,00	919.645.000,00	100
90	6.403.112.003	Teluk Alulu	Maratua	BERKEMBANG	790.407.000,00	790.407.000,00	100
91	6.403.112.004	Teluk Harapan	Maratua	MAJU	684.343.000,00	684.343.000,00	100
92	6.403.072.002	Teluk Semanting	Pulau Derawan	MAJU	837.572.000,00	837.572.000,00	100
93	6.403.082.008	Teluk Sulaiman	Biduk-Biduk	MAJU	848.315.000,00	848.315.000,00	100
94	6.403.082.004	Teluk Sumbang	Biduk-Biduk	BERKEMBANG	803.208.000,00	803.208.000,00	100
95	6.403.122.001	Tembudan	Batu Putih	MANDIRI	885.970.000,00	885.970.000,00	100
96	6.403.042.011	Tepian Buah	Segah	MAJU	921.677.000,00	921.677.000,00	100
97	6.403.102.003	Tubaan	Tabalar	MAJU	764.665.000,00	764.665.000,00	100
98	6.403.032.002	Tumbit Dayak	Sambaliung	MAJU	1.099.516.000,00	1.099.516.000,00	100
99	6.403.092.001	Tumbit Melayu	Teluk Bayur	BERKEMBANG	890.400.000,00	890.400.000,00	100
100	6.403.022.016	Tunggal Bumi	Talisayan	BERKEMBANG	1.971.882.000,00	1.971.882.000,00	100
Jumlah					**93.677.389.000,00**	**93.677.389.000,00**	



LAMPIRAN 2

Penyaluran Realisasi Alokasi Dana Kampung (ADK)
Tahun Anggaran 2023

REKAPITULASI SP2D BANKEU TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
1	16.01/04.0/000002/LS/2023	17/01/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Pemotongan BPJS KESEHATAN 1% APARAT KAMPUNG BULAN JANUARI	BPJS KESEHATAN	19.371.993,00	TJG REDEB	
2	16.01/04.0/000024/LS/2023	21/02/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Pemotongan BPJS KESEHATAN 1% APARAT KAMPUNG BULAN FEBRUARI	BPJS KESEHATAN	19.519.029,00	TJG REDEB	
3	16.01/04.0/000062/LS/2023			5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Pemotongan BPJS KESEHATAN 1% APARAT KAMPUNG BULAN MARET	BPJS KESEHATAN	19.666.065,00	TJG REDEB	
4	16.01/04.0/000062/LS/2023	31/03/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung Pegat Bukur Kec. Lobang Kelatak Tahun 2023	KAKAM PEGAT BUKUR	992.600.000,00	PEGAT BUKUR	THP 1
5	16.01/04.0/000066/LS/2023	03/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LABANAN MAKARTI Kec. TELUK BAYUR Tahun 2023	KAKAM LABANAN MAKARTI	1.116.000.000,00	LABANAN MAKARTI	THP 1
6	16.01/04.0/000091/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung MUARA LESAN Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM MUARA LESAN	842.000.000,00	MUARA LESAN	THP 1
7	16.01/04.0/000092/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LONG AYAP Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM LONG AYAP	836.000.000,00	LONG AYAP	THP 1
8	16.01/04.0/000093/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung SIDO BANGEN Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM SIDO BANGEN	916.000.000,00	SIDO BANGEN	THP 1
9	16.01/04.0/000094/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TEPIAN BUAH Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM TEPIAN BUAH	908.900.000,00	TEPIAN BUAH	THP 1
10	16.01/04.0/000095/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PANAAN Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM PANAAN	818.900.000,00	PANAAN	THP 1
11	16.01/04.0/000096/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TASUK Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM TASUK	1.161.800.000,00	TASUK	THP 1
12	16.01/04.0/000097/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung KAYU INDAH Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM KAYU INDAH	911.800.000,00	KAYU INDAH	THP 1
13	16.01/04.0/000098/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung MERAPUN Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM MERAPUN	1.030.400.000,00	MERAPUN	THP 1

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
14	16.01/04.0/000099/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TUMBIT DAYAK Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM TUMBIT DAYAK	1.159.700.000,00	TUMBIT DAYAK	THP 1
15	16.01/04.0/000100/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TANJUNG PEREPAT Kec. BIDUK2 Tahun 2023	KAKAM TANJUNG PEREPAT	983.900.000,00	TANJUNG PEREPAT	THP 1
16	16.01/04.0/000101/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BUKIT MAKMUR Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM BUKIT MAKMUR	897.500.000,00	BUKIT MAKMUR	THP 1
17	16.01/04.0/000102/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PANTAI HARAPAN Kec. BIDUK2 Tahun 2023	KAKAM PANTAI HARAPAN	967.100.000,00	PANTAI HARAPAN	THP 1
18	16.01/04.0/000103/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BUKIT MAKMUR JAYA Kec. BIATAN Tahun 2023	KAKAM BUKIT MAKMUR JAYA	967.000.000,00	BUKIT MAKMUR JAYA	THP 1
19	16.01/04.0/000104/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TUNGGAL BUMI Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM TUNGGAL BUMI	906.400.000,00	TUNGGAL BUMI	THP 1
20	16.01/04.0/000105/LS/2023	05/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TELUK SULAIMAN Kec. BIDUK2 Tahun 2023	KAKAM TELUK SULAIMAN	969.800.000,00	TELUK SULAIMAN	THP 1
21	16.01/04.0/000120/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BATU PUTIH Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM BATU PUTIH	1.277.900.000,00	BATU PUTIH	THP 1
22	16.01/04.0/000121/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LABANAN JAYA Kec. TELUK BAYUR Tahun 2023	KAKAM LABANAN JAYA	1.132.700.000,00	LABANAN JAYA	THP 1
23	16.01/04.0/000122/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LOBANG KELATAK Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM LOBANG KELATAK	813.800.000,00	LOBANG KELATAK	THP 1
24	16.01/04.0/000134/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BUMI JAYA Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM BUMI JAYA	1.018.700.000,00	BUMI JAYA	THP 1
25	16.01/04.0/000135/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung SUKA MURYA Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM SUKA MURYA	899.000.000,00	SUKA MURYA	THP 1
26	16.01/04.0/000136/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TALISAYAN Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM TALISAYAN	1.418.500.000,00	TALISAYAN	THP 1

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
27	16.01/04.0/000137/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung CAMPUR SARI Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM CAMPUR SARI	911.600.000,00	CAMPUR SARI	THP 1
28	16.01/04.0/000138/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung EKA SAPTA Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM EKA SAPTA	912.800.000,00	EKA SAPTA	THP 1
29	16.01/04.0/000139/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TELUK SUMBANG Kec. BIDUK2 Tahun 2023	KAKAM TELUK SUMBANG	1.005.500.000,00	TELUK SUMBANG	THP 1
30	16.01/04.0/000140/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BALIKUKUP Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM BALIKUKUP	937.100.000,00	BALIKUKUP	THP 1
31	16.01/04.0/000141/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PULAU BESING Kec. GUNUNG TABUR Tahun 2023	KAKAM PULAU BESING	776.000.000,00	PULAU BESING	THP 1
32	16.01/04.0/000142/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TEMBUDAN Kec.BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM TEMBUDAN	1.175.000.000,00	TEMBUDAN	THP 1
33	16.01/04.0/000143/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LESAN DAYAK Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM LESAN DAYAK	788.900.000,00	LESAN DAYAK	THP 1
34	16.01/04.0/000144/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung MERANCANG ULU Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM MERANCANG ULU	1.019.300.000,00	MERANCANG ULU	THP 1
35	16.01/04.0/000148/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BIDUK2 Kec. BIDUK2 Tahun 2023	KAKAM BIDUK2	1.111.100.000,00	BIDUK2	THP 1
36	16.01/04.0/000149/LS/2023	11/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TUBAAN Kec. TABALAR Tahun 2023	KAKAM TUBAAN	1.025.600.000,00	TUBAAN	THP 1
37	16.01/04.0/000153/LS/2023	12/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung MELATI JAYA Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM MELATI JAYA	1.008.500.000,00	MELATI JAYA	THP 1
38	16.01/04.0/000154/LS/2023	12/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung GIRING2 Tahun 2023	KAKAM GIRING2	1.111.100.000,00	GIRING2	THP 1
39	16.01/04.0/000156/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung CAPUAK Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM CAPUAK	974.600.000,00	CAPUAK	THP 1

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
40	16.01/04.0/000157/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung SUMBER MULYA Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM SUMBER MULYA	866.300.000,00	SUMBER MULYA	THP 1
41	16.01/04.0/000158/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung DUMARING Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM DUMARING	1.019.600.000,00	DUMARING	THP 1
42	16.01/04.0/000159/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung INARAN Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM INARAN	920.000.000,00	INARAN	THP 1
43	16.01/04.0/000160/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung SAMBAKUNGAN Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM SAMBAKUNGAN	1.211.400.000,00	SAMBAKUNGAN	THP 1
44	16.01/04.0/000161/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BIRANG Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM BIRANG	964.400.000,00	BIRANG	THP 1
45	16.01/04.0/000162/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung MALUANG Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM MALUANG	1.468.700.000,00	MALUANG	THP 1
46	16.01/04.0/000163/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TELUK SEMANTING Kec. P. DERAWAN Tahun 2023	KAKAM TELUK SEMANTING	877.100.000,00	TELUK SEMANTING	THP 1
47	16.01/04.0/000164/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PUNAN MAHKAM Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM PUNAN MAHKAM	872.000.000,00	PUNAN MAHKAM	THP 1
48	16.01/04.0/000165/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung SUMBER AGUNG Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM SUMBER AGUNG	919.900.000,00	SUMBER AGUNG	THP 1
49	16.01/04.0/000166/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LONG KELUH Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM LONG KELUH	772.400.000,00	SUMBER AGUNG	THP 1
50	16.01/04.0/000167/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung GURIMBANG Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM GURIMBANG	1.009.700.000,00	GURIMBANG	THP 1
51	16.01/04.0/000168/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung SEI BEBANIR BANGUN Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM SEI BEBANIR BANGUN	1.502.000.000,00	SEI BEBANIR BANGUN	THP 1
52	16.01/04.0/000169/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PULAU DERAWAN Kec. P. DERAWAN Tahun 2023	KAKAM PULAU DERAWAN	955.100.000,00	PULAU DERAWAN	THP 1

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
53	16.01/04.0/000170/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung AMPEN MEDANG Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM AMPEN MEDANG	841.700.000,00	AMPEN MEDANG	THP 1
54	16.01/04.0/000171/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung SUKAN TENGAH Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM SUKAN TENGAH	1.311.200.000,00	SUKAN TENGAH	THP 1
55	16.01/04.0/000172/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BATU2 Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM BATU2	828.500.000,00	BATU2	THP 1
56	16.01/04.0/000174/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TANJUNG BATU Kec. P.DERAWAN Tahun 2023	KAKAM TANJUNG BATU	1.786.100.000,00	TANJUNG BATU	THP 1
57	16.01/04.0/000175/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PAYUNG2 Kec. MARATUA Tahun 2023	KAKAM PAYUNG2	806.000.000,00	PAYUNG2	THP 1
58	16.01/04.0/000176/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LONG LAMCIN Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM LONG LAMCIN	836.300.000,00	LONG LAMCIN	THP 1
59	16.01/04.0/000177/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PUNAN SEGAH Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM PUNAN SEGAH	778.100.000,00	PUNAN SEGAH	THP 1
60	16.01/04.0/000178/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LONG DUHUNG Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM LONG DUHUNG	767.900.000,00	LONG DUHUNG	THP 1
61	16.01/04.0/000179/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TABALAR MUARA Kec. TABALAR Tahun 2023	KAKAM TABALAR MUARA	860.900.000,00	TABALAR MUARA	THP 1
62	16.01/04.0/000180/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TUMBIT MELAYU Kec. TELUK BAYUR Tahun 2023	KAKAM TUMBIT MELAYU	1.159.700.000,00	TUMBIT MELAYU	THP 1
63	16.01/04.0/000181/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung MERABU Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM MERABU	809.600.000,00	MERABU	THP 1
64	16.01/04.0/000182/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung SEMURUT Kec. TABALAR Tahun 2023	KAKAM SEMURUT	980.300.000,00	SEMURUT	THP 1
65	16.01/04.0/000183/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung SAMBURAKAT Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM SAMBURAKAT	941.300.000,00	SAMBURAKAT	THP 1

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
66	16.01/04.0/000184/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung SUARAN Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM SUARAN	1.478.300.000,00	SUARAN	THP 1
67	16.01/04.0/000185/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TELUK ALULU Kec. MARATUA Tahun 2023	KAKAM TELUK ALULU	875.300.000,00	TELUK ALULU	THP 1
68	16.01/04.0/000186/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LONG PELAY Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM LONG PELAY	817.700.000,00	LONG PELAY	THP 1
69	16.01/04.0/000187/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung MERANCANG ILIR Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM MERANCANG ILIR	929.000.000,00	MERANCANG ILIR	THP 1
70	16.01/04.0/000188/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung RANTAU PANJANG Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM RANTAU PANJANG	844.100.000,00	RANTAU PANJANG	THP 1
71	16.01/04.0/000189/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TABALAR MUARA Kec. TABALAR Tahun 2023	KAKAM TABALAR ULU	837.800.000,00	TABALAR ULU	THP 1
72	16.01/04.0/000190/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BOHE SILIAN Kec. MARATUA Tahun 2023	KAKAM BOHE SILIAN	858.800.000,00	BOHE SILIAN	THP 1
73	16.01/04.0/000191/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung MAPULU Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM MAPULU	1.767.000.000,00	MAPULU	THP 1
74	16.01/04.0/000192/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PESAYAN Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM PESAYAN	1.045.400.000,00	PESAYAN	THP 1
75	16.01/04.0/000193/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung KASAI Kec. P. DERAWAN Tahun 2023	KAKAM KASAI	1.196.600.000,00	KASAI	THP 1
76	16.01/04.0/000194/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TELUK HARAPAN Kec. MARATUA Tahun 2023	KAKAM TELUK HARAPAN	921.200.000,00	TELUK HARAPAN	THP 1
77	16.01/04.0/000195/LS/2023	14/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BENA BARU Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM BENA BARU	870.500.000,00	BENA BARU	THP 1
78	16.01/04.0/000196/LS/2023	17/04/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PILANJAU Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM PILANJAU	1.068.500.000,00	PILANJAU	THP 1

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
79	16.01/04.0/000210/LS/2023	05/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung MERASA Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM MERASA	968.800.000,00	MERASA	THP 1
80	16.01/04.0/000237/LS/2023	09/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung HARAPAN JAYA Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM HARAPAN JAYA	1.073.300.000,00	HARAPAN JAYA	THP 1
81	16.01/04.0/000261/LS/2023	17/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BIATAN LEMPAKE Kec. BIATAN Tahun 2023	KAKAM BIATAN LEMPAKE	1.088.900.000,00	BIATAN LEMPAKE	THP 1
82	16.01/04.0/000262/LS/2023	17/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung TANJUNG PERANGAT Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM TANJUNG PERANGAT	936.200.000,00	TANJUNG PERANGAT	THP 1
83	16.01/04.0/000263/LS/2023	17/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BIATAN ILIR Kec. BIATAN Tahun 2023	KAKAM BIATAN ILIR	966.800.000,00	BIATAN ILIR	THP 1
84	16.01/04.0/000265/LS/2023	17/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PURNASARI JAYA Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM PURNASARI JAYA	876.800.000,00	PURNASARI JAYA	THP 1
85	16.01/04.0/000279/LS/2023	25/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LONG SULUY Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM LONG SULUY	1.007.000.000,00	LONG SULUY	THP 1
86	16.01/04.0/000280/LS/2023	25/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BATU RAJANG Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM BATU RAJANG	819.200.000,00	BATU RAJANG	THP 1
87	16.01/04.0/000281/LS/2023	25/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LONG LAAI Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM LONG LAAI	941.300.000,00	LONG LAAI	THP 1
88	16.01/04.0/000282/LS/2023	25/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BIATAN BAPINANG Kec. BIATAN Tahun 2023	KAKAM BIATAN BAPINANG	847.100.000,00	BIATAN BAPINANG	THP 1
89	16.01/04.0/000283/LS/2023	25/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung LONG LANUK Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM LONG LANUK	945.200.000,00	LONG LANUK	THP 1
90	16.01/04.0/000296/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PEGAT BATUMBUK Kec. P. DERAWAN Tahun 2023	KAKAM PEGAT BATUMBUK	919.100.000,00	PEGAT BATUMBUK	THP 1
91	16.01/04.0/000297/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung KARANGAN Kec. BIATAN Tahun 2023	KAKAM KARANGAN	839.000.000,00	KARANGAN	THP 1

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
92	16.01/04.0/000298/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung HARAPAN MAJU Kec. TABALAR Tahun 2023	KAKAM HARAPAN MAJU	942.200.000,00	HARAPAN MAJU	THP 1
93	16.01/04.0/000299/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BIATAN ULU Kec. BIATAN Tahun 2023	KAKAM BIATAN ULU	876.500.000,00	BIATAN ULU	THP 1
94	16.01/04.0/000300/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung BUYUNG2 Kec. TABALAR Tahun 2023	KAKAM BUYUNG2	1.253.000.000,00	BUYUNG2	THP 1
95	16.01/04.0/000333/LS/2023	07/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LOBANG KELATAK Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM LOBANG KELATAK	1.220.700.000,00	LOBANG KELATAK	THP 2
96	16.01/04.0/000334/LS/2023	07/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) LABANAN MAKMUR Kec. TELUK BAYUR Tahun 2023	KAKAM LABANAN MAKMUR	1.212.500.000,00	LABANAN MAKMUR	THP 1
97	16.01/04.0/000421/LS/2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung MALUANG Tahun 2023	KAKAM MALUANG	2.203.050.000,00	MALUANG	THP 2
98	16.01/04.0/000422/LS/2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung MUARA LESAN Tahun 2023	KAKAM MUARA LESAN	1.263.000.000,00	MUARA LESAN	THP 2
99	16.01/04.0/000423/LS/2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) SIDUUNG INDAH Tahun 2023	KAKAM SIDUUNG INDAH	872.300.000,00	SIDUUNG INDAH	THP 1
100	16.01/04.0/000424/LS/2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I Kampung BIATAN BARU Tahun 2023	KAKAM BIATAN BARU	819.800.000,00	BIATAN BARU	THP 1
101	16.01/04.0/000425/LS/2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I (Pertama) Kampung PUNAN MALINAU Tahun 2023	KAKAM PUNAN MALINAU	905.600.000,00	PUNAN MALINAU	THP 1
102	16.01/04.0/000478/LS/2023	27/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I Kampung LONG BELIU Tahun 2023	KAKAM LONG BELIU	1.067.000.000,00	LONG BELIU	THP 1
103	16.01/04.0/000479/LS/2023	27/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PULAU BESING Tahun 2023	KAKAM PULAU BESING	1.164.000.000,00	PULAU BESING	THP 2
104	16.01/04.0/000480/LS/2023	27/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SAMBAKUNGAN Tahun 2023	KAKAM SAMBAKUNGAN	1.817.100.000,00	SAMBAKUNGAN	THP 2

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
105	16.01/04.0/000481/LS/2023	27/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung MELATI JAYA Tahun 2023	KAKAM MELATI JAYA	1.512.750.000,00	MELATI JAYA	THP 2
106	16.01/04.0/000482/LS/2023	27/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BATU BATU Tahun 2023	KAKAM BATU BATU	1.242.750.000,00	BATU BATU	THP 2
107	16.01/04.0/000483/LS/2023	27/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SAMBURAKAT Tahun 2023	KAKAM SAMBURAKAT	1.411.950.000,00	SAMBURAKAT	THP 2
108	16.01/04.0/000484/LS/2023	27/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TABALAR ULU Tahun 2023	KAKAM TABALAR ULU	1.256.700.000,00	TABALAR ULU	THP 2
109	16.01/04.0/000535/LS/2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LONG AYAP Tahun 2023	KAKAM LONG AYAP	1.254.000.000,00	LONG AYAP	THP 2
110	16.01/04.0/000536/LS/2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I Kampung GUNUNG SARI Tahun 2023	KAKAM GUNUNG SARI	1.678.400.000,00	GUNUNG SARI	THP 1
111	16.01/04.0/000537/LS/2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LONG PELAY Tahun 2023	KAKAM LONG PELAY	1.226.550.000,00	LONG PELAY	THP 2
112	16.01/04.0/000538/LS/2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I Kampung PANDAN SARI Tahun 2023	KAKAM PANDAN SARI	994.400.000,00	PANDAN SARI	THP 1
113	16.01/04.0/000539/LS/2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LONG DUHUNG Tahun 2023	KAKAM LONG DUHUNG	1.151.850.000,00	LONG DUHUNG	THP 2
114	16.01/04.0/000600/LS/2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PEGAT BUKUR Tahun 2023	KAKAM PEGAT BUKUR	1.488.900.000,00	PEGAT BUKUR	THP 2
115	16.01/04.0/000601/LS/2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TASUK Tahun 2023	KAKAM TASUK	1.742.700.000,00	TASUK	THP 2
116	16.01/04.0/000640/LS/2023	12/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I Kampung LONG AYAN Tahun 2023	KAKAM LONG AYAN	920.900.000,00	LONG AYAN	THP 1
117	16.01/04.0/000641/LS/2023	12/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap I Kampung MANUNGGAL JAYA Tahun 2023	KAKAM MANUNGGAL JAYA	948.800.000,00	MANUNGGAL JAYA	THP 1

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
118	16.01/04.0/000642/LS/2023	12/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SIDO BANGEN Tahun 2023	KAKAM SIDO BANGEN	1.374.000.000,00	SIDO BANGEN	THP 2
119	16.01/04.0/000654/LS/2023	14/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TANJUNG BATU Tahun 2023	KAKAM TANJUNG BATU	2.679.150.000,00	TANJUNG BATU	THP 2
120	16.01/04.0/000655/LS/2023	14/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BUKIT MAKMUR JAYA Tahun 2023	KAKAM BUKIT MAKMUR JAYA	1.450.500.000,00	BUKIT MAKMUR JAYA	THP 2
121	16.01/04.0/000656/LS/2023	14/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TELUK SULAIMAN Tahun 2023	KAKAM TELUK SULAIMAN	1.454.700.000,00	TELUK SULAIMAN	THP 2
122	16.01/04.0/000657/LS/2023	14/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PAYUNG - PAYUNG Tahun 2023	KAKAM PAYUNG - PAYUNG	1.209.000.000,00	PAYUNG - PAYUNG	THP 2
123	16.01/04.0/000675/LS/2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LABANAN MAKARTI Tahun 2023	KAKAM LABANAN MAKARTI	1.674.000.000,00	LABANAN MAKARTI	THP 2
124	16.01/04.0/000676/LS/2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TEPIAN BUAH Tahun 2023	KAKAM TEPIAN BUAH	1.363.350.000,00	TEPIAN BUAH	THP 2
125	16.01/04.0/000677/LS/2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PILANJAU Tahun 2023	KAKAM PILANJAU	1.602.750.000,00	PILANJAU	THP 2
126	16.01/04.0/000678/LS/2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TELUK SUMBANG Tahun 2023	KAKAM TELUK SUMBANG	1.508.250.000,00	TELUK SUMBANG	THP 2
127	16.01/04.0/000679/LS/2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PANTAI HARAPAN Tahun 2023	KAKAM PANTAI HARAPAN	1.450.650.000,00	PANTAI HARAPAN	THP 2
128	16.01/04.0/000680/LS/2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PUNAN SEGAH Tahun 2023	KAKAM PUNAN SEGAH	1.167.150.000,00	PUNAN SEGAH	THP 2
129	16.01/04.0/000697/LS/2023	24/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung MERANCANG ILIR Tahun 2023	KAKAM MERANCANG ILIR	1.393.500.000,00	MERANCANG ILIR	THP 2
130	16.01/04.0/000698/LS/2023	24/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TANJUNG PEREPAT Tahun 2023	KAKAM TANJUNG PEREPAT	1.475.850.000,00	TANJUNG PEREPAT	THP 2

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
131	16.01/04.0/000714/LS/2023	26/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PANAAN Tahun 2023	KAKAM PANAAN	1.228.350.000,00	PANAAN	THP 2
132	16.01/04.0/000715/LS/2023	26/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SEI BEBANIR BANGUN Tahun 2023	KAKAM SEI BEBANIR BANGUN	2.253.000.000,00	SEI BEBANIR BANGUN	THP 2
133	16.01/04.0/000729/LS/2023	31/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung RANTAU PANJANG Tahun 2023	KAKAM RANTAU PANJANG	1.266.150.000,00	RANTAU PANJANG	THP 2
134	16.01/04.0/000760/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung MERANCANG ULU Tahun 2023	KAKAM MERANCANG ULU	1.528.950.000,00	MERANCANG ULU	THP 2
135	16.01/04.0/000759/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BIRANG Tahun 2023	KAKAM BIRANG	1.446.600.000,00	BIRANG	THP 2
136	16.01/04.0/000761/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PUNAN MAHKAM Tahun 2023	KAKAM PUNAN MAHKAM	1.308.000.000,00	PUNAN MAHKAM	THP 2
137	16.01/04.0/000762/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LESAN DAYAK Tahun 2023	KAKAM LESAN DAYAK	1.183.350.000,00	LESAN DAYAK	THP 2
138	16.01/04.0/000763/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung GIRING2 Tahun 2023	KAKAM GIRING2	1.666.650.000,00	GIRING2	THP 2
139	16.01/04.0/000764/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TUBAAN Tahun 2023	KAKAM TUBAAN	1.538.400.000,00	TUBAAN	THP 2
140	16.01/04.0/000765/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BUMI JAYA Tahun 2023	KAKAM BUMI JAYA	1.528.050.000,00	BUMI JAYA	THP 2
141	16.01/04.0/000792/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BIDUK2 Tahun 2023	KAKAM BIDUK2	1.666.650.000,00	BIDUK2	THP 2
142	16.01/04.0/000793/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung INARAN Tahun 2023	KAKAM INARAN	1.380.000.000,00	INARAN	THP 2
143	16.01/04.0/000794/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TELUK HARAPAN Tahun 2023	KAKAM TELUK HARAPAN	1.381.800.000,00	TELUK HARAPAN	THP 2

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
144	16.01/04.0/000795/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung AMPEN MEDANG Tahun 2023	KAKAM AMPEN MEDANG	1.262.550.000,00	AMPEN MEDANG	THP 2
145	16.01/04.0/000796/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PULAU DERAWAN Tahun 2023	KAKAM PULAU DERAWAN	1.432.650.000,00	PULAU DERAWAN	THP 2
146	16.01/04.0/000797/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BENA BARU Tahun 2023	KAKAM BENA BARU	1.305.750.000,00	BENA BARU	THP 2
147	16.01/04.0/000798/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LABANAN JAYA Tahun 2023	KAKAM LABANAN JAYA	1.699.050.000,00	LABANAN JAYA	THP 2
148	16.01/04.0/000816/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TELUK SEMANTING Tahun 2023	KAKAM TELUK SEMANTING	1.315.650.000,00	TELUK SEMANTING	THP 2
149	16.01/04.0/000817/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PESAYAN Tahun 2023	KAKAM PESAYAN	1.568.100.000,00	PESAYAN	THP 2
150	16.01/04.0/000818/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BUKIT MAKMUR Tahun 2023	KAKAM BUKIT MAKMUR	1.346.250.000,00	BUKIT MAKMUR	THP 2
151	16.01/04.0/000822/LS/2023	14/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TEMBUDAN Tahun 2023	KAKAM TEMBUDAN	1.762.500.000,00	TEMBUDAN	THP 2
152	16.01/04.0/000823/LS/2023	14/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung KASAI Tahun 2023	KAKAM KASAI	1.794.900.000,00	KASAI	THP 2
153	16.01/04.0/000828/LS/2023	15/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SUKAN TENGAH Tahun 2023	KAKAM SUKAN TENGAH	1.966.800.000,00	SUKAN TENGAH	THP 2
154	16.01/04.0/000829/LS/2023	15/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LONG KELUH Tahun 2023	KAKAM LONG KELUH	1.158.600.000,00	LONG KELUH	THP 2
155	16.01/04.0/000830/LS/2023	15/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung KAYU INDAH Tahun 2023	KAKAM KAYU INDAH	1.367.700.000,00	KAYU INDAH	THP 2
156	16.01/04.0/000831/LS/2023	22/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung GURIMBANG Tahun 2023	KAKAM GURIMBANG	1.514.550.000,00	GURIMBANG	THP 2

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
157	16.01/04.0/000832/LS/2023	22/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PEGAT BATUMBUK Tahun 2023	KAKAM PEGAT BATUMBUK	1.378.650.000,00	PEGAT BATUMBUK	THP 2
158	16.01/04.0/000833/LS/2023	22/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM BATU PUTIH	1.916.850.000,00	BATU PUTIH	THP 2
159	16.01/04.0/000834/LS/2023	22/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung KARANGAN Tahun 2023	KAKAM KARANGAN	1.258.500.000,00	KARANGAN	THP 2
160	16.01/04.0/000835/LS/2023	22/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SUMBER AGUNG Tahun 2023	KAKAM SUMBER AGUNG	1.379.850.000,00	SUMBER AGUNG	THP 2
161	16.01/04.0/000836/LS/2023	22/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung HARAPAN JAYA Tahun 2023	KAKAM HARAPAN JAYA	1.609.950.000,00	HARAPAN JAYA	THP 2
162	16.01/04.0/000837/LS/2023	22/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TUNGGAL BUMI Tahun 2023	KAKAM TUNGGAL BUMI	1.359.600.000,00	TUNGGAL BUMI	THP 2
163	16.01/04.0/000842/LS/2023	25/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SUKA MURYA Tahun 2023	KAKAM SUKA MURYA	1.348.500.000,00	SUKA MURYA	THP 2
164	16.01/04.0/000851/LS/2023	29/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung CAMPUR SARI Tahun 2023	KAKAM CAMPUR SARI	1.367.400.000,00	CAMPUR SARI	THP 2
165	16.01/04.0/000852/LS/2023	29/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung DUMARING Tahun 2023	KAKAM DUMARING	1.529.400.000,00	DUMARING	THP 2
166	16.01/04.0/000859/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TUMBIT DAYAK Tahun 2023	KAKAM TUMBIT DAYAK	1.739.550.000,00	TUMBIT DAYAK	THP 2
167	16.01/04.0/000860/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PURNASARI JAYA Tahun 2023	KAKAM PURNASARI JAYA	1.315.200.000,00	PURNASARI JAYA	THP 2
168	16.01/04.0/000861/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BUYUNG2 Tahun 2023	KAKAM BUYUNG2	1.879.500.000,00	BUYUNG2	THP 2
169	16.01/04.0/000862/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung CAPUAK Tahun 2023	KAKAM CAPUAK	1.461.900.000,00	CAPUAK	THP 2

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
170	16.01/04.0/000863/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung EKA SAPTA Tahun 2023	KAKAM EKA SAPTA	1.369.200.000,00	EKA SAPTA	THP 2
171	16.01/04.0/000864/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SUMBER MULYA Tahun 2023	KAKAM SUMBER MULYA	1.299.450.000,00	SUMBER MULYA	THP 2
172	16.01/04.0/000865/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BOHE SILIAN Tahun 2023	KAKAM BOHE SILIAN	1.288.200.000,00	BOHE SILIAN	THP 2
173	16.01/04.0/000866/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LONG LAAI Tahun 2023	KAKAM LONG LAAI	1.411.950.000,00	LONG LAAI	THP 2
174	16.01/04.0/000867/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PANDAN SARI Tahun 2023	KAKAM PANDAN SARI	1.491.600.000,00	PANDAN SARI	THP 2
175	16.01/04.0/000868/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TANJUNG PERANGAT Tahun 2023	KAKAM TANJUNG PERANGAT	1.404.300.000,00	TANJUNG PERANGAT	THP 2
176	16.01/04.0/000869/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TELUK ALULU Tahun 2023	KAKAM TELUK ALULU	1.312.950.000,00	TELUK ALULU	THP 2
177	16.01/04.0/000870/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LONG BELIU Tahun 2023	KAKAM LONG BELIU	1.600.500.000,00	LONG BELIU	THP 2
178	16.01/04.0/000888/LS/2023	05/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung MERASA Tahun 2023	KAKAM MERASA	1.453.200.000,00	MERASA	THP 2
179	16.01/04.0/000887/LS/2023	05/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SEMURUT Tahun 2023	KAKAM SEMURUT	1.470.450.000,00	SEMURUT	THP 2
180	16.01/04.0/000901/LS/2023	06/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung MERAPUN Tahun 2023	KAKAM MERAPUN	1.545.600.000,00	MERAPUN	THP 2
181	16.01/04.0/000900/LS/2023	06/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SUARAN Tahun 2023	KAKAM SUARAN	2.217.450.000,00	SUARAN	THP 2
182	16.01/04.0/000899/LS/2023	06/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BIATAN BAPINANG Tahun 2023	KAKAM BIATAN BAPINANG	1.270.650.000,00	BIATAN BAPINANG	THP 2

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
183	16.01/04.0/000898/LS/2023	06/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LABANAN MAKMUR Tahun 2023	KAKAM LABANAN MAKMUR	1.818.750.000,00	LABANAN MAKMUR	THP 2
184	16.01/04.0/000913/LS/2023	07/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung MAPULU Tahun 2023	KAKAM MAPULU	2.650.500.000,00	MAPULU	THP 2
185	16.01/04.0/000924/LS/2023	13/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BALIKUKUP Tahun 2023	KAKAM BALIKUKUP	1.405.650.000,00	BALIKUKUP	THP 2
186	16.01/04.0/000922/LS/2023	13/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BIATAN ILIR Tahun 2023	KAKAM BIATAN ILIR	1.450.200.000,00	BIATAN ILIR	THP 2
187	16.01/04.0/000923/LS/2023	13/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TUMBIT MELAYU Tahun 2023	KAKAM TUMBIT MELAYU	1.739.550.000,00	TUMBIT MELAYU	THP 2
188	16.01/04.0/000925/LS/2023	13/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TABALAR MUARA Tahun 2023	KAKAM TABALAR MUARA	1.291.350.000,00	TABALAR MUARA	THP 2
189	16.01/04.0/000931/LS/2023	20/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BIATAN ULU Tahun 2023	KAKAM BIATAN ULU	1.314.750.000,00	BIATAN ULU	THP 2
190	16.01/04.0/000932/LS/2023	20/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung HARAPAN MAJU Tahun 2023	KAKAM HARAPAN MAJU	1.413.300.000,00	HARAPAN MAJU	THP 2
191	16.01/04.0/000937/LS/2023	25/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung SIDUUNG INDAH Tahun 2023	KAKAM SIDUUNG INDAH	1.308.450.000,00	SIDUUNG INDAH	THP 2
192	16.01/04.0/0001016/LS/2023	05/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung MERABU Tahun 2023	KAKAM MERABU	1.214.400.000,00	MERABU	THP 2
193	16.01/04.0/0001017/LS/2023	05/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LONG LAMCIN Tahun 2023	KAKAM LONG LAMCIN	1.254.450.000,00	LONG LAMCIN	THP 2
194	16.01/04.0/0001035/LS/2023	11/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung PUNAN MALINAU Tahun 2023	KAKAM PUNAN MALINAU	1.358.400.000,00	PUNAN MALINAU	THP 2
195	16.01/04.0/0001047/LS/2023	18/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM TALISAYAN	2.127.750.000,00	TALISAYAN	THP 2

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
196	16.01/04.0/0001044/LS/2023	18/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BIATAN LEMPAKE Tahun 2023	KAKAM BIATAN LEMPAKE	1.633.350.000,00	BIATAN LEMPAKE	THP 2
197	16.01/04.0/0001054/LS/2023	30/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BIATAN BARU Tahun 2023	KAKAM BIATAN BARU	1.229.700.000,00	BIATAN BARU	THP 2
198	16.01/04.0/0001081/LS/2023	06/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LONG SULUY Tahun 2023	KAKAM LONG SULUY	1.510.500.000,00	LONG SULUY	THP 2
199	16.01/04.0/0001082/LS/2023	06/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung BATU RAJANG Tahun 2023	KAKAM BATU RAJANG	1.228.800.000,00	BATU RAJANG	THP 2
200	16.01/04.0/0001083/LS/2023	06/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung MANUNGGAL JAYA Tahun 2023	KAKAM MANUNGGAL JAYA	1.423.200.000,00	MANUNGGAL JAYA	THP 2
201	16.01/04.0/0001103/LS/2023	09/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung GUNUNG SARI Tahun 2023	KAKAM GUNUNG SARI	2.517.600.000,00	GUNUNG SARI	THP 2
202	16.01/04.0/0001115/LS/2023	10/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LONG AYAN Tahun 2023	KAKAM LONG AYAN	1.381.350.000,00	LONG AYAN	THP 2
203	16.01/04.0/0001125/LS/2023	14/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap II Kampung LONG LANUK Tahun 2023	KAKAM LONG LANUK	1.417.800.000,00	LONG LANUK	THP 2
	TOTAL TAHAP 1 DAN 2							**250.058.557.087,00**		
1	16.01/04.0/0001180/LS/2023	01/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung MUARA LESAN Tahun 2023	KAKAM MUARA LESAN	431.000.000,00	MUARA LESAN	ABT
2	16.01/04.0/0001181/LS/2023	01/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PANAAN Tahun 2023	KAKAM PANAAN	419.450.000,00	PANAAN	ABT
3	16.01/04.0/0001182/LS/2023	01/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LESAN DAYAK Tahun 2023	KAKAM LESAN DAYAK	404.450.000,00	LESAN DAYAK	ABT
4	16.01/04.0/0001183/LS/2023	01/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LONG SULUY Tahun 2023	KAKAM LONG SULUY	513.500.000,00	LONG SULUY	ABT

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
5	16.01/04.0/0001184/LS/2023	01/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SEI BEBANIR BANGUN Tahun 2023	KAKAM SEI BEBANIR BANGUN	761.000.000,00	SEI BEBANIR BANGUN	ABT
6	16.01/04.0/0001185/LS/2023	01/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PULAU DERAWAN Tahun 2023	KAKAM PULAU DERAWAN	487.550.000,00	PULAU DERAWAN	ABT
7	16.01/04.0/0001186/LS/2023	01/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SIDO BANGEN Tahun 2023	KAKAM SIDO BANGEN	428.000.000,00	SIDO BANGEN	ABT
8	16.01/04.0/0001187/LS/2023	01/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PEGAT BUKUR Tahun 2023	KAKAM PEGAT BUKUR	506.300.000,00	PEGAT BUKUR	ABT
9	16.01/04.0/0001188/LS/2023	01/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LOBANG KELATAK Tahun 2023	KAKAM LOBANG KELATAK	416.900.000,00	LOBANG KELATAK	ABT
10	16.01/04.0/0001206/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung GURIMBANG Tahun 2023	KAKAM GURIMBANG	514.850.000,00	GURIMBANG	ABT
11	16.01/04.0/0001207/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BUKIT MAKMUR JAYA Tahun 2023	KAKAM BUKIT MAKMUR JAYA	423.500.000,00	BUKIT MAKMUR JAYA	ABT
12	16.01/04.0/0001208/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LONG LAAI Tahun 2023	KAKAM LONG LAAI	480.650.000,00	LONG LAAI	ABT
13	16.01/04.0/0001209/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BALIKUKUP Tahun 2023	KAKAM BALIKUKUP	478.550.000,00	BALIKUKUP	ABT
14	16.01/04.0/0001210/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BUKIT MAKMUR Tahun 2023	KAKAM BUKIT MAKMUR	458.750.000,00	BUKIT MAKMUR	ABT
15	16.01/04.0/0001211/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BUMI JAYA Tahun 2023	KAKAM BUMI JAYA	519.350.000,00	BUMI JAYA	ABT
16	16.01/04.0/0001212/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LONG AYAP Tahun 2023	KAKAM LONG AYAP	428.000.000,00	LONG AYAP	ABT
17	16.01/04.0/0001244/LS/2023	07/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LONG LAMCIN Tahun 2023	KAKAM LONG LAMCIN	428.150.000,00	LONG LAMCIN	ABT

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
18	16.01/04.0/0001243/LS/2023	07/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TASUK Tahun 2023	KAKAM TASUK	590.900.000,00	TASUK	ABT
19	16.01/04.0/0001242/LS/2023	07/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TUNGGAL BUMI Tahun 2023	KAKAM TUNGGAL BUMI	423.200.000,00	TUNGGAL BUMI	ABT
20	16.01/04.0/0001238/LS/2023	07/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TEPIAN BUAH Tahun 2023	KAKAM TEPIAN BUAH	464.450.000,00	TEPIAN BUAH	ABT
21	16.01/04.0/0001241/LS/2023	07/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LONG PELAY Tahun 2023	KAKAM LONG PELAY	418.850.000,00	LONG PELAY	ABT
22	16.01/04.0/0001240/LS/2023	07/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PUNAN MAHKAM Tahun 2023	KAKAM PUNAN MAHKAM	446.000.000,00	PUNAN MAHKAM	ABT
23	16.01/04.0/0001239/LS/2023	07/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung MERAPUN Tahun 2023	KAKAM MERAPUN	525.200.000,00	MERAPUN	ABT
24	16.01/04.0/0001249/LS/2023	08/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BATU-BATU Tahun 2023	KAKAM BATU-BATU	424.250.000,00	BATU-BATU	ABT
25	16.01/04.0/0001247/LS/2023	08/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PESAYAN Tahun 2023	KAKAM PESAYAN	532.700.000,00	PESAYAN	ABT
26	16.01/04.0/0001251/LS/2023	08/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LONG BELIU Tahun 2023	KAKAM LONG BELIU	543.500.000,00	LONG BELIU	ABT
27	16.01/04.0/0001252/LS/2023	08/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung KAYU INDAH Tahun 2023	KAKAM KAYU INDAH	425.900.000,00	KAYU INDAH	ABT
28	16.01/04.0/0001253/LS/2023	08/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung KASAI Tahun 2023	KAKAM KASAI	608.300.000,00	KASAI	ABT
29	16.01/04.0/0001254/LS/2023	11/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TANJUNG PEREPAT Tahun 2023	KAKAM TANJUNG PEREPAT	501.950.000,00	TANJUNG PEREPAT	ABT
30	16.01/04.0/0001255/LS/2023	11/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SUMBER AGUNG Tahun 2023	KAKAM SUMBER AGUNG	429.950.000,00	SUMBER AGUNG	ABT

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
31	16.01/04.0/0001258/LS/2023	12/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LONG DUHUNG Tahun 2023	KAKAM LONG DUHUNG	393.950.000,00	LONG DUHUNG	ABT
32	16.01/04.0/0001259/LS/2023	12/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BIATAN ULU Tahun 2023	KAKAM BIATAN ULU	448.250.000,00	BIATAN ULU	ABT
33	16.01/04.0/0001260/LS/2023	12/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PEGAT BATUMBUK Tahun 2023	KAKAM PEGAT BATUMBUK	469.550.000,00	PEGAT BATUMBUK	ABT
34	16.01/04.0/0001261/LS/2023	12/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BENA BARU Tahun 2023	KAKAM BENA BARU	445.250.000,00	BENA BARU	ABT
35	16.01/04.0/0001262/LS/2023	12/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung MAPULU Tahun 2023	KAKAM MAPULU	393.500.000,00	MAPULU	ABT
36	16.01/04.0/0001263/LS/2023	12/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PAYUNG2 Tahun 2023	KAKAM PAYUNG2	413.000.000,00	PAYUNG2	ABT
37	16.01/04.0/0001264/LS/2023	12/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TELUK HARAPAN Tahun 2023	KAKAM TELUK HARAPAN	470.600.000,00	TELUK HARAPAN	ABT
38	16.01/04.0/0001265/LS/2023	12/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BOHE SILIAN Tahun 2023	KAKAM BOHE SILIAN	439.400.000,00	BOHE SILIAN	ABT
39	16.01/04.0/00012666LS/2023	12/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LONG KELUH Tahun 2023	KAKAM LONG KELUH	396.200.000,00	LONG KELUH	ABT
40	16.01/04.0/0001272/LS/2023	12/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung MERASA Tahun 2023	KAKAM MERASA	454.400.000,00	MERASA	ABT
41	16.01/04.0/0001273/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung MERABU Tahun 2023	KAKAM MERABU	414.800.000,00	MERABU	ABT
42	16.01/04.0/0001274/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM TALISAYAN	679.250.000,00	TALISAYAN	ABT
43	16.01/04.0/0001275/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SUKA MURYA Tahun 2023	KAKAM SUKA MURYA	459.500.000,00	SUKA MURYA	ABT

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
44	16.01/04.0/0001276/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PURNASARI JAYA Tahun 2023	KAKAM PURNASARI JAYA	448.400.000,00	PURNASARI JAYA	ABT
45	16.01/04.0/0001277/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung EKA SAPTA Tahun 2023	KAKAM EKA SAPTA	466.400.000,00	EKA SAPTA	ABT
46	16.01/04.0/0001278/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung CAPUAK Tahun 2023	KAKAM CAPUAK	497.300.000,00	CAPUAK	ABT
47	16.01/04.0/0001279/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung INARAN Tahun 2023	KAKAM INARAN	470.000.000,00	INARAN	ABT
48	16.01/04.0/0001280/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TUMBIT DAYAK Tahun 2023	KAKAM TUMBIT DAYAK	589.850.000,00	TUMBIT DAYAK	ABT
49	16.01/04.0/0001281/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung RANTAU PANJANG Tahun 2023	KAKAM RANTAU PANJANG	432.050.000,00	RANTAU PANJANG	ABT
50	16.01/04.0/0001282/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SUARAN Tahun 2023	KAKAM SUARAN	749.150.000,00	SUARAN	ABT
51	16.01/04.0/0001283/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PILANJAU Tahun 2023	KAKAM PILANJAU	544.250.000,00	PILANJAU	ABT
52	16.01/04.0/0001284/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SUKAN TENGAH Tahun 2023	KAKAM SUKAN TENGAH	665.600.000,00	SUKAN TENGAH	ABT
53	16.01/04.0/0001285/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TJG PERANGAT Tahun 2023	KAKAM TJG PERANGAT	478.100.000,00	TJG PERANGAT	ABT
54	16.01/04.0/0001286/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PANTAI HARAPAN Tahun 2023	KAKAM PANTAI HARAPAN	493.550.000,00	PANTAI HARAPAN	ABT
55	16.01/04.0/0001287/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung MALUANG Tahun 2023	KAKAM MALUANG	744.350.000,00	MALUANG	ABT
56	16.01/04.0/0001288/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung GIRING2 Tahun 2023	KAKAM GIRING2	565.550.000,00	GIRING2	ABT

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
57	16.01/04.0/0001289/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SUMBER MULYA Tahun 2023	KAKAM SUMBER MULYA	443.150.000,00	SUMBER MULYA	ABT
58	16.01/04.0/0001290/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TELUK SUMBANG Tahun 2023	KAKAM TELUK SUMBANG	512.750.000,00	TELUK SUMBANG	ABT
59	16.01/04.0/0001291/LS/2023	13/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung DUMARING Tahun 2023	KAKAM DUMARING	519.800.000,00	DUMARING	ABT
60	16.01/04.0/0001294/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LONG LANUK Tahun 2023	KAKAM LONG LANUK	482.600.000,00	LONG LANUK	ABT
61	16.01/04.0/0001295/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TELUK SEMANTING Tahun 2023	KAKAM TELUK SEMANTING	448.550.000,00	TELUK SEMANTING	ABT
62	16.01/04.0/0001296/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LABANAN MAKARTI Tahun 2023	KAKAM LABANAN MAKARTI	518.000.000,00	LABANAN MAKARTI	ABT
63	16.01/04.0/0001297/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TABALAR ULU Tahun 2023	KAKAM TABALAR ULU	428.900.000,00	TABALAR ULU	ABT
64	16.01/04.0/0001298/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TEMBUDAN Tahun 2023	KAKAM TEMBUDAN	597.500.000,00	TEMBUDAN	ABT
65	16.01/04.0/0001299/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM BATU PUTIH	588.950.000,00	BATU PUTIH	ABT
66	16.01/04.0/0001300/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung HARAPAN JAYA Tahun 2023	KAKAM HARAPAN JAYA	546.650.000,00	HARAPAN JAYA	ABT
67	16.01/04.0/0001301/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TUBAAN Tahun 2023	KAKAM TUBAAN	522.800.000,00	TUBAAN	ABT
68	16.01/04.0/0001302/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung MELATI JAYA Tahun 2023	KAKAM MELATI JAYA	514.250.000,00	MELATI JAYA	ABT
69	16.01/04.0/0001303/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung MERANCANG ULU Tahun 2023	KAKAM MERANCANG ULU	519.650.000,00	MERANCANG ULU	ABT

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
70	16.01/04.0/0001304/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PULAU BESING Tahun 2023	KAKAM PULAU BESING	398.000.000,00	PULAU BESING	ABT
71	16.01/04.0/0001305/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung KARANGAN Tahun 2023	KAKAM KARANGAN	429.500.000,00	KARANGAN	ABT
72	16.01/04.0/0001306/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SEMURUT Tahun 2023	KAKAM SEMURUT	500.150.000,00	SEMURUT	ABT
73	16.01/04.0/0001307/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TANJUNG BATU Tahun 2023	KAKAM TANJUNG BATU	903.050.000,00	TANJUNG BATU	ABT
74	16.01/04.0/0001308/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TELUK ALULU Tahun 2023	KAKAM TELUK ALULU	447.650.000,00	TELUK ALULU	ABT
75	16.01/04.0/0001309/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BIDUK2 Tahun 2023	KAKAM BIDUK2	565.550.000,00	BIDUK2	ABT
76	16.01/04.0/0001310/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TELUK SULAIMAN Tahun 2023	KAKAM TELUK SULAIMAN	494.900.000,00	TELUK SULAIMAN	ABT
77	16.01/04.0/0001311/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PANDAN SARI Tahun 2023	KAKAM PANDAN SARI	507.200.000,00	PANDAN SARI	ABT
78	16.01/04.0/0001312/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PUNAN SEGAH Tahun 2023	KAKAM PUNAN SEGAH	399.050.000,00	PUNAN SEGAH	ABT
79	16.01/04.0/0001313/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung CAMPUR SARI Tahun 2023	KAKAM CAMPUR SARI	465.800.000,00	CAMPUR SARI	ABT
80	16.01/04.0/0001314/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LABANAN JAYA Tahun 2023	KAKAM LABANAN JAYA	576.350.000,00	LABANAN JAYA	ABT
81	16.01/04.0/0001315/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BIRANG Tahun 2023	KAKAM BIRANG	492.200.000,00	BIRANG	ABT
82	16.01/04.0/0001316/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SAMBAKUNGAN Tahun 2023	KAKAM SAMBAKUNGAN	535.700.000,00	SAMBAKUNGAN	ABT

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
83	16.01/04.0/0001317/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung HARAPAN MAJU Tahun 2023	KAKAM HARAPAN MAJU	481.100.000,00	HARAPAN MAJU	ABT
84	16.01/04.0/0001318/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BUYUNG2 Tahun 2023	KAKAM BUYUNG2	636.500.000,00	BUYUNG2	ABT
85	16.01/04.0/0001323/LS/2023	18/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SAMBURAKAT Tahun 2023	KAKAM SAMBURAKAT	480.650.000,00	SAMBURAKAT	ABT
86	16.01/04.0/0001325/LS/2023	19/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung MANUNGGAL JAYA Tahun 2023	KAKAM MANUNGGAL JAYA	484.400.000,00	MANUNGGAL JAYA	ABT
87	16.01/04.0/0001326/LS/2023	19/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BIATAN BAPINANG Tahun 2023	KAKAM BIATAN BAPINANG	433.550.000,00	BIATAN BAPINANG	ABT
88	16.01/04.0/0001328/LS/2023	19/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BIATAN ILIR Tahun 2023	KAKAM BIATAN ILIR	493.400.000,00	BIATAN ILIR	ABT
89	16.01/04.0/0001364/LS/2023	20/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LABANAN MAKMUR Tahun 2023	KAKAM LABANAN MAKMUR	616.250.000,00	LABANAN MAKMUR	ABT
90	16.01/04.0/0001365/LS/2023	20/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BATU RAJANG Tahun 2023	KAKAM BATU RAJANG	419.600.000,00	BATU RAJANG	ABT
91	16.01/04.0/0001366/LS/2023	20/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TABALAR MUARA Tahun 2023	KAKAM TABALAR MUARA	440.450.000,00	TABALAR MUARA	ABT
92	16.01/04.0/0001367/LS/2023	20/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung SIDUUNG INDAH Tahun 2023	KAKAM SIDUUNG INDAH	446.150.000,00	SIDUUNG INDAH	ABT
93	16.01/04.0/0001368/LS/2023	20/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BIATAN BARU Tahun 2023	KAKAM BIATAN BARU	419.900.000,00	BIATAN BARU	ABT
94	16.01/04.0/0001369/LS/2023	20/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung TUMBIT MELAYU Tahun 2023	KAKAM TUMBIT MELAYU	589.850.000,00	TUMBIT MELAYU	ABT
95	16.01/04.0/0001371/LS/2023	21/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung BIATAN LEMPAKE Tahun 2023	KAKAM BIATAN LEMPAKE	554.450.000,00	BIATAN LEMPAKE	ABT

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
96	16.01/04.0/0001372/LS/2023	21/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung LONG AYAN Tahun 2023	KAKAM LONG AYAN	470.450.000,00	LONG AYAN	ABT
97	16.01/04.0/0001373/LS/2023	21/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung PUNAN MALINAU Tahun 2023	KAKAM PUNAN MALINAU	462.800.000,00	PUNAN MALINAU	ABT
98	16.01/04.0/0001374/LS/2023	21/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung GUNUNG SARI Tahun 2023	KAKAM GUNUNG SARI	849.200.000,00	GUNUNG SARI	ABT
99	16.01/04.0/0001375/LS/2023	21/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung AMPEN MEDANG Tahun 2023	KAKAM AMPEN MEDANG	430.850.000,00	AMPEN MEDANG	ABT
100	16.01/04.0/0001377/LS/2023	21/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahap III (ABT) Kampung MERANCANG ILIR Tahun 2023	KAKAM MERANCANG ILIR	474.500.000,00	MERANCANG ILIR	ABT
						TOTAL		**50.000.000.000,00**		

	JUMLAH	**300.058.557.087,00**



LAMPIRAN 3

Daftar Bantuan PKK Kampung Se-Kabupaten Berau

Tahun Anggaran 2023

REKAPITULASI SP2D BANKEU PKK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 3

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
1	16.01/04.0/000333/LS/2023	08/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung MALUANG Kec. GUNUNG TABUR Tahun 2023	KAKAM MALUANG	17.500.000,00	MALUANG	
2	16.01/04.0/000356/LS/2023	08/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung KARANGAN Kec. BIATAN Tahun 2023	KAKAM KARANGAN	17.500.000,00	KARANGAN	
3	16.01/04.0/000355/LS/2023	08/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung SAMBURAKAT Kec. GUNUNG TABUR Tahun 2023	KAKAM SAMBURAKAT	17.500.000,00	SAMBURAKAT	
4	16.01/04.0/000354/LS/2023	08/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung SAMBAKUNGAN Kec. GUNUNG TABUR Tahun 2023	KAKAM SAMBAKUNGAN	17.500.000,00	SAMBAKUNGAN	
5	16.01/04.0/000353/LS/2023	08/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung BUKIT MAKMUR Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM BUKIT MAKMUR	17.500.000,00	BUKIT MAKMUR	
6	16.01/04.0/000352/LS/2023	08/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung SUKA MURYA Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM SUKA MURYA	17.500.000,00	SUKA MURYA	
7	16.01/04.0/000351/LS/2023	08/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung SEI BEBANIR BANGUN Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM SEI BEBANIR BANGUN	17.500.000,00	SEI BEBANIR BANGUN	
8	16.01/04.0/000403/LS/2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung TASUK Tahun 2023	KAKAM TASUK	17.500.000,00	TASUK	
9	16.01/04.0/000404/LS/2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung PANAAN Tahun 2023	KAKAM PANAAN	17.500.000,00	PANAAN	
10	16.01/04.0/000429/LS/2023	21/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung BUKIT MAKMUR JAYA Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM BUKIT MAKMUR JAYA	17.500.000,00	BUKIT MAKMUR JAYA	
11	16.01/04.0/000430/LS/2023	21/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung SIDO BANGEN Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM SIDO BANGEN	17.500.000,00	SIDO BANGEN	
12	16.01/04.0/000431/LS/2023	21/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung PURNASARI JAYA Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM PURNASARI JAYA	17.500.000,00	PURNASARI JAYA	
13	16.01/04.0/000432/LS/2023	21/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung BIRANG Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM BIRANG	17.500.000,00	BIRANG	
14	16.01/04.0/000433/LS/2023	21/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung LABANAN MAKARTI Kec. TELUK BAYUR Tahun 2023	KAKAM LABANAN MAKARTI	17.500.000,00	LABANAN MAKARTI	
15	16.01/04.0/000434/LS/2023	21/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung LABANAN MAKMUR Kec. TELUK BAYUR Tahun 2023	KAKAM LABANAN MAKMUR	17.500.000,00	LABANAN MAKMUR	
16	16.01/04.0/000435/LS/2023	21/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung PULAU BESING Kec. GUNTATahun 2023	KAKAM PULAU BESING	17.500.000,00	PULAU BESING	

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
17	16.01/04.0/000541/LS/2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung MERANCANG ILIR Tahun 2023	KAKAM MERANCANG ILIR	17.500.000,00	MERANCANG ILIR	
18	16.01/04.0/000542/LS/2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung PESAYAN Tahun 2023	KAKAM PESAYAN	17.500.000,00	PESAYAN	
19	16.01/04.0/000543/LS/2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung BATU BATU Tahun 2023	KAKAM BATU BATU	17.500.000,00	BATU BATU	
20	16.01/04.0/000544/LS/2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung AMPEN MEDANG Tahun 2023	KAKAM AMPEN MEDANG	17.500.000,00	AMPEN MEDANG	
21	16.01/04.0/000545/LS/2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung BUMI JAYA Tahun 2023	KAKAM BUMI JAYA	17.500.000,00	BUMI JAYA	
22	16.01/04.0/000608/LS/2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung LONG AYAP Tahun 2023	KAKAM LONG AYAP	17.500.000,00	LONG AYAP	
23	16.01/04.0/000609/LS/2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung TUMBIT DAYAK Tahun 2023	KAKAM TUMBIT DAYAK	17.500.000,00	TUMBIT DAYAK	
24	16.01/04.0/000610/LS/2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung MELATI JAYA Tahun 2023	KAKAM MELATI JAYA	17.500.000,00	MELATI JAYA	
25	16.01/04.0/000611/LS/2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung SUMBER MULYA Tahun 2023	KAKAM SUMBER MULYA	17.500.000,00	SUMBER MULYA	
26	16.01/04.0/000612/LS/2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung PEGAT BUKUR Tahun 2023	KAKAM PEGAT BUKUR	17.500.000,00	PEGAT BUKUR	
27	16.01/04.0/000646/LS/2023	12/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung PILANJAU Tahun 2023	KAKAM PILANJAU	17.500.000,00	PILANJAU	
28	16.01/04.0/000681/LS/2023	21/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung TANJUNG BATU Tahun 2023	KAKAM TANJUNG BATU	17.500.000,00	TANJUNG BATU	
29	16.01/04.0/000682/LS/2023	21/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung TELUK SULAIMAN Tahun 2023	KAKAM TELUK SULAIMAN	17.500.000,00	TELUK SULAIMAN	
30	16.01/04.0/000683/LS/2023	21/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung CAMPUR SARI Tahun 2023	KAKAM CAMPUR SARI	17.500.000,00	CAMPUR SARI	
31	16.01/04.0/000704/LS/2023	24/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung TELUK SUMBANG Tahun 2023	KAKAM TELUK SUMBANG	17.500.000,00	TELUK SUMBANG	
32	16.01/04.0/000724/LS/2023	27/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung GUNUNG SARI Tahun 2023	KAKAM GUNUNG SARI	17.500.000,00	GUNUNG SARI	
33	16.01/04.0/000733/LS/2023	31/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung HARAPAN JAYA Tahun 2023	KAKAM HARAPAN JAYA	17.500.000,00	HARAPAN JAYA	
34	16.01/04.0/000734/LS/2023	31/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung TUNGGAL BUMI Tahun 2023	KAKAM TUNGGAL BUMI	17.500.000,00	TUNGGAL BUMI	
35	16.01/04.0/000766/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM BATU PUTIH	17.500.000,00	BATU PUTIH	
36	16.01/04.0/000749/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung TEMBUDAN Tahun 2023	KAKAM TEMBUDAN	17.500.000,00	TEMBUDAN	

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
37	16.01/04.0/000750/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung PAYUNG-PAYUNG Tahun 2023	KAKAM PAYUNG-PAYUNG	17.500.000,00	PAYUNG-PAYUNG	
38	16.01/04.0/000751/LS/2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung MERANCANG ULU Tahun 2023	KAKAM MERANCANG ULU	17.500.000,00	MERANCANG ULU	
39	16.01/04.0/000784/LS/2023	09/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung TANJUNG PERANGAT Tahun 2023	KAKAM TANJUNG PERANGAT	17.500.000,00	TANJUNG PERANGAT	
40	16.01/04.0/000785/LS/2023	09/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung BIDUK2 Tahun 2023	KAKAM BIDUK2	17.500.000,00	BIDUK2	
41	16.01/04.0/000786/LS/2023	09/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung PANDAN SARI Tahun 2023	KAKAM PANDAN SARI	17.500.000,00	PANDAN SARI	
42	16.01/04.0/000802/LS/2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung BIATAN ILIR Tahun 2023	KAKAM BIATAN ILIR	17.500.000,00	BIATAN ILIR	
43	16.01/04.0/000840/LS/2023	25/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung BIATAN ULU Tahun 2023	KAKAM BIATAN ULU	17.500.000,00	BIATAN ULU	
44	16.01/04.0/000841/LS/2023	25/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) Kampung PEGAT BATUMBUK Tahun 2023	KAKAM PEGAT BATUMBUK	17.500.000,00	PEGAT BATUMBUK	
45	16.01/04.0/000850/LS/2023	29/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) MERABU Tahun 2023	KAKAM MERABU	17.500.000,00	MERABU	
46	16.01/04.0/000857/LS/2023	31/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) BOHE SILIAN Tahun 2023	KAKAM BOHE SILIAN	17.500.000,00	BOHE SILIAN	
47	16.01/04.0/000902/LS/2023	06/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) SUARAN Tahun 2023	KAKAM SUARAN	17.500.000,00	SUARAN	
48	16.01/04.0/000920/LS/2023	12/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) SUMBER AGUNG Tahun 2023	KAKAM SUMBER AGUNG	17.500.000,00	SUMBER AGUNG	
49	16.01/04.0/000933/LS/2023	20/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) SIDUUNG INDAH Tahun 2023	KAKAM SIDUUNG INDAH	17.500.000,00	SIDUUNG INDAH	
50	16.01/04.0/000934/LS/2023	20/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) TEPIAN BUAH Tahun 2023	KAKAM TEPIAN BUAH	17.500.000,00	TEPIAN BUAH	
51	16.01/04.0/0001020/LS/2023	05/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) HARAPAN MAJU Tahun 2023	KAKAM HARAPAN MAJU	17.500.000,00	HARAPAN MAJU	
52	16.01/04.0/0001021/LS/2023	05/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) LOBANG KELATAK Tahun 2023	KAKAM LOBANG KELATAK	17.500.000,00	LOBANG KELATAK	
53	16.01/04.0/0001022/LS/2023	05/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) PUNAN MAHKAM Tahun 2023	KAKAM PUNAN MAHKAM	17.500.000,00	PUNAN MAHKAM	
54	16.01/04.0/0001050/LS/2023	18/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) TELUK HARAPAN Tahun 2023	KAKAM TELUK HARAPAN	17.500.000,00	TELUK HARAPAN	
55	16.01/04.0/0001049/LS/2023	18/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) PUNAN MALINAU Tahun 2023	KAKAM PUNAN MALINAU	17.500.000,00	PUNAN MALINAU	
56	16.01/04.0/0001064/LS/2023	31/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) GIRING2 Tahun 2023	KAKAM GIRING2	17.500.000,00	GIRING2	

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
57	16.01/04.0/0001109/LS/2023	09/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) RANTAU PANJANG Tahun 2023	KAKAM RANTAU PANJANG	17.500.000,00	RANTAU PANJANG	
58	16.01/04.0/0001110/LS/2023	09/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM TALISAYAN	17.500.000,00	TALISAYAN	
59	16.01/04.0/0001111/LS/2023	09/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) PULAU DERAWAN Tahun 2023	KAKAM PULAU DERAWAN	17.500.000,00	PULAU DERAWAN	
60	16.01/04.0/0001122/LS/2023	14/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) LONG LAAI Tahun 2023	KAKAM LONG LAAI	17.500.000,00	LONG LAAI	
61	16.01/04.0/0001127/LS/2023	14/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) MANUNGGAL JAYA Tahun 2023	KAKAM MANUNGGAL JAYA	17.500.000,00	MANUNGGAL JAYA	
62	16.01/04.0/0001131/LS/2023	27/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) TABALAR ULU Tahun 2023	KAKAM TABALAR ULU	17.500.000,00	TABALAR ULU	
63	16.01/04.0/0001136/LS/2023	29/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) TELUK ALULU Tahun 2023	KAKAM TELUK ALULU	17.500.000,00	TELUK ALULU	
64	16.01/04.0/0001137/LS/2023	29/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) BIATAN BARU Tahun 2023	KAKAM BIATAN BARU	17.500.000,00	BIATAN BARU	
65	16.01/04.0/0001209/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) TANJUNG PEREPAT Tahun 2023	KAKAM TANJUNG PEREPAT	17.500.000,00	TANJUNG PEREPAT	
66	16.01/04.0/0001210/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) KASAI Tahun 2023	KAKAM KASAI	17.500.000,00	KASAI	
67	16.01/04.0/0001211/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) BIATAN BAPINANG Tahun 2023	KAKAM BIATAN BAPINANG	17.500.000,00	BIATAN BAPINANG	
68	16.01/04.0/0001212/LS/2023	06/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) GURIMBANG Tahun 2023	KAKAM GURIMBANG	17.500.000,00	GURIMBANG	
69	16.01/04.0/0001246/LS/2023	08/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) KAYU INDAH Tahun 2023	KAKAM KAYU INDAH	17.500.000,00	KAYU INDAH	
70	16.01/04.0/0001247/LS/2023	08/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) MUARA LESAN Tahun 2023	KAKAM MUARA LESAN	17.500.000,00	MUARA LESAN	
71	16.01/04.0/0001319/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) LABANAN JAYA Tahun 2023	KAKAM LABANAN JAYA	17.500.000,00	LABANAN JAYA	
72	16.01/04.0/0001320/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) BUYUNG2 Tahun 2023	KAKAM BUYUNG2	17.500.000,00	BUYUNG2	
73	16.01/04.0/0001321/LS/2023	15/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) PUNAN SEGAH Tahun 2023	KAKAM PUNAN SEGAH	17.500.000,00	PUNAN SEGAH	
74	16.01/04.0/0001324/LS/2023	19/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) SEMURUT Tahun 2023	KAKAM SEMURUT	17.500.000,00	SEMURUT	
75	16.01/04.0/0001360/LS/2023	20/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) TABALAR MUARA Tahun 2023	KAKAM TABALAR MUARA	17.500.000,00	TABALAR MUARA	
76	16.01/04.0/0001362/LS/2023	20/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) LESAN DAYAK Tahun 2023	KAKAM LESAN DAYAK	17.500.000,00	LESAN DAYAK	

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
77	16.01/04.0/0001376/LS/2023	21/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) LONG AYAN Tahun 2023	KAKAM LONG AYAN	17.500.000,00	LONG AYAN	
78	16.01/04.0/0001383/LS/2023	21/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) LONG LANUK Tahun 2023	KAKAM LONG LANUK	17.500.000,00	LONG LANUK	
79	16.01/04.0/0001384/LS/2023	21/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) SUKAN TENGAH Tahun 2023	KAKAM SUKAN TENGAH	17.500.000,00	SUKAN TENGAH	
80	16.01/04.0/0001386/LS/2023	21/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) TELUK SEMANTING Tahun 2023	KAKAM TELUK SEMANTING	17.500.000,00	TELUK SEMANTING	
81	16.01/04.0/0001387/LS/2023	27/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) BENA BARU Tahun 2023	KAKAM BENA BARU	17.500.000,00	BENA BARU	
82	16.01/04.0/0001388/LS/2023	27/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan (BK3) BIATAN LEMPAKE Tahun 2023	KAKAM BIATAN LEMPAKE	17.500.000,00	BIATAN LEMPAKE	
						Jumlah		**1.435.000.000,00**		



LAMPIRAN 4

Bantuan Propinsi Tahun Anggaran 2023

REKAPITULASI SP2D BANKEU PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 4

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
1	16.01/04.0/000264/LS/2023	17/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung Pegat Bukur Kec. Sambaliung Tahun 2023	KAKAM PEGAT BUKUR	110.000.000,00	PEGAT BUKUR	
2	16.01/04.0/000271/LS/2023	23/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung MALUANG Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM MALUANG	50.000.000,00	MALUANG	
3	16.01/04.0/000272/LS/2023	23/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung BOHE SILIAN Kec. MARATUA Tahun 2023	KAKAM BOHE SILIAN	50.000.000,00	BOHE SILIAN	
4	16.01/04.0/000273/LS/2023	23/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung PAYUNG2 Kec. MARATUA Tahun 2023	KAKAM PAYUNG2	50.000.000,00	PAYUNG2	
5	16.01/04.0/000274/LS/2023	23/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung BATU-BATU Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM BATU-BATU	50.000.000,00	BATU-BATU	
6	16.01/04.0/000275/LS/2023	23/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung TELUK HARAPAN Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM TELUK HARAPAN	50.000.000,00	TELUK HARAPAN	
7	16.01/04.0/000276/LS/2023	23/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung TASUK Kec. Sambaliung Tahun 2023	KAKAM TASUK	50.000.000,00	TASUK	
8	16.01/04.0/000277/LS/2023	23/05/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung LOBANG KELATAK Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM LOBANG KELATAK	50.000.000,00	LOBANG KELATAK	8
9	16.01/04.0/000301/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung KARANGAN Kec. BIATAN Tahun 2023	KAKAM KARANGAN	50.000.000,00	KARANGAN	
10	16.01/04.0/000302/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung TEMBUDAN Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM TEMBUDAN	110.000.000,00	TEMBUDAN	
11	16.01/04.0/000303/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung BUKIT MAKMUR JAYA Kec. BIATAN Tahun 2023	KAKAM BUKIT MAKMUR JAYA	50.000.000,00	BUKIT MAKMUR JAYA	
12	16.01/04.0/000304/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung BUKIT MAKMUR Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM BUKIT MAKMUR	50.000.000,00	BUKIT MAKMUR	

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
13	16.01/04.0/000305/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung TANJUNG PERANGAT Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM TANJUNG PERANGAT	50.000.000,00	TANJUNG PERANGAT	
14	16.01/04.0/000306/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung PANAAN Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM PANAAN	50.000.000,00	PANAAN	
15	16.01/04.0/000307/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung KAYU INDAH Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM KAYU INDAH	50.000.000,00	KAYU INDAH	
16	16.01/04.0/000308/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung BIRANG Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM BIRANG	50.000.000,00	BIRANG	
17	16.01/04.0/000309/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung SUKAN TENGAH Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM SUKAN TENGAH	110.000.000,00	SUKAN TENGAH	
18	16.01/04.0/000310/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung MUARA LESAN Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM MUARA LESAN	50.000.000,00	MUARA LESAN	
19	16.01/04.0/000311/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung TABALAR ULU Kec. TABALAR Tahun 2023	KAKAM TABALAR ULU	50.000.000,00	TABALAR ULU	
20	16.01/04.0/000312/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung PULAU BESING Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM PULAU BESING	50.000.000,00	PULAU BESING	
21	16.01/04.0/000313/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung SAMBAKUNGAN Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM SAMBAKUNGAN	50.000.000,00	SAMBAKUNGAN	
22	16.01/04.0/000314/LS/2023	05/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung SAMBURAKAT Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM SAMBURAKAT	50.000.000,00	SAMBURAKAT	14
23	16.01/04.0/000336/LS/2023	07/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung SUKA MURYA Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM SUKA MURYA	50.000.000,00	SUKA MURYA	
24	16.01/04.0/000337/LS/2023	07/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung CAPUAK Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM CAPUAK	50.000.000,00	CAPUAK	
25	16.01/04.0/000338/LS/2023	07/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung EKA SAPTA Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM EKA SAPTA	50.000.000,00	EKA SAPTA	

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
26	16.01/04.0/000339/LS/ 2023	07/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Desa Kampung SEI BEBANIR BANGUN Kec. SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM SEI BEBANIR BANGUN	50.000.000,00	SEI BEBANIR BANGUN	
27	16.01/04.0/000340/LS/ 2023	07/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah HARAPAN MAJU Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM HARAPAN MAJU	50.000.000,00	HARAPAN MAJU	
28	16.01/04.0/000341/LS/ 2023	07/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BUYUNG BUYUNG Kec. TABALAR Tahun 2023	KAKAM BUYUNG BUYUNG	50.000.000,00	BUYUNG BUYUNG	
29	16.01/04.0/000342/LS/ 2023	07/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TUBAAN Kec. TABALAR Tahun 2023	KAKAM TUBAAN	50.000.000,00	TUBAAN	7
30	16.01/04.0/000368/LS/ 2023	13/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah SIDO BANGEN Kec. KELAY Tahun 2023	KAKAM SIDO BANGEN	50.000.000,00	SIDO BANGEN	
31	16.01/04.0/000369/LS/ 2023	13/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah P. DERAWAN Kec. P. DERAWAN Tahun 2023	KAKAM P. DERAWAN	50.000.000,00	P. DERAWAN	
32	16.01/04.0/000370/LS/ 2023	13/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BENA BARU Kec. SBL Tahun 2023	KAKAM BENA BARU	50.000.000,00	BENA BARU	
33	16.01/04.0/000371/LS/ 2023	13/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah PILANJAU Kec. SBL Tahun 2023	KAKAM PILANJAU	50.000.000,00	PILANJAU	
34	16.01/04.0/000372/LS/ 2023	13/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah SUARAN Kec. SBL Tahun 2023	KAKAM SUARAN	50.000.000,00	SUARAN	
35	16.01/04.0/000373/LS/ 2023	13/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah PURNASARI JAYA Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM PURNASARI JAYA	50.000.000,00	PURNASARI JAYA	
36	16.01/04.0/000374/LS/ 2023	13/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TUNGGAL BUMI Kec. TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM TUNGGAL BUMI	50.000.000,00	TUNGGAL BUMI	7
37	16.01/04.0/000398/LS/ 2023	13/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LABANAN MAKARTI Kec. TELUK BAYUR Tahun 2023	KAKAM LABANAN MAKARTI	110.000.000,00	LABANAN MAKARTI	1
38	16.01/04.0/000400/LS/ 2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BIRANG Kec. GUNTA Tahun 2023	KAKAM BIRANG	60.000.000,00	BIRANG	TAMBAHAN
39	16.01/04.0/000401/LS/ 2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LABANAN MAKMUR Kec. TELUK BAYUR Tahun 2023	KAKAM LABANAN MAKMUR	50.000.000,00	LABANAN MAKMUR	

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
40	16.01/04.0/000406/LS/ 2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BATU PUTIH Kec. BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM BATU PUTIH	50.000.000,00	BATU PUTIH	
41	16.01/04.0/000407/LS/ 2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TUMBIT MELAYU Kec. TELUK BAYUR Tahun 2023	KAKAM TUMBIT MELAYU	110.000.000,00	TUMBIT MELAYU	
42	16.01/04.0/000408/LS/ 2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LONG LAAI Kec. SEGAH Tahun 2023	KAKAM LONG LAAI	50.000.000,00	LONG LAAI	
43	16.01/04.0/000409/LS/ 2023	20/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah MELATI JAYA Kec.SEGAH Tahun 2023	KAKAM MELATI JAYA	50.000.000,00	MELATI JAYA	6
44	16.01/04.0/000467/LS/ 2023	26/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LONG KELUH Kec.SEGAH Tahun 2023	KAKAM LONG KELUH	50.000.000,00	LONG KELUH	
45	16.01/04.0/000468/LS/ 2023	26/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah AMPEN MEDANG Kec.BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM AMPEN MEDANG	50.000.000,00	AMPEN MEDANG	
46	16.01/04.0/000469/LS/ 2023	26/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah PESAYAN Kec.SAMBALIUNG Tahun 2023	KAKAM PESAYAN	50.000.000,00	PESAYAN	
47	16.01/04.0/000470/LS/ 2023	26/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah MERANCANG ILIR Kec.GUNTA Tahun 2023	KAKAM MERANCANG ILIR	50.000.000,00	MERANCANG ILIR	
48	16.01/04.0/000471/LS/ 2023	26/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah SUMBER AGUNG Kec.BATU PUTIH Tahun 2023	KAKAM SUMBER AGUNG	50.000.000,00	SUMBER AGUNG	
49	16.01/04.0/000472/LS/ 2023	26/06/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LONG PELAY Kec.SEGAH Tahun 2023	KAKAM LONG PELAY	50.000.000,00	LONG PELAY	
50	16.01/04.0/000563/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah SIDUUNG INDAH Tahun 2023	KAKAM SIDUUNG INDAH	50.000.000,00	SIDUUNG INDAH	
51	16.01/04.0/000564/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TABALAR MUARA Tahun 2023	KAKAM TABALAR MUARA	50.000.000,00	TABALAR MUARA	
52	16.01/04.0/000565/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TEPIAN BUAH Tahun 2023	KAKAM TEPIAN BUAH	50.000.000,00	TEPIAN BUAH	
53	16.01/04.0/000566/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BUMI JAYA Tahun 2023	KAKAM BUMI JAYA	50.000.000,00	BUMI JAYA	
54	16.01/04.0/000567/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah GURIMBANG Tahun 2023	KAKAM GURIMBANG	50.000.000,00	GURIMBANG	

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
55	16.01/04.0/000568/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah PEGAT BATUMBUK Tahun 2023	KAKAM PEGAT BATUMBUK	50.000.000,00	PEGAT BATUMBUK	
56	16.01/04.0/000569/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TALISAYAN Tahun 2023	KAKAM TALISAYAN	50.000.000,00	TALISAYAN	
57	16.01/04.0/000570/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah INARAN Tahun 2023	KAKAM INARAN	50.000.000,00	INARAN	
58	16.01/04.0/000571/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah RANTAU PANJANG Tahun 2023	KAKAM RANTAU PANJANG	50.000.000,00	RANTAU PANJANG	
59	16.01/04.0/000572/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BATU RAJANG Tahun 2023	KAKAM BATU RAJANG	50.000.000,00	BATU RAJANG	
60	16.01/04.0/000573/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah DUMARING Tahun 2023	KAKAM DUMARING	50.000.000,00	DUMARING	
61	16.01/04.0/000574/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah SUMBER MULYA Tahun 2023	KAKAM SUMBER MULYA	50.000.000,00	SUMBER MULYA	
62	16.01/04.0/000575/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah KASAI Tahun 2023	KAKAM KASAI	50.000.000,00	KASAI	
63	16.01/04.0/000576/LS/ 2023	04/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LONG AYAP Tahun 2023	KAKAM LONG AYAP	50.000.000,00	LONG AYAP	14
64	16.01/04.0/000604/LS/ 2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LONG LAMCIN Tahun 2023	KAKAM LONG LAMCIN	50.000.000,00	LONG LAMCIN	
65	16.01/04.0/000605/LS/ 2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TELUK SEMANTING Tahun 2023	KAKAM TELUK SEMANTING	50.000.000,00	TELUK SEMANTING	
66	16.01/04.0/000599/LS/ 2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah GUNUNG SARI Tahun 2023	KAKAM GUNUNG SARI	50.000.000,00	GUNUNG SARI	
67	16.01/04.0/000606/LS/ 2023	05/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TUMBIT DAYAK Tahun 2023	KAKAM TUMBIT DAYAK	110.000.000,00	TUMBIT DAYAK	4
68	16.01/04.0/000634/LS/ 2023	06/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LABANAN JAYA Tahun 2023	KAKAM LABANAN JAYA	50.000.000,00	LABANAN JAYA	
69	16.01/04.0/000635/LS/ 2023	06/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LESAN DAYAK Tahun 2023	KAKAM LESAN DAYAK	50.000.000,00	LESAN DAYAK	2
70	16.01/04.0/000644/LS/ 2023	12/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TANJUNG BATU Tahun 2023	KAKAM TANJUNG BATU	50.000.000,00	TANJUNG BATU	
71	16.01/04.0/000667/LS/ 2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TELUK SULAIMAN Tahun 2023	KAKAM TELUK SULAIMAN	50.000.000,00	TELUK SULAIMAN	

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
72	16.01/04.0/000671/LS/ 2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah CAMPUR SARI Tahun 2023	KAKAM CAMPUR SARI	50.000.000,00	CAMPUR SARI	
73	16.01/04.0/000672/LS/ 2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah PUNAN MALINAU Tahun 2023	KAKAM PUNAN MALINAU	50.000.000,00	PUNAN MALINAU	
74	16.01/04.0/000673/LS/ 2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah PANTAI HARAPAN Tahun 2023	KAKAM PANTAI HARAPAN	50.000.000,00	PANTAI HARAPAN	
75	16.01/04.0/000674/LS/ 2023	20/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BIATAN ULU Tahun 2023	KAKAM BIATAN ULU	50.000.000,00	BIATAN ULU	
76	16.01/04.0/000699/LS/ 2023	24/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah MERANCANG ULU Tahun 2023	KAKAM MERANCANG ULU	50.000.000,00	MERANCANG ULU	
77	16.01/04.0/000700/LS/ 2023	24/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TELUK SUMBANG Tahun 2023	KAKAM TELUK SUMBANG	50.000.000,00	TELUK SUMBANG	
78	16.01/04.0/000701/LS/ 2023	24/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah PUNAN SEGAH Tahun 2023	KAKAM PUNAN SEGAH	50.000.000,00	PUNAN SEGAH	
79	16.01/04.0/000702/LS/ 2023	24/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TANJUNG PEREPAT Tahun 2023	KAKAM TANJUNG PEREPAT	50.000.000,00	TANJUNG PEREPAT	
80	16.01/04.0/000731/LS/ 2023	31/07/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah HARAPAN JAYA Tahun 2023	KAKAM HARAPAN JAYA	50.000.000,00	HARAPAN JAYA	
81	16.01/04.0/000747/LS/ 2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerint LONG AYAN Tahun 2023	KAKAM LONG AYAN	50.000.000,00	LONG AYAN	
82	16.01/04.0/000748/LS/ 2023	02/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah GIRING2 Tahun 2023	KAKAM GIRING2	50.000.000,00	GIRING2	
83	16.01/04.0/000800/LS/ 2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BIDUK2 Tahun 2023	KAKAM BIDUK2	50.000.000,00	BIDUK2	
84	16.01/04.0/000801/LS/ 2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah MERAPUN Tahun 2023	KAKAM MERAPUN	50.000.000,00	MERAPUN	
85	16.01/04.0/000803/LS/ 2023	10/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BIATAN ILIR Tahun 2023	KAKAM BIATAN ILIR	50.000.000,00	BIATAN ILIR	
86	16.01/04.0/000824/LS/ 2023	14/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah TELUK ALULU Tahun 2023	KAKAM TELUK ALULU	50.000.000,00	TELUK ALULU	
87	16.01/04.0/000847/LS/ 2023	29/08/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah MERABU Tahun 2023	KAKAM MERABU	50.000.000,00	MERABU	
88	16.01/04.0/000889/LS/ 2023	05/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LONG BELIU Tahun 2023	KAKAM LONG BELIU	50.000.000,00	LONG BELIU	
89	16.01/04.0/000903/LS/ 2023	06/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah MERASA Tahun 2023	KAKAM MERASA	50.000.000,00	MERASA	

NO	NO SP2D	TGL SP2D	NO SK	NO REKENING	URAIAN	KEPERLUAN UNTUK	NAMA PEMOHON	JUMLAH	LOKASI	ALAMAT
90	16.01/04.0/000904/LS/ 2023	06/09/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BIATAN BAPINANG Tahun 2023	KAKAM BIATAN BAPINANG	50.000.000,00	BIATAN BAPINANG	
91	16.01/04.0/0001019/LS/ 2023	05/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah PUNAN MAHKAM Tahun 2023	KAKAM PUNAN MAHKAM	50.000.000,00	PUNAN MAHKAM	
92	16.01/04.0/0001051/LS/ 2023	18/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah SEMURUT Tahun 2023	KAKAM SEMURUT	50.000.000,00	SEMURUT	
93	16.01/04.0/0001055/LS/ 2023	30/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah MAPULU Tahun 2023	KAKAM MAPULU	50.000.000,00	MAPULU	
94	16.01/04.0/0001084/LS/ 2023	30/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah PANDAN SARI Tahun 2023	KAKAM PANDAN SARI	50.000.000,00	PANDAN SARI	
95	16.01/04.0/0001090/LS/ 2023	30/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LONG LANUK Tahun 2023	KAKAM LONG LANUK	50.000.000,00	LONG LANUK	
96	16.01/04.0/0001091/LS/ 2023	30/10/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LONG SULUY Tahun 2023	KAKAM LONG SULUY	50.000.000,00	LONG SULUY	
97	16.01/04.0/0001107/LS/ 2023	09/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah MANUNGGAL JAYA Tahun 2023	KAKAM MANUNGGAL JAYA	50.000.000,00	MANUNGGAL JAYA	
98	16.01/04.0/0001108/LS/ 2023	09/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BALIKUKUP Tahun 2023	KAKAM BALIKUKUP	50.000.000,00	BALIKUKUP	
99	16.01/04.0/0001132/LS/ 2023	29/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BIATAN BARU Tahun 2023	KAKAM BIATAN BARU	50.000.000,00	BIATAN BARU	
100	16.01/04.0/0001133/LS/ 2023	29/11/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah BIATAN LEMPAKE Tahun 2023	KAKAM BIATAN LEMPAKE	50.000.000,00	BIATAN LEMPAKE	
101	16.01/04.0/0001248/LS/ 2023	08/12/2023		5.02.02.2.04.08	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah LONG DUHUNG Tahun 2023	KAKAM LONG DUHUNG	50.000.000,00	LONG DUHUNG	
						Jumlah		**5.420.000.000,00**		

LAMPIRAN 5

Persediaan Obat-Obatan Yang Sudah Kadaluarsa pada RSUD DR. Abdul Rivai

DAFTAR OBAT / ALKES / BMHP RUSAK / KADALUARSA
RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB
TAHUN 2023

Lampiran 5

No	Nama Obat	Satuan	NO BATCH	Exp Date	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1	AMOXYCILLIN 500 MG	Kaplet	CAMXA01983	Sep-22	10	320,01	3.200,10
2	ASAM TRANEKSAMAT 500MG INJ	Ampul	4701076	May-23	11	2.374,00	26.114,00
3	ASSUCRYL 0 HRG 38	Sachet	802118	Feb-23	3	84.078,50	252.235,50
4	ATRACURIUM BESILATE 50MG/5ML	AMPUL	PIL01150	Oct-23	12	46.200,00	554.400,00
5	ATROPINA SULFAT 0,25 MG	Ampul	0061A	Feb-23	3	1.718,00	5.154,01
6	AUGENTONIC MD	Keping	720285	Feb-23	47	24.003,75	1.128.176,25
7	BFLUID 500ML	Sofbag	F91F51A	Jun-23	86	76.300,40	6.561.834,40
8	BROADCED 1 GRAM INJEKSI	Vial	VROK10279	Feb-23	17	191.675,00	3.258.475,00
9	CANUL OKSIGEN - BAYI	Pieces	20898	Aug-23	1	6.325,00	6.325,00
10	CAPTOPRIL 25 MG	Tablet	46324001	Feb-23	8.141	136,00	1.107.176,00
11	CATAPRES 0,15 MG/ML INJ	Ampul	002312	May-23	27	36.290,10	979.832,70
12	CATAPRES 0,15 MG/ML INJ	Ampul	C69414	Oct-23	8	36.290,10	290.320,80
13	CATAPRES 0,15 MG/ML INJ	Ampul	C27792	Feb-23	20	36.290,10	725.802,00
14	CATARLENT ED MINI DOSE	Keping	1CA60908	Sep-23	26	22.000,00	572.000,00
15	CATARLENT ED MINI DOSE	Keping	61218	Dec-23	1	22.000,00	22.000,00
16	CERNEVIT	Vial	LE20C008	Jan-22	9	201.025,00	1.809.225,00
17	CHLORPROMAZIN 25 MG INJ	Ampul	36329002	Sep-22	1	1.531,02	1.531,02
18	DEHAF	Sct	22N0014	Rusak	6	9.139,61	54.837,66
19	DIGOXIN 0,25 MG	TABLET	A8617JY	Oct-23	1.180	124,00	146.314,45
20	DOXICICLIN 100 MG	Kapsul	52J0611	Aug-23	406	514,25	208.785,50
21	ENERCORE	Sct	21H0060	Aug-23	70	19.008,00	1.330.560,00
22	ESOMEPRAZOLE	VIAL	4911809	Aug-23	66	8.173,00	539.418,00
23	ESOMEPRAZOLE	VIAL	4711348	Jun-23	62	8.173,00	506.726,00
24	ETT 3.0	Pieces	230912	Sep-23	1	27.001	27.000,60
25	ETT RUSCH 3,5	Pieces	230711	Nov-22	1	27.000,60	27.000,60
26	ETT RUSCH NO. 4,0	Pieces	220381	Mar-23	21	27.000,60	567.012,60
27	ETT RUSCH NO. 4,5	Pieces	254877	Mar-22	9	27.000,60	243.005,40
28	ETT WORK NO 7	Pieces	191201	Aug-23	3	27.001,00	81.003,00
29	EZELIN INJ	PEN	23005	Oct-23	12	89.000,00	1.068.000,00
30	FOLAMIL GENIO	Tablet	53K0066	Rusak	30	3.846,00	115.380,00
31	FOROTIC	BOTOL	16003	Nov-23	2	79.475,00	158.950,00
32	GAMEX STERIL NO 8	PASANG	37304	Jun-22	10	20.350	203.500,00
33	GENTAMICIN 0,3% TETES MATA	Botol	256007	Jul-23	120	4.885,00	586.200,00
34	GLUVIGEN 500 MG	Tablet	D1A0098	Rusak	30	15.505,00	465.150,00
35	HALOPERIDOL 5 MG	Tablet	A20334	Feb-23	82	121,55	9.967,10
36	IFALMIN 500 MG	Tablet	D3A0401	Rusak	90	15.505,00	1.395.450,00
37	INFIMYCIN INJ	Vial	2150	Jan-23	49	137.500,00	6.737.500,00
38	INTRAOKULER NEO EYE 21	Box	125	Jan-23	1	198.000,00	198.000,00
39	IRBESARTAN 300MG	TABLET	10322	Mar-23	150	3.336,67	500.500,05
40	KALMECO 500 MCG INJEKSI	Ampul	15003	Sep-23	8	35.200,00	281.600,00
41	KALXETIN 20 MG	Kapsul	1254	Feb-23	26	6.233,33	162.066,67

No	Nama Obat	Satuan	NO BATCH	Exp Date	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
42	KCL(POTASIUM KLORIDA) INJ	Flacon	B901514	Nov-23	2	3.471,60	6.943,20
43	KETOROLAC 30MG INJ	Ampul	IB02K0261	Feb-23	20	923,00	18.460,00
44	LEVOFLOXACIN INF 500MG	Botol	5011940	Aug-23	36	19.800,00	712.800,00
45	LIDOKAIN 2%	Ampul	FIB07049	Aug-22	7	1.403,00	9.820,97
46	MAGNESIUM SULFAT 20 %	Colf	B71F51B	Aug-23	3	3.328,00	9.984,00
47	MAGNESIUM SULFAT 20 %	Colf	B71F51B	Jun-23	30	3.328,00	99.840,00
48	MAGNESIUM SULFAT 40%	Colf	B87A51C	Aug-23	1	4.700,30	4.700,30
49	MAGNESIUM SULFAT 40%	Colf	77L50A	Jun-23	1	4.700,00	4.700,00
50	MERTIGO	Tablet	52C0298	Sep-23	214	3.179,00	680.306,00
51	MEYLON INJEKSION	Flacon	B76E51A	May-23	24	6.750,00	162.000,00
52	MINIASPI 80 MG	Tablet	A10613	Mar-23	67	89,00	5.963,07
53	MORFIN INJEKSI 10MG/ML	AMPUL	G21255J	Jul-23	5	30.000	150.000
54	MYDRIATYL ED 0,5% 5CC, CEN	Botol	2M0328	Aug-23	1	31.762,50	31.762,50
55	MYORES	Tablet	A1B770	Feb-23	10	4.207,50	42.075,00
56	NGT 12	Pieces	2205757	Dec-22	148	15.538,00	2.299.624,00
57	NGT 8	Pieces	200118	Jan-23	1	12.099,40	12.099,40
58	NORAGES SYRUP	Botol	E2C586	Jan-23	4	29.920,00	119.680,00
59	NOVOMIX-30 INSULIN	Pen	MR7CJ91	Dec-23	9	112.000,00	1.008.000,00
60	OCTALBIN 5% 250ML	Botol	K101C6641	Dec-23	6	940.000,00	5.640.000,00
61	OFLOXACIN 200 MG	Tablet	180X1005	Jan-23	965	531,10	512.507,06
62	PANTOCAIN 0,5%	Botol	QPI1229	Dec-23	1	12.704,00	12.704,00
63	PHENOBARBITAL 30 MG	Tablet	E810968	Apr-23	383	187,00	71.621,00
64	PIRACETAM 800 MG	Tablet	PCMB00608	Dec-22	148	660,00	97.680,00
65	POLYGRAN MINI DOSE	Keping	OPG60417	Jan-23	16	19.250,00	308.000,00
66	PROCALMA LICAP	Kapsul	B711487	Jun-23	58	3.553,00	206.074,00
67	PROCALMA LICAP	Kapsul	B911745	Feb-23	30	3.553,00	106.590,00
68	RANTIN 150 MG	Tablet	KTRANA11590	Feb-23	10	4.207,50	42.075,00
69	RHINOFED	Tablet	52H0424	Jun-23	90	1.980,00	178.200,00
70	SERETIDE 50 INHALER	Botol	VP8U	Dec-23	2	59.000,00	118.000,00
71	SERUM ANTI BISA ULAR (BIOSAVE)	VIAL	4700621	Nov-23	5	948.750,00	4.743.750,00
72	SIMVASTATIN TABLET 10 MG	TABLET	16476	Dec-23	9	148,50	1.336,50
73	SKIN TRACTION KIT ADULT	Pieces	ST2973	Feb-23	1	313.187,00	313.187,00
74	SP PGA 8/0	Pieces	95879	Feb-23	1	185.130,00	185.130,00
75	SPINOCAN 26	Pieces	8B61	Dec-22	125	32.857,00	4.107.125,00
76	SPINOCAN 26	Pieces	8218	Sep-23	25	32.857,00	821.425,00
77	TELMISARTAN 80MG	Tablet	10110	Apr-23	40	4.350,00	174.000,00
78	TRYPAN BLUE 1,5 ML	Vial	OTB012001	Jan-23	5	66.000,00	330.000,00
79	TUTOSAL	Softbag	I030017B	Jun-23	40	37.790,00	1.511.600,17
80	URINTER	Tablet	K093K001	Apr-23	93	4.978,88	463.035,38
81	VOMCERAN 4MG/2ML	Ampul	KAVCRA12053	Mar-23	10	53.295,00	532.950,00
82	VOSAMA MINI DOSE	Keping	0460130	Jan-23	4	19.387,50	77.550,00
							-
TOTAL							**58.851.027,93**

DAFTAR OBAT COVID
RUSAK / KADALUARSA
RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB
TAHUN 2023

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Exp Date	Jumlah	Hrg Satuan	Total Harga
1	FABIFLU 200 MG	Tablet	05211494	Jul-23	4.896	15.980,00	78.238.080
2	TOCILIZUMAD 80MG/4ML INJ	Vial	189471	Feb-23	25	1.006.182,00	25.154.550
3	REMCOR INJ	Vial	OE053	Jan-23	865	290.000,00	250.850.000
4	COVIFOR INJ (Remdesisvir)	Vial	HGL21031	May-22	250	380.000,00	95.000.000
5	COVIFOR INJ (Remdesisvir)	Vial	HGL21031	May-22	157	425.000,00	66.725.000
6							-
							515.967.630

DAFTAR OBAT COVID
RUSAK / KADALUARSA
RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB
TAHUN 2023

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Exp Date	Jumlah	Sumber	Harga
1	FAVIPIRAVIR 200MG	Tablet	H10143N	Jul-22	200	DINKES PROVIN	-
2	COVIFOR INJ (Remdesisvir)	Vial	HGL21031	May-22	385	DINKES PROVIN	-
3	REMDAC (REMDESIVIR)	Vial	L100192	May-22	4.493	DINKES PROVIN	-

DAFTAR OBAT RUSAK / KADALUARSA
PROGRAM HIV

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Exp Date	Jumlah	Sumber	Harga
1	LAMIVUDINE 150MG	TABLET	G02026J	Mar-21	510	Dinkes	-
2	EFAVIRENZ 600MG	TABLET	H021XXX	Mar-21	30	Dinkes	-
3	EFAVIRENZ 600MG	TABLET	I02732J	Feb-20	210	Dinkes	-
4	TENOFOVIR	TABLET	K03385J	Oct-21	195	Dinkes	-
5	ZIDOVUDINE 100MG	TABLET	E91424J	Sep-23	509	Dinkes	-
6	EFAVIRENZ 600MG	TABLET	H129XXJ	Aug-23	5	Dinkes	-
7	EFAVIRENZ 600MG	TABLET	I02733J	Sep-23	600	Dinkes	-
8	COTRIMOXAZOLE 480 HIV	TABLET	A101819	Jul-22	300	Dinkes	-

DAFTAR OBAT RUSAK / KADALUARSA
PROGRAM TB

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Exp Date	Jumlah	Sumber	Harga
1	MDR VIT B6 25MG	Tablet	B9A809A	Mar-23	3.000	Dinkes	-
2	MDR ISONIAZID 300	Tablet	G00552B	Jun-22	5.000	Dinkes	-
3	MDR ISONIAZID 300	Tablet	G00550B	Dec-22	100	Dinkes	-
4	MDR ISONIAZID 300	Tablet	H01145A	Feb-21	215	Dinkes	-
5	MDR ETHAMBUTOL 400 MG	Tablet	ETB5284	Aug-20	1.387	Dinkes	-
6	MDR ETHIONAMID 250MG	Tablet	16TEF041A	Oct-20	272	Dinkes	-
7	MDR VIT B6 100MG	Tablet	B615874	Mar-23	250	Dinkes	-
8	MDR ISONIAZID 300	Tablet	BIG908A	Mar-23	306	Dinkes	-
9	MDR MOXIFLOXACIN TAB	Tablet	MX25871	Jun-23	1.085	Dinkes	-
10	MDR ISONIAZID 300	Tablet	NIB035A	Dec-23	1.070	Dinkes	-
11	MDR LINEZOLID 600	Tablet	BLC72009A	Dec-23	333	Dinkes	-

DAFTAR OBAT RUSAK / KADALUARSA
PROGRAM MALARIA

No	Nama Obat	Satuan	No Batch	Exp Date	Jumlah	Sumber	Harga
1	PRIMAQUIN	TABLET	36386001-1	Aug-23	550	Dinkes	-



LAMPIRAN 6

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

DAN

LAPORAN AUDIT

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN KEUANGAN	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5-26

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU
JALAN RAJA ALAM I KM 5 TELP.(0554) 2020050
T A N J U N G R E D E B

PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Saipul Rahman
Alamat Kantor	: Jl Raja Alam I Km 5 Tg Redeb Berau
Alamat Domisili sesuai KTP	: Jl Durian III BI Blok C8 No 14 Tg Redeb Berau
Jabatan	: Direktur

Menyatakanbahwa:

1) Kami Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau

2) Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)di Indonesia;

3) a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar ,dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;dan

4) Kami bertanggung jawab atas system pengendalian intern dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjung Redeb, 18 Maret 2024



Saipul Rahman, M.Sc
Direktur

Muhammad Danial
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ijin Usaha KAP No. KEP. 298/KM, 1/2011

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor :00009/2.0844/AU.2/05/0131-1/1/III/2024

Dewan Pengawas **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal**
di -
Tempat

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal**, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal** tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal - hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal - hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan tekait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atasTata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Hal Lain

Laporan Keuangan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal** pada tanggal 31 Desember 2022 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik lain dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan nomor laporan 00032/2.0883/AU.2/05/0835-2/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap resiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Resiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal - hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap indepedensi kami dan jika relevan pengaman terkait.

Muhammad Danial
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ijin Usaha KAP No. KEP. 298/KM, 1/2011

Dari hal - hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal - hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit Utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang - undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MUHAMMAD DANIAL

00009

M. Danial, SE Ak MM CPA CA
N.R.A.P AP.0131

Jakarta, 18 Maret 2024

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
NERACA
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas		22.262.149.162	20.377.551.257
Piutang usaha		9.233.266.579	10.218.155.115
Persediaan		8.022.497.819	11.134.417.193
Jumlah Aset Lancar		**39.517.913.560**	**41.730.123.565**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - neto		169.278.872.838	169.801.068.165
Aset lain-lain		--	--
Jumlah Aset Tidak Lancar		**169.278.872.838**	**169.801.068.165**
JUMLAH ASET		**208.796.786.398**	**211.531.191.730**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang usaha		13.470.900	--
Utang pajak		1.663.568.531	847.445.869
Beban yang masih harus dibayar		82.653.488	33.109.638
Utang lain-lain		56.096.000	583.845.689
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**1.815.788.919**	**1.464.401.196**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang sewa guna usaha		--	266.684.991
Utang imbalan kerja		10.516.213.000	13.798.091.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**10.516.213.000**	**14.064.775.991**
JUMLAH KEWAJIBAN		**12.332.001.919**	**15.529.177.187**
EKUITAS			
Kekayaan pemda yang dipisahkan		171.320.860.000	171.320.860.000,00
Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya		4.676.266.000	4.676.266.000
Tambahan modal disetor		528.460.000	528.460.000
Modal hibah		14.760.000	14.760.000
Dana cadangan		4.709.893.182	4.849.540.006
Penyisihan laba		4.465.270.871	4.465.270.871
Saldo laba (rugi)		10.749.274.426	10.146.857.666
Jumlah Ekuitas		**196.464.784.479**	**196.002.014.543**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**208.796.786.398**	**211.531.191.730**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

		2023	2022
PENDAPATAN USAHA		75.469.517.964	71.551.506.366
BEBAN USAHA		72.565.899.291	67.510.429.917
LABA (RUGI) USAHA		**2.903.618.673**	**4.041.076.449**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan lain-lain		3.687.540.945	358.637.127
Beban lain-lain		(83.055.100)	(1.783.688.069)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		**3.604.485.845**	**(1.425.050.942)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**6.508.104.518**	**2.616.025.507**
Beban pajak penghasilan		1.234.492.380	1.300.358.840
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**5.273.612.138**	**1.315.666.667**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Kekayaan pemda yang dipisahkan	Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Tambahan modal disetor	Modal hibah	Dana cadangan	Penyisihan Laba	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2021	**171.320.860.000**	**4.676.266.000**	**528.460.000**	**14.760.000**	**5.116.809.006**	**4.465.270.871**	**13.135.614.638**	**199.258.040.515**
Dana sosial pendidikan	--	--	--	--	(267.269.000)	--	--	(267.269.000)
	--	--	--	--	--	--	--	--
Pajak asli daerah (PAD)							(375.330.008)	(375.330.008)
Koreksi Laba Ditahan	--	--	--	--	--	--	(3.929.093.631)	(3.929.093.631)
Laba (rugi) tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	1.315.666.667	1.315.666.667
Saldo 31 Desember 2022	**171.320.860.000**	**4.676.266.000**	**528.460.000**	**14.760.000**	**4.849.540.006**	**4.465.270.871**	**10.146.857.666**	**196.002.014.543**
Dana sosial pendidikan	--	--	--	--	(139.646.824)	--	--	(139.646.824)
Pajak asli daerah (PAD)	--	--	--	--	--	--	(460.483.333)	(460.483.333)
Jasa Produksi							(394.700.000)	(394.700.000)
Koreksi Laba Ditahan	--	--	--	--	--	--	(3.816.012.044)	(3.816.012.044)
Laba (rugi) tahun berjalan	--	--	--	--	--	--	5.273.612.138	5.273.612.138
Saldo 31 Desember 2023	**171.320.860.000**	**4.676.266.000**	**528.460.000**	**14.760.000**	**4.709.893.182**	**4.465.270.871**	**10.749.274.426**	**196.464.784.479**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba (Rugi) Usaha	**5.273.612.138**	**1.315.666.667**
Koreksi atas pos-pos yang tidak mempengaruhi Kas dari kegiatan operasi :	--	
Penyusutan aset tetap	10.525.139.833	10.409.087.251
Koreksi Laba Ditahan	(2.214.418.233)	(3.929.093.557)
PERUBAHAN MODAL KERJA		
Kenaikan / Penurunan Aset Lancar		
(Kenaikan) / Penurunan piutang usaha	(1.437.376.549)	3.390.183.146
(Kenaikan) / Penurunan persediaan	3.111.919.375	(1.041.270.420)
Kenaikan / (Penurunan) utang usaha	13.470.900	(56.171.030)
Kenaikan / (Penurunan) beban yang masih harus dibayar	49.543.850	(307.686.339)
Kenaikan / (Penurunan) utang pajak	1.538.135.822	(1.266.706.428)
Kenaikan / (Penurunan) utang lainnya	(527.749.689)	268.320.931
Kenaikan / (Penurunan) utang sewa guna usaha	(266.684.991)	(355.580.004)
Kenaikan / (Penurunan) utang imbalan kerja	(3.281.878.000)	962.296.000
Jumlah Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Operasi	**12.783.714.456**	**9.389.046.217**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Pembelian (pengadaan) aset tetap	(10.002.944.506)	(11.919.850.895)
Jumlah Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Investasi	**(10.002.944.506)**	**(11.919.850.895)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Kenaikan tambahan modal	(12.806.205)	--
Cadangan dana pendidikan	(139.646.824)	(267.269.000)
Pajak asli daerah (PAD)	(368.386.667)	(375.330.008)
Jasa Produksi	(375.330.008)	--
Jumlah Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Pendanaan	**(896.169.704)**	**(642.599.008)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	1.884.600.245	(3.173.403.686)
SALDO KAS DAN BANK AWAL PERIODE	20.377.551.257	23.550.954.943
SALDO KAS DAN BANK AKHIR PERODE	**22.262.151.502**	**20.377.551.257**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL KABUPATEN BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau pada awalnya merupakan Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Berau yang didirikan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 171/KPTS/CK/XII/1982 tanggal 4 Desember 1982 berkedudukan di Kota Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Dengan Pertimbangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi masa kini, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mengembangkan kemasa depan, Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Berau disesuaikan namanya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau Nomor 41 Tahun 1993 tanggal 15 Maret 1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Tingkat II No.7 Tahun 1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Pembentukan/Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Berau. PDAM Tirta Segah Kabupaten Berau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau. Perusahaan merupakan perangkat dari Pemerintah Kabupaten Berau dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Kepala Daerah (Kuasa Pemilik Modal).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 114 ayat (2) dan ayat (4) peraturan pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melaksanakan perubahan entitas hukum maka peraturan daerah No. 1 tahun 2013 tentang perusahaan daerah air minum tirta segah Kabupaten Berau Perlu diganti. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau adalah perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya, seluruh modalnya dimiliki oleh daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Struktur Organisasi dan Tata kerja

Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah No. 2 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020. Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau terdiri dari:

- KPM;
- Dewan Pengawas; dan
- Direksi.

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

b. Struktur Organisasi dan Tata kerja (lanjutan)

Sesuai Keputusan Bupati Berau No. 33 Tahun 2018 Tanggal 16 Januari 2018 dan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau, Surat Keputusan Bupati No.5 Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Periode 2019 - 2023 dan Keputusan Bupati Berau No. 439 Tahun 2016 Tanggal 08 Juni 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Berau No. 864 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau, susunan pengurus Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas

Ketua	: Drh Mustakim Suharjana
Direktur	: Saipul Rahman, S. Hut., M, ENVN.MAN,SC
Kabag. Keuangan & Adm. Umum	: Nasrudin Uttung, SE
Kabag. Teknik	: Syahril, SE., M.Si
Kabag. Hublang	: Yan AT, SE
Kabag. Satuan Pengawas Internal	: Datuk Syaipul Kasni

Karyawan

Bidang Umum	: 26 Orang
Bidang Teknik	: 40 Orang
Bidang Hublang	: 16 Orang
Karyawan/Pegawai Kontrak	: 9 Orang
Outsorsing	: 25 Orang

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Penyajian laporan keuangan

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Perusahaan memenuhi kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas pubik. Oleh karena itu manajemen Perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan efektif tahun buku 1 Januari 2011.

Meskipun persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang diterapkan sebelumnya maupun perkembangan terkini SAK tersebut, namun perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagaimana disyaratkan oleh standar tersebut. Oleh karena itu tujuan penyajian laporan keuangan bagi sebagian besar pemakai tetap terpenuhi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

b. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK ETAP

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2023 dan tahun 2022 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

c. Dasar penyusunan laporan keuangan

Perusahaan menetapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan Perusahaan.

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

d. Mata uang pelaporan, transaksi, dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dijelaskan lain.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (*spot rate*) pada saat terjadinya transaksi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

e. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
   a). Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow* subsidiaries);
   b). Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas;atau
   c). Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
iii. Pihak tersebut adalah *joint ventures* di mana entitas tersebut merupakan *venture* ;
iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv); Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v);atau
vi. Pihak tersebut adalah program imbalan kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perusahaan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

Perusahaan mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu Jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai “Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah yang terutang dari pelanggan atas jasa yang dilakukan atau barang dagangan yang dijual dalam kegiatan usaha normal. Piutang lain-lain terutama merupakan pinjaman dan penggantian yang diberikan kepada pihak ketiga.

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP).

Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah dan pada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Persediaan dikelompokan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu :
- Persediaan bahan kimia
- Persediaan bahan lainnya

Pembebanan pemakaian bahan kimia dan bahan instalasi kedalam pos biaya dicatat dengan metode FIFO.

i. Aset tetap

Aset tetap dibukukan menurut harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, sedangkan metode penyusutan yang digunakan adalah berdasarkan Undang-undang Perpajakan yakni sesuai SK Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/1994 dengan penggolongan penyusutan sebagai berikut:

Metode penyusutan dihitung dengan menggunakan presentase saldo menurun (*decleaning balance method*) berdasarkan perkiraan masa manfaat ekonomisnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

i. Aset tetap (lanjutan)

	Masa Manfaat	Prosentase (%)
Tanah	-	Tidak Disusutkan
Bangunan	20 Tahun	5,00%
Instalasi Sumber Air	8 Tahun	12,50%
Instalasi Pompa	8 Tahun	12,50%
Instalasi Pengolahan Air	8 Tahun	12,50%
Peralatan/Perlengkapan	8 Tahun	12,50%
Kendaraan	8 Tahun	12,50%
Inventaris/Perabot Kantor	4 Tahun	25,00%

Aset tetap yang telah berakhir masa manfaatnya, maka pada tahun tersebut seluruh nilai buku yang tersisa akan disusutkan sekaligus .

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat di atribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK-ETAP.

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

j. Aset tidak berfungsi

Aset tidak berfungsi merupakan aset tetap yang umur ekonomisnya (masa manfaatnya) telah habis. Namun beberapa aset tidak berfungsi tersebut masih digunakan dalam operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

k. Penurunan nlai aset

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dan informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

l. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha dan utang lain-lain adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok.

Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

m. Pajak penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perseroan tidak mengakui pajak tangguhan.

n. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar oleh Perusahaan karena diterimanya jasa selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi yang pembayarannya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

o. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

p. Imbalan kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK-ETAP Bab 23 "imbalan kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 (”PP 35/2021”). Sebelum PP 35/2021 diberlakukan, imbalan pascakerja dihitung dan dibayarkan berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 (“UU 13/2003”) tentang Ketenagakerjaan.

Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan ketentuan tersebut adalah program imbalan pasti.

Perusahaan mampu untuk menggunakan metode *projected unit credit* untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban terkait. Sehingga Perusahaan dalam menghitung kewajiban tersebut menggunakan asumsi aktuarial dan asumsi keuangan dalam menentukan kewajiban imbalan pascakerja, biaya jasa kini, bunga atas kewajiban imbalan, dan keuntungan atau kerugian aktuarial. Tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga pasar obligasi pemerintah pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui dalam laporan laba rugi. Perusahaan tidak menyelenggarakan aset program imbalan pasti.

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terjadinya.

q. Pendapatan dan Beban

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

q. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

i. Penjualan barang
Penjualan barang dakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:
a). Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dalihkan kepada pembeli;
b). Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat di mana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun control efektif atas barang yang terjual;
c). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
d). Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan, dan
e). Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

ii. Penjualan jasa
Penjualan jasa diakui dengan metode persentase penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi:
a). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
b). Beser kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;
c). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
d). Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal;dan
e). Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Pendapatan penjualan air yang disajikan dalam laporan laba rugi diakui/dicatat dan dilaporkan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan.

Pendapatan sambungan baru dan pendapatan penjualan non air diakui dan dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan sebagai berikut :
- Jika menurut prosedur, pelanggan/calon pelanggan diharuskan membayar secara tunai, maka pendapatan diakui dan dicatat pada saat pembayaran.
- Jika menurut prosedur, pelanggan/calon pelanggan diharuskan membayar secara angsuran, maka pendapatan diakui dan dicatat pada saat dokumen tagihan diterbitkan atau pada saat kontrak sambungan baru ditandatangani.
- Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda diterima.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

q. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

- Pendapatan yang berasal dari usaha kerjasama dengan pihak ketiga berupa royalti, *revenue sharing* , *production sharing* diakui atas dasar akrual. Sedang pendapatan berupa pembagian keuntungan dan deviden diakui pada saat hak untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*basis akrual*).. Pembebanan beban yang bersifat periodik seperti gaji, sewa, asuransi, harus dikaitkan dengan periode dimana beban tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan atau telah dibayar dimuka. Kecuali untuk listrik dan telephone dibukukan atas dasar cash basis.

r. Sumber utama ketidakpastian estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan, Perusahaan menggunakan basis estimasian dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus di evaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dan peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perusahaan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

<u>Penyisihan Penurunan Nilai Piutang</u>

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang, Perusahaan mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Perusahaan telah melakukan penelaahan tingkat penyisihan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas pinjaman.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (LANJUTAN)

r. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Penyusutan

Perusahaan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusulan diterapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Perusahaan mereviu umur manfaat nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Imbalan Pascakerja

Perusahaan mengakui imbalan pascakerja karyawan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 (“UU 11/2020”) mengenai Cipta Kerja yang diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021. Pada saat karyawan berhenti bekerja, Perusahaan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pension normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut, Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja, dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja, Perusahaan mengakui imbalan pascakerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan metode projected unit credit dan mengakui keuntungan - kerugian actuarial sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Dalam menentukan beban dan kewajiban imbalan pascakerja per tanggal laporan keuangan, Perusahaan menggunakan asumsi keuangan dan asumsi aktuarial.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan saldo kas dan setara kas dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas		
Kas kecil	398.006.647	92.533.771
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	825.000	825.000
PT Bank Pembangunan Daerah Syariah	1.203.176	1.203.176
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.634.610.198	202.193.718
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.493.969.304	13.503.628.979
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	8.733.534.837	6.577.166.613
Jumlah	**22.262.149.162**	**20.377.551.257**

4. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan saldo piutang usaha dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang penjualan air	26.886.226.627	25.489.432.429
Piutang penjualan non air	560.273.500	560.273.500
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(18.213.233.548)	(15.831.550.814)
Jumlah	**9.233.266.579**	**10.218.155.115**

Jumlah piutang usaha berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut :

	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang Penjualan Air		
Piutang kel. Pelanggan khusus (A1)	1.324.366.865	359.732.494
Piutang kel. Pelanggan khusus (A2)	21.604.726.326	850.049.982
Piutang kel. Pelanggan khusus (A3)	910.374.231	22.009.083.236
Piutang kel. Pelanggan khusus (A4)	108.871.900	1.124.080.381
Piutang kel. Pelanggan khusus (SOS)	390.680.344	137.057.850
Piutang kel. Pelanggan khusus (NK)	2.044.601.860	359.732.494
Piutang kel. Pelanggan khusus (NM)	361.026.427	396.588.000
Piutang kel. Pelanggan khusus (NB)	141.478.674	232.390.492
Piutang air Industri Kecil	--	--
Piutang air Industri Besar	--	777.500
Bandara	--	--
Hidran pelabuhan	100.000	19.940.000
Jumlah	**26.886.226.627**	**25.489.432.429**

4. PIUTANG USAHA (LANJUTAN)

	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang Penjualan Non Air		
Piutang rekening non air lainnya	560.273.500	560.273.500
Jumlah	**560.273.500**	**560.273.500**

Jumlah perincian piutang usaha bersih adalah sebagai berikut :

	Piutang Usaha 31 Desember 2023	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	Jumlah Piutang Usaha Bersih
Piutang Usaha			
Piutang kel. Pelanggan khusus (A1)	1.324.366.865	(878.943.054)	445.423.811
Piutang kel. Pelanggan khusus (A2)	21.604.726.326	(15.769.165.871)	5.835.560.455
Piutang kel. Pelanggan khusus (A3)	910.374.231	(62.591.264)	847.782.967
Piutang kel. Pelanggan khusus (A4)	108.871.900	(688.954)	108.182.946
Piutang kel. Pelanggan khusus (SOS)	390.680.344	(106.581.025)	284.099.319
Piutang kel. Pelanggan khusus (NK)	2.044.601.860	(1.023.232.699)	1.021.369.161
Piutang kel. Pelanggan khusus (NM)	361.026.427	(226.544.074)	134.482.353
Piutang kel. Pelanggan khusus (NB)	141.478.674	(145.486.607)	(4.007.933)
Piutang air Industri Kecil	--	--	--
Piutang air Industri Besar	--	--	--
Bandara	--	--	--
Hidran pelabuhan	100.000	--	100.000
Piutang rekening non air lainnya	560.273.500	--	560.273.500
Jumlah	**27.446.500.127**	**(18.213.233.548)**	**9.233.266.579**

	Piutang Usaha 31 Desember 2022	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha	Jumlah Piutang Usaha Bersih
Piutang Usaha			
Piutang kel. Pelanggan khusus (A1)	359.732.494	(764.006.654)	(404.274.160)
Piutang kel. Pelanggan khusus (A2)	850.049.982	(13.707.085.572)	(12.857.035.590)
Piutang kel. Pelanggan khusus (A3)	22.009.083.236	(54.406.417)	21.954.676.819
Piutang kel. Pelanggan khusus (A4)	1.124.080.381	(598.862)	1.123.481.519
Piutang kel. Pelanggan khusus (SOS)	137.057.850	(92.643.786)	44.414.064
Piutang kel. Pelanggan khusus (NK)	359.732.494	(889.428.032)	(529.695.538)
Piutang kel. Pelanggan khusus (NM)	396.588.000	(196.919.674)	199.668.326
Piutang kel. Pelanggan khusus (NB)	232.390.492	(126.461.817)	105.928.675
Piutang air industri besar	777.500	--	777.500
Bandara	--	--	--
Hidran pelabuhan	19.940.000	--	19.940.000
Piutang rekening non air lainnya	560.273.500	--	560.273.500
Jumlah	**26.049.705.929**	**(15.831.550.814)**	**10.218.155.115**

5. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan saldo persediaan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
Persediaan Bahan Operasi Kimia		
Persediaan Bahan Kimia Kaporit	35.447.971	298.686.053
Persediaan Bahan Kimia Polimer	--	--
Persediaan Bahan Kimia PAC	242.745.821	2.588.811.740
Persediaan Bahan Kimia Soda Ash	125.986.300	181.602.300
Persediaan Bahan Kimia Soda Caustic	2.640.000	2.640.000
Persediaan Bahan Operasi Lainnya		
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	678.815.744	367.027.800
Persediaan Bahan Instalasi		
Persediaan Pipa-Pipa	1.149.701.413	1.258.694.937
Persediaan Water Meter	2.144.198.645	2.666.966.750
Persediaan Accessories	3.642.961.925	3.769.987.613
Jumlah	**8.022.497.819**	**11.134.417.193**

6. ASET TETAP

Akun ini merupakan saldo aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2023			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Nilai Perolehan				
Tanah	54.722.618.910	30.000.000	--	54.752.618.910
Bangunan dan gedung	14.278.853.354	1.661.824.353	--	15.940.677.707
Instalasi sumber air	15.024.459.478	1.065.105.282	--	16.089.564.760
Instalasi pengolahan air	48.384.827.472	928.264.092	--	49.313.091.564
Transmisi dan distribusi	72.009.976.121	3.450.534.517	--	75.460.510.638
Peralatan/perlengkapan	1.165.962.726	22.700.000	--	1.188.662.726
Kendaraan/alat pengangkutan	3.340.994.000	180.352.000	--	3.521.346.000
Inventaris/perabot kantor	5.754.973.280	2.664.164.262	--	8.419.137.542
Jumlah	**214.682.665.341**	**10.002.944.506**	**--**	**224.685.609.847**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan dan gedung	2.140.745.078	613.474.928	--	2.754.220.006
Instalasi sumber air	4.272.713.911	584.191.229	--	4.856.905.140
Instalasi pengolahan air	10.709.991.311	2.701.560.759	--	13.411.552.070
Transmisi dan distribusi	20.354.723.986	5.620.310.726	--	25.975.034.712
Peralatan/perlengkapan	1.103.928.139	37.449.368	--	1.141.377.507
Kendaraan/alat pengangkutan	2.093.293.871	334.469.032	--	2.427.762.903
Inventaris/perabot kantor	4.206.200.880	633.683.791	--	4.839.884.671
Jumlah	**44.881.597.176**	**10.525.139.833**	**--**	**55.406.737.009**
Nilai Buku	**169.801.068.165**			**169.278.872.838**

6. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Des 2022			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Nilai Perolehan				
Tanah	54.722.618.910	--	--	54.722.618.910
Bangunan dan gedung	8.304.795.354	5.974.058.000	--	14.278.853.354
Instalasi sumber air	14.745.501.678	278.957.800	--	15.024.459.478
Instalasi pengolahan air	47.777.229.072	607.598.400	--	48.384.827.472
Transmisi dan distribusi	67.989.284.810	4.020.691.311	--	72.009.976.121
Peralatan/perlengkapan	1.165.962.726	--	--	1.165.962.726
Kendaraan/alat pengangkutan	2.987.290.000	353.704.000	--	3.340.994.000
Inventaris/perabot kantor	5.070.131.970	684.841.310	--	5.754.973.280
Jumlah	**202.762.814.520**	**11.919.850.821**	**--**	**214.682.665.341**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan dan gedung	1.790.119.370	350.625.708	--	2.140.745.078
Instalasi sumber air	3.667.822.465	604.891.446	--	4.272.713.911
Instalasi pengolahan air	7.953.488.566	2.756.502.745	--	10.709.991.311
Transmisi dan distribusi	14.418.154.495	5.936.569.491	--	20.354.723.986
Peralatan/perlengkapan	1.041.893.572	62.034.567	--	1.103.928.139
Kendaraan/alat pengangkutan	1.755.994.717	337.299.154	--	2.093.293.871
Inventaris/perabot kantor	3.845.036.740	361.164.140	--	4.206.200.880
Jumlah	**34.472.509.925**	**10.409.087.251**	**--**	**44.881.597.176**
Nilai Buku	**168.290.304.595**			**169.801.068.165**

7. ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo aset tetap tidak berfungsi dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
Harga perolehan aktiva tetap tidak dimanfaatkan	2.653.645.006	2.653.645.006
Harga perolehan aktiva tetap yang rusak	270.548.318	270.548.318
Akumulasi penyusutan	(2.924.193.324)	(2.924.193.324)
Nilai Buku	**--**	**--**

8. UTANG USAHA

Akun ini merupakan saldo utang usaha dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
	--	--
	--	--
	--	--
Utang Usaha	13.470.900	--
Nilai Buku	**13.470.900**	**--**

9. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan saldo utang pajak dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
Utang PPh Pasal 21	249.578.714	86.337.274
Utang PPh Pasal 23	25.080	5.340.088
Utang PPh Pasal 29	932.320.950	646.015.912
PPN Masukan Yang Ditahan	481.643.787	107.712.724
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2	--	2.039.871
Jumlah	**1.663.568.531**	**847.445.869**

b. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	31 Des 2023	31 Des 2022
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	**6.508.104.518**	**2.616.025.507**
Koreksi fiskal		
Perbedaan Temporer:		
- Beban (Manfaat) Imbalan Pasca Kerja	(2.909.652.000)	1.151.554.000
- Beban Penyisihan Piutang	2.381.682.734	2.381.682.734
- Pembayaran Manfaat Pensiun	(372.226.000)	(189.258.000)
Jumlah Perbedaan Temporer	(900.195.266)	3.343.978.734
Perbedaan Tetap		
- Beban Olahraga	50.771.300	32.558.000
- Bantuan Dan Sumbangan	258.917.000	185.674.000
- Beban Pajak	18.261.999	19.847.565
- Beban Pajak Jasa Giro	81.132.600	71.275.675
Penghasilan yang dikenakan pajak final :		
- Pendapatan Jasa Giro	(405.662.945)	(358.637.127)
Laba (Rugi) menurut fiskal	5.611.329.206	5.910.722.354
Penghasilan kena pajak dibulatkan	5.611.329.000	5.910.722.000
Beban Pajak penghasilan badan	**1.234.492.380**	**1.300.358.840**
Kredit Pajak:		
- Angsuran PPh Pasal 25	(302.171.430)	(654.342.928)
Pajak penghasilan badan (lebih) kurang bayar - PPh Pasal 29	**932.320.950**	**646.015.912**

10. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan saldo beban yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
Beban SPPD	--	--
Beban operasi lainnya	82.653.488	33.109.638
Jumlah	**82.653.488**	**33.109.638**

11. UTANG LAIN-LAIN JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan saldo utang lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
Titipan materai	--	20.443.210
Jaminan masa pemeliharaan	--	310.133.479
Titipan retribusi kebersihan	56.096.000	253.269.000
Jumlah	**56.096.000**	**583.845.689**

12. UTANG SEWA GUNA USAHA

Akun ini merupakan saldo utang sewa guna usaha dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2023	31 Des 2022
Utang sewa guna usaha	--	266.684.991
Jumlah	**--**	**266.684.991**

13. UTANG IMBALAN KERJA

Pencatatan Liabilitas imbalan kerja untuk tahun 2023 belum dilakukan perhitungan yang didasarkan pada perhitungan aktuaris. Tahun 2022 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dengan NO.2212/ETAP-TBA.AN/III-2022 tanggal 31 Desember 2022, yang didalam laporannya menggunakan metode ”Projected Unit Credit” dan asumsi utama sebagai berikut :

	31 Des 2023	31 Des 2022
- Kenaikan gaji	7,00 % per tahun	7,00 % per tahun
- Tingkat diskonto	7,06 % pertahun	6,78 % pertahun
- Rata-rata usia pegawai	43,69 tahun	43,52 tahun
- Usia pensiun	56 tahun	56 tahun
- Jumlah karyawan	80	82

Tabel berikut menyajikan komponen imbalan paska kerja karyawan yang diakui di dalam neraca dan beban-beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi.

a. Liabilitas yang diakui di neraca	31 Des 2023	31 Des 2022
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	10.516.213.000	13.798.091.000
Liabilitas yang diakui dalam Neraca	**10.516.213.000**	**13.798.091.000**

13. UTANG IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

b. Rekonsiliasi Jumlah yang diakui dalam Neraca

	31 Des 2023	31 Des 2022
Liabilitas (Kekayaan) pada awal tahun	13.798.091.000	12.835.795.000
Beban (Pendapatan)	(2.909.652.000)	1.151.554.000
Aset Program	--	--
Realisasi pembayaran manfaat	(372.226.000)	(189.258.000)
Liabilitas (Kekayaan) pada akhir tahun	**10.516.213.000**	**13.798.091.000**

c. Beban (Pendapatan) yang diakui dalam Laporan Laba Rugi

	31 Des 2023	31 Des 2022
Beban Jasa Kini	785.052.000	1.031.904.000
Beban (Manfaat) Jasa Lalu	--	(1.585.632.000)
Beban Bunga	973.524.000	966.940.000
(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria	(4.668.228.000)	738.342.000
Beban Imbalan Pasca Kerja	**(2.909.652.000)**	**1.151.554.000**

14. EKUITAS

a. Kekayaan Pemda yang dipisahkan

	31 Des 2023	31 Des 2022
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2011	2.000.000.000	2.000.000.000
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2009	2.700.000.000	2.700.000.000
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2010	1.000.000.000	1.000.000.000
Bantuan Dana Pemda Kab. Berau Tahun 2001,2002	9.000.000.000	9.000.000.000
Penyertaan Modal tahun 2018	149.460.860.000	149.460.860.000
Penyertaan Modal tahun 2020	5.900.000.000	5.900.000.000
Penyertaan Modal tahun 2021	1.260.000.000	1.260.000.000
Jumlah	**171.320.860.000**	**171.320.860.000**

b. Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya

	31 Des 2023	31 Des 2022
Bantuan penyertaan modal tahun 2011	4.676.266.000	4.676.266.000
Jumlah	**4.676.266.000**	**4.676.266.000**

c. Tambahan modal disetor

	31 Des 2023	31 Des 2022
Tambahan modal disetor (Tax Amnesty)	528.460.000	528.460.000
Jumlah	**528.460.000**	**528.460.000**

14. EKUITAS (LANJUTAN)

d. Modal hibah

	31 Des 2023	31 Des 2022
Computer	3.500.000	3.500.000
Printer	450.000	450.000
Mesin Pack	1.800.000	1.800.000
Computer	3.500.000	3.500.000
Kursi Putar	850.000	850.000
Kursi Lipat	80.000	80.000
Kursi Lipat	80.000	80.000
TV 20 "	1.500.000	1.500.000
Digital GS. 2500 Parabola	3.000.000	3.000.000
Jumlah	**14.760.000**	**14.760.000**

e. Dana cadangan

	31 Des 2023	31 Des 2022
Dana cadangan umum	2.976.847.248	2.976.847.248
Dana sosial pendidikan	1.733.045.934	1.872.692.758
Jumlah	**4.709.893.182**	**4.849.540.006**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau pasal 90 ayat 2 (b) laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa cadangan umum dan berupa sosial dan pendidikan. Cadangan umum ditempatkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau, sedangkan dana sosial dan pendidikan dialokasikan untuk program sosial dan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan bagi pengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.

f. Penyisihan laba

	31 Des 2023	31 Des 2022
Penyisihan laba	4.465.270.871	4.465.270.871
Jumlah	**4.465.270.871**	**4.465.270.871**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau pasal 90 ayat 2 (e) laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal digunakan untuk keperluan investasi kembali berupa penyisihan laba. Penyisihan laba dialokasikan untuk dana cadangan.

15. PENDAPATAN USAHA

Akun ini merupakan saldo pendapatan usaha dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Pendapatan penjualan air		
Harga Air	65.431.658.850	60.974.699.750
Jasa Administrasi	1.945.250.000	1.820.300.000
Penjualan Air Mobil Tangki	1.683.000	330.000
Pendapatan non air		
Pendapatan Sambungan Baru	7.169.865.460	7.643.226.451
Pendapatan BK Pasang Baru	--	2.483.600
Pendapatan Penyambungan Kemball	133.270.800	227.531.750
Pendapatan Denda	575.882.120	612.316.750
Pendapatan Balik Nama	4.200.000	4.400.000
Pendapatan Pemeriksaan Instalasi Pelanggan	16.000	--
Pendapatan Pemindahan Jaringan /Meter	207.691.734	266.218.065
Jumlah	**75.469.517.964**	**71.551.506.366**

16. BEBAN USAHA

Akun ini merupakan saldo beban usaha dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Beban Sumber Air		
Beban Operasi Sumber Air	5.353.211.499	6.075.333.193
Beban Pemeliharaan Sumber Air	357.073.762	752.148.787
Beban Air Baku	265.613.228	195.744.500
Beban Penyusutan Sumber Air	584.191.229	604.891.445
Beban Pengolahan Air		
Beban Operasi Pengolahan Air	20.971.630.273	18.073.755.117
Beban Pemeliharaan Pengolahan Air	783.377.966	490.405.821
Beban Penyusutan Pengolahan Air	2.701.560.759	2.756.502.745
Beban Transmisi dan Distribusi		
Beban Operasi Transmisi dan Distribusi	654.424.328	539.831.635
Beban Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	4.432.817.386	4.389.028.614
Beban Penyusutan Transmisi dan Distribusi	5.620.310.726	5.936.569.491
Beban Kemitraan		
Beban Kemitraan	--	91.969.900
Jumlah	*41.724.211.156*	*39.906.181.248*

16. BEBAN USAHA (LANJUTAN)

	2023	2022
Jumlah sebelumnya	*41.724.211.156*	*39.906.181.248*
Beban Umum dan Administrasi		
Beban Pegawai	14.422.568.407	14.960.719.853
Beban Dana Representatif Direksi	255.000.000	318.000.000
Beban Kantor	3.138.860.613	2.077.051.794
Beban Hubungan Langganan	969.234.939	1.108.254.935
Beban Penelitian dan Pengembangan	577.851.384	554.384.864
Beban Keuangan	26.985.009	35.979.996
Beban Pemeliharaan	1.355.644.812	881.472.506
Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	2.381.682.734	2.381.682.734
Beban (manfaat) Imbalan Kerja	--	(553.728.000)
Rupa-Rupa Beban Umum	6.094.783.118	4.729.306.418
Beban Penyusutan	1.619.077.119	1.111.123.569
Jumlah	**72.565.899.291**	**67.510.429.917**

17. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo pendapatan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Pendapatan Jasa Giro	405.662.945	358.637.127
Keuntungan Aktuaria	3.281.878.000	--
Jumlah	**3.687.540.945**	**358.637.127**

18. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldobeban lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Beban Administrasi Bank	830.000	6.671.394
Pajak Jasa Giro	81.132.600	71.275.675
Beban Cek	550.000	245.000
Beban Payroll	542.500	214.000
Beban Bunga Imbalan Kerja	--	966.940.000
Kerugian Imbalan Kerja	--	738.342.000
Jumlah	**83.055.100**	**1.783.688.069**

19. KOREKSI LABA DITAHAN

Koreksi laba ditahan adalah penyesuaian saldo piutang yaitu dengan mengurangi saldo piutang atas uang retribusi, denda, dan angsuran sambungan rumah (biaya pasang baru). Manajamen melakukan penyesuaian atas saldo tersebut dikarenakan:

a. Uang retribusi dan denda bukan merupakan hak Perusahaan;
b. Pengakuan pendapatan atas angsuran sambungan rumah diakui sesuai dengan progress pembayaran.

20. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 18 Maret 2024.



LAMPIRAN 7

LAPORAN KEUANGAN PT HUTAN SANGGAM BERAU TAHUN ANGGARAN 2023

PT HUTAN SANGGAM BERAU

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UNTUK TAHUN YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023

PT. HUTAN SANGGAM BERAU
Jl. Padat Karya RT. 01 Kel. Gn. Panjang Telp. (0554) 2022865
TANJUNG REDEB – KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT HUTAN SANGGAM BERAU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Nama	:	Roby Maula, S.Hut
	Alamat Kantor	:	Jl. Padat Karya RT 01 Tanjung Reded - Berau
	Alamat Domisili Sesuai KTP	:	Jl. Teuku Umar Komp Pengayoman No. 13 RT. 009 Tanjung Redeb – Berau
	No. Tlpn / Hp	:	0813 1655 5783
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	Nama	:	Adi Dhatta Arief
	Alamat Kantor	:	Jl. Padat Karya RT 01 Tanjung Reded - Berau
	Alamat Domisili Sesuai KTP	:	Jl. AW Syahranie Perum Villa Tamara RT 033 Samarinda Ulu – Samarinda
	No. Tlpn / Hp	:	0811 584 845
	Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau yang disertakan dengan laporan auditor independen;
2. Laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Hutan Sanggam Berau
5. Laporan keuangan tahun 2023 hanya diaudit KAP Thoufan dan Rosyid dan tidak ada akuntan publik lain yang mengaudit tahun buku 2023.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjung Redeb, 07 Februari 2024

Direktur Utama	Direktur Keuangan dan Umum
Roby Maula, S.Hut	Adi Dhatta Arief

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00005/3.0307/AU.1/01/0009-2/1/II/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT HUTAN SANGGAM BERAU
Jl. Padat Karya RT 01 Kel. Gn. Panjang
Tanjung Redeb - Kalimantan Timur

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT HUTAN SANGGAM BERAU ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP. THOUFAN DAN ROSYID

Thoufan Nuri SE., Ak., MSA., CPA., CA., BKP., ACPA.
Nomor Reg. Akuntan Publik : AP. 0009.

00005

7 Februari 2024

Kantor Pusat :
Address Dinoyo Permai Timur Kav. 7 A-4, Jl. MT. Haryono Malang, Jawa Timur
Phone +62341 307 0518
Fax +62341 307 0518
E-mail kaptnr@yahoo.com

Kantor Cabang :
Address Citraland City Blok D-03 No. 1, Jl. DI. Panjaitan Samarinda, Kalimantan Timur
Phone +62541 410 0641
Fax +62541 410 0641
E-mail kaptnr_smd@yahoo.com

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2g.4	1.649.691.758	5.768.870.477
Piutang Usaha Pihak Ketiga	2h.5	208.102.277	204.439.545
Piutang Pajak	2n.6	575.795.425	-
Piutang Lain-lain	2h.7		
Pihak Berelasi		59.235.472	9.882.400
Pihak Ketiga		660.363.126	194.130.677
Biaya Dibayar Dimuka	2i.8	14.802.083	20.052.083
Uang Muka	2i.9	188.490.170	10.000.000
Persediaan	2j.10	7.562.522	3.493.350
Jumlah Aset Lancar		**3.364.042.834**	**6.210.868.532**
ASET TIDAK LANCAR			
Properti Investasi - setelah dikurangi			
Akumulasi Penyusutan Sebesar			
Rp. 409.958.285,- Tahun 2023			
Rp. 353.412.314,- Tahun 2022	2k.11	720.961.131	777.507.102
Aset Tetap - Setelah Dikurangi			
Akumulasi Penyusutan Sebesar			
Rp 2.955.105.869,- Tahun 2023			
Rp 2.955.105.869,- Tahun 2023	2l.12	2.547.664.594	2.243.792.188
Aset Pajak Tangguhan	13	154.153.008	247.001.088
Aset Lain-lain	14	3.034.183.939	3.443.360.078
Jumlah Aset Tidak Lancar		**6.456.962.674**	**6.711.660.457**
TOTAL ASET		**9.821.005.507**	**12.922.528.989**

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
KEWAJIBAN & EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha - Pihak Ketiga	15	-	-
Utang Pajak	2n.16	104.484.231	1.253.416.895
Beban Akrual	17	2.281.071.613	2.912.109.433
Utang Lain - lain	18	116.408.277	129.230.883
Jumlah Kewajiban Lancar		**2.501.964.121**	**4.294.757.211**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Usaha - Pihak Ketiga	15	1.467.754.160	1.540.895.680
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	19	1.593.980.040	1.654.073.463
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		**3.061.734.200**	**3.194.969.143**
Total Kewajiban		**5.563.698.321**	**7.489.726.354**
EKUITAS			
Modal Dasar - 6.000 Lembar Saham, Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 Per Saham			
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh - 1.500 Lembar Saham	20	1.500.000.000	1.500.000.000
Penghasilan Komprehensip Lainnya		232.369.400	237.538.836
Cadangan Umum		2.467.620.669	1.237.787.010
Saldo Laba		57.317.117	2.457.476.790
Jumlah Ekuitas		**4.257.307.186**	**5.432.802.636**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**9.821.005.507**	**12.922.528.989**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Atas Nama dan Mewakili Direksi

Robby Maula, S.Hut
Direktur Utama

Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
PENDAPATAN	2o.21	8.525.585.656	13.119.679.257
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG	2o.22	(4.459.557.418)	(4.607.087.724)
Laba (Rugi) Kotor Usaha		**4.066.028.238**	**8.512.591.533**
Beban Personalia	2o.23	(2.815.402.279)	(3.937.262.155)
Beban Administrasi dan Umum	2o.24	(1.397.267.502)	(1.561.169.529)
		(4.212.669.781)	**(5.498.431.684)**
Laba (Rugi) Usaha		**(146.641.542)**	**3.014.159.849**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	2o.25		
Pendapatan Non Operasional		230.075.505	59.185.200
Beban Non Operasional		(28.681.763)	(15.991.800)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**201.393.742**	**43.193.400**
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	26	**54.752.200**	**3.057.353.249**
BEBAN PAJAK	2o.27		
Beban Pajak Kini		(38.440.112)	(638.390.580)
Beban PajakTangguhan		41.005.029	38.514.120
Jumlah Beban Pajak		**2.564.917**	**(599.876.460)**
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan	28	**57.317.117**	**2.457.476.790**
Penghasilan Komprehensif Lainnya :			
Pengakuan Kembali Atas Program Imbalan Pasca Kerja		(139.022.545)	(94.262.603)
Manfaat (Beban) Pajak Terkait		133.853.109	(109.187.250)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya, Setelah Pajak		**(5.169.436)**	**(203.449.853)**
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		**52.147.681**	**2.254.026.936**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Atas Nama dan Mewakili Direksi

Robby Maula, S.Hut
Direktur Utama

Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Catatan	Modal Saham	Laba Komprehensif Lain	Cadangan Umum	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo, 31 Desember 2021		**1.500.000.000**	**518.016.930**	**1.137.920.163**	**276.860.844**	**3.432.797.937**
Deviden	29	-	-	-	(276.860.844)	(276.860.844)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	-	-	2.457.476.790	2.457.476.790
Koreksi Cadangan Umum	20	-	-	99.866.847	-	99.866.847
Laba (Rugi) Aktuarial Yang Belum Diakui		-	(94.262.603)	-	-	(94.262.603)
Penyesuaian Laba Rugi Komprehensif Lain		-	(186.215.491)	-	-	(186.215.491)
Saldo, 31 Desember 2022		**1.500.000.000**	**237.538.836**	**1.237.787.010**	**2.457.476.790**	**5.432.802.636**
Penambahan Cadangan Umum Dari Pembagian Laba Rugi Tahun Buku 2022		-	-	1.228.738.395	(1.228.738.395)	-
Deviden 2022	29	-	-	-	(1.228.738.395)	(1.228.738.395)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	-	-	57.317.117	57.317.117
Koreksi Cadangan Umum	20	-	-	1.095.264	-	1.095.264
Laba (Rugi) Aktuarial Yang Belum Diakui		-	(139.022.545)	-	-	(139.022.545)
Penyesuaian Laba Rugi Komprehensif Lain		-	133.853.109	-	-	133.853.109
Saldo, 31 Desember 2023		**1.500.000.000**	**232.369.400**	**2.467.620.669**	**57.317.117**	**4.257.307.186**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Atas Nama dan Mewakili Direksi

Robby Maula, S.Hut
Direktur Utama

Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
- Penerimaan Kas Dari Pelanggan	8.623.730.499	14.697.639.820
- Penerimaan Bunga Bank	30.590.379	2.360.875
- Pembayaran Kas Kepada Pemasok dan Agen	(6.284.299.210)	(4.611.958.608)
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan	(4.055.979.457)	(4.459.437.693)
- Pembayaran Pajak Penghasilan	(599.876.460)	(151.670.291)
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	**(2.285.834.249)**	**5.476.934.103**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	(604.606.075)	(23.479.700)
Arus Kas Bersih Digunakan Dari Aktivitas Investasi	**(604.606.075)**	**(23.479.700)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembagian Deviden	(1.228.738.395)	(166.116.506)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	**(1.228.738.395)**	**(166.116.506)**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(4.119.178.719)**	**5.287.337.897**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5.768.870.477	481.532.580
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.649.691.758**	**5.768.870.477**
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Terdiri Dari :		
Kas	267.106.637	272.026.725
Bank	1.382.585.121	5.496.843.752
Jumlah	**1.649.691.758**	**5.768.870.477**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Atas Nama dan Mewakili Direksi

Robby Maula, S.Hut
Direktur Utama

Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Hutan Sanggam Berau (Perusahaan) yang semula bernama PT. Hutansanggam Laban Lestari didirikan dengan akta Nomor 02 tanggal 03 April 2003 yang dikeluarkan oleh Tn. Sony Thio, S.H. Notaris di Berau dan disahkan berdasarkan Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-12138.HT.01.01.TH 2003 ditetapkan tanggal 02 Juni 2003 dan dipublikasikan pada suplemen No. 64 dalam Lembaran Berita Negara Indonesia No. 6684 tanggal 12 Agustus 2003.
Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Hutansanggam Labanan Lestari Nomor 20 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh M. Fahmi Azis, SH., M.Kn Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) di Berau tentang pergantian nama perseroan terbatas yang semula bernama PT Hutansanggam Labanan Lestari menjadi PT Hutan Sanggam Berau. Akta perubahan pendirian tersebut telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146075.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 28 Juli 2022.

Rekomendasi dan Perizinan

- Nomor Pokok Wajib Pajak	:	02.250.996.2-725.000 terdaftar sejak 19 Juni 2003
- Nomor Induk Berusaha	:	0108220037819 Diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2022
- Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	:	No: S-56KT/WPJ.14/KP.0503/2022 tanggal 12 Agustus 2022 oleh KKP Madya Balikpapan

b. Bidang Usaha

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 22 Juli 2022 maksud dan tujuan Perseroan ini adalah, menjelankan usaha-usaha dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perusahaan bertujuan untuk turut melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian, Kehutanan dan Pertanian
   - Pertanian Raman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan meliputi perkebunan buah kelapa, perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya sapi perah, pembibitan dan budidaya kerbau potong, pembibitan dan budidaya kerbau perah, budidaya ayam ras pedaging, budidaya ayam ras petelur, pembibitan ayam lokal dan persilangannya, pembibitan dan budidaya Itik dan atau bebek, pembibitan dan budidaya burung puyuh, pembibitan dan budidaya merpati, pembibitan ayam ras, pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya
   - Pengolahan Kehutanan dan Penebangan, meliputi pemanfaatan kayu hutan, pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam, perkebunan karet dan tanam penghasil getah lainnya.

2. Bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
   - Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, meliputi perdaganga eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket atau supermarket atau hypermarket, dan perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik

3. Bidang Penyediaan Akomodasi dan penyediaaan Makan Minum
   - Penyedia Makanan dan Minuman, meliputi jasa boga untuk suatu *event* tertentu *(Event Catering)*

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

b. Bidang Usaha (Lanjutan)

4. Bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya
   - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, meliputi aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya

c. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 22 Juli 2022 dan berdasarkan Akta No. 14 tanggal 08 Oktober 2021 susunan pengurus perusahaan tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

		Tahun 2023	Tahun 2022
Dewan Komisaris			
- Komisaris Utama	:	Joko Rianto, S.Hut	Joko Rianto, S.Hut
- Komisaris	:	Drs. H. Ibnu Sina Asyari Fitriadi, SE., M.Si	Drs. H. Ibnu Sina Asyari Fitriadi, SE., M.Si
Dewan Direksi			
- Direktur Utama	:	Robby Maula, S.Hut	Robby Maula, S.Hut
- Direktur Operasional	:	Ir. Gunawan Setiyani	Ir. Gunawan Setiyani
- Direktur Keuangan Umum	:	Adi Dhatta Arief, SH	Adi Dhatta Arief, SH

Dalam menjalankan kegiatan usaha, dewan direksi mengangkat staf dan karyawan sesuai dengan kebutuhan.

d. Karyawan

Jumlah karyawan rata-rata perusahaan adalah sebanyak 25 orang tahun 2023 dan *23* orang untuk tahun 2022.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas operasi dilaporkan menggunakan metode langsung *(direct method)* .

Mata uang fungsional dan mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp).

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Amendemen PSAK 2 "Laporan arus kas"

Amandemen tersebut mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktifitas pembiayaan pada laporan arus kas.

Amandemen PSAK 13 "Properti investasi"

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk mengalihkan ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan. Untuk menyimpulkan bahwa terdapat perubahan penggunaan terjadi, pengujian perlu dilakukan untuk mengetahui apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi. Perubahan ini harus didukung oleh bukti atas penggunaan perubahan. Pada amandemen ini, dikonfirmasi juga bahwa perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukkan bukti perubahan penggunaan.

Amandemen PSAK 15 "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"

Amandemen tersebut mengizinkan perusahaan modal ventura, reksa dana, unit trust dan entitas serupa untuk memilih pengukuran investasi mereka di perusahaan asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). DSAK mengklarifikasi bahwa pemilihan tersebut harus dilakukan secara terpisah untuk setiap asosiasi atau ventura bersama saat pengakuan awal.

Amandemen PSAK 16 "Aset tetap"

Amandemen tersebut memberikan klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran dari tanaman produksi harus sesuai dengan standar yang relevan.

Amandemen PSAK 46 "Pajak penghasilan"

Amandemen tersebut mengklarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi. Amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi untuk pajak tangguhan dimana sebuah aset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih rendah dari dasar pengenaan pajak atas aset tersebut. Amandemen tersebut dari akuntansi untuk pajak tangguhan.

Amandemen PSAK 53 "Pembayaran berbasis saham"

Amandemen ini mengklarifikasi basis pengukuran untuk pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas dan akuntansi untuk modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham yang sebelumnya diklasifikasikan dari imbalan yang diselesaikan dengan kas menjadi imbalan yang diselesaikan dengan instrument ekuitas. Amandemen ini juga memperkenalkan sebuah pengecualian terhadap prinsip pada PSAK 53 yang mengharuskan suatu penghargaan diakui seakan-akan seluruhnya akan diselesaikan melalui pembayaran berbasis saham, ketika pemberi kerja diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pekerja terkait dengan pembayaran berbasis saham dan membayarkannya kepada otoritas pajak.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Amandemen PSAK 67 "Pengungkapan kepentingan dalam entitas"
Amandemen tersebut berlaku untuk kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sifat dari kepentingan di entitas lain, risiko yang terasosiasi dengan kepentingan dan efek dari kepentingan tersebut untuk laporan keuangan.

PSAK 69 "Agrikultur"
Standar ini menyajikan definisi dan kriteria pengakuan untuk aset biologis atau hasil agrikultur. Aset-aset tersebut diukur menggunakan nilai wajar dikurangi harga jual dengan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan.

Amandemen PSAK 62 "Kontrak asuransi"
Amandemen ini merupakan amandemen lanjutan dikarenakan oleh penerbitan PSAK 71. Standar yang diamandemen memberikan petunjuk bagi entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi terutama perusahaan asuransi, tentang bagaimana menerapkan PSAK 71.

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan.

Sementara ini perusahaan belum melakukan kajian yang terperinci atas klasifikasi dan pengukuran dari aset keuangan, instrumen utang yang sekarang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dianggap memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dengan begitu tidak ada perubahan perlakuan akuntansi untuk aset-aset tersebut.

Aset keuangan lainnya yang dimiliki mencakup:

a. Instrumen ekuitas yang sekarang diklasifikasikan sebagai AFS dimana pemilihan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya tersedia
b. Investasi dalam ekuitas yang sekarang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang kemungkinan besar akan dilanjutkan untuk diukur berdasarkan basis yang sama di bawah PSAK 71, dan
c. Instrumen utang yang sekarang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan diukur pada biaya amortisasi yang tampaknya memenuhi persyaratan untuk klasifikasi pada biaya amortisasi di bawah PSAK 71.

Oleh karena itu, perusahaan tidak mengharapkan pedoman baru tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangannya.

Tidak akan ada dampak terhadap perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan perusahaan, karena persyaratan yang baru hanya berdampak kepada perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dan perusahaan tidak memiliki liabilitas tersebut. Peraturan penghentian pengakuan telah dipindahkan dari PSAK 55 dan tidak mengalami perubahan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Peraturan akuntansi lindung nilai yang baru akan menyelaraskan akuntansi untuk instrumen lindung nilai lebih dekat lagi dengan praktik manajemen risiko perusahaan. Sebagai peraturan umum, akan lebih banyak lagi hubungan lindung nilai yang dapat memenuhi syarat untuk akuntasi lindung nilai, karena standar memperkenalkan pendekatan yang lebih berbasis prinsip. Sementara perusahaan masih belum melakukan tinjauan yang mendalam, aktivitas lindung nilai perusahaan sekarang akan tampak memenuhi persyaratan sebagai lindung nilai setelah menerapkan PSAK 71. Dengan demikian, perusahaan tidak mengharapkan dampak signifikan atas akuntansi untuk aktifitas lindung nilai.

Model penurunan nilai yang baru mensyaratkan pengakuan atas provisi penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit espektasian daripada hanya kerugian kredit seperti kasus dalam PSAK 55. Hal ini berlaku untuk aset keuangan diklasifikasi dalam biaya amortisasi, instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, kontrak aset dalam PSAK 72 Pendapatan dari kontrak pelanggan, piutang sewa, komitmen pinjaman dan kontrak garansi keuangan tertentu. Sementara perusahaan belum melakukan tinjauan mendalam tentang bagaimana provisi penurunan nilainya akan terkena dampak model baru ini, hal itu dapat menghasilkan pengakuan dini atas kerugian kredit.

PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

Sebuah standar untuk pengakuan penghasilan telah diterbitkan. Standar ini akan menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa penghasilan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa dialihkan ke pelanggan.

Standar mengijinkan pendekatan *retrospektif* penuh atau *retrospektif* modifikasian untuk penerapan.

Manajemen sedang meninjau efek dari penerapan standar baru atas laporan keuangan perusahaan dan telah mengidentifikasi hal-hal berikut yang akan terkena dampak:

- Akuntansi untuk program loyalitas pelanggan – PSAK 23 mensyaratkan total imbalan yang diperoleh harus dialokasikan ke poin dan barang berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif daripada metode nilai residu; hal ini dapat menghasilkan perbedaan antara jumlah yang dialokasikan ke barang yang dijual dan keterlambatan pengakuan porsi penghasilan.
- Akuntansi untuk biaya tertentu yang terjadi dalam pemenuhan kontrak – biaya tertentu yang saat ini dibebankan mungkin harus diakui sebagai aset dalam PSAK 72, dan
- Hak pengembalian – PSAK 72 mensyaratkan penyajian terpisah di laporan posisi keuangan atas hak pemulihan barang dari pelanggan dan kewajiban pengembalian.

PSAK 73 "Sewa"

PSAK 73 disahkan di September 2017. Hal ini akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan khusus bagi entitas uang telah menerapkan PSAK 72. Perusahaan tidak bermaksud untuk mengadopsi standar ini sebelum tanggal efektifnya. Penerapan akuntansi baru dan amandemen lainnya tidak berdampak potensial terhadap laporan keuangan perusahaan.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Kerugian akibat selisih kurs yang disebabkan karena devaluasi atau kondisi yang tidak normal, maka kerugian tersebut dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Kurs USD 1	15.439	15.731

e. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laba atau Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi;
b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iv. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Sedangkan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas tersedia untuk dijual yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi komprehensif dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas tersedia untuk dijual, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

i. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai kewajiban diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diperoleh.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada laporan posisi keuangan.

Investasi pada efek ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal dicatat sebesar biaya perolehan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

(a). Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

(b). Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari kas, bank dan semua deposito bank yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaanya.

h. Piutang

Pada saat pengakuan awal piutang diukur sebesar nilai wajar dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Penyisihan penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti obyektif bahwa perusahaan tidak akan dapat menagih semua piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, probabilitas bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan dalam pembayaran (lebih dari 360 hari jatuh tempo) dianggap sebagai indikator bahwa piutang telah turun nilainya. Jumlah penyisihan tersebut adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan, dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapuskan terhadap akun penyisihan. Penerimaan kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif.

i. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang Muka Pembelian diperhitungkan sesuai pembayaran dimuka dengan harga pembelian/nilai kontrak yang diperjanjikan pada saat penerimaan barang/jasa. Biaya dibayar dimuka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

j. Persediaan

Persediaan dinilai dengan biaya perolehannya, atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah *(the lower of cost or net realizable value)* . Biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan harga pembelian.

k. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang dikuasai oleh penyewa melalui sewa operasional untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi.

Properti investasi dinyatakan berdasarkan model harga perolehan yang dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan prasarana	20

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

l. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset Tetap dinilai dengan harga perolehan dan dinyatakan dalam neraca dengan nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun berganda untuk selain bangunan dengan taksiran masa manfaat masing-masing kelompok, yaitu sebagai berikut :

Jenis Aset	Masa Manfaat	Prosentase
Tanah	-	Tidak Disusutkan
Bangunan Permanen	20 Tahun	5%
Bangunan Tidak Permanen	10 Tahun	10%
Kendaraan	4 / 8 Tahun	25% / 50%
Inventaris Kantor	4 / 8 Tahun	25% / 50%

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
Apabila aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi komprehensif tahun berjalan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

m. Liabilitas yang Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan Pasca Kerja sebagaimana diatur dalam PSAK No.24 (revisi 2010) tentang, "Imbalan Kerja" Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal menundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut dihitung berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

o. Pendapatan dan Beban

Pendapatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dicatat berdasarkan hasil produksi yang dilakukan oleh pihak kedua yang jumlah kubikasinya m³ diperhitungkan berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan penerbitan *invoice* .

Beban-beban yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan dinyatakan dalam periode diakuinya pendapatan. Beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dialokasikan secara sistematis sepanjang periode diperoleh manfaatnya. Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual* basis).

p. Persetujuan Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau dan telah menyetujui untuk menerbitkan laporan keuangan 31 Desember 2023 pada tanggal 2024

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi. Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 29a.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana perusahaan menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto aset tetap perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan pada Catatan 11.

	2023	2022
	Rp	Rp
4. Kas dan Setara Kas		
Terdiri dari :		
- **Kas**		
- Kas Kecil	-	2.000.000
- Kas Tanjung	267.106.637	270.026.725
Jumlah	**267.106.637**	**272.026.725**
- **Bank**		
- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Rek. No. 148-00-04119536	911.928.090	5.496.843.752
- Bank Muamalat Rek. No.	470.657.031	-
Jumlah	**1.382.585.121**	**5.496.843.752**
Total	**1.649.691.758**	**5.768.870.477**
5. Piutang Usaha		
Piutang Usaha Pihak Ketiga		
- PT Wijaya Sukses Sejahtera	208.102.277	204.439.545
Jumlah	**208.102.277**	**204.439.545**
6. Piutang Pajak		
- PPh Pasal 28	575.795.425	-
Jumlah	**575.795.425**	**-**
7. Piutang Lain-lain		
Terdiri dari :		
Pihak Berelasi		
- Pegawai	59.235.472	8.105.701
- Perusda Sylva Kaltim Sejahtera	-	1.776.699
Jumlah	**59.235.472**	**9.882.400**
Pihak Ketiga		
- Alimuddin Merancang	53.500.000	53.500.000
- Marpai	44.000.000	44.000.000
- Agustinus	6.500.000	7.000.000
- PT Berkah Utama Pontianak	11.200.000	11.200.000
- PT Wijaya SS - Dana Talangan Dokumen dan Kompenmas	91.177.551	78.430.677
- PT Aksa	89.300.000	-
- PT Wana NP - Dana Talangan Dokumen	364.685.575	-
Jumlah	**660.363.126**	**194.130.677**
Total	**719.598.598**	**204.013.077**

	2023	2022
	Rp	Rp
8. Biaya Dibayar Dimuka		
Terdiri dari :		
- Sewa Tanah	218.750	5.468.750
- Sewa Mess Direksi	11.458.333	11.458.333
- Sewa Tanah Untuk Kandang Ayam	3.125.000	3.125.000
Jumlah	**14.802.083**	**20.052.083**
9. Uang Muka		
Terdiri dari :		
- Uang Muka Pembelian Mobil	-	10.000.000
- Uang Muka Pengurusan Dokumen RKT 2024	7.500.000	-
- Uang Muka Pembelian Spare Part Mobil Estrada Triton	2.200.000	-
- Uang Muka Rapat RUPS LB	178.790.170	-
- Uang Muka PPh Pasal 4 (2) Final	-	-
- Uang Muka Atas PPh Pasal 21 Kurang Potong	-	-
Jumlah	**188.490.170**	**10.000.000**
10. Persediaan		
Terdiri dari :		
- Label (PVC Tag)	6.169.426	2.495.250
- Ribbon	1.393.096	998.100
Jumlah	**7.562.522**	**3.493.350**

11. Properti Investasi

31 DESEMBER 2023

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Bangunan	1.130.919.417	-	-	1.130.919.417
	1.130.919.417	**-**	**-**	**1.130.919.417**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	353.412.315	56.545.971	-	409.958.286
	353.412.315	**56.545.971**	**-**	**409.958.286**
Nilai Buku	**777.507.102**			**720.961.131**

31 DESEMBER 2022

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Bangunan	1.130.919.417	-	-	1.130.919.417
	1.130.919.417	**-**	**-**	**1.130.919.417**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	296.866.344	56.545.971	-	353.412.315
	296.866.344	**56.545.971**	**-**	**353.412.315**
Nilai Buku	**834.053.073**			**777.507.102**

12. Aset Tetap

	31 DESEMBER 2023			
	Saldo Awal	**Mutasi**		**Saldo Akhir**
	1 Januari 2023	**Penambahan**	**Pengurangan**	**31 Desember 2023**
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Tanah	541.962.500	-	-	541.962.500
Bangunan	2.651.279.152	73.890.000	264.655.117	2.460.514.035
Kendaraan	1.612.827.636	472.287.436	290.000.000	1.795.115.072
Inventaris Kantor	1.061.909.216	58.428.639	415.158.999	705.178.856
	5.867.978.504	**604.606.075**	**969.814.116**	**5.502.770.463**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.085.397.677	130.546.043	264.655.117	951.288.603
Kendaraan	1.537.381.438	136.933.409	290.000.000	1.384.314.846
Inventaris Kantor	1.001.407.201	33.254.217	415.158.999	619.502.420
	3.624.186.316	**300.733.669**	**969.814.116**	**2.955.105.869**
Nilai Buku	**2.243.792.189**			**2.547.664.594**

	31 DESEMBER 2022			
	Saldo Awal	**Mutasi**		**Saldo Akhir**
	1 Januari 2022	**Penambahan**	**Pengurangan**	**31 Desember 2022**
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Tanah	541.962.500	-	-	541.962.500
Bangunan	2.646.879.152	4.400.000	-	2.651.279.152
Kendaraan	1.799.824.636	-	186.997.000	1.612.827.636
Inventaris Kantor	1.070.336.516	19.079.700	27.507.000	1.061.909.216
	6.059.002.804	**23.479.700**	**214.504.000**	**5.867.978.504**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	945.379.639	140.018.038	-	1.085.397.677
Kendaraan	1.699.229.705	25.148.733	186.997.000	1.537.381.438
Inventaris Kantor	1.009.171.979	19.742.222	27.507.000	1.001.407.201
	3.653.781.323	**184.908.993**	**214.504.000**	**3.624.186.316**
Nilai Buku	**2.405.221.481**			**2.243.792.189**

13. Aset Pajak Tangguhan

	31 DESEMBER 2023			
	Saldo Awal	**Dibebankan Ke Laporan Laba Rugi**	**Dibebankan Ke Penghasilan Komprehensif**	**Saldo Akhir**
	Rp	Rp	Rp	Rp
Manfaat / (Beban) Imbalan Pasca Kerja	247.001.088	41.005.029	133.853.109	154.153.008
Tantiem	-	-	-	-
Jumlah	**247.001.088**	**41.005.029**	**133.853.109**	**154.153.008**

	31 DESEMBER 2022			
	Saldo Awal	**Dibebankan Ke Laporan Laba Rugi**	**Dibebankan Ke Penghasilan Komprehensif**	**Saldo Akhir**
	Rp	Rp	Rp	Rp
Manfaat / (Beban) Imbalan Pasca Kerja	317.674.218	38.514.120	109.187.250	247.001.088
Tantiem	31.307.190	31.307.190	-	-
Jumlah	**348.981.408**	**69.821.310**	**109.187.250**	**247.001.088**

	2023	**2022**
	Rp	**Rp**
14. Aset Lain-lain		
Harga Perolehan		
Perizinan IUPHHK	5.614.299.000	5.614.299.000
Revisi RKU-IUPHHK	236.868.000	236.868.000
Penyusunan RKU-IUPHHK Berbasis IMHB-HA	49.012.504	49.012.504
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2018	358.404.849	358.404.849
Pelaksanaan IHMB Tahun 2020	453.134.285	453.134.285
Usaha Pengolahan Karet Dalam Pengembangan	199.677.000	199.677.000
Perkebunan Karet Dalam Pengembangan	283.132.100	283.132.100
Piutang Macet	79.469.400	79.469.400
Beban Pra Operasi	28.842.850	28.842.850
Beban Ditangguhkan	443.345.523	443.345.523
Penyusunan RKU PHHK	162.731.109	162.731.109
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2013	242.418.020	242.418.020
Perubahan Anggaran Dasar	16.500.000	16.500.000
Pelaksanaan IHMB RKU Periode 2022-2031	215.640.880	215.640.880
Jumlah	**8.383.475.520**	**8.383.475.520**

	2023	2022
	Rp	Rp
14. Aset Lain-lain (Lanjutan)		
Amortisasi		
Perizinan IUPHHK	3.157.107.465	2.971.835.598
Revisi RKU-IUPHHK	169.755.400	146.068.600
Penyusunan RKU-IUPHHK Berbasis IMHB-HA	49.012.504	48.522.379
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2018	358.404.849	292.697.290
Pelaksanaan IHMB Tahun 2020	453.134.285	453.134.281
Usaha Pengolahan Karet Dalam Pengembangan	79.870.800	39.935.400
Perkebunan Karet Dalam Pengembangan	113.252.840	56.626.420
Piutang Macet	31.787.760	15.893.880
Beban Pra Operasi	28.842.850	28.842.850
Beban Ditangguhkan	443.345.523	443.345.524
Penyusunan RKU PHHK	162.731.109	162.731.111
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2013	242.418.020	242.418.021
Perubahan Anggaran Dasar	16.500.000	16.500.000
Pelaksanaan IHMB RKU Periode 2022-2031	43.128.176	21.564.088
Jumlah	**5.349.291.581**	**4.940.115.441**
Nilai Buku	**3.034.183.939**	**3.443.360.078**

15. Utang Usaha Pihak Ketiga		
Terdiri dari :		
- PT Wijaya Sukses Sejahtera	1.467.754.160	1.540.895.680
Jumlah	**1.467.754.160**	**1.540.895.680**
Bagian Jangka Pendek		
Pihak Ketiga	-	-
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi		
Bagian Jangka Pendek - Pihak Ketiga	**1.467.754.160**	**1.540.895.680**

16. Utang Pajak		
Terdiri dari :		
- PPh Pasal 29 Badan	-	421.251.963
- PPh Pasal 25	53.199.215	9.111.498
- PPh Pasal 21	39.082.767	54.471.569
- PPh Pasal 4 Ayat 2 Final	4.749.997	4.634.257
- PPN Keluaran	7.452.252	763.947.608
Jumlah	**104.484.231**	**1.253.416.895**

	2023	2022
	Rp	Rp
17. Biaya Akrual		
Terdiri dari:		
- PT Inhutani I	1.750.085.440	1.441.416.644
- Kompensasi Masyarakat	160.045.700	132.749.140
- Tantiem Pengurus	-	402.750.000
- Beban Operasional	60.278.556	151.436.266
- Iuran APHI	73.154.810	68.583.465
- Jasa Karyawan	-	443.288.758
- Iuran Dana Pensiun	112.576.624	112.576.624
- Premi Produksi	-	3.051.446
- Tunjangan Cuti Tahunan	124.930.484	156.257.090
Jumlah	**2.281.071.613**	**2.912.109.433**
18. Utang Lain-lain		
Terdiri dari:		
Pihak Berelasi		
- Lebih Potong PPh 21	13.781.467	11.717.225
- Tunjangan Purnajabatan	-	30.000.000
- Uang Penghargaan Masa Kerja	102.626.810	87.513.658
Jumlah	**116.408.277**	**129.230.883**

19. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada Tanggal 25 Maret 2003, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut mengharuskan perusahaan untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak apabila karyawan mencapai usia pensiun, terjadi pemutusan hubungan kerja dan atau pengunduran diri berdasarkan masa kerja dan kondisi yang ditentukan dalam Undang - Undang tersebut. Uang penghargaan dan atau pengunduran diri berdasarkan masa kerja dan kondisi yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut dihitung sendiri oleh manajemen perusahaan.

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut adalah :

Jumlah Karyawan	18 orang	19 orang
Usia Pensiun Normal	56 Tahun	56 Tahun
Kenaikan Gaji	0%	0%
Tingkat Bunga	6%	4,25%

Beban imbalan kerja yang dibebankan di laporan laba rugi dan komprehensif lain merupakan jumlah neto dari :

Beban Jasa Kini	96.161.212	107.631.933
Beban Bunga	90.225.285	67.432.251
Jumlah	**186.386.497**	**175.064.184**

Liabilitas neto diestimasi atas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Nilai kini liabilitas	1.593.980.041	1.654.073.463
Jumlah	**1.593.980.041**	**1.654.073.463**

	2023	2022
	Rp	Rp

19. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Mutasi nilai kini liabilitas bersih yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut :

Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.654.073.463	1.443.974.104
Beban tahun berjalan	186.386.497	175.064.184
Amortisasi rugi yang belum direalisasi	(133.853.109)	139.983.654
Pembayaran imbalan kerja	(112.626.810)	(104.948.480)
Jumlah	**1.593.980.041**	**1.654.073.463**

20. Ekuitas

Terdiri dari:

- Modal Saham	1.500.000.000	1.500.000.000
- Penghasilan Komprehensif Lain	232.369.400	237.538.836
- Cadangan Umum	2.467.620.669	1.237.787.010
- Saldo Laba	57.317.117	2.457.476.790
Jumlah	**4.257.307.186**	**5.432.802.636**

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor
- Pemerintah Kabupaten Berau	750	50%	750.000.000
- PT Inhutani I	450	30%	450.000.000
- Perusda Sylva Kaltim Sejahtera	300	20%	300.000.000
Jumlah	**1500**	**100%**	**1.500.000.000**

	2023	2022
	Rp	Rp
Cadangan Umum		
- Saldo Awal Cadangan Umum	1.237.787.010	1.137.920.163
- Penambahan Cadangan Umum Dari Pembagian Laba Rugi Tahun Buku 2022	1.228.738.395	-
- Koreksi Saldo Cad. Umum Atas Pemeriksaan Pajak Tahun Buku 2020	-	(74.669.425)
- Koreksi Saldo Cad. Umum Atas Pembagian Pembebanan Beban IHMB Periode Tahun 2022 - 2	-	7.616.238
- Koreksi Cad. Umum Atas Pembebanan Biaya Yang Diacrualkan (diutangkan) ditahun 2021 atas	-	42.314.000
- Koreksi Cad. Umum Atas Koreksi Kelebihan PPh Pasal 25 Badan Masa Agustus 2020 Yang di F	-	9.111.498
- Koreksi Cad. Umum Atas Koreksi Kelebihan PPh Pasal 25 Badan Masa Agustus 2020 Yang di F	-	4.112.226
- Pembagian Deviden Tahun Buku 2021	-	110.744.338
- Koreksi Cad. Umum Atas Koreksi Kelebihan PPh Pasal 25 Badan Masa September 2020 Yang	-	637.973
- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	1.095.268	(0)
- Koreksi Amortisasi Aset Lain-lain	(4)	1
Jumlah	**2.467.620.669**	**1.237.787.010**

	2023	2022
	Rp	Rp
21. Pendapatan		
Terdiri dari :		
- Pendapatan IUPHHK	3.120.180.250	6.362.922.500
- Penggantian Biaya Investasi	5.405.405.406	6.756.756.757
Jumlah	**8.525.585.656**	**13.119.679.257**

22. Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung		
Terdiri dari :		
- Perencanaan		
- Amortisasi Iuran IUPHHK	185.271.867	185.271.867
- Amortisasi Penyusunan dan Pengesahan RKUPHHK	23.686.800	23.686.800
- Pengurusan dan Pengesahan RKT - IUPHHK Self Approval	41.475.000	20.115.000
- Biaya GIS (Pembuatan Peta Kerja Dll)	5.899.742	16.648.167
- Ceking Pengawasan (Dishut Prop & Kab RKT, SPORC Dephut)	-	1.155.000
- Amortisasi Orientasi Potensi dan Lokasi RKT 2017-2021, 18.000 Ha	490.125	5.391.375
- Amortisasi Re-Sertifikasi Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (F	65.707.560	71.680.968
- Monitoring Evaluasi RKT Self Approval	3.582.295	-
- Survailance PHPL 2023	54.740.376	7.679.220
- Beban Overhead	282.536.794	331.694.423
- Amortisasi IHMB Konsesi IUPHHK	21.564.088	21.564.088
- Penataan Areal Kerja URKT 2024	24.450.150	47.985.500
- ITSP URKT 2024	213.493.975	400.502.986
- Pembuatan Trace Jalan URKT 2024	30.386.450	60.929.514
Jumlah	**953.285.222**	**1.194.304.908**
- Pembinaan Hutan		
- Produksi Bibit dan Pemelihraan Bibit di Persemaian 37 Labanan 36.000 batang	61.760.000	10.606.250
- Penanaman Tanah TPN dan Jalan Sarat (30 Ha)	26.674.150	6.749.800
- Pemeliharaan Tanah TPN dan Jalan Sarat (30 Ha)	9.875.000	-
- Penanaman Kanan Kiri Jalan (30 Ha)	27.012.150	6.749.800
- Pemeliharaan tanaman Kanan Kiri Jalan (30 Ha)	9.875.000	-
- Pembuatan dan Pengukuran Erosi Sedimentasi 1 Unit	8.465.500	-
- Beban Overhead	121.562.164	107.366.143
- Produksi Bibit Depterocarpacea Untuk Cilin	-	8.860.000
- Perapihan Pasca Panen	32.410.000	13.673.000
- Pembebasan Pohon Binaan	32.410.000	19.715.000
- Checking Dishut Provinsi kaltim	817.572	1.524.780
- Checking Dishut Kabupaten	4.500.000	-
- Pembuatan Sempadan Sungai Siduung	9.561.900	-
Jumlah	**344.923.436**	**175.244.773**

	2023	2022
	Rp	Rp
22. Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung (Lanjutan)		
- Pengendalian Kebakaran dan Pamhut		
- Perlindungan Hutan / Patroli Pengamanan Hutan	68.676.000	56.976.000
- Perlengkapan Kerja	11.682.834	2.233.866
- Beban Overhead	318.085.255	358.505.748
- Pembuatan Papan Nama Larangan	-	5.651.000
Jumlah	**398.444.089**	**423.366.614**
- Pemanfaatan Hasil Hutan		
- Bahan Makan & Obat-obatan (bulan)	6.792.500	5.683.500
- Beban Perlengkapan Kerja Lapangan (set)	2.425.852	2.994.152
- Koordinasi Pengurusan LHP	3.750.000	5.250.000
- Pengurusan SKSHHK Siangung	2.742.807	5.736.702
- Register Penerbitan LHP & SKSHHK	20.356.498	46.291.638
- Monitoring RKT 2021 self approvel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim	3.000.000	4.264.473
- Monitoring RKT 2021 self approvel oleh BP2HP wilayah XIII Kaltim/BPHP Wilayah	-	5.690.152
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) Dishut Propinsi	-	6.000.000
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) oleh Dirjen BUHA	-	3.600.000
- Sewa TPK/Tpn/Logpon	5.833.333	5.833.333
- Biaya Rekonsiliasi PSDH DR Per Triwulan	18.247.500	16.251.000
- Iuran APHI	4.571.345	9.561.170
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) Dishut Kabupaten	3.212.700	-
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) BPHP Wil. XI Samarinda	5.679.145	-
- Beban Overhead	428.899.581	511.280.598
Jumlah	**505.511.261**	**628.436.718**
- Kelola Sosial		
- Beban Overhead	302.171.710	361.682.990
- Pengadaan Sarana dan Prasarana	10.250.000	12.250.000
- Sosial Budaya	45.200.000	42.200.000
Jumlah	**357.621.710**	**416.132.990**
- Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara		
- PBB Areal IUPHHK	985.293.543	1.030.372.393
Jumlah	**985.293.543**	**1.030.372.393**

	2023	2022
	Rp	Rp
22. Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung (Lanjutan)		
- Beban Camp dan Administrasi		
- ATK, Foto Copy, Cetakan	6.914.950	8.083.600
- BBM, Pelumas Kendaraan & Inventaris	135.939.613	100.596.182
- Spare Parts Kendaraan & Inventaris	65.973.000	41.862.500
- Material Bangunan Camp	1.095.263	-
- PKB dan Perijinan	5.686.794	9.634.190
- Penyusutan & Amortisasi	141.067.014	38.624.650
- Lain-Lain	114.255.026	78.118.500
- Beban Overhead	443.546.497	462.309.706
Jumlah	**914.478.157**	**739.229.328**
Total	**4.459.557.418**	**4.607.087.724**
23. Beban Personalia		
Terdiri dari :		
- Beban Gaji Direksi dan Karyawan	1.752.295.470	1.741.095.480
- Beban Honorarium Komisaris	441.000.000	441.000.000
- Beban Pajak Ditanggung Perusahaan (Komisaris)	-	19.640.600
- Beban Rapat Internal Komisaris	35.250.000	49.948.500
- Beban Premi Produksi	16.045.423	30.117.763
- Beban Tunjangan Hari Raya (THR)	182.041.290	181.483.248
- Beban Tantiem	-	402.750.000
- Beban Tunjangan Cuti	37.484.054	72.486.554
- Beban Asuransi Jiwa	108.000.000	108.000.000
- Beban Tunjangan Purna Jabatan	-	401.479.167
- Beban Imbalan Pasca Kerja	69.020.904	63.350.540
- Beban Tunjangan PPh Pasal 21	-	22.996.550
- Beban Jasa Karya	-	142.773.871
- Beban Jamuan Makan Minum	23.012.562	37.943.938
- Beban BPJS Tenagakerjaan Perusahaan	20.571.242	20.515.312
- Beban Pengobatan	9.829.260	9.521.352
- Beban Santunan Duka Cita	-	1.500.000
- Beban Diklat/Seminar/Loka Kerja	2.145.000	18.000.000
- Beban Olahraga dan Rekreasi	111.752.094	32.386.430
- Tunjangan Pajak Penghasilan	6.954.980	140.272.850
Jumlah	**2.815.402.279**	**3.937.262.155**

	2023	2022
	Rp	Rp
24. Beban Administrasi dan Umum		
Terdiri dari :		
- Beban Rapat	124.045.800	407.760.866
- Beban Perjalanan Dinas	221.400.000	212.661.800
- Beban Representasi	109.978.754	106.825.430
- Beban Sewa Mess	27.777.776	26.620.370
- Beban Jasa Profesional	40.000.000	50.000.000
- Beban BBM dan Pelumas	79.180.027	80.575.620
- Beban Listrik	42.468.294	41.818.294
- Beban Air PDAM	7.107.470	6.876.600
- Beban Spare Parts	43.630.360	37.795.400
- Beban ATK, Fotocopy dan Cetakan	12.112.364	12.585.550
- Beban Rumah Tangga Kantor dan Mess	62.345.860	20.008.230
- Beban Telekomunikasi	12.250.107	11.238.672
- Beban Perlengkapan Kantor dan Mess	10.036.625	12.885.200
- Beban Media Sosial, Branding, Surat Kabar dan Majalah	60.727.388	67.904.234
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	328.668.326	315.286.014
- Beban Perizinan	19.968.400	28.290.797
- Beban Pakaian Seragam Karyawan	27.416.000	20.135.000
- Beban Pos dan Pengiriman Dokumen	4.781.280	5.132.710
- Beban Lain-lain	163.372.671	96.768.742
Jumlah	**1.397.267.502**	**1.561.169.529**
25. Pendapatan (Beban) Non Operasional		
- **Pendapatan Non Operasional**		
- Pendapatan Jasa Giro	30.590.379	2.360.875
- Laba Penjualan Aset Tetap	68.468.469	-
- Usaha Lain-lain	131.016.657	56.824.325
Jumlah	**230.075.505**	**59.185.200**
- **Beban Non Operasional**		
- Beban Administrasi Bank	1.287.200	1.026.600
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	975.675	1.076.312
- Beban Usaha Lainnya	26.418.888	13.888.888
Jumlah	**28.681.763**	**15.991.800**
Total	**201.393.742**	**43.193.400**
26. Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan		
- Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	54.752.200	3.057.353.249
Jumlah	**54.752.200**	**3.057.353.249**

	2023	2022
	Rp	Rp
27. Beban Pajak		
- Pajak kini	(38.440.112)	(638.390.580)
- Pajak tangguhan	41.005.029	38.514.120
Jumlah	**2.564.917**	**(599.876.459)**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum taksiran pajak penghasilan seperti disajikan pada laporan laba (rugi) dan akumulasi laba fiskal perusahaan sebagai berikut :

Laba sebelum pajak	54.752.200	3.057.353.249
Kompensasi kerugian fiskal tahun lalu	-	-
Perbedaan Temporer		
- Imbalan pasca kerja	186.386.497	175.064.184
- Tantiem	-	-
Perbedaan Tetap		
- Jasa Giro	(30.590.379)	(2.360.875)
- Beban representasi	-	106.825.430
- Denda pajak	975.675	1.076.312
- Pajak ditanggung perusahaan	-	160.316.150
- Beban kelola sosial	-	34.200.000
- Beban jamuan makan minum	31.662.862	18.971.969
Jumlah	**188.434.655**	**494.093.170**
Laba Kena Pajak (Pembulatan)	**243.186.000**	**3.551.446.000**
Perhitungan pajak penghasilan		
- Tarif 11%	15.060.808	142.927.540
- Tarif 22%	23.379.304	495.463.039
Beban Pajak Kini	**38.440.112**	**638.390.580**
Kredit Pajak		
- PPh Pasal 23	108.108.108	135.135.135
- PPh Pasal 25	506.127.429	82.003.482
Jumlah	**614.235.537**	**217.138.617**
Jumlah penghasilan pajak (lebih) / kurang bayar	**(575.795.425)**	**421.251.963**

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Laba sebelum pajak menurut laba rugi dan penghasilan Komprehensif lain	54.752.200	3.057.353.249
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(12.045.429)	(672.617.660)
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap	(450.595)	(70.186.377)
Penyesuaian tarif pajak	15.060.808	142.927.540
Beban / (manfaat) pajak penghasilan	**2.564.784**	**(599.876.496)**

	2023	2022
	Rp	Rp
28. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan		
- Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan	57.317.117	2.457.476.790
Jumlah	**57.317.117**	**2.457.476.790**

29. Deviden Tunai

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan sebagaimana tercantum dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Hutan Sanggam Berau tanggal 10 Maret 2023, pemegang saham menyetujui pembagian deviden tunai final untuk tahun buku 2022 sebesar 50% atau sebesar Rp 1.228.738.395. Deviden sebesar Rp 614.369.197 telah dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau pada tanggal 27 Juli 2022 dan kepada PT Inhutani I sebesar Rp 368.621.519 tanggal 27 Juli 2022 dan dibayarkan kepada Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera sebesar Rp 245.747.679 tanggal 04 April 2022.

30. Ikatan

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama operasional (KSO) dengan PT. Wijaya Sukses Sejahtera untuk melakukan penebangan, pengupasan, penyaradan, pengangkutan, pemasaran dan penjualan kayu bulat di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Inhutani I (Labanan unit I) yang telah dikelola secara patungan antara pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I dan Perusahaan Daerah Sylvia Kaltim Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas areal 78.436 Ha.

Jangka waktu perjanjian selama 20 tahun mulai tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 15 Januari 2025, dengan fee sebesar Rp 280,000 per m3. setiap tahun kedua belah pihak akan meninjau kembali kenaikan *fee* tegakan kayu.

Sesuai kesepakatan bersama atas perubahan harga tegakan produksi kayu tertebang dan target capaian produksi tebangan pada unit kelestarian hutan labanan I PT Inhutani I yang dikelola PT Hutansanggam Labanan Lestari antara PT Hutansanggam Labanan Lestari dengan PT Wljaya Sukses Sejahtera tanggal 20 April 2022 bahwa PT Wljaya Sukses Sejahtera setuju membayar perubahan harga tegakan kayu bulat yang tertebang yang telah di LHP (Laporan Hasil Produksi) kan secara sah. dari harga Rp 280.000 per m3 menjadi sebagai berikut :

- Rp 350.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Meranti, dengan Diameter minimal 50 cm.
- Rp 325.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Meranti, dengan Diameter minimal 40 cm dan maksimal 49 cm.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Rimba Campurani, dengan Diameter minimal 50 cm.

PT. Wijaya Sukses Sejahtera berkewajiban membayar Dana Reboisasi Dan Provisi Sumber Daya Hutan (DR PSDH) atas nama perusahaan dan membayar semua biaya kompensasi masyarakat sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur no. 20 tahun 2000.

31. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal

a. Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi perusahaan.

31. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

(i) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko dimana perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Instrumen keuangan perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, investasi, piutang usaha, piutang lain-lain, dana yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan jatuh tempo :

	31 Desember 2023		
	< 365	> 365	Total
	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan			
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang			
Kas dan Setara Kas	1.649.691.758	-	1.649.691.758
Piutang Usaha Pihak Ketiga	208.102.277	-	208.102.277
Piutang Lain-lain	719.598.598	-	719.598.598
Aset Keuangan Lainnya	14.802.083	-	14.802.083
Jumlah	**2.592.194.717**	**-**	**2.592.194.717**

	31 Desember 2022		
	< 365	> 365	Total
	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan			
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang			
Kas dan Setara Kas	5.768.870.477	-	5.768.870.477
Piutang Usaha Pihak Ketiga	204.439.545	-	204.439.545
Piutang Lain-lain	204.013.077	-	204.013.077
Aset Keuangan Lainnya	20.052.083	-	20.052.083
Jumlah	**6.197.375.182**	**-**	**6.197.375.182**

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

	2023	**2022**
	Rp	**Rp**
Kas dan Setara Kas	1.649.691.758	5.768.870.477
Piutang Usaha Pihak Ketiga	208.102.277	204.439.545
Piutang Lain-lain	719.598.598	204.013.077
Aset Keuangan Lainnya	14.802.083	20.052.083
Jumlah	**2.592.194.717**	**6.197.375.182**

31. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

(ii) Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	31 Desember 2023		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan Diukur Pada			
Biaya Perolehan Diamortisasi			
Utang Lain-Lain	116.408.277	-	116.408.277
Utang Pajak	104.484.231	-	104.484.231
Beban Akrual	2.281.071.613	-	2.281.071.613
Utang Usaha Jangka Panjang	1.467.754.160	-	1.467.754.160
Jumlah	**3.969.718.281**	**-**	**3.969.718.281**

	31 Desember 2022		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan Diukur Pada			
Biaya Perolehan Diamortisasi			
Utang Lain-Lain	Rp 129.230.883	-	129.230.883
Utang Pajak	Rp 1.253.416.895		1.253.416.895
Beban Akrual	Rp 2.912.109.433	-	2.912.109.433
Utang Usaha Jangka Panjang	Rp 1.540.895.680	-	1.540.895.680
Jumlah	**Rp 5.835.652.891**	**-**	**5.835.652.891**

b. Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapkan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik(tingkat 1);
b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat di observasi) (tingkat

31. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan peseroan yang tercatat dalam laporan keuangan:

	2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	1.649.691.758	1.649.691.758
Piutang Usaha Pihak Ketiga	208.102.277	208.102.277
Piutang Lain-lain	719.598.598	719.598.598
Biaya Dibayar Dimuka	14.802.083	14.802.083
KEWAJIBAN LANCAR		
Utang Pajak	104.484.231	104.484.231
Utang Lain-Lain	116.408.277	116.408.277
Beban Akrual	2.281.071.613	2.281.071.613

	2022	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET LANCAR		
Kas Dan Setara kas	5.768.870.477	5.768.870.477
Piutang Usaha Pihak Ketiga	204.439.545	204.439.545
Piutang Lain-Lain	204.013.077	204.013.077
Biaya Dibayar Dimuka	20.052.083	20.052.083
KEWAJIBAN LANCAR		
Utang Pajak	1.253.416.895	1.253.416.895
Utang Lain-Lain	129.230.883	129.230.883
Beban Akrual	2.912.109.433	2.912.109.433

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

PT HUTAN SANGGAM BERAU

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UNTUK TAHUN YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023

PT. HUTAN SANGGAM BERAU
Jl. Padat Karya RT. 01 Kel. Gn. Panjang Telp. (0554) 2022865
TANJUNG REDEB – KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT HUTAN SANGGAM BERAU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Nama	:	Roby Maula, S.Hut
	Alamat Kantor	:	Jl. Padat Karya RT 01 Tanjung Reded - Berau
	Alamat Domisili Sesuai KTP	:	Jl. Teuku Umar Komp Pengayoman No. 13 RT. 009 Tanjung Redeb – Berau
	No. Tlpn / Hp	:	0813 1655 5783
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	Nama	:	Adi Dhatta Arief
	Alamat Kantor	:	Jl. Padat Karya RT 01 Tanjung Reded - Berau
	Alamat Domisili Sesuai KTP	:	Jl. AW Syahranie Perum Villa Tamara RT 033 Samarinda Ulu – Samarinda
	No. Tlpn / Hp	:	0811 584 845
	Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau yang disertakan dengan laporan auditor independen;
2. Laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Hutan Sanggam Berau
5. Laporan keuangan tahun 2023 hanya diaudit KAP Thoufan dan Rosyid dan tidak ada akuntan publik lain yang mengaudit tahun buku 2023.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjung Redeb, 07 Februari 2024

Direktur Utama	Direktur Keuangan dan Umum
Roby Maula, S.Hut	Adi Dhatta Arief

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00005/3.0307/AU.1/01/0009-2/1/II/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT HUTAN SANGGAM BERAU
Jl. Padat Karya RT 01 Kel. Gn. Panjang
Tanjung Redeb - Kalimantan Timur

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT HUTAN SANGGAM BERAU ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP. THOUFAN DAN ROSYID

Thoufan Nuri SE., Ak., MSA., CPA., CA., BKP., ACPA.
Nomor Reg. Akuntan Publik : AP. 0009.

00005

7 Februari 2024

Kantor Pusat :
Address Dinoyo Permai Timur Kav. 7 A-4, Jl. MT. Haryono Malang, Jawa Timur
Phone +62341 307 0518
Fax +62341 307 0518
E-mail kaptnr@yahoo.com

Kantor Cabang :
Address Citraland City Blok D-03 No. 1, Jl. DI. Panjaitan Samarinda, Kalimantan Timur
Phone +62541 410 0641
Fax +62541 410 0641
E-mail kaptnr_smd@yahoo.com

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2g.4	1.649.691.758	5.768.870.477
Piutang Usaha Pihak Ketiga	2h.5	208.102.277	204.439.545
Piutang Pajak	2n.6	575.795.425	-
Piutang Lain-lain	2h.7		
Pihak Berelasi		59.235.472	9.882.400
Pihak Ketiga		660.363.126	194.130.677
Biaya Dibayar Dimuka	2i.8	14.802.083	20.052.083
Uang Muka	2i.9	188.490.170	10.000.000
Persediaan	2j.10	7.562.522	3.493.350
Jumlah Aset Lancar		**3.364.042.834**	**6.210.868.532**
ASET TIDAK LANCAR			
Properti Investasi - setelah dikurangi			
Akumulasi Penyusutan Sebesar			
Rp. 409.958.285,- Tahun 2023			
Rp. 353.412.314,- Tahun 2022	2k.11	720.961.131	777.507.102
Aset Tetap - Setelah Dikurangi			
Akumulasi Penyusutan Sebesar			
Rp 2.955.105.869,- Tahun 2023			
Rp 2.955.105.869,- Tahun 2023	2l.12	2.547.664.594	2.243.792.188
Aset Pajak Tangguhan	13	154.153.008	247.001.088
Aset Lain-lain	14	3.034.183.939	3.443.360.078
Jumlah Aset Tidak Lancar		**6.456.962.674**	**6.711.660.457**
TOTAL ASET		**9.821.005.507**	**12.922.528.989**

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
KEWAJIBAN & EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha - Pihak Ketiga	15	-	-
Utang Pajak	2n.16	104.484.231	1.253.416.895
Beban Akrual	17	2.281.071.613	2.912.109.433
Utang Lain - lain	18	116.408.277	129.230.883
Jumlah Kewajiban Lancar		**2.501.964.121**	**4.294.757.211**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Usaha - Pihak Ketiga	15	1.467.754.160	1.540.895.680
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	19	1.593.980.040	1.654.073.463
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		**3.061.734.200**	**3.194.969.143**
Total Kewajiban		**5.563.698.321**	**7.489.726.354**
EKUITAS			
Modal Dasar - 6.000 Lembar Saham, Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 Per Saham			
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh - 1.500 Lembar Saham	20	1.500.000.000	1.500.000.000
Penghasilan Komprehensip Lainnya		232.369.400	237.538.836
Cadangan Umum		2.467.620.669	1.237.787.010
Saldo Laba		57.317.117	2.457.476.790
Jumlah Ekuitas		**4.257.307.186**	**5.432.802.636**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**9.821.005.507**	**12.922.528.989**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Atas Nama dan Mewakili Direksi

Robby Maula, S.Hut
Direktur Utama

Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
PENDAPATAN	2o.21	8.525.585.656	13.119.679.257
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG	2o.22	(4.459.557.418)	(4.607.087.724)
Laba (Rugi) Kotor Usaha		**4.066.028.238**	**8.512.591.533**
Beban Personalia	2o.23	(2.815.402.279)	(3.937.262.155)
Beban Administrasi dan Umum	2o.24	(1.397.267.502)	(1.561.169.529)
		(4.212.669.781)	**(5.498.431.684)**
Laba (Rugi) Usaha		**(146.641.542)**	**3.014.159.849**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	2o.25		
Pendapatan Non Operasional		230.075.505	59.185.200
Beban Non Operasional		(28.681.763)	(15.991.800)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**201.393.742**	**43.193.400**
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	26	**54.752.200**	**3.057.353.249**
BEBAN PAJAK	2o.27		
Beban Pajak Kini		(38.440.112)	(638.390.580)
Beban PajakTangguhan		41.005.029	38.514.120
Jumlah Beban Pajak		**2.564.917**	**(599.876.460)**
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan	28	**57.317.117**	**2.457.476.790**
Penghasilan Komprehensif Lainnya :			
Pengakuan Kembali Atas Program Imbalan Pasca Kerja		(139.022.545)	(94.262.603)
Manfaat (Beban) Pajak Terkait		133.853.109	(109.187.250)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lainnya, Setelah Pajak		**(5.169.436)**	**(203.449.853)**
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		**52.147.681**	**2.254.026.936**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Atas Nama dan Mewakili Direksi

Robby Maula, S.Hut
Direktur Utama

Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Catatan	Modal Saham	Laba Komprehensif Lain	Cadangan Umum	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo, 31 Desember 2021		**1.500.000.000**	**518.016.930**	**1.137.920.163**	**276.860.844**	**3.432.797.937**
Deviden	29	-	-	-	(276.860.844)	(276.860.844)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	-	-	2.457.476.790	2.457.476.790
Koreksi Cadangan Umum	20	-	-	99.866.847	-	99.866.847
Laba (Rugi) Aktuarial Yang Belum Diakui		-	(94.262.603)	-	-	(94.262.603)
Penyesuaian Laba Rugi Komprehensif Lain		-	(186.215.491)	-	-	(186.215.491)
Saldo, 31 Desember 2022		**1.500.000.000**	**237.538.836**	**1.237.787.010**	**2.457.476.790**	**5.432.802.636**
Penambahan Cadangan Umum Dari Pembagian Laba Rugi Tahun Buku 2022		-	-	1.228.738.395	(1.228.738.395)	-
Deviden 2022	29	-	-	-	(1.228.738.395)	(1.228.738.395)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-	-	-	57.317.117	57.317.117
Koreksi Cadangan Umum	20	-	-	1.095.264	-	1.095.264
Laba (Rugi) Aktuarial Yang Belum Diakui		-	(139.022.545)	-	-	(139.022.545)
Penyesuaian Laba Rugi Komprehensif Lain		-	133.853.109	-	-	133.853.109
Saldo, 31 Desember 2023		**1.500.000.000**	**232.369.400**	**2.467.620.669**	**57.317.117**	**4.257.307.186**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Atas Nama dan Mewakili Direksi

Robby Maula, S.Hut
Direktur Utama

Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

PT HUTAN SANGGAM BERAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
- Penerimaan Kas Dari Pelanggan	8.623.730.499	14.697.639.820
- Penerimaan Bunga Bank	30.590.379	2.360.875
- Pembayaran Kas Kepada Pemasok dan Agen	(6.284.299.210)	(4.611.958.608)
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan	(4.055.979.457)	(4.459.437.693)
- Pembayaran Pajak Penghasilan	(599.876.460)	(151.670.291)
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	**(2.285.834.249)**	**5.476.934.103**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	(604.606.075)	(23.479.700)
Arus Kas Bersih Digunakan Dari Aktivitas Investasi	**(604.606.075)**	**(23.479.700)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembagian Deviden	(1.228.738.395)	(166.116.506)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	**(1.228.738.395)**	**(166.116.506)**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(4.119.178.719)**	**5.287.337.897**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5.768.870.477	481.532.580
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.649.691.758**	**5.768.870.477**
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Terdiri Dari :		
Kas	267.106.637	272.026.725
Bank	1.382.585.121	5.496.843.752
Jumlah	**1.649.691.758**	**5.768.870.477**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Atas Nama dan Mewakili Direksi

Robby Maula, S.Hut
Direktur Utama

Adi Dhatta Arief, SH
Direktur Keuangan dan Umum

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Hutan Sanggam Berau (Perusahaan) yang semula bernama PT. Hutansanggam Laban Lestari didirikan dengan akta Nomor 02 tanggal 03 April 2003 yang dikeluarkan oleh Tn. Sony Thio, S.H. Notaris di Berau dan disahkan berdasarkan Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-12138.HT.01.01.TH 2003 ditetapkan tanggal 02 Juni 2003 dan dipublikasikan pada suplemen No. 64 dalam Lembaran Berita Negara Indonesia No. 6684 tanggal 12 Agustus 2003.
Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT Hutansanggam Labanan Lestari Nomor 20 tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh M. Fahmi Azis, SH., M.Kn Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) di Berau tentang pergantian nama perseroan terbatas yang semula bernama PT Hutansanggam Labanan Lestari menjadi PT Hutan Sanggam Berau. Akta perubahan pendirian tersebut telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146075.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 28 Juli 2022.

Rekomendasi dan Perizinan

- Nomor Pokok Wajib Pajak	:	02.250.996.2-725.000 terdaftar sejak 19 Juni 2003
- Nomor Induk Berusaha	:	0108220037819 Diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2022
- Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	:	No: S-56KT/WPJ.14/KP.0503/2022 tanggal 12 Agustus 2022 oleh KKP Madya Balikpapan

b. Bidang Usaha

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 22 Juli 2022 maksud dan tujuan Perseroan ini adalah, menjelankan usaha-usaha dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, perusahaan bertujuan untuk turut melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian, Kehutanan dan Pertanian
   - Pertanian Raman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan meliputi perkebunan buah kelapa, perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya, pembibitan dan budidaya sapi potong, pembibitan dan budidaya sapi perah, pembibitan dan budidaya kerbau potong, pembibitan dan budidaya kerbau perah, budidaya ayam ras pedaging, budidaya ayam ras petelur, pembibitan ayam lokal dan persilangannya, pembibitan dan budidaya Itik dan atau bebek, pembibitan dan budidaya burung puyuh, pembibitan dan budidaya merpati, pembibitan ayam ras, pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya
   - Pengolahan Kehutanan dan Penebangan, meliputi pemanfaatan kayu hutan, pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam, perkebunan karet dan tanam penghasil getah lainnya.

2. Bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
   - Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor, meliputi perdaganga eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket atau supermarket atau hypermarket, dan perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik

3. Bidang Penyediaan Akomodasi dan penyediaaan Makan Minum
   - Penyedia Makanan dan Minuman, meliputi jasa boga untuk suatu *event* tertentu *(Event Catering)*

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

b. Bidang Usaha (Lanjutan)

4. Bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya
   - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, meliputi aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya

c. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 22 Juli 2022 dan berdasarkan Akta No. 14 tanggal 08 Oktober 2021 susunan pengurus perusahaan tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

		Tahun 2023	Tahun 2022
Dewan Komisaris			
- Komisaris Utama	:	Joko Rianto, S.Hut	Joko Rianto, S.Hut
- Komisaris	:	Drs. H. Ibnu Sina Asyari Fitriadi, SE., M.Si	Drs. H. Ibnu Sina Asyari Fitriadi, SE., M.Si
Dewan Direksi			
- Direktur Utama	:	Robby Maula, S.Hut	Robby Maula, S.Hut
- Direktur Operasional	:	Ir. Gunawan Setiyani	Ir. Gunawan Setiyani
- Direktur Keuangan Umum	:	Adi Dhatta Arief, SH	Adi Dhatta Arief, SH

Dalam menjalankan kegiatan usaha, dewan direksi mengangkat staf dan karyawan sesuai dengan kebutuhan.

d. Karyawan

Jumlah karyawan rata-rata perusahaan adalah sebanyak 25 orang tahun 2023 dan *23* orang untuk tahun 2022.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktivitas operasi dilaporkan menggunakan metode langsung *(direct method)* .

Mata uang fungsional dan mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp).

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Amendemen PSAK 2 "Laporan arus kas"

Amandemen tersebut mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktifitas pembiayaan pada laporan arus kas.

Amandemen PSAK 13 "Properti investasi"

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk mengalihkan ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan. Untuk menyimpulkan bahwa terdapat perubahan penggunaan terjadi, pengujian perlu dilakukan untuk mengetahui apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi. Perubahan ini harus didukung oleh bukti atas penggunaan perubahan. Pada amandemen ini, dikonfirmasi juga bahwa perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukkan bukti perubahan penggunaan.

Amandemen PSAK 15 "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"

Amandemen tersebut mengizinkan perusahaan modal ventura, reksa dana, unit trust dan entitas serupa untuk memilih pengukuran investasi mereka di perusahaan asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). DSAK mengklarifikasi bahwa pemilihan tersebut harus dilakukan secara terpisah untuk setiap asosiasi atau ventura bersama saat pengakuan awal.

Amandemen PSAK 16 "Aset tetap"

Amandemen tersebut memberikan klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran dari tanaman produksi harus sesuai dengan standar yang relevan.

Amandemen PSAK 46 "Pajak penghasilan"

Amandemen tersebut mengklarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi. Amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi untuk pajak tangguhan dimana sebuah aset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih rendah dari dasar pengenaan pajak atas aset tersebut. Amandemen tersebut dari akuntansi untuk pajak tangguhan.

Amandemen PSAK 53 "Pembayaran berbasis saham"

Amandemen ini mengklarifikasi basis pengukuran untuk pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas dan akuntansi untuk modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham yang sebelumnya diklasifikasikan dari imbalan yang diselesaikan dengan kas menjadi imbalan yang diselesaikan dengan instrument ekuitas. Amandemen ini juga memperkenalkan sebuah pengecualian terhadap prinsip pada PSAK 53 yang mengharuskan suatu penghargaan diakui seakan-akan seluruhnya akan diselesaikan melalui pembayaran berbasis saham, ketika pemberi kerja diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pekerja terkait dengan pembayaran berbasis saham dan membayarkannya kepada otoritas pajak.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Amandemen PSAK 67 "Pengungkapan kepentingan dalam entitas"
Amandemen tersebut berlaku untuk kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sifat dari kepentingan di entitas lain, risiko yang terasosiasi dengan kepentingan dan efek dari kepentingan tersebut untuk laporan keuangan.

PSAK 69 "Agrikultur"
Standar ini menyajikan definisi dan kriteria pengakuan untuk aset biologis atau hasil agrikultur. Aset-aset tersebut diukur menggunakan nilai wajar dikurangi harga jual dengan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan.

Amandemen PSAK 62 "Kontrak asuransi"
Amandemen ini merupakan amandemen lanjutan dikarenakan oleh penerbitan PSAK 71. Standar yang diamandemen memberikan petunjuk bagi entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi terutama perusahaan asuransi, tentang bagaimana menerapkan PSAK 71.

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan.

Sementara ini perusahaan belum melakukan kajian yang terperinci atas klasifikasi dan pengukuran dari aset keuangan, instrumen utang yang sekarang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dianggap memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dengan begitu tidak ada perubahan perlakuan akuntansi untuk aset-aset tersebut.

Aset keuangan lainnya yang dimiliki mencakup:

a. Instrumen ekuitas yang sekarang diklasifikasikan sebagai AFS dimana pemilihan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya tersedia
b. Investasi dalam ekuitas yang sekarang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang kemungkinan besar akan dilanjutkan untuk diukur berdasarkan basis yang sama di bawah PSAK 71, dan
c. Instrumen utang yang sekarang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan diukur pada biaya amortisasi yang tampaknya memenuhi persyaratan untuk klasifikasi pada biaya amortisasi di bawah PSAK 71.

Oleh karena itu, perusahaan tidak mengharapkan pedoman baru tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangannya.

Tidak akan ada dampak terhadap perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan perusahaan, karena persyaratan yang baru hanya berdampak kepada perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dan perusahaan tidak memiliki liabilitas tersebut. Peraturan penghentian pengakuan telah dipindahkan dari PSAK 55 dan tidak mengalami perubahan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Peraturan akuntansi lindung nilai yang baru akan menyelaraskan akuntansi untuk instrumen lindung nilai lebih dekat lagi dengan praktik manajemen risiko perusahaan. Sebagai peraturan umum, akan lebih banyak lagi hubungan lindung nilai yang dapat memenuhi syarat untuk akuntasi lindung nilai, karena standar memperkenalkan pendekatan yang lebih berbasis prinsip. Sementara perusahaan masih belum melakukan tinjauan yang mendalam, aktivitas lindung nilai perusahaan sekarang akan tampak memenuhi persyaratan sebagai lindung nilai setelah menerapkan PSAK 71. Dengan demikian, perusahaan tidak mengharapkan dampak signifikan atas akuntansi untuk aktifitas lindung nilai.

Model penurunan nilai yang baru mensyaratkan pengakuan atas provisi penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit espektasian daripada hanya kerugian kredit seperti kasus dalam PSAK 55. Hal ini berlaku untuk aset keuangan diklasifikasi dalam biaya amortisasi, instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, kontrak aset dalam PSAK 72 Pendapatan dari kontrak pelanggan, piutang sewa, komitmen pinjaman dan kontrak garansi keuangan tertentu. Sementara perusahaan belum melakukan tinjauan mendalam tentang bagaimana provisi penurunan nilainya akan terkena dampak model baru ini, hal itu dapat menghasilkan pengakuan dini atas kerugian kredit.

PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

Sebuah standar untuk pengakuan penghasilan telah diterbitkan. Standar ini akan menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa penghasilan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa dialihkan ke pelanggan.

Standar mengijinkan pendekatan *retrospektif* penuh atau *retrospektif* modifikasian untuk penerapan.

Manajemen sedang meninjau efek dari penerapan standar baru atas laporan keuangan perusahaan dan telah mengidentifikasi hal-hal berikut yang akan terkena dampak:

- Akuntansi untuk program loyalitas pelanggan – PSAK 23 mensyaratkan total imbalan yang diperoleh harus dialokasikan ke poin dan barang berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif daripada metode nilai residu; hal ini dapat menghasilkan perbedaan antara jumlah yang dialokasikan ke barang yang dijual dan keterlambatan pengakuan porsi penghasilan.
- Akuntansi untuk biaya tertentu yang terjadi dalam pemenuhan kontrak – biaya tertentu yang saat ini dibebankan mungkin harus diakui sebagai aset dalam PSAK 72, dan
- Hak pengembalian – PSAK 72 mensyaratkan penyajian terpisah di laporan posisi keuangan atas hak pemulihan barang dari pelanggan dan kewajiban pengembalian.

PSAK 73 "Sewa"

PSAK 73 disahkan di September 2017. Hal ini akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (Lanjutan)

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan khusus bagi entitas uang telah menerapkan PSAK 72. Perusahaan tidak bermaksud untuk mengadopsi standar ini sebelum tanggal efektifnya. Penerapan akuntansi baru dan amandemen lainnya tidak berdampak potensial terhadap laporan keuangan perusahaan.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Kerugian akibat selisih kurs yang disebabkan karena devaluasi atau kondisi yang tidak normal, maka kerugian tersebut dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
	Rp	Rp
Kurs USD 1	15.439	15.731

e. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laba atau Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi;
b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iv. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Sedangkan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas tersedia untuk dijual yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi komprehensif dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas tersedia untuk dijual, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

i. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai kewajiban diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

e. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diperoleh.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada laporan posisi keuangan.

Investasi pada efek ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal dicatat sebesar biaya perolehan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

(a). Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

(b). Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari kas, bank dan semua deposito bank yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaanya.

h. Piutang

Pada saat pengakuan awal piutang diukur sebesar nilai wajar dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.

Penyisihan penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti obyektif bahwa perusahaan tidak akan dapat menagih semua piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, probabilitas bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan dalam pembayaran (lebih dari 360 hari jatuh tempo) dianggap sebagai indikator bahwa piutang telah turun nilainya. Jumlah penyisihan tersebut adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan, dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapuskan terhadap akun penyisihan. Penerimaan kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif.

i. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang Muka Pembelian diperhitungkan sesuai pembayaran dimuka dengan harga pembelian/nilai kontrak yang diperjanjikan pada saat penerimaan barang/jasa. Biaya dibayar dimuka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

j. Persediaan

Persediaan dinilai dengan biaya perolehannya, atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah *(the lower of cost or net realizable value)* . Biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan harga pembelian.

k. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang dikuasai oleh penyewa melalui sewa operasional untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi.

Properti investasi dinyatakan berdasarkan model harga perolehan yang dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan prasarana	20

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

l. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset Tetap dinilai dengan harga perolehan dan dinyatakan dalam neraca dengan nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun berganda untuk selain bangunan dengan taksiran masa manfaat masing-masing kelompok, yaitu sebagai berikut :

Jenis Aset	Masa Manfaat	Prosentase
Tanah	-	Tidak Disusutkan
Bangunan Permanen	20 Tahun	5%
Bangunan Tidak Permanen	10 Tahun	10%
Kendaraan	4 / 8 Tahun	25% / 50%
Inventaris Kantor	4 / 8 Tahun	25% / 50%

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
Apabila aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi komprehensif tahun berjalan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

m. Liabilitas yang Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan Pasca Kerja sebagaimana diatur dalam PSAK No.24 (revisi 2010) tentang, "Imbalan Kerja" Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal menundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut dihitung berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

o. Pendapatan dan Beban

Pendapatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dicatat berdasarkan hasil produksi yang dilakukan oleh pihak kedua yang jumlah kubikasinya m³ diperhitungkan berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan penerbitan *invoice* .

Beban-beban yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan dinyatakan dalam periode diakuinya pendapatan. Beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dialokasikan secara sistematis sepanjang periode diperoleh manfaatnya. Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual* basis).

p. Persetujuan Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan PT Hutan Sanggam Berau dan telah menyetujui untuk menerbitkan laporan keuangan 31 Desember 2023 pada tanggal 2024

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi. Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 29a.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana perusahaan menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto aset tetap perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan pada Catatan 11.

	2023	2022
	Rp	Rp
4. Kas dan Setara Kas		
Terdiri dari :		
- **Kas**		
- Kas Kecil	-	2.000.000
- Kas Tanjung	267.106.637	270.026.725
Jumlah	**267.106.637**	**272.026.725**
- **Bank**		
- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Rek. No. 148-00-04119536	911.928.090	5.496.843.752
- Bank Muamalat Rek. No.	470.657.031	-
Jumlah	**1.382.585.121**	**5.496.843.752**
Total	**1.649.691.758**	**5.768.870.477**
5. Piutang Usaha		
Piutang Usaha Pihak Ketiga		
- PT Wijaya Sukses Sejahtera	208.102.277	204.439.545
Jumlah	**208.102.277**	**204.439.545**
6. Piutang Pajak		
- PPh Pasal 28	575.795.425	-
Jumlah	**575.795.425**	**-**
7. Piutang Lain-lain		
Terdiri dari :		
Pihak Berelasi		
- Pegawai	59.235.472	8.105.701
- Perusda Sylva Kaltim Sejahtera	-	1.776.699
Jumlah	**59.235.472**	**9.882.400**
Pihak Ketiga		
- Alimuddin Merancang	53.500.000	53.500.000
- Marpai	44.000.000	44.000.000
- Agustinus	6.500.000	7.000.000
- PT Berkah Utama Pontianak	11.200.000	11.200.000
- PT Wijaya SS - Dana Talangan Dokumen dan Kompenmas	91.177.551	78.430.677
- PT Aksa	89.300.000	-
- PT Wana NP - Dana Talangan Dokumen	364.685.575	-
Jumlah	**660.363.126**	**194.130.677**
Total	**719.598.598**	**204.013.077**

	2023	2022
	Rp	Rp
8. Biaya Dibayar Dimuka		
Terdiri dari :		
- Sewa Tanah	218.750	5.468.750
- Sewa Mess Direksi	11.458.333	11.458.333
- Sewa Tanah Untuk Kandang Ayam	3.125.000	3.125.000
Jumlah	**14.802.083**	**20.052.083**
9. Uang Muka		
Terdiri dari :		
- Uang Muka Pembelian Mobil	-	10.000.000
- Uang Muka Pengurusan Dokumen RKT 2024	7.500.000	-
- Uang Muka Pembelian Spare Part Mobil Estrada Triton	2.200.000	-
- Uang Muka Rapat RUPS LB	178.790.170	-
- Uang Muka PPh Pasal 4 (2) Final	-	-
- Uang Muka Atas PPh Pasal 21 Kurang Potong	-	-
Jumlah	**188.490.170**	**10.000.000**
10. Persediaan		
Terdiri dari :		
- Label (PVC Tag)	6.169.426	2.495.250
- Ribbon	1.393.096	998.100
Jumlah	**7.562.522**	**3.493.350**

11. Properti Investasi

31 DESEMBER 2023

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Bangunan	1.130.919.417	-	-	1.130.919.417
	1.130.919.417	**-**	**-**	**1.130.919.417**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	353.412.315	56.545.971	-	409.958.286
	353.412.315	**56.545.971**	**-**	**409.958.286**
Nilai Buku	**777.507.102**			**720.961.131**

31 DESEMBER 2022

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Bangunan	1.130.919.417	-	-	1.130.919.417
	1.130.919.417	**-**	**-**	**1.130.919.417**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	296.866.344	56.545.971	-	353.412.315
	296.866.344	**56.545.971**	**-**	**353.412.315**
Nilai Buku	**834.053.073**			**777.507.102**

12. Aset Tetap

	31 DESEMBER 2023			
	Saldo Awal	**Mutasi**		**Saldo Akhir**
	1 Januari 2023	**Penambahan**	**Pengurangan**	**31 Desember 2023**
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Tanah	541.962.500	-	-	541.962.500
Bangunan	2.651.279.152	73.890.000	264.655.117	2.460.514.035
Kendaraan	1.612.827.636	472.287.436	290.000.000	1.795.115.072
Inventaris Kantor	1.061.909.216	58.428.639	415.158.999	705.178.856
	5.867.978.504	**604.606.075**	**969.814.116**	**5.502.770.463**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.085.397.677	130.546.043	264.655.117	951.288.603
Kendaraan	1.537.381.438	136.933.409	290.000.000	1.384.314.846
Inventaris Kantor	1.001.407.201	33.254.217	415.158.999	619.502.420
	3.624.186.316	**300.733.669**	**969.814.116**	**2.955.105.869**
Nilai Buku	**2.243.792.189**			**2.547.664.594**

	31 DESEMBER 2022			
	Saldo Awal	**Mutasi**		**Saldo Akhir**
	1 Januari 2022	**Penambahan**	**Pengurangan**	**31 Desember 2022**
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Tanah	541.962.500	-	-	541.962.500
Bangunan	2.646.879.152	4.400.000	-	2.651.279.152
Kendaraan	1.799.824.636	-	186.997.000	1.612.827.636
Inventaris Kantor	1.070.336.516	19.079.700	27.507.000	1.061.909.216
	6.059.002.804	**23.479.700**	**214.504.000**	**5.867.978.504**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	945.379.639	140.018.038	-	1.085.397.677
Kendaraan	1.699.229.705	25.148.733	186.997.000	1.537.381.438
Inventaris Kantor	1.009.171.979	19.742.222	27.507.000	1.001.407.201
	3.653.781.323	**184.908.993**	**214.504.000**	**3.624.186.316**
Nilai Buku	**2.405.221.481**			**2.243.792.189**

13. Aset Pajak Tangguhan

	31 DESEMBER 2023			
	Saldo Awal	**Dibebankan Ke Laporan Laba Rugi**	**Dibebankan Ke Penghasilan Komprehensif**	**Saldo Akhir**
	Rp	Rp	Rp	Rp
Manfaat / (Beban) Imbalan Pasca Kerja	247.001.088	41.005.029	133.853.109	154.153.008
Tantiem	-	-	-	-
Jumlah	**247.001.088**	**41.005.029**	**133.853.109**	**154.153.008**

	31 DESEMBER 2022			
	Saldo Awal	**Dibebankan Ke Laporan Laba Rugi**	**Dibebankan Ke Penghasilan Komprehensif**	**Saldo Akhir**
	Rp	Rp	Rp	Rp
Manfaat / (Beban) Imbalan Pasca Kerja	317.674.218	38.514.120	109.187.250	247.001.088
Tantiem	31.307.190	31.307.190	-	-
Jumlah	**348.981.408**	**69.821.310**	**109.187.250**	**247.001.088**

	2023	**2022**
	Rp	**Rp**
14. Aset Lain-lain		
Harga Perolehan		
Perizinan IUPHHK	5.614.299.000	5.614.299.000
Revisi RKU-IUPHHK	236.868.000	236.868.000
Penyusunan RKU-IUPHHK Berbasis IMHB-HA	49.012.504	49.012.504
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2018	358.404.849	358.404.849
Pelaksanaan IHMB Tahun 2020	453.134.285	453.134.285
Usaha Pengolahan Karet Dalam Pengembangan	199.677.000	199.677.000
Perkebunan Karet Dalam Pengembangan	283.132.100	283.132.100
Piutang Macet	79.469.400	79.469.400
Beban Pra Operasi	28.842.850	28.842.850
Beban Ditangguhkan	443.345.523	443.345.523
Penyusunan RKU PHHK	162.731.109	162.731.109
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2013	242.418.020	242.418.020
Perubahan Anggaran Dasar	16.500.000	16.500.000
Pelaksanaan IHMB RKU Periode 2022-2031	215.640.880	215.640.880
Jumlah	**8.383.475.520**	**8.383.475.520**

	2023	2022
	Rp	Rp
14. Aset Lain-lain (Lanjutan)		
Amortisasi		
Perizinan IUPHHK	3.157.107.465	2.971.835.598
Revisi RKU-IUPHHK	169.755.400	146.068.600
Penyusunan RKU-IUPHHK Berbasis IMHB-HA	49.012.504	48.522.379
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2018	358.404.849	292.697.290
Pelaksanaan IHMB Tahun 2020	453.134.285	453.134.281
Usaha Pengolahan Karet Dalam Pengembangan	79.870.800	39.935.400
Perkebunan Karet Dalam Pengembangan	113.252.840	56.626.420
Piutang Macet	31.787.760	15.893.880
Beban Pra Operasi	28.842.850	28.842.850
Beban Ditangguhkan	443.345.523	443.345.524
Penyusunan RKU PHHK	162.731.109	162.731.111
Pelaksanaan PHPL Resertifikasi 2013	242.418.020	242.418.021
Perubahan Anggaran Dasar	16.500.000	16.500.000
Pelaksanaan IHMB RKU Periode 2022-2031	43.128.176	21.564.088
Jumlah	**5.349.291.581**	**4.940.115.441**
Nilai Buku	**3.034.183.939**	**3.443.360.078**

15. Utang Usaha Pihak Ketiga		
Terdiri dari :		
- PT Wijaya Sukses Sejahtera	1.467.754.160	1.540.895.680
Jumlah	**1.467.754.160**	**1.540.895.680**
Bagian Jangka Pendek		
Pihak Ketiga	-	-
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi		
Bagian Jangka Pendek - Pihak Ketiga	**1.467.754.160**	**1.540.895.680**

16. Utang Pajak		
Terdiri dari :		
- PPh Pasal 29 Badan	-	421.251.963
- PPh Pasal 25	53.199.215	9.111.498
- PPh Pasal 21	39.082.767	54.471.569
- PPh Pasal 4 Ayat 2 Final	4.749.997	4.634.257
- PPN Keluaran	7.452.252	763.947.608
Jumlah	**104.484.231**	**1.253.416.895**

	2023	2022
	Rp	Rp
17. Biaya Akrual		
Terdiri dari:		
- PT Inhutani I	1.750.085.440	1.441.416.644
- Kompensasi Masyarakat	160.045.700	132.749.140
- Tantiem Pengurus	-	402.750.000
- Beban Operasional	60.278.556	151.436.266
- Iuran APHI	73.154.810	68.583.465
- Jasa Karyawan	-	443.288.758
- Iuran Dana Pensiun	112.576.624	112.576.624
- Premi Produksi	-	3.051.446
- Tunjangan Cuti Tahunan	124.930.484	156.257.090
Jumlah	**2.281.071.613**	**2.912.109.433**
18. Utang Lain-lain		
Terdiri dari:		
Pihak Berelasi		
- Lebih Potong PPh 21	13.781.467	11.717.225
- Tunjangan Purnajabatan	-	30.000.000
- Uang Penghargaan Masa Kerja	102.626.810	87.513.658
Jumlah	**116.408.277**	**129.230.883**

19. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada Tanggal 25 Maret 2003, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut mengharuskan perusahaan untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak apabila karyawan mencapai usia pensiun, terjadi pemutusan hubungan kerja dan atau pengunduran diri berdasarkan masa kerja dan kondisi yang ditentukan dalam Undang - Undang tersebut. Uang penghargaan dan atau pengunduran diri berdasarkan masa kerja dan kondisi yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut dihitung sendiri oleh manajemen perusahaan.

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya dan kewajiban imbalan kerja tersebut adalah :

Jumlah Karyawan	18 orang	19 orang
Usia Pensiun Normal	56 Tahun	56 Tahun
Kenaikan Gaji	0%	0%
Tingkat Bunga	6%	4,25%

Beban imbalan kerja yang dibebankan di laporan laba rugi dan komprehensif lain merupakan jumlah neto dari :

Beban Jasa Kini	96.161.212	107.631.933
Beban Bunga	90.225.285	67.432.251
Jumlah	**186.386.497**	**175.064.184**

Liabilitas neto diestimasi atas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Nilai kini liabilitas	1.593.980.041	1.654.073.463
Jumlah	**1.593.980.041**	**1.654.073.463**

	2023	2022
	Rp	Rp

19. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Mutasi nilai kini liabilitas bersih yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut :

Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.654.073.463	1.443.974.104
Beban tahun berjalan	186.386.497	175.064.184
Amortisasi rugi yang belum direalisasi	(133.853.109)	139.983.654
Pembayaran imbalan kerja	(112.626.810)	(104.948.480)
Jumlah	**1.593.980.041**	**1.654.073.463**

20. Ekuitas

Terdiri dari:

- Modal Saham	1.500.000.000	1.500.000.000
- Penghasilan Komprehensif Lain	232.369.400	237.538.836
- Cadangan Umum	2.467.620.669	1.237.787.010
- Saldo Laba	57.317.117	2.457.476.790
Jumlah	**4.257.307.186**	**5.432.802.636**

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor
- Pemerintah Kabupaten Berau	750	50%	750.000.000
- PT Inhutani I	450	30%	450.000.000
- Perusda Sylva Kaltim Sejahtera	300	20%	300.000.000
Jumlah	**1500**	**100%**	**1.500.000.000**

	2023	2022
	Rp	Rp
Cadangan Umum		
- Saldo Awal Cadangan Umum	1.237.787.010	1.137.920.163
- Penambahan Cadangan Umum Dari Pembagian Laba Rugi Tahun Buku 2022	1.228.738.395	-
- Koreksi Saldo Cad. Umum Atas Pemeriksaan Pajak Tahun Buku 2020	-	(74.669.425)
- Koreksi Saldo Cad. Umum Atas Pembagian Pembebanan Beban IHMB Periode Tahun 2022 - 2	-	7.616.238
- Koreksi Cad. Umum Atas Pembebanan Biaya Yang Diacrualkan (diutangkan) ditahun 2021 atas	-	42.314.000
- Koreksi Cad. Umum Atas Koreksi Kelebihan PPh Pasal 25 Badan Masa Agustus 2020 Yang di F	-	9.111.498
- Koreksi Cad. Umum Atas Koreksi Kelebihan PPh Pasal 25 Badan Masa Agustus 2020 Yang di F	-	4.112.226
- Pembagian Deviden Tahun Buku 2021	-	110.744.338
- Koreksi Cad. Umum Atas Koreksi Kelebihan PPh Pasal 25 Badan Masa September 2020 Yang	-	637.973
- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	1.095.268	(0)
- Koreksi Amortisasi Aset Lain-lain	(4)	1
Jumlah	**2.467.620.669**	**1.237.787.010**

	2023	2022
	Rp	Rp
21. Pendapatan		
Terdiri dari :		
- Pendapatan IUPHHK	3.120.180.250	6.362.922.500
- Penggantian Biaya Investasi	5.405.405.406	6.756.756.757
Jumlah	**8.525.585.656**	**13.119.679.257**

22. Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung		
Terdiri dari :		
- Perencanaan		
- Amortisasi Iuran IUPHHK	185.271.867	185.271.867
- Amortisasi Penyusunan dan Pengesahan RKUPHHK	23.686.800	23.686.800
- Pengurusan dan Pengesahan RKT - IUPHHK Self Approval	41.475.000	20.115.000
- Biaya GIS (Pembuatan Peta Kerja Dll)	5.899.742	16.648.167
- Ceking Pengawasan (Dishut Prop & Kab RKT, SPORC Dephut)	-	1.155.000
- Amortisasi Orientasi Potensi dan Lokasi RKT 2017-2021, 18.000 Ha	490.125	5.391.375
- Amortisasi Re-Sertifikasi Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (F	65.707.560	71.680.968
- Monitoring Evaluasi RKT Self Approval	3.582.295	-
- Survailance PHPL 2023	54.740.376	7.679.220
- Beban Overhead	282.536.794	331.694.423
- Amortisasi IHMB Konsesi IUPHHK	21.564.088	21.564.088
- Penataan Areal Kerja URKT 2024	24.450.150	47.985.500
- ITSP URKT 2024	213.493.975	400.502.986
- Pembuatan Trace Jalan URKT 2024	30.386.450	60.929.514
Jumlah	**953.285.222**	**1.194.304.908**
- Pembinaan Hutan		
- Produksi Bibit dan Pemelihraan Bibit di Persemaian 37 Labanan 36.000 batang	61.760.000	10.606.250
- Penanaman Tanah TPN dan Jalan Sarat (30 Ha)	26.674.150	6.749.800
- Pemeliharaan Tanah TPN dan Jalan Sarat (30 Ha)	9.875.000	-
- Penanaman Kanan Kiri Jalan (30 Ha)	27.012.150	6.749.800
- Pemeliharaan tanaman Kanan Kiri Jalan (30 Ha)	9.875.000	-
- Pembuatan dan Pengukuran Erosi Sedimentasi 1 Unit	8.465.500	-
- Beban Overhead	121.562.164	107.366.143
- Produksi Bibit Depterocarpacea Untuk Cilin	-	8.860.000
- Perapihan Pasca Panen	32.410.000	13.673.000
- Pembebasan Pohon Binaan	32.410.000	19.715.000
- Checking Dishut Provinsi kaltim	817.572	1.524.780
- Checking Dishut Kabupaten	4.500.000	-
- Pembuatan Sempadan Sungai Siduung	9.561.900	-
Jumlah	**344.923.436**	**175.244.773**

	2023	2022
	Rp	Rp
22. Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung (Lanjutan)		
- Pengendalian Kebakaran dan Pamhut		
- Perlindungan Hutan / Patroli Pengamanan Hutan	68.676.000	56.976.000
- Perlengkapan Kerja	11.682.834	2.233.866
- Beban Overhead	318.085.255	358.505.748
- Pembuatan Papan Nama Larangan	-	5.651.000
Jumlah	**398.444.089**	**423.366.614**
- Pemanfaatan Hasil Hutan		
- Bahan Makan & Obat-obatan (bulan)	6.792.500	5.683.500
- Beban Perlengkapan Kerja Lapangan (set)	2.425.852	2.994.152
- Koordinasi Pengurusan LHP	3.750.000	5.250.000
- Pengurusan SKSHHK Siangung	2.742.807	5.736.702
- Register Penerbitan LHP & SKSHHK	20.356.498	46.291.638
- Monitoring RKT 2021 self approvel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim	3.000.000	4.264.473
- Monitoring RKT 2021 self approvel oleh BP2HP wilayah XIII Kaltim/BPHP Wilayah	-	5.690.152
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) Dishut Propinsi	-	6.000.000
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) oleh Dirjen BUHA	-	3.600.000
- Sewa TPK/Tpn/Logpon	5.833.333	5.833.333
- Biaya Rekonsiliasi PSDH DR Per Triwulan	18.247.500	16.251.000
- Iuran APHI	4.571.345	9.561.170
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) Dishut Kabupaten	3.212.700	-
- Monitoring Penata Usahaan Hasil Hutan (PUH) BPHP Wil. XI Samarinda	5.679.145	-
- Beban Overhead	428.899.581	511.280.598
Jumlah	**505.511.261**	**628.436.718**
- Kelola Sosial		
- Beban Overhead	302.171.710	361.682.990
- Pengadaan Sarana dan Prasarana	10.250.000	12.250.000
- Sosial Budaya	45.200.000	42.200.000
Jumlah	**357.621.710**	**416.132.990**
- Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara		
- PBB Areal IUPHHK	985.293.543	1.030.372.393
Jumlah	**985.293.543**	**1.030.372.393**

	2023	2022
	Rp	Rp
22. Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung (Lanjutan)		
- Beban Camp dan Administrasi		
- ATK, Foto Copy, Cetakan	6.914.950	8.083.600
- BBM, Pelumas Kendaraan & Inventaris	135.939.613	100.596.182
- Spare Parts Kendaraan & Inventaris	65.973.000	41.862.500
- Material Bangunan Camp	1.095.263	-
- PKB dan Perijinan	5.686.794	9.634.190
- Penyusutan & Amortisasi	141.067.014	38.624.650
- Lain-Lain	114.255.026	78.118.500
- Beban Overhead	443.546.497	462.309.706
Jumlah	**914.478.157**	**739.229.328**
Total	**4.459.557.418**	**4.607.087.724**
23. Beban Personalia		
Terdiri dari :		
- Beban Gaji Direksi dan Karyawan	1.752.295.470	1.741.095.480
- Beban Honorarium Komisaris	441.000.000	441.000.000
- Beban Pajak Ditanggung Perusahaan (Komisaris)	-	19.640.600
- Beban Rapat Internal Komisaris	35.250.000	49.948.500
- Beban Premi Produksi	16.045.423	30.117.763
- Beban Tunjangan Hari Raya (THR)	182.041.290	181.483.248
- Beban Tantiem	-	402.750.000
- Beban Tunjangan Cuti	37.484.054	72.486.554
- Beban Asuransi Jiwa	108.000.000	108.000.000
- Beban Tunjangan Purna Jabatan	-	401.479.167
- Beban Imbalan Pasca Kerja	69.020.904	63.350.540
- Beban Tunjangan PPh Pasal 21	-	22.996.550
- Beban Jasa Karya	-	142.773.871
- Beban Jamuan Makan Minum	23.012.562	37.943.938
- Beban BPJS Tenagakerjaan Perusahaan	20.571.242	20.515.312
- Beban Pengobatan	9.829.260	9.521.352
- Beban Santunan Duka Cita	-	1.500.000
- Beban Diklat/Seminar/Loka Kerja	2.145.000	18.000.000
- Beban Olahraga dan Rekreasi	111.752.094	32.386.430
- Tunjangan Pajak Penghasilan	6.954.980	140.272.850
Jumlah	**2.815.402.279**	**3.937.262.155**

	2023	2022
	Rp	Rp
24. Beban Administrasi dan Umum		
Terdiri dari :		
- Beban Rapat	124.045.800	407.760.866
- Beban Perjalanan Dinas	221.400.000	212.661.800
- Beban Representasi	109.978.754	106.825.430
- Beban Sewa Mess	27.777.776	26.620.370
- Beban Jasa Profesional	40.000.000	50.000.000
- Beban BBM dan Pelumas	79.180.027	80.575.620
- Beban Listrik	42.468.294	41.818.294
- Beban Air PDAM	7.107.470	6.876.600
- Beban Spare Parts	43.630.360	37.795.400
- Beban ATK, Fotocopy dan Cetakan	12.112.364	12.585.550
- Beban Rumah Tangga Kantor dan Mess	62.345.860	20.008.230
- Beban Telekomunikasi	12.250.107	11.238.672
- Beban Perlengkapan Kantor dan Mess	10.036.625	12.885.200
- Beban Media Sosial, Branding, Surat Kabar dan Majalah	60.727.388	67.904.234
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	328.668.326	315.286.014
- Beban Perizinan	19.968.400	28.290.797
- Beban Pakaian Seragam Karyawan	27.416.000	20.135.000
- Beban Pos dan Pengiriman Dokumen	4.781.280	5.132.710
- Beban Lain-lain	163.372.671	96.768.742
Jumlah	**1.397.267.502**	**1.561.169.529**
25. Pendapatan (Beban) Non Operasional		
- **Pendapatan Non Operasional**		
- Pendapatan Jasa Giro	30.590.379	2.360.875
- Laba Penjualan Aset Tetap	68.468.469	-
- Usaha Lain-lain	131.016.657	56.824.325
Jumlah	**230.075.505**	**59.185.200**
- **Beban Non Operasional**		
- Beban Administrasi Bank	1.287.200	1.026.600
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	975.675	1.076.312
- Beban Usaha Lainnya	26.418.888	13.888.888
Jumlah	**28.681.763**	**15.991.800**
Total	**201.393.742**	**43.193.400**
26. Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan		
- Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	54.752.200	3.057.353.249
Jumlah	**54.752.200**	**3.057.353.249**

	2023	2022
	Rp	Rp
27. Beban Pajak		
- Pajak kini	(38.440.112)	(638.390.580)
- Pajak tangguhan	41.005.029	38.514.120
Jumlah	**2.564.917**	**(599.876.459)**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum taksiran pajak penghasilan seperti disajikan pada laporan laba (rugi) dan akumulasi laba fiskal perusahaan sebagai berikut :

Laba sebelum pajak	54.752.200	3.057.353.249
Kompensasi kerugian fiskal tahun lalu	-	-
Perbedaan Temporer		
- Imbalan pasca kerja	186.386.497	175.064.184
- Tantiem	-	-
Perbedaan Tetap		
- Jasa Giro	(30.590.379)	(2.360.875)
- Beban representasi	-	106.825.430
- Denda pajak	975.675	1.076.312
- Pajak ditanggung perusahaan	-	160.316.150
- Beban kelola sosial	-	34.200.000
- Beban jamuan makan minum	31.662.862	18.971.969
Jumlah	**188.434.655**	**494.093.170**
Laba Kena Pajak (Pembulatan)	**243.186.000**	**3.551.446.000**
Perhitungan pajak penghasilan		
- Tarif 11%	15.060.808	142.927.540
- Tarif 22%	23.379.304	495.463.039
Beban Pajak Kini	**38.440.112**	**638.390.580**
Kredit Pajak		
- PPh Pasal 23	108.108.108	135.135.135
- PPh Pasal 25	506.127.429	82.003.482
Jumlah	**614.235.537**	**217.138.617**
Jumlah penghasilan pajak (lebih) / kurang bayar	**(575.795.425)**	**421.251.963**

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Laba sebelum pajak menurut laba rugi dan penghasilan Komprehensif lain	54.752.200	3.057.353.249
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(12.045.429)	(672.617.660)
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap	(450.595)	(70.186.377)
Penyesuaian tarif pajak	15.060.808	142.927.540
Beban / (manfaat) pajak penghasilan	**2.564.784**	**(599.876.496)**

	2023	2022
	Rp	Rp
28. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan		
- Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Penghasilan	57.317.117	2.457.476.790
Jumlah	**57.317.117**	**2.457.476.790**

29. Deviden Tunai

Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan sebagaimana tercantum dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Hutan Sanggam Berau tanggal 10 Maret 2023, pemegang saham menyetujui pembagian deviden tunai final untuk tahun buku 2022 sebesar 50% atau sebesar Rp 1.228.738.395. Deviden sebesar Rp 614.369.197 telah dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau pada tanggal 27 Juli 2022 dan kepada PT Inhutani I sebesar Rp 368.621.519 tanggal 27 Juli 2022 dan dibayarkan kepada Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera sebesar Rp 245.747.679 tanggal 04 April 2022.

30. Ikatan

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama operasional (KSO) dengan PT. Wijaya Sukses Sejahtera untuk melakukan penebangan, pengupasan, penyaradan, pengangkutan, pemasaran dan penjualan kayu bulat di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Inhutani I (Labanan unit I) yang telah dikelola secara patungan antara pemerintah Kabupaten Berau, PT Inhutani I dan Perusahaan Daerah Sylvia Kaltim Sejahtera Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas areal 78.436 Ha.

Jangka waktu perjanjian selama 20 tahun mulai tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 15 Januari 2025, dengan fee sebesar Rp 280,000 per m3. setiap tahun kedua belah pihak akan meninjau kembali kenaikan *fee* tegakan kayu.

Sesuai kesepakatan bersama atas perubahan harga tegakan produksi kayu tertebang dan target capaian produksi tebangan pada unit kelestarian hutan labanan I PT Inhutani I yang dikelola PT Hutansanggam Labanan Lestari antara PT Hutansanggam Labanan Lestari dengan PT Wljaya Sukses Sejahtera tanggal 20 April 2022 bahwa PT Wljaya Sukses Sejahtera setuju membayar perubahan harga tegakan kayu bulat yang tertebang yang telah di LHP (Laporan Hasil Produksi) kan secara sah. dari harga Rp 280.000 per m3 menjadi sebagai berikut :

- Rp 350.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Meranti, dengan Diameter minimal 50 cm.
- Rp 325.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Meranti, dengan Diameter minimal 40 cm dan maksimal 49 cm.
- Rp 300.000 per m3 (belum termasuk PPn) untuk jenis kelompok Rimba Campurani, dengan Diameter minimal 50 cm.

PT. Wijaya Sukses Sejahtera berkewajiban membayar Dana Reboisasi Dan Provisi Sumber Daya Hutan (DR PSDH) atas nama perusahaan dan membayar semua biaya kompensasi masyarakat sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur no. 20 tahun 2000.

31. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal

a. Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi perusahaan.

31. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

(i) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko dimana perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Instrumen keuangan perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, investasi, piutang usaha, piutang lain-lain, dana yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan jatuh tempo :

	31 Desember 2023		
	< 365	> 365	Total
	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan			
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang			
Kas dan Setara Kas	1.649.691.758	-	1.649.691.758
Piutang Usaha Pihak Ketiga	208.102.277	-	208.102.277
Piutang Lain-lain	719.598.598	-	719.598.598
Aset Keuangan Lainnya	14.802.083	-	14.802.083
Jumlah	**2.592.194.717**	**-**	**2.592.194.717**

	31 Desember 2022		
	< 365	> 365	Total
	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan			
Pinjaman Yang Diberikan Dan Piutang			
Kas dan Setara Kas	5.768.870.477	-	5.768.870.477
Piutang Usaha Pihak Ketiga	204.439.545	-	204.439.545
Piutang Lain-lain	204.013.077	-	204.013.077
Aset Keuangan Lainnya	20.052.083	-	20.052.083
Jumlah	**6.197.375.182**	**-**	**6.197.375.182**

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

	2023	**2022**
	Rp	**Rp**
Kas dan Setara Kas	1.649.691.758	5.768.870.477
Piutang Usaha Pihak Ketiga	208.102.277	204.439.545
Piutang Lain-lain	719.598.598	204.013.077
Aset Keuangan Lainnya	14.802.083	20.052.083
Jumlah	**2.592.194.717**	**6.197.375.182**

31. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

(ii) Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	31 Desember 2023		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan Diukur Pada			
Biaya Perolehan Diamortisasi			
Utang Lain-Lain	116.408.277	-	116.408.277
Utang Pajak	104.484.231	-	104.484.231
Beban Akrual	2.281.071.613	-	2.281.071.613
Utang Usaha Jangka Panjang	1.467.754.160	-	1.467.754.160
Jumlah	**3.969.718.281**	**-**	**3.969.718.281**

	31 Desember 2022		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan Diukur Pada			
Biaya Perolehan Diamortisasi			
Utang Lain-Lain	Rp 129.230.883	-	129.230.883
Utang Pajak	Rp 1.253.416.895		1.253.416.895
Beban Akrual	Rp 2.912.109.433	-	2.912.109.433
Utang Usaha Jangka Panjang	Rp 1.540.895.680	-	1.540.895.680
Jumlah	**Rp 5.835.652.891**	**-**	**5.835.652.891**

b. Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapkan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik(tingkat 1);
b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat di observasi) (tingkat

31. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan Dan Risiko Modal (Lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan peseroan yang tercatat dalam laporan keuangan:

	2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	1.649.691.758	1.649.691.758
Piutang Usaha Pihak Ketiga	208.102.277	208.102.277
Piutang Lain-lain	719.598.598	719.598.598
Biaya Dibayar Dimuka	14.802.083	14.802.083
KEWAJIBAN LANCAR		
Utang Pajak	104.484.231	104.484.231
Utang Lain-Lain	116.408.277	116.408.277
Beban Akrual	2.281.071.613	2.281.071.613

	2022	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET LANCAR		
Kas Dan Setara kas	5.768.870.477	5.768.870.477
Piutang Usaha Pihak Ketiga	204.439.545	204.439.545
Piutang Lain-Lain	204.013.077	204.013.077
Biaya Dibayar Dimuka	20.052.083	20.052.083
KEWAJIBAN LANCAR		
Utang Pajak	1.253.416.895	1.253.416.895
Utang Lain-Lain	129.230.883	129.230.883
Beban Akrual	2.912.109.433	2.912.109.433

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.



LAMPIRAN 8

LAPORAN KEUANGAN PT INDO PUSAKA BERAU TAHUN ANGGARAN 2023

PT INDO PUSAKA BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN (UNAUDITED)
31 Desember 2023 dan Desember 2022

	2023	2022
ASET		
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap	226.767.681.477	231.023.330.821
Aset lain-lain	507.286.577	2.803.276.540
Aset Hak Guna	14	2.413.124.110
Total Aset Tidak Lancar	**227.274.968.068**	**236.239.731.471**
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	2.324.439.478	11.849.882.627
Piutang usaha		
Pihak Berelasi	6.042.427.007	7.771.344.957
Pihak ketiga	63.565.679.617	8.720.129.635
Aset lancar lainnya	989.274.304	-
Persediaan	8.425.506.586	8.928.811.158
Uang muka & Biaya dibayar dimuka	55.068.696	308.361.637
Pajak Dibayar Dimuka	1.700.313	131.051.087
Total Aset Lancar	**81.404.096.001**	**37.709.581.101**
TOTAL ASET	**308.679.064.069**	**273.949.312.572**
	-	

PT INDO PUSAKA BERAU
LAPORAN POSISI KEUANGAN (UNAUDITED)
31 Desember 2023 dan Desember 2022

LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha	95.459.463.721	6.405.674.055
Pinjaman Bank	-	3.102.187.500
Utang Hak Guna	767.538.467	2.873.963.715
Utang pajak	(1.570.577.537)	2.757.438.519
Biaya yang masih harus dibayar	5.756.167.118	7.492.229.533
Utang lain-lain	1.103.849.968	203.865.465
Total Liabilitas Jangka Pendek	**101.516.441.737**	**22.835.358.787**
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang kepada pemegang saham	5.669.630.931	3.769.158.648
Liabilitas imbalan pasca kerja	12.838.140.865	16.962.148.999
Liabilitas pajak tangguhan	7.202.442.026	7.532.263.130
Utang Pinjaman Bank Jangka Panjang	-	-
Utang Usaha Jangka Panjang	-	21.700.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	**25.710.213.822**	**28.285.270.777**
Ekuitas		
Modal saham Modal dasar 247.800 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 133.150 saham dan 133.150 saham, masing-masing untuk tahun 2023 dan 2022.	133.150.000.000	133.150.000.000
Tambahan modal saham	2.543.000.000	2.543.000.000
Agio saham	1.527.764.235	1.527.764.235
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	72.404.548.563	72.404.548.563
Tidak ditentukan penggunaannya	(26.341.306.691)	14.072.262.628
Pendapatan Konfrehensif Lainnya	(1.831.597.596)	(868.892.418)
Total Ekuitas	**181.452.408.511**	**222.828.683.008**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**308.679.064.069**	**273.949.312.572**

PT INDO PUSAKA BERAU

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (Unaudited)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022

	2023	2022
PENDAPATAN USAHA	125.461.674.704	103.796.747.377
BEBAN POKOK PENJUALAN	(141.152.845.157)	(79.519.729.978)
LABA KOTOR	**(15.691.170.454)**	**24.277.017.399**
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	(21.572.016.564)	(9.454.058.598)
LABA OPERASI	**(37.263.187.018)**	**14.822.958.801**
Pendapatan bunga dan jasa giro	152.813.263	272.654.902
Beban Keuangan	(32.722.657)	(57.642.777)
Laba (rugi) selisih kurs	(991)	1.709
Pendapatan (beban) lainnya	(248.990.803)	4.669.737.736
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	**(37.392.088.206)**	**19.707.710.371**
Manfaat (beban) pajak penghasilan		
Pajak kini	-	(5.244.932.661)
Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1.053.473.944	68.354.086
Total manfaat (beban) pajak penghasilan	**1.053.473.944**	**(5.176.578.575)**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**(36.338.614.262)**	**14.531.131.796**
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		
Mafaat (beban) pajak terkait		
Penghasilan komprehensif lain	**-**	**-**
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(36.338.614.262)**	**14.531.131.796**
	-	
Laba per saham	(272.915)	109.774

PT INDO PUSAKA BERAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Unaudited)

	Modal saham	Tambahan setoran modal	Agio saham	Saldo Laba		OCI	Total ekuitas
				Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Saldo 31 Desember 2022	**133.150.000.000**	**2.543.000.000**	**1.527.764.235**	**72.404.548.563**	**14.072.262.628**	**(868.892.418)**	**222.828.683.008**
Koreksi Laba Ditahan	-	-	-	-	930.588.298	-	930.588.298
Cadangan umum tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-
Dividen tahun buku 2022	-	-	-	-	(5.005.542.365)	-	(5.005.542.365)
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	(36.338.614.262)	(962.705.178)	(37.301.319.440)
Saldo 31 Desember 2023	**133.150.000.000**	**2.543.000.000**	**1.527.764.235**	**72.404.548.563**	**(26.341.305.701)**	**(1.831.597.596)**	**181.452.408.510**



LAMPIRAN 9

LAPORAN KEUANGAN PERUMDA BHAKTI PRAJA TAHUN ANGGARAN 2023

PERUMDA BHAKTI PRAJA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir

Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUMDA BHAKTI PRAJA

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	1 - 2
Neraca	3
Laporan Laba Rugi	4
Laporan Perubahan Ekuitas	5
Laporan Arus Kas	6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 15

PERUMDA BHAKTI PRAJA KABUPATEN BERAU
Jl. SM. Aminuddin No.57, Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Berau - Kaltim
Email: *perumdabhaktipraja@gmail.com* Telp: 081348280145

PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
PERUMDA BHAKTI PRAJA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sultan, S.Pi
Alamat Kantor	: Jl. SM. Aminuddin No.57, Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb, Berau - Kaltim
Alamat Domisili sesuai KTP	: Jl. HM Thaib, RT 07 Karang Ambun, Tanjung Redeb
Nomor Telepon	: 081348280145
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1) Kami Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Bhakti Praja;

2) Laporan keuangan Perumda Bhakti Praja telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia;

3) a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Bhakti Praja telah dimuat secara lengkap dan benar ;
   b. Laporan Keuangan Perumda Bhakti Praja tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

4) Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perumda Bhakti Praja.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjung Redeb, 14 Maret 2024



(Sultan, S.Pi)
Direktur

Muhammad Danial
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ijin Usaha KAP No. KEP. 298/KM, 1/2011

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor :00008/2.0844/AU.2/01/0131-1/1/III/2024

Direksi **Perusda Bhakti Praja**
di -
Tempat

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusda Bhakti Praja**, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Perusda Bhakti Praja** tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal - hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal - hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan tekait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atasTata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Hal Lain

Laporan Keuangan **Perusda Bhakti Praja** pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disajikan sebagai angka perbandingan terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 tidak diaudit oleh auditor independen.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap resiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Resiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal - hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap indepedensi kami dan jika relevan pengaman terkait.

Muhammad Danial
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Ijin Usaha KAP No. KEP. 298/KM, 1/2011

Dari hal - hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal - hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit Utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang - undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MUHAMMAD DANIAL

00008

M. Danial, SE Ak MM CPA CA
N.R.A.P AP.0131

Jakarta, 14 Maret 2024

PERUMDA BHAKTI PRAJA

NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan No.	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	*2e, 3*	2.000.645.379	-
Piutang Usaha	*2f, 4*	83.374.200	-
Uang Muka dan Baiaya Dibayar Dimuka	*5*	90.000.000	-
Jumlah Aset Lancar		**2.174.019.579**	**-**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	*2i, 6*	45.997.727	0
Jumlah Aset Tidak Lancar		**45.997.727**	**0**
JUMLAH ASET		**2.220.017.306**	**0**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	*7*	300.000.000	-
Utang Pajak	*8*	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	*9*	34.030.501	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**334.030.501**	**-**
EKUITAS			
Modal Saham	*10*	2.000.000.000	-
Saldo Laba (Rugi)		(114.013.195)	-
Jumlah Ekuitas		**1.885.986.805**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**2.220.017.306**	**-**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BHAKTI PRAJA

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan No.	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Usaha	*2j, 11*	2.247.662.300	-
Harga Pokok Pendapatan	*2j, 12*	2.048.513.200	-
Laba (Rugi) Kotor		**199.149.100**	**-**
Beban Usaha:			
Beban Umum dan Administrasi	*2j, 13*	313.430.773	-
Jumlah Beban Usaha		**313.430.773**	**-**
Laba (Rugi) Usaha		**(114.281.673)**	**-**
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	*2j, 14*	268.478	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		**(114.013.195)**	**-**
Pajak Penghasilan			
Pajak kini		-	-
Beban Pajak Penghasilan		-	-
Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan		**(114.013.195)**	**-**
Laba (Rugi) Ditahan		-	**-**
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		**(114.013.195)**	**-**
Saldo Laba (Rugi)		**(114.013.195)**	**-**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BHAKTI PRAJA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	SALDO LABA (RUGI)	JUMLAH
Saldo per 31 Desember 2021	**-**	**-**	**-**
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2022	**-**	**-**	**-**
Saldo Disajikan Kembali	-	-	-
Modal Disetor	**2.000.000.000**	-	2.000.000.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	(114.013.195)	(114.013.195)
Saldo per 31 Desember 2023	**2.000.000.000**	**(114.013.195)**	**1.885.986.805**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BHAKTI PRAJA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	**(114.013.195)**	**-**
Perubahan Modal Kerja dari Aktivitas Operasi		
Piutang Usaha	(83.374.200)	-
Uang Muka dan Baiaya Dibayar Dimuka	(90.000.000)	-
Utang Usaha	300.000.000	-
Utang Pajak	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	34.030.501	-
Jumlah Penyesuaian	**160.656.301**	**-**
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**46.643.106**	**-**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI :		
Aset Tetap	(45.997.727)	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**(45.997.727)**	**-**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Modal Saham	2.000.000.000	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**2.000.000.000**	**-**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**2.000.645.379**	**-**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**-**	**-**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**2.000.645.379**	**-**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BHAKTI PRAJA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perumda Bhakti Praja didikan untuk pertama kalinya dengan nama Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Tingkat II Berau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau No. 05 Tahun 1998 (Perda 05/1998) tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Tingkat II Kabupaten Berau.

Dalam rangka memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 14 Tahun 2020 (Perda 14/2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah, Perusahaan Daerah Bhakti Praja diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah, dengan nama Perumda Bhakti Praja.

b. Bidang Usaha

Berdasarkan pasal 5 Perda 14/2020, bidang usaha Perumda Bhakti Praja meliputi sebagai berikut :

1. Kehutanan
2. Pertanian tanaman pangan
3. Perkebunan
4. Peternakan
5. Perikanan
6. Pariwisata
7. Pertambangan dan penggalian
8. Minyak dan Gas Bumi
9. Ketenagalistrikan
10. Perhubungan/Kepelabuhanan
11. Industri Pengolahan dan
12. Pergudangan

Di samping itu, Perumda Bhakti Praja dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Untuk mencapai tujuan perusahaan dan memperhatikan bidang usaha yang telah ditetapkan dalam Perda 14/2020, sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perumda Bhakti Praja menginisiasi berbagai kegiatan usaha yang akan dijalankan pada tahun 2023, yang meliputi :

1. Pengangkutan CPO
2. Perdagangan TBS Kelapa Sawit
3. Perdagangan Cangkang Kelapa Sawit
4. Perdagangan Karet
5. Supplier BBM Industri

c. Permodalan

Berdasarkan Perda 14/2020 Perumda Bhakti Praja memiliki modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000 yang akan disetor secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Pada bulan November 2023 Perumda Bhakti Praja menerima setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp. 2.000.000.000

d. Susunan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2023, susunan pengurus Perumda Bhakti Praja adalah sebagai berikut :

- Direktur : Sultan, S.Pi
- Dewan Pengawas : H. Jaka Siswanta, SH, M.Si

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Direksi Perumda Bhakti Praja memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis penyusunan dan penyajian laopran keuangan.

Perusahaan memilih untuk menerapkan SAK ETAP dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis

Meskipun menggunakan SAK ETAP, Perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagaimana disyaratkan oleh standar tersebut. Oleh karena itu, tujuan penyajian laporan keuangan bagi sebagian besar pemakai tetap terpenuhi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan mata uang rupiah.

b. Periode Pembukuan

Periode pembukuan adalah tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu - waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat pembatasan penggunaannya.

d. Piutang Usaha

Piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Pada setiap tanggal pelaporan dilakukan penyisihan kerugian piutang secara kolektif. Besarnya penyisihan kerugian piutang ditentukan berdasarkan rata - rata piutang tak tertagih untuk tiga tahun terakhir. Piutang yang telah berumur kebih dari dua tahun dibentuk cadangan penyisihan piutang sebesar 100% dan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan hapus buku.

Penuruan nilai atau pemulihan penurunan nilai piutang diakui sebagai beban atau pendapatan pada tahun berjalan.

e. Persediaan

Persediaan diukur pada biaya perolehannya yang meliputi seluruh biaya pembelian dan biaya yang dapat dibebankan secara langsung serta biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap pakai.

Metode pencatatan terhadap persediaan menggunakan metode *"Physial Inventory Method"*.

f. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan akumulasi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan dan biaya - biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran - pengeluaran untuk pengadaan aset tetap adalah sebagai berikut :

Pengeluaran - pengeluaran untuk pembelian aset berwujud dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dicatat sebagai aset tetap apabila aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha yang normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dengan batasan jumlah di atas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, sedangkan aset tetap selain bangunan menggunakan metode saldo menurun berganda. Tanah tidak disusutkan. Taksiran umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut :

Bangunan	20 tahun
Mesin dan Peralatan	8 tahun
Kendaraan/Alat angkut	8 tahun
Peralatan/Perlengkapan	4 tahun
Inventaris Kantor	4 tahun

Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi dan dialokasikan selama umur manfaat aset tetap. Penyusutan dimulai saat aset tetap tersedia untuk digunakan, dan dihentikan saat aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tetap tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara peuh.

Aset tetap dalam menyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahakan ke masing - masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

g. Pencatatan Utang/Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesai nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo dan jumlahnya dapat

h. Pendapatan

Pendapatan Perumda Bhakti Praja terdiri dari pendapatan usaha dan non usaha. Pendapatan usaha meliputi pendapatan jasa pengangkutan CPO dan pendapatan penjualan. Sedangkan pendapatan non usaha (pendapatan lain - lain) meliputi pendapatan bunga deposito, jasa giro, sewa, royalti, dividen, dan lain - lain.

Pendapatan yang berasal dari jasa pengangkutan CPO dan penjualan diakui dengan terbitnya invoice kepada penggunan jasa/pembeli.

Pendapatan non usaha (pendapatan lain - lain) diakui dalam laporan laba rugi jika timbul hak untuk memperoleh pendapatan tersebut dan dapat diukur nilainya dengan andal.

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan lain - lain diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

i. Pengunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP mengharuskan manajemen untuk membuat berbagai estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3. Kas dan Setara Kas	**2.000.645.379**	**-**
Akun ini terdiri dari :		
Kas		
Kas - IDR	403.685.557	-
Jumlah Kas	**403.685.557**	-
Bank		
BANK IDR		
Bank BPD Kaltim Kaltara	1.452.783.080	-
Bank Mandiri	144.176.742	-
Jumlah	**1.596.959.822**	**-**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**2.000.645.379**	**-**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
4. Piutang Usaha	**83.374.200**	**-**
Akun ini terdiri dari:		
Penjualan	83.374.200	-
Jumlah	**83.374.200**	**-**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5. Uang Muka dan Baiaya Dibayar Dimuka	**90.000.000**	**-**
Akun ini terdiri dari:		
Sewa Dibayar Dimuka	90.000.000	-
Jumlah	**90.000.000**	**-**

6. Aset Tetap

31 Desember 2023

Nama Akun	Saldo Awal 01 January 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 December 2023
Harga Perolehan				
Peralatan Kantor	-	17.647.679	-	17.647.679
Inventaris Kantor	-	29.850.000	-	29.850.000
Jumlah	**-**	**47.497.679**	**-**	**47.497.679**
Akumulasi Penyusutan				
Persalatan Kantor	-	(643.702)	-	(643.702)
Inventaris Kantor	-	(856.250)	-	(856.250)
Jumlah	**-**	**(1.499.952)**	**-**	**(1.499.952)**
Nilai Buku	**-**			**45.997.727**

31 Desember 2022

Nama Akun	Saldo Awal 01 January 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 December 2023
Harga Perolehan				
Peralatan Kantor	-	-	-	-
Inventaris Kantor	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**
Akumulasi Penyusutan				
Persalatan Kantor	-	-	-	-
Inventaris Kantor	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**
Nilai Buku	**-**	**-**	**-**	**-**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
7. Utang Usaha	**300.000.000**	**-**
Akun ini terdiri dari:		
Utang Usaha	300.000.000	-
Jumlah Utang Usaha	**300.000.000**	**-**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
8. Utang Pajak	**-**	**-**
Akun ini terdiri dari:		
Utang Pajak Pasal 29	-	-
Jumlah	**-**	**-**
Rekonsiliasi laba rugi		
Laba (Rugi) komersial	(114.013.195)	-
Koreksi positif :		
Koreksi negatif :		
Jasa Giro	**341.153**	
Laba Kena Pajak	**(113.672.042)**	**-**
Perkiraan Pajak Penghasilan Badan	-	-

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
9. Biaya Yang Masih Harus Dibayar	**34.030.501**	**-**
Akun ini terdiri dari:		
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	34.030.501	-
Jumlah	**34.030.501**	**-**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
10. Ekuitas	**2.000.000.000**	**-**

Berdasarkan Perda 14/2020, Perumda Bhakti Praja memiliki modal dasar sebesar Rp 50.000.000.000 yang akan disetor secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Pada bulan November 2023 Perumda Bhakti Praja menerima setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp 2.000.000.000,-.

Pemegang Saham	Jumlah %	Jumlah (Lembar)	Jumlah (Rp)
Pemda Kabupaten Berau	100%	-	2.000.000.000
	100%	**-**	**2.000.000.000**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
11. Pendapatan Usaha	**2.247.662.300**	**-**
Akun ini terdiri dari:		
Penjualan Jasa	2.247.662.300	-
Jumlah	**2.247.662.300**	**-**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
12. Harga Pokok Pendapatan	**2.048.513.200**	**-**
Akun ini terdiri dari:		
Beban Pengankutan CPO	2.048.513.200	-
Jumlah Harga Pokok Pendapatan	**2.048.513.200**	**-**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
13. Beban Umum dan Administrasi	**313.430.773**	**-**
Biaya Gaji Pegawai	215.580.000	-
Beban Kantor	1.576.000	-
Beban Sewa	17.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas	15.991.863	-
Beban Jasa Profesional	55.500.000	-
Beban Pemeliharaan	200.000	-
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.499.952	-
Beban Administrasi Lainnya	6.082.958	-
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	**313.430.773**	**-**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
14. Pendapatan (Biaya) Lain-lain	**268.478**	**-**
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Jasa Giro	341.153	-
Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah	**341.153**	**-**
Biaya Lain-lain		
Pajak Jasa Giro	-	-
Biaya Administrasi Bank	72.675	-
Bunga Pinjaman	-	-
Jumlah	**72.675**	**-**
Jumlah Pendapatan (Biaya) Lain-lain	**268.478**	**-**

15. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Bhakti Praja untuk tahun berakhir 31 Desember 2023 yang telah diselesaikan pada tanggal 14 Maret 2024.



LAMPIRAN 10

Rincian JIJ yang Dimanfaatkan Perumda Batiwakkal
Tanpa Kerja Sama Pemanfaatan Tahun 2023 dan 2022

Rincian JIJ yang Dimanfaatkan Perumda Batiwakkal Tanpa Kerja Sama Pemanfaatan Tahun 2023 dan 2022

Lampiran 10

No	ID Pemda	UPB	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Keterangan
1	‘05010010014008355	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83.163.213.002,40	83.163.213.002,40	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)
2	‘05010010014007851	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.240.272.200,00	59.240.272.200,00	Sumur Resapan
3	‘05010010014004898	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.622.918.000,00	3.622.918.000,00	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup
4	‘05010010014008096	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.844.806.652,00	1.844.806.652,00	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)
5	‘05010010014007583	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.386.343.000,00	1.386.343.000,00	Sumur Resapan
6	‘05010010014006728	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.286.232.200,00	1.286.232.200,00	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain
7	‘05010010014004890	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.151.685.000,00	1.151.685.000,00	Bangunan Pelengkap Pengembangan Lain-lain
8	‘05010010014007910	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.047.400.100,00	1.047.400.100,00	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)
9	‘05010010014004884	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	934.633.000,00	934.633.000,00	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain
10	‘05010010014005335	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	899.181.000,00	899.181.000,00	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang
11	‘05010010014004681	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	884.362.000,00	884.362.000,00	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang
12	‘05010010014002343	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	865.659.000,00	865.659.000,00	Bangunan Buster Pump
13	‘05010010014004882	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	780.775.000,00	780.775.000,00	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup
14	‘05010010014002404	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	739.250.000,00	739.250.000,00	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain
15	‘05010010014005044	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.797.000,00	700.797.000,00	Sumur Resapan
16	05010010014009399	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.742.587.214,00	4.742.587.214,00	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
17	05010010014009393	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.554.624.101,41	1.554.624.101,41	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
18	05010010014009086	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	650.792.396,00	650.792.396,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
19	05010010014009132	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.577.232.400,00	15.577.232.400,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
20	05010010014009186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.930.365.390,00	6.930.365.390,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
21	05010010014009375	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.832.307.759,00	1.832.307.759,00	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
Jumlah			**189.835.436.414,81**	**189.835.436.414,81**	



LAMPIRAN 11

RINCIAN TABEL PROPERTI INVESTASI DAN AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI TAHUN 2023

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROPERTY INVESTASI

Lampiran 11

NO		NAMA ASET	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2021	NILAI BUKU PER 31 DES 2021	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022	NILAI BUKU PER 31 DES 2022	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	LOKASI	TERCATAT PADA KIB C
B		GEDUNG DAN BANGUNAN									
	1	GEDUNG OLAH RAGA PEMUDA	3.823.462.841,00	815.672.068,00	3.007.790.773,00	892.141.324,00	2.931.321.517,00	968.610.580,00	2.854.852.261,00	Jl. Pemuda Tanjung Redeb	PUPR
	2	PASAR SANGGAM ADJI DILAYAS	286.207.413.000,00	74.537.273.163,00	210.680.239.837,00	80.261.321.423,00	205.946.091.577,00	80.283.821.423,00	205.923.591.577,00	Jl. RM Ayoeb Kel Rinding	PUPR
	3	GEDUNG BUSAK MALUR	460.494.000,00	106.784.911,00	353.709.089,00	115.994.791,00	344.499.209,00	125.204.671,00	335.289.329,00	Jl. Pemuda Tanjung Redeb	PUPR
	4	STADION MINI OLIMPIC	72.297.466.424,00	120.495.777,00	72.176.970.647,00	1.566.445.105,00	70.731.021.319,00	3.012.394.433,00	69.285.071.991,00	Kel. Teluk Bayur	PUPR
	5	WISMA ATLIT	1.376.396.000,00	364.744.940,00	1.011.651.060,00	392.272.860,00	984.123.140,00	419.800.780,00	956.595.220,00	Kampung Tanjung Batu	PUPR
	6	MESS BERAU SAMARINDA 1	1.197.000.000,00	600.495.000,00	596.505.000,00	624.435.000,00	572.565.000,00	648.375.000,00	548.625.000,00	Jl. P. Hidayatullah Samarinda	SEKRETARIAT DAERAH
	7	MESS BERAU SAMARINDA 2	1.125.000.000,00	564.375.000,00	560.625.000,00	586.875.000,00	538.125.000,00	609.375.000,00	515.625.000,00	Jl. P. Hidayatullah Samarinda	SEKRETARIAT DAERAH
			366.487.232.265,00	**77.109.840.859,00**	**288.387.491.406,00**	**84.439.485.503,00**	**282.047.746.762,00**	**86.067.581.887,00**	**280.419.650.378,00**		

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROPERTY INVESTASI

Lampiran 11

NO	NAMA ASET		HARGA PEROLEHAN	LOKASI	TERCATAT PADA KIB A
A	**TANAH**				
	1	TANAH PEMKAB BERAU EX BSC	2.700.000.000,00	Kec. Gunung tabur	BPKAD
	2	TANAH PEMKAB BERAU EX PLTU SAMBAKUNGAN	461.844.520,00	Kampung Sambakungan	BPKAD
			3.161.844.520,00		



LAMPIRAN 12

RINCIAN MASING – MASING POS ASET TIDAK BERWUJUD

	Rincian Masing - Masing Pos Aset Tidak Berwujud OPD	
1	**BAPENDA**	
	Reklas ke ATB Kajian Akademis Pengelolaan PBB P2 dengan FEB Universitas Gajah Mada. Nomor BAST 01/BAST - HP/BAPENDA-B/202 tanggal 09/06/2023 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	375.000.000,00
	Reklas ke ATB Kajian Penyusunan Potensi Wajib Pajak dengan Universitas Muhammadiyah Berau. Nomor BAST 15/BA-STP/BAPENDA/2023 tanggal 10/07/2023 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	125.100.000,00
	Reklas ke ATB Kajian Penyusunan Potensi Wajib Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam Batuan) Nomor BAST 11/BAST-HP/Kwp.XII/2023 tanggal 01/12/2023 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	120.000.000,00
	Reklas ATB Belanja Modal Kajian Jasa Kajian Akademis Pengelolaan PBB-P2 dengan FEB Universitas Gadjah Mada. Tanggal 30/09/2022 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	500.000.000,00
	Reklas ATB Belanja Kajian Penyusunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Tanggal 12/12/2022 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	100.000.000,00
	Reklas ATB Belanja Kajian Penyusunan Potensi Wajib Pajak dengan UMB Tanggal 14/12/2022 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	99.500.000,00
2	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	
	Reklas Jasa Konsultasi Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan BLK (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	84.722.000,00
3	**SEKRETARIAT DPRD**	
	Reklas ke ATB Aplikasi/ Software Gaji Nomor BAST :027/12.01/BA-STB.SIMPERGAJI/XII/2023 Tanggal 27 /12/2023 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	86.635.500,00
	Reklas ke ATB Aplikasi/ Software Perjadin Nomor BAST :027/12.01/BA-STB.PERJADIN/XII/2023 Tanggal 27 /12/2023 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	84.634.614,00
4	**DINAS PERHUBUNGAN**	
	Reklas Ke ATB Aplikasi Sistem Pencatatan Penarikan Retribusi Parkir No.BAST 03/BASTP/DISHUB-PERPARKIRAN/IX/2023 Tanggal 22 September 2023 (asal KIB : Peralatan dan Mesin, tujuan KIB : Aset Lainnya)	33.633.000,00
	Reklas Ke ATB Aplikasi Sistem Pendaftaran Uji Kendaraan bermotor No.BAST 266/BAPP/PKB/DISHUB-BRU/VIII/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 (asal KIB : Peralatan dan Mesin, tujuan KIB : Aset Lainnya)	29.850.000,00
5	**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN**	
	Reklas Dari GB Ke ATB Bangunan Industri (Kajian Teknis Pengadaan Tanah) Kamp. Tasuk Kec. Gn Tabur Tanggal 19 Desember 2023 (asal KIB : Gedung dan Bangunan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	99.000.000,00
6	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**	
	Reklas ATB Kajian Dokumen Penyusunan PS (Study Kelayakan) Penataaan Ujung Tanjung Ex lahan Kebakaran Kelurahan Bugis Nomor BAST : 04/ BASTP/ KPA - PPK - Ujung Tanjung / DPKP II / V / 2023 Tanggal 04 Mei 2023 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	69.750.000,00
	Reklas ATB Kajian Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Tanjung Ex lahan Kebakaran Kelurahan Bugis Nomor BAST : 05 / KPA - PPK / DPPT - Ujung Tanjung /DPKP II / VII / 2023 Tanggal 15 Agustus 2023 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	69.700.000,00
7	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**	
	Reklas Dari PM Ke ATB Pembuatan Sytem Informasi Data Base Destinasi Pariwisata Nomor BAST : 04 / BASTP /PL.20 - DEST / X /2023 Tanggal 08 Agustus 2023 (asal KIB : Peralatan dan Mesin, tujuan KIB : Aset Lainnya)	69.900.000,00
8	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**	
	Reklas Dari GB Perencanaan Tehnis Master Plan Dan Perencanaan DED Lapangan Batiwakkal Nomor BAST : 03 /BASTP / KPA / PPK /MPDED Batiwakkal /RTH /DBHDR /DLHK /XII /2023 Tanggal 18 Desember 2023 (asal KIB : Gedung dan Bangunan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	484.863.983,00
	Reklas Dari GB Review DED Master Plan RTH Kantor Kecamatan Teluk Bayur DBHDR Nomor BAST : 08 /BAST / PPRTH / RVMRKKT /DBHDR /XII / 2023 Tanggal 21 Desember 2023 (asal KIB : Gedung dan Bangunan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	99.442.680,00
9	**SEKRETARIAT DAERAH**	
	Reklas ke ATB pengadaan SoftwareAplikasi Forkopimda Nomor BAST : 900/123/Bastpb/Keu.3 tanggal 31/08/2023 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	20.000.000,00
10	**DINAS KESEHATAN**	
	Reklas ke ATB Website Profil Layanan UPT.Puskesmas Talisayan .JKN.TA.2023.no.1319/1/JKN/PKMT/VI/2023.tanggal 17/6/2023. (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	5.000.000,00
11	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
	Reklas dari Barjas Ke ATB Konsultansi Beorientasi Bidang Telematika Nomor BAST : 91 /BA . STB - Diskominfo - IV / XII / 2023 tanggal 08 Desember 2023	170.052.000,00
	Reklas dari Barjas Ke ATB, Pengadaan Sistem Informasi Satu Data Kabupaten Berau, BAST Nomor : 79/BA.STB-Diskominfo-IV/XI tanggal 27 November 2023	98.500.000,00
	Reklas ke ATB Kajian - Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Layanan SPBE Nomor BAST :43/BASTPK/diskominfo -II/IX/2023 tanggal 02/09/2023 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	486.535.200,00
	Reklas ke ATB Kajian Penyusunan Master Plan Smart City Nomor BAST : 46/ BASTP / Diskominfo - II / VIII / 2023 Tanggal 17/08/2023 (asal KIB : Aset Tetap Lainnya, tujuan KIB : Aset Lainnya)	297.119.250,00
12	**RSUD Dr. ABDUL RIVAI**	
	Reklas ke ATB Konsultan DED (Design Engineering Detail) Pengembangan gedung RSUD dr.Abdul Rivai Tanjung Redeb (BLUD) (asal KIB : Gedung dan Bangunan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	1.500.000.000,00
	Reklas ke ATB Konsultan Master Plan Pengembangan gedung RSUD dr.Abdul Rivai Tanjung Redeb (BLUD) (asal KIB : Gedung dan Bangunan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	750.000.000,00

	Rincian Masing - Masing Pos Aset Tidak Berwujud OPD	
13	**DPUPR**	
	Reklas ke ATB Masterplan Drainase Tanjung Redeb tanggal 10/11/2023 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	1.781.550.000,00
	Reklas ke ATB Kajian Survey data base update kondisi jaringan Jalan tanggal 17/11/2023 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	897.894.540,00
	Reklas ke ATB Reviu Masterplan dan DED Pembangunan RSUD Tanjung Redeb, tanggal 04/09/2023 (asal KIB : Gedung dan Bangunan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	119.662.550,00
	Reklas ke ATB Pelaksanaan updating E-PAKSI D.I Semurut Tahun 2023 Nomor BAST : 02-BASTHP-KPA-PTLH/E-Paksi D.I Semurut/DPUPR-SDA/APBD-P/2023 tanggal 06/12/2023 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan	99.589.000,00
	Reklas ke ATB pelaksanaan updating E-PAKSI D.I buyung-buyung Tahun 2023 Nomor BAST : 02-BASTHP-KPA-PTLH/E-Paksi D.I Buyung2/DPUPR-SDA/APBD-P/2023 tanggal 06/12/2023 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan,	99.589.000,00
	Reklas ke ATB Pelaksanaan updating E-PAKSI D.I Tumbit melayu tahun 2023 Nomor BAST : 02-BASTHP-KPA-PTLH/E-paksi D.I Tumbit Melayu/DPUPR-SDA/APBD-P/2023 tanggal 06/12/2023 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jarin	99.478.000,00
	Reklas ke ATB pelaksaaan updating E-PAKSI D.I Gurimbang Tahun 2023 Nomor BAST : 02-BASTHP-KPA-PTLH/E-Paksi D.I Gurimbang/DPUPR-SDA/APBD-P/2023 tanggal 06/12/2023 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tuju	99.389.000,00
	Reklas ke ATB pelaksaan updating E-PAKSI D.I Pulau Besing Tahun 2023 Nomor BAST : 02-BASTHP-KPA-PTLH/E-Paksi D.I P.Besing/DPUPR-SDA/APBD-P/2023 tanggal 06/12/2023 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tuju	99.167.000,00
	Reklas ke ATB Pelaksanaan Updating E-PAKSI D.I Tasuk Tahun 2023 Nomor BAST : 02-BASTHP-KPA-PTLH/E-Paksi D.I Tasuk/DPUPR-SDA/APBD-P/2023 tanggal 06/12/2023 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB	99.056.000,00
	Reklas ke ATB DED SPAM Kampung Merapun tanggal 21/12/2023 (asal KIB : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	94.902.003,00
	Reklas ke ATB Pemetaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Berau tanggal 08/12/2016 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	996.656.000,00
	Reklas ke ATB DED Rekayasa Sungai Pengaman Turap Kawasan A. Yani & Jl. Pl. Derawan T.A tanggal 2015 31/12/2015 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	931.425.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study Jembatan sambaliung - gunung tabur (Melalui pulau Adji) tanggal 31/12/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	710.902.500,00
	Reklas ke ATB Masterplan Penataan Bangunan Pelengkap & Fasilitas Pendukung Jalan Perkotaan tanggal 28/12/2020 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	707.824.150,00
	Reklas ke ATB Survey Potensi Sumber Energi Alternatif Belanja DED (PLTS) tanggal 23/12/2015 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	589.000.000,00
	Reklas ke ATB SID kelayakan pembangunan embung D.I Tasuk Mandiri Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur tanggal 19/12/2016 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	493.542.000,00
	Reklas ke ATB DED Penanganan dan Pengendalian banjir di Kawasan Tumbit tanggal 07/11/2016 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	493.400.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Dokumen Lingkungan Penataan bantaran Sungai Kelay tanggal 20/12/2019 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	481.030.000,00
	Reklas ke ATB Master Plan Air Limbah Kabupaten Berau tanggal 31/12/2019 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	431.015.200,00
	Reklas ke ATB DED sistem sarana air bersih tembudan tanggal 26/10/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	384.334.500,00
	Reklas ke ATB Studi air baku Spam tanjung batu tanggal 26/10/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	377.355.000,00
	Reklas ke ATB Studi air baku spam Kasai tanggal 26/10/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	373.945.000,00
	Reklas ke ATB Survey Potensi Sumber Energi Alternatif Belanja Detail Engineering Desain (DED) PLTMH tanggal 16/11/2015 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	372.000.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study & DED Sarana air bersih kampung bukit makmur segah tanggal 26/10/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	341.764.500,00
	Reklas ke ATB Penyusunan DED Sarana air bersih punan malinau tanggal 18/12/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	339.350.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study & DED sarana air bersih long ayan tanggal 06/11/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	339.295.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study & DED saran air bersih kampung muara lesan tanggal 09/11/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	339.185.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study & DED sarana air bersih Long ayap tanggal 18/12/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	336.655.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study & DED sarana air bersih Kampung pandan sari segah tanggal 02/11/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	335.720.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study & DED sarana air besih teluk semanting tanggal 31/12/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	303.193.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan DED Daerah Irigasi Eka Sapta (ABT) tanggal 15/05/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	293.700.000,00
	Reklas ke ATB Survey Potensi Sumber Energi Alternatif TA 2014, Pekerjaan : Redesign Pembangkitan Daya PLTMH di Kampung Tembudan Kec. Batu Putih tanggal 08/07/2014 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KI	287.200.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan DED Derah Irigasi Tasuk tanggal 12/09/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	285.835.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study dan Master Plan IPLT Tanjung Redeb tanggal 31/12/2019 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	272.812.100,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study & DED Sarana air bersih kampung pilanjau tanggal 20/12/2018 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	257.730.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pangaman Pantai Pulau Derawan Kec. Pulau Derawan T.A 2015 (Banprov) tanggal 31/12/2015 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainn	248.765.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Data Peli Banjir Kecamatan Sambaliung tanggal 28/12/2020 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	210.430.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study & DOK Lingkungan Pembangunan Jembatan Bena Baru tanggal 30/12/2016 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	199.980.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study & DED Sarana Air Bersih Suaran tanggal 26/07/2017 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	140.728.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study Pengadaan Tanah Jalan H.Isa IV tanggal 13/12/2022 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	99.906.660,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study Pengadaan Tanah Jalan Singkuang - Bandara Kalimarau Segmen 1 dan Segmen 2 (Gang At Taubah - Jl. Raja Alam) tanggal 13/12/2022 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : A	99.901.110,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study Pengadaan Tanah Jalan Singkuang - Bandara Kalimarau Segmen I (Gang At Taubah - Rencana Jembatan Kelay III) tanggal 13/12/2022 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : As	99.878.910,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study Pengadaan Tanah Jalan Singkuang - Mantaritip Segmen 4 Limunjan tanggal 13/12/2022 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	99.851.160,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Sistem Informasi Daerah Irigasi Sukan tanggal 31/12/2019 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	99.500.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Sistem Informasi Daerah Irigasi Buyung-Buyung - Semurut tanggal 31/12/2019 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	99.325.000,00
	Reklas ke ATB DED SAB Kampung Sumber Agung dan Kayu Indah T.A. 2021 tanggal 27/12/2021 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	99.200.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Sistem Informasi Daerah Irigasi (D.I) Bumi Jaya tanggal 12/11/2020 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	98.890.000,00
	Reklas ke ATB Feasibility Study Perluasan SPAM Unit Suaran (support Kawasan Industri Mangkajang dan sekitarnya) tanggal 15/12/2022 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	98.817.750,00
	Reklas ke ATB Studi potensi kelayakan air baku kampung pilanjau Mantaritip T.A 2022) tanggal 19/12/2022 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	98.745.600,00
	Reklas ke ATB KAJIAN SURVEY PEMELIHARAAN RUTIN JALAN tanggal 23/12/2021 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	94.882.000,00
	Reklas ke ATB Studi potensi air baku kecamatan tanjung batu T.A 2022 (APBD-P) tanggal 19/12/2022 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	93.906.000,00
	Reklas ke ATB KAJIAN SURVEY KONDISI JALAN WILAYAH PESISIR tanggal 23/07/2021 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	93.885.000,00
	Reklas ke ATB Studi potensi kelayakan sumber Air Baku Kecamatan Maratua T.A 2022) tanggal 19/12/2022 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	93.573.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Dokumen SID Embung Pilanjau tanggal 12/11/2020 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	88.825.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Sistem Informasi Daerah Irigasi (D.I) Pandan Sari Kecamatan Segah tanggal 12/11/2020 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	86.432.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Dokumen Invetarisasi Lahan dan Bangunan di Bantaran Sungai Kelay tanggal 02/12/2020 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	74.360.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Database Inventarisasi Saluran Draianse kelurahan teluk Bayur T.A 2015 tanggal 31/12/2020 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	49.665.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Database Inventarisasi Saluran Draianse Kelurahan Gunung Tabur T.A 2015 tanggal 31/12/2020 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	49.500.000,00

	Rincian Masing - Masing Pos Aset Tidak Berwujud OPD	
	Reklas ke ATB Penyusunan Database Inventarisasi Saluran Draianse Kelurahan Rinding T.A 2015 tanggal 31/12/2015 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	49.445.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan Database Inventarisasi Saluran Drainase kelurahan Sambaliung T.A 2015 tanggal 31/12/2015 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	49.390.000,00
	Reklas ke ATB Sistem Evaluasi Monitoring Proyek TA. 2015) tanggal 31/12/2015 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	49.060.000,00
	Reklas ke ATB Penyusunan DED pembangunan jaringan listrik menuju wisata air panas bapinang tanggal 29/11/2017 (asal KIB : Konstruksi Dalam Pengerjaan, tujuan KIB : Aset Lainnya)	43.395.000,00
	JUMLAH ATB TAHUN 2023 KESELURUHAN	**23.134.321.460,00**



LAMPIRAN 13

RINCIAN BEBAN HIBAH

Rincian Beban Hibah Tahun 2023

Lampiran 13

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
1	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Penataan Halaman SD IT Ashowah (Dana Hibah) TA. 2023 Keg. 02.2.01.06	12.970.000,00
2	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Penataan Halaman SDIT Ash Showah TA. 2023 Keg. 02.2.01.06	191.703.000,00
3	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Perencanaan Penataan Halaman SD IT Ashowah (Dana Hibah) TA. 2023 Keg. 02.2.01.06	14.973.000,00
4	Dinas Pendidikan	Belanja Pengadaan Laptop MIS Nahdatul Wathan Labanan TA. 2023 Keg. 02.2.01.16	44.750.000,00
5	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengadaan Komputer SD Muhammadiyah Tanjung Redeb TA. 2023 Keg. 02.2.01.22	174.250.000,00
6	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA MI Negeri Tanjung Redeb (MIN 1 Berau Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	137.400.000,00
7	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan BOSDA MI Negeri Tanjung Redeb (MIN 1 Berau) Triwulan III dan IV (Juli - Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	137.400.000,00
8	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SD Al-Quran Wahdah Islamiyah Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	25.500.000,00
9	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SDS Teladan Prima 01 Talisayan Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	72.600.000,00
10	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SD Annisa Tanjung Redeb Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	30.600.000,00
11	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MI Nahdlatul Wathan Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	56.400.000,00
12	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SD Muhammadiyah Tanjung Redeb Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	35.400.000,00
13	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MI DDI Biduk-Biduk Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	33.600.000,00
14	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MI Al-Ihsan Tanjung Redeb Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	155.700.000,00
15	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SDIT Madani Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	102.090.000,00
16	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SDIT Ash Shohwah Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	165.024.600,00
17	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SD Katolik WR. Supratman Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	94.200.000,00
18	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MI Al Ma'arif At-taqwa Tahap I - Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	32.700.000,00
19	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MIS Al-Ridho Berau Tahap I (Triwulan I dan II) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	6.198.000,00
20	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SDTK Harvest Tahap I (Triwulan I dan II) Bulan Januari s.d Juni TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	33.000.000,00
21	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Triwulan I dan II (Januari s/d Juni) BOSDA SD Ibnu Katsir TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	81.660.000,00
22	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SDN Al-Quran Wahdah Islamiyah Tahap II (Triwulan III dan IV) Juli - Desember TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	25.500.000,00
23	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SD Katolik WR. Supratman Tahap II Juli - Desember TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	94.200.000,00
24	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SDIT Ash Shohwah Tahap II Triwulan III dan IV (Juli - Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	166.775.400,00
25	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SD MI Al Ma'arif At-taqwa Tahap III dan IV (Juli - Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	32.700.000,00
26	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MIS Nurul Huda Sambaliung Tahap 1, 2, 3 dan 4 (Januari - Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	9.000.000,00
27	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MIS DDI Biduk-Biduk Tahap II Triwulan III dan IV (Juli - Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	33.600.000,00
28	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SD Muhammadiyah Tanjung Redeb Triwulan 3 dan 4 (Juli - Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	35.400.000,00
29	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SDIT Madani Tahap II Triwulan III dan IV (Juli - Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	101.310.000,00
30	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SD Annisa Triwulan III dan IV (Juli - Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	30.600.000,00
31	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MI Al-Ihsan Triwulan III dan IV (Juli - Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	155.700.000,00
32	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SDTK Harvest Triwulan III dan IV (Juli - Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	33.000.000,00
33	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SDS Teladan Prima 01 Talisayan Triwulan III dan IV (Juli s/d Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	72.600.000,00
34	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MI Nahdlatul Wathan Triwulan III dan IV (Juli s/d Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	56.400.000,00
35	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MIS Al-Ridho Berau Triwulan III dan IV (Juli s/d Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	4.602.000,00
36	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyaarakatan BOSDA MIS Ma'arif NU 02 Berau Tahap I dan II Triwulan 1 s/d 4 (Januari s.d Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	15.000.000,00
37	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SD Ibnu Katsir Triwulan 3 s/d 4 (Juli s.d Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	81.540.000,00
38	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyaarakatan BOSDA MI Nurul Amin Tahap I dan II Triwulan 1 s/d 4 (Januari s.d Desember) TA. 2023 Keg. 02.2.01.29	27.000.000,00
39	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pembangunan Tempat Parkir dan Kantin Sekolah SMPIT Ash Shohwah Sub Keg. 1.01.02.2.02.12 TA.2023	180.763.000,00
40	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Bosda MTsN Berau An. Gatot Subroto,S.Ag Semester I Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	251.033.500,00
41	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Bosda MTsN Berau An. Gatot Subroto,S.Ag Semester 2 Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA. 2023	237.666.500,00
42	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP IBNU KATSIR A.n Muhammad Yamin Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	18.450.000,00
43	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP IT Madani Tg. Redeb An. Zulkipli,S.Pd Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA. 2023	46.200.000,00
44	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda MTs Ma'arif NU 02 Berau An. Neri,S.Pd Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA. 2023	36.900.000,00
45	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Bosda SMPIT Ash Shohwah An. Khairul Anwar,S.Pd Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	117.691.000,00
46	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Bosda SMP Muhammadiyah Tanjung Redeb An. Muhammad Yunus,S.Pd.I Semester I Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	51.600.000,00
47	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SMP Katolik WR Soepratman Berau A.n Maria M. Teofils Surat Langobelen,S.Pd Semester 1 Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	69.300.000,00
48	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA MTs Ma'arif NU 03 Berau An. Siti Khotijah Semester 1 Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	13.682.000,00
49	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SMP AL IHSAN BERAU An. Majdi,S.Pd Semester 1 Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	89.700.000,00
50	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan BOSDA SMP PGRI Tanjung Redeb An. Ali Syahbana,SE,M.Pd Semester 1 Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	21.600.000,00
51	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Bosda MTs Nurul Muhajirin An. Arif Furqon,S.Pd.I Semester I Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	31.991.000,00
52	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Bosda MTs Al-Ridho An. Evy Hanafiah,S.Pd (Januari s.d Juni 2023) Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023 Semester I	71.723.000,00
53	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Bosda MTs DDI Biduk-Biduk An. Fitriadi,S.Pd.I Semester I Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	100.504.000,00
54	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Bosda SMP Kristen Harvest An. Lim Fei Lien,M.M Semester I (Januari-Juni 2023) Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	12.150.000,00
55	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Bosda MTs Labanan Makmur An. Saman Siregar,M.Pd Semester I Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	64.169.000,00
56	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Bosda MTs Nurul Huda Sambaliung An. Madani Ashari,S.Pd.I Semester I (Januari-Juni 2023) Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	31.170.000,00
57	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan BOSDA SMP IT Al-I'Tisham Biatan An. Shiddiqi Rajab,S.Pd.I.,Gr.Semester 1 Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	53.700.000,00
58	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Bosda MTs Al-Kholil NU Berau An. FATHULLAH GZ Semester I (Januari-Juni 2023) Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	55.476.000,00
59	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. BOSDA MTs As'adiyah H. M Yusuf Bukit Kasai An. Muhammad Arifin, S.Gz M. Pd Semester 1 Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA. 2023	7.650.000,00
60	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP Muhammadiyah Tanjung Redeb An. Muhammad Yunus,S.Pd. I Semester II Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	50.100.000,00

61	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda MTs MA'arif NU 03 Berau An. Siti Khotijah Semester 2 Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	13.318.000,00
62	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda MTs Nurul Muhajirin An. Arif Furqon,S.Pd.I Semester II (dua) Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	31.009.000,00
63	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda MTs.Nurul Huda Sambaliung An. Madani Ashari S,PD.I Semester 2 (Juli-Desember 2023) Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	30.930.000,00
64	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP PGRI Tanjung Redeb An. Ali Syahbana,SE.M.Pd Semester 2 Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	21.600.000,00
65	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP IBNU KATSIR An. Muhammad Yamin Semester II (Juli-Desember 2023) Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	18.450.000,00
66	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP Katolik WR Soepratman Berau An. Afia Ai,S.Pd Semester 2 Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	69.300.000,00
67	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP AL IHSAN BERAU An. Majdi,S.Pd Semester II (Juli-Desember 2023) Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	90.300.000,00
68	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP IT Ash Shohwah An. Khairul Anwar,S.Pd Semester II Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	121.709.000,00
69	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda Mts Ma'arif NU 02 Berau An. Neri ,S.Pd Semester II Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA.2023	36.900.000,00
70	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP Kristen Harvest An. Lim Fei Lien,M.M Semester II (Juli-Desember 2023) Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	11.250.000,00
71	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda MTs Labanan Makmur An. Saman Siregar,M.Pd Semester II (Dua) Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	63.631.000,00
72	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda MTs AL-Ridho An. Evy Hanifah,S.Pd (Juli s.d Desember 2023) Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023 Semester 2	61.477.000,00
73	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda MTs DDI Biduk - Biduk An. Fitriadi,S.Pd Semester 2 Sub Keg. TA.2023	92.096.000,00
74	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda Mts Al-Kholil NU Berau An. Fathullah GZ Semester II (Juli - Desember 2023) Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	53.424.000,00
75	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP IT Madani Tg. Redeb Semester II An. Zulkipli,S.Pd Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	45.600.000,00
76	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda MTs. As'Adiyah H. M Yusuf Bukit Kasai An. Muhammad Arifin, S Gz., M.Pd Semester 2 Sub Keg. 1.01.02.2.02.42 TA.2023	7.650.000,00
77	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bosda SMP IT AL-I;Tisham Biatan An. Shiddiqi Rajab,S.Pd.I., Gr. Semester II Sub Keg.1.01.02.2.02.42 TA.2023	53.400.000,00
78	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemagaran PAUD Permata Indah Kampung Biatan Ilir TA. 2023 Keg. 03.02	314.500,00
79	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Pemagaran Paud Permata Indah Kampung Biatan Ilir TA. 2023 Keg. 03.02	13.986.000,00
80	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Perencanaan Pemagaran Paud Permata Indah Kampung Biatan ilir TA. 2023 Keg.03.02	15.928.500,00
81	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemagaran PAUD Permata Indah Kampung Biatan Ilir TA. 2023 Keg. 03.02	154.071.500,00
82	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pengadaan Meubelair TK Tunas Pertiwi TA. 2023 Keg. 03.07	79.998.000,00
83	Dinas Pendidikan	Peng. Laptop - Printer Untuk Sek. Penggerak (KB IT Azzahro dan TK Darul Ulum) TA. 2023 Keg. 03.09	52.830.000,00
84	Dinas Pendidikan	Pengadaan Laptop dan Printer KB Bina Mutiara Bunda TA. 2023 Keg. 03.09	16.160.000,00
85	Dinas Pendidikan	Pengadaan Laptop 1 Lembaga 1 Laptop PAUD Swasta se- Kabupaten Berau	1.953.000.000,00
86	Dinas Pendidikan	Pengadaan Hibah Laptop PAUD Harapan Indah dan PAUD Haur Gading TA. 2023 Keg. 03.09	36.000.000,00
87	Dinas Pendidikan	Pengadaan Komputer ANBK PKBM Nusa Bangsa TA. 2023 Keg. 03.09	77.025.000,00
88	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengadaan KIT BOX Siswa PAUD TA. 2023 Keg. 03.09	1.041.905.200,00
89	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pengadaan APE TK GIDEON Rt. 17 Tanjung Redeb TA. 2023 Keg. 03.12	28.000.000,00
		Sub total	**8.517.527.700,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
90	Dinas Kesehatan	Bantuan Dana Hibah Kepada PMI Kabupaten Berau Yang Terprogram Pada DPA Dinas Kesehatan Berau Tahun 2023	700.000.000,00
		Sub total	**700.000.000,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
91	DPUPR	Sekaligus 100% Pekerjaan Tandon Air 1200ML Seramut RT 22 Sambaliung	108.824.000,00
92	DPUPR	Sekaligus 100% Pekerjaan Pengadaan Tandon Air 1200 ML Tabalar Muara	65.238.696,00
93	DPUPR	Sekaligus 100% Pekerjaan Pengadaan Tandon Air 1200ML Harapan Maju	198.059.520,00
94	DPUPR	Pembayaran Tahap I 60% Penyediaan SPALD-S Di Kampung Tanjung Perangat KSM Saragan Maju	288.000.000,00
95	DPUPR	Tahap I (60%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S Di kampung Sei Bebanir Bangun KSM Lestari	180.000.000,00
96	DPUPR	Tahap I (60%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kelurahan Teluk Bayur KSM Sidowaras	180.000.000,00
97	DPUPR	Tahap I (60%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di kelurahan Rinding KSM Rinding Sehat	180.000.000,00
98	DPUPR	Tahap I (60%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S Di Kampung Sukan Tengah KSM Amanah	216.000.000,00
99	DPUPR	Tahap I (60%) Pekerjaan penyediaan SPALD-S Di Kampung Merancang Ilir KSM Merancang Mandiri	180.000.000,00
100	DPUPR	Tahap I (60%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S Di Kampung Tanjung Batu (Karena kurangnya ketersediaan dana maka tidak dapat dibayarkan seluruhnya) KSM Danakan	70.000.000,00
101	DPUPR	Tahap I (60%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S Di Kampung Kasai (Karena kurangnya ketersediaan dana maka tidak dapat dibayarkan seluruhnya) KSM Sejahtera Bersama	70.000.000,00
102	DPUPR	Tahap III (30%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S Di Kampung Kasai	8.800.000,00
103	DPUPR	Tahap II (30%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kelurahan Rinding	90.000.000,00
104	DPUPR	Tahap II (30%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S Di Kampung Sei Bebanir Bangun KSM lestari	90.000.000,00
105	DPUPR	Tahap II (30%) Penyediaan SPALD-S di Kampung Tanjung Perangat ksm Saragan Maju	144.000.000,00
106	DPUPR	Tahap II (30%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kampung Sukan Tengah KSM Amanah	108.000.000,00
107	DPUPR	Tahap II (30%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kelurahan Teluk Bayur KSM Sidowaras	90.000.000,00
108	DPUPR	Tahap II (30%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kampung Merancang Ilir KSM Merancang Mandiri	90.000.000,00
109	DPUPR	Tahap II (30%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kampung Tanjung Batu KSM Danakan	200.000.000,00
110	DPUPR	Tahap II (30%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kampung Kasai KSM Sejahtera Bersama	200.000.000,00
111	DPUPR	Tahap III (30%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S Di Kampung Kasai	21.200.000,00
112	DPUPR	Tahap III (10%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kelurahan Rinding	30.000.000,00
113	DPUPR	Tahap III (10%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kampung Tanjung Batu	30.000.000,00
114	DPUPR	Tahap III (10%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kampung Sukan Tengah	36.000.000,00
115	DPUPR	Tahap III (10%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S di Kampung Sei Bebanir Bangun	30.000.000,00
116	DPUPR	Tahap III (10%) Pekerjaaan Penyediaan SPALD-S di Kelurahan Teluk Bayur	30.000.000,00
117	DPUPR	Tahap III (10%) Pekerjaan Penyediaan SPALD-S Di Kampung Merancang Ilir	30.000.000,00
118	DPUPR	Tahap III (10%) Penyediaan SPALD-S di Kampung Tanjung Perangat	48.000.000,00
119	DPUPR	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencana SPALD-S (APBD-P) TA 2023	79.686.900,00
120	DPUPR	UMK 50% Penyediaan SPALD-Setempat Di Kelurahan Sambaliung	95.796.575,00
121	DPUPR	UMK 50% Penyediaan SPALD-Setempat di Kampung Sembakungan	95.796.556,00
122	DPUPR	UMK 50% Penyediaan SPALD-Setempat Di Kelurahan Teluk Bayur	95.866.767,00

123	DPUPR	UMK 50% Penyediaan SPALD-Setempat Kampung Maluang	95.864.827,00
124	DPUPR	UMK 50% Penyediaan SPALD-Setempat Kelurahan Gayam	95.852.553,00
125	DPUPR	MC 100% Penyediaan SPALD- Setempat Di Kampung Sembakungan	95.796.555,00
126	DPUPR	MC 100% Penyediaan SPALD-Setempat Di Kampung Maluang	95.864.827,00
127	DPUPR	MC 100% Penyediaan SPALD- Setempat Kelurahan Gayam	95.852.553,00
128	DPUPR	MC 100% Penyediaan SPALD- Setempat Di Kelurahan Teluk Bayur	95.866.766,00
129	DPUPR	MC 100% Penyediaan SPALD-Setempat Di kelurahan Sambaliung	95.796.574,00
130	DPUPR	sekaligus 100% Penyediaan SPALD-Setempat Di kelurahan Bugis	191.724.386,00
131	DPUPR	Sekaligus 100% Pekerjaan Konsultan Pengawas SPALD-S	69.930.000,00
132	DPUPR	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencana Rehab Mako Skadron Berau T.A. 2023 (APBD - Kab)	98.967.600,00
133	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA LANJUTAN REHAB GEDUNG KAJARI JL. SA. MAULANA T.A. 2023 (APBD - KAB)	98.967.600,00
134	DPUPR	Uang Muka 30 % Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Kodim 2023 T.A. 2023	2.734.877.700,00
135	DPUPR	UANG MUKA 30 % PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR KODIM T.A. 2023	147.059.793,00
136	DPUPR	UANG MUKA 30 % PEKERJAAN LANJUTAN REHAB GEDUNG KAJARI JL. SA. MAULANA T.A. 2023 (APBD - Kab)	372.905.598,00
137	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA REHAB KANTOR POLSEK TANJUNG REDEB JL. P. HIDAYAHTULLAH NO. 2 KEL. BENDUNGAN KECAMATAN TANJUNG REDEB KAB. BERAU T..A. 2023 (APBD - Kab)	18.870.000,00
138	DPUPR	UANG MUKA 30 % PEKERJAAN REHAB MAKO SKADRON BERAU T.A. 2023 (APBD - Kab)	200.079.270,00
139	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA REHAB ATAP GEDUNG SUB DENPOM JL. PULAU SAMBIT T.A. 2023 (APBD - Kab)	19.955.580,00
140	DPUPR	MC 73,22 % PEKERJAAN REHAB MAKO SKADRON BERAU T.A. 2023 (APBD - Kab)	317.412.423,00
141	DPUPR	MC 32,98 % PEKERJAAN LANJUTAN REHAB GEDUNG KAJARI JL. SA. MAULANA	266.465.911,00
142	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB DI KUTAI KERTANEGARA T.A. 2023	970.301.838,00
143	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS REHAB MAKO SKADRON BERAU T.A. 2023 (APBD - Kab)	69.042.000,00
144	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN REHAB KANTOR POLSEK TANJUNG REDEB JL. P. HIDAYATULLAH NO. 02 KEL. BEDUNGUN KECAMATAN TANJUNG REDEB KAB. BERAU T.A. 2023 (APBD - Kab)	129.941.743,00
145	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS REHAB KANTOR POLSEK TANJUNG REDEB JL. P. HIDAYATULAH NO. 02 KEL. BEDUNGUN KECAMATAN TANJUNG REDEB KAB. BERAU T.A. 2023 (APBD - Kab)	12.137.850,00
146	DPUPR	MC 57,46 % PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR KODIM T.A. 2023	3.498.505.368,00
147	DPUPR	MC 100 % PEKERJAAN REHAB MAKO SKADRON BERAU T.A. 2023 (APBD - Kab)	149.439.206,00
148	DPUPR	SEKALIGUS 100 % KONSULTAN PENGAWAS REHAB ATAP GEDUNG SUB DENPOM JL. PULAU SAMBIT T.A. 2023 (APBD - Kab)	16.183.800,00
149	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN REHAP ATAP GEDUNG SUB DENPOM JL. PULAU SAMBIT T.A. 2023 (APBD Kab)	169.054.940,00
150	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN LANJUTAN REHAB GEDUNG KAJARI JL. SA. MAULANA T.A. 2023 (APBD - Kab)	79.143.000,00
151	DPUPR	MC 03 (100 %) PEKERJAAN LANJUTAN REHAB GEDUNG KAJARI JL. SA. MAULANA T.A. 2023 (APBD - Kab)	213.805.425,00
152	DPUPR	MC 77,13 % PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR KODIM T.A. 2023 (APBD - Kab)	1.197.626.185,00
153	DPUPR	MC 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Kantor Kodim 2023	343.139.517,00
154	DPUPR	Termyn 100 % Pekerjaan Penataan Halaman dan Pagar Keliling Rumah Sehat Baznas JL. APT. Pranoto T.A. 2023 (APBD - P)	565.827.591,00
155	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB DI KUTAI KARTANEGARA T.A. 2023	791.415.015,00
156	DPUPR	MC 100 % PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR KODIM T.A.2023	1.856.854.330,00
157	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN PEMBANGUNAN GAPURA KAMPUNG BENA BARU T.A. 2023 (APBD - P)	181.818.000,00
158	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN PERENCANAAN REHAB RUMAH JABATAN KEMENAG T.A. 2023 (APBD - P)	66.156.000,00
159	DPUPR	TERMYN 95 % PEKERJAAN PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB DI KUTAI KARTANEGARA T.A. 2023	4.860.368.525,00
160	DPUPR	MC 02 (81,23%) Pekerjaan Lanjutan Rehab Gedung Kajari Jl. SA. Maulana	389.841.729,00
161	DPUPR	UANG MUKA 20 % PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN POLRES KABUPATEN BERAU T.A. 2023 (APBD - P)	3.817.925.720,00
162	DPUPR	UANG MUKA 30 % PEKERJAAN LANJUTAN REHAB TOTAL KANTOR KODIM T.A. 2023 (APBD - P)	1.676.819.230,00
163	DPUPR	UANG MUKA 30 % PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN DAN PAGAR KELILING RUMAH SEHAT BAZNAS JL. APT. PRANOTO T.A. 2023 (APBD - P)	213.251.604,00
164	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA SEMENISASI AREA BARANGGANG RUTAN TANJUNG REDEB T.A. 2023 (APBD - P)	17.904.300,00
165	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA PENATAAN HALAMAN DAN PAGAR KELILING RUMAH SEHAT BAZNAS JL. APT. PRANOTO T.A. 2023 (APBD - P)	86.591.100,00
166	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN GAPURA KAMPUNG BENA BARU T.A. 2023 (APBD - P)	19.869.000,00
167	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA LANJUTAN PENATAAN HALAMAN DAN PEMAGARAN KANTOR POLSEK BIDUK - BIDUK T.A. 2023 (APBD - P)	17.600.160,00
168	DPUPR	TERMYN 25 % PEKERJAAN LANJUTAN REHAB TOTAL KANTOR KODIM T.A. 2023 (APBD - P)	908.277.083,00
169	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN PERENCANA GEDUNG KANTOR KORAMIL GUNUNG TABUR T.A. 2023 (APBD - P)	66.003.819,00
170	DPUPR	TERMYN 50 % PEKERJAAN LANJUTAN REHAB TOTAL KANTOR KODIM T.A. 2023 (APBD - P)	908.277.083,00
171	DPUPR	Termyn 50 % Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Polres Kabupaten Berau T.A. 2023 (APBD - P)	7.158.610.725,00
172	DPUPR	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencana Pembangunan Lansekap & Parkir GOR SPN Polda Kaltim di Tenggarong T.A. 2023 (APBD - P)	99.790.000,00
173	DPUPR	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Perencana Pembangunan Kelas Kecil SPN POLDA Kaltim di Tenggarong T.A. 2023 (APBD - P)	99.111.900,00
174	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN PERENCANAAN KANTOR PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB T.A. 2023 (APBD - P)	274.947.000,00
175	DPUPR	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Lanjutan Rehab Total Kantor Kodim 2023 T.A. 2023 (APBD - P)	98.956.500,00
176	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN SEMENISASI AREA BARANGGANG RUTAN TANJUNG REDEB T.A. 2023 (APBD - P)	156.709.311,00
177	DPUPR	Termyn 100 % Pekerjaan Pembangunan Lansekap & Parkir GOR SPN POLDA KALTIM DI TENGGARONG T.A. 2023 (APBD - P)	6.872.755.945,00
178	DPUPR	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Semenisasi Area Baranggang Rutan Tanjung Redeb T.A. 2023 (APBD - P)	14.763.300,00
179	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN GAPURA KAMPUNG BENA BARU T.A. 2023 (APBD - P)	14.874.000,00
180	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PENATAAN HALAMAN DAN PEMAGARAN POLSEK BIDUK-BIDUK T.A. 2023 (APBD - P)	14.828.601,00
181	DPUPR	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Kelas Kecil SPN Polda Kaltim di Tenggarong T.A. 2023 (APBD - P)	99.620.280,00
182	DPUPR	SEKALIGUS 100 % PEKERJAAN KONSULTAN PENGAWAS PENATAAN HALAMAN DAN PAGAR KELILING RUMAH SEHAT BAZNAS JL. APT. PRANOTO T.A. 2023 (APBD - P)	59.928.900,00
183	DPUPR	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Lansekap & Parkir GOR SPN Polda kaltim di Tenggarong T.A. 2023 (APBD - P)	99.400.500,00
184	DPUPR	Termyn 95 % Pekerjaan Lanjutan Rehab Total Kantor Kodim 2023 T.A. 2023 (APBD - P)	1.793.935.732,00
185	DPUPR	Sekaligus 100 % Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor POLSEK PL. DERAWAN T.A. 2023 (APBD - P)	181.860.000,00
186	DPUPR	SEKALIGUS 100 % LANJUTAN PENATAAN HALAMAN DAN PEMAGARAN KANTOR POLSEK BIDUK-BIDUK T.A. 2023 (APBD - P)	152.124.512,00
187	DPUPR	TERMYN 90 % PEKERJAAN PEMBANGUNAN KELAS KECIL SPN POLDA KALTIM DI TENGGARONG T.A. 2023	4.256.307.334,00
188	DPUPR	Sekaligus 100 % Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Pagar Kantor Polsek PL. Derawan T.A. 2023	14.970.015,00
189	DPUPR	TERMYN 95 % PEKERJAAN PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB DI KUTAI KARTANEGARA T.A. 2023	1.943.358.171,00
		Sub total	**55.287.353.417,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
190	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Bedungun Maju" Kel. Sei. Bedungun	69.992.790,00
191	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Bedungun Maju" Kel. Sei. Bedungun	69.992.791,00
192	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Karbun" Kel. Karang Ambun	29.996.871,00
193	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Gunpa Peduli" Kel. Gunung Panjang	39.995.085,00
194	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Tanjung Indah" Kel. Tanjung Redeb	39.996.755,00
195	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Karbun" Kel. Karang Ambun	29.996.870,00
196	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Gunpa Peduli" Kel. Gunung Panjang	39.995.086,00
197	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Bugis Damai" Kel. Bugis	39.997.867,00
198	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Tanjung Indah" Kel. Tanjung Redeb	39.996.754,00
199	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Bugis Damai" Kel.Bugis	39.997.867,00
200	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Gayam Berkah" Kel. Gayam	69.997.019,00
201	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Tembudan Berseri" Kamp. Tembudan	99.888.691,00
202	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Padaidi Banua Lawas" Kamp. Batu Putih	40.155.554,00
203	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Padaidi Banua Lawas" Kamp. Batu Putih	69.933.266,00
204	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Maju Berseri" Kamp. Lobang Kelatak	69.967.200,00
205	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Lumba-lumba" Kamp. Balikukup	79.972.091,00
206	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Sumber Agung Bangkit" Kamp. Sumber Agung	79.927.308,00
207	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Gayam Berkah" Kel. Gayam	69.997.018,00
208	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Tembudan Berseri" Kamp. Tembudan	99.888.692,00
209	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Padaidi Banua Lawas" Kamp. Batu Putih	29.777.712,00
210	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Maju Berseri" Kamp. Lobang Kelatak	69.967.201,00
211	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Lumba Lumba" Kamp. Balikukup	79.972.091,00
212	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Sumber Agung Bangkit" Kamp. Sumber Agung	79.927.309,00
213	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Karang Ambun Berkah" Kel. Karang Ambun	119.979.360,00
214	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Bugis Tenteram" Kel. Bugis	69.996.407,00
215	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Tanjung Berkah" Kel. Tanjung Redeb	179.953.964,00
216	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Gunung Panjang Damai" Kel. Gunung Panjang	179.988.066,00
217	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Bedungun Bersatu" Kel. Sei. Bedungun	169.987.459,00
218	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Bersatu Maju" Kel. Teluk Bayur, Kamp. Tumbit Melayu, Kamp. Samburakat & Kamp. Tanjung Perangat	49.997.196,00
219	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Karang Ambun Berkah" Kel. Karang Ambun	119.979.360,00
220	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Bugis Tenteram" Kel. Bugis	69.996.406,00
221	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Tanjung Berkah" Kel. Tanjung Redeb	179.953.964,00
222	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Gunung Panjang Damai" Kel. Gunung Panjang	179.988.065,00

223	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Bedungun Bersatu" Kel. Sei. Bedungun	169.987.458,00
224	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Bersatu Maju" Kel. Teluk Bayur, Kamp. Tumbit Melayu, Kamp. Samburakat & Kamp. Tanjung Perangat	49.997.195,00
225	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Gayam Makmur Sejahtera" Kel. Gayam	199.985.720,00
226	Beban Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas RTLH pada masyarakat KPB "Gayam Makmur Sejahtera" Kel. Gayam	199.985.719,00
		Sub total	**3.319.106.227,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
227	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada PT Mario Kajuwara	121.289.700,00
		Sub total	**121.289.700,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
228	Dinas Pangan	Belanja Hibah Konsultansi Perencanaan Pembangunan Lumbung Pangan sesuai SPK No. 02/PPK-DP/PRC.LUMBUNG/GT/VIII/2023 pada CV. Era Teknik Consultant an. Edwan Rozalie	11.766.000,00
229	Dinas Pangan	Belanja Hibah Pembangunan Lumbung Pangan pada CV. Zaz Generations Contraktor an. Indra sesuai SPK No 027/03/PLP/DP-DCP Tanggal 2 Oktober 2023	167.626.000,00
230	Dinas Pangan	Belanja Hibah- Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Lumbung Pangan pada CV. Diayu Consultant an. Jamaluddin Gani	8.436.000,00
231	Dinas Pangan	Pengadaan Bibit Tanaman, pupuk Kandang dan Bahan Penunjang Lapau Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (LPB2SA)	165.948.600,00
232	Dinas Pangan	Belanja Hibah Pengadaan Barang Cultivator sesuai SP No 027/01/PPK-e-Ktg/DP-KPP Tgl 21 September 2023 pada CV. Karya Hidup Sentosa an. Ramadhan Widya Putra	140.070.000,00
233	Dinas Pangan	Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Pengadaan Pupuk OrganikCair Sesuai SPK Nomor 027.1/87/DP-KP Tanggal 27 Juni 2023 dan Nota TerlampirAn. Isa Anshori (Direktur PT.Eco Agro Mandiri)	211.070.640,00
234	Dinas Pangan	Belanja Hibah, Belanja Demplot sesuai SPK No: 027/21/PPK/DP-KP tanggal 01 November 2023 pada CV. Avia Lestari jaya an. Direktris Alvia dwi Samudra	92.982.960,00
235	Dinas Pangan	Belanja Hibah, Belanja Demplot sesuai SPK No: 027/21/PPK/DP-KP tanggal 01 November 2023 pada CV. Avia Lestari jaya an. Direktris Alvia dwi Samudra	84.445.040,00
		Sub total	**882.345.240,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
236	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	Belanja Hibah barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan (DBH-DR) sesuai Surat Perjanjian Nomor : 01/PPK-PPKLH/PUCAMADU/DLHK-IV/IX/2023 Tanggal 12 September 2023 pada PT. MADU BARU	189.000.000,00
237	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	Belanja Bibit Durian dan Duku (DBH DR) sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02/PPK-PPKLH/BIBIT/DLHK-IV/IX/2023	211.500.000,00
238	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	Pengadaan Tempat/Tong Sampah Plastik dan Tong komposter Proklim 2023 sesuai deangan SPK nomor : 02/SPK-DLHK-IV/TONG-PROKLIM/XI/2023, tanggal 17 November 2023 pada CV. Najaha Karunia an. Mochammad Masruh	105.450.000,00
239	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	Pengadaan Tempat/tong Sampah Plastik dan tong komposter Adiwiyata 2023 sesuai deangan SPK nomor : 02/SPK-DLHK-IV/ADW-TONG/XI/2023, tanggal 17 November 2023 pada CV. Najaha Karunia an. Mochammad Masruh	78.699.000,00
240	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	Pengadaan Tong komposter,Timbangan Digital Sesuai SPK No : 03/PPK/Komposter/Peran Serta/DLHK/X/2023, Tgl. 25 Oktober 2023 pada CV.ERLANGGA DIRGA HUTAMA	36.408.000,00
241	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	Belanja Motor Roda 3 Sesuai SPK No : 02/PPK-SAPRAS /RODA 3 - HIBAH/DLHK/V/2023 Tgl 24 Mei 2023 pada PT. MULTIPARTS RAKINDO	341.600.000,00
242	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan	Belanja Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Sesuai SP No : 01/PPK-SAPRAS /RODA 3 - PILANJAU/DLHK/X/2023 , Tgl. 20 Oktober 2023 pada PT. ASEAN MOTOR INTERNASIONAL	53.800.000,00
		Sub total	**1.016.457.000,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
243	Dinas Pemberdayaan Kampung	Dibayar Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakat Pada Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tanggal 06 Juli 2023 Pada CV. KARYA TABALONG MANDIRI an. HERMANUS	1.910.000,00
		Sub total	**1.910.000,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
244	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	Belanja Hibah Barang kepada badan dan lembaga Nirlaba,Sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan (Mesin Jahit) pada CV. SHILYA an. agya pramana	174.658.500,00
245	Dinas Koprasi, Perindustrian & Perdagangan	Belanja Hibah Barang kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan (Pengadaan Alat Industri Kecil pada CV. ASA SEDAYA KARYATAMA an. Derviansyah	98.752.260,00
		Sub total	**273.410.760,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
246	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tahun 2023	250.000.000,00
247	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Barang Kepada Badaln Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat sosial Kemasyarakatan-Pengadaan Peralatan Cabor Panahan Pada CV.Affan Jaya Sesuai SPK No.02/KPA/PL.Peralatan-Panahan/2023. Tanggal 10 Mei 2023	197.750.000,00
248	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	belanja hibah barang kepada badan lembaga nirlaba, sukarela,bersifat sosial kemasyarakatan perlatan cabang triatlon pada cv. berkah indah alam, sesuai spk-02/kpa/pl.peralatan.triatlon/2023, tanggal 24 november 2023	130.055.000,00
249	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat sosial Kemasyarakatan-Pengadaan Peralatan Cabang angkat Besi Pada CV. Frifa Sesuai SPK No.02/KPA/PL.Peralatan-Angkat Besi /2023. Tanggal 25 Mei 2023	149.850.000,00
250	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Peralatan Cabang Taekwondo berkas Terlampir	199.225.000,00
251	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	belanja hibah barang kepada badan lembaga nirlaba, sukarela,bersifat sosial kemasyarakatan perlatan cabang triatlon pada cv. berkah indah alam, sesuai spk-02/kpa/pl.peralatan.triatlon/2023, tanggal 24 november 2023	44.775.000,00
252	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Kepada Badan dam Lembaga Nirlaba,Sukarela,bersifat sosial Kemasyarakatan (pengadaan sapras penahan tradisional) sesuai SPk No 027/02/KPA/Panahan Tradisional/dispora-Bid.Sapras/XI/2023 tanggal 20 November 2023 pada CV.Dunia Usaha Jaya.	19.550.000,00
253	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Biaya Konsultan Pengawasan pembangunan Lapangan Gunung sari Kec. Segah pada Cv. M.Project sesuai SPK No. 2/KPA/Pgws.Pemb-Lap- Volly/Sarpras-1/2023 Tanggal 1 Nov 2023.	6.338.000,00
254	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Pembangunan Lapangan Volly Kampung Gunung sari kec, segah pada Cv. Fajar Indah sesuai dengan SPK No.2/KPA/Pl.Pemb Lap- Volly/Sapras-1/2023 Tanggal 1 Nov 2023.	112.555.000,00
255	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Kepada Badan dan lembaga Nirlaba Bersifat sosial Kemasyarakatan belanja pengadaan peralatan cabang olah raga menembak (Perbakin) dengan No SPK 02/KPA/Pl.Perealatan-Menenbak.2023 An.Rekananan PT.Lokta Prima Mandiri.	175.950.263,00

256	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan- Hibah Alat Cabor IMI,Woodball, Sepak Bola dan Sky Air Pada CV. Green Turtle, Tahun 2023	89.438.250,00
257	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	1)Belanja Hibah barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial (jaket BAPOPSI) Pada CV RIzky Mandiri Th.2023	10.500.000,00
258	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Pengawasan penimbunan lapangan sepak bola kampung bumi jaya kecamatan talisayan pada CV.HorizonTeknik Konsultan sesui SPK No.03/KPA/KPA-PWS.PEN LAP- Bola/Sapras 1/2023 tanggal 3 Nopember 2023.	9.213.000,00
259	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Penimbunan lapangan sepak bola kam;pung Bumi jaya kecamatan talisayan pada CV. STEVANO JAYA Sesuai SPK No. 02/KPA/PL-Pen.Lap-Bola/Sapras-1/2023 tanggal 03 Nlovember 2023.	189.544.500,00
260	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Perencanaan penimbunan Lapangan sepak bola Bumi Jaya Kecamatan Talisayan pasa CV.M-Project sesuai SPK No 02/KPA/Pec.Penimbunan/2023 tanggal 11 Oktober 2023.	20.390.700,00
261	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial kemsayarakatan peralatan Cabang Bola -Volly pada Cv. MANDIRI KARYA PERKASA sesuai SPK 02/KPA/PL.BOLA_VOLLY/2023 tanggal 24 Oktober 2023.	49.075.000,00
262	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,sukarela Bersifat Sosial kemasyarakatan peralatan Cabang ESI pada CV Berkah Indah Alam sesuai SPK 01/KPA/PL.PENGGADAAN ESI/2023 Tanggal 24 Oktobetr 2023.	99.645.000,00
263	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan peralatan Cabang PICKLEBALL pada CV. SIPAKKAMASE sesuai SPK 02//KPA/Pl.PERALATSN -PICKLEBALL/2023 tanggal 13 November 2023.	59.450.000,00
264	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial Kemasyarakatan peralaran Cabang TASKRAW pada CV. Kenith sesuai SPK 02/KPA/Pl-PARALATAN-TAKRAW/2023 tanggal 2 November 2023.	73.384.500,00
265	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba.Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pengadaan Alat EWali Climbing pada CV. Kenith sesuai SPK 02/KPA/PL-Wali- Climbing/2023 tanggal 2 Nopember 2023.	44.458.500,00
266	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan (pengadaan Sarpras PABERSI Kab.Berau)sesuai SPK 27/2/KPA/PABERSI/Dispora-Bid.Sarpras/XI/2023 tanggal 20 November 2023 pada CV.fairuz Jaya gemilang.	40.000.000,00
267	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Perencanaan Pembangunn Lapangan Volley kampung,Gunung Sari kecamatan Segah pada CV.ALIF ENGINEERING CONSULTANT sesuai SPK No 02/KPA/PRC.PEMB.LAP-VOLLY/SAPRAS-1/2023 Tanggal 28 September 2023.	10.434.000,00
268	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Dana Hibah Pramuka Kabupaten Berau Tahun 2023, an, Hj. Syarifatul Sya'diyah, S. Pd, M.S	525.000.000,00
269	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	Belanja Hibah Barang Kepada Badan atau Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Belanja Kursi Rapat, Meja dan Sound System Lapangan) pada CV. Mega Persada Sesuai dengan SPK Nomor : 02/KPA/PL.SARPRAS-PRAMUKA/2023	43.429.860,00
		Sub total	**2.550.011.573,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
270	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.232.000,00
271	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	71.768.000,00
272	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.232.000,00
273	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00
274	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	79.000.000,00
275	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengadaan Glamping Set	191.100.000,00
276	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Barang Yang Dihibahkan Kepada Masyarakat dalam Bentuk Paddle Board	49.480.000,00
277	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakatan Belanja Pembuatan Perahu/Kapal Wisata dengan Mesin Tempel 2 Unit	159.880.000,00
278	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk Pematangan Lahan Balai Adat Tubaan	220.000.000,00
279	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Belanja Hibah Pembuatan/Pengadaan Perahu Wisata Susur Sungai Pulau Besing	199.985.000,00
		Sub total	**1.061.677.000,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
280	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Be;anja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Lemari Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada CV.Kimyassada Herlanda	9.542.000,00
281	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka Rela,Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Pengadaan Buku) pada CV APRIMAZEN SAKTI	2.940.125.000,00
282	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirmala, Suka Rela Bersifat Sosial Kemasyarakatan9(Belanaj BarangPembuatan Aplikasi / Software) pada CV Daya Jaya	193.972.500,00
283	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Belanja Hibah BarangKepada Badan dan Lembaga Nirmala, Suka Rela Bersifat Sosial Kemasyarakatan(Komputer PC) pada CV Robinson Komputer Berau	92.250.000,00
284	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga, Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada CV Daya Jaya	99.320.000,00
285	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirmala, Suka Rela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Komputer Pc) pada CV Robinson Komputer Berau	41.000.000,00
286	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Nirmala, Suka Rela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Display Pojok Informasi Bersifat Berau (Atpusi Coner) pada CV Cahaya Rejeki	15.725.000,00
287	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirmala , Suka Rela, Bersifat Soaial Kemasyarakatan- Belanja Hibah Buku pada PT Nawesana Literasi Niscala	196.061.900,00
288	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Belanja Hibah Buku Biografi Alm. Muharram Supu pada CV. Daya Jaya - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	172.500.000,00
		Sub total	**3.760.496.400,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
289	Dinas Perikanan	Belanja barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Mesin Ketinting sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 523/G.1/P3T-62/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, An. Triton Trisula	1.376.640.537,00
290	Dinas Perikanan	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadan Mesin Kapal sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 523/G.1/P3T-63/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023, An. CV. Triton Trisula	2.413.663.476,00
291	Dinas Perikanan	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat - Pengadaan Mesin Genset sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-245/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023, An. CV. Batara Wajo	193.306.500,00
292	Dinas Perikanan	Belanja Barang yg akan diserahkan kepada Masyarakat - Pengadaan Jaring Insang (Lengkap) sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-515/IX/2023 tanggal 20 September 2023, An. CV. Tirta Persada	99.622.500,00
293	Dinas Perikanan	Belanja Barang yg akan Diserahkan Kepada Masyarakaat - Pengadaan Perahu Fiber sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-325/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023, An. CV. Putra Soetradireja	273.235.380,00
294	Dinas Perikanan	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Perahu Ketinting dan Mesin ketinting Beserta Alat Tangkap Ikan sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-472/X/2023 Tanggal 29 Agustus 2023, An. CV. Frifa	199.522.500,00
295	Dinas Perikanan	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Cool Box, Jaring Milenium, Kapal sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-611/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023, An. CV. Erlangga Dirga Hutama	180.264.000,00
296	Dinas Perikanan	Belanja Barang yg akan diserahkan kepada Masyrkat - Pengadaan Jaring Insang (Lengkap) Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :523/G.1/P3T-428.1/VIII/2023 Tanggal 10 Agustus 2023, An. CV. Seibun Prima Sukses	246.003.750,00
297	Dinas Perikanan	Belanja Barang yang akan diserahkaan Kepada Masyarakat - Pengadaan Cool Box sesuai SPK Nomor 523/G.1/P3T-524/X/2023 Tanggal 22 September 2023, An. Cipta Bukit Tanjung	131.501.700,00
298	Dinas Perikanan	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Trammel Net sesuai SPK No 523/G.1/P3T-489/IX/2023 Tanggal 7 September 2023, An. PT. Annur Rilangi Siengkang	359.346.000,00
299	Dinas Perikanan	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Mesin Genset Kapal sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-707/XI/2023 tanggal 21 November 2023, An. CV. GG Jaya Mandiri	76.329.150,00
300	Dinas Perikanan	Belanja Barang yg Akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Jaring Insng (Lengkap) SPK No. 523/G.1/P3T-697.1/XI/2023 Tanggal 17 November 2023, An. CV. Putra Soetradireja	481.481.000,00
301	Dinas Perikanan	Belanja Barang yg Akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Trammel Net sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-588/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023, An. PT. PT Mario Cemerlang Perkasa	212.725.000,00
302	Dinas Perikanan	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Fish Finder sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-690/XI/2023 tgl 16 November 2023, An. CV. Berkah Alika Jaya	45.376.800,00
303	Dinas Perikanan	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pengadaan Mesin Kapal sesuai SPK No 523/G.1/P3T-656/XI/2023 Tanggal 7 November 2023, An. PT. Annur Rilangi Siengkang	2.996.445.000,00
304	Dinas Perikanan	belanja barang yg akan diserahkan kepada masyarakat - Pengadaan Mesin Ketinting sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-652.1/XI/2023 Tanggal 6 November 2023, An. PT. Annur Rilangi Siengkang	3.140.190.000,00
305	Dinas Perikanan	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Pengadaan Bubu Ikan sesuai SPK No. 523/G.1/P3T-740/XII/2023 Tanggal 1 Desember 2023, An. CV. Techpro Indonesia	121.878.000,00
306	Dinas Perikanan	Belanja bantuan sapras perbenihan untuk UPR sesuai SPK No.523/G.1/PPB-258/V/2023 tanggal 31 Mei 2023	19.936.000,00
307	Dinas Perikanan	Pengadaan sapras minapadi sesuai SPK No.523/G.1/PPB-260/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023	27.542.000,00
308	Dinas Perikanan	Belanja sapras budidaya kolam sesuai SPK No.523/G.1/PPB-252/V/2023 tanggal 29 Mei 2023	148.297.500,00
309	Dinas Perikanan	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - pengadaan sapras bioflok sesuai SPK No.523/G.1/PBP-266/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023	66.456.036,00
310	Dinas Perikanan	Belanja hibah barang kepada badan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - pengadaan sapras kolam terpal sesuai SPK No.523/G.1/PPB-446/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023	241.238.500,00
311	Dinas Perikanan	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - pengadaan sapras keramba sesuai SPK no.523/G.1/PPB-596/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	152.500.000,00
312	Dinas Perikanan	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - pengadaan sapras kolam terpal sesuai SPK No.523/G.1/PPB-594/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023	484.909.610,00

313	Dinas Perikanan	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba,sukarela bersifat sosial kemasyarakatan - pengadaan sapras kolam sesuai SPK No.523/G.1/PPB-593/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023	99.790.000,00
314	Dinas Perikanan	Belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/belanja pihak ketiga, pengdaan chooper, freezer box, timbangan digital dan vacum sealer di Kelurahan Sambaliung sesuai SPK No. 523/G.1/PM.03.02/35/III/2023 tanggal 13 Maret 2023	12.853.800,00
315	Dinas Perikanan	Belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/belanja pihak ketiga, pengadaan freezer box dan food processor di Kelurahan Gunung Tabur, sesuai SPK No. 523/G.1/PM.03.02/34/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023	93.750.600,00
316	Dinas Perikanan	Bayar Belanja Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Belanja Pihak Ketiga (Freezer Box, Plastik Standing Pouch, Spiner/Mesin Peniris Minyak dan Vacum Sealer) di kampung Tanjung Batu sesuai SPK No. 523/G.1/PM.03.02/120/V/2023 tanggal 22 Mei 2023	38.055.240,00
317	Dinas Perikanan	Belanja hibahkepada masyarakat (belanja pengadaan mesin penggiling daging) di Kamp. Pilanjau, Kamp. Buyung-buyung, Kamp. Tabalat Muara sesuai dengan SPK No. 523/G.1/PM/03.02/543/XI/2023 tanggal 14 November 2023	59.940.000,00
318	Dinas Perikanan	Belanja Hibah kepada Masyarakat (FCPF-CP) di Kampung Suaran sesuai dengan SPK No. 523/G.1/PM/03.02/355/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 An. Agus Endang Suhartati	80.112.474,00
319	Dinas Perikanan	Belanja barang untuk diserahkan pada masyarakat,jasa konsultasi perencanaan konstruksi (perencanaan belanja bahan rumah produksi) sesuai SPK No. 523/G1/Pm.03.02/450/X/2023 tanggal 20 oktober an. Aidin Salam. ST	6.000.000,00
320	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Kepada Masyarakat di Kelurahan Sambaliung sesuai SPK No. 523/G.1/PM/03.02/471/X/2023 Tgl 27 Oktober 2023 An. Clara Annisa Forester Bangabua	8.935.000,00
321	Dinas Perikanan	Belanja hibah kepada masyarakat di kelurahan gunung panjang jasa konsultasi pengawasan konstruksi sesuai dengan sPK No. 523/G.1/PM/03.02/482/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023	3.600.000,00
322	Dinas Perikanan	Belanja hibah kepada masyarakat (Belanja bahan rumah produksi) di kelurahan Gunung Panjang sesuai dengan SPK No. 523/G.1/PM.03.02/489/X/2023tanggal 31 Oktober 2023 An TriKurnia Baan	89.845.000,00
323	Dinas Perikanan	Belanja hibah kepada masyarakat (Belanja Pengadaan Cool Box) di Kelurahan Gayam sesuai dengan SPK No. 523/G.1/PM. 03.02 /468/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023, An. Dina Roehaini	196.581.000,00
324	Dinas Perikanan	Belanja Hibah kepada masyarakat (Belanja meja produksi) di kelurahanGunungpanjang sesuai dengan SPK No.523/G.1/PM.03.02/704/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023. An, tri Kurnia Baan	15.000.000,00
		Sub total	**14.392.874.053,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
325	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (2 Unit Combine Harvester Besar) pada PT PURA BARUTAMA (Dedy Dafianto) sesuai SPK No. 521.4/648/DPP.4/IV/2023 tgl 14 April 2023	955.612.500,00
326	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (1 unit Husker, 1 unit Polisher dan 7 unit Power Threser Multiguna) pada PT Mitra Balai Industri (Ade Surya) sesuai SPK No. 521.4/705/DPP.4/V/2023 tgl 11 Mei 2023	286.355.000,00
327	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang kpd Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyaraktn (14 unit Tipe Singkal, 7 unit Tipe Rotary dan 6 unit Cultivator) pd PT. Teknik Agro Lestari Jaya (Dedy Setyawan) sesuai SPK No:521.4/757/DPP.4/V/2023 tgl 25 Mei 2023	857.451.000,00
328	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (10 Unit Hand Sprayer Elektrik) pada CV. Avia Lestari Jaya (Alvia Dwi Samudra) sesuai Surat Pesanan/SPK/Perjanjian/Kontrak No. 521.4/1247.B/DPP.4/IX/2023 tanggal 27 September 2023	8.880.000,00
329	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Berupa 1 Unit Husker, 1 Unit Polisher pada PT.Mitra Balai Industri sesuai SPK No.521.4/1298/DPP.4/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Melalui APBD II P 2023 (FCPF)	93.855.000,00
330	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Berupa 3 Unit Power Thresher Multiguna pada PT.Mitra Balai Industri sesuai SPK No.521.4/1334/DPP.4/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Melalui APBD II Perubahan 2023	91.500.000,00
331	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Alsintan (Combine Harvester Besar) pada PT. Pura Barutama Sesuai Surat Pesanan No. 521.4/1335/DPP.4/X/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 (sumber dana APBD-P)	477.806.250,00
332	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Alsintan (Hand Tractor, Rotary dan Cultivator) pada PT. Teknik Agro Lestari Jaya Sesuai Surat Pesanan Nomor 521.4/1371/DPP.4/X/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 (sumber dana APBD-P)	620.437.000,00
333	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Handsprayer Electric dan Manual) pada CV. Rizki Melati Jaya sesuai SPK Nomor : 521.4/1613/DPP.4/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023	163.780.500,00
334	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja bibit ternak itik kepada CV. Avia Lestari Jaya sesuai SPK Nomor : 027/92/DPP.3/VIII/2023 Tanggal 07 Agustus 2023 an. Alvia Dwi Samudra	45.106.600,00
335	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Bibit Ternak Kambing pada CV. Kaka Farm sesuai SPK. Nomor : 027/272/SP-BBTK/ VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 an. Nanang Wibowo	220.000.000,00
336	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja hibah barang kpd badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan (Belanja Kandang Jepit) pada CV. Syifa Anugrah	78.588.000,00
337	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa bibit ternak kambing pada CV. KAKA FARM sesuai SPK nomor : 027/432/PPK-Kambing/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 an. Nanang Wibowo	484.398.400,00
338	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa bibit ternak sapi pada CV. KAKA FARM sesuai SPK nomor : 027/401/PPK-Sapi/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 an. Nanang Wibowo	387.000.000,00
339	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kandang kambing pada CV. SYIFA ANUGRAH sesuai SPK nomor:027/446/PPK-kandang/XII/2023 tanggal 01 November 2023 an. Hari Sukristo	49.450.500,00
340	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga niralaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa bibit ternak kambing pada CV. KAKA FARM sesuai SPK nomor : 027/432/PPK-Kambing/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 an. Nanang Wibowo	383.441.600,00
341	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Benih Jagung) pada CV. Sumber Berkah Pangan sesuai SP Nomor : 521.2.217.SPK-JAGUNG/VII/2023 Tanggal 31 Juli 2023	160.380.000,00
342	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Bibit Alpukat) - Program FCPF pada CV. Mitra Persada sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.2/468/SPK-ALPUKAT.B/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023	92.500.000,00
343	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Bibit Lengkeng) pada CV. Mitra Persada sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.2/458/SPK-KLENGKENG/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023	44.240.000,00
344	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Bibit Durian) pada CV. Mitra Persada sesuai Surat Pesanan Nomor : 521./457/SPK-DURIAN/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023	310.865.000,00
345	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Bibit Jeruk) pada CV. MItra Persada Sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.2/525/SPK-Jeruk/DPP.2/XI/2023 tanggal 1`3 November 2023	48.000.000,00
346	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosisl Kemasyarakatan (Benih Cabe Keriting) pada CV. Kaltim Tani Sejahtera sesuai SPK Nomor : 521.2/514/DPP.2/XI/2023 tanggal 13 November 2023	5.440.000,00
347	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Bibit Alpukat) pada CV. Mitra Persada sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.2/459/SPK-ALPUKAT/X/2023 Tanggal 19 Oktober 2023	111.740.000,00
348	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Bibit Durian) - Program FCPF Performance pada CV. Mitra Persada Sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.2/467/SPK-DURIAN.B/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023	94.800.000,00
349	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Benih Padi) pada PT. Agri Makmur Pertiwi sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.2/460/SPK-PADI/DPP.2/IX/2023 Tanggal 27 September 2023	90.000.000,00
350	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja HIbah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Benih Jagung) pada CV. Nur Afifa sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.2/523.SPK-JAGUNG/XI/2023 Tanggal 14 November 2023	285.120.000,00
351	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-Pembangunan DAM Parit (Bahan/Material) di Kp. Tanjung Perengat sesuai SPK No. 521.4/14432/DPP.4/XI/2023 Tanggal 15 November 2023	100.413.930,00
352	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Pembangunan DAM Parit di Kampung Tanjung Perangat (HOK-Swakelola)	43.200.000,00
353	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Belanja Bahan Untuk Konstruksi Mina Padi di Kampung Melati Jaya, Kec. Gunung Tabur Pada CV. Rizqi Malati Jaya Sesuai SPK No.521.4/1248.B/DPP.4/X/2023 Tgl 27 Sep 2023	37.362.600,00

354	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang - Konsultan Pengawasan Konstruksi Lantai Jemur di Kp. Sumber Mulya pada CV. Yasa Pratama Consultant sesuai dengan SPK No.521.4/1087/DPP.4/VIII/2023/ Tanggal 11 Agustus 2023	8.602.500,00
355	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang - Konsultan Pengawasan Konstruksi Lantai Jemur di Kp. Purnasari Jaya pada CV. Yasa Pratama Consultant sesuai dengan SPK No.521.4/1083/DPP.4/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023	8.602.500,00
356	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang - Pembangunan Lantai Jemur di Kp. Sumber Mulya pada CV. Mitra Abadi sesuai dengan SPK No.521.4/1085/DPP.4/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023	178.305.263,00
357	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang - Pembangunan Lantai Jemur di Kp. Purnasari Jaya pada CV. Mitra Abadi sesuai dengan SPK No.521.4/1080/DPP.4/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023	92.090.000,00
358	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Belanja Pupuk Organik/Pupuk Hayati Cair - Pupuk Organik Cair pada PT. Madu Baru sesuai SP Nomor : 521.2/460/SPK-PUPUK CAIR/DPP.2/X/2023 Tgl 10 Oktober 2023	5.761.528.400,00
359	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Belanja Pupuk Hayati Padat Pada PT. Rajawali I sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.2/491/SPK-HAYATI PADAT/DPP.2/XI/2023 Tanggal 5 Nopember 2023	272.400.000,00
360	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Belanja NPK Pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Sesuai Surat Pesanan Nomor : 521.2/521/SPK-NPK/XI/2023 Tanggal 10 November 2023	210.000.000,00
361	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Belanja Hibah - Belanja Alat Tanam Jagung Manual pada CV. Avia Lestari Jaya An. Alvia Dwi Samudra (Direktris) Sesuai SPK Nomor : 027/210/DPP.2/VII/2023	57.000.000,00
362	Dinas Pertanian & Peternakan	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Belanja Hibah - Alat Tanam Jagung pada CV. Avia Lesatari jaya An. Alvia Dwi Samudra (Direktris) sesuai PPK Nomor : 027/628/SPK-ALAT TANAM JAGUNG/DPP.2/XII/20	21.955.800,00
		Sub total	**13.238.208.343,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
363	Dinas Perkebunan	Pengadaan Mesin Pemasta Kasar/Grinding, Mesin Pembubuk Coklat, Mesin Pemecah Kulit dan Pemisah Biji Kakao, Mesin Sangrai Biji Kakao, Mesin Tempering Kakao CV.Sanggam Berkah Jaya	114.000.000,00
364	Dinas Perkebunan	Pengadaan Lantai Jemur Lokasi Pekerjaan Kamp. Suaran Kec. Sambaliung	112.590.000,00
365	Dinas Perkebunan	Pengadaan Mesin Pemasta Kasar/Grinding, Mesin Pembubuk Coklat, Mesin Pemecah Kulit dan Pemisah Biji Kakao, Mesin Sangrai Biji Kakao, Mesin Tempering Kakao CV.Sanggam Berkah Jaya	60.487.500,00
366	Dinas Perkebunan	Pengadaan Bibit Kakao dan Pupuk NPK Lokasi Akhir Kampung Tasuk Kec. Gunung Tabur	83.536.000,00
367	Dinas Perkebunan	Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat (Pestisida Nabati dan Pupuk NPK) Lokasi Akhir Kampung Long Lanuk Dusun Nyapa Indah	91.090.000,00
368	Dinas Perkebunan	Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat (Pestisida Nabati , Pupuk NPK dan Handsprayer Elektrik	168.400.000,00
369	Dinas Perkebunan	Belanja barang yang akan diserahkan ke Masyarakat (Handsprayer)	44.340.000,00
370	Dinas Perkebunan	Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat (Handsprayer Elektrik) Lokasi Akhir Kampung Tumbit Dayak Kec. Sambaliung	41.000.000,00
371	Dinas Perkebunan	Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat berupa : Pupuk NPK dan Pestisida NabatiLokasi Akhir Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur	67.240.000,00
372	Dinas Perkebunan	Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat berupa : Pupuk NPK Lokasi Akhir Kampung SidoBangen Kec. Kelay	52.290.000,00
373	Dinas Perkebunan	Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat berupa : Handsprayer Elektrik, Pupuk NPK dan Pestisida Nabati, Lokasi Akhir Kampung Suaran Kec. Sambaliung	173.400.000,00
374	Dinas Perkebunan	Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat berupa : Handsprayer , Pupuk NPK dan Pestisida Nabati, Lokasi Akhir Kampung Semurut dan Kampung Sukan Tengah	108.422.000,00
375	Dinas Perkebunan	Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat berupa : Handsprayer Elektrik Lokasi Akhir Kampung Manunggal Jaya Kec. Biatan An. Muhammad Ridwansyah (CV.Kulanta)	39.360.000,00
376	Dinas Perkebunan	Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat berupa : Handsprayer Semi Automatic Lokasi Akhir Kampung Tubaan Kec. Tabalar An. Lisa Ananda Putri (CV.Asma)	74.475.000,00
377	Dinas Perkebunan	Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat berupa : Handsprayer Lokasi Akhir Kampung Merancang Ulu dan Batu- Batu Kec. Gunung Tabur An.Khoiri Mahmud (CV.Horizon Project)	38.098.000,00
378	Dinas Perkebunan	Pengadaan Bibit Pala Lokasi Pekerjaan Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan	94.365.000,00
379	Dinas Perkebunan	Pengadaan Bibit Kopi Lokasi Pekerjaan Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung	44.550.000,00
380	Dinas Perkebunan	Pengadaan Bibit Karet Lokasi Akhir Kampung Sido Bangen Kec. Kelay an. Mulyadi (CV. Shorea Mahakam)	144.527.000,00
381	Dinas Perkebunan	Pengadaan Bibit Lada Sambungan Malada Lokasi Pekerjaan Poktan Limunjan Jaya RT 21 Kel.Sambaliung An.Nurdin (CV.Usaha Kalimantan)	58.108.000,00
382	Dinas Perkebunan	Pengadaan Bibit Pala Lokasi Akhir Kampung Gunung Sari an. Irvan Kiay CV.Tiga Bintang Anugrah	92.070.000,00
383	Dinas Perkebunan	Pengadaan Bibit Lada Sambungan Malada Lokasi Pekerjaan Poktan Limunjan Jaya RT 21 Kel.Sambaliung An.Nurdin (CV.Usaha Kalimantan)	139.692.000,00
384	Dinas Perkebunan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Hand Sprayer Elektrik untuk Kelompok Tani MITRA TANI Kampung Teluk Sumbang (Sub Keg OPT 2023)	94.482.000,00
385	Dinas Perkebunan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Mesin Rumput untuk Kel Tani TUNAS MAKMUR Kamp Tanjung Perangat Kecamatan Sambaliung (SubKeg OPT 2023)	49.500.000,00
386	Dinas Perkebunan	Pengadaan Handsprayer Semi Otomatik, Lokasi Akhir Kelompok Tani Adat Suaran Jaya Kelompok Tani Hulu Suaran Dan Kelompok Tani Tunas Harapan Mandiri Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung, An Marlina (CV. MOBAROQ)	143.985.000,00
387	Dinas Perkebunan	Pengadaan Mesin Rmput, Lokasi Akhir Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Tunas Mandiri Kampung Pilanjau Kecamatan Sambaliung An Lisa Ananda Putri (CV.ASMA)	123.900.000,00
388	Dinas Perkebunan	Pengadaan Mesin Rumput, Lokasi Akhir Kelompok Sumber Rejeki II Kamp. Tanjung Perangat, Kelompok Mentari 12 Kamp. Pilanjau Dan Kelompok Florida Beribit Kamp. Sukan Kecamatan Sambaliung.An. Muhammad Ridwansyah (CV. Kulanta)	193.635.000,00
389	Dinas Perkebunan	Pengadaan Mesin Rumput, Lokasi Akhir Kelompok Makmur Jaya II Kamp Sido Bangen Kec Kelay, Kelompok Jaya Maju Kamp Buyung-Buyung Kec Tabalar Dan Kelompok Tani Sepakat Kelurahan Sambaliung Kec Sambaliung.An. Paskal Deni Setia Jaya (CV.Sehati Jaya Makmur)	183.705.000,00
390	Dinas Perkebunan	Pengadaan Handsprayer Semi Otometik, Lokasi Akhir Kelompok Tubaan Jaya dan Mandiri Sejahtera Kampung Tubaan Kecamatan Tabalar An. Paskal Deni Setia Jaya (CV. Sehati Jaya Makmur)	138.376.000,00
391	Dinas Perkebunan	Pengadaan Handsprayer Semi Otometik, Lokasi Akhir Kelompok Suka Maju Kampung Semurut dan Kelompok Karya Nyata Kampung Harapan Maju Kecamatan Tabalar. An. Muhammad Ridwansyah (CV. Kulanta)	138.376.000,00
392	Dinas Perkebunan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Belanja Bibit Tanaman Aren Genjah di Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah	193.315.000,00
393	Dinas Perkebunan	Pengadaan Bibit Tanaman Aren Genjah (FPCF-CF)	115.000.000,00
394	Dinas Perkebunan	Pengadaan Bantuan Peralatan Darkarlabun Ke KTPA kamp Tubaan kec. TabalarDan Kamp Long lanuk Kec. Sambaliung,An. Agus Wahyudi (CV.Fahcri Akbar)	110.147.800,00
395	Dinas Perkebunan	Pengadaan Bantuan Peralatan Darkarlabun Ke KTPA kamp Melati Jayakec.Gn.Tabur Dan Kamp Kasai Kec. Pl Derawan An. Paskal Deni Setia Jaya (CV.SEHATI JAYA MAKMUR)	110.147.800,00
		Sub total	**3.436.610.100,00**

No	SKPD	Keterangan Dok.	Nilai Realisasi
396	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Kendaraan Roda 4 /Operasional Kantor/Lapangan. Dua Unit Mobil Jenazah Daihatsu Luxio 1.5 MT An. PT. Rekanan Telaga Kautsar Biosurgery.	780.000.000,00
397	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia/Pengurus Masjid Al-Muhaimin Bujangga Kec. Tanjung Redeb An H.AM Darham	100.000.000,00
398	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Jami AL-Hidayah di Jln Pramuka RT 03 Kampung Tunggal Bumi Kec. Talisayan	200.000.000,00
399	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus Pembangunan Masjid Jami Al-Mujahadah di Jalan Murjani III Perumahan Korpri Tanjung Redeb	500.000.000,00
400	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kab Berau-	200.000.000,00
401	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Nurul HudaJl Poros Bumi Jaya RT 07Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan Ta 2023	200.000.000,00
402	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Madrasah Ibtidaiyah Barud Da Wah Irsyad Cabang Biduk-Biduk Ta 2023	200.000.000,00
403	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Nurul falah Jl Iswahyudi Kel rinding Kec.Teluk Bayur	200.000.000,00

404	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Surau Al-Mujahadah Jl Diponegoro RT 02 Kampung Tembudan Kec. Batu Putih	50.000.000,00
405	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Nurul Yaqin Jln Poros Birang Kel.Gunung Tabur Kec.Gunung Tabur Ta 2023	250.000.000,00
406	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Istiqomah Jl Poros Bangun Kampung Sei Bangun Kec. Sambaliung Ta 2023	200.000.000,00
407	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Masjjid Al-Haq Kampung Balikukup Kec. Batu Putih	500.000.000,00
408	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Al-Iklas Sei Maning Kec.Gunung Tabur	100.000.000,00
409	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah uang Kepada Masjid Al-Anshar RT 009 Kampung Buyung-Buyung Kec. Tabalar	100.000.000,00
410	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Surau Sabilal Muttaqin Jalan Kemuning RT 007 Kampung Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur	150.000.000,00
411	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Gereja Bethel Indonesia Mangkajang Jalan Bukit Sion RT 08 Kecamatan Sambaliung	200.000.000,00
412	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Yayasan Abang Putih Al-Ansori Jalan Soekarno Hatta Kampung Sumber Agung Kec. Batu Putih Ta 2023	250.000.000,00
413	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah uang Kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam, Bina Insan di Jalan Albina 7 RT 15 Gunung Panjang Tanjung Redeb Ta 2023	500.000.000,00
414	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman Jl. Pulau Panjang RT.23 Tanjung Redeb TA 2023.	350.000.000,00
415	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Musholla Darussalam Jl. Poros RT.003 Kampung Bumi Jaya, Talisayan TA 2023.	50.000.000,00
416	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Rehab Gedung Sarana Madrasah Tsanawiyah DDI Jl. Majahabah RT.004 Biduk - Biduk TA 2023.	300.000.000,00
417	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Ar-Riyadhoh Jl. Poros Bangun RT.15 Sambaliung TA 2023.	200.000.000,00
418	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Kristus Raja Jl. Flores RT.01 Kamoung Bumi Jaya Kec. Talisayan TA 2023.	71.000.000,00
419	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada BAZNAS Kab Berau Jl SM Aminuddin RT 09 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb untuk Operasional BAZNAS Ta 2023	500.000.000,00
420	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Gedung LAZIS Muhammadiyah Kab Berau Jl Flamboyan Tanjung Redeb Ta 2023	500.000.000,00
421	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Masjid Raudhatul Jannah Jl Dara Mahkota RT IX Labanan Jaya Kec. Teluk Bayur Ta 2023	200.000.000,00
422	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Yayasan Mambaul Ulum Jl Kakawan RT 004 Batu Putih Kec. Batu Putih Ta 2023	300.000.000,00
423	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia pembangunan Masjid Al-Mukminun Jl Poros RT 006 Kampung Bumi Jaya Kec. Talisayan Ta 2023	175.000.000,00
424	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Kristus Raja Jl. Flores RT.01 Kamoung Bumi Jaya Kec. Talisayan TA 2023.	229.000.000,00
425	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Gereja Toraja Jemaat Mantaritip Klasis Kaltara Berau Jl. RT.005 Kampung Pilanjau, Sambaliung TA 2023.	125.000.000,00
426	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) RT.01 Kampung Long Sului Kec. Kelai TA 2023.	250.000.000,00
427	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Surau Al-Huda Jl. Bayanuddin RT.01 Kel. Sambaliung TA 2023.	300.000.000,00
428	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta Serikat Di Indonesia (GPSDI) Jl. H. Isa II Gang. Lingkungan RT.33 Tanjung Redeb TA 2023.	125.000.000,00
429	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Hijratul Islamiyah Jl. Poros Talisayan RT.01 Kampung Tabalar Ulu Kec. Tabalar TA 2023.	350.000.000,00
430	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Jl Poros RT 03 Kampung Kayu Indah Kec. Batu Putih Ta 2023	200.000.000,00
431	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Nurutta Ibin Jl Iswahyudi Gg Rajawali Kec Teluk Bayur	350.000.000,00
432	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Jami Lailatul Huda Jl Durian II Kel Gunung Panjang Tanjung Redeb	300.000.000,00
433	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Ketua Ta,mir Masjid Darussalam Kampung Harapan Jaya Kec Segah	350.000.000,00
434	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Mushola Al-Qolam Jl SMA Bangun Kampung Sei Bebanir Bangun Kec. Sambaliung Ta 2023	300.000.000,00
435	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda Kampung Gunung Sari Kec Segah Ta 2023	500.000.000,00
436	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Nurul Ikhlas Kampung Bukit Makmur Kec Segah Ta 2023	250.000.000,00
437	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al Muttaqin Kampung Tubaan Kecamatan Tabalar Ta 2023	150.000.000,00
438	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Surau-Al Ihsan Jl Kalibasau Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur	170.000.000,00
439	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Utsman Bin Affan Jl Mangkubumi Sambaliung Kec. Sambaling Ta 2023	700.000.000,00
440	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid At-Taqwa Kampung Pandan sari Kec. Segah Ta 2023	250.000.000,00
441	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus Yayasan Tahfidz Qur,an Al-Fatih Kabupaten Berau Ta 2023	350.000.000,00
442	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Ar-Raudhah Kampung Gunung Sari Kec Segah Ta 2023	350.000.000,00
443	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Pengurus Ponpes Nurul Hidayah Labanan Jaya Kec. Teluk Bayur Ta 2023	350.000.000,00
444	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Manarul Islam Jalan Tambak Baru RT.16 Gunung Tabur TA 2023.	350.000.000,00
445	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Al-Hijrah Jalan Manunggal RT.02 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur TA 2023.	350.000.000,00
446	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus Yayasan Maulana Arsyeh Al-Islamiyah Jalan AKB Sanipah II, Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb TA 2023.	500.000.000,00
447	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus TPA Al-Anshor Jalan Kemakmuran RT.16 Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung TA 2023.	150.000.000,00
448	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia GKII Jl. AKB Sanipah II, Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb TA 2023.	150.000.000,00
449	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus Gereja Bethel Injil Sepenuh Jl. Poros Sambaliung Gg. Perintis RT.15 Kec. Sambaliung TA 2023.	250.000.000,00
450	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus Gereja Paroki Santo Yoseph Jl. Mulawarman RT. 08 Kamp. Dumaring Kec. Talisayan TA 2023.	300.000.000,00
451	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus Gereja Toraja Jemaat Imanuel Suaran Jalan Merdeka No. 55 Kamp. Suaran RT.006, Kec. Sambaliung TA 2023.	300.000.000,00
452	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat El-Shaddai Berau Jl. Merah Delima No. 11 RT. 17 Tanjung Redeb TA 2023.	750.000.000,00
453	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus Ponpes Al-Makrifah Indonesia Jalan Stasiun 3 Rt. 013 Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur TA 2023.	350.000.000,00
454	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia Pembangunan Masjid Baitul Hikmah RT.05 Kamp. Biatan Ilir Kec. Biatan TA 2023.	200.000.000,00
455	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus Musholla Darul Ilmi SMA 4 di Jalan Bukit Berbunga RT.03 Sambaliung TA 2023.	700.000.000,00
456	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus Yayasan Islam Darul Ihya Jalan Karang Mulyo RT.14 Tanjung Redeb TA 2023.	500.000.000,00
457	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Masjid Nurul Huda Jalan Jabontara RT.05 Kec. Batu Putih TA 2023.	300.000.000,00
458	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Yayasan Sosial Pendidikan Islam dan Dakwah Al-Kholil Berau Jalan Raya Bangun RT.001 Sambaliung TA 2023.	500.000.000,00
459	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Kepada Panitia / Pengurus Masjid Fastabiqul Khoirat Jalan Utama RT.01 Kamp. Lobak Kelatak Kec. Batu Putih TA 2023.	50.000.000,00
		Sub total	**18.975.000.000,00**
No	**SKPD**	**Keterangan Dok.**	**Nilai Realisasi**
460	Kec Teluk Bayur	BELANJA HIBAH BARANG DANA DAU KELURAHAN RINDING PADA CV.MULYA JAYA	77.203.000,00
461	Kec Teluk Bayur	PEMBAYARAN BELANJA HIBAH BARANG DANA DAU KELURAHAN TELUK BAYUR TAHUN 2023 PADA CV.FAJAR INDAH	150.059.000,00
		Sub total	**227.262.000,00**
No	**SKPD**	**Keterangan Dok.**	**Nilai Realisasi**
462	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2023	277.851.000,00
463	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Berau)	500.000.000,00
464	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	STS Hibah KPU Kab. Berau TA.2023	- 43.167.434,00
465	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2023	15.166.352.340,00

466	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar / Belanja Bantuan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab. Berau Tahun 20	5.400.000.000,00
467	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Berau)	79.502.486,00
468	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Berau)	115.485.730,00
469	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Berau)	147.861.478,00
470	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Berau)	60.471.416,00
471	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Demokrat (PD) Kabupaten Berau)	64.147.699,00
472	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Berau)	113.368.619,00
473	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Berau)	29.303.262,00
474	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Berau)	63.345.184,00
475	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Berau)	171.042.697,00
476	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2023	250.000.000,00
477	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	Hibah Uang Untuk Pengadaan Alat dan Sistem Informasi Monitoring CCTV di Wilayah IKN	3.500.000.000,00
		Sub total	**25.895.564.477,00**
		TOTAL	**153.657.103.990,00**